

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

BUTIR-BUTIR PERENCANAAN BAHASA

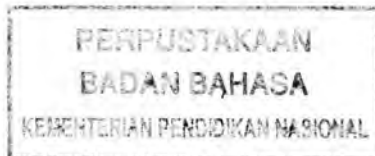
Kumpulan Makalah Dr. Hasan Alwi



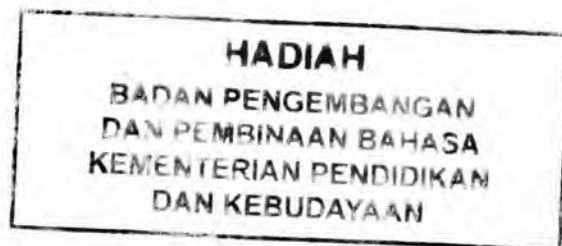
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2011

BUTIR-BUTIR PERENCANAAN BAHASA

Kumpulan Makalah Dr. Hasan Alwi



Penyunting:
Anton M. Moeliono
Dewi Puspita
Meryna Afrila



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA
2011**

BUTIR-BUTIR PERENCANAAN BAHASA

Kumpulan Makalah Dr. Hasan Alwi

Editor:

Anton M. Moeliono

Dewi Puspita

Meryna Afrila

Edisi Pertama 2011

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya,
dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun
tanpa seizin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan
untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

306.44906 ALWI, HASAN

ALW Butir-Butir Perencanaan Bahasa: Kumpulan Makalah Hasan Alwi/Hasan Alwi. Editor Anton M. Moeliono, Dewi Puspita, Meryna Afrila. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011. viii; 352 hlm.; 24 cm

ISBN 978-979-069-082-0

1. Perencanaan Bahasa -Temu Ilmiah

PERPUSTAKAAN BADAN BAHASA	
# PD Klasifikasi 306.449 06 BUT t. 6	No. Induk : 238 Tgl. : 9/5/2012 Ttd. : _____

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Buku ini berisi kumpulan tulisan Dr. Hasan Alwi yang diambil dari berbagai media massa dan acara seminar, kongres, simposium, ataupun sidang kebahasaan dan kesastraan. Buah pemikiran Dr. Hasan Alwi mengenai bahasa dan sastra, yang selama ini tersebar, patut dibaca oleh masyarakat untuk memperluas wawasannya mengenai bahasa dan sastra. Tema tulisannya pun sangat beragam, seperti perkembangan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, kebijakan dan perencanaan bahasa, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, sastra dan pengembangan bahasa, penerjemahan, pengajaran bahasa, perkamusan, dan penggunaan bahasa di kalangan pejabat.

Ide penyusunan buku ini muncul dari gagasan Prof. Dr. Anton M. Moeliono. Untuk mewujudkan buku yang dapat dipersembahkan kepada Dr. Hasan Alwi dalam rangka ulang tahun, Pak Ton juga yang mengatakan kesediaannya untuk menjadi editor kumpulan tulisan itu. Akan tetapi, Tuhan punya rencana lain. Sebelum kumpulan tulisan ini terwujud menjadi sebuah buku, Pak Ton sudah dipanggil ke pangkuan-Nya. Atas dasar penghormatan kepada Pak Ton dan Pak Hasan Alwi, akhirnya kami berupaya untuk mewujudkan keinginan Pak Ton tersebut.

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim editor dan tim penerbitan yang telah bekerja keras hingga buku ini dapat terwujud dan sampai pada masyarakat. Semoga buku ini memberikan manfaat kepada para pembaca dalam mengembangkan wawasannya mengenai bahasa Indonesia.

Jakarta, 1 Desember 2011

Dra. Yeyen Maryani, M.Hum.

PRAKATA EDITOR

Hasan Alwi lahir di Talaga, Jawa Barat, pada tanggal 14 Juli 1940 dan dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh dengan sakinah. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1952 di Majalengka; di tempat itu juga ia kemudian lulus SMP-nya tahun 1955 dan SGB-nya tahun 1956. Selama enam tahun setelah itu ia terpenggil jadi guru sekolah dasar di Banjaran (1956-1959) dan di Ciheuleut, Bogor (1959-1962). Filsafat hidup pemuda Hasan pada waktu itu ialah belajar sambil mengajar, atau mengajar sambil belajar. Ia tidak saja percaya pada adagium itu, tetapi juga mempraktikkannya. Maka masuklah ia ke SMA Taman Siswa di Bogor sambil mengajar di Jakarta (1962-1965).

Ketika ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan bahasa Prancis di IKIP Jakarta, ia juga menjadi guru bahasa asing itu di beberapa SMA, seperti SMA IPPI, SMA Wedha, SMA Santa Ursula II, dan SMA Sekolah Pembangunan IKIP. Hasan memperoleh ijazah sarjananya di bidang bahasa Prancis pada tahun 1971. Dalam pada itu ia berbagi pengetahuan dan keterampilannya pada Akademi Bahasa Asing, salah satu unit Departemen Pendidikan (1966-1978), pada *Djakarta Academy of Languages* (1966-1979) dan pada kursus Pusat Kebudayaan Prancis (1972-1986). Pada tahun 1973-1974 ia diberi kesempatan belajar di Pusat Linguistik Terapan, Fakultas Sastra, Universitas Besançon, Prancis.

Tahun 1978 menjadi tahun yang penting bagi hidupnya karena ia diterima jadi staf ilmiah pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan. Pada tahun '70-an Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang mewakili Pemerintah Indonesia, bersetuju mengadakan kerja sama dengan Universitas Leiden, yang mewakili Pemerintah Belanda, dan yang mempunyai sarana meningkatkan keahlian ahli bahasa Indonesia di berbagai bidang linguistik. Kerja sama itu diberi nama *Indonesian Linguistics Development Project* (ILDEP). Pelatihan yang bertahap-tahap itu diselenggarakan di kompleks penataran Departemen Pendidikan di Tugu, Puncak. Para peserta datang dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki jurusan bahasa. Kelompok peserta dengan nilai rerata yang terbaik diberi peluang mengikuti program pascasarjana di Universitas Leiden. Hasan termasuk salah satu kelompok itu dan pada tahun 1979-1980 ia pun sekali lagi jadi pemukim Eropa.

Karena Hasan percaya bahwa "belajar seumur hidup" banyak maslahatnya, ia menanggapi tawaran atasannya untuk menuangkan karya medan-

nya menjadi disertasi doktoralnya. Untuk mencapai cita-citanya ia sekali lagi harus berpisah dari anak-istrinya dan selama setahun melakukan penelitian di Universitas J.W. Goethe di Frankfurt, Jerman. Pelanglangan buananya dapat disudahinya pada tanggal 26 September 1990 ketika ia lulus menjadi doktor di Universitas Indonesia dengan predikat “sangat memuaskan”.

Keberhasilannya mencapai gelar pendidikan universitas yang tertinggi membukakan gerbang baginya untuk menjadi Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan pada tahun 1991 dan tidak lama kemudian diangkat menjadi Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selama sembilan tahun (1992-2001). Di samping mengemban tata kelola lembaganya beserta cabang dan pelbagai proyeknya, ia menjadi ketua atau penasihat organisasi profesi. Dapat disebut di antaranya Panitia Kerja sama Kebahasaan, Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia VI dan VII, Komite Nasional RELC, Panitia Pengarah Kongres Bahasa Jawa II, Perutusan Indonesia pada Sidang Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, dan Sidang Majelis Sastra Asia Tenggara.

Selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dr. Hasan Alwi harus mengakrabkan dirinya dengan konsep dan aliran dalam sosiolinguistik dan perencanaan bahasa. Setiap kali diminta menyampaikan sambutannya, ia merasa wajib menyebarkan cita-cita peningkatan martabat bahasa Indonesia dan pengembangan korpusnya. Ia pun ikut merampungkan edisi lanjutan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Ia juga mengajukan masalah tentang perlu tidaknya pembinaan bahasa daerah dan susastra Indonesia.

Kumpulan karangan yang dibukukan ini dan yang kami beri judul *Butir-Butir Perencanaan Bahasa* menggambarkan pemikirannya tentang disiplin baru di bidang linguistik terapan. Karena setiap sambutannya diberikan kepada khalayak yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, tidak dapat tidak terjadi pengulangan di sana-sini. Di pihak lain, setiap karangan dapat diikuti peneralarannya tanpa orang harus memahami karangan sebelumnya terlebih dahulu.

Semoga pembahasan konsep perencanaan bahasa yang di negeri ini dikenal dengan nama *politik* atau *kebijakan bahasa*, pengembangan dan pembinaan bahasa dapat membangkitkan hasrat para pembaca untuk mengembangkan bahasa dengan berencana termasuk sumber daya manusia.

Anton M. Moeliono
Dewi Puspita
Meryna Afrila

Jakarta, Agustus 2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA EDITOR	v
DAFTAR ISI	vii
I DARI BAHASA MELAYU KE BAHASA INDONESIA	
1. Dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia: Pemantapan Sarana Pencerdasan Kehidupan Bangsa	1
2. Sebelum dan Sesudah Sumpah Pemuda	10
II KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN BAHASA	
1. Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam Konteks Transformasi Budaya	25
2. Pembinaan Bahasa: Tantangan dan Harapan	32
3. Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000	40
4. Bahasa Indonesia dan Sumber Daya Manusia	50
5. Pemasarakatan Bahasa Indonesia	60
6. Kebijakan Bahasa	69
7. Bahasa Sebagai Jati Diri Bangsa	78
8. Menumbuhkan Sikap Berbahasa Indonesia Dalam Pembentukan Jati Diri	87
9. Kedudukan dan Peran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Era Globalisasi	97
10. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Menuju Era Globalisasi	103
11. Fungsi Politik Bahasa	108
12. Bahasa Indonesia dan Perilaku Berbahasa	116
13. Bahasa Indonesia di Antara Kemauan Politik dan Belantara Pemakaiannya	121
14. Bahasa Menunjukkan Bangsa	134
III PERENCANAAN LARAS BAHASA	
1. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek	147
2. Peran Media Massa dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	156
3. Bahasa Kebangsaan dan Pengembangan Ilmu	165

IV	SASTRA DAN PENGEMBANGAN BAHASA	
1.	Sastra di Indonesia Perlukah Dibina dan Dikembangkan?	175
2.	Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Sastra di Indonesia	183
3.	Upaya Peningkatan Kerja Sama Pembinaan dan Pengembangan Sastra dalam Menghadapi Tantangan Zaman	191
4.	Pengembangan Kesusastraan Indonesia pada Abad ke-21	194
5.	Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia: Kesejajaran dalam Pertumbuhan dan Perkembangannya	210
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH	
1.	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Bahasa Sunda (1993)	213
2.	Pembinaan Sastra Daerah	227
3.	Pembinaan Bahasa Jawa	237
VI	PENERJEMAHAN	
1.	Beberapa Catatan tentang Penerjemahan	247
2.	Pengindonesiaan Istilah Komputer dan Internet	255
VII	PENGAJARAN BAHASA DAN SARANANYA	
1.	Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing	257
2.	Upaya Meningkatkan Pengajaran BIPA di Luar Indonesia	265
3.	Kebijakan Pengajaran BIPA	273
4.	Pengembangan Kurikulum Bahasa	280
5.	Plus Minus Kamus Badudu-Zain	287
6.	Kamus Besar Bahasa Indonesia	297
7.	Penelitian Kebahasaan di Indonesia	320
8.	Seputar Kalimat Imperatif dalam Bahasa Indonesia	331
VIII	KARANGAN LEPAS	
1.	Kesempatan yang Berbahagia	339
2.	Bahasa SBY Memprihatinkan?	341
3.	Kapten Kesebelasan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar	343
	DAFTAR PUSTAKA	345

I. DARI BAHASA MELAYU KE BAHASA INDONESIA

1. DARI BAHASA MELAYU KE BAHASA INDONESIA: PEMANTAPAN SARANA PENCERDASAN KEHIDUPAN BANGSA^{*)}

1. Dalam makalah ini ada dua hal pokok yang dikemukakan. Pertama, semacam "sejarah" pertumbuhan atau perkembangan bahasa Melayu yang pada tanggal 28 Oktober 1928 "dinobatkan" menjadi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan. Paparan mengenai pokok pertama ini di sana-sini secara tak terhindarkan dihubungkan dengan bahasa Melayu yang sekarang dikenal dengan nama bahasa Malaysia. Kedua, lebih banyak berkenaan dengan upaya yang telah, sedang, dan harus terus dilakukan agar bahasa Indonesia tetap dapat diandalkan sebagai sarana komunikasi (oleh bangsa Indonesia) dalam berbagai bidang kehidupan yang gerak laju perkembangan dan tuntutananya tidak akan pernah berhenti. Dengan perkataan lain, paparan pokok kedua ini diharapkan dapat menjadi alternatif jawaban atas pertanyaan yang seringkali membuat sebagian di antara kita menjadi ragu-ragu dan pesimistis: mampukah bahasa Indonesia mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam tingkat kehidupan dan peradaban modern?

Tidak ada pandangan yang dapat disebut baru dalam pembahasan kedua pokok tersebut. Paparan yang dikemukakan dalam makalah ini juga bukanlah pembahasan akademis. Yang diharapkan ialah bahwa dari uraian itu kita dapat menemukan refleksi dan perspektif yang lebih "jernih", terutama sehubungan dengan pokok kedua. Bagaimanapun pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa itu tidak hanya berkaitan dengan upaya (yang lazim disebut) pengembangan bahasa, tetapi juga dan terutama perlu kita telusuri keterkaitannya dengan upaya (yang juga lazim disebut) pembinaan bahasa.

^{*)} Makalah Simposium Raja Ali Haji, Pulau Penyengat, 29--31 Oktober 1996

Upaya pengembangan, yang sasarannya adalah bahasa itu sendiri sebagai suatu sistem dalam kegiatan komunikasi, memang merupakan "Wilayah kekuasaan" para ahli atau pakar bahasa saja. Akan tetapi, upaya pembinaan berurusan dengan para pemakai atau penutur bahasa secara umum sebagai sasarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang "bertanggung jawab" dalam hal pembinaan tidak hanya para ahli perencanaan bahasa (*language planning*), tetapi juga semua pihak dari masyarakat pemakai bahasa, terutama yang dapat digolongkan sebagai kelompok strategis, seperti para guru, wartawan, dan pemuka masyarakat. Untuk kasus bahasa Indonesia, hal yang disebutkan terakhir ini terasa menjadi amat penting mengingat dua hal, yaitu (1) kenyataan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan (2) kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945).

2. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Melayu yang digunakan di Brunei dan Singapura mempunyai latar belakang pertumbuhan dan perkembangan yang sama, sehingga dari segi teknis kebahasaan alat komunikasi di keempat negara itu dapat disebut bahasa Melayu yang supranasional. Secara singkat dapat dikemukakan lima tahapan yang mendahuluinya, yaitu:

- (1) Bahasa Austronesia Purba atau Proto Austronesia,
- (2) Bahasa Melayu Purba atau Proto Melayu,
- (3) Bahasa Melayu Kuno,
- (4) Bahasa Melayu Klasik, dan
- (5) Bahasa Melayu Modern.

Bahasa Austronesia Purba memiliki wilayah pemakaian yang meliputi kawasan Asia Tenggara. Bahasa inilah yang dalam linguistik historis-komparatif diakui sebagai Proto-Austronesia. Dalam proses berikutnya para ahli mencatat timbulnya bahasa Melayu Purba. Jenis bahasa yang dikenal sebagai Proto-Melayu ini diperkirakan digunakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Indonesia Barat, dan Semenanjung Malaya. Sementara itu, ada pula dugaan di antara para ahli yang menyebutkan bahwa bahasa Melayu Purba ini digunakan di wilayah Kalimantan Barat. Pandangan manapun yang benar, informasi yang perlu dicatat ialah bahwa Proto-Melayu dalam perkembangannya kemudian menurunkan sejumlah bahasa dan dialek. Salah satu di antaranya ialah bahasa Melayu.

Dalam kurun waktu berikutnya digunakan bahasa Melayu yang secara tipologi dinamai bahasa Melayu Kuno ini. Sejumlah prasasti yang ditemukan

di Indonesia Barat dan Tanah Melayu (Semenanjung Malaya) merupakan peninggalan yang membuktikan bahwa pada saat itu bahasa Melayu Kuno digunakan dengan memperoleh pengaruh dari bahasa Sansekerta. Yang cukup banyak bukti peninggalannya ialah bahasa Melayu Klasik, yaitu yang berupa naskah-naskah berbahasa Melayu dengan pengaruh bahasa Arab, Parsi, dan Portugis yang cukup menonjol. Dari segi isinya, naskah-naskah bahasa Melayu Klasik itu mengandung ajaran-ajaran agama Islam. Periode bahasa Melayu Klasik ini berlangsung sampai kedatangan orang-orang Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Pada saat itu bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca* sehingga kedudukan bahasa Melayu di Indonesia yang luar biasa itu sama atau dapat dibandingkan dengan kedudukan dan pengaruh bahasa Perancis di Belanda pada zaman itu. Periode bahasa Melayu Modern berlangsung bersamaan dengan masa penjajahan. Apabila pada awal-awalnya bahasa Melayu hanya berfungsi sebagai bahasa perantara orang asing dengan penduduk pribumi, pada abad ke-19 bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa dalam bidang politik dan administrasi serta bahasa dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan gaya barat. Berikut ini perihal bahasa Melayu Kuno disinggung sehubungan dengan Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu Klasik dengan Kerajaan Malaka, dan bahasa Melayu Modern dengan Kerajaan Johor-Riau-Pahang.

Pada abad ke-7 sampai dengan ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu pertama. Di kerajaan yang wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara itu, bahasa Melayu tidak saja digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk perdagangan dan penyebaran agama Hindu/Budha. Itulah sebabnya bahasa Melayu mulai mendapat pengaruh dan bahasa Sansekerta. Bahasa Melayu yang digunakan semasa kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai bahasa Melayu Kuno yang peninggalannya terdapat pada sejumlah prasasti beraksara Pallawa di Kota Kapur, Karang Berahi, Kedukan Bukit, dan Talang Tuo. Prasasti berbahasa Melayu Kuno ini bahkan juga terdapat di luar wilayah pemakaian bahasa Melayu. Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah (827 dan 832 M) membuktikan hal itu. bahasa Melayu Kuno tetap digunakan di Sumatera sampai masa Hindu/Budha berakhir, sama halnya seperti bahasa Jawa Kuno di Jawa.

Setelah zaman keemasan Sriwijaya, bahasa Melayu makin dikembangkan dan diperluas wilayah pemakaiannya sehingga meliputi hampir seluruh kawasan Asia Tenggara oleh kerajaan Malaka pada abad ke-14 sampai dengan ke-16 Masehi. Pada abad ke-14 muncul prasasti Trengganu dan pra-

sasti Pasai (di Aceh) yang masing-masing bertuliskan aksara Jawi dan (masih) Pallawa serta berisi ajaran-ajaran atau gagasan-gagasan Islam. Selain digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, dan bahasa (penyebaran) agama, seperti halnya pada masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu oleh Kerajaan Malaka juga digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Karena agama yang disebarkan lewat bahasa Melayu itu adalah agama Islam, tulisan Arab mulai digunakan pula dalam bahasa Melayu. Sejak itulah kita mengenal aksara Arab-Melayu atau tulisan Jawi. Oleh karena itu, peninggalan Kerajaan Malaka ini, tidak hanya terdapat dalam bentuk prasasti, tetapi juga dalam bentuk buku yang bernama *Sejarah Melayu* yang ditulis oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612.

Pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan upaya pengembangan bahasa Melayu oleh Kerajaan Malaka, di Aceh mulai bermunculan ulama-ulama besar yang menulis sejumlah syair dan kitab dalam bahasa Melayu. Di antara ulama-ulama besar itu terdapat nama Hamzah Fansuri, Samsuddin Al Sumatrani, dan Nuruddin Arraniri. Bahkan sampai sekarang nama Hamzah Fansuri senantiasa disebut dan dikenang sebagai "Pilar Agung" penyair Melayu. Seperti telah disinggung di atas, naskah-naskah dalam periode bahasa Melayu Klasik ini memperlihatkan pengaruh yang amat kuat tidak saja dan bahasa Arab tetapi juga dan bahasa Parsi dan Portugis.

Sebagai mata rantai berikutnya adalah kerajaan Johor-Riau-Pahang pada abad ke-17 sampai dengan ke-19. Seperti halnya pada masa Kerajaan Malaka, bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa (penyebaran) agama, dan bahasa ilmu pengetahuan. Beberapa tahun setelah Singapura didirikan dan dibangun oleh Raffles pada tahun 1819, bahasa Melayu yang telah lama dibina dan dikembangkan itu mulai menghadapi saat-saat awal "perpecahan"-nya.

Berdasarkan Perjanjian London tahun 1824, wilayah Johor-Pahang diserahkan kepada Inggris, sedangkan wilayah Riau-Lingga menjadi daerah kekuasaan Belanda. Itulah sebabnya dari perkembangan pada abad-abad selanjutnya kita melihat adanya perbedaan pengaruh: bahasa Melayu di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam dipengaruhi bahasa Inggris; sementara bahasa Melayu di Indonesia oleh bahasa Belanda. Dasar pikiran dan pandangan penjajah dari Eropa ini "dipaksakan" ke dalam dunia bahasa Melayu sehingga ejaan Jawi diganti dengan ejaan Romawi. Hal ini terasa sekali di Indonesia. Dalam hal sistem pendidikan, kehakiman, dan administrasi kolonial terlihat perbedaan yang cukup mencolok antara penjajah

Inggris dan Belanda. Sebelum bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda 1928, perlu dikemukakan beberapa "tokoh" bahasa Melayu sebagai berikut.

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi untuk Singapura dan Raja Ali Haji untuk Riau (tepatnya Pulau Penyengat yang merupakan pusat kerajaan Riau-Lingga) patut disebut sebagai dua orang tokoh bahasa Melayu pada abad ke-19. Nama yang disebut pertama diberi gelar *munsyi*, yang artinya 'guru bahasa', karena peranakan India itu mengabdikan dirinya antara lain untuk mengajarkan bahasa Melayu kepada para pembesar Inggris di Singapura, termasuk Raffles.

Raja Ali Haji oleh kalangan luas di Indonesia hanya dikenal sebagai pengarang sastra dengan karyanya yang berjudul "Gurindam Dua Belas". Sesungguhnya tokoh ini sangat besar jasanya sehingga Raja Ali Haji patut disebut sebagai orang pertama yang melakukan upaya penataan sistem dan kodifikasi bahasa Melayu. Buku *Bustanul Katibin* yang ditulisnya pada tahun 1857 boleh dikatakan merupakan buku tata bahasa Melayu yang pertama. Sementara itu, hasil karyanya yang lain, yaitu *buku Pengetahuan Bahasa* yang disusunnya pada tahun 1859, merupakan semacam kamus (atau bahkan ensiklopedia) yang berisi deskripsi lengkap tentang kata-kata bahasa Melayu pada masa itu.

3. Butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928 harus dicatat dengan "tinta emas" dalam sejarah perkembangan bahasa di Indonesia. Melalui ikrarnya yang sarat dengan kandungan makna, gagasan, dan harapan, yaitu "Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia", bahasa Melayu telah diangkat dan disepakati menjadi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan. Perannya sudah jelas dan terbukti, terutama dalam membangkitkan dan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh bangsa Indonesia yang sebenarnya memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan persatuan dan kesatuan itulah para pendahulu dan pejuang kita telah bangkit melawan penjajah sehingga akhirnya bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Tanpa disepakatinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sudah dapat dibayangkan apa yang terjadi di Indonesia dalam bidang kebahasaan. Tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa apa yang akan digunakan oleh para pemimpin bangsa ketika mereka saling berkomunikasi untuk membangkitkan semangat kemerdekaan? Tanpa

bahasa Indonesia sebagai persatuan, bahasa apa yang akan digunakan pada saat menyusun teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa apa yang akan digunakan pada saat menyusun naskah Undang-Undang Dasar 1945?

Hanya ada dua kemungkinan jawaban yang dapat dikemukakan terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertama, setiap pemimpin bangsa akan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibunya yang bisa dipastikan bahasa daerah tersebut tidak akan dipahami oleh pemimpin bangsa yang berasal dari kelompok etnis yang lain. Kemungkinan yang pertama ini pasti merupakan sesuatu yang mustahil. Kalau demikian adanya, maka kemungkinan jawaban kedua harus ditemukan pada suatu bahasa yang dipahami dan dikuasai oleh para cendekiawan yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa itu. Bahasa tersebut adalah bahasa Belanda, bahasa ibu penjajah. Oleh karena itu, beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga makna yang tersirat di balik formulasi butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928 itu ialah bahwa kita bukan saja dituntut untuk menggunakannya secara baik dan benar, melainkan juga perlu menjaganya sebagai lambang jati diri bangsa.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu makin dilengkapi dengan dicantumkannya dalam UUD 1945 bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Pasal 36). Yang disebut terakhir ini mengakibatkan, antara lain, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan dan dalam dunia pendidikan sebagai bahasa pengantar. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan mengandung implikasi yang sangat luas dan mendalam. Pada satu sisi ia dituntut agar mampu menyampaikan dan menyebarluaskan konsep-konsep berbagai ilmu pengetahuan (alam, sosial, dan budaya/humaniora), baik untuk keperluan lembaga pendidikan formal maupun untuk keperluan yang lebih luas. Pada sisi lain ia juga dituntut agar mampu mengembangkan konsep-konsep berbagai ilmu pengetahuan untuk mengantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia menuju ke arah peradaban dan kehidupan modern, sesuai dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa pada awal tulisan ini. Dengan kata lain, bahasa Indonesia harus tetap mantap dapat digunakan untuk mengungkapkan pikiran, pandangan, atau konsep apa pun, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling rumit dan kompleks.

Persyaratan yang amat mendasar mengenai hal itu ada dua. Pertama, tata bahasa Indonesia, yang antara lain mengatur pembentukan kata dan istilah serta kalimat, harus jelas dan mantap. Kedua, perbendaharaan kata dan istilah untuk berbagai ilmu pengetahuan harus tersedia. Apabila kedua jenis persyaratan itu dipenuhi, maka dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia mantap sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa. Untuk itu, rasanya tidaklah berlebihan apabila Sutan Takdir Alisyahbana pernah menyatakan bahwa bersama-sama dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, dan Brunei, "Bahasa Indonesia akan menjadi salah satu bahasa dunia modern yang besar, yang hanya diatasi oleh bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol".

4. Ada pertanyaan yang jawabannya masih belum memperlihatkan "kesatu-bahasaan" di antara para ahli. Yang dimaksud ialah pertanyaan tentang bahasa Melayu yang mana yang pada tahun 1928 diangkat sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Patut disimak pandangan atau penilaian yang menyatakan bahwa di antara berbagai dialek Melayu yang berkembang pada masa itu, yang baik dan baku adalah bahasa Melayu dialek Riau dan Johor. Penilaian dan pandangan ini dapat dipertimbangkan sebagai alternatif jawaban yang memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penelitian diakronis.

Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 sekurang-kurangnya didahului oleh dua peristiwa penting sebelumnya, yaitu kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menandai hari kebangkitan nasional dan berdirinya Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917 yang boleh disebut sebagai langkah awal pencerdasan kehidupan bangsa lewat bacaan. Setelah Sumpah Pemuda 1928, diterbitkannya majalah *Pujangga Baru* pada tahun 1933 yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisyahbana, Armijn Pane, dan Amir Hamzah turut memacu proses pencerdasan kehidupan bangsa pada masa-masa berikutnya. Hasilnya antara lain berupa diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta pada tahun 1938.

Kedatangan Jepang dari segi kebahasaan dapat diartikan membawa angin segar. Pada tahun 1942 penjajah Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Untuk itu, dibentuklah Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. Komisi ini berhasil menyusun 7000 istilah dalam bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Juni 1947 dibentuk Komisi Bahasa yang menghasilkan 5000 istilah dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1952 dibentuk lagi Komisi Istilah yang merupakan bagian

kegiatan dari Lembaga Bahasa dan Budaya, Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia. Pembentukan berbagai komisi yang mengurus bidang peristilahan itu jelas menunjukkan adanya keinginan yang kuat agar bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang modern. Masalah peristilahan ini juga mendapat porsi pembahasan yang cukup luas pada saat diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan. Mulai Kongres Bahasa Indonesia III (1978), kegiatan ini dilaksanakan lima tahun sekali di Jakarta oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Yang terakhir diadakan adalah Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993 di Jakarta. Salah satu hasil yang menarik untuk dicatat dari kongres terakhir ini adalah dibentuknya Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia VI yang bertugas antara lain memantau tindak lanjut hasil-hasil kongres serta memberikan masukan untuk melaksanakan kongres yang akan datang.

Upaya pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa, seperti yang telah disinggung di atas, merupakan bagian utama dan sekaligus menjadi tujuan utama dari kegiatan pengembangan bahasa. Kegiatan pengembangan bahasa ini lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk penelitian, baik yang menyangkut segi bahasa maupun segi sastranya. Mengingat yang diangkat sebagai bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, maka penelitian tentang bahasa dan sastra Melayu pun telah dan akan terus dilaksanakan. Setakat ini kegiatan semacam itu telah menghasilkan 61 penelitian bahasa dan 26 penelitian sastra yang sebagian di antaranya telah diterbitkan.

5. Pada bagian akhir makalah ini perlu pula dikemukakan adanya kegiatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan di antara bangsa-bangsa serumpun, bahasa Melayu di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura serta bahasa Indonesia di Indonesia, seperti yang telah dipaparkan di atas, berasal dari satu rumpun bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu. Meskipun demikian, di dalam perkembangannya kemudian (dan hal ini dapat kita saksikan sekarang), kedua jenis bahasa serumpun itu memperlihatkan adanya perbedaan, terutama yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor sejarah, geografi, sosiokultural, dan (sudah barang tentu) sosiolinguistiknya itu sendiri.

Agar kedua jenis bahasa itu dapat berfungsi secara efektif dan efisien sehingga sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai bidang kehidupan yang tuntutan dan tantangannya makin meningkat dari waktu ke waktu, perbedaan-perbedaan di antara kedua jenis bahasa itu perlu diperkecil dan

dijembatani. Dengan menyadari hal itu, bangsa-bangsa serumpun itu, terutama Indonesia dan Malaysia, mulai melakukan "pendekatan" sejak tahun 1959. Selama kurun waktu yang dalam catatan sejarah sering disebut sebagai "masa konfrontasi" (1963-1966), upaya pendekatan tersebut terpaksa dihentikan.

Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia) disepakati oleh kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967. Langkah berikutnya ialah penandatanganan "Komunike Bersama" pada tanggal 23 Mei 1972 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mashuri, S.H.) dan Menteri Pendidikan Malaysia (Hussein Onn).

Tindak lanjut yang paling langsung berhubungan dengan kerja sama kebahasaan antara kedua negara terjadi pada tanggal 29 Desember 1972, yaitu dengan diresmikannya Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Hasilnya yang amat monumental adalah disusun dan diterbitkannya dua buah buku pedoman, yakni Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Wadah ini dengan ikut sertanya Brunei Darussalam pada tanggal 4 November 1985 berubah namanya menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang setiap tahun selalu melakukan sidang untuk membahas peristilahan dalam berbagai bidang ilmu. Dalam setiap sidang Mabbim itu, keputusan Singapura juga selalu hadir sebagai pemerhati (*observer*).

Yang tergabung dalam wadah kerja sama kebahasaan yang bernama Mabbim itu ialah tiga institusi pemerintah masing-masing. Yaitu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Yang membahas peristilahan berbagai bidang ilmu itu ialah para pakar ketiga negara, baik yang berasal dari perguruan-perguruan tinggi maupun pusat-pusat penelitian.

Selain Mabbim sebagai wadah kerja sama kebahasaan antarnegara, juga perlu disebutkan satu wadah lagi, yaitu Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera). Wadah yang disebutkan terakhir ini baru berdiri tahun yang lalu pada tanggal 25 Agustus 1995 di Kuala Lumpur. Mastera yang beranggotakan Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia ini juga disaksikan saat peresmian oleh wakil dari keempat negara anggota ASEAN yang lain, yaitu Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

2. SEBELUM DAN SESUDAH SUMPAH PEMUDA 1928

1. Dalam tulisan ini ada dua hal pokok yang akan dikemukakan. Pertama, semacam "sejarah" pertumbuhan atau perkembangan bahasa Melayu yang pada tanggal 28 Oktober 1928 "dinobatkan" menjadi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan. Paparan mengenai pokok pertama ini di sana-sini secara tak terhindarkan dihubungkan dengan bahasa Melayu yang sekarang dikenal dengan nama bahasa Malaysia. Kedua, lebih banyak berkenaan dengan upaya yang telah, sedang, dan harus terus dilakukan agar bahasa Indonesia tetap dapat diandalkan sebagai sarana komunikasi (oleh bangsa Indonesia) dalam berbagai bidang kehidupan yang gerak laju perkembangan dan tuntutananya tidak akan pernah berhenti. Dapat juga dikatakan bahwa paparan pokok kedua ini diharapkan dapat menjadi alternatif jawaban atas pertanyaan yang seringkali membuat sebagian di antara kita menjadi ragu-ragu dan pesimistis: mampukah bahasa Indonesia mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam tingkat kehidupan dan peradaban modern?

Di dalam mengikuti paparan tentang kedua pokok bahasan tersebut, pembaca boleh bersiap-siap untuk merasa kecewa karena dalam paparan itu tidak ada hal yang benar-benar dapat disebut sebagai sesuatu yang baru. Dari balik itu, sebenarnya penulis ingin menyampaikan harapan agar yang disajikan dalam tulisan ini dapat merangsang kita ke arah penemuan refleksi dan perspektif yang lebih "jernih", terutama sehubungan dengan pokok kedua. Bagaimanapun pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa itu tidak hanya berkaitan dengan upaya (yang lazim disebut) pengembangan bahasa, tetapi juga dan terutama perlu kita telusuri keterkaitannya dengan upaya (yang juga lazim disebut) pembinaan bahasa.

Upaya pengembangan, yang sasarannya adalah bahasa itu sendiri sebagai suatu sistem dalam kegiatan komunikasi, memang merupakan "wilayah kekuasaan" para ahli atau pakar bahasa saja. Adapun upaya pembinaan berurusan dengan para pemakai atau penutur bahasa secara umum sebagai sasarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang "bertanggung jawab" dalam hal pembinaan tidak hanya para ahli dalam bidang perencanaan bahasa (*language planning*), tetapi juga semua pihak dari masyarakat pe-



makai bahasa, terutama yang dapat digolongkan sebagai kelompok anutan strategis, seperti para guru, wartawan, dan pemuka masyarakat. Untuk kasus bahasa Indonesia, hal yang disebutkan terakhir ini terasa menjadi amat penting mengingat dua hal, yaitu (1) kenyataan bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan (2) kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945).

2. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, dan bahasa Melayu yang digunakan di Brunei dan Singapura mempunyai latar belakang pertumbuhan dan perkembangan yang sama, sehingga dari segi teknis kebahasaan alat komunikasi di keempat negara itu dapat disebut bahasa Melayu dalam pemahaman yang supranasional. Mengenai pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu secara singkat dapat dikemukakan lima tahapan yang mendahuluinya, yaitu (1) bahasa Austronesia Purba atau Proto-Austronesia, (2) bahasa Melayu Purba atau Proto Melayu, (3) bahasa Melayu Kuno, (4) bahasa Melayu Klasik, dan (5) bahasa Melayu Modern.

Bahasa Austronesia Purba memiliki wilayah pemakaian yang meliputi kawasan Asia Tenggara. Bahasa inilah yang oleh para ahli bahasa bidang historis-komparatif diakui sebagai bahasa Proto-Austronesia. Dalam proses perkembangan berikutnya timbullah bahasa Melayu Purba. Jenis bahasa yang dikenal sebagai bahasa Proto-Melayu ini diperkirakan digunakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Indonesia Barat dan Semenanjung Malaka. Sementara itu, ada pula dugaan di antara para ahli yang menyebutkan bahwa bahasa Melayu Purba digunakan di wilayah Kalimantan Barat. Pandangan manapun yang benar, informasi yang perlu disimak ialah bahwa bahasa Proto-Melayu dalam perkembangannya kemudian menurunkan sejumlah bahasa dan dialek. Salah satu di antaranya ialah bahasa yang sekarang kita kenal dengan sebutan bahasa Melayu.

Bahasa Melayu itu secara tipologis dinamai bahasa Melayu Kuno. Sejumlah prasasti yang ditemukan di Indonesia Barat dan Tanah Melayu (Semenanjung Malaka) merupakan peninggalan yang membuktikan bahwa pada saat itu bahasa Melayu Kuno yang digunakan memperoleh pengaruh dari bahasa Sansekerta. Yang cukup banyak bukti peninggalannya ialah bahasa Melayu Klasik. Peninggalan tersebut berupa naskah-naskah berbahasa Melayu yang korpusnya memperlihatkan adanya pengaruh yang cukup menonjol dari bahasa Arab, Parsi, dan Portugis. Dari segi isinya, naskah-naskah bahasa Melayu Klasik itu mengandung ajaran-ajaran agama Islam. Periode bahasa Melayu Klasik ini berlangsung sampai masa ke-

datangan orang-orang Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Pada saat itu bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca* sehingga kedudukan bahasa Melayu di Indonesia yang luar biasa itu sama atau dapat dibandingkan dengan kedudukan dan pengaruh bahasa Perancis di Belanda pada zaman itu. Periode bahasa Melayu Modern berlangsung bersamaan dengan masa penjajahan. Apabila pada awalnya bahasa Melayu hanya berfungsi sebagai bahasa perantara bagi orang asing untuk berkomunikasi dengan penduduk pribumi, pada abad ke-19 bahasa Melayu itu berperan sebagai sarana komunikasi, baik dalam bidang politik dan administrasi maupun dalam kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dengan gaya barat. Paparan tentang bahasa Melayu Kuno berikut ini dikemukakan dalam kaitannya dengan kerajaan Sriwijaya. Demikian pula halnya dengan bahasa Melayu Klasik dan bahasa Melayu Modern yang masing-masing dihubungkan dengan Kerajaan Malaka dan Kerajaan Johor-Riau-Pahang.

Pada abad ke-7 sampai dengan ke-11 Masehi Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Melayu pertama. Di kerajaan yang wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh Nusantara itu, bahasa Melayu tidak saja digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk perdagangan dan penyebaran agama Hindu/Budha. Itulah sebabnya bahasa Melayu mulai mendapat pengaruh dari bahasa Sansekerta. Bahasa Melayu yang digunakan semasa kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai bahasa Melayu Kuno yang peninggalannya terdapat pada sejumlah prasasti beraksara Pallawa di Kota Kapur, Karang Berahi, Kedukan Bukit, dan Talang Tuo. Prasasti berbahasa Melayu Kuno ini bahkan juga terdapat di luar wilayah pemakaian bahasa Melayu. Prasasti Gandasuli di Jawa Tengah (827 dan 832 M) membuktikan hal itu. Bahasa Melayu Kuno tetap digunakan di Sumatera sampai masa Hindu/Budha berakhir, sama halnya seperti bahasa Jawa Kuno di Jawa.

Setelah zaman keemasan Sriwijaya pada abad ke-14 sampai dengan ke-16 Masehi bahasa Melayu makin dikembangkan dan diperluas wilayah pemakaiannya oleh Kerajaan Malaka sehingga wilayah pemakaiannya meliputi hampir seluruh kawasan Asia Tenggara. Pada abad ke-14 muncul prasasti Trengganu dan prasasti Pasai (di Aceh) yang masing-masing bertuliskan aksara Jawi dan (masih) Pallawa serta berisi ajaran atau gagasan Islam. Selain digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, dan bahasa (penyebaran) agama, seperti halnya pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu oleh Kerajaan Malaka juga digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Karena agama yang disebarkan lewat

bahasa Melayu itu adalah agama Islam, aksara Arab mulai digunakan pula dalam bahasa Melayu. Sejak itulah kita mengenal aksara Arab-Melayu yang kemudian dikenal dengan sebutan tulisan Jawi. Oleh karena itu, peninggalan Kerajaan Malaka tidak hanya terdapat dalam bentuk prasasti, tetapi juga dalam bentuk buku, yaitu *Sejarah Melayu* yang ditulis oleh Tun Sri Lanang pada tahun 1612.

Pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan upaya pengembangan bahasa Melayu oleh Kerajaan Malaka, di Aceh mulai bermunculan ulama besar yang menulis sejumlah syair dan kitab (mengenai agama Islam) dalam bahasa Melayu. Di antara ulama-ulama besar itu terdapat nama Hamzah Fansuri, Samsuddin Alsumatrani, dan Nuruddin Arraniri. Bahkan sampai sekarang nama Hamzah Fansuri senantiasa disebut dan dikenang sebagai "pilar agung" penyair Melayu. Seperti telah disinggung di atas, naskah-naskah dalam periode bahasa Melayu Klasik memperlihatkan pengaruh yang amat kuat tidak saja dan bahasa Arab, tetapi juga dan bahasa Parsi dan Portugis.

Sebagai mata rantai berikutnya adalah Kerajaan Johor-Riau-Pahang pada abad ke-17 sampai dengan ke-19. Seperti halnya pada masa Kerajaan Malaka, bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa (penyebaran) agama, dan bahasa ilmu pengetahuan. Beberapa tahun setelah Singapura didirikan dan dibangun oleh Raffles pada tahun 1819, bahasa Melayu yang telah lama dibina dan dikembangkan itu mulai menghadapi saat-saat awal "perpecahan"-nya.

Berdasarkan Perjanjian London tahun 1824, wilayah Johor-Pahang diserahkan kepada Inggris, sedangkan wilayah Riau-Lingga menjadi daerah kekuasaan Belanda. Itulah sebabnya pada perkembangan selanjutnya kita melihat adanya perbedaan pengaruh: bahasa Melayu di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam dipengaruhi bahasa Inggris; sementara bahasa Melayu di Indonesia oleh bahasa Belanda. Dasar pikiran dan pandangan yang dianut penjajah dari Eropa ini "dipaksakan" ke dalam dunia bahasa Melayu dan salah satu akibatnya ialah digantinya ejaan Jawi dengan ejaan Romawi. Hal ini terasa sekali di Indonesia. Dalam hal sistem pendidikan, kehakiman, dan administrasi kolonial terlihat perbedaan yang cukup mencolok antara penjajah Inggris dan Belanda. Sebelum bahasa Melayu diikrarkan menjadi bahasa persatuan di Indonesia—dengan nama bahasa Indonesia—melalui rumusan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, ada beberapa "tokoh" bahasa Melayu yang harus dicatat, di antaranya ialah Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan Raja Ali Haji.

Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi untuk Singapura dan Raja Ali Haji untuk Riau (tepatnya Pulau Penyengat yang merupakan pusat Kerajaan Riau-Lingga) patut disebut sebagai dua orang tokoh bahasa Melayu pada abad ke-19. Nama yang disebut pertama diberi gelar *munsyi*, yang artinya 'guru bahasa', karena peranannya di India itu mengabdikan dirinya antara lain untuk mengajarkan bahasa Melayu kepada para pembesar Inggris di Singapura, termasuk Raffles.

Raja Ali Haji oleh kalangan luas di Indonesia hanya dikenal sebagai pengarang sastra dengan karyanya yang berjudul "Gurindam Dua Belas". Sesungguhnya tokoh ini sangat besar jasanya dalam bidang kebahasaan sehingga Raja Ali Haji patut disebut sebagai orang pertama yang melakukan upaya penataan sistem dan kodifikasi bahasa Melayu. Buku *Bustanul Katibin* yang ditulisnya pada tahun 1857 boleh dikatakan merupakan buku tata bahasa Melayu yang pertama. Sementara itu, hasil karyanya yang lain, yaitu *Buku Pengetahuan Bahasa* yang disusunnya pada tahun 1859, merupakan semacam kamus (atau bahkan ensiklopedia) yang berisi deskripsi lengkap tentang kata-kata bahasa Melayu pada masa itu.

3. Butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928 harus dicatat dengan "tinta emas" dalam sejarah perkembangan bahasa di Indonesia. Melalui ikrarnya yang sarat dengan kandungan makna, gagasan, dan harapan, yaitu "Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia", bahasa Melayu telah diangkat dan disepakati menjadi bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan.¹ Perannya sudah jelas dan terbukti, terutama dalam membangkitkan dan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan di antara seluruh bangsa Indonesia yang sebenarnya memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Dengan persatuan dan kesatuan itulah para pendahulu dan pejuang kita telah bangkit melawan penjajah sehingga akhirnya bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampailah ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Kalau bahasa Indonesia tidak disepakati sebagai bahasa persatuan, sudah dapat dibayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia dalam bidang kebahasaan. Tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa apa yang akan digunakan oleh para pemimpin bangsa ketika mereka berkomunikasi di antara sesamanya untuk membangkitkan semangat kemerdekaan? Tanpa bahasa Indonesia sebagai persatuan, bahasa apa yang akan digunakan pada saat menyusun teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa apa yang akan digunakan pada saat menyusun naskah Undang-Undang

Dasar 1945?

Hanya ada dua kemungkinan jawaban yang dapat dikemukakan terhadap pertanyaan seperti itu. Pertama, setiap pemimpin bangsa akan menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibunya yang bisa dipastikan bahasa daerah tersebut tidak akan dipahami oleh pemimpin bangsa yang berasal dan kelompok etnis yang lain. Kemungkinan yang pertama ini pasti merupakan sesuatu yang mustahil. Kalau demikian adanya, kemungkinan jawaban kedua harus ditemukan pada suatu bahasa yang dipahami dan dikuasai oleh para cendekiawan yang menjadi pemimpin bangsa pada saat itu. Bahasa tersebut adalah bahasa Belanda, bahasa kaum penjajah. Oleh karena itu, beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga makna yang tersirat di balik rumusan butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928 itu ialah bahwa kita bukan saja dituntut untuk menggunakannya secara tertib dan cermat, melainkan juga perlu menjaganya sebagai lambang jati diri bangsa.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu makin dilengkapi dengan dicantumkannya dalam UUD 1945 bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Pasal 36).² Yang disebut terakhir ini mengakibatkan, antara lain, bahasa Indonesia digunakan dalam administrasi pemerintahan dan dunia pendidikan sebagai bahasa pengantar. Digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan mengandung implikasi yang sangat luas. Pada satu sisi ia dituntut agar mampu menyampaikan dan menyebarluaskan konsep berbagai bidang ilmu pengetahuan (alam, sosial, dan budaya/humaniora), baik untuk keperluan lembaga pendidikan formal maupun untuk keperluan yang lebih luas. Pada sisi lain ia juga dituntut agar mampu mengembangkan konsep-konsep berbagai ilmu pengetahuan untuk mengantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia menuju ke arah peradaban dan kehidupan modern, sesuai dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Inilah sesungguhnya yang dimaksud dengan pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa pada awal tulisan ini. Dengan kata lain, bahasa Indonesia harus tetap mantap dapat digunakan untuk mengungkapkan pikiran, pandangan, atau konsep apa pun, mulai dari yang paling singkat dan sederhana sampai kepada yang paling rumit dan kompleks.

Persyaratan yang amat mendasar mengenai hal itu ada dua. Pertama, tata bahasa Indonesia, yang antara lain mengatur pembentukan kata dan istilah serta kalimat, harus jelas dan mantap. Kedua, perbendaharaan kata dan istilah untuk berbagai bidang ilmu pengetahuan harus tersedia. Apabila

kedua jenis persyaratan itu dipenuhi, maka dapatlah dikatakan bahwa bahasa Indonesia akan mantap sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa. Untuk itu, rasanya tidaklah berlebihan apabila Sutan Takdir Alisyahbana pernah menyatakan bahwa bersama-sama dengan bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Singapura, dan Brunei, "bahasa Indonesia akan menjadi salah satu bahasa dunia modern yang besar, yang hanya diatasi oleh bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol".

4. Ada pertanyaan yang jawabannya masih belum memperlihatkan "kesatu-bahasaan" di antara para ahli. Yang dimaksud ialah pertanyaan tentang bahasa Melayu yang mana yang pada tahun 1928 diangkat sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Patut disimak pandangan atau penilaian yang menyatakan bahwa di antara berbagai dialek Melayu yang berkembang pada masa itu, yang baik dan baku adalah bahasa Melayu dialek Riau dan Johor. Penilaian dan pandangan ini dapat dipertimbangkan sebagai alternatif jawaban yang memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penelitian diakronis.

Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 sekurang-kurangnya didahului oleh dua peristiwa penting sebelumnya, yaitu kelahiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menandai hari kebangkitan nasional dan berdirinya Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917 yang boleh disebut sebagai langkah awal pencerdasan kehidupan bangsa lewat bacaan. Setelah Sumpah Pemuda 1928, diterbitkannya majalah *Pujangga Baru* pada tahun 1933 yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisyahbana, Armijn Pane, dan Amir Hamzah turut memacu proses pencerdasan kehidupan bangsa pada masa-masa berikutnya. Hasilnya antara lain adalah diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta pada tahun 1938.

Kedatangan Jepang tampaknya membawa angin segar bagi upaya pemantapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pada tahun 1942 pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Untuk itu, dibentuklah Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. Komisi ini berhasil menyusun 7000 istilah dalam bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 18 Juni 1947 dibentuk Komisi Bahasa yang menghasilkan 5000 istilah dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1952 dibentuk lagi Komisi Istilah yang merupakan bagian kegiatan dari Lembaga Bahasa dan Budaya, Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia. Pembentukan berbagai komisi yang mengurus bidang peristilahan itu jelas

menunjukkan adanya keinginan yang kuat agar bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang modern. Masalah peristilahan ini juga mendapat porsi pembahasan yang cukup luas pada saat diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan. Mulai Kongres Bahasa Indonesia III (1978), kegiatan ini dilaksanakan lima tahun sekali di Jakarta oleh Pusat Bahasa.

Demikianlah setelah Kongres Bahasa Indonesia III berturut-turut diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia IV dan V pada tahun 1983 dan 1988. Pada ketiga kongres itu pokok bahasan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah berikut pengajarannya menunjukkan keluasan cakupan substansi dan kedalaman elaborasi—dalam batas-batas kelayakan pembahasan masalah untuk forum kongres yang pasti berbeda dari pertemuan para pakar dalam sebuah diskusi ilmiah—yang makin mantap dan komprehensif. Bahkan, mulai Kongres tahun 1988 pokok bahasan tentang pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (pengajaran BIPA) memperoleh tempat dan perhatian khusus. Perlu dicatat bahwa setelah itu diadakan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA (KIP-BIPA) tahun 1994 (di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga), 1996 (di IKIP Padang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Padang), dan 1999 (di IKIP Bandung yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia). Karena kegiatan itu dilaksanakan dua tahun sekali, KIP-BIPA berikutnya diadakan pada tanggal 1—3 Oktober 2001 di Denpasar. KIP-BIPA I--IV itu selalu dirancang dan dilaksanakan melalui kerja sama antara perguruan tinggi penyelenggara dan Pusat Bahasa.³

Seperti telah disebutkan, pembahasan berbagai masalah kebahasaan dalam Kongres Bahasa Indonesia makin mantap dan komprehensif. Akan tetapi, secara jujur harus diakui bahwa tidak ada "jembatan" yang menghubungkan kongres yang satu dengan kongres yang lain, padahal jembatan semacam itu makin dirasakan keperluannya. Karena keterbatasan wewenang dan kendala birokratis sebagai instansi pemerintah eselon II, Pusat Bahasa tidak mungkin dapat melaksanakan dengan baik keseluruhan tugas yang melekat pada peran dan fungsi "jembatan" yang dimaksudkan, yaitu sekurang-kurangnya menindaklanjuti berbagai butir putusan hasil Kongres dan, berdasarkan tugas tersebut, menyampaikan saran dan masukan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Kongres berikutnya.

Dengan memperhatikan dasar pertimbangan itu, Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) menghasilkan dibentuknya Panitia Kerja Kongres

Bahasa Indonesia VI (PK-KBI VI), sedangkan Kongres Bahasa Indonesia VII (1998) merekomendasikan adanya Dewan Pertimbangan Bahasa (DPB). PK-KBI VI dapat segera bekerja setelah Kongres berakhir karena susunan anggotanya telah ditunjuk dan disepakati oleh Kongres. Adapun DPB, sampai saat tulisan ini dibuat, belum terbentuk. Yang direkomendasikan oleh Kongres ialah bahwa DPB, yang merupakan mitra Pusat Bahasa, keanggotaannya terdiri atas para pakar bahasa dan sastra, tokoh masyarakat, dan pakar bidang lain yang mempunyai minat dan perhatian terhadap bahasa dan sastra. Tugasnya ialah (1) mengupayakan peningkatan status Pusat Bahasa menjadi lembaga nondepartemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (hal ini juga menjadi tugas PK-KBI VI), (2) memberikan nasihat kepada Pusat Bahasa sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya (termasuk pelaksanaan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII), dan (3) melanjutkan pelaksanaan tugas PK-KBI VI.

Upaya pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa, seperti yang telah disinggung di atas, merupakan bagian utama dan sekaligus menjadi tujuan utama dari kegiatan pengembangan bahasa. Kegiatan pengembangan bahasa ini lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk penelitian, baik yang menyangkut segi bahasa maupun segi sastranya. Mengingat yang diangkat sebagai bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, maka penelitian tentang bahasa dan sastra Melayu pun telah dan akan terus dilaksanakan.

Status bahasa Melayu di Indonesia mengalami perubahan. Pada masa lalu pemahaman terhadap status bahasa Melayu itu didasarkan pada rumusan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 yang menyebutkan, antara lain, bahwa bahasa asing adalah bahasa yang bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa daerah. Artinya, bahasa Melayu di Indonesia menurut Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 dikelompokkan sebagai bahasa daerah. Dasar pandangan itu sekarang mulai bergeser karena didasarkan pada hasil Seminar Politik Bahasa tahun 1999 yang menyebutkan bahwa bahasa asing adalah bahasa yang bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, dan bukan bahasa rumpun Melayu. Penyebutan bahasa rumpun Melayu ini berkaitan erat dengan kenyataan kebahasaan di Indonesia, yakni banyaknya dialek Melayu yang penuturnya tersebar di seluruh Indonesia.⁴

5. Pada tulisan ini perlu pula dikemukakan adanya kegiatan kerja sama kebahasaan dan kesastraan di antara bangsa-bangsa serumpun Bahasa Melayu di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura serta bahasa

Indonesia di Indonesia, seperti yang telah dipaparkan di atas, berasal dari satu rumpun bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu. Meskipun demikian, di dalam perkembangannya kemudian (dan hal ini dapat kita saksikan sekarang), kedua jenis bahasa serumpun itu memperlihatkan adanya perbedaan, terutama yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor sejarah, geografi, sosiokultural, dan (sudah barang tentu) sosiolinguistiknya itu sendiri.

Agar kedua jenis bahasa itu dapat berfungsi secara efektif dan efisien sebagai sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai bidang kehidupan yang tuntutan dan tantangannya makin meningkat dari waktu ke waktu, perbedaan-perbedaan di antara kedua jenis bahasa itu perlu diperkecil dan dijembatani. Dengan menyadari hal itu, bangsa-bangsa serumpun itu, terutama bangsa Indonesia dan Malaysia, mulai melakukan "pendekatan" sejak tahun 1959. Selama kurun waktu yang dalam catatan sejarah sering disebut sebagai "masa konfrontasi" (1963--1966), upaya pendekatan tersebut terpaksa dihentikan.

Ejaan Melindo (Melayu-Indonesia) disepakati oleh kedua negara pada tanggal 27 Juni 1967. Langkah berikutnya ialah penandatanganan "Komunike Bersama" pada tanggal 23 Mei 1972 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mashuri, S.H.) dan Menteri Pendidikan Malaysia (Hussein Onn). Tindak lanjut yang paling langsung berhubungan dengan kerja sama kebahasaan antara kedua negara terjadi pada tanggal 29 Desember 1972, yaitu dengan diresmikannya Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM). Hasilnya yang amat bermakna adalah disusun dan diterbitkannya dua buah buku pedoman, yakni *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Wadah ini dengan ikut sertanya Brunei Darussalam pada tanggal 4 November 1985 berubah namanya menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang setiap tahun selalu melakukan sidang untuk membahas peristilahan berbagai bidang ilmu. Dalam setiap sidang Mabbim itu, perutusan Singapura juga selalu hadir sebagai pemerhati (*observer*).

Yang tergabung dalam wadah kerja sama kebahasaan itu ialah Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Malaysia yang mewakili Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei yang mewakili Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, dan Panitia Kerja Sama Kebahasaan yang mewakili Pusat Bahasa Indonesia. Yang membahas peristilahan itu ialah para pakar berbagai bidang ilmu dari ketiga negara, baik yang berasal dari perguruan tinggi maupun pusat penelitian. Kerja

sama kebahasaan dari ketiga negara serumpun itu makin ditingkatkan lagi dengan dibentuknya wadah baru yang bernama Majelis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM) pada bulan Agustus 2000 di Kuala Lumpur. MABM bertujuan menyebarluaskan pemakaian bahasa Melayu (dalam pengertian supra-nasional, lihat Catatan 3) di luar wilayah Nusantara yang didukung oleh peningkatan pengajaran bahasa Melayu di luar negeri (Eropa, Amerika, Asia, dan Oseania) serta pembentukan pusat-pusat pengkajian bahasa dan kebudayaan Melayu di luar negeri.

Kerja sama kesastraan digalang melalui wadah Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) yang diresmikan pendiriannya pada tanggal 25 Agustus 1995 di Kuala Lumpur. Berbagai kegiatan Mastera pelaksanaannya diserahkan kepada ketiga negara anggota. Pemberian hadiah sastra Mastera dan penyelenggaraan kuliah serta seminar sastra bandingan berada di bawah koordinasi Malaysia. Penelitian dan penyelenggaraan forum pertemuan penulisan kreatif dikelola oleh Indonesia, sementara Brunei Darussalam ditugasi mengelola penerbitan majalah Mastera yang bernama *Pangsura*.

Ada satu hal lagi mengenai kegiatan kesastraan yang patut dicatat, yaitu Pertemuan Sastrawan Nusantara (PSN), forum yang dua tahun sekali mempertemukan para sastrawan dan ahli serta peminat sastra dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia. Wadah itu gagasannya muncul ketika diadakan Seminar Kesastraan Nusantara tahun 1973 di Kuala Lumpur. PSN I diadakan di Singapura tahun 1977 dan yang terakhir (PSN XI) di Brunei Darussalam tahun 2001.

6. Tujuan utama dari bermacam-macam kerja sama kebahasaan yang telah disebutkan itu ialah agar bahasa kebangsaan di negara masing-masing dapat berperan secara makin mantap sehingga tetap mampu digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien, termasuk di dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek modern. Tuntutan dan tantangan ke arah itu makin meningkat dan makin bervariasi, apalagi kalau dikaitkan dengan kemajuan teknologi informasi yang tingkat percepatannya begitu tinggi. Hal itu menjadi lebih ekstensif lagi dengan munculnya isu kesejagatan (globalisasi) yang mulai mewarnai hubungan antarnegara pada dekade awal milenium ketiga ini.

Bahasa Indonesia dan para pemakainya harus dipersiapkan secara "lahir-batin" ke arah keniscayaan global tersebut. Itulah sebabnya dua kali Kongres Bahasa Indonesia terakhir pada tahun 1993 dan 1998 diselenggarakan dengan tema "Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000" dan "Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi". Tidak lama lagi Kongres Bahasa Indonesia

VIII akan diadakan (tahun 2003). Kita semua, terutama para ahli dan peminat bahasa, harus sudah siap secara "lahir-batin" pula untuk menghadapi segala macam kemungkinan yang akan terjadi.

Catatan:

1. Ketiga butir rumusan Sumpah Pemuda itu sebenarnya sudah diungkapkan pada Kongres Pemuda I tahun 1926. Dengan demikian, yang berlangsung pada tahun 1928 adalah Kongres Pemuda II. Rumusan Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda I belum dapat diterima karena pandangan para pesertanya belum mencapai kesepakatan mengenai rumusan butir ke-3. Ada yang berpandangan realistis dan bersikukuh mengatakan bahwa bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kelompok pertama ini berpendapat bahwa sampai pada saat itu yang menjadi *lingua franca* bukanlah bahasa Indonesia yang memang belum ada, melainkan bahasa Melayu. Sebaliknya, kelompok kedua menganut pandangan bahwa bahasa persatuan itu haruslah bernama bahasa Indonesia. Hal itu, menurut argumentasi kelompok kedua, sangat penting sebagai pernyataan kemauan politik yang teguh dan kuat karena butir pertama dan kedua masing-masing telah dengan tegas menyatakan pengakuan terhadap bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Oleh karena itu, pernyataan tentang bahasa persatuan pun haruslah terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan nama bahasa Melayu, menurut kelompok kedua itu, hanya akan memperlihatkan ketidaktegasan sikap sehingga pada gilirannya hal itu dapat memperlemah semangat bangsa Indonesia sendiri di dalam upaya memperjuangkan kemerdekaannya. Perbedaan pandangan mengenai isi butir ketiga itu terus berlangsung dan Kongres Pemuda I tahun 1926 dinyatakan berakhir tanpa adanya kesepakatan untuk mencetuskan ikrar Sumpah Pemuda. Setelah kontroversi itu diendapkan selama dua tahun, pada Kongres Pemuda II tahun 1928 baru disepakati bahwa bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Maka, pada upacara penutupan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 dicetuskanlah ketiga butir ikrar Sumpah Pemuda yang kita kenal sekarang.
2. Di dalam Pasal 36 UUD 1945 dinyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia dan penjelasan pasal itu menegaskan bahwa bahasa-bahasa daerah yang digunakan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dipelihara dan dihormati juga oleh negara karena pada hakikatnya bahasa-bahasa daerah itu merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Sehubungan dengan yang disebutkan terakhir, patut dicatat apa yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Menurut PP tersebut, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia merupakan kewenangan Pusat. Adapun pengembangan bahasa dan budaya daerah termasuk ke dalam kewenangan daerah. Dengan merujuk kepada PP tersebut, dapatlah dikatakan bahwa pemahaman terhadap *negara* pada Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 itu adalah pemerintah daerah, baik tingkat I maupun tingkat II. Sementara itu, mengenai latar belakang isi Pasal 36 dan penjelasannya itu, patut ditambahkan catatan berikut.

Rumusan Pasal 36 UUD 1945 berikut penjelasannya yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bersidang di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya lagi, pada tanggal 13 Juli 1945 pada rapat yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, Prof. Dr. Soepomo, S.H., selaku Ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (anggota Panitia ini berjumlah lima orang: Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Dr. Soekiman, dan Haji Agoes Salim), menguraikan dan memberikan penjelasan tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Rumusan mengenai bahasa tercantum pada Pasal 36 yang terdiri atas dua ayat sebagai berikut.

- (1) Bahasa kebangsaan ialah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa-bahasa daerah dihormati.

Panitia Perancang UUD itu merupakan bagian dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yang menarik dari rapat yang membahas rancangan UUD itu ialah dibentuknya "Panitia Penghalus Bahasa" yang terdiri atas tiga orang, yakni Prof. Dr. Husein Djajadiningrat, Haji Agoes Salim, dan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Panitia Penghalus Bahasa inilah yang menghasilkan keseluruhan rumusan yang kita kenal sekarang dengan nama UUD 1945. Catatan lain yang menarik ialah penjelasan dan penerangan Prof. Soepomo mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang disampaikan pada sidang BPUPKI tentang 15 Juli 1945, sebagaimana yang dikutipkan berikut ini.

"Bahasa negara ialah bahasa Indonesia sama sekali tidak berarti bahwa misalnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda harus dihapuskan. Sama sekali tidak! Saya pernah mendengar dalam sidang ini perkataan: janganlah memakai nama Soekardjo, sebab itu ialah nama Jawa. Kita harus memakai nama Indonesia. Pendapat ini salah. Bukan itu yang dimaksudkan. Nama Jawa atau nama Sunda itu juga nama Indonesia. Jadi, bahasa-bahasa daerah, bahasa Jawa dan bahasa lain-lain harus dihormati. Bahasa Jawa, misalnya, yang begitu tinggi tingkatannya dan dipakai oleh berjuta-juta orang, tidak bisa lenyap. Kita harus memelihara dengan sebaik-baiknya bahasa daerah yang begitu luas dan tinggi kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Di sampingnya itu, kita harus mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa negara. Dengan menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, kita akan mengekalkan persatuan seluruh rakyat Indonesia."

3. Pengajaran BIPA, selain dibahas dalam forum KIP-BIPA I--IV seperti yang telah disebutkan, juga menjadi topik utama di dalam Kongres Internasional Pengajaran BIPA yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 28--30 Agustus 1995. Sebelumnya, pada bulan dan tahun yang sama di Kuala Lumpur diadakan Kongres Bahasa Melayu Sedunia dengan penyelenggara Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. Bahasa Melayu

yang dimaksudkan adalah bahasa Melayu yang supra-nasional sehingga cakupannya tidak hanya bahasa Melayu seperti yang digunakan di Malaysia, Brunei, Singapura, dan Thailand Selatan, tetapi juga termasuk bahasa Indonesia.

4. Penelitian tentang bahasa dan sastra Melayu selama ini dilakukan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra yang terdapat di sebagian besar provinsi di Indonesia. Jenis dialek Melayu yang telah diteliti menunjukkan bahwa sekurang-kurangnya ada 21 dialek Melayu di Indonesia, yakni sebagai berikut.

- 1) Melayu Deli
- 2) Melayu Langkat
- 3) Melayu Serdang
- 4) Melayu Panai
- 5) Melayu Jambi
- 6) Melayu Kuantan
- 7) Melayu Riau
- 8) Melayu Bengkulu
- 9) Melayu Bangka
- 10) Melayu Palembang
- 11) Melayu Betawi
- 12) Melayu Pontianak
- 13) Melayu Sambas
- 14) Melayu Kapuas Hulu
- 15) Melayu Sanggau
- 16) Melayu Makassar
- 17) Melayu Lombok
- 18) Melayu Loloan
- 19) Melayu Larantuka
- 20) Melayu Kupang
- 21) Melayu Ambon

II. KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN BAHASA

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DALAM KONTEKS TRANSFORMASI BUDAYA*

Bahasa dan pembangunan bangsa (*nation building*) merupakan dua hal yang kesalingterkaitannya antara yang satu dengan yang lain sangat erat. Seberapa jauh tingkat dan intensitas kesalingterkaitan itu berbanding sejajar dengan besarnya sumbangan yang diberikan bahasa terhadap pembangunan bangsa itu sendiri. Dengan perkataan lain, kesalingterkaitan itu diwarnai oleh peran yang dimainkan oleh bahasa dalam pembinaan kejatidirian dan sistem nilai yang bercorak nasional. Peran bahasa dalam pembinaan kejatidirian dan sistem nilai yang bercorak kebangsaan ini akan dengan sendirinya tercerminkan melalui kekuatan atau daya rekat yang dimiliki bahasa untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat yang latar belakang etnis, budaya, dan bahasanya berbeda-beda menjadi kesatuan masyarakat yang lebih besar yang disebut bangsa.

Interaksi antara bahasa pada satu pihak dan gerak serta laju pembangunan bangsa pada pihak lain dengan demikian harus memperlihatkan porsi yang seimbang. Kalau tidak, terutama kalau bahasa tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai alat komunikasi masyarakat bangsa yang tengah membangun dirinya agar bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kelompok masyarakat bangsa yang lain, benteng pertahanan kebangsaan dalam bentuk identitas dan sistem nilai itu makin lama akan makin rapuh. Hal itu berarti pula bahwa bahasa makin lama akan makin kehilangan kekuatan dan daya rekatnya sebagai alat pemersatu. Oleh karena itu, dalam menentukan dasar dan arah kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa, faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi laju dan gerak pembangunan bangsa harus benar-benar dipertimbangkan.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dominan di luar kebahasaan itu, penetapan dasar dan arah kebijakan bahasa tidak semata-mata didasarkan pada eksistensi bahasa sebagai sistem fonologis, gramatikal, atau semantis saja. Dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penetapan

* Makalah Sidang Ke-32 Mabbim, Cisarua, 8—12 Februari 1993

an dasar dan arah kebijakan bahasa itu akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor nonkebahasaan. Pertimbangan-pertimbangan itu dapat dikaitkan dengan masalah politik, pendidikan, atau kebudayaan.

Dasar dan arah kebijakan bahasa itu dapat pula diacu sebagai garis kebijakan bahasa. Pada hakikatnya, penetapan garis kebijakan bahasa bersangkut-paut dengan penentuan fungsi kemasyarakatan berbagai jenis bahasa dalam masyarakat yang didasarkan praanggapan bahwa tidak ada masyarakat modern yang betul-betul bersifat monolingual. Penetapan fungsi itu haruslah sedemikian rupa sehingga pertanyaan tentang maksud atau tujuan yang berkenaan dengan pemakaian bahasa tertentu yang harus atau akan digunakan sebagai alat perhubungan warga masyarakat yang bersangkutan dapat dengan mudah dijawab. Pemakaian bahasa tertentu sebagai alat perhubungan oleh warga masyarakat menyiratkan pengertian tentang warga masyarakat yang multilingual atau sekurang-kurangnya bilingual, seperti halnya warga masyarakat di Indonesia.

Di Indonesia dapat dibedakan tiga golongan bahasa menurut kedudukannya, yakni menurut tempatnya berdasarkan nilai sosial budaya yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Ketiga golongan bahasa itu ialah (1) bahasa kebangsaan, (2) bahasa daerah, dan (3) bahasa asing. Kedudukan bahasa kebangsaan ditempati oleh bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Nama yang diberikan kepada bahasa itu, yakni bahasa persatuan, bertalian erat dengan cita-cita pembinaan kepribadian sosial budaya masyarakat bangsa yang harus diupayakan dapat mengatasi kepribadian kelompok. Kedudukan bahasa daerah dimiliki oleh beratus-ratus bahasa daerah di kepulauan Indonesia yang jumlah penuturnya berkisar antara beberapa ratus orang saja (misalnya di Irian Jaya) dan tujuh puluh juta orang (bahasa Jawa)². Kedudukan bahasa asing terlihat pada sejumlah bahasa asing yang dipakai dan/atau dipelajari di dalam lingkungan budaya Indonesia. Berbeda dari bahasa daerah yang merupakan unsur kebudayaan Indonesia, bahasa-bahasa asing ini, meskipun dipakai atau dipelajari, tidaklah dianggap sebagai unsur kebudayaan Indonesia.

Berdasarkan fungsi kemasyarakatannya, ketiga golongan bahasa itu dipakai sebagai (1) bahasa resmi, (2) bahasa untuk hubungan luas, (3) bahasa dalam sistem pendidikan, dan (4) bahasa dalam bidang seni, ilmu, dan teknologi. Bahasa Indonesia menjalankan fungsi bahasa resmi kenegaraan (UUD 1945, Pasal 36). Hal itu berarti bahwa di dalam segala urusan negara yang resmi, seperti di dalam tata usahanya, peradilanannya, dan penyelenggaraan politiknya, akan dipakai bahasa Indonesia. Di samping itu, dapat dicatat bahwa di dalam berbagai upacara adat, bahasa daerah juga berfungsi sebagai bahasa resmi kedaerahan. Artinya, bahasa daerah dipakai di muka umum pada kesempatan seperti itu.

Bahasa Indonesia juga menjalankan fungsi bahasa untuk hubungan luas dalam komunikasi antardaerah dan antarbudaya Indonesia. Fungsi itu juga dijalankan oleh sejumlah bahasa asing yang dipakai di Indonesia untuk hubungan antarbangsa dan untuk penyebaran ilmu dan teknologi modern. Dapat juga dikatakan bahwa bahasa Indonesia dalam fungsi itu menjadi alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan.

Bahasa Indonesia selanjutnya berfungsi sebagai bahasa di dalam sistem pendidikan formal. Fungsi kemasyarakatan yang ketiga ini berkaitan dengan garis kebijakan dalam penentuan bahasa sebagai bahasa pengantar dan/atau sebagai mata pelajaran atau objek studi. Di dalam situasi keanekaragaman bahasa di Indonesia, pendidikan formal berhadapan dengan tiga masalah kebahasaan, yakni (1) bagaimana orang harus mempelajari bahasa kebangsaannya demi perpaduan nasional di antara warga negara, dan demi pemerataan kesempatan bekerja yang diciptakan oleh pembangunan nasional dan yang hanya dapat dimanfaatkan oleh orang yang mampu berbahasa Indonesia; (2) bagaimana orang dapat memahami bahasa ibunya, atau bahasa bapaknya, jika ia bukan penutur asli bahasa nasional sehingga ia dapat menghayati, menginternalkan, dan melestarikan warisan budaya kelompok etnisnya; dan (3) bagaimana orang dapat mempelajari jenis bahasa asing yang akan membukakan gerbang baginya ke dunia ilmu dan teknologi modern, ke dunia keagamaan yang supranasional, dan ke peradaban dunia yang makin merata.

Fungsi bahasa dalam bidang kesenian secara bersama-sama dipikul oleh bahasa Indonesia dan pelbagai bahasa daerah Nusantara. Dapat dicontohkan bahwa cabang seni yang diungkapkan lewat bahasa ialah seni vokal, seni sastra (prosa, puisi, dan drama), dan seni pertunjukan seperti film dan wayang. Seni yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai medium ini diciptakan oleh penyair, pengarang, dan penggubah drama yang latar sosial budayanya bertumpu pada budaya etnis dan daerahnya yang beragam-ragam.

Fungsi bahasa dalam bidang ilmu dan teknologi terutama diisi oleh bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Tentu saja ada beberapa bahasa asing lain, seperti bahasa Belanda, Jepang, Arab, Perancis, dan Jerman yang juga berperan pada skala yang lebih terbatas. Bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi yang disebutkan terakhir ini karena bahasa Indonesia memiliki ragam tulis yang dapat dipakai untuk merekam penelitian dan menjabarkan ilmu, serta untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam pelbagai jenisnya. Sebenarnya ada hubungan timbal balik antara kemajuan ilmu dan kemampuan berbahasa yang harus merekam kemajuan itu, menguraikannya, dan kemudian menyampaikannya kepada kalangan yang lebih luas. Masyarakat yang tidak mampu merangsang pengembangan ilmu dan teknologi tidak dapat berharap memiliki bahasa keilmuan dan keteknologian. Sebaliknya, ketiadaan

bahasa keilmuan dan keteknologian akan menghambat usaha penyemaian dan pembinaan generasi ilmuwan dan pakar teknologi yang berkesinambungan.

Usaha pengembangan bahasa nasional bertolak dari kenyataan bahwa bahasa itu harus meningkatkan fungsi kemasyarakatan yang sebelumnya kurang berkembang. Sebagai akibat dari kegiatan masyarakat Indonesia yang tengah membangun dan mengembangkan penyelenggaraan tata usaha kenegaraannya di berbagai bidang, timbul keperluan baru pada diri anggota masyarakatnya untuk dapat berbicara dan menulis tentang apa saja yang mungkin dipikirkan dalam proses transformasi budaya. Jalinan antara pengembangan kebudayaan dan pengembangan bahasa nasional menjadi lebih jelas pada waktu berlangsungnya perubahan masyarakat, yang antara lain disebabkan oleh arus migrasi, urbanisasi, dan modernisasi, yang masing-masing dapat menghasilkan fungsi kemasyarakatan bahasa yang baru atau yang lebih berkembang.

Usaha pengembangan bahasa nasional, dan sampai taraf tertentu pengembangan bahasa daerah tertentu juga, memperlihatkan tiga aspek yang berkorelasi dengan tolok ukur pembangunan nasional. Taraf keberaksaraan fungsional (*functional literacy*) penduduk berjalan seiring dengan peningkatan keberaksaraan orang dalam bahasa nasional dan bahasa daerah. Pembakuan atau standardisasi di bidang industri dan perdagangan mensyaratkan pembakuan atau standardisasi bahasa. Selanjutnya, pemodernan dan peningkatan keefisienan dan keefektifan aparatur pemerintah dan dunia swasta memerlukan keperluan akan pemodernan bahasa.

Keberaksaraan fungsional, terutama dalam bahasa nasional, bertujuan mengukuhkan kohesi nasional di antara warga masyarakat; menjembatani kesenjangan antara orang tua yang monolingual dan anaknya yang bilingual (bahkan mungkin multilingual); dan membuka pintu gerbang ke pasaran kerja yang sering hanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh orang yang mampu membaca dan menulis bahasa Indonesia.

Usaha pembakuan bahasa nasional berhadapan dengan dua ragam pokok bahasa yang dipakai secara berdampingan untuk fungsi sosial yang berbeda-beda. Ada ragam pokok yang terutama diperoleh penuturnya lewat pendidikan formal yang menginternalkan norma dan kaidah bahasa. Selain itu ada ragam pokok yang diperoleh penuturnya lewat proses sosialisasi dengan bantuan orang tua dan teman sebaya. Yang pertama dapat disebut ragam pokok pendidikan dan yang kedua ragam pokok sehari-hari. Ragam pokok "pendidikan" digunakan, misalnya, dalam pidato resmi, khotbah, kuliah atau ceramah; dalam siaran media massa cetak dan elektronik, dalam komunikasi di bidang pendidikan, ilmu, teknologi, dan kesusastraan. Ragam pokok "sehari-hari" yang berkembang dalam berbagai rupa dialek dan sosiolek, biasanya dipakai dalam lingkungan keluarga, di pasar dalam tawar-menawar, di

dalam kegiatan seni dan sastra rakyat, dan dalam pergaulan yang tidak resmi.

Pembakuan bahasa nasional terutama ditujukan pada ragam pokok "pendidikan"-nya, yakni di bidang ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Pilihan itu didasarkan pada pertimbangan bahwa ragam itu dinilai lebih mampu mengungkapkan pikiran yang berbobot dan kompleks. Lagi pula, berkat sistem pendidikan nasional, proses pembakuan ragam itu dapat menghasilkan dengan lebih mudah penyeragaman norma dan kaidah bahasa yang sekaligus memperikutkan kemantapan. Kemantapan itu diperlukan agar hasil pembakuan itu dapat berfungsi sebagai acuan atau model. Pembakuan seperti itu dapat digolongkan ke dalam upaya pemodernan bahasa.

Pemodernan bahasa bertujuan menjadikan bahasa itu memiliki taraf yang secara fungsional sederajat dengan bahasa lain di dunia yang lazim disebut bahasa modern yang sudah terkembang yang sudah mantap. Pemodernan itu akan memudahkan, antara lain, penerjemahan timbal balik di berbagai bidang, seperti industri, perniagaan, teknologi, dan pendidikan lanjut. Pemodernan itu bertalian baik dengan pemekaran kosakata bahasa maupun dengan pengembangan berbagai langgam, gaya, dan bentuk wacana. Pemodernan bahasa itu dengan demikian tidak dapat mengabaikan aspek pencendekiaan bahasa, mengingat tujuan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni dalam rangka usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pokok kedua dalam makalah ini, yaitu pembinaan bahasa, berkenaan dengan usaha pencermatan pemakaian bahasa. Yang menjadi sasaran bukan lagi kerumpangan dalam sistem bahasa, melainkan kerumpangan dalam perilaku kebahasaan para penuturnya. Yang diperhatikan bukan saja pengetahuan tentang kaidah bahasa, melainkan kemampuan berkomunikasi dalam pelbagai situasi. Ada sejumlah perintang yang dapat menghambat kelancaran pembinaan bahasa itu. Dapat disebut di antaranya, keanekaragaman yang disertai taraf kebutuhurufan yang tinggi; kelangkaan penutur atau penulis tolok atau model yang dapat dicontoh; adanya bahasa asing yang nilai pasarnya lebih tinggi dan karena itu bergengsi sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat; serta ketiadaan perangsang dan sistem ganjaran atau imbalan yang dapat meningkatkan motivasi penutur untuk mencapai kemahiran berbahasa yang tinggi.

Keberhasilan pembinaan pemakaian bahasa sebenarnya sering bergantung pada tersedia dan terjangkauanya sumber acuan yang dianjurkan sebagai tolok ukur. Di samping produksi berbagai sumber acuan itu, yang juga sangat penting ialah penyampaiannya ke berbagai kelompok sasaran lewat pasar buku dan penyuluhan. Produksi istilah, misalnya, yang tidak disertai sarana penerbitan dan penyebarluasannya, akan tetap tinggal sebagai harta karun. Jika para ilmuwan diharapkan menggunakan istilah yang sudah dibakukan dengan taat asas, harus diciptakan saluran komunikasi yang dapat menjamin

terciptanya arus balik yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengembangan bahasa. Tidak dapat disangkal bahwa yang penting dalam pembinaan bahasa yang berkenaan dengan kosakata ilmiah ialah masuknya istilah itu ke dalam buku ajar, makalah para ahli, atau diskusi profesional.

Yang perlu diusahakan segera, di dalam rangka pembinaan bahasa, ialah penerbitan dan pemasaran daftar istilah dan kamus bidang ilmu yang ditujukan ke berbagai kelompok sasaran, seperti perguruan tinggi, kalangan profesi, dunia industri dan perniagaan. Di samping itu, perlu dipasarkan berbagai buku panduan yang memperkenalkan jenis langgam dan wacana yang tingkat keterpakaiannya sangat tinggi, seperti format dan bahasa surat, bahasa yang digunakan dalam skripsi dan makalah, serta pemakaian bahasa dalam laporan dinas dan laporan penelitian.

Dunia pendidikan dan kalangan media massa merupakan dua saluran komunikasi yang terpenting bagi penyebaran hasil pengembangan bahasa, khususnya hasil pembakuan serta kodifikasi. Untuk tujuan itu, hubungan kelembagaan antara badan pengembang dan pembina bahasa di satu pihak dan dunia pendidikan serta kalangan media massa pada pihak lain perlu ditingkatkan.

Pembinaan bahasa mungkin berkisar pada dua jenis kegiatan yang bersangkutan dan yang saling mempengaruhi dalam hal keberhasilannya. Yang pertama berkenaan dengan pengubahan sikap bahasa, sedangkan yang kedua berhubungan dengan penyuluhan lewat saluran media massa, penerangan untuk kelompok sasaran yang berkepentingan, dan pelayanan jasa terhadap kalangan masyarakat luas yang dilakukan secara teratur, melalui sarana lisan atau tulisan.

Berdasarkan fungsi dan sikap bahasa yang berpautan dengan ragam bahasa itu, maka usaha pengubahan sikap itu akan dipusatkan pada peningkatan sikap kesetiaan bahasa, sikap kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan norma dan kaidah bahasa sebagai kerangka acuan. Penyuluhan bahasa dapat dianggap sebagai pelengkap terhadap penyebaran hasil pengembangan bahasa lewat bentuk terbitan. Jika ditinjau dari jenis kelompok sasarannya, penyuluhan bahasa dapat ditujukan kepada khalayak umum, kelompok khusus, atau kepada perseorangan.

Penyuluhan kepada khalayak umum biasanya dilakukan dengan memanfaatkan media massa. Yang termasuk sasaran khusus ialah kalangan pejabat dan karyawan. Corak penyuluhan kepada kelompok khusus itu berbeda dalam dua hal dari penyuluhan kepada khalayak umum. Kelompok khusus mempunyai kepentingan yang sama sehingga bahan penyuluhan yang disusun dengan baik akan dirasakan memiliki taraf kegunaan yang tinggi. Kedua, penyuluhan itu terbatas dalam cakupan materi dan jangka waktu pelaksanaannya. Badan pengembang dan pembina bahasa yang melayani

permintaan keterangan yang melayani permintaan keterangan yang berasal dari anggota masyarakat penutur secara perseorangan berpeluang menjalin hubungan kemasyarakatan yang baik. Akhirnya, dapat ditambahkan bahwa putusan garis haluan yang menetapkan bahwa setiap permintaan pribadi melalui telepon atau surat, betapapun kecil pokok masalah yang ditanyakannya, harus dijawab dengan baik dan segera karena pelayanan yang demikian pasti akan menumbuhkan rasa muhibah di kalangan khalayak terhadap usaha penyuluhan itu.

Catatan:

1. Saya berterima kasih kepada Prof. Dr. Anton M. Moeliono yang telah berbagi pengalamannya dalam penyusunan makalah ini.
2. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (1983), jumlah penutur yang menggunakan bahasa tertentu dalam pergaulan sehari-hari memperlihatkan pemerinkatan berikut:
 - a) 59.357.000 penutur bahasa Jawa (40%)
 - b) 22.110.000 penutur bahasa Sunda (15%)
 - c) 17.505.000 penutur bahasa Indonesia (12%)
 - d) 6.914.000 penutur bahasa Madura (5%)
 - e) 3.546.000 penutur bahasa Minang (2%)
 - f) 3.322.000 penutur bahasa Bugis (2%)
 - g) 3.107.000 penutur bahasa Batak (2%)
 - h) 2.481.000 penutur bahasa Bali (2%)
 - i) 1.662.000 penutur bahasa Banjar (1%)Angka persentase dihitung berdasarkan penduduk Indonesia pada saat itu yang berjumlah 146.775.000 orang.

2. PEMBINAAN BAHASA: TANTANGAN DAN HARAPAN*

Pengantar

Baik dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional (sesuai dengan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928) maupun sebagai bahasa negara (sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945), bahasa Indonesia harus senantiasa ditempatkan dalam posisinya sebagai alat komunikasi masyarakat dan bangsa Indonesia yang tengah melakukan pembangunan di segala bidang. Selama dua puluh lima tahun terakhir, yang dikenal sebagai masa Pembangunan Jangka Panjang I, bahkan sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, bahasa Indonesia telah terbukti dan berhasil memainkan perannya sebagai sarana komunikasi yang ampuh dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam rangka menyongsong masa Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) dalam kurun waktu dua puluh lima tahun yang akan datang, kita perlu melakukan evaluasi dan menyusun strategi yang tepat agar bahasa Indonesia dapat berfungsi secara lebih efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal itu, yang akan disoroti dalam makalah ini ialah masalah pembinaan bahasa dan berbagai faktor yang berhubungan dengan kegiatan itu. Masalah pengembangan bahasa tidak disinggung bukan karena hal itu tidak penting, melainkan karena peningkatan mutu sumber daya manusia, yang akan menjadi prioritas utama dalam PJP II, memperlihatkan korelasi yang jelas dengan masalah pembinaan bahasa yang menempatkan para pemakai bahasa sebagai kelompok sasaran kegiatannya.

Untuk melihat hubungan antara pembinaan bahasa dan peningkatan sumber daya manusia itu, berikut ini akan dipaparkan secara singkat lima hal, yaitu kedudukan dan fungsi bahasa, keadaan pemakai bahasa, upaya pembinaan bahasa, kendala yang dihadapi, dan upaya yang perlu dilakukan sehubungan dengan kendala tersebut.

Kedudukan dan Fungsi Bahasa

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak hanya berhubungan dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa daerah dan bahasa asing karena bagai-

* Makalah Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya, diselenggarakan oleh FPBS IKIP Medan pada tanggal 15—16 Desember 1993 di Medan

mana pun kedua jenis bahasa yang disebutkan terakhir memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, baik dilihat dari pemerayaan kosakatanya maupun dari pengembangan kaidah-kaidah kebahasaannya. Oleh karena itu, perlu diperhatikan batas-batas dan perbedaan yang tegas mengenai kedudukan dan fungsi antara bahasa Indonesia pada satu pihak dan bahasa daerah serta bahasa asing pada pihak lain.

a. Bahasa Indonesia

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebulatan semangat kebangsaan Indonesia, (2) alat pemersatu berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam satu masyarakat nasional Indonesia, dan (3) alat perhubungan antarsuku, antardaerah, serta antarbudaya.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi pemerintahan, (2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dengan kedudukan dan fungsi yang demikian, bahasa Indonesia tidak hanya merupakan alat komunikasi semata-mata, tetapi juga, seperti yang telah disebutkan di atas, memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Bahasa Daerah

Sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa-bahasa di Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan nasional. Dalam kedudukannya yang demikian, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah.

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

c. Bahasa Asing

Bahasa-bahasa di Indonesia yang bukan bahasa Indonesia dan tidak tergolong sebagai bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa sejumlah bahasa asing diajarkan di

lembaga-lembaga pendidikan pada tingkat tertentu. Bahasa-bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa asing itu berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa, (2) alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan (3) alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional.

Keadaan Pemakai Bahasa

Untuk melihat seberapa jauh kemampuan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, perlu diperhatikan beberapa faktor yang diperkirakan memberikan pengaruh, secara langsung ataupun tidak langsung, terhadap tingkat kemampuan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia tersebut. Di antara faktor-faktor itu dapat disebutkan tiga hal, yaitu (1) pemakaian bahasa tertentu sebagai bahasa sehari-hari, (2) kemampuan membaca dan menulis, dan (3) tingkat pendidikan.

a. Pemakaian Bahasa Sehari-Hari

Hasil sensus penduduk tahun 1990, mengenai pemakaian bahasa sehari-hari oleh anggota masyarakat Indonesia yang berusia lima tahun ke atas, memperlihatkan adanya tiga kelompok masyarakat, yaitu (1) masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 23.802.520 orang (15,07%); (2) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (tetapi dapat memahami dan menggunakannya) berjumlah 107.066.316 orang (67,80%); dan (3) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya berjumlah 27.055.488 orang (17,13%).

Hasil sensus itu memperlihatkan bahwa masih cukup banyak penduduk Indonesia (17,13%) yang belum dapat menyerap informasi pembangunan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1980 mengenai hal yang sama, angka-angka tersebut di atas cukup menggembirakan, terutama dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan berkurangnya jumlah penduduk Indonesia yang tidak memahami bahasa Indonesia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980, ketiga kelompok masyarakat itu adalah sebagai berikut: (1) masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 17.505.303 orang (11,93%); (2) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (tetapi dapat memahami dan menggunakannya) berjumlah 71.758.926 orang (48,89%); dan (3) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya berjumlah 57.512.244 orang (39,18%).

Kenyataan itu mengisyaratkan bahwa upaya pemberantasan buta bahasa

Indonesia perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, antara lain, melalui jalur pemasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991, tanggal 28 Oktober 1991, tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa (yang ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992, tanggal 10 April 1992).

Bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk Indonesia yang buta bahasa Indonesia itu boleh dikatakan berbanding sejajar dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penutur bahasa-bahasa daerah tertentu, sebagaimana yang dapat diamati melalui angka-angka pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Bahasa-Bahasa di Indonesia dan Jumlah Penuturnya

No.	Nama Bahasa	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penutur	Persentase	Jumlah Penutur	Persentase
1.	Indonesia	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
2.	Jawa	59.357.040	40,44	60.267.461	38,08
3.	Sunda	22.110.403	15,06	24.155.962	15,26
4.	Madura	6.913.977	4,71	6.792.447	4,29
5.	Batak	3.106.970	2,12	3.120.047	1,97
6.	Minang	3.545.928	2,42	3.527.726	2,23
7.	Bali	2.481.249	1,69	2.589.256	1,64
8.	Bugis	3.322.192	2,26	3.228.742	2,04
9.	Banjar	1.661.792	1,13	2.755.337	1,74
10.	Lainnya	25.653.378	17,48	27.070.883	17,11
11.	Tak terjawab	1.118.235	0,76	712.629	0,45
	Jumlah	146.776.467	100,00	158.262.640	100,00

b. Kemampuan Membaca dan Menulis

Tingkat penguasaan bahasa seseorang ditentukan, antara lain, oleh kemampuan dan keterampilannya membaca dan menulis. Sebagai sebuah negara yang rata-rata penduduknya tergolong dwibahasawan, terutama sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, hal itu dapat ditelusuri. Dalam hal penguasaan bahasa Indonesia, alat ukurnya ialah kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis aksara Latin karena dalam sistem pendidikan di Indonesia bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Indonesia dan aksara atau huruf yang dipakai ialah huruf Latin.

Berdasarkan alat ukur itu, dengan memperhatikan hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 seperti yang tampak pada Tabel 2, ada dua hal yang perlu dicatat, yakni bertambahnya penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis huruf Latin serta berkurangnya penduduk Indonesia yang buta aksara.

Tabel 2
Penduduk Indonesia Usia 10 Tahun ke Atas
dan Kepandaian Membaca dan Menulis

No.	Membaca dan Menulis	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penduduk	Persentase	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Huruf Latin	72.670.883	69,64	111.365.827	82,47
2.	Huruf Lain	1.514.493	1,45	2.145.277	1,59
3.	Buta Aksara	30.096.559	28,84	21.494.117	15,92
4.	Tak Terjawab	70.635	0,07	34.360	0,02
Jumlah		104.352.570	100,00	135.039.58	100,00

c. Tingkat Pendidikan

Selain dengan kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis huruf Latin, seperti yang sudah dikemukakan di atas, tingkat penguasaan bahasa Indonesia juga berhubungan dengan latar belakang pendidikan penutur yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan makin tinggi pula tingkat penguasaan bahasa Indonesiannya, baik penguasaan bahasa Indonesia tulisan maupun

penguasaan bahasa Indonesia lisan. Sebaliknya, makin rendah tingkat pendidikan seseorang akan makin rendah pula penguasaan bahasa Indonesianya. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, seperti yang terlihat pada Tabel 3, dari penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang berjumlah 135.038.185 orang, hal yang disebutkan terakhir ini dapat diamati terutama pada kelompok penduduk yang belum pernah duduk di bangku sekolah yang jumlahnya 21.952.791 orang (16,26%).

Tabel 3
Penduduk Indonesia Usia 10 Tahun ke Atas
dan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Belum Pernah Sekolah	21.952.791	16,26
2.	Tidak/ Belum Tamat SD	42.480.415	31,46
3.	SD	40.996.434	30,36
4.	SLTP Umum	13.392.558	9,92
5.	SLTP Kejuruan	1.088.539	0,80
6.	SLTA Umum	7.882.905	5,84
7.	SLTA Kejuruan	5.204.538	3,85
8.	Diploma I/II	352.505	0,26
9.	Akademi/Diploma III	700.801	0,52
10.	Universitas	986.699	0,73
Jumlah		135.038.185	100,00

Dari paparan tentang ketiga faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa Indonesia itu, kalau secara khusus diperhatikan hasil sensus penduduk tahun 1990, tampaknya banyak diperkirakan bahwa ada korelasi antara kelompok penduduk yang tidak dapat berbahasa Indonesia (17,13%), penduduk yang buta aksara (15,92%), dan penduduk yang tidak pernah bersekolah (16,26%).

Upaya Pembinaan Bahasa

Seperti yang telah disebutkan di atas, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pada satu pihak perlu dibedakan dari kedudukan dan fungsi bahasa daerah dan bahasa asing pada pihak lain. Batas-batas atau perbedaan seperti itu tampak pula pada pembinaannya, sebagaimana yang secara singkat dikemukakan berikut ini.

Pembinaan bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang berkenaan dengan usaha membudidayakan pemakaian bahasa agar para pemakai bahasa Indonesia memiliki sikap positif yang mencakup tiga unsur, yaitu kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dan kesadaran akan norma bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia itu dilakukan karena terdapat ketakpadanan di dalam perilaku kebahasaan para penuturnya, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

Sehubungan dengan hal itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 menyebutkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan untuk (1) mempertinggi mutu pemakaian, (2) meningkatkan sikap positif, dan (3) mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penerapan dan penggunaannya perlu terus ditingkatkan dan diperluas sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pembinaan bahasa daerah, baik sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia maupun sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional dan alat perhubungan dalam lingkungan masyarakat daerah, perlu dilaksanakan seiring dengan pembinaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain melestarikan sikap positif terhadap bahasa daerah, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, pembinaan bahasa daerah juga bertujuan memotivasi masyarakat khususnya generasi muda, agar mereka tetap memelihara, menghormati, dan menggunakan bahasa daerah dalam situasi dan konteks pemakaian yang tepat.

Berbeda dari pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pembinaan bahasa asing harus diartikan sebagai pembinaan terhadap pemakaian bahasa asing agar peningkatan penguasaan bahasa asing di Indonesia ditujukan untuk (1) memperluas cakrawala berpikir, (2) memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan terhadap bahasa asing di Indonesia hendaknya diupayakan agar kegiatan itu tidak mengorbankan sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Kendala yang Dihadapi

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa upaya pembinaan bahasa, terutama pembinaan bahasa Indonesia, menghadapi berbagai macam kendala,

seperti (1) perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah, (2) tingkat keniraksaraan penduduk yang masih cukup tinggi, (3) kelangkaan penutur anutan yang dapat diteladani, (4) adanya bahasa asing yang bergengsi sosial di dalam masyarakat, dan (5) kurang adanya motivasi untuk meningkatkan penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan struktur sosial, terutama di daerah perkotaan, cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembinaan bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembinaan bahasa daerah dilakukan atas dasar "semangat" yang saling menunjang dengan pembinaan bahasa Indonesia. Sementara itu, pemakaian bahasa asing di Indonesia mengakibatkan timbulnya kendala yang cukup serius bagi upaya pembinaan bahasa Indonesia itu sendiri. Untuk itu, perlu disadari sungguh-sungguh oleh kelompok pemakai bahasa asing yang bersangkutan, terutama para pengusaha yang cenderung menganggap bahwa pemakaian bahasa Inggris lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia, bahwa bahasa asing yang mereka kuasai jangan sampai mengorbankan kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara.

Penutup

Mengingat pentingnya peran pembinaan bahasa dalam peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia, perlu dilakukan berbagai rencana dan upaya yang terpadu dan terarah, berdasarkan suatu kebijaksanaan bahasa nasional yang komprehensif agar pembinaan bahasa itu dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Kebijakan bahasa nasional yang komprehensif itu sekurang-kurangnya harus meliputi tiga komponen, yakni (1) pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, (2) pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, dan (3) pengelolaan dan pemanfaatan bahasa asing untuk keperluan nasional kita.

3. BAHASA INDONESIA MENJELANG TAHUN 2000*

Pengantar

Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 secara eksplisit mengungkapkan tekad dan semangat para pemuda pada saat itu tidak sekadar untuk mengangkat dan menyepakati bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan,¹ tetapi juga sekaligus untuk menjunjungnya. Menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu secara tersirat mengandung makna yang sangat dalam, yaitu menggunakannya secara cermat sambil tetap memeliharanya agar bahasa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang sebagai sarana komunikasi yang mantap dan sekaligus sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia.

Selain sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 36 UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara itu, fungsi bahasa Indonesia harus dilihat dan ditempatkan dalam konteks usaha mencapai tujuan yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Dari sudut pandang ini, mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang memperlihatkan keterkaitan yang langsung dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Dilihat dari kurun waktu yang telah dilaluinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berusia 65 tahun dan sebagai bahasa negara 48 tahun. Sebagai suatu bahasa untuk ratusan juta penduduk yang tersebar pada ratusan pulau dengan bahasa daerah atau bahasa ibu yang jumlahnya juga ratusan, kurun waktu yang demikian merupakan usia yang masih sangat muda. Akan tetapi, bahasa Indonesia menanggung beban tugas yang amat sarat karena ia dituntut untuk tetap menjadi sarana komunikasi yang mantap dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam konteks kegiatan pembangunan yang tengah dan akan terus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, tuntutan terhadap bahasa Indonesia itu akan makin bertambah karena pada saat yang sama ia pun harus tetap dapat mempertahankan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien tanpa kehilangan apalagi mengorbankan keutuhan jati dirinya.

Berdasarkan kerangka pemikiran seperti yang dipaparkan di atas, pada

* Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI, Jakarta, 1993

makalah ini akan dikemukakan beberapa hal yang seyogianya diperhatikan sehubungan dengan peran bahasa Indonesia menjelang tahun 2000, suatu kurun waktu yang menandai awal tahap lepas landas yang diharapkan akan dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kehidupan dan peradaban yang modern.

Peran Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia telah berhasil membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam "mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan", sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antarsuku, antardaerah, dan bahkan antarbudaya.

Sebagai akibat dari ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga memiliki peran yang sangat menentukan sebagai alat komunikasi dalam peri kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungan itu, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan dan dikaji ulang. Pada dasarnya peran atau fungsi bahasa Indonesia dari waktu ke waktu boleh dikatakan tidak mengalami perubahan. Artinya, rincian peran bahasa Indonesia, sekurang-kurangnya yang telah disinggung tadi, boleh dikatakan berlaku sepanjang masa selama bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang perlu dipertimbangkan ialah kemungkinan memberikan perhatian yang lebih khusus pada peran-peran tertentu, sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat pemakainya.

Kalau hal yang disebutkan terakhir ini dihubungkan dengan kurun waktu menjelang tahun 2000, maka, menurut hemat penulis, yang perlu dikaji ulang dan dimantapkan itu ialah peran bahasa Indonesia sebagai sarana pembangunan bangsa, sebagai sarana pengembangan iptek, dan sebagai sarana pembinaan kehidupan budaya bangsa.

Bahasa Indonesia dan Pembangunan Bangsa

Bahasa dan pembangunan bangsa memperlihatkan kesalingterkaitan yang sangat erat, sebagaimana yang dikilatkan melalui ungkapan "bahasa menunjukkan bangsa". Seberapa jauh tingkat dan intensitas kesalingterkaitan itu berbanding sejajar dengan besarnya sumbangan yang diberikan bahasa terhadap pembangunan bangsa itu sendiri. Kesalingterkaitan itu akan diwarnai oleh peran bahasa, terutama dalam pembinaan jati diri dan sistem nilai yang bercorak nasional. Dalam konteks Indonesia, hal itu akan dengan sendirinya tercerminkan melalui kekuatan atau daya rekat yang dimiliki bahasa Indonesia untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, budaya, dan bahasa yang berbeda menjadi kesatuan masyarakat yang lebih besar yang disebut bangsa Indonesia.

Dalam hubungan itu, perlu disinggung hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang jumlahnya ratusan itu. Hubungan itu dapat dilihat sekurang-kurangnya dari dua sisi, yaitu dari sisi bahasanya dan sisi para pemakainya. Dari segi bahasanya kita melihat adanya hubungan timbal balik antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam hal pemerayaan kosakata masing-masing. Bertambah kayanya kosakata bahasa Indonesia, antara lain, berasal dari berbagai bahasa daerah.² Demikian pula sebaliknya, bahasa daerah pun turun diperkaya kosakatanya oleh bahasa Indonesia.³

Sumbangan dari setiap bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia itu sudah barang tentu tidak berlangsung berdasarkan asas keadilan dan pemerataan. Asas itu justru harus dikembalikan pada kondisi objektif dari setiap bahasa daerah yang bersangkutan. Atas dasar itu, hanya bahasa daerah yang 'kuat' yang dapat memberikan sumbangannya terhadap bahasa Indonesia. Faktor kuatnya bahasa daerah itu dapat diamati, antara lain, dari jumlah penuturnya, seberapa jauh bahasa daerah itu menjadi sarana pendukung utama kebudayaan kelompok etnis yang bersangkutan, dan seberapa jauh bahasa daerah yang bersangkutan digunakan sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Dengan memperhatikan ketiga faktor itu, keberadaan bahasa-bahasa daerah haruslah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan pemerayaan kosakata dan pemantapan sistem bahasa Indonesia. Catatan yang patut ditambahkan ialah bahwa kata apa pun yang berasal dari bahasa daerah mana pun haruslah tunduk pada atau mengikuti kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Kalau apa yang baru saja dikemukakan berkenaan dengan masalah pengembangan, maka hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dilihat dari sisi para pemakainya merupakan masalah pembinaan. Dengan mengecualikan mereka yang belum/tidak dapat berbahasa Indonesia,⁴ pada umumnya dapat dikatakan bahwa penduduk Indonesia merupakan penutur yang bilingual karena di samping menguasai bahasa Indonesia, mereka juga dapat mengguna-

kan salah satu bahasa daerah sebagai bahasa ibunya. Penguasaan dua bahasa sekaligus oleh seseorang akan mengakibatkan kemungkinan terjadinya apa yang secara teknis disebut interferensi, baik interferensi yang bercorak gramatikal maupun leksikal.

Pengamatan terhadap kenyataan pemakaian bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa interferensi leksikal jauh lebih menonjol daripada yang gramatikal. Gejala itu jelas menggambarkan tidak/kurang cermatnya penutur yang bersangkutan dalam menggunakan bahasa Indonesia dan apabila secara kebetulan si lawan bicaranya tidak memahaminya, hal itu akan mengganggu kelancaran komunikasi. Kalau hal itu terjadi, bahasa yang digunakan tidak lagi efektif sebagai sarana komunikasi. Dalam skala nasional, cara berbahasa seperti itu hendaknya mendapat perhatian yang layak dari semua pihak yang berkepentingan agar gejala tersebut tidak sampai menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Masalah ini perlu kita sadari bersama karena dalam kerangka pembangunan nasional, jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar kedua setelah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara.⁵

Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa erat pula kaitannya dengan kualitas penduduknya. Dalam makalah ini kualitas penduduk itu dihubungkan dengan mutu atau tingkat penguasaan bahasa Indonesianya. Untuk itu, hasil sensus penduduk 1990 menggambarkan bahwa 15,07% dari penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari,⁶ sementara 67,80% tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka dapat berbahasa Indonesia (lihat pula Catatan 4). Secara keseluruhan berarti bahwa, menurut sensus terakhir itu, 82,87% dari penduduk Indonesia sudah dapat berbahasa Indonesia. Tanpa harus memperhitungkan seberapa jauh mutu atau tingkat penguasaan bahasa Indonesia mereka, karena sama sekali tidak terdapat indikator yang dapat digunakan untuk keperluan itu, dapatlah dikatakan bahwa angka 82,87% itu memperlihatkan banyaknya persentase penduduk Indonesia yang dapat menyerap dan memahami konsep-konsep dan informasi pembangunan yang disampaikan dengan bahasa Indonesia. Dari kelompok penduduk inilah sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan bangsa diharapkan dapat ditingkatkan.

Pemahaman sumber daya manusia yang potensial dan produktif dapat pula dikaitkan dengan peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang dan jenis pendidikan. Dunia pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mempersiapkan

sumber daya manusia yang potensial dan produktif itu. Setelah memasuki lapangan kerja, mereka juga berhadapan dengan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang digunakan secara lisan atau tertulis dalam melaksanakan tugasnya.

Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam rangka pembangunan bangsa. Agar pembangunan itu berhasil seperti yang direncanakan, bahasa Indonesia yang digunakan sebagai sarana komunikasinya perlu dikuasai secara mantap. Sampai pada tingkat tertentu bahkan tidak saja dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan sarana pembuka jalan ke dunia kerja, tetapi juga dapat disimpulkan bahwa penguasaan bahasa Indonesia seseorang akan berbanding seajar dengan bidang tugas atau pekerjaan yang terbuka bagi yang bersangkutan.

Bahasa Indonesia dan Pengembangan Iptek

Uraian di atas menyiratkan bahwa interaksi antara bahasa Indonesia pada satu pihak dan gerak serta laju pembangunan bangsa pada pihak lain harus memperlihatkan adanya keseimbangan. Keseimbangan itu mengandung arti bahwa gerak dan laju pembangunan yang berlangsung dinamis itu harus pula diimbangi oleh upaya pengembangan bahasa Indonesianya itu sendiri.

GBHN 1993 menyebutkan iptek sebagai salah satu asas pembangunan nasional yang perlu diperhatikan. Kalau asas ini dihubungkan dengan masalah sumber daya manusia, maka implikasinya ialah bahwa sumber daya manusia itu mutunya harus diukur berdasarkan tingkat penguasaannya terhadap iptek. Penguasaan iptek itu pada gilirannya harus pula diimbangi oleh penguasaan bahasa Indonesia sebagai sarana pengembangannya.

Kalau dalam hubungannya dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang perlu diperhatikan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, maka dalam hal pengembangan iptek perhatian itu hendaknya dipusatkan pada bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bahasa asing. Pengaitan dengan bahasa asing itu sekaligus menggambarkan kenyataan bahwa konsep-konsep iptek modern, sebagaimana yang dimaksudkan oleh GBHN 1993, pada umumnya berasal dari dunia barat dan oleh sebab itu masih tertulis dalam bahasa asing.⁷

Sehubungan dengan pemanfaatan dan kemungkinan pengembangannya, buku-buku atau tulisan-tulisan tentang iptek modern yang masih diungkapkan dalam bahasa asing haruslah diupayakan penyebarluasannya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, mengusahakan agar dalam bahasa Indonesia juga tersedia perangkat peristilahan yang menyangkut bidang iptek tersebut. Cara yang disebutkan pertama akan sangat bergantung pada hasil kerja cara kedua. Artinya, penerjemahan buku-buku iptek ke dalam bahasa Indonesia hanya dapat dilakukan kalau perangkat peristilahan itu sudah ada

padanannya dalam bahasa Indonesia.

Dengan demikian, upaya yang perlu dilakukan agar pengembangan bahasa Indonesia seimbang dengan gerak dan laju pembangunan di bidang iptek ialah penyusunan dan pembakuan istilahnya. Kalau perangkat peristilahan ini sudah tersedia secara memadai, maka tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia belum mampu berfungsi sebagai bahasa iptek. Bahkan, terlepas dari masalah peristilahan itu, bahasa Indonesia sebagai suatu sistem komunikasi sudah mantap untuk digunakan sebagai sarana pengungkap segala macam pikiran dan perasaan dengan berbagai nuansanya, termasuk konsep-konsep yang rumit sekalipun. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus tetap dibina dan dikembangkan agar menjadi bahasa modern yang ilmiah, indah dan lincah, serta kaya kosakatanya. Kekayaan kosakata ini mencakupi pula kosakata khusus yang lazim disebut istilah.

Penyusunan dan pembakuan istilah bidang iptek hendaknya dilakukan oleh para ahli di bidang yang bersangkutan bersama-sama dengan para ahli bahasa. Cara yang seperti inilah yang selama ini ditempuh oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam rangka pemerikayaan kosakata bahasa Indonesia, termasuk dalam hal penyediaan perangkat peristilahan di bidang iptek.⁸

Dengan demikian, kegiatan itu mutlak dilakukan dan bahkan harus lebih ditingkatkan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya para ahli di bidang/sub-bidang ilmu yang bersangkutan. Selain itu, penerbitan dan pemasaran daftar dan kamus istilah yang ditujukan kepada berbagai kelompok pemakai juga perlu mendapat perhatian utama. Para ahli dari berbagai perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, kalangan profesi, dan bahkan mereka yang bergerak dalam bidang industri dan niaga seyogianya sama-sama memikul beban tanggung jawab demi pemantapan peran bahasa Indonesia dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek.

Bahasa Indonesia dan Pembinaan Kehidupan Budaya Bangsa

Dalam rangka pembangunan bangsa yang memberikan penekanan pada pengembangan iptek, hal yang berkenaan dengan pembinaan kehidupan budaya bangsa juga perlu diperhatikan. Hal itu sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah digariskan, yaitu "mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual". Tujuan itu secara tersirat mengamanatkan adanya keseimbangan antara pembangunan di bidang materiil dan pembangunan di bidang spiritual. Pembinaan budaya bangsa termasuk ke dalam pembangunan di bidang spiritual.

Salah satu aspek budaya bangsa yang telah disebutkan pada makalah ini ialah jati diri dan sistem nilai yang bercorak nasional. Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, dapat dikatakan bahwa peran bahasa Indonesia dalam pembinaan jati diri dan sistem nilai yang bercorak nasional itu pada

gilirannya dapat juga ditafsirkan sebagai pembinaan kehidupan budaya bangsa. Kalau bahasa Indonesia tidak dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai alat komunikasi masyarakat bangsa, pertahanan kebangsaan dalam bentuk identitas dan sistem nilai itu akan makin rapuh. Bahasa Indonesia akan makin kehilangan daya rekatnya sebagai alat pemersatu.

Dalam konteks pembinaan kehidupan budaya bangsa ini, interaksi yang perlu diperhatikan tidak saja antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi juga antara bahasa Indonesia dan bahasa asing.⁹ Dalam hubungannya dengan bahasa daerah, pemakaian bahasa Indonesia dalam bidang kebudayaan harus dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas tentang puncak-puncak kebudayaan daerah yang didasari oleh nilai budaya daerah yang luhur. Persentuhan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah akan mengakibatkan dicorakinya kebudayaan nasional oleh ciri-ciri budaya daerah. Sebaliknya, persentuhan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing (lihat juga Catatan 9a dan 9c) akan membuat kebudayaan nasional itu agak bercorak mondial.

Berdasarkan kedua kecenderungan itu, bahasa Indonesia yang berperan dalam pembinaan budaya bangsa harus menampilkan diri, baik dalam sistem ketatabahasaannya maupun dalam kenyataan pemakaian bahasanya, sebagai filter yang akan menjaga keutuhan identitas dan sistem nilai yang bercorak nasional itu. Untuk itu, sejauh menyangkut pembinaan dan pengembangan bahasa, bahasa daerah dan bahasa asing harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memantapkan sistem dan pemerayaan kosakata bahasa Indonesia. Hal itu berarti bahwa unsur-unsur yang berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing itu, seperti yang telah dikemukakan, haruslah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia.

Penutup

Seberapa jauh pandangan dan harapan yang telah dikemukakan di atas, sehubungan dengan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, pengembangan iptek, dan pembinaan budaya bangsa, hal itu sepenuhnya akan terpulang pada masyarakat pemakainya secara keseluruhan. Sementara itu, yang perlu ditambahkan pada bagian akhir makalah ini ialah bahwa upaya apa pun yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa haruslah didasarkan pada perencanaan bahasa yang telah digariskan secara nasional.

Sebagai akibat dari begitu kompleksnya jaringan masalah kebahasaan di Indonesia karena adanya persentuhan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada satu pihak dan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing pada pihak yang lain, ditambah pula dengan tuntutan agar bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan,

maka perencanaan bahasa itu tidak semata-mata didasarkan pada eksistensi bahasa Indonesia sebagai sistem fonologi, gramatikal, dan semantis, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor nonkebahasaan seperti politik, pendidikan, iptek, kebudayaan, dan ekonomi.

Catatan

1. Ikrar ketiga Sumpah Pemuda itu berbeda dari ikrar pertama dan kedua, yang masing-masing menyatakan *pengakuan* terhadap tanah air yang satu dalam (tanah air Indonesia) dan terhadap bangsa yang satu (bangsa Indonesia). Sehubungan dengan bahasa Indonesia, formulasi ikrarnya bukan berupa pernyataan pengakuan terhadap bahasa yang satu (bahasa Indonesia), melainkan berupa pernyataan *tekad* untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal itu berarti bahwa bahasa-bahasa yang lain di luar bahasa Indonesia, yaitu bahasa-bahasa daerah, tetap diakui keberadaannya. Hal itu makin lebih dipertegas oleh penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara secara baik oleh rakyatnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.
2. Bertambahnya kosakata bahasa Indonesia itu jelas terlihat kalau, misalnya, kamus-kamus bahasa Indonesia yang terbit pada tahun 50-an dibandingkan dengan kamus bahasa Indonesia yang mutakhir seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Bahkan KBBI edisi II saja sudah memuat 72.805 kata. Hal ini berarti bahwa KBBI edisi II bertambah dengan 10.000 lebih kosakata baru karena KBBI edisi I hanya memuat 62.116 kata.
3. Digunakannya kata-kata seperti *radio*, *televisi*, *kalkulator*, dan *komputer* dalam bahasa-bahasa daerah jelas memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia turut memperkaya bahasa daerah karena keberadaan kata-kata tersebut dalam bahasa daerah tidak diperoleh secara langsung dari bahasa asingnya, tetapi pasti melalui pemakaiannya dalam bahasa Indonesia.
4. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, masih terdapat 27.005.488 orang (17,13% dari keseluruhan penduduk usia 5 tahun ke atas yang berjumlah 157.924.324 orang) yang tidak/belum dapat berbahasa Indonesia. Angka buta bahasa Indonesia ini cukup menarik kalau dihubungkan dengan penduduk Indonesia yang masih miskin yang jumlahnya juga 27 juta. Persoalannya ialah apakah betul ada korelasi antara buta bahasa Indonesia dan kemiskinan. Hal ini merupakan masalah yang perlu diteliti secara khusus.
5. Lihat GBHN 1993.
6. Kalau angka 15,07% itu dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1980 tentang kasus yang sama yang hanya memperlihatkan angka 11,93%, kenaikan angka tersebut menggembirakan karena memperlihatkan bertambahnya penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dalam

kehidupan sehari-hari. Sementara itu, terlihat adanya penurunan dalam hal pemakaian bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari 50,44% (sensus 1980) ke 38,08% (sensus 1990). Tampaknya ada hubungan yang timbal balik antara bertambahnya penutur bahasa Indonesia dan berkurangnya penutur bahasa Jawa itu. Khusus mengenai menurunnya angka persentase penutur bahasa Jawa, dapat dikemukakan semacam hipotesis bahwa generasi muda kelompok etnis Jawa, terutama yang tinggal di wilayah perkotaan, memperlihatkan kecenderungan untuk menghindarkan diri dan "lari" dari pemakaian bahasa Jawa sebagai akibat, antara lain, dari adanya tingkat-tingkat tutur pada bahasa daerah itu. Akibatnya, mereka lebih suka menggunakan bahasa lain yang lebih 'demokratis', yakni bahasa Indonesia. Kemungkinan penyebab lainnya ialah perbedaan kelompok etnis kedua orang tua mereka. Hipotesis ini perlu dibuktikan melalui penelitian.

7. Tidak semua konsep iptek menggunakan bahasa asing. Dalam hal iptek 'tradisional' yang menyangkut teknologi pembuatan batik atau keris, misalnya, konsep dalam bidang tersebut pasti diungkapkan dengan menggunakan kata/istilah bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Jawa.
8. Dalam penyusunan dan pembakuan istilah ini sejak tahun 1972 Indonesia bekerja sama dengan Malaysia melalui wadah kerja sama kebahasaan MBIM (Majelis Bahasa Indonesia–Malaysia). Dalam perkembangannya, wadah itu berubah menjadi Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia) karena sejak tahun 1985 Brunei Darussalam ikut bergabung sebagai anggota dan Singapura sebagai peninjau. Dalam rangka itu, pihak Indonesia telah menerbitkan 30 kamus istilah dan 4 daftar istilah komprehensif masing-masing untuk bidang ilmu kimia, fisika, matematika, dan biologi. Selain itu, menurut Johannes (1988), pada tahun 1942–1945 pernah pula ada satu badan khusus yang menangani istilah, yaitu Komisi Bahasa Indonesia.
9. Mengenai bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing ini GBHN 1993 dalam sektor kebudayaan mengemukakan sebagai berikut.
 - a. Pembinaan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga penggunaannya secara baik dan benar serta dengan penuh rasa bangga makin menjangkau seluruh masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantapkan kepribadian bangsa. Penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Pengembangan bahasa Indonesia juga terus ditingkatkan melalui upaya penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi sarana pengungkap cipta, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Penulisan karya ilmiah dan karya sastra termasuk bacaan anak yang berakar pada

- budaya bangsa, serta penerjemahan karya ilmiah dan karya sastra yang memberikan inspirasi bagi pembangunan budaya nasional perlu digalakkan untuk memperkaya bahasa, kesusastraan, dan pustaka Indonesia.
- b. Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media.
 - c. Kemampuan penguasaan bahasa asing perlu ditingkatkan dan dikembangkan untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain di segala aspek kehidupan terutama penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping memperluas cakrawala pandang bangsa sejalan dengan kebutuhan pembangunan.

4. BAHASA INDONESIA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengantar

Fungsi utama bahasa ialah sebagai alat komunikasi dan alat berpikir. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia dapat saling berhubungan dengan sesamanya, baik secara lisan maupun tertulis. Bahasa sebagai alat berpikir memungkinkan seseorang dapat mengembangkan berbagai macam gagasan tentang bidang-bidang kehidupan yang dihadapinya.

Komunikasi akan berlangsung secara efektif apabila para pelaku komunikasi yang bersangkutan menggunakan bahasa secara efektif pula. Bahasa yang dapat digunakan secara efektif, baik untuk keperluan komunikasi maupun dalam rangka proses berfikir, menggambarkan bahwa bahasa tersebut telah memiliki tingkat kemantapan yang tinggi.

Tingkat keefektifan bahasa sebagai sarana komunikasi berkorelasi dengan tingkat kemantapan bahasa yang bersangkutan sebagai suatu sistem yang mencakupi keseluruhan pola dan kaidah-kaidah kebahasaannya. Selain itu, seberapa luas khazanah perbendaharaan katanya juga merupakan faktor yang sangat menentukan. Makin beragam dan meningkatnya bidang kehidupan yang menjadi ranah pemakaian bahasa pada gilirannya akan mengisyaratkan bahwa keluasan khazanah perbendaharaan kata yang dimaksudkan harus dilengkapi pula dengan perangkat peristilahan yang diperlukan.

Kemantapan bahasa sebagai sarana komunikasi seharusnya mencerminkan kemantapan bahasa sebagai alat berpikir. Seberapa jauh kedua jenis kemantapan itu berkorelasi akan sangat bergantung kepada manusia pelakunya. Uraian pada tulisan ini dikemukakan berdasarkan asumsi bahwa bahasa yang dapat digunakan secara mantap sebagai alat komunikasi dan alat berpikir dapat memberikan dampak yang positif bagi upaya peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia.

Kemantapan Bahasa dan Kemantapan Berbahasa

Kemantapan bahasa perlu dibedakan dari kemantapan berbahasa. Yang secara singkat telah disinggung lebih banyak berkenaan dengan kemantapan bahasa. Adapun kemantapan berbahasa harus dilihat dari sisi para pemakai (bahasa)-nya. Untuk melihat perbedaan semacam itu diperlukan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengamati tingkat kemantapan tersebut. Dengan perkataan lain, yang perlu disimak lebih lanjut ialah faktor apa yang mempengaruhi kemantapan bahasa dan faktor apa pula yang turut menentukan kemantapan berbahasa.

Dasar pemikiran yang telah dikemukakan dapat digunakan untuk menjawab kedua jenis pertanyaan itu. Oleh karena itu, secara sederhana dapatlah dikemukakan bahwa kemantapan suatu bahasa berbanding sejajar dengan kemantapan bahasa yang bersangkutan sebagai alat komunikasi dan alat berpikir. Akibatnya, yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya ialah kemantapan sistem, keluasan khazanah perbendaharaan kata, dan tersedianya perangkat istilah untuk ranah pemakaian yang diperlukan.

Adapun kemantapan berbahasa dapat diamati berdasarkan mutu dan keterampilannya dalam menggunakan bahasa secara lisan ataupun tertulis. Mutu dan keterampilan berbahasa ini selain bersifat individual, juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, latar belakang pendidikan, minat, dan lingkungan.

Ukuran kemantapan itu tidak mungkin bersifat statis karena ia harus mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan setiap bidang kehidupan yang senantiasa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan dan perkembangan itu secara jelas memberikan pengaruh yang langsung terhadap bahasa yang digunakan dan hal itu terutama terlihat pada makin meningkatnya jumlah kata dan istilah.

Kenyataan itu pada gilirannya memunculkan persoalan yang cukup mendasar dalam hal penanganan masalah bahasa. Dengan menyadari diperlukannya upaya-upaya agar bahasa tetap mantap dan efektif sebagai alat komunikasi dan alat berpikir dalam menghadapi perubahan dan perkembangan berbagai bidang kehidupan yang menjadi ranah pemakaiannya, pertanyaan yang timbul ialah siapa yang harus tampil berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan (kalau perlu) mengevaluasi upaya-upaya tersebut.

Pertanyaan semacam itu patut diperhatikan sehubungan dengan adanya beberapa pandangan mengenai hal itu. Ada yang berpendapat bahwa karena bahasa itu pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kesepakatan atau konvensi masyarakat, pengelolaan bahasa hendaknya diserahkan saja kepada masyarakat pemakai bahasa yang bersangkutan. Pandangan lain menghendaki agar hal itu ditanggulangi oleh para pakar atau kelompok ahli bahasa dengan alasan merekalah yang paling kompeten dalam masalah itu. Sementara itu, mereka yang berpendapat bahwa upaya-upaya itu tidak dapat dipisahkan dari masalah perencanaan dan pelaksanaan yang perlu secara terus-menerus dikaji ulang cenderung menyerahkan masalah tersebut kepada lembaga tertentu yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

Dari ketiga jenis pandangan itu, yang paling tepat ialah adanya kerja sama di antara ketiga pihak yang disebutkan di atas. Kasus bahasa Indonesia dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasanya merupakan contoh yang dapat dikemukakan mengenai hal itu.

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Karena yang menjadi sasaran pembinaan bahasa ialah masyarakat pemakai bahasa dan yang menjadi sasaran pengembangan bahasa ialah bahasanya itu sendiri, maka dapatlah dikatakan bahwa pembinaan bahasa bersangkutan-paut dengan upaya pemantapan berbahasa, sedangkan pengembangan bahasa dengan upaya pemantapan bahasa.

Pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kedudukan bahasa Indonesia sekaligus sebagai bahasa Negara dan bahasa persatuan. Mengingat situasi kebahasaan di Indonesia, maka pembinaan bahasa itu tidak saja diupayakan dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa daerah dan pemakaian bahasa asing.

Pembinaan bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang berkenaan dengan usaha membudidayakan pemakaian bahasa agar para pemakai bahasa Indonesia memiliki sikap positif yang mencakup tiga unsur, yaitu kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dan kesadaran akan norma bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia itu dilakukan karena terdapat ketidakpadanan di dalam perilaku kebahasaan para penuturnya, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

Sehubungan dengan hal itu, pembinaan bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan untuk (1) mempertinggi mutu pemakaian, (2) meningkatkan sikap positif, dan (3) mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penerapan dan penggunaannya perlu terus ditingkatkan dan diperluas sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pembinaan bahasa daerah, baik sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia, maupun sebagai salah satu unsure kebudayaan nasional dan alat perhubungan dalam lingkungan masyarakat daerah, perlu dilaksanakan seiring dengan pembinaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain melestarikan sikap positif terhadap bahasa daerah, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, pembinaan bahasa daerah juga bertujuan memotivasi masyarakat khususnya generasi muda, agar mereka tetap memelihara, menghormati, dan menggunakan bahasa daerah dalam situasi dan konteks pemakaian yang tepat.

Berbeda dari pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pembinaan bahasa asing harus diartikan sebagai pembinaan terhadap pemakai bahasa asing agar peningkatan penguasaan bahasa asing di Indonesia ditujukan untuk (1) memperluas cakrawala berpikir, (2) memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) meningkatkan kemampuan berkomunikasi

dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan terhadap bahasa asing di Indonesia hendaknya diupayakan agar pemakaian bahasa asing itu tidak akan mengurangi kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Dalam kenyataannya, upaya pembinaan bahasa, terutama pembinaan bahasa Indonesia, menghadapi berbagai macam kendala, seperti (1) perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah, (2) tingkat keniraksaraan penduduk yang masih cukup tinggi, (3) kelangkaan penutur anutan yang dapat diteladani, (4) adanya bahasa asing yang bergengsi sosial di dalam masyarakat, dan (5) kurang adanya motivasi untuk meningkatkan penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa perubahan dan perkembangan struktur sosial, terutama di daerah perkotaan, cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembinaan bahasa daerah. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar pembinaan bahasa daerah dilakukan atas dasar "semangat" yang saling menunjang dengan pembinaan bahasa Indonesia. Sementara itu, pemakaian bahasa asing di Indonesia mengakibatkan timbulnya kendala yang cukup serius bagi upaya pembinaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kendala itu terutama berkenaan dengan adanya anggapan atau penilaian pada sebagian anggota masyarakat bahwa bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia.

Pengembangan bahasa Indonesia diarahkan kepada upaya pemodernan bahasa itu. Pemodernan bahasa dapat diartikan sebagai upaya pemutakhiran atau pemantapan bahasa Indonesia sehingga serasi dengan tuntutan dan keperluan komunikasi dewasa ini dalam berbagai bidang kehidupan, seperti Industri, perniagaan, teknologi, dan pendidikan lanjutan.

Sejalan dengan hal itu, pengembangan bahasa Indonesia perlu dilakukan melalui upaya penelitian, pemantapan kaidah-kaidah kebahasaan, pembakuan peristilahan, dan pemekaran perbendaharaan kata dan istilah sehingga bahasa Indonesia benar-benar dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana komunikasi dan sarana berpikir. Upaya yang disebutkan terakhir, yaitu pemekaran perbendaharaan kata dan istilah, pada gilirannya akan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi karena kata dan istilah tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan, antara lain, dalam penulisan berbagai karangan ilmiah, penyusunan buku teks, dan penerjemahan.

Sehubungan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa itu, Pusat Bahasa boleh dikatakan telah memberikan perhatian dan melaksanakan kegiatan dalam porsi dan intensitas yang sama. Akan tetapi, hasil kedua jenis kegiatan itu belum memperlihatkan hasil yang sama-sama menggembirakan. Upaya pembinaan tampaknya masih harus terus ditingkatkan, bukan semata-mata karena belum terbinanya sikap positif pada masyarakat pemakai bahasa,

melainkan juga karena masih derasnya arus interferensi, baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah.

Keadaan dan Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia dalam Pembangunan Jangka Panjang II memperoleh porsi perhatian yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hal yang sama pada masa pembangunan 25 tahun sebelumnya. Dalam konteks yang demikian, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap mutu sumber daya manusia di Indonesia ialah keterampilan memahami dan menggunakan bahasa Indonesia.

Untuk memperoleh gambaran mengenai hal itu, perlu diperhatikan beberapa faktor yang diperkirakan memberikan pengaruh, secara langsung ataupun tidak langsung, terhadap tingkat kemampuan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia tersebut. Di antara faktor-faktor itu, dapat disebutkan tiga hal, yaitu (1) pemakaian bahasa tertentu sebagai bahasa sehari-hari, (2) kemampuan membaca dan menulis, dan (3) tingkat pendidikan.

a. Pemakaian Bahasa Sehari-hari.

Hasil sensus penduduk tahun 1990 mengenai pemakaian bahasa sehari-hari oleh anggota masyarakat Indonesia yang berusia lima tahun ke atas memperlihatkan adanya tiga kelompok masyarakat: (1) masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari yang berjumlah 23.802.520 orang (15,07%), (2) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (tetapi dapat memahami dan menggunakannya) yang berjumlah 107.066.316 orang (67,80%), dan (3) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya yang berjumlah 27.055.488 orang (17,13%).

Hasil sensus itu memperlihatkan bahwa masih cukup banyak penduduk Indonesia (17,13%) yang belum dapat menyerap informasi pembangunan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 1980 mengenai hal yang sama, angka-angka tersebut di atas cukup menggembirakan, terutama dilihat dari bertambahnya jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan berkurangnya jumlah penduduk Indonesia yang tidak memahami bahasa Indonesia. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980, ketiga kelompok masyarakat itu adalah sebagai berikut: (1) masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 17.505.303 orang (11,93%), (2) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (tetapi dapat memahami dan menggunakannya) berjumlah 71.758.926 orang (48,89%), dan (3) masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena

tidak memahaminya berjumlah 57.512.244 orang (39,18%). Perbandingan antara hasil sensus penduduk tahun 1990 dan 1980 mengenai pemakaian bahasa ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Kenyataan itu mengisyaratkan bahwa upaya pemberantasan buta bahasa Indonesia perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, antara lain, melalui jalur pemasyarakatan bahasa Indonesia ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991, tanggal 28 Oktober 1991, tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Instruksi ini ditindaklanjuti oleh Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992, tanggal 10 April 1992.

Bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk Indonesia yang buta bahasa Indonesia itu boleh dikatakan berbanding sejajar dengan bertambah dan berkurangnya jumlah penutur bahasa-bahasa daerah tertentu, sebagaimana yang dapat diamati melalui angka-angka pada Tabel 2.

Tabel 1
Penduduk Indonesia Usia 5 Tahun ke Atas
menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Kelompok	Sensus 1980		Sensus 1990	
	Jumlah	%	Jumlah	%
I	17.505.3	11,93	24.042.0	15,19
II	71.758.9	48,89	107.066.	67,65
III	57.512.2	39,18	27.154,4	17,16
Jumlah	146.776	100,00	158.262.	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

Keterangan

- Kelompok I : menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
 Kelompok II : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat memahami dan menggunakannya.
 Kelompok III : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya.

Tabel 2
Bahasa-bahasa di Indonesia dan
Jumlah Penuturnya

No	Nama Bahasa	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penutur	%	Jumlah Penutur	%
1.	Indonesia	17.505.3	11,93	24.042.	15,19
2.	Jawa	59.357.0	40,44	60.267.	38,08
3.	Sunda	22.110.4	15,06	24.155.	15,26
4.	Madura	6.913.97	4,71	6.792.4	4,29
5.	Batak	3.106.97	2,12	3.120.0	1,97
6.	Minang	3.545.92	2,42	3.527.7	2,23
7.	Bali	2.481.24	1,69	2.589.2	1,64
8.	Bugis	3.322.19	2,26	3.228.7	2,04
9.	Banjar	1.661.79	1,13	2.755.3	1,74
10.	Lainnya	25.653.3	17,48	27.070.	17,11
11.	Tak	1.118.23	0,76	712.629	0,45
	Jumlah	146.776.	100,00	158.262	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

b. Kemampuan Membaca dan Menulis.

Tingkat penguasaan bahasa seseorang ditentukan, antara lain, oleh kemampuan dan keterampilannya membaca dan menulis. Sebagai sebuah negara yang rata-rata penduduknya tergolong dwibahasawan, terutama sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, hal itu dapat ditelusuri. Dalam hal penguasaan bahasa Indonesia, alat ukurnya ialah kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis aksara Latin karena dalam sistem pendidikan di Indonesia bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Indonesia dan aksara atau huruf yang dipakai ialah huruf Latin.

Berdasarkan alat ukur itu, dengan memperhatikan hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 seperti yang tampak pada Tabel 3 hlm 170, ada dua hal yang perlu dicatat, yakni bertambahnya penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis huruf Latin serta berkurangnya penduduk Indonesia yang buta aksara.

Tabel 3
Penduduk Indonesia Usia 10 Tahun ke Atas
dan Kepandaian Membaca dan Menulis

No.	Membaca dan Menulis	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Huruf Latin	72.670.8	69,64	111.365.8.	82,47
2.	Huruf Lain	1.514.49	1,45	2.145.277	1,59
3.	Buta Aksara	30.096.5	28,84	21.494.11	15,92
4.	Tak	70.635	0,07	34.360	0,02
Jumlah		104.352.	100,00	135.039.5	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

c. Tingkat Pendidikan

Selain dengan kemampuan dan keterampilan membaca dan menulis huruf Latin, seperti yang telah dikemukakan di atas, tingkat penguasaan bahasa Indonesia juga berhubungan dengan latar belakang pendidikan penutur yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal itu, dapat dikatakan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan makin tinggi pula tingkat penguasaan bahasa Indonesiannya, baik penguasaan bahasa Indonesia tulisan maupun bahasa Indonesia lisan. Sebaliknya, makin rendah tingkat pendidikan seseorang akan makin rendah pula penguasaan bahasa Indonesiannya. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, seperti yang terlihat pada Tabel 4 hlm 171, dari penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas yang berjumlah 135.038.185 orang, hal yang disebutkan terakhir ini dapat diamati terutama pada kelompok penduduk yang belum pernah duduk di bangku sekolah yang jumlahnya 21.952.791 orang (16,26%).

Tabel 4
Penduduk Indonesia Usia 10 Tahun ke Atas
dan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
1.	Belum Pernah Sekolah	21.952.791	16,26
2.	Tidak/Belum Tamat SD	42.480.415	31,46
3.	SD	40.996.434	30,36
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
4.	SLTP Umum	13.392.558	9,92
5.	SLTP Kejuruan	1.088.539	0,80

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
6.	SLTA Umum	7.882.905	5,84
7.	SLTA Kejuruan	5.204.538	3,85
8.	Diploma I/II	352.505	0,26
9.	Akademi/Diploma III	700.801	0,52
10.	Universitas	986.699	0,73
Jumlah		135.038.185	100,00

Bahan: Biro Pusat Statistik

Dari paparan tentang ketiga faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa Indonesia itu, kalau secara khusus diperhatikan hasil sensus penduduk tahun 1990, maka tampaknya dapat diperkirakan bahwa ada korelasi antara kelompok penduduk yang tidak dapat berbahasa Indonesia (17,13%), penduduk yang buta aksara (15,92%), dan penduduk yang tidak pernah bersekolah (16,26%).

Selain itu, perlu juga dicatat bahwa penduduk Indonesia usia 10 tahun ke atas lebih banyak yang tinggal di pedesaan daripada di kota-kota: 79.605.791 orang (64,91%) di pedesaan dan 43.040.719 orang (35,09%) di kota-kota.

Penutup

Upaya pemantapan bahasa dan pemantapan berbahasa dengan demikian perlu dilakukan secara terus menerus berdasarkan perencanaan yang terpadu dan terarah. Kendala pengembangan bahasa, terutama yang berkenaan dengan upaya penyebarluasan atau pemasyarakatan hasilnya, perlu diperhatikan. Demikian pula halnya dengan kendala yang dihadapi oleh pembinaan bahasa, terutama sikap yang kurang menguntungkan dari para "tokoh" pemakai bahasa, yang masih merupakan tantangan yang perlu dihadapi secara lebih ber-sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, Pusat Bahasa perlu meningkatkan upayanya dalam meng-galang dan membina kerja sama dengan semua pihak, baik lembaga maupun perseorangan, termasuk dengan kelompok ahli dari perguruan tinggi, organisasi kebahasaan/kesastraan dan organisasi profesi lainnya, para guru, kalangan media massa, para pengambil keputusan di lingkungan pemerintahan, dan tokoh masyarakat.

Catatan:

1. Peningkatan jumlah kata dan istilah itu dapat diamati, antara lain, melalui kamus-kamus bahasa Indonesia sebagai berikut.
 - a. *Kamus Indonesia* (1951) oleh E. St. Harahap: 21.119 kata
 - b. *Kamus Modern Bahasa Indonesia* (1954) oleh St. Moh. Zain: 39.738 kata

- c. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1976) oleh W.J.S. Poerwadarminta: 48.004 kata
 - d. *Kamus Bahasa Indonesia* (1983) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 55.406 kata
 - e. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi I (1988) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 62.116 kata
 - f. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II (1991) oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 73.024 kata
2. Lihat Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.
 3. Ketidaksamaan hasil kedua jenis kegiatan itu diakibatkan oleh tidak mungkinnya dilakukan pengukuran secara tepat terhadap hasil Pembinaan bahasa. Berbeda halnya dengan hasil pengembangan bahasa yang dapat dikuantifikasi. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa melalui jaringan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan badan-badan lain di dalam dan di luar negeri, Pusat Bahasa telah meneliti 241 bahasa daerah yang mencakupi 749 topik bahasa dan 188 topik sastra. Dalam hal peristilahan berbagai bidang ilmu telah dihasilkan kurang lebih 190.000 istilah yang beberapa di antaranya diolah lebih lanjut menjadi kamus istilah untuk bidang/ subbidang ilmu tertentu. Selain itu, telah pula diperoleh sejumlah buku pedoman, dua buah buku tata bahasa, dan beberapa kamus ekabahasa (lihat Catatan 1) dan 54 kamus bahasa daerah-Indonesia.

5. PEMASYARAKATAN BAHASA INDONESIA¹⁾

Pemasyarakatan bahasa Indonesia merupakan salah satu kegiatan utama dan sangat strategis yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sebelum membahas lebih lanjut hal yang berkenaan dengan "apa dan bagaimana" pemasyarakatan bahasa Indonesia itu, perlu dikemukakan secara singkat terlebih dahulu beberapa hal yang berkenaan dengan instansi pelaksana kegiatan tersebut.

Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa berkedudukan sebagai pelaksana tugas di bidang penelitian dan pengembangan bahasa yang berada langsung di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Hal itu tercantum di dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 079/0 Tahun 1975, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222g/0 Tahun 1980. Dalam kedudukannya yang demikian, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pembinaan, dan pengembangan bahasa dan sastra berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai tiga fungsi, yaitu: (1) merumuskan kebijaksanaan Menteri dan kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan bahasa; (2) melaksanakan penelitian dan pengembangan bahasa serta membina unit pelaksana teknis penelitian bahasa di daerah; dan (3) melaksanakan urusan tata usaha pusat.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi tersebut, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dengan porsi perhatian dan tingkat intensitas yang sama. Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan bahasa lebih banyak dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan daripada kegiatan pengembangan bahasa. Tantangan dan hambatan itu terutama diakibatkan oleh tidak mungkinnya membuat kuantifikasi terhadap hasil pembinaan bahasa, yang bertujuan meningkatkan sikap positif masyarakat pemakai terhadap bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan, sesuai dengan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, maupun sebagai bahasa resmi atau bahasa negara, sesuai

¹⁾ Rapat Koordinasi Proyek, Arga Mulya, Oktober 1995.

dengan Pasal 36 UUD 1945. Hal itu berbeda dari pengembangan bahasa yang bertujuan memantapkan kaidah bahasa dan memperkaya khazanah perbendaharaan kata, melalui berbagai kegiatan penelitian yang berkenaan baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Hasil kegiatan pengembangan bahasa ini, yang antara lain berupa buku tata bahasa, buku pedoman, dan kamus, jelas dapat dikuantifikasi sehingga tingkat keberhasilannya boleh dikatakan dapat diukur. Dengan demikian, perbedaan antara kedua jenis kegiatan itu terletak pada sasarannya. Yang menjadi sasaran pembinaan adalah masyarakat pemakai bahasa, sedangkan sasaran pengembangan ialah bahasanya itu sendiri sebagai alat komunikasi yang disepakati oleh masyarakat pemakai yang bersangkutan.

Berdasarkan perbedaan itu, pemasyarakatan bahasa Indonesia yang menjadi topik bahasan dalam tulisan ini jelas merupakan salah satu bentuk kegiatan pembinaan bahasa. Menurut apa yang tersurat dan tersirat dalam (sejenis slogan) "bahasa Indonesia yang baik dan benar", yang dimasyarakatkan itu tidak saja bahasa Indonesia yang baik, yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks atau situasi pemakaian bahasa, tetapi juga sekaligus bahasa Indonesia yang benar, yaitu bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau norma bahasa. Jadi, bahasa Indonesia yang benar tidak dengan sendirinya dapat disebut bahasa Indonesia yang baik. Sebaliknya, bahasa yang baik tidak secara otomatis identik dengan bahasa Indonesia yang benar. Ketidakmungkinan menyamakan pengertian antara bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar itu terutama diakibatkan oleh begitu banyaknya ragam pemakaian bahasa Indonesia tulis yang memang memperlihatkan ciri-ciri perbedaan jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia lisan yang juga memiliki sejumlah ragam pemakaian.

Pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan demikian merupakan upaya nyata ke arah tercapainya tujuan pembinaan bahasa, yaitu—seperti yang telah disinggung di atas—meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, di samping kesadarannya akan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Dengan sikap positif yang demikian, diharapkan bahwa masyarakat akan dapat menggunakan bahasa Indonesia secara efektif dan efisien dalam setiap bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan ke arah itu diupayakan melalui peningkatan mutu dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia. Atas dasar itu, yang menjadi sasaran pemasyarakatan bahasa Indonesia adalah penduduk Indonesia yang sudah dapat menggunakan bahasa Indonesia.

Menurut sensus penduduk tahun 1990, penduduk Indonesia usia lima

tahun ke atas yang berjumlah 158.262.639 orang dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok I, yaitu penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, berjumlah 24.042.010 orang (15,19%). Kelompok II, yaitu penduduk yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat memahami dan menggunakannya, berjumlah 107.066.141 orang (67,65 %). Kelompok III, yaitu penduduk yang sama sekali tidak dapat berbahasa Indonesia, berjumlah 27.154.488 orang (17,16%). Dari laporan Biro Pusat Statistik mengenai hal itu, sama sekali tidak ada data yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa bahasa Indonesia Kelompok I lebih baik daripada Kelompok II. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemakaian bahasa Indonesia sebagian orang Kelompok II lebih baik daripada sebagian orang Kelompok I. Demikian pula halnya dengan kemungkinan yang sebaliknya. Hal itu berarti bahwa yang perlu diperhitungkan sebagai sasaran pemasyarakatan bahasa Indonesia ialah penduduk yang termasuk Kelompok I dan Kelompok II, yaitu sebanyak 131.108.151 orang (82,84 %).

Kelompok sasaran pemasyarakatan bahasa Indonesia yang secara kuantitatif sangat besar itu menjadi lebih kompleks permasalahannya bila dikaitkan, antara lain, dengan latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan atau profesi yang bersangkutan. Ciri keheterogenan ini tidak saja mengakibatkan berbedanya mutu dan tingkat keterampilan mereka dalam berbahasa Indonesia, tetapi juga sekaligus menimbulkan perbedaan tingkat keperluan, kepentingan, dan kepedulian mereka terhadap bahasa Indonesia.

Tantangan lain yang dihadapi erat kaitannya dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakainya dilindungi dan dibina juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup. Hal itu berarti bahwa upaya pembinaan yang harus dilakukan tidak boleh terbatas hanya pada bahasa Indonesia, tetapi juga harus mencakupi bahasa daerah. Angka yang pasti mengenai jumlah bahasa daerah di Indonesia ini belum ada. Sebagian ahli mengemukakan ada $\pm$ 400 bahasa daerah di Indonesia. Penelitian mengenai hal itu tengah dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bekerja sama dengan para ahli dari perguruan tinggi.

Sebagai kebudayaan nasional yang hidup, bahasa-bahasa daerah itu perlu ditangani secara berencana, terarah, dan terpadu sehingga tidak menimbulkan pertumpangtindihan kepentingan dengan bahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, penanganan bahasa daerah dan bahasa Indonesia harus diupayakan sedemikian rupa sehingga di antara keduanya terjalin hubungan yang saling menunjang. Pertanyaan yang timbul ialah apakah kita sudah siap untuk melakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang oleh sementara ahli disebutkan berjumlah $\vee$ 400 buah itu.

Tugas yang sangat berat itu seyogianya dilakukan oleh unit pelaksana teknis Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di setiap provinsi. Akan tetapi, Balai Penelitian Bahasa yang merupakan unit pelaksana teknis itu baru terdapat di tiga tempat, yaitu di Yogyakarta, Ujungpandang, dan Denpasar. Untuk menangani masalah bahasa daerah secara keseluruhan, pendirian atau pengadaan Balai Penelitian Bahasa di setiap provinsi itu harus sama-sama kita sadari sebagai kebutuhan yang mendesak.

Upaya pembinaan bahasa Indonesia (termasuk bahasa daerah) yang dilandasi oleh keinginan untuk menjawab kedua jenis tantangan itu menjadi sangat tidak mungkin untuk dilakukan hanya oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, mengingat adanya sejumlah kendala dan keterbatasan, antara lain yang menyangkut tenaga, dana, dan kewenangan dalam arti yang luas. Oleh karena itu, apa yang tercantum dalam GBHN 1993 mengenai perlunya meningkatkan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat, mengingat kendala dan keterbatasan tersebut, perlu dilakukan melalui kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan berbagai pihak. Salah satu pihak yang sangat strategis untuk keperluan itu ialah Pemerintah Daerah Tingkat 1.

Keinginan untuk melakukan pemasyarakatan bahasa Indonesia dengan cakupan sasaran yang seluas-luasnya sambil sekaligus menangani bahasa-bahasa daerah itu seakan-kan memperoleh tiupan angin segar dan darah baru dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Rangka Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Instruksi yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 1991 itu ditujukan kepada para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Walikotamadya, dan Camat Kepala Wilayah di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia sebagai bagian dari upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam instruksi itu disebutkan bahwa puncak kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan bahasa Indonesia itu diintegrasikan dengan kegiatan Bulan Bahasa yang selama ini dilaksanakan pada bulan Oktober setiap tahun.

Karena tembusan instruksi itu antara lain dialamatkan kepada para Menteri Kabinet Pembangunan V, Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan meminta laporan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengenai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam bidang pemasyarakatan bahasa Indonesia. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dibahas dalam rapat pimpinan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Keputusan rapat pimpinan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah (1) mendukung Instruksi Menteri Dalam Negeri dan (2) perlu ada

Instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk melaksanakan pemasyarakatan bahasa Indonesia.

Setelah kedua masalah itu dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tanggal 10 April 1992 keluar Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992, ditujukan kepada Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa agar meningkatkan usaha pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui penyuluhan bahasa Indonesia kepada masyarakat, dengan tujuan memupuk sikap masyarakat agar: (1) memiliki sikap positif terhadap bahasa nasional dan bahasa negara; (2) memiliki kebanggaan nasional terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa nasional, dan sarana komunikasi sebagai salah satu sarana untuk memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa; dan (3) memiliki wawasan yang luas tentang kebahasaan. Selain itu, disebutkan pula bahwa Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu menyusun program pemasyarakatan bahasa Indonesia dengan cara-cara yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengadakan rapat pimpinan untuk membicarakan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka menindaklanjuti instruksi tersebut. Persoalan yang dibahas adalah sebagai berikut.

1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa belum mempunyai Balai Penelitian Bahasa di daerah (kecuali di Yogyakarta, Ujungpandang, dan Denpasar seperti yang telah disebutkan di atas).
2. Dana dan tenaga yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk pemasyarakatan bahasa Indonesia itu sangat terbatas.
3. Sehubungan dengan terbatasnya tenaga, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu memanfaatkan sebaik-baiknya tenaga yang tersedia di berbagai perguruan tinggi.

Yang dimaksudkan dengan tenaga dari perguruan tinggi adalah tenaga pengajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi seluruh Indonesia, baik yang terdapat di universitas maupun IKIP dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sudah barang tentu dalam tahap awal ini tidak semua tenaga pengajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi dapat segera dimanfaatkan. Perlu ditemukan semacam alat ukur dalam melakukan pemilihan untuk keperluan itu. Alat ukur atau kriteria yang kemudian digunakan ialah pengajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang pernah terlibat dalam berbagai kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kegiatan yang paling menonjol ialah penataran

kebahasaan dan kesastraan yang dilaksanakan pada kurun waktu 1974--1984 oleh ILDEP (*Indonesian Linguistics for Development Project*), suatu wadah kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Universitas Leiden, Negeri Belanda. Melalui kegiatan penataran dan pelatihan penelitian yang diadakan di Indonesia dan yang kemudian diteruskan dengan pendidikan pascasarjana di Universitas Leiden, di antara mereka itu sudah banyak banyak yang meraih gelar doktor di berbagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. Tidak sedikit pula di antara mereka yang berhasil itu bahkan sekarang ini telah diangkat menjadi guru besar. Mereka itulah yang diprioritaskan sebagai mitra Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di daerah dalam rangka melaksanakan pemasyarakatan bahasa Indonesia itu.

Setelah diadakan diskusi dalam rapat pimpinan itu, kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu melakukan kerja sama dengan para gubernur/kepala daerah tingkat 1.
2. Kerja sama itu akan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemampuan daerah dan tersedianya tenaga.
3. Untuk setiap daerah perlu ditunjuk seorang koordinator yang antara lain akan bertugas sebagai penghubung antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan gubernur/kepala daerah tingkat 1.
4. Koordinator yang ditunjuk adalah tenaga dari perguruan tinggi dengan kriteria yang telah dikemukakan di atas.

Segera setelah rapat pimpinan itu, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengirimkan surat kepada calon koordinator dan ternyata mereka semuanya menyambut dengan baik permintaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu. Untuk memberikan penjelasan dan informasi lebih lanjut mengenai rencana pemasyarakatan bahasa Indonesia di daerah itu, pada bulan Juli 1992 diadakan Rapat Koordinasi yang pertama. Pada pertemuan itu hadir 17 koordinator yang mewakili 17 provinsi, yaitu dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Sehubungan dengan hal itu, perlu dikemukakan catatan mengenai DKI Jakarta dan 9 provinsi lainnya. Kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan DKI Jakarta sudah diresmikan sebelum Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dikeluarkan, yaitu pada tanggal 18 Februari 1989. Mengenai Balai Penelitian Bahasa, hal itu tidak diperlukan untuk DKI Jakarta karena sudah ada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berkedudukan di Jakarta. Sementara itu, 9 provinsi lainnya, yaitu Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Irian Jaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur, merupakan

daerah binaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Artinya, pemasyarakatan bahasa Indonesia di 9 provinsi itu sepenuhnya ditangani oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, baik tenaga maupun dananya, sehingga kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan untuk sementara masih belum diperlukan. Akan tetapi, di dalam perkembangannya kemudian, Gubernur Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk bekerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kembali kepada Rapat Koordinasi bersama dengan 17 orang koordinator itu, kesepakatan yang dicapai adalah sebagai berikut.

1. Para koordinator mendukung usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.
2. Para koordinator akan mengadakan pembicaraan dengan pemerintah daerah.
3. Para koordinator menyetujui konsep piagam kerja sama yang akan dibicarakan dengan pihak pemerintah daerah tingkat I yang bersangkutan.

Adapun isi konsep piagam kerja sama itu berkisar pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Kerja sama bertujuan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mengembangkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia di kalangan warga masyarakat provinsi daerah tingkat I.
2. Program kerja dan kegiatan kerja sama meliputi:
 - a. penyuluhan bahasa Indonesia untuk berbagai lapisan masyarakat;
 - b. penyegaran keterampilan berbahasa;
 - c. penataran tentang penyusunan berbagai naskah dinas dan naskah pidato; dan
 - d. penertiban penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum, seperti pada papan nama, iklan, papan petunjuk, rambu lalu lintas, dan kain rentang.
3. Sarana/prasarana untuk melaksanakan kegiatan pada angka 2 di atas diatur sebagai berikut.
 - a. Pemerintah provinsi daerah tingkat I dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyediakan fasilitas dan dana.
 - b. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyediakan tenaga ahli untuk melaksanakan penyegaran keterampilan berbahasa, penataran, dan penyuluhan.
 - c. Pemerintah daerah provinsi daerah tingkat I mendukung usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam hal pendirian Balai Penelitian Bahasa di provinsi daerah tingkat I.

4. Kerja sama ini dikelola oleh suatu tim yang anggotanya mewakili Pemerintah daerah tingkat I, kantor wilayah departemen pendidikan dan kebudayaan, dan tenaga yang ditunjuk oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Enam bulan kemudian, yaitu pada bulan Januari 1993, diadakan Rapat Koordinasi yang kedua, terutama untuk membahas laporan dari para koordinator setelah mereka melakukan pembicaraan dengan pihak pemerintah daerah tingkat I. Dari laporan yang disampaikan, diketahui bahwa pada dasarnya pemerintah daerah tingkat I menyambut dengan gembira rencana Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk mengadakan kerja sama itu. Untuk itu, pemerintah daerah tingkat I perlu mempelajari dan menyimak lebih lanjut konsep piagam kerja sama yang ditawarkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dalam rapat koordinasi yang kedua itu para koordinator juga menyepakati bentuk organisasi tim kerja sama yang dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan keperluan dan kondisi setempat.

Berdasarkan laporan dari para koordinator itu, pada tanggal 9 Juni 1993 Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa secara resmi mengirimkan surat kepada gubernur/kepala daerah tingkat I untuk menyampaikan rencana kerja sama tersebut dengan catatan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan kerja sama itu dapat dibicarakan dengan koordinator yang telah ditunjuk oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk provinsi yang bersangkutan.

Sampai saat ini sudah 14 gubernur/kepala daerah tingkat I yang menandatangani piagam kerja sama tersebut, yaitu Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, DI Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Lampung. Provinsi Bali memutuskan untuk tidak mengadakan kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena Pemerintah Daerah Tingkat I Bali telah secara khusus menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri itu dengan melakukan kerja sama dengan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bali dan Balai Penelitian Bahasa di Denpasar. Sementara itu, kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah diharapkan dapat diresmikan sebelum tahun anggaran 1994/1995 berakhir.

Dengan ditandatanganinya piagam kerja sama itu, jelas diperlukan koordinasi yang mantap antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, koordinator, dan pemerintah daerah tingkat I. Sehubungan dengan itu, setiap tahun diadakan rapat koordinasi sebanyak dua kali untuk membahas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, pada rapat koordinasi

itu setiap daerah diwakili oleh dua orang, yaitu seorang koordinator dan seorang wakil dari pemerintah daerah tingkat I.

Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I sangat berpengaruh kepada masalah ketenagaan dan dana. Tenaga teknis Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa saat ini berjumlah 158 orang dengan latar belakang pendidikan sarjana bahasa atau sastra. Tenaga yang memenuhi kualifikasi sebagai penyuluh baru berjumlah 34 orang, 15 orang di antaranya merupakan tenaga senior, sedangkan selebihnya belum memiliki pengalaman menyuluh secara memadai. Untuk mengatasi masalah ini, pimpinan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

1. Mengadakan penataran penyuluh bagi tenaga teknis Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Balai Penelitian Bahasa.
2. Mengadakan penataran penyuluh yang diikuti oleh pengajar bahasa Indonesia perguruan tinggi dari daerah.
3. Membentuk jaringan komunikasi antara penyuluh di daerah dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Masalah dana merupakan kendala yang cukup serius. Akan tetapi, sesuai dengan salah satu butir yang tercantum dalam piagam kerja sama, dana pemasyarakatan bahasa Indonesia itu ditanggung secara bersama-sama oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (melalui APBN) dan Pemerintah Daerah Tingkat I (melalui APBD). Se jauh yang menyangkut bahan penyuluhan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah sejak lama menyusun dan menerbitkan sejumlah buku Seri Penyuluhan, antara lain yang berkaitan dengan materi ejaan, pilihan kata (diksi), struktur kalimat/paragraf, komposisi, dan surat-menyurat.

Akhirnya, pada tulisan ini perlu pula ditambahkan satu hal lagi yang berkenaan dengan upaya lebih memantapkan koordinasi yang selama ini sudah terbina dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia itu. Yang dimaksudkan ialah keterlibatan secara aktif pihak Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, dalam berbagai kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia, termasuk dalam Rapat Koordinasi. Upaya ke arah itu didukung sepenuhnya oleh semua wakil Pemerintah Daerah Tingkat I sehingga pada Rapat Koordinasi yang akan diselenggarakan pada bulan April 1995 nanti Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah itu diharapkan sudah dapat mengirimkan wakilnya.

6. KEBIJAKAN BAHASA^{*)}

Pengantar

Kebijakan bahasa di Indonesia dari segi substansinya harus berciri multilingual karena selain bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya sampai sekarang belum diketahui secara tepat,¹ kenyataan menunjukkan bahwa bahasa asing,² terutama bahasa Inggris, juga digunakan di Indonesia. Hal itu berarti bahwa kebijakan bahasa di Indonesia haruslah didasarkan pada ketiga jenis bahasa itu dengan memperhatikan kedudukan dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan tema seminar yang diadakan dalam rangka memperingati lima puluh tahun Indonesia merdeka, pengertian kebijakan bahasa pada makalah ini secara khusus dikaitkan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam Pencanangan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar oleh Presiden Soeharto tanggal 20 Mei 1995. Karena pencanangan itu dilakukan pada saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus pula ditafsirkan sebagai bahasa Indonesia yang menjadi lambang dan perwujudan jati diri bangsa. Dalam konteks yang demikian, bahasa Indonesia harus mampu berperan secara mantap sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara sehingga pemakaiannya terhindar dari pengaruh bahasa asing (baca: bahasa Inggris) yang tidak diperlukan.

Landasan

- a. Sumpah Pemuda 1928 telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional yang perlu dijunjung dan dihormati melalui pemakaiannya secara baik dan benar.
- b. Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia dan penjelasan pasal itu menyebutkan bahwa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat perhubungan dan dipelihara oleh masyarakat pemakaiannya dilindungi dan dibina juga oleh negara sebagai bagian kebudayaan nasional yang hidup.
- c. Ketetapan-ketetapan MPR tentang GBHN, khususnya yang menyangkut peningkatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar (pada sektor

^{*)} Makalah Seminar Nasional Lima Puluh Tahun Indonesian Merdeka, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 13—14 September 1995

- Pendidikan dan sektor Kebudayaan), merupakan rambu-rambu yang jelas dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia.
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991, tanggal 28 Oktober 1991, tentang pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa menyiratkan bahwa upaya pembinaan bahasa Indonesia harus dilakukan secara lebih terencana dan terarah sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - e. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/U/1992, tanggal 10 April 1992 memberikan arahan tentang peningkatan usaha pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 1991.
 - f. Surat Menteri Dalam negeri No. 434/1021/SJ tanggal 16 Maret 1995 tentang penertiban penggunaan bahasa asing yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan walikotamadya di seluruh Indonesia merupakan pemicu dalam gerakan pengindonesiaan bahasa asing di tempat umum yang tengah dilaksanakan.
 - g. Pencanangan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1995 menggambarkan tekad yang mantap bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dari "serbuan" bahasa asing.

Pada surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Maret 1995 (butir f) secara eksplisit disebutkan bahwa penertiban penggunaan bahasa asing itu haruslah didasarkan pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku itu bernama *Pedoman Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pengalihan Nama dan Kata Asing ke Nama dan Kata Indonesia pada Tempat Umum*, disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Buku tersebut kemudian diolah lebih lanjut dan lebih dilengkapi oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan nama *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*. Buku inilah yang pada tanggal 20 Mei 1995 diserahkan secara simbolis oleh Presiden Soeharto kepada Menteri Dalam Negeri. Buku yang sama juga diserahkan secara simbolis oleh para gubernur pada tanggal 22 Mei 1995 kepada salah seorang bupati atau walikotamadya di provinsi yang bersangkutan.

Kedudukan dan Fungsi Bahasa di Indonesia

a. Bahasa Indonesia

Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda latar belakang kebahasaan, kebudayaan, dan kesukuannya ke dalam satu masya-

rakat nasional Indonesia, dan (4) alat perhubungan antarsuku, antardaerah, serta antarbudaya.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, (3) alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, dan (4) alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dengan kedudukan dan fungsi yang demikian, bahasa Indonesia tidak hanya merupakan alat komunikasi semata-mata, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Bahasa Daerah

Sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa-bahasa di Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa daerah merupakan unsur kebudayaan nasional. Dalam kedudukannya yang demikian, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah.

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

c. Bahasa Asing

Bahasa-bahasa di Indonesia yang bukan bahasa Indonesia dan tidak tergolong sebagai bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa sejumlah bahasa asing diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pada tingkat tertentu. Bahasa-bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa asing itu berfungsi sebagai alat perhubungan antarbangsa, alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional.

Keadaan Masyarakat Pemakai Bahasa

Sebagaimana terlihat pada tabel berikut (yang diolah berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990), pemakai bahasa di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pemakai bahasa Indonesia dan kelompok pemakai bahasa (-bahasa) daerah. Bertambahnya atau berkurangnya jumlah penutur bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu dapat dihubungkan, antara lain, dengan latar pendidikan dan kepandaian membaca

dan menulis penutur yang bersangkutan.

Tabel 1
Bahasa-Bahasa di Indonesia dan Jumlah Penuturnya

No.	Nama Bahasa	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penutur	%	Jumlah Penutur	%
1.	Indonesia	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
2.	Jawa	59.357.040	40,44	60.267.461	38,08
3.	Sunda	22.110.403	15,06	24.155.962	15,26
4.	Madura	6.913.977	4,71	6.792.447	4,29
5.	Batak	3.106.970	2,12	3.120.047	1,97
6.	Minang	3.545.928	2,42	3.527.726	2,23
7.	Bali	2.481.249	1,69	2.589.256	1,64
8.	Bugis	3.322.192	2,26	3.228.742	2,04
9.	Banjar	1.661.792	1,13	2.755.337	1,74
10.	Lainnya	25.653.378	17,48	27.070.883	17,11
11.	Tak terjawab	1.118.235	0,76	712.629	0,45
	Jumlah	146.776.473	100,00	158.262.639	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Tabel 2
Penduduk Indonesia Usia 5 Tahun ke Atas menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Kelompok	Sensus 1980		Sensus 1990	
	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
I	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
II	71.758.926	48,89	107.066.141	67,65
III	57.512.244	39,18	27.154.488	17,16
Jumlah	146.776.473	100,00	158.262.639	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Keterangan

Kelompok I : menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.

Kelompok II : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat memahami dan menggunakannya.

Kelompok III : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya.

Tabel 3
Penduduk Indonesia menurut Kepandaian Membaca dan Menulis

No.	Membaca dan Menulis	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Huruf Latin	72.670.883	69,64	111.365.82	82,47
2.	Huruf Lain	1.514.493	1,45	2.145.277	1,59
3.	Buta Aksara	30.096.559	28,84	21.494.117	15,92
4.	Tak Terjawab	70.635	0,07	34.360	0,02
Jumlah		104.352.570	100,00	135.039.581	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Tabel 4
Tingkat Pendidikan
Penduduk Indonesia menurut Sensus 1980

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak tamat SD	42.772.729	56,57
2.	SD	21.537.840	28,49
3.	SLTP Umum	5.164.454	6,84
4.	SLTP Kejuruan	1.072.007	1,42
5.	SLTA Umum	2.263.224	3,00
6.	SLTA Kejuruan	2.273.951	3,01
7.	Akademi	280.241	0,37
8.	Universitas	227.932	0,31
Jumlah		75.592.378	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Tabel 5
Tingkat Pendidikan
Penduduk Indonesia menurut Sensus 1990

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
1.	Belum Pernah Sekolah	21.952.7919	16,26
2.	Tidak/Belum Tamat SD	42.480.415	31,46
3.	SD	40.996.434	30,36
4.	SLTP Umum	13.392.558	9,92
5.	SLTP Kejuruan	1.088.539	0,80
6.	SLTA Umum	7.882.905	5,84
7.	SLTA Kejuruan	5.204.538	3,85
8.	Diploma I/II	352.505	0,26
9.	Akademi/Diploma III	700.801	0,52
10.	Universitas	986.699	0,73
Jumlah		135.038.185	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Bahasa Asing di Indonesia

Seperti telah disebutkan di atas, bahasa asing Indonesia berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa, (2) alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan (3) alat pemanfaatan iptek modern untuk pembangunan nasional. Hal itu sejalan dengan apa yang tercantum dalam GBHN 1993 yang menyatakan bahwa peningkatan penguasaan bahasa asing di Indonesia ditujukan untuk (1) memperluas cakrawala berpikir, (2) memperkuat penguasaan iptek, dan (3) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional.

Kenyataan menunjukkan bahwa, sebagai akibat dari kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi ditambah dengan arus globalisasi yang tengah melanda negara mana pun, golongan menengah ke atas di Indonesia, terutama yang bergerak dalam dunia bisnis dalam arti yang luas, memperlihatkan kesan bahwa mereka lebih "akrab" dan, akibatnya, lebih "mencintai" bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah karena tidak sedikit di antara mereka yang menempuh pendidikan tinggi atau pendidikan

lanjutannya di luar negeri. Akan tetapi, penyebab utama maraknya pemakaian bahasa asing itu ialah, seperti telah disebutkan, adanya anggapan bahwa dengan bahasa asing orang yang memakainya akan terkesan lebih "modern" daripada dengan bahasa Indonesia. Mereka yang tergolong sebagai orang Indonesia yang berpendidikan sudah selayaknya menguasai (salah satu) bahasa asing. Namun, hal itu tidaklah berarti harus merugikan, apalagi mengalahkan bahasa Indonesia. Bahasa asing haruslah dimanfaatkan untuk memperkaya bahasa Indonesia, terutama dalam hal kosakata dan peristilahannya.

Upaya pemanfaatan bahasa asing itu harus dilakukan berdasarkan dua macam pertimbangan. Pertama, yang benar-benar dapat memperkaya bahasa Indonesia hanyalah kata/istilah asing yang memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, dapat dilakukan apa yang lazim disebut peminjaman atau penyerapan yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Melalui cara seperti itulah dalam bahasa Indonesia sekarang kita mengenal kata seperti *departemen*, *staf*, *televisi*, dan *bisnis*.

Pertimbangan kedua ialah harus dihindarinya kemubaziran. Artinya, kata/istilah asing yang sudah jelas ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus "diharamkan" dengan dalih apa pun. Contoh menunjukkan bahwa orang masih merasa mantap dan gagah menggunakan *garden*, padahal kita sudah mempunyai *taman*. Dalam dunia bisnis hampir setengah mati kita menemukan *pe-masaran* karena yang ada di mana-mana ialah *marketing*. Bahkan dunia pendidikan pun ikut latah karena, misalnya, untuk mengetahui tingkatan/urutan prestasi murid di sebuah kelas, orang sudah terbiasa menggunakan *ranking*, alih-alih *pemeringkatan*.

Upaya Pembinaan

Sebagai penjabaran/tindak lanjut dari butir-butir landasan yang telah disebutkan di atas, perlu dibina dan dijalin kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan pihak-pihak lain yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, merasa berkepentingan dengan "gerakan" pengindonesiaan bahasa asing di tempat umum tersebut. *Buku Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing* harus disebarluaskan dan dimasyarakatkan kepada kelompok-kelompok sasaran yang relevan. Sementara itu, isi buku pedomannya itu sendiri perlu terus ditambah dan dilengkapi sehingga dokumen itu dapat menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai pemakaian bahasa asing dalam masyarakat kita; apalagi bila diingat bahwa kata/istilah asing yang digunakan akan terus bertambah dan berkembang, sesuai dengan tuntutan perkembangan ke arah kehidupan dan peradaban yang makin modern.

Mengingat keterbatasan peran dan kedudukannya, dalam pelaksanaan

pengindonesiaan bahasa asing di tempat umum ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mutlak menjalin dan membina kerja sama dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

- a. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat I didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20/1991 dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1/1992. Sebagian besar dari 27 provinsi di Indonesia telah meresmikan kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang kegiatannya meliputi (1) pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bentuk penyuluhan dan penyegaran; (2) penataran bahasa Indonesia bagi tenaga konseptor; (3) penyuntingan naskah-naskah dokumen resmi seperti surat dinas dan laporan; dan (4) penertiban penggunaan bahasa asing di tempat umum. Selain itu, dalam piagam kerja sama itu juga disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Tingkat I mendukung sepenuhnya usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam mendirikan Balai Penelitian Bahasa di provinsi yang bersangkutan. Sampai sekarang ini baru terdapat 3 buah Balai Penelitian Bahasa, yaitu di Ujungpandang, Denpasar, dan Yogyakarta. Balai Penelitian Bahasa yang merupakan "perpanjangan tangan" Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu idealnya berada di setiap provinsi. Akan tetapi, mengingat kepentingan dan jumlah penutur bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang sangat beragam, di samping keterbatasan dana dan tenaga, yang sudah sangat mendesak untuk dipertimbangkan ialah pendirian Balai Penelitian Bahasa di Jawa Barat, satu atau dua di Sumatra, satu di Kalimantan, satu untuk Maluku dan Irian Jaya, dan satu lagi untuk Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Di provinsi-provinsi yang telah membina kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, diangkat seorang Koordinator Pemasyarakatan Bahasa Indonesia. Koordinator inilah yang "menjembatani" Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan, termasuk kegiatan pengindonesiaan bahasa asing di tempat umum. Dalam rangka koordinasi, setiap tahun diadakan forum yang mempertemukan wakil Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Forum semacam itu, yang disebut rapat koordinasi, dihadiri pula oleh para koordinator dari setiap provinsi.
- b. Pada tanggal 20 Maret 1995 telah diresmikan kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI). Penandatanganan kerja sama itu disaksikan pula oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Dewan Pembina REI. Kerja sama ini bertujuan melakukan pengindonesiaan kata atau istilah asing yang lazim digunakan dalam bidang properti. Kerja sama serupa telah pula dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa dengan Kelompok Lippo pada tanggal 9 Mei 1995.

- c. Dalam rangka menyebarluaskan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia sebagai pengganti bahasa asing itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah pula melakukan koordinasi dan pertemuan-pertemuan yang cukup intensif, antara lain, dengan PWI berikut para pimpinan redaksi media massa cetak dan elektronik, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, dan para manajer yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
- d. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu secara terus menerus bekerja sama dengan organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan, yaitu Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), dan Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI). Sementara itu, kerja sama serupa perlu pula dibina dengan kalangan perguruan tinggi.

Penutup

Pencanangan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1995 itu perlu dilihat dari tekad dan semangat yang melatarbelakangi disepakatinya butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yaitu "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Upaya yang telah dan akan terus dilakukan dalam rangka mengindonesiakan bahasa asing di tempat umum itu pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari pernyataan tekad untuk menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga dalam upaya mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern, bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara itu, akan tetap dapat diandalkan sebagai lambang jati diri bangsa.

Catatan:

1. Ada yang menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat kurang lebih 400 bahasa daerah, belum termasuk bahasa-bahasa yang terdapat di Irian Jaya. Atas dasar itu, dikemukakan bahwa sebenarnya di Indonesia terdapat 500—600 bahasa daerah. Oleh karena itu, sejak tahun 1992, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melakukan penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kekerabatannya serta untuk keperluan pemetaannya. Setelah penelitian yang dijadwalkan akan berlangsung selama 15 tahun itu selesai, jumlah bahasa daerah di Indonesia dapat diketahui secara pasti.
2. Dengan memperhatikan faktor budaya dan agama di Indonesia, bahasa Arab dan bahasa Sansekerta tidak tergolong sebagai bahasa asing.

7. BAHASA SEBAGAI JATI DIRI BANGSA*

1. Bahasa menunjukkan bangsa. Demikianlah untaian kata dari kaum cerdik-pandai dan para bijak-bestari zaman dahulu kala yang selalu kita kaji ulang pada saat-saat yang dianggap tepat untuk mengungkapkannya. Dalam konteks Indonesia dan berbagai hal yang menyangkut keindonesiaan, pengajiulangan terhadap "butir mutiara" itu akan tetap penting dan selalu relevan, terutama sehubungan dengan ciri keindonesiaan yang multietnis, multikultural, dan (yang berakibat pada) multilingual.

Kongres bahasa seperti ini merupakan forum yang sungguh tepat bagi para pakar dan peminat bahasa yang mengikutinya untuk sekurang-kurangnya melakukan tiga hal, yaitu (1) memahami apa yang tersurat dan tersirat dalam ungkapan para bijak-bestari dan kaum cerdik-pandai itu; (2) menerjemahkan pemahaman tersebut berdasarkan kenyataan dan kecenderungan sosiolinguistik yang senantiasa bergerak searah dan seirama dengan perubahan sosial budaya yang melingkupi dan menyemangatnya; serta (3) menyusun perencanaan bahasa yang lebih terarah dan komprehensif agar bahasa-bahasa di Indonesia merupakan sarana komunikasi yang tetap mantap sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sehingga "bahasa menunjukkan bangsa" juga tetap terjaga.

Karena masalah kebahasaan di Indonesia erat berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah (selain bahasa asing yang tidak akan secara khusus dibicarakan kecuali dalam hal "pengaruhnya" terhadap kedua jenis bahasa itu), maka lingkup tinjauan dalam makalah ini akan berkisar pada dua hal yang menyangkut perilaku berbahasa. Pertama, pada saat kita berbahasa Indonesia, seharusnya kita menggunakannya sedemikian rupa sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tetap tampak dan terjaga. Kedua, pada saat kita menggunakan bahasa daerah, hendaknya bahasa daerah yang kita gunakan itu juga mencerminkan jati diri keetnisan kita masing-masing. Dengan perkataan lain, jati diri kita sebagai bangsa ataupun suku bangsa/kelompok etnis perlu ditampilkan dalam setiap pandangan, sikap, dan perbuatan yang salah satu bentuk pengungkapannya adalah perilaku berbahasa.

* Makalah Kongres Bahasa Bali II, 7—9 November 1996, Denpasar

2. Pemahaman kita terhadap jati diri lazim menggunakan konsep kebudayaan (dalam arti yang seluas-luasnya) sebagai kerangka acuan. Apabila jati diri itu diukur dengan menggunakan parameter perilaku berbahasa, seperti yang telah disinggung di atas dan yang akan dipaparkan lebih lanjut dalam makalah ini, maka konsep kebudayaan itu harus lebih difokuskan pada seberapa jauh acuan yang lazim disebut faktor sosial budaya itu mampu mempengaruhi dan mewarnai nuansa-nuansa penggunaan bahasa kita. Dampak faktor sosial budaya terhadap perilaku berbahasa ini, kalau dilihat dari masalah kebahasaan di Indonesia yang secara sepintas telah disinggung di atas, seharusnya tidaklah sama antara persoalan yang diakibatkan oleh pemakaian bahasa Indonesia pada satu pihak dan pemakaian (salah satu) bahasa daerah pada pihak lain.

Ketidaksamaan itu bersumber pada atau berkaitan erat dengan "sikap batin" orang Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah kelompok etnisnya. Sikap batin ini sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh hubungan emosional yang bersangkutan terhadap kedua jenis bahasa itu. Tentang hal itu dapat dikemukakan semacam asumsi yang berkenaan dengan tingkat keakraban yang bersangkutan terhadap bahasa Indonesia dibandingkan dengan tingkat keakraban terhadap bahasa ibunya. Secara singkat, karena hal itulah justru yang dijadikan benang merah makalah ini, dapatlah dikatakan bahwa sikap batin, hubungan emosional, dan tingkat keakraban dalam berbahasa itu dapat dihubungkan dengan "usia" bahasa Indonesia dan bahasa daerah kita masing-masing. Dengan mengecualikan bahasa Melayu yang kita akui bersama sebagai bahasa yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, asumsi itu harus didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa-bahasa daerah di Indonesia (jauh) lebih tua daripada bahasa Indonesia. Atas dasar itu, apabila rata-rata orang Indonesia "menguasai" bahasa daerahnya, hampir dapat dipastikan bahwa sikap batin, hubungan emosional, dan tingkat keakraban mereka terhadap bahasa daerah masing-masing lebih mantap daripada terhadap bahasa Indonesia.

3. Melalui butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia dengan nama bahasa Indonesia. Meskipun sesungguhnya butir ketiga Sumpah Pemuda itu merupakan pernyataan yang bersifat politis, formulasinya mengisyaratkan agar kita "menjunjung" bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga bahasa Indonesia berfungsi bukan sekadar sebagai lambang kebudayaan dan identitas (jati diri) nasional, melainkan juga sebagai alat pemersatu dan alat perhubungan.

Dengan beban "fungsi" yang demikian, bahasa Indonesia telah terbukti keberhasilannya dalam mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu

gerbang kemerdekaannya. Tanpa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, akan sulit dijawab pertanyaan tentang bahasa apa yang akan digunakan oleh para pemimpin bangsa pada masa perjuangan kemerdekaan, baik sebagai alat komunikasi di antara mereka sendiri maupun untuk membangkitkan dan mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia secara umum. Bahasa apa yang akan digunakan dalam teks proklamasi (kemerdekaan) dan dalam UUD 1945 juga akan sama sulitnya untuk dijawab kalau kita belum memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Satu hari setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia bahkan mempunyai kedudukan yang lain, yaitu sebagai bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945). Yang amat penting dalam hal ini ialah penjelasannya yang menyebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara secara baik-baik oleh rakyatnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Selain itu, disebutkan juga bahwa bahasa-bahasa daerah itu juga merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Kedudukannya sebagai bahasa negara mengakibatkan bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, tetapi juga sekaligus sebagai alat perhubungan (dalam arti yang luas) tingkat nasional dan bahkan sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia seperti yang telah disebutkan di atas, bagaimana halnya dengan bahasa daerah? Jawaban atas pertanyaan ini patut dihubungkan dengan penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Untuk itu, kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan bahasa daerah yang dipelihara secara baik-baik oleh rakyatnya. Secara sederhana hal itu dapat diartikan bahwa bahasa daerah yang bersangkutan digunakan sebagai alat perhubungan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat daerahnya. Selain itu, tentu saja setiap bahasa daerah harus pula dipandang sebagai lambang jati diri daerah dan sekaligus sebagai lambang kebanggaan daerah. Dalam GBHN 1993 bahkan digarisbawahi pentingnya bahasa daerah untuk keperluan pengembangan bahasa Indonesia dan kebudayaan nasional sehingga terhadap bahasa daerah (termasuk sastranya) perlu dilakukan berbagai upaya penelitian berikut penyebaran atau pemuasarakatannya. Sementara itu, bahasa Indonesia yang pemerupayaannya antara lain diperoleh dari bahasa-bahasa daerah itu perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia dapat berfungsi dengan mantap sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Uraian singkat tadi menggambarkan perlu dibedakannya secara jelas antara peran bahasa Indonesia dan peran bahasa daerah dalam kehidupan berbahasa di Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa perlu terus dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dengan mengoptimalkan potensi dan pemanfaatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, terutama yang menyangkut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengoptimalan potensi bahasa Indonesia mengandung makna ganda, yaitu pemantapan norma bahasa yang dibarengi dengan pemerayaan kosakata berikut peristilahannya. Hal yang disebutkan terakhir ini perlu secara terencana dan terus-menerus diupayakan melalui pemanfaatan sumber-sumber di luar bahasa Indonesia, baik yang terdapat dalam bahasa daerah maupun bahasa asing. Namun, yang perlu tetap diperhatikan ialah bahwa masuknya kosakata dan istilah yang berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing itu haruslah tunduk pada "aturan main" yang berlaku dalam ketentuan-ketentuan normatif bahasa Indonesia, seperti yang tercantum, misalnya, dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Melalui pemantapan norma bahasa dan pemerayaan kosakata serta peristilahannya itu, bahasa Indonesia diharapkan tetap berperan sebagai alat pengungkap yang efektif untuk berbagai pikiran, pandangan, dan konsep, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling rumit dan kompleks.

Pemerayaan kosakata dan peristilahan bahasa Indonesia itu sebenarnya merupakan proses yang sudah sangat alamiah sifatnya dalam setiap peristiwa kontak bahasa. Bahasa yang kuat akan selalu mempengaruhi bahasa yang lemah. Yang perlu diupayakan ialah agar bahasa yang berstatus "lemah" menggali dan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan bahasa yang berstatus "kuat" untuk kepentingan dirinya tanpa harus mengorbankan identitas atau jati dirinya. Untuk itu, ada prinsip yang harus secara konsisten diterapkan: kata dan istilah yang diserap dari bahasa daerah dan bahasa asing itu hanyalah bentuk-bentuk yang tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Adapun kata dan istilah yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus kita hindari pemakaiannya karena hal itu hanya akan mengotori atau mencemari ciri keindonesiaan bahasa persatuan dan bahasa negara kita. Apabila hal itu terjadi, maka kita tidak dapat lagi dengan bangga menyatakan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.

Prinsip seperti itu merupakan bagian yang amat strategis dalam upaya kita menerjemahkan "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia".

Bagian lainnya dari apa yang tersirat dalam butir ketiga Sumpah Pemuda itu berkenaan dengan upaya kita untuk senantiasa meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia yang secara populer dimasyarakatkan melalui ajakan atau imbauan agar kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang sering disalahpahami ialah seakan-akan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu hanyalah satu jenis atau satu macam saja, yaitu bahasa Indonesia yang tingkat kebakuan dan keresmiannya tinggi, padahal kenyataan pemakaian bahasa Indonesia menunjukkan bahwa ragam bahasa Indonesia itu alangkah banyak dan beranekanya: ada bahasa tulis dan bahasa lisan, ada ragam resmi dan tidak resmi (dengan sejumlah gradasi di antara keduanya), dan ada pula ragam fungsional (seperti bahasa jurnalistik, bahasa laporan, dan bahasa surat-menyurat).

Kalau upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dikaitkan dengan pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan, peran apa yang harus dimainkan oleh bahasa daerah? Seperti yang telah ditegaskan di atas, pemantapan norma bahasa dan pemerayaan kosakata berikut peristilahannya itu haruslah diupayakan tanpa harus mengorbankan ciri keindonesiaan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Untuk keperluan yang disebutkan terakhir inilah bahasa daerah dapat mengambil posisi untuk tampil secara lebih berperan.

Fungsinya sebagai bahasa yang digunakan di lingkungan keluarga dan masyarakat daerah serta sebagai lambang identitas dan kebanggaan daerah pada gilirannya akan berfungsi sebagai perekat yang makin mengukuhkan pilar-pilar dari sebuah bangunan monumental yang bernama kebudayaan Indonesia.

5. Kecenderungan sosiolinguistik yang senantiasa bergerak mengikuti perubahan sosial budaya itu, bila dihubungkan dengan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, akan makin jelas memperlihatkan perbedaan peran di antara kedua jenis bahasa itu. Dengan memperlihatkan peran seperti itu, seharusnya kita dapat pula menentukan dan menarik garis pembatas yang transparan dalam pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan tolok ukur sikap batin, hubungan emosional, dan tingkat keakraban yang sesuai untuk jenis bahasa yang digunakan. Tolok ukur "kedaerahan" digunakan untuk melihat (atau menilai?) mutu pemakaian bahasa daerah. Sejalan dengan hal itu, mutu pemakaian bahasa Indonesia pada gilirannya harus pula dipertanyakan dengan menggunakan tolok ukur "keindonesiaan".

Apabila mutu pemakaian bahasa Indonesia itu dihubungkan dengan cara pengungkapannya yang berbentuk bahasa tulis dan bahasa lisan, yang patut dirisaukan adalah pemakaian bahasa lisan karena pemakaian bahasa

tulis tidak memperlihatkan tingkat kegawatan yang merisaukan seperti halnya bahasa lisan. Hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan yang amat mendasar: bahasa lisan terikat oleh waktu dan tempat, sedangkan bahasa tulis tidak. Akibatnya, karena tuntutan bahwa bahasa lisan itu harus berciri spontan, sedangkan kita sebagai pembicara kurang "menguasai" bahasa Indonesia yang kita gunakan, maka yang akan terjadi ialah interferensi dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.

Interferensi dalam bentuk pengaruh lafal untuk sementara tidak perlu diperhitungkan sebagai faktor yang menimbulkan kerisauan. Keanekaragaman pelafalan setiap bahasa daerah, bagaimanapun, akan tetap merupakan batu sandungan ke arah terciptanya satu jenis pelafalan bahasa Indonesia yang dapat dicermati oleh keseluruhan bangsa Indonesia. Yang dapat diupayakan untuk dihindari ialah interferensi leksikal dan gramatikal. Dalam hal ini, upaya untuk mengatasi interferensi leksikal harus lebih diprioritaskan daripada yang gramatikal, terutama apabila kita sedang berbicara terhadap khalayak yang bahasa ibunya belum tentu sama dengan bahasa ibu kita. Apabila hal itu tetap berlangsung karena kita belum mampu mengatasinya (karena berbagai alasan), maka pendengar atau lawan bicara kita tidak akan sepenuhnya memahami apa yang kita ucapkan. Akibatnya, bahasa yang kita gunakan dapat disebut gagal sebagai alat komunikasi. Selain itu, bahasa yang kita gunakan akan kehilangan ciri keindonesiaannya. Dengan perkataan lain, bahasa Indonesia yang kita gunakan tidak lagi mencerminkan lambang jati diri bangsa.

Pemakaian bahasa Indonesia lisan dengan interferensi leksikal dari bahasa daerah itu, apalagi dalam porsi yang berlebihan, dapat diartikan bahwa yang bersangkutan belum termasuk ke dalam penutur yang "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Gejala berbahasa seperti ini tampaknya tidak atau belum disadari sebagaimana mestinya oleh yang bersangkutan. Sebaliknya, kita bahkan dapat menyaksikan makin meningkatnya kecenderungan yang tidak menggembirakan itu. Penulis makalah ini belum dapat memastikan apakah masalah itu, yang makin lama akan makin terakumulasi kalau tetap dibiarkan, pada saatnya nanti akan berpengaruh terhadap keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah sejak lama kita bina dan kita pelihara.

6. Interferensi leksikal dari bahasa daerah yang terjadi ketika seseorang tengah berbahasa Indonesia itu perlu dilihat dari wacana komunikasinya itu sendiri agar kita terhindar dari kecerobohan yang akan membawa kita kepada semacam penilaian bahwa yang bersangkutan dengan serta merta dianggap sebagai orang yang "tidak menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Wacana komunikasi yang dimaksudkan paling tidak berhubungan dengan

dua hal, yakni tingkat keresmiannya dan usia serta status sosial para peserta komunikasi.

Dengan memperhatikan kedua jenis parameter itu, kita akan dapat memahami, mungkin dalam arti 'memafkan', bahwa interferensi leksikal yang terjadi dalam situasi komunikasi yang tingkat keresmiannya relatif rendah dan para peserta komunikasinya memperlihatkan tingkat usia dan status sosial yang secara alamiah dan spontan tidak mengikat mereka untuk hanya menggunakan satu jenis atau ragam bahasa saja. Sebaliknya, dalam situasi komunikasi yang tingkat keresmiannya tinggi, interferensi leksikal seperti itu tidak pada tempatnya kita beri toleransi meskipun dari segi usia dan status sosial peserta komunikasinya, parameter yang di atas disebutkan layak dipertimbangkan, interferensi tersebut masih dapat "dimafkan".

Yang perlu kita sadari benar ialah bahwa interferensi leksikal itu seharusnya tidak boleh terjadi dalam situasi komunikasi yang tingkat keresmiannya tinggi. Akan tetapi, tuntutan yang demikian itu akan terasa sebagai beban yang berat kalau dihubungkan dengan ciri bahasa lisan yang harus serba spontan karena terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Akibatnya, kalau "spesifikasi" pembicara seperti itu memang tidak mendukung, interferensi itu menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan oleh pembicara yang bersangkutan. Spesifikasi pembicara yang dimaksudkan berkorelasi dengan latar belakang pendidikan, bidang profesi yang dihadapi, serta yang tidak kalah pentingnya ialah minat dan perhatian yang bersangkutan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Kesemuanya itu akan sangat jelas tergambarkan lewat keterampilan berbahasanya, baik keterampilan dalam menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulis.

Seseorang yang berbicara di hadapan khalayak umum yang merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang pasti berciri heterogen dari segi keetnisan, tetapi mungkin memperlihatkan kehomogenan dari segi yang lain, harus diasumsikan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan bahasa Indonesia lisan. Asumsi itu seharusnya memperhadapkan kita kepada kenyataan berbahasa yang mengisyaratkan bahwa kita sudah mampu 'menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia' sebagaimana mestinya, antara lain karena kita sudah memiliki kemampuan atau bahkan daya tahan untuk tidak dijangkiti oleh "penyakit interferensi" itu.

Penjelasan singkat tentang asumsi di atas memberikan gambaran berbahasa yang sangat ideal. Apa pun yang tergolong ideal biasanya selalu tidak cocok atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Demikian pula halnya dengan kenyataan berbahasa sehingga sangat tidak mungkin kita mengharapkan agar setiap orang yang berbicara dalam situasi komuni-

kasi yang tingkat keresmiannya tinggi dapat benar-benar membebaskan dirinya dari gangguan interferensi tersebut.

Yang dapat dikemukakan dan oleh karena itu layak untuk diharapkan ialah agar ketika seseorang sedang berbahasa Indonesia, yang bersangkutan tetap menyadari ciri keindonesiaannya. Harapan seperti ini bertolak dari analogi yang menggambarkan melekatnya ciri keetnisan atau kedaerahan pada seseorang yang tengah berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Dengan perkataan lain, yang diharapkan dari seseorang yang tengah berbahasa Indonesia dalam situasi pemakaian yang resmi itu ialah adanya sikap batin, hubungan emosional, dan keakraban yang memadai terhadap bahasa yang digunakannya sehingga setelah itu kita lalu dapat mengidentifikasikannya sebagai ciri keindonesiaan dari yang bersangkutan.

7. Dalam konteks pembicaraan seperti itu, yang relevan untuk diungkapkan ialah pertanyaan tentang seberapa jauh ciri keindonesiaan itu dipahami dan disadari oleh masyarakat kita, terutama oleh mereka yang karena tuntutan profesinya sering berbahasa untuk kepentingan khalayak yang lebih luas. Jawaban terhadap pertanyaan itu sejak awal harus dihubungkan dengan masalah *bilingualisme*.

Hampir semua orang Indonesia pada umumnya dapat dikatakan sebagai anggota masyarakat yang bilingual. Selain berbahasa Indonesia, mereka juga merupakan penutur bahasa daerah tertentu. Bahasa daerah ini pada umumnya juga merupakan bahasa ibu yang bersangkutan. Catatan yang perlu ditambahkan ialah bahwa ada juga orang Indonesia, yang jumlahnya setakat ini boleh dikatakan amat terbatas, yang bahasa ibunya bahasa Indonesia. Kelompok masyarakat penutur bahasa Indonesia yang jumlahnya terbatas ini dengan mudah dapat dijumpai di hampir semua kota besar di Indonesia, yaitu pada generasi muda yang orang tuanya atau ayah dan ibunya memperlihatkan perbedaan dalam hal kelompok etnis dan yang wilayah atau kawasan tempat tinggalnya dihuni oleh warga yang secara etnis heterogen. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi serta informasi, diperkirakan kelompok penutur bahasa Indonesia seperti ini akan makin bertambah. Selama hal itu berlangsung secara alamiah, kita tak perlu merasa risau semata-mata karena bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia itu akan berakibat kepada makin berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah.

Dengan mengecualikan kelompok yang terbatas itu, fenomena ke-bahasaan yang menarik untuk diamati ialah adanya semacam tarik-menarik antara ciri keindonesiaan dan ciri kedaerahan pada diri seseorang yang sedang berbahasa Indonesia di depan khalayak umum. Tarik-menarik itu akan sangat diwarnai oleh ketiga aspek yang telah disebutkan, yaitu sikap

batin, hubungan emosional, dan keakraban. Ketiga aspek tersebut akan menentukan kecenderungan berbahasa yang pada dasarnya akan menentukan apakah yang bersangkutan lebih condong kepada ciri keindonesiaan atau ciri kedaerahannya.

8. Kalau ihwal tarik-menarik antara ciri kedaerahan dan ciri keindonesiaan itu dihubungkan dengan pandangan yang menyebutkan bahasa sebagai jati diri bangsa, yang menjadi topik bahasan dalam makalah ini, maka seyogianya ciri kedaerahan hanya melekat pada seseorang yang sedang berbicara dalam bahasa daerah dan ketika orang yang sama pada kesempatan lain menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasinya, maka secara moral yang bersangkutan berkewajiban tampil dengan ciri keindonesiaannya.

Agar gambaran ideal yang telah disebutkan di atas secara berangsur-angsur dapat mendekati kenyataan yang sebenarnya, maka semua pihak harus mengambil posisi dan peran yang cocok untuk menerjemahkan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928. Para ahli bahasa berkewajiban mengembangkan bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang mantap dan modern. Para guru, wartawan, pengarang, wartawan, dan tokoh masyarakat serta pejabat negara perlu menyadari dirinya sebagai tokoh yang akan diteladani oleh masyarakat luas dalam hal berbahasa. Sementara itu, masyarakat umum diharapkan untuk memperlihatkan sikapnya yang positif terhadap bahasa Indonesia.

8. MENUMBUHKAN SIKAP BERBAHASA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI*

Beberapa Masalah Pemakaian

Sampai saat ini kita sering membaca di surat kabar berita tentang akan diselenggarakannya berbagai jenis pameran, seperti pameran perumahan, produk elektronik, dan furnitur. Penyelenggaraannya di *Jakarta Convention Center*. Mengapa berita seperti di atas ditampilkan sebagai contoh untuk mengawali tulisan ini? Apakah karena ada sesuatu yang istimewa, menarik, atau bahkan salah? Contoh itu memang istimewa dan menarik, tetapi mengandung "kesalahan" gara-gara *Jakarta Convention Center*. Kita tentu (atau mudah-mudahan) masih ingat bahwa Presiden Soeharto mencanangkan "Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar" pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1995. Pada upacara ini nama *Jakarta Convention Center* diubah menjadi *Balai Sidang Jakarta*. Peristiwa itu secara simbolik mengawali gerakan pengindonesiaan nama dan kata asing yang selama ini kian merebak digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama dan iklan/reklame. Sang wartawan penulis berita itu mustahil tidak mengetahuinya. Namun, yang dia lakukan dalam mengemban profesinya ialah bukan menggunakan dan memasyarakatkan nama *Balai Sidang Jakarta*, melainkan makin mengukuhkan dan mengekalkan nama asingnya.

Berikut adalah contoh lain mengenai pengindonesiaan nama/kata sing dalam bidang properti: kawasan permukiman yang semula, misalnya, bernama *Astina Resort* kemudian diubah menjadi *Astina Resor*. Perubahan *resort* menjadi *resor* sebenarnya sudah sesuai. Dalam buku *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1995), *resort* dipadankan dengan *sanggraloka* atau *resor*. Dengan memperhatikan pola urutan kata pada frasa yang lazim disebut hukum D-M (Diterangkan-Menerangkan), *Astina Resort* seharusnya menjadi *Sanggraloka Astina* atau *Resor Astina*. Dengan demikian, *Astina Resor* jelas bertentangan dengan hukum D-M tersebut.

Masih sering digunakannya kata seperti *marketing*, *security* dan *tailor* alih-alih *pemasaran*, *keamanan*, dan *penjahit*, juga dapat dijadikan tolok ukur tentang betapa masih jauhnya perjalanan yang harus ditempuh untuk "membudayakan" bahasa Indonesia di kalangan masyarakat penutur bahasa Indonesia sendiri. Dampak yang tidak menguntungkan dari pemakaian bahasa asing yang makin tidak terkendali itu boleh dikatakan memperlihatkan tingkat kegawatan yang sama dengan makin bertambah suburnya akronim yang dari

waktu ke waktu pertumbuhannya "sangat mengagumkan". Kata *balon* dan *jagung*, sekadar contoh, berbeda muatan maknanya dari akronim *balon* 'bakal calon' dan *jagung* 'jaksa agung'. Pasangan kata dan akronim semacam itu, kalau pertumbuhannya tetap dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian dari "pihak yang berwenang", pada saatnya nanti akan menjadi bumerang bagi keefisienan dan keefektifan bahasa Indonesia sebagai medium komunikasi verbal. Akan timbul "kemacetan komunikasi" kalau orang tidak memahami kandungan makna dari akronim yang kita gunakan. Selain itu, di sekolah murid akan makin terbebani karena dia harus mampu membedakan: kapan suatu bentuk digunakan sebagai kata (utuh) dan kapan bentuk tersebut digunakan sebagai akronim. Kalau akronim ini dibiarkan tumbuh dan berkembang secara liar, pada suatu saat nanti, entah pada generasi mana, bahasa Indonesia akan menjadi hutan belantara akronim yang dapat menyesatkan masyarakat pemakai bahasa Indonesia itu sendiri.

Dari segi kehematan berbahasa, akronim memang diperlukan. Yang sering kita lupakan ialah pengertian dasarnya, yaitu bahwa *akronim* adalah bentuk singkatan yang berupa kata dan yang dapat diperlakukan sebagai kata. Akronim *tilang* 'bukti pelanggaran', misalnya, dapat digunakan dalam bentuk *menilang*, *ditilang*, *penilang*, dan *penilangan*. Kenyataannya menunjukkan bahwa cukup banyak akronim yang tidak dikenal secara meluas, tetapi tetap digunakan. Akibatnya, tujuan utama komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat tidak mencapai sasaran. Oleh sebab itu, biarlah kalangan yang berkepentingan dengan tugas-tugas keamanan saja yang mengetahui bahwa *anirat* itu 'penganiayaan berat' atau bahkan *curanmor* itu 'pencurian kendaraan bermotor'. Masyarakat umum tak perlu sama repotnya dengan anggota pramuka untuk mengingat-ingat bahwa *jumbara* bermakna 'jumpa bakti gembira'. Yang di luar lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tak usah ikut sibuk menyebut *diklusepora* untuk 'pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga'. Akronim jenis ini harus secara ketat dibatasi ruang geraknya. Untuk itu, kelompok wartawan sangat diharapkan berfungsi sebagai penapis atau filter agar akronim yang seharusnya hanya diketahui dan digunakan oleh kalangan yang (amat) terbatas itu tidak dengan begitu saja berhamburan memenuhi kolom-kolom surat kabar setiap harinya.

Dengan alasan (atau dalih?) yang sama, yaitu demi kehematan berbahasa, bentuk ungkapan padu seperti *sesuai dengan* sudah biasa 'disunat' menjadi *sesuai*. Hampir setiap saat kita berhadapan dengan model kalimat seperti *Hal itu sesuai kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor*. Seharusnya: *Hal itu sesuai dengan kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor*. Kejanggalan yang diakibatkan oleh 'dihemat'-nya kata *dengan itu* jelas makin terasa kalau setelah *sesuai* ditambahkan kata *sekali* atau *benar*. Rasa bahasa kita tentu

tidak akan membenarkan kalimat *Hal itu sesuai sekali kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor* atau *Hal itu sesuai benar kebijakan Pemerintah dalam bidang ekspor-impor*.

Dalam hal tata kalimat kita juga terkesan sudah sangat terlena dalam kebiasaan memproduksi kalimat rancu. Cobalah disimak contoh berikut. *Kepada para peserta yang masih berada di luar diharap segera masuk* lazim sekali disampaikan oleh seorang pembawa acara. *Untuk medali perunggu direbut oleh atlet Sumatera Utara* sering kita baca dalam surat kabar atau kita dengar melalui siaran berita di radio atau televisi. Contoh itu tidak memungkinkan kita dapat menjawab pertanyaan tentang siapa yang diharap segera masuk dan apa yang direbut oleh atlet Sumatera Utara. Kerancuan itu akan sirna kalau *untuk* pada contoh pertama dan *kepada* pada contoh kedua tidak digunakan: *Para peserta yang masih berada di luar diharap segera masuk* dan *Medali perunggu direbut oleh atlet Sumatera Utara*.

Sikap Bahasa

Contoh yang ditampilkan di atas sekurang-kurangnya mencerminkan mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh sebagian besar dari kita dewasa ini. Mutu pemakaian ini pada hakikatnya berkorelasi dengan tingkat kemampuan dan keterampilan kita dalam berbahasa. Akan tetapi, contoh-contoh tersebut, baik yang berkaitan dengan pemakaian bahasa asing (khususnya bahasa Inggris), keasyikan kita dalam menciptakan/menggunakan akronim, maupun dengan kekurangpedulian kita terhadap kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku, sesungguhnya mencerminkan sikap kita yang tidak atau belum positif terhadap bahasa Indonesia.

Seberapa jauh sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia dapat dilihat berdasarkan tiga macam tolok ukur, yaitu (1) kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, (2) kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dan (3) kesadaran untuk mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Kebanggaan, kesetiaan, dan kesadaran ini bermuara pada apa yang tersurat dan tersirat dalam butir ketiga ikrar Sumpah Pemuda 1928, yaitu "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia".

Butir ketiga Sumpah Pemuda itu, pernyataan politik yang mencanangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (disebut juga bahasa nasional atau bahasa kebangsaan), mengandung makna bahwa kita, baik sebagai perseorangan, anggota masyarakat, maupun terutama sebagai bangsa, harus senantiasa memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dengan menggunakannya secara baik dan benar. Itulah sebabnya, sekurang-kurangnya sejak tahun tujuh puluhan, kita selalu diimbau untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik

dan benar.

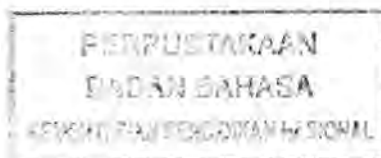
Sering diperkatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik ialah bahasa yang sesuai dengan keperluan pemakaiannya. Bahasa Indonesia lisan tidak dengan sendirinya harus sama dengan bahasa Indonesia tulis. Situasi pemakaian, dengan siapa kita berbahasa, dan tentang apa kita berbicara (dalam hal bahasa lisan) akan sangat menentukan kadar kebaikan kita dalam berbahasa. Faktor-faktor tersebut akan menentukan tidak saja bentuk dan pilihan kata serta struktur kalimat yang kita gunakan, tetapi juga akan mempengaruhi tempo dan intonasi kita dalam berbicara. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang digunakan dalam forum resmi di DPR, misalnya, pasti jauh berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh dua orang sahabat yang secara kebetulan bertemu pada suatu kesempatan setelah sekian lama berpisah.

Yang menjadi tolok ukur bahasa Indonesia yang benar ialah tingkat kesesuaiannya dengan aturan, norma, atau kaidah kebahasaan. Kata *menyolok* pada kalimat *Warna bajunya sangat menyolok*, misalnya, jelas menyalahi kaidah yang berlaku tentang pembentukan kata. Konsonan *c* pada bentuk dasar *colok* tidak luluh kalau diberi imbuhan *me-*. Jadi, bukan *menyolok*, melainkan *mencolok* (bandingkan dengan *mencuci*, bukan *menyuci*, yang bentuk dasarnya *cuci*). Bentuk *saling kait-mengait* juga merupakan contoh kekurangcermatan berbahasa yang sering kita lakukan. Bentuk itu mengandung dua kesalahan. Pertama, *kait* dengan awalan *me-* menjadi *mengait*, bukan *mengkait* (bandingkan dengan *mengejar* yang berasal dari *kejar*). Kedua, *saling kait-mengait* pun masih memperlihatkan adanya pertumpangtindihan makna resiprokal antara *saling* dan bentuk ulang *kait-mengait*. Atas dasar itu, seyogianya kita menggunakan *saling mengait* atau *kait-mengait*.

Bentuk *mencolok* dan *mengait* sebagai pengganti *menyolok* dan *mengkait* ini sudah kita ketahui. Kesalahan yang kita lakukan boleh dikatakan karena kita sudah terbawa arus kebiasaan berbahasa masyarakat kita. Arus kebiasaan berbahasa yang sebenarnya salah itu sering disebut "salah kaprah". Apabila kita memiliki salah satu ciri dari sikap positif tersebut, yakni kesadaran untuk mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan, seharusnya kita tidak ikut "terjerumus" ke dalam kesalahkaprahan itu.

Kebanggaan dan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dua ciri lainnya dari sikap positif, erat sekali kaitannya dengan kebiasaan sebagian anggota masyarakat kita dalam menggunakan kata/istilah asing pada saat yang bersangkutan sebenarnya sedang berbahasa Indonesia. Bagaimana reaksi Anda ketika menyaksikan lewat layar kaca dua orang "pejabat" pada kesempatan yang berbeda berbicara dengan menggunakan dua kalimat berikut?

- Hal itu *mbok* betul-betul dipersiapkan supaya kita-kita di lapangan *ndak*



confused.

- Kalau *demand* meningkat, *automatically* jumlah persediaan barang harus ditingkatkan pula.

Pejabat yang menggunakan kalimat pertama lebih "gawat" cara berbahasanya daripada yang kedua karena selain memperlihatkan adanya interferensi bahasa daerah (*mbok, ndak*) dan bahasa Inggris (*confused*), kata bahasa Indonesia yang digunakannya (*kita-kita*) juga tidak tepat.

Pertanyaan yang timbul kemudian ialah apakah pejabat yang bersangkutan tidak tahu bahwa dalam bahasa Indonesia ada kata *bingung, permintaan, dan dengan sendirinya* atau *otomatis* sebagai pengganti *confused, demand, dan automatically*. Kemungkinan lain ialah bahwa sebenarnya yang bersangkutan mengetahuinya, tapi tetap menggunakan kata dalam bahasa Inggrisnya dengan harapan agar orang lain mempunyai kesan bahwa yang bersangkutan tampak lebih gagah, lebih terhormat, dan lebih terpelajar.

Kecenderungan yang disebutkan terakhir ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga hampir dapat dipastikan bahwa kelompok atau lapisan masyarakat menengah ke atas akan senantiasa menyelip-nyelipkan kata/istilah asing, terutama yang berasal dari bahasa Inggris, meskipun sebenarnya untuk kata/istilah asing yang digunakannya itu sudah ada padanan bahasa Indonesianya. Lambat laun makin mantaplah anggapan pada sebagian anggota masyarakat kita bahwa bahasa Inggris memiliki status sosial yang jauh lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Akibatnya, hampir di mana-mana, terutama di kota-kota besar, kita menjumpai tulisan dalam bahasa Inggris yang isinya bermacam-macam: nama perusahaan, nama gedung, nama kawasan permukiman, iklan, dan lain-lain.

Pemakaian bahasa Inggris itu tidak terbatas hanya pada nama diri perusahaan, misalnya, tetapi juga penjelasan/keterangan mengenai jenis usahanya pun ditulis pula dalam bahasa Inggris. Sekadar contoh: *beauty salon, shopping center, dan after-sales service* jauh lebih mudah kita temukan daripada *salon kecantikan, pusat belanja, dan layanan pascajual*.

Nama kawasan permukiman dengan bahasa Inggris secara tidak langsung mendidik dan mengarahkan calon pembeli/penghuninya untuk tidak menggunakan "akal sehat". Bukankah mereka diharapkan lebih mementingkan dan mengutamakan kemententerangan nama dalam bahasa Inggris dari kawasan permukiman yang diminatinya daripada mempertimbangkan mutu bangunan, fasilitas yang disediakan, dan keasrian lingkungannya?

Pemakaian bahasa Inggris yang makin "meriah" itu juga sering dihubungkan dengan dua hal yang akan lebih tepat disebut "dalih", yaitu untuk mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi untuk keperluan pembangunan dan

untuk lebih memberikan berbagai kemudahan bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Benarkah demikian? Meskipun belum pernah dilakukan studi perbandingan yang layak mengenai hal itu, contoh berikut rasanya patut sekali dipertimbangkan.

Ada beberapa negara di Asia, tanpa harus menyebutkan namanya, yang penguasaan bahasa Inggris di kalangan warga masyarakatnya dikenal cukup meluas. Namun, negara-negara itu tidak pernah disebut-sebut sebagai contoh keberhasilan dalam bidang pembangunan ekonomi dan industrinya. Sebaliknya, Jepang dan Korea Selatan sekarang ini selalu dijadikan contoh keberhasilan pembangunan ekonomi dan industri, padahal rakyat kedua negara itu terkenal sangat fanatik dalam mempertahankan tradisi budaya dan bahasanya.

Mengenai pemakaian bahasa Inggris untuk keperluan wisatawan asing agar berbondong-bondong datang ke Indonesia? Kita tahu bahwa wisatawan asing yang datang ke Thailand, terutama ke Bangkok, jumlahnya sering membuat kita "iri", padahal di sana jangankan bahasanya, tulisannya pun masih menggunakan huruf setempat (yang sangat jauh perbedaannya dengan huruf Latin).

Kegandrungan kita pada segala hal yang memungkinkan digunakannya kata/istilah bahasa Inggris itu telah menumbuhkan satu jenis "penyakit" baru, yaitu "biar salah asal berbahasa Inggris". Gejala penyakit baru itu terlihat pada tiga contoh berikut. Pertama, *Economic and Bisnis Center* terpampang pada sebuah papan nama perusahaan di Jakarta. Kedua, di luar Jakarta ada sebuah tempat kursus komputer yang namanya *Profesional Computer College*. Ketiga, *no think to loose* tertulis pada sebuah surat kabar daerah yang menurunkan berita tentang akan berlangsungnya pertandingan tenis antara Michael Chang dan seorang petenis Indonesia. Dengan ungkapan bahasa Inggris itu si wartawan hendak menyatakan bahwa petenis Indonesia tidak perlu menanggung beban mental apa-apa karena lawan yang akan dihadapinya itu tingkat permainannya sudah sangat "canggih". Penyakit "biar salah asal berbahasa Inggris" itu terlihat pada penulisan *bisnis*, *profesional*, dan *no think to loose* yang maksudnya masing-masing adalah *business*, *professional*, dan *nothing to loose*.

Masih sangat banyak contoh yang dapat diketengahkan sehubungan dengan masih memperhatinkannya pandangan dan sikap sebagian anggota masyarakat kita terhadap bahasa Indonesia, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan (butir ketiga Sumpah Pemuda 1928) maupun sebagai bahasa negara (Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945). Untuk itu, upaya pembinaan perlu diupayakan secara terus-menerus agar masyarakat kita secara berangsur-angsur memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia.

Pembinaan Bahasa

Menumbuhkan sikap positif bahasa Indonesia yang merupakan tujuan

upaya pembinaan itu sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa kita dilarang menggunakan bahasa asing. Kita bahkan dianjurkan untuk menguasai dan memanfaatkan bahasa asing untuk (1) memperlancar komunikasi dengan bangsa lain, (2) menyerap informasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk keperluan pembangunan nasional, dan (3) memperluas wawasan dan cakrawala pandang bangsa kita (GBHN 1993). Hal itu berarti bahwa kalau selama ini kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pada saatnya yang tepat kita pun dituntut untuk menguasai bahasa asing (terutama bahasa Inggris) serta menggunakannya secara baik dan benar pula.

Upaya pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dilakukan melalui berbagai jalur dengan memperhatikan kelompok sasaran yang strategis. Ada penyuluhan bagi para guru, baik guru bahasa Indonesia maupun guru non-bahasa Indonesia; ada penyuluhan untuk para wartawan, baik dari media massa cetak maupun elektronik; ada penyuluhan untuk para mubalig; bahkan ada pula penyuluhan yang khusus diadakan bagi mereka yang terlibat dalam bidang iklan. Para guru, wartawan, mubalig, dan pengelola iklan ini merupakan kelompok-kelompok profesi yang pemakaian bahasa Indonesiannya sering dijadikan contoh oleh masyarakat kita.

Melalui RRI dan TVRI program nasional dilakukan Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia sekali seminggu. Siaran ini mendapat perhatian yang cukup luas, terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan para peminat bahasa yang lain. Selain itu, karena GBHN 1993 mengamanatkan agar upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat, penyuluhan yang dilakukan melalui kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan Pemerintah Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia sungguh-sungguh sangat bermanfaat. Para pejabat teras di lingkungan Pemda Tingkat I itu merupakan kelompok sasaran yang diprioritaskan. Demikian pula halnya dengan para pejabat teras departemen dan lembaga-lembaga tinggi negara di tingkat pusat. Kegiatan penyuluhan atau pemasyarakatan bahasa Indonesia itu tidak hanya dilakukan selama Bulan Bahasa pada bulan Oktober, tetapi juga senantiasa diupayakan agar kegiatan tersebut berlangsung sepanjang tahun.

Dalam hal penyuluhan itu dilakukan di kantor/instansi pemerintah, perlu pula diperhatikan tingkat dan mutu penguasaan dan keterampilan kelompok sasaran dalam berbahasa Indonesia. Salah satu indikatornya ialah latar belakang pendidikan. Menurut catatan tanggal 31 Maret 1993, dari jumlah PNS (pegawai negeri sipil) sebanyak 4.009.347 orang, yang paling banyak ialah lulusan SLTA (58%), kemudian lulusan SD (14%), disusul oleh lulusan SLTP dan akademi (masing-masing 10%), dan yang paling sedikit ialah lulusan S1, S2, dan S3 (8%).

Pengembangan Bahasa

Kalau upaya pembinaan bahasa, seperti yang telah disebutkan, bertujuan agar masyarakat memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia dan dapat menggunakannya secara baik dan benar, upaya pengembangan bahasa dilakukan agar bahasa Indonesia tetap mantap dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang efektif dan efisien dalam berbagai bidang kehidupan: pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, pemerintahan, hukum, dan sebagainya. Dengan demikian, kalau sasaran pembinaan ialah para pemakai, sasaran pengembangan adalah bahasa Indonesianya itu sendiri sebagai sistem sandi sehingga bahasa Indonesia siap digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang paling kompleks sekalipun. Untuk itu, bahasa Indonesia dituntut untuk memenuhi dua persyaratan pokok, yaitu (1) memiliki tata bahasa yang mantap dan (2) khazanah perbendaharaan kata dan peristilahannya luas dan lengkap.

Mengenai hal yang disebutkan terakhir, sejak tahun 1972 selalu diupayakan penyusunan padanan istilah dalam bahasa Indonesia untuk berbagai bidang ilmu. Yang menjadi prioritas utama ialah peristilahan untuk empat bidang ilmu dasar, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sampai saat ini telah berhasil disusun 160.092 istilah dari 107 bidang/sub-bidang ilmu. Kegiatan penyusunan istilah ini dilakukan oleh para pakar/ahli dari berbagai perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia melalui wadah kerja sama kebahasaan antarnegara yang disebut Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia).

Kosakata bahasa Indonesia dari waktu ke waktu memperlihatkan peningkatan yang menakjubkan. Hal ini antara lain terlihat pada jumlah kata yang termuat dalam kamus. *Kamus Indonesia* susunan E.St. Harahap (1951) memuat 21.119 kata. Berikutnya *Kamus Modern Bahasa Indonesia* oleh St. Moh. Zain (1954) sudah memuat 39.738 kata. Tahun 1976 terbit *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan W.J.S. Poerwadarminta dengan 48.004 kata. Setelah itu, ada *Kamus Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1983) dengan 55.406 kata. Akhirnya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi I susunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1988) menampilkan 62.116 kata, sementara pada edisi keduanya (1991) terdapat 73.024 kata. Jumlah kosakata ini akan terus bertambah secara lebih cepat, terutama karena makin pesatnya kemajuan dan perkembangan dalam teknologi informasi.

Kosakata bahasa Indonesia yang kian hari kian bertambah itu diakibatkan oleh masuknya kata/istilah baru dari bahasa daerah dan bahasa asing. Kata/istilah "pendatang baru" itu harus tunduk pada 'aturan main' yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kata *grobak* dan *clurit* yang berasal dari bahasa

daerah, misalnya, menjadi *gerobak* dan *celurit* dalam bahasa Indonesia. Demikian pula contoh kata Indonesia *televisi*, *departemen*, dan *management*. Aturan atau kaidah mengenai hal ini tercantum baik pada buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* maupun *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.

Sehubungan dengan hal itu, bahasa asing harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya kosakata bahasa nasional kita agar potensi dan daya ungkapnya makin lama makin kuat. Oleh karena itu, dalam menghadapi ekspansi kata-kata asing ini kita harus benar-benar mampu membedakan kata-kata asing yang memang diperlukan untuk memperkaya perbendaharaan kata bahasa Indonesia dari kata-kata asing yang tidak kita perlukan karena sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia.

Kata seperti *direktur*, *radio*, *komunikasi*, *struktur*, dan *karier* yang berasal dari bahasa asing memang kita perlukan. Akan tetapi, untuk apa kita menggunakan *skill*, *mental*, *attitude*, *high cost*, *buyer*, dan *airport*, misalnya, kalau kita dapat mengungkapkannya dengan *keterampilan*, *sikap mental*, *biaya tinggi*, *pembeli*, dan *bandara*. Kata-kata asing jenis terakhir ini harus berani kita golongkan sebagai sampah yang hanya akan mencemari citra bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.

Catatan Penutup

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa ini perlu diupayakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Kalau dinamika masyarakat pemakaian bahasa Indonesia yang terus berkembang seiring dengan perubahan dan tuntutan berbagai bidang kehidupan tidak dapat diimbangi oleh upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesianya, maka bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi akan selalu "ketinggalan".

Keberhasilan upaya pengembangan bahasa dapat diukur atau dapat di-kuantifikasi. Adanya buku tata bahasa, kamus umum, kamus istilah, dan berbagai buku pedoman mengenai pemakaian bahasa Indonesia secara tertulis atau lisan merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan upaya pengembangan. Berbeda halnya dengan upaya pembinaan yang tingkat keberhasilannya tidak mungkin dapat diukur. Selama masyarakat kita belum memperlihatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, selama itu pula pembudayaan bahasa Indonesia belum berhasil. Hal itu berarti pula bahwa upaya pembinaan masih harus terus dilakukan oleh semua pihak, tidak saja oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi juga oleh pihak mana saja, baik sebagai perseorangan maupun kelompok, yang merasa terpanggil untuk "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia".

Sejak Presiden Soeharto mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada tanggal 20 Mei 1995, bersamaan dengan saat pencahangan Gerakan Disiplin Nasional, sejak itu pula terlihat adanya titik-titik terang yang menggembirakan karena bahasa Indonesia mulai menampakkan dirinya sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Mudah-mudahan perubahan papan nama, papan petunjuk, dan iklan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia yang kita saksikan sekarang ini benar-benar mencerminkan mulai tumbuh dan makin mantapnya sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia. Hal itu berarti pula kedudukan bahasa Indonesia sebagai lambang dan perwujudan jati diri bangsa akan semakin mantap.

9. KEDUDUKAN DAN PERAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI*

1. Selama beberapa tahun terakhir ini era globalisasi hampir selalu dijadikan topik pembicaraan, terutama oleh kelompok menengah ke atas. Pada umumnya era globalisasi itu hanya dihubungkan dengan bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam pengertian itu yang dipermasalahkan adalah perdagangan bebas yang menyangkut lalu-lintas barang dan jasa, termasuk lalu-lintas (anggota) kelompok profesional yang terlibat (langsung) dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan proses dihasilkannya barang dan jasa itu. Ini berarti bahwa era perdagangan bebas itu juga ditandai oleh lalu-lintas sumber daya manusia (SDM).

Pada saat era globalisasi itu sudah menjadi kenyataan nanti, pada abad ke-21 atau milenium ketiga, batas-batas geopolitis yang selama ini dipandang sebagai ciri dan sekaligus penyekat suatu negara, dapat dipastikan akan makin kabur, sesuai dengan tingkat kepesatan lalu-lintas barang dan jasa serta SDM antarnegara.

Dalam derap dan dinamika arus globalisasi yang demikian, amatlah wajar apabila kita mulai mempertanyakan tentang seberapa jauh potensi yang kita miliki guna mempertahankan kedudukan dan peran bahasa dan sastra Indonesia. Kalau disederhanakan, pertanyaan itu menjadi sebagai berikut. Dapatkah bahasa Indonesia bertahan sebagai lambang jati diri bangsa? Akankah sastra Indonesia tetap dipandang sebagai mahkota bahasa?

2. Ada jawaban yang sudah dapat dipastikan terhadap pertanyaan itu, yakni bahwa era globalisasi dengan ruang lingkup konsep dan muatan makna yang demikian pasti akan berpengaruh terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Pemberian pengaruh itu bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Dampak yang ditimbulkannya bisa positif atau negatif. Dampak positif pasti memberikan keuntungan dan dampak negatif bagaimanapun hanya akan menimbulkan kerugian bagi kelangsungan hidup bahasa dan sastra Indonesia.

Apa yang akan terjadi pada bahasa dan sastra Indonesia pada era glo-

* Makalah Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XIX, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, 8 September 1997.

balisasi itu sesungguhnya sudah dapat diramalkan. Dengan mudah kita dapat menarik berbagai pelajaran berharga dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Setelah dikukuhkan dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung (dalam arti harus dihormati dan digunakan dengan sebaik-baiknya), bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 UUD 1945.¹

Bahasa Melayu, yang pada tahun 1928 disepakati oleh para pemuda yang mewakili hampir seluruh kelompok etnis di Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia,² juga sejak awal pertumbuhannya sudah memperlihatkan perkembangan yang dinamis, terutama dari segi pengayaan kosakatanya. Dapat disebutkan, misalnya, bahwa pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu sudah mulai dimasuki unsur-unsur bahasa Sansekerta dan pada zaman kerajaan Malaka yang memperkaya kosakata bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Arab.³ Bahwa pada zaman kerajaan Malaka kedudukan dan peran bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca* di kawasan Asia Tenggara, hal itu diakui oleh seorang peneliti Belanda, Jan Huygen van Linschoten, yang menyatakan bahwa "bahasa Melayu di Asia Tenggara tak kurang pentingnya dalam fungsi komunikasi antarbangsanya daripada bahasa Perancis di Eropa Barat". "...setiap orang yang ingin ikut dalam kehidupan antarbangsa di kawasan itu mutlak perlu mengetahui bahasa Melayu."⁴

3. Dengan memperhatikan secara cermat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sejak bahasa itu masih bernama bahasa Melayu sampai menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (Bab XV Pasal 36 UUD 1945), dapatlah disimpulkan bahwa bahasa persatuan dan bahasa negara kita itu telah berhasil menjalankan peran dan memenuhi fungsinya. Pada kurun waktu 1928--1945 bahasa Indonesia telah berhasil menumbuhkan dan memelihara semangat persatuan di antara seluruh kelompok etnis yang ada sehingga bangsa Indonesia dapat menyatakan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang merdeka di sebuah negara yang berdaulat. Alat komunikasi yang digunakan oleh para pemimpin dan pejuang kemerdekaan (dalam arti yang luas) adalah bahasa Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam UUD 1945 adalah bahasa Indonesia. Kesemuanya itu dengan jelas menggambarkan keberhasilan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Setelah proklamasi 1945 peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara amatlah menonjol dan dominan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenis dan jenjang pendidikan.

Administrasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan peri kehidupan bernegara dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan nasional—kebudayaan nasional yang sudah pasti tidak hanya menyangkut kebudayaan kelompok etnis tertentu—juga dilakukan lewat pemanfaatan bahasa Indonesia.⁵ Karena pada umumnya konsep-konsep yang berhubungan dengan iptek modern terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia juga telah terbukti berperan secara efektif dan efisien tidak saja dalam menyebarluaskan (antara lain melalui penerjemahan dan penyaduran), tetapi juga dalam upaya lebih meningkatkan dan mengembangkan bidang-bidang ilmu yang tergolong iptek modern itu (antara lain melalui penulisan buku teks dan karya-karya ilmiah di lembaga pendidikan tinggi, seperti skripsi, tesis, dan disertasi).

4. Keberhasilan bahasa Indonesia dalam memenuhi peran dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara itu sangat erat berkaitan dengan dua hal yang masing-masing dapat disebut—sekadar penamaan karena tidak didasarkan pada kriteria terminologis tertentu—masalah teknis dan masalah prinsip. Masalah teknis berhubungan dengan hal kebahasaan, sedangkan masalah prinsip dengan hal sikap keindonesiaan.

Upaya yang harus terus-menerus dilakukan untuk masalah kebahasaan ialah upaya yang bertujuan agar bahasa Indonesia tetap dapat digunakan secara mantap sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan segala macam pandangan, gagasan, dan konsep mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai pada yang paling rumit dan kompleks—yang menyangkut berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, ada dua ukuran yang dapat digunakan. Pertama, kaidah atau norma yang tercakup dalam tata bahasa bahasa Indonesia harus mantap, menyeluruh, dan tuntas. Kedua, kosakata bahasa Indonesia, termasuk peristilahannya, harus lengkap sehingga dengan bahasa Indonesia siapa pun dapat berbicara atau menulis tentang apa saja.

Adapun masalah prinsip, yang di atas disebutkan sebagai hal yang berkenaan dengan sikap keindonesiaan, sesungguhnya bermuara pada muatan makna kata *menjunjung* yang terdapat dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928: "Kami putera dan puteri Indonesia *menjunjung* bahasa persatuan bahasa Indonesia". Makna *menjunjung* yang dilandasi oleh sikap keindonesiaan mengisyaratkan bahwa semua warga negara Indonesia diharapkan untuk menghormati, memelihara, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sikap keindonesiaan tidak berarti bahwa kita harus menutup diri ter-

hadap pengaruh bahasa asing. Kalau hal itu kita lakukan akan berarti bahwa kita telah membentengi bahasa Indonesia bukan dengan maksud agar bahasa persatuan dan bahasa negara itu tetap terjaga ciri keasliannya, melainkan agar bahasa Indonesia tetap miskin (kosakatanya). Akibatnya akan lebih parah, yaitu bahwa bahasa Indonesia tidak akan mampu berperan sebagai bahasa negara dengan sebaik-baiknya karena, misalnya, kita tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam penyebarluasan dan pengembangan iptek modern. Yang harus diupayakan ialah agar bahasa Indonesia itu sekaligus memenuhi tuntutan teknis kebahasaan (tata bahasanya mantap dan kosakata/ peristilahannya lengkap) dan tuntutan untuk tetap bersikap keindonesiaan di dalam menerima pengaruh-pengaruh yang berasal dari bahasa asing itu. Hal itu jelas mengisyaratkan bahwa dalam hal upaya memperkaya kosakata/peristilahan bahasa Indonesia, misalnya, kita harus terbuka, tetapi selektif: terbuka untuk pengaruh yang benar-benar dapat memperkaya, selektif untuk pengaruh yang dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi citra bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.

5. Kalau ditinjau dari segi pembinaan dan pengembangan bahasa/sastra Indonesia, maka upaya pembinaan berhubungan dengan masalah sikap keindonesiaan dan upaya pengembangan dengan masalah teknis kebahasaan/kesastraan. Di dalam garis-garis haluan kebahasaan yang telah sepakati selama ini (lihat Halim (Ed.), 1976 dan Moeliono, 1985) terlihat bahwa upaya pembinaan dan pengembangan bahasa (termasuk sastra) di Indonesia perlu dilakukan secara berencana, teratur, dan terarah.⁶

Apabila kita berhasil dengan baik dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dengan pengembangan yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia, rasanya tidak ada alasan untuk bersikap pesimistis dalam memandang kedudukan dan peran bahasa dan sastra Indonesia dalam era globalisasi nanti.

Catatan:

1. Semboyan atau imbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesungguhnya bersumber pada butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut. Tahun 1928 dengan demikian merupakan tonggak sejarah yang mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tonggak sejarah lainnya bertariikh tahun 1945 karena melalui Pasal 36 UUD 1945 kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan lagi sebagai bahasa negara. Kedudukan yang disebutkan terakhir ini bahkan dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa bahasa Indonesia

digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang dan jenis pendidikan. Mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal itu selalu tercantum dalam setiap GBHN, baik dalam sektor pendidikan maupun kebudayaan. Menurut GBHN 1993, secara eksplisit dinyatakan bahwa upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat antara lain untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam GBHN yang sama juga dikemukakan bahwa penggunaan kata atau istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Namun, dalam kenyataannya imbauan itu tidak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya ialah masih adanya pandangan pada sebagian anggota masyarakat kita yang menganggap bahasa asing lebih bergengsi karena memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Masalah inilah yang melatarbelakangi dan mendorong Kepala Negara untuk mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada tanggal 20 Mei 1995. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan itu ialah ditertibkannya pemakaian bahasa asing di tempat-tempat umum dan menggantinya dengan bahasa Indonesia.

2. Disepakatinya pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia itu oleh Taufik Abdullah (dalam Latif dan Idi Subandy (Ed.), 1996:360) dipandang sebagai proses kimia kebahasaan yang unik karena bahasa Melayu sebagai bahasa non-mayoritas telah disepakati menjadi bahasa nasional tanpa saingan dan bahkan tanpa perdebatan.
3. Kronologi perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia ini dapat dilihat, antara lain, dalam Alwi (1996).
4. Lihat Teeuw (1994:251--252) yang selanjutnya juga mencatat bahwa *Kamus Bahasa Melayu-Belanda* yang disusun oleh Frederick de Houtman, seorang pedagang Belanda, diterbitkan tahun 1603. Kamus itu kemudian diterbitkan pula dalam bahasa Latin dan beberapa bahasa Eropa lain. Menurut Teeuw, hal itu "menjadi bukti pertama yang sangat meyakinkan tentang prestise bahasa Melayu dalam dunia antarbangsa di zaman modern."
5. Seperti kita ketahui, masalah kebudayaan ini amatlah penting dalam kehidupan suatu bangsa. Itulah sebabnya Pasal 32 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" yang penjelasannya adalah sebagai berikut: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan

bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Sastra Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia dengan demikian menjadi salah satu komponen utama yang perlu dan harus pula "diperhatikan" oleh Pemerintah.

6. Upaya seperti itu dapat dikaitkan dengan pandangan Soedjatmoko (dalam Latif dan Idi Subandy (Ed.), 1996:184) yang merumuskan tiga buah pertanyaan: "1. Sampai di mana bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa persatuan? 2. Sampai di mana bahasa Indonesia berhasil menjadi wahana modernisasi kebudayaan, dan khususnya berhasil menjadi alat penguasaan dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi? 3. Sampai di mana bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat?"

10. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA MENUJU ERA GLOBALISASI*

1. Selama beberapa tahun terakhir ini era globalisasi hampir selalu dijadikan topik pembicaraan, terutama oleh kelompok menengah ke atas. Pada umumnya era globalisasi itu hanya dihubungkan dengan bidang perekonomian dan perdagangan. Dalam pengertian itu yang dipermasalahkan adalah perdagangan bebas yang menyangkut lalu-lintas barang dan jasa, termasuk lalu-lintas (anggota) kelompok profesional yang terlibat (langsung) dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan proses dihasilkannya barang dan jasa itu. Ini berarti bahwa era perdagangan bebas itu juga ditandai oleh lalu-lintas sumber daya manusia (SDM).

Pada saat era globalisasi itu sudah menjadi kenyataan nanti, pada abad ke-21 atau milenium ketiga, batas-batas geopolitis yang selama ini dipandang sebagai ciri dan sekaligus penyekat suatu negara, dapat dipastikan akan makin kabur, sesuai dengan tingkat kepesatan lalu-lintas barang dan jasa serta SDM antarnegara.

Dalam derap dan dinamika arus globalisasi yang demikian, amatlah wajar apabila kita mulai mempertanyakan tentang seberapa jauh potensi yang kita miliki guna mempertahankan kedudukan dan peran bahasa Indonesia. Kalau disederhanakan, pertanyaan itu menjadi: Dapatkah bahasa Indonesia bertahan sebagai lambang jati diri bangsa?

2. Ada jawaban yang sudah dapat dipastikan terhadap pertanyaan itu, yakni bahwa era globalisasi dengan ruang lingkup konsep dan muatan makna yang demikian pasti akan berpengaruh terhadap bahasa Indonesia. Pemberian pengaruh itu bisa terjadi secara langsung atau tidak langsung. Dampak yang ditimbulkannya bisa positif atau negatif. Dampak positif pasti memberikan keuntungan dan dampak negatif bagaimanapun hanya akan menimbulkan kerugian bagi kelangsungan hidup bahasa Indonesia.

Apa yang akan terjadi pada bahasa Indonesia pada era globalisasi itu sesungguhnya sudah dapat diramalkan. Dengan mudah kita dapat menarik berbagai pelajaran berharga dari sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Setelah dikukuhkan dalam butir ketiga Sumpah

* Makalah Seminar Sehari MGMP Bahasa Indonesia SLTP dan SMU se-Jawa Timur, Surabaya, 17 November 1997.

Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung (dalam arti harus dihormati dan digunakan dengan sebaik-baiknya), bahasa Indonesia kemudian ditetapkan sebagai bahasa negara melalui Pasal 36 UUD 1945.

Semboyan atau imbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesungguhnya bersumber pada butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut. Tahun 1928 dengan demikian merupakan tonggak sejarah yang mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tonggak sejarah lainnya bertarih tahun 1945 karena melalui Pasal 36 UUD 1945 kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan lagi sebagai bahasa negara. Kedudukan yang disebutkan terakhir ini bahkan dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang dan jenis pendidikan. Mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal itu selalu tercantum dalam setiap GBHN, baik dalam sektor pendidikan maupun kebudayaan. Menurut GBHN 1993, secara eksplisit dinyatakan bahwa upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat antara lain untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam GBHN yang sama juga dikemukakan bahwa penggunaan kata atau istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Namun, dalam kenyataannya imbauan itu tidak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya ialah masih adanya pandangan pada sebagian anggota masyarakat kita yang menganggap bahasa asing lebih bergengsi karena memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Masalah inilah yang melatarbelakangi dan mendorong Kepala Negara untuk mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada tanggal 20 Mei 1995. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan itu ialah ditertibkannya pemakaian bahasa asing di tempat-tempat umum dan menggantinya dengan bahasa Indonesia.

Bahasa Melayu, yang pada tahun 1928 disepakati oleh para pemuda yang mewakili hampir seluruh kelompok etnis di Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia, juga sejak awal pertumbuhannya sudah memperlihatkan perkembangan yang dinamis, terutama dari segi pengayaan kosakatanya. Disepakatinya pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia itu oleh Taufik Abdullah (dalam Latif dan Idi Subandy (Ed.), 1996:360) dipandang sebagai proses kimia kebahasaan yang unik karena bahasa Melayu sebagai bahasa non-mayoritas telah disepakati menjadi bahasa nasional tanpa saingan dan bahkan tanpa perdebatan.

Mengenai perkembangan bahasa Melayu itu sendiri, dapat disebutkan, misalnya, bahwa pada zaman Sriwijaya bahasa Melayu sudah mulai dimasuki unsur-unsur bahasa Sansekerta dan pada zaman kerajaan Malaka yang

memperkaya kosakata bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Arab. Bahwa pada zaman kerajaan Malaka kedudukan dan peran bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca* di kawasan Asia Tenggara, hal itu diakui oleh seorang peneliti Belanda, Jan Huygen van Linschoten, yang menyatakan bahwa "bahasa Melayu di Asia Tenggara tak kurang pentingnya dalam fungsi komunikasi antarbangsanya daripada bahasa Perancis di Eropa Barat". "...setiap orang yang ingin ikut dalam kehidupan antarbangsa di kawasan itu mutlak perlu mengetahui bahasa Melayu."

Mengenai hal itu, Teeuw (1994:251--252) yang selanjutnya juga mencatat bahwa *Kamus Bahasa Melayu-Belanda* yang disusun oleh Frederick de Houtman, seorang pedagang Belanda, diterbitkan tahun 1603. Kamus itu kemudian diterbitkan pula dalam bahasa Latin dan beberapa bahasa Eropa lain. Menurut Teeuw, hal itu "menjadi bukti pertama yang sangat meyakinkan tentang prestise bahasa Melayu dalam dunia antarbangsa di zaman modern."

3. Dengan memperhatikan secara cermat tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan sejak bahasa itu masih bernama bahasa Melayu sampai menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan bahasa negara (Bab XV Pasal 36 UUD 1945), dapatlah disimpulkan bahwa bahasa persatuan dan bahasa negara kita itu telah berhasil menjalankan peran dan memenuhi fungsinya. Pada kurun waktu 1928—1945 bahasa Indonesia telah berhasil menumbuhkan dan memelihara semangat persatuan di antara seluruh kelompok etnis yang ada sehingga bangsa Indonesia dapat menyatakan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang merdeka di sebuah negara yang berdaulat. Alat komunikasi yang digunakan oleh para pemimpin dan pejuang kemerdekaan (dalam arti yang luas) adalah bahasa Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam UUD 1945 adalah bahasa Indonesia. Kesemuanya itu dengan jelas menggambarkan keberhasilan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Setelah proklamasi 1945 peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara amatlah menonjol dan dominan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Administrasi pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan peri kehidupan bernegara dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Upaya pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan nasional--kebudayaan nasional yang sudah pasti tidak hanya menyangkut kebudayaan kelompok etnis tertentu--juga dilakukan lewat pemanfaatan bahasa Indonesia. Karena pada umumnya konsep-konsep yang berhubungan dengan iptek modern terdapat dalam tulisan-tulisan yang berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia juga telah terbukti berperan secara efektif dan efisien tidak saja dalam menyebarkan (antara lain melalui penerjemahan dan

penyaduran), tetapi juga dalam upaya lebih meningkatkan dan mengembangkan bidang-bidang ilmu yang tergolong iptek modern itu (antara lain melalui penulisan buku teks dan karya-karya ilmiah di lembaga pendidikan tinggi, seperti skripsi, tesis, dan disertasi). Sehubungan dengan masalah kebudayaan yang disinggung di atas, Pasal 32 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" yang penjelasannya adalah sebagai berikut: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Sastra Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia dengan demikian menjadi salah satu komponen utama yang perlu dan harus pula "diperhatikan" oleh Pemerintah.

4. Keberhasilan bahasa Indonesia dalam memenuhi peran dan menjalankan fungsinya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara itu sangat erat berkaitan dengan dua hal yang masing-masing dapat disebut—sekadar penamaan karena tidak didasarkan pada kriteria terminologis tertentu—masalah teknis dan masalah prinsip. Masalah teknis berhubungan dengan hal kebahasaan, sedangkan masalah prinsip dengan hal sikap keindonesiaan.

Upaya yang harus terus-menerus dilakukan untuk masalah kebahasaan ialah upaya yang bertujuan agar bahasa Indonesia tetap dapat digunakan secara mantap sebagai alat komunikasi untuk mengungkapkan segala macam pandangan, gagasan, dan konsep mulai dari yang paling mudah dan sederhana sampai pada yang paling rumit dan kompleks—yang menyangkut berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, ada dua ukuran yang dapat digunakan. Pertama, kaidah atau norma yang tercakup dalam tata bahasa bahasa Indonesia harus mantap, menyeluruh, dan tuntas. Kedua, kosakata bahasa Indonesia, termasuk peristilahannya, harus lengkap sehingga dengan bahasa Indonesia siapa pun dapat berbicara atau menulis tentang apa saja.

Adapun masalah prinsip, yang di atas disebutkan sebagai hal yang berkenaan dengan sikap keindonesiaan, sesungguhnya bermuara pada muatan makna kata *menjunjung* yang terdapat dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928: "Kami putera dan puteri Indonesia *menjunjung* bahasa persatuan bahasa Indonesia". Makna *menjunjung* yang dilandasi oleh sikap keindonesiaan mengisyaratkan bahwa semua warga negara Indonesia diharapkan untuk menghormati, memelihara, dan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Sikap keindonesiaan tidak berarti bahwa kita harus menutup diri terhadap

pengaruh bahasa asing. Kalau hal itu kita lakukan akan berarti bahwa kita telah membentengi bahasa Indonesia bukan dengan maksud agar bahasa persatuan dan bahasa negara itu tetap terjaga ciri keasliannya, melainkan agar bahasa Indonesia tetap miskin (kosakatanya). Akibatnya akan lebih parah, yaitu bahwa bahasa Indonesia tidak akan mampu berperan sebagai bahasa negara dengan sebaik-baiknya karena, misalnya, kita tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia dalam penyebarluasan dan pengembangan iptek modern. Yang harus diupayakan ialah agar bahasa Indonesia itu sekaligus memenuhi tuntutan teknis kebahasaan (tata bahasanya mantap dan kosakata/peristilahannya lengkap) dan tuntutan untuk tetap bersikap keindonesiaan di dalam menerima pengaruh-pengaruh yang berasal dari bahasa asing itu. Hal itu jelas mengisyaratkan bahwa dalam hal upaya memperkaya kosakata/peristilahan bahasa Indonesia, misalnya, kita harus terbuka, tetapi selektif: terbuka untuk pengaruh yang benar-benar dapat memperkaya, selektif untuk pengaruh yang dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi citra bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa.

5. Kalau ditinjau dari segi pembinaan dan pengembangan bahasa, upaya Pembinaan berhubungan dengan masalah sikap keindonesiaan dan upaya pengembangan dengan masalah teknis kebahasaan/kesastraan. Di dalam garis-garis haluan kebahasaan yang telah sepakati selama ini (lihat Halim (Ed.), 1976 dan Moeliono, 1985) terlihat bahwa upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia perlu dilakukan secara berencana, teratur, dan terarah. Upaya seperti itu dapat dikaitkan dengan pandangan Soedjatmoko (dalam Latif dan Idi Subandy (Ed.), 1996:184) yang merumuskan tiga buah pertanyaan: "1. Sampai di mana bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa persatuan? 2. Sampai di mana bahasa Indonesia berhasil menjadi wahana modernisasi kebudayaan, dan khususnya berhasil menjadi alat penguasaan dan pembinaan ilmu pengetahuan dan teknologi? 3. Sampai di mana bahasa Indonesia telah berhasil menjadi wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat?"

Apabila kita berhasil dengan baik dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dengan pengembangan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, rasanya tidak ada alasan untuk bersikap pesimistis dalam memandang kedudukan dan peran bahasa Indonesia dalam era globalisasi nanti.

11. FUNGSI POLITIK BAHASA*

1. Masalah kebahasaan di Indonesia memperlihatkan ciri yang sangat kompleks. Hal itu berkaitan erat dengan tiga aspek, yaitu yang menyangkut *bahasa*, *pemakai bahasa*, dan *pemakaian bahasa*. Aspek bahasa menyangkut bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing (terutama bahasa Inggris). Aspek pemakai bahasa terutama berkaitan dengan mutu dan keterampilan berbahasa seseorang. Dalam perilaku berbahasa tidak saja terlihat mutu dan keterampilan berbahasa, tetapi juga sekaligus dapat diamati apa yang sering disebut sebagai *sikap* pemakai bahasa terhadap bahasa yang digunakannya. Adapun aspek pemakaian bahasa mengacu pada bidang-bidang kehidupan yang merupakan ranah pemakaian bahasa.

Pengaturan masalah kebahasaan yang kompleks itu perlu didasarkan pada *kehendak politik* yang mantap. Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai *bahasa persatuan* yang harus dijunjung dan dihormati oleh seluruh warga negara, secara jelas merupakan *pernyataan politik* yang sangat mendasar dan strategis dalam bidang kebahasaan. Pasal 36 UUD 1945 berikut penjelasannya, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai *bahasa negara*, merupakan landasan konstitusional yang kokoh dan sekaligus sebagai pernyataan kehendak politik yang kuat dalam bidang kebahasaan. Selain itu, berbagai macam rekomendasi yang disepakati dalam setiap kali penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia perlu dicatat sebagai gambaran keinginan yang kuat dari para pesertanya agar segala sesuatu yang menyangkut masalah kebahasaan di Indonesia ditangani melalui upaya *pembinaan* dan *pengembangan* bahasa yang lebih efektif dan efisien.

2. Kesimpulan, pendapat, dan usul Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan tahun 1975 di Jakarta telah memberikan gambaran yang komprehensif dan lengkap mengenai butir-butir pokok yang harus diperhatikan dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu meliputi ketiga aspek yang telah disebutkan di atas (*bahasa*, *pemakai bahasa*, dan *pemakaian bahasa*). Selain itu, secara khusus dikemukakan juga rumusan tentang *kedudukan* dan *fungsi* yang

* Makalah Seminar Politik Bahasa, 9—12 November 1999, Hotel Puncak Raya, Cisarua, Bogor

merupakan kerangka dasar dalam *perencanaan bahasa*.

Kerangka dasar yang mantap akan menjadi sumber acuan bagi upaya pengembangan korpus bahasa dan pengidentifikasian ranah pemakaian bahasa. Kedua hal itu pada gilirannya dapat dijadikan semacam tolok ukur untuk mengetahui mutu dan keterampilan berbahasa seseorang, termasuk sikap bahasa yang bersangkutan. Sementara itu, rumusan hasil Seminar juga memberikan perhatian khusus pada *pengembangan pengajaran dan bahasa pengantar*. Keduanya masih merupakan bagian dari aspek pemakaian bahasa yang perlu memperoleh porsi perhatian yang sungguh-sungguh.

Seperti yang dirumuskan Seminar, "pengembangan pengajaran ialah usaha-usaha dan kegiatan yang ditujukan kepada pengembangan pengajaran bahasa agar dapat dicapai tujuan pengajaran bahasa itu sendiri, yaitu agar penutur bahasa itu memiliki keterampilan berbahasa, pengetahuan yang baik tentang bahasa itu, dan sikap positif terhadap bahasa itu, termasuk hasil sastranya." Mengenai bahasa pengantar disebutkan bahwa yang dimaksudkan ialah "bahasa resmi yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di lembaga-lembaga pendidikan."

Undang-Undang No. 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa "bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia". Dalam undang-undang itu juga dirumuskan ihwal bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam tahap awal pendidikan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu, bahasa daerah atau bahasa asing juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar.

3. Seperti sudah disebutkan, hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 memuat rumusan dengan tiga macam tajuk, yaitu *kesimpulan*, *pendapat*, dan *usul*. Rumusan kesimpulan diawali dengan paparan tentang pengertian dasar mengenai *kebijaksanaan nasional*, *bahasa nasional*, *bahasa daerah*, dan *bahasa asing*. Kebijakan nasional dirumuskannya sebagai politik bahasa nasional "yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan." Ditambahkan bahwa penanganan masalah kebahasaan itu perlu diupayakan secara berencana, terarah, dan menyeluruh. Selanjutnya, berturut-turut disajikan rumusan tentang *kedudukan dan fungsi*, *pembinaan dan pengembangan*, *pengembangan pengajaran*, dan *bahasa pengantar* yang semuanya dikaitkan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Perlu ditambahkan bahwa dalam rumusan tersebut bahasa asing hanya dikemukakan sehubungan dengan pemakaian dan pemanfaatannya di Indonesia yang bersama-sama dengan

bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjalin masalah kebahasaan di Indonesia yang perlu ditangani secara berencana, terarah, dan menyeluruh dalam suatu kebijaksanaan nasional seperti yang telah disebutkan di atas.

Rumusan yang bertajuk *pendapat* berisi delapan butir yang secara umum menyangkut pengajaran, ketenagaan, dan sarana. Salah satu butir yang amat penting ialah dikemukakannya pandangan bahwa Politik Bahasa Nasional merupakan penjabaran terhadap Penjelasan Pasal 36 UUD 1945. Pandangan tersebut sudah tepat, tetapi hal itu dalam seminar ini masih perlu dimantapkan lagi, terutama mengingat adanya tuntutan dan tantangan baru yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selama 24 tahun terakhir.

Tiga butir rumusan yang bertajuk *usul* masing-masing menyangkut pengindonesiaan nama-nama asing, penerjemahan, dan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku dalam situasi yang menuntut digunakannya ragam bahasa baku tersebut. Pemberian sanksi ini tampaknya dihadapkan pada berbagai kendala sehingga usul ini masih belum mungkin dapat dilaksanakan. Apalagi dalam suasana dan semangat gerakan reformasi yang masih tetap bergelora seperti sekarang ini, usul tersebut akan dirasakan sangat tidak populer dan pasti memiliki tingkat kesensitifan yang tinggi sehingga hal itu diperkirakan akan menyudutkan posisi Pemerintah pada umumnya dan posisi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada khususnya.

Usul agar kegiatan *penerjemahan* dilaksanakan secara berencana telah diupayakan melalui berbagai cara. Akan tetapi, hasilnya masih amat jauh dari yang diharapkan. Dalam berbagai pertemuan yang secara khusus membahas masalah penerjemahan, persoalan yang sama selalu kembali, yaitu bahwa imbalan yang dapat diberikan kepada penerjemah masih belum sesuai. Akibatnya, sampai saat ini penerjemahan masih merupakan lahan kegiatan yang kering dan tidak menarik. Kita menyadari bahwa penerjemahan itu sangat penting. Masalahnya ialah bahwa hal itu tidak sepenuhnya bergantung pada tersedianya tenaga penerjemah yang bermutu. Perlu dipertimbangkan sejumlah faktor penunjang, antara lain masalah imbalan seperti yang baru saja dikemukakan dan—ini sangat penting dan menentukan—adanya niat atau bahkan tekad yang mantap dari Pemerintah ataupun dari pihak-pihak lain untuk secara bersungguh-sungguh menangani masalah penerjemahan ini.

Sehubungan dengan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional itu, masih ada tiga hal lagi yang perlu memperoleh catatan tersendiri, yaitu dua hal yang menyangkut upaya pembinaan dan pengembangan serta satu hal yang berkenaan dengan pengembangan pengajaran. Catatan tentang ketiga hal itu adalah sebagai berikut.

- a. Upaya *pembakuan bahasa Indonesia ragam lisan* patut memperoleh perhatian yang berimbang dengan pembakuan bahasa Indonesia ragam tulis. Untuk itu, saatnya sudah tiba karena kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi informasi telah memberikan kemungkinan yang amat luas bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan untuk lebih mudah mengakses pada penggunaan bahasa lisan dibandingkan dengan bahasa tulis. Dalam bidang media massa, misalnya, masyarakat lebih mudah mendengarkan radio dan/atau "menonton" televisi daripada membaca surat kabar dan/atau majalah. Untuk keperluan itu, apa yang telah dirumuskan Seminar, yakni diperlukannya pembakuan lafal sebagai pegangan bagi para guru, penyiar radio/televisi, dan masyarakat umum, perlu benar-benar dilaksanakan karena sampai saat ini upaya pembakuan tersebut belum memperoleh perhatian dan upaya penanganan yang memadai. Yang telah dilakukan sangat bersifat sporadis karena masalah lafal ini hanya disinggung pada saat siaran Pembinaan Bahasa Indonesia lewat radio/televisi atau sekadar dikomentari dalam kegiatan penyuluhan bahasa.
 - b. Pelbagai *ragam dan gaya bahasa* seperti yang digunakan dalam perundang-undangan, administrasi pemerintahan, dan sarana komunikasi massa memang sudah diteliti. Namun, upaya penelitian itu bukan saja belum tuntas dan belum meliputi seluruh bidang pemakaian bahasa, melainkan juga belum dikodifikasikan. Masalah ini perlu segera ditangani sebagaimana mestinya dan memperoleh prioritas yang sama dengan pembakuan lafal.
 - c. Penelitian *pengajaran bahasa*, baik yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, perlu benar-benar dilaksanakan secara lebih berencana dan lebih terarah agar mutu dan keterampilan siswa dalam berbahasa secara lisan ataupun tertulis dapat ditingkatkan. Dalam berbagai pertemuan masih sering dilontarkan keluhan dan keprihatinan tentang penguasaan bahasa yang masih rendah di kalangan siswa.
4. Dengan beberapa catatan di atas, secara keseluruhan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 masih tetap relevan karena butir-butir rumusannya sudah tepat menggambarkan hal-hal mendasar dalam menangani masalah kebahasaan di Indonesia. Yang masih perlu diupayakan lebih banyak berkaitan dengan strategi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa. Selain itu, rumusan tentang bahasa tertentu yang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia perlu disesuaikan. Tanpa harus menghubungkannya dengan tuntutan keterbukaan dan transparansi yang menjadi ciri era reformasi—lazimnya masalah ini dikaitkan dengan

bidang politik, hukum, dan ekonomi—atau juga tanpa harus menyiasatinya dari keniscayaan global abad ke-21, bahasa Cina (juga bahasa Arab?) perlu diposisikan secara lebih cermat, apakah bahasa yang juga digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia itu akan tetap kita golongkan sebagai bahasa asing atau sebagai salah satu bahasa daerah karena para penuturnya, seperti sudah disebutkan, merupakan salah satu di antara sejumlah kelompok etnis yang sama-sama membangun masyarakat bangsa Indonesia. Kemungkinan perubahan tentang "status" itu akan berakibat pada adanya "pergeseran" tentang kedudukan dan fungsi dari bahasa tersebut.

Penjelasan Pasal 36 UUD 1945, yang antara lain menyebutkan bahwa bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara, akan memperoleh dorongan dan tenaga baru dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Selama ini upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, termasuk pengajarannya, dilakukan oleh Balai Bahasa yang sampai akhir tahun lalu (1998) hanya terdapat di Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang. Pada tahun ini unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Bahasa itu bertambah 14 buah lagi, yaitu di Surabaya, Semarang, Bandung, Padang, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Palu, Manado, dan Jayapura. Bersama-sama dengan Balai Bahasa dan Proyek Pembinaan Bahasa yang ada di hampir semua provinsi, pemerintah daerah (tingkat I dan II) dapat menangani masalah kebahasaan dan kesastraan secara lebih terkoordinasi. Perlu ditambahkan bahwa sudah ada kesepakatan dengan ditandatanganinya Piagam Kerja Sama antara Pusat Bahasa dan Pemda Tingkat I seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia di daerahnya masing-masing dan, sebagai akibat dari Undang-Undang tentang Otonomi Daerah itu, cakupan tugas itu dapat dan harus diperluas dengan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap bahasa dan sastra daerah berikut pengajarannya.

Dalam rumusan tentang pengembangan pengajaran bahasa Indonesia, secara singkat disinggung perlunya menyiapkan program khusus pengajaran bahasa Indonesia, antara lain untuk orang asing. Sejak tahun 80-an telah berlangsung berbagai pertemuan di dalam dan di luar negeri yang secara khusus membicarakan pengajaran *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)*. Kalau diperhatikan dari segi peserta yang menghadiri pertemuan itu, patut dicatat bahwa forum seperti itu ternyata mendapat perhatian yang cukup luas dan menggembirakan, terutama dari para pengajar BIPA di luar negeri. Oleh karena itu, pada tempatnyalah kalau seminar ini memberikan perhatian khusus pada masalah pengajaran BIPA dengan merumuskannya secara lebih tegas dan lebih eksplisit.

Masalah kelembagaan yang dikaitkan dengan penanganan masalah kebahasaan di Indonesia, baik yang berupa instansi Pemerintah maupun institusi lainnya (termasuk lembaga swasta), juga perlu memperoleh porsi pembahasan yang memadai dalam seminar ini. Sejauh yang menyangkut keberadaan Pusat Bahasa berikut UPT-nya, momentum perubahan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Departemen Pendidikan Nasional perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melakukan semacam revisi dan menyampaikan usul perubahan terhadap struktur instansi Pemerintah ini berikut cakupan tugas dan wewenangnya. Tanpa hal itu, tampaknya instansi ini akan tetap menghadapi kendala birokratis di dalam melaksanakan misi yang dipercayakan kepadanya.

5. Dengan kedudukannya sebagai bahasa persatuan (Sumpah Pemuda 1928) dan sebagai bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945), bahasa Indonesia harus berperan dan memenuhi fungsinya sebagai *sarana komunikasi dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa*. Politik bahasa di Indonesia harus jelas menggambarkan kebijaksanaan nasional dalam bidang kebahasaan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti yang luas. Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, kebijaksanaan nasional kebahasaan yang perlu dirumuskan secara berencana, terarah, dan menyeluruh itu harus menggambarkan rambu-rambu yang jelas mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai *wahana modernisasi kebudayaan*, khususnya sebagai *alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Oleh karena itu, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa boleh dikatakan sepenuhnya bergantung pada peran bahasa Indonesia dalam memenuhi fungsi atau tuntutan ini.

Kebiasaan sebagian masyarakat kita dalam berbahasa, seperti yang terlihat pada kecenderungan generasi (cendekiawan) muda yang menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris, belum dapat dikategorikan sebagai gejala yang membahayakan semangat persatuan bangsa. Dilihat dari sifat hubungan informal dan akrab, gejala kebahasaan yang demikian lazim terjadi dalam masyarakat dwibahasa dan dalam kasus tertentu bahkan mungkin dapat dipandang sebagai kreativitas ekspresif kelompok masyarakat yang bersangkutan. Namun, apabila pemakaian bahasa campuran itu lebih cenderung mencerminkan kurang adanya rasa tanggung jawab dalam berbahasa, gejala itu merupakan kecerobohan. Gejala "kebudayaan santai" tersebut juga bersumber pada kurang adanya rasa tanggung jawab dalam pengembangan masyarakat Indonesia secara umum, termasuk dalam konteks pembangunan bangsa. "Kebudayaan santai" itu bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan merupakan pola hidup yang lebih berorientasi pada kebudayaan asing. Kendurnya semangat nasional pada sementara kalangan masyarakat itu pada hakikatnya merupakan

masalah politik. Akan tetapi, hal itu tercerminkan dalam perilaku berbahasa.

Kalau pemakaian bahasa campuran itu bukan karena kecerobohan, melainkan karena kurangnya penguasaan bahasa Indonesia—seperti halnya yang diperlihatkan oleh sebagian besar dari mereka yang telah memperoleh seluruh pendidikannya dalam bahasa Indonesia, tetapi penguasaan bahasa Indonesianya secara lisan apalagi tertulis masih jauh di bawah mutu yang seharusnya—, kalau tetap dibiarkan, hal itu dapat menjadi tendensi regresif dalam peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oleh karena itu, politik bahasa harus mencakupi sejumlah aspek yang memungkinkan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa persatuan.

Selain sebagai *wahana modernisasi kebudayaan* dan sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia yang dirumuskan dalam politik bahasa harus pula berfungsi sebagai *wahana aspirasi bangsa ke arah pendemokrasian masyarakat*. Sejak awal pertumbuhannya, bahasa Indonesia disepakati pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 karena cirinya sebagai bahasa yang demokratis, yang tidak mencerminkan status stratifikasi sosial pemakainya. Itulah sebabnya bahasa Indonesia dapat diterima dan dengan mudah dipelajari oleh generasi muda bangsa dari seluruh kelompok etnik.

Egalitarianisme yang dimiliki bahasa Indonesia itu merupakan jawaban yang tepat atas keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan (sebelum kemerdekaan) dan untuk menikmati kehidupan yang lebih demokratis (setelah kemerdekaan). Dalam perkembangannya kemudian, bahasa Indonesia memperlihatkan pertumbuhan ke arah terciptanya *bahasa tinggi* dan *bahasa rendah*, terutama dalam komunikasi lisan. Pemakaian kata dan ungkapan tertentu dalam jumlah yang makin lama makin besar, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru, mencerminkan bangkitnya kembali sikap dan jiwa feodal atau neofeodal dalam strata masyarakat dan kebudayaan kita.

Gejala itu memperlihatkan eratnya hubungan antara perkembangan bahasa Indonesia dan perkembangan masyarakat pemakaiannya, sesuai dengan aspirasi sosial-politik dan sosial-budaya yang melatarbelakanginya. Dalam batas-batas tertentu, hal itu dapat berdampak positif terhadap upaya pengembangan daya ungkap bahasa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya selama ini yang menggejala ialah *kerancuan semantik* yang lebih luas dan lebih dominan daripada berkembangnya daya ungkap tersebut. Selama kerancuan semantik ini masih melekat dalam perilaku berbahasa kelompok masyarakat tertentu, maka selama itu pula kerancuan semantik itu akan menjadi penghalang bagi masyarakat luas untuk menggunakan bahasa Indonesia secara lebih bebas dan lebih leluasa. Oleh karena itu, membebaskan bahasa Indonesia dari pengaruh neofeodal seperti itu dan

mengembalikan ciri demokratis dan egalitarianisme yang dimilikinya merupakan kewajiban semua pihak yang harus terintegrasi dalam rumusan politik bahasa.

6. Sehubungan dengan beberapa butir pandangan di atas, seminar ini diselenggarakan dengan tujuan meninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Selama 24 tahun telah terjadi berbagai perubahan dalam bidang sosial-politik dan sosial-budaya, baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap situasi dan kehidupan kebahasaan di Indonesia. Empat pokok bahasan dalam seminar ini diharapkan dapat menjaring dan mengidentifikasi perubahan-perubahan tersebut sebagai bahan masukan dan sekaligus bahan pertimbangan bagi para peserta Seminar dalam meninjau dan merumuskan kembali hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 itu.

Keempat pokok bahasan itu masing-masing berkaitan dengan (1) kedudukan dan fungsi bahasa, (2) mutu dan peran bahasa, (3) mutu pemakaian bahasa, dan (4) kelembagaan. Kedudukan dan fungsi bahasa disoroti dari bahasa Indonesia, bahasa daerah, sastra Indonesia dan daerah, dan bahasa asing. Adapun topik tentang penelitian bahasa, penelitian sastra, penelitian pengajaran bahasa dan sastra, serta penyusunan sarana uji kemahiran berbahasa tercakup dalam pokok bahasan tentang mutu dan peran bahasa. Sementara itu, masalah mutu pemakaian bahasa akan dipaparkan melalui tiga topik, yaitu peningkatan mutu pengajaran bahasa, peningkatan mutu pengajaran sastra, dan peningkatan pemyarakatan bahasa dan sastra. Akhirnya, hal yang berkenaan dengan masalah kelembagaan secara khusus akan dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi lembaga kebahasaan.

Melalui pemaparan dan pembahasan keempat pokok bahasan itu, seminar ini diharapkan dapat menyusun dan merumuskan suatu politik bahasa yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam menangani berbagai masalah kebahasaan yang aktual di Indonesia. Dalam menghadapi era globalisasi pada abad ke-21, rumusan tentang kedudukan dan fungsi bahasa perlu benar-benar lebih dimantapkan dalam seminar ini. Selain itu, masalah kelembagaan perlu ditata kembali sesuai dengan tuntutan perubahan yang timbul di dalam masyarakat sehingga mekanisme kelembagaan tersebut mencerminkan rambu-rambu yang jelas dalam mengelola setiap upaya pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia.

12. BAHASA INDONESIA DAN PERILAKU BERBAHASA*

1. Bahasa Indonesia sekarang ini sedang sakit. Ia tidak lagi dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang dapat diandalkan, yang efektif". Pernyataan itu diungkapkan oleh seorang wartawan di sela-sela kegiatan Bulan Bahasa beberapa tahun yang lalu. Seminggu yang lalu, dalam suatu pertemuan yang membahas topik pengajaran bahasa Indonesia, seorang mahasiswa pascasarjana jurusan bahasa asing mengemukakan hal yang hampir sama, tetapi dengan cara dan nada yang berbeda. Dikatakannya bahwa bahasa Indonesia berjalan di tempat alias tidak maju-maju sehingga, menurut yang bersangkutan, bahasa persatuan kita itu makin ketinggalan zaman. Bukan-kah kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, terlebih-lebih nanti pada era globalisasi, memperlihatkan peningkatan yang makin cepat?
2. Baik sang wartawan ataupun si mahasiswa sama-sama bertolak dari sudut pandang yang keliru tentang bahasa Indonesia. Akibatnya, timbullah kerancuan dalam penilaian seperti yang digambarkan di atas. Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi verbal harus dibedakan dari kemampuan seseorang di dalam menggunakannya secara tertulis ataupun lisan. Dengan demikian, yang sedang sakit dan berjalan di tempat itu adalah (para) pemakainya, bukan bahasa Indonesiannya. Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesiannya, selama terus diupayakan agar tata bahasanya tetap mantap, kosakata berikut peristilahannya tetap kaya dan lengkap, serta daya ungkapnya tetap dikembangkan, dan selama dengan bahasa Indonesia yang seperti itu tata bahasanya mantap, kosakata dan peristilahannya lengkap, dan daya ungkapnya tinggi orang dapat mengungkapkan berbagai gagasan, konsep, atau pandangan dalam segala bidang kehidupan, mulai dari yang singkat dan sederhana sampai kepada yang rumit dan kompleks, maka selama itu pula bahasa Indonesia tetap merupakan sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien.
3. Tingkat kemampuan berbahasa Indonesia para pemakainya sangat ditentukan oleh jenis jawaban yang dapat diberikan terhadap ketiga pertanyaan

* Makalah "Seminar Sastra Indonesia XII", Forum Komunikasi Nasional Mahasiswa Sastra Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Tanjungpura, Pontianak, 23—24 November 1999.

berikut. Seberapa jauh perangkat aturan atau norma kebahasaan yang telah dikodifikasi dalam dokumen yang bernama *tata bahasa* itu kita ketahui dan kita kuasai? Seberapa jauh kita memahami dan mengakrabi khazanah kosakata dan peristilahan yang telah terekam di dalam dokumen yang bernama *kamus*? Dalam hal pengembangan daya ungkap, seberapa jauh upaya yang telah kita lakukan agar bahasa yang kita gunakan benar-benar efektif? Kalau jawaban terhadap ketiga pertanyaan itu nadanya "membesarkan hati", maka bolehlah dikatakan bahwa tingkat kemampuan berbahasa Indonesia kita sekurang-kurangnya telah memadai. Sebaliknya, apabila jawaban yang dapat kita berikan terhadap ketiga pertanyaan itu masih berada pada tingkat "memprihatinkan" sehingga kita merasa gagal tidak dapat mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi kemudian kita memberikan penilaian seperti yang dicontohkan bahwa bahasa Indonesia sedang sakit atau berjalan di tempat, maka sesungguhnya penilaian kita itu ibarat kata peribahasa *buruk muka cermin dibelah* atau *awak yang tidak pandai menari dikatakan lantai terjungkit*.

4. *Kemampuan atau keterampilan* berbahasa sangat bersifat individual, bergantung pada pengetahuan tata bahasa dan penguasaan kosakata/peristilahan masing-masing. Latar belakang pendidikan dan minat seseorang terhadap bahasa merupakan faktor pendukung keterampilan berbahasa. Selain itu, keterampilan berbahasa ini akan ditentukan mutunya oleh seberapa jauh kita berupaya menerampilkannya diri dalam menggunakan bahasa lisan atau tulis. Makin sering kita berbicara, makin terampil kita menggunakan bahasa lisan. Makin sering kita menulis, makin terampil kita dalam menggunakan bahasa tulis. Upaya menerampilkannya diri dalam berbahasa itu sekaligus berarti pula meningkatkan mutu pemakaian bahasa. Mutu pemakaian yang meningkat, seperti sudah disebutkan, menggambarkan dapat digunakannya bahasa secara efektif. Penggunaan bahasa secara efektif hanya dimungkinkan kalau bahasa yang bersangkutan memiliki daya ungkap yang tinggi. Meningkatkan daya ungkap bahasa ini tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Hanya mereka yang benar-benar sudah terampil dan berpengalaman, melalui berbagai kreasi, inovasi, dan eksperimennya dalam pemakaian bahasa, daya ungkap suatu bahasa dapat dikembangkan atau ditingkatkan.
5. Kalau dihubungkan dengan *perilaku berbahasa*, kemampuan atau keterampilan itu merupakan salah satu komponen utamanya. Komponen lainnya ialah *sikap*. Kalau kita memiliki *kebanggaan* dan *kesetiaan* terhadap

bahasa Indonesia yang ditunjang oleh *kesadaran* akan norma atau aturan bahasa, hal itu menengarai bahwa kita memiliki *sikap positif* terhadap bahasa Indonesia. Aspek-aspek yang berkenaan dengan sikap itu boleh dikatakan merupakan faktor internal dari perilaku berbahasa seseorang. Di dalam kenyataan berbahasa faktor internal itu berinteraksi dengan sejumlah faktor eksternal. Faktor eksternal ini dapat berupa pola dan praktik berbahasa dari orang-orang yang biasa berkomunikasi dengan masyarakat luas. Kelompok pemakai bahasa yang secara potensial dapat dijadikan model atau contoh berbahasa ini mungkin berperan sebagai *pejabat pemerintah*, *pemuka masyarakat*, *politisi*, atau bahkan *tokoh agama*. Meskipun aktivitas berbahasa ini tidak berlangsung secara bersemuka, kemajuan teknologi informasi sekarang ini membuka peluang yang selebar-lebarnya bagi masyarakat luas untuk mengakses pada peristiwa berbahasa itu. Biasanya yang lazim dijadikan contoh adalah gaya bahasa dan pilihan kata atau diksinya, termasuk ungkapan klise yang sebenarnya sangat bertentangan dengan upaya pengembangan daya ungkap bahasa itu sendiri.

6. Dari keempat kelompok pemakai bahasa yang diasumsikan berpengaruh terhadap perilaku berbahasa masyarakat luas itu, tampaknya yang paling sesuai dengan tema seminar ini, adalah pemakai bahasa yang tergolong sebagai pejabat pemerintah dan politisi. Semasa pemerintahan Orde Baru, misalnya, pendekatan yang ditekankan pada masalah keamanan dan ketertiban dalam pembangunan ekonomi ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan demokrasi pada umumnya dan pada kehidupan politik nasional khususnya. Bahasa yang digunakan pada masa Orde Baru itu dengan demikian diarahkan sedemikian rupa untuk menciptakan mekanisme yang pada satu pihak mampu memaksimalkan produktivitas ekonomi, tetapi pada pihak lain mampu pula meminimalkan kemungkinan terjadinya berbagai konflik sosial. Dengan perkataan lain perilaku berbahasa masyarakat Indonesia harus ditata dan diarahkan untuk mencapai kemandirian dan ketertiban dalam sistem politik. Perilaku berbahasa yang didasarkan pada pendekatan seperti itu melahirkan dan menumbuhkan apa yang dikenal sebagai *eufemisme*, semacam gaya bahasa yang bertujuan menghalus-haluskan ungkapan sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar karena dianggap merugikan atau tidak menyenangkan.
7. Penghalusan bahasa yang sudah sangat memasyarakat pada masa Orde Baru itu mengakibatkan kecenderungan yang kuat bahwa pemakaian bahasa Indonesia mengalami proses *kramanisasi* yang ditandai oleh bahasa yang halus dan enak didengar serta terpeliharanya *jarak* antara pembicara

dan masyarakat pendengar. Pemakaian kata seperti *rawan pangan*, *subversif*, *stabilitas nasional*, *bersih lingkungan*, *diamankan*, *dirumahan*, dan *kesalahan prosedur* sengaja diciptakan oleh para pemakai bahasa yang sedang berkuasa pada saat itu dengan makna yang diinginkannya. Masyarakat luas pemakai bahasa yang lain tidak dibenarkan memberikan penafsiran yang berbeda dari konsep dan kandungan makna yang telah mereka tentukan sehubungan dengan pemakaian kata-kata yang dicontohkan tersebut. Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi adalah semacam *hegemoni makna* dalam pemakaian bahasa Indonesia. Dilihat dari perkembangan bahasa yang seharusnya berlangsung secara wajar dan alamiah yang semata-mata didasarkan pada kesepakatan di antara para pemakainya, pendekatan penguasa dalam hal pemakaian bahasa yang melahirkan kramanisasi dan hegemoni makna itu jelas sangat merugikan.

8. Contoh di atas memperlihatkan bahwa perilaku berbahasa masyarakat sangat dipengaruhi oleh bidang di luar bahasa itu sendiri. Pemakaian bahasa dalam era reformasi sekarang justru memperlihatkan hal yang sebaliknya. Gaya bahasa yang menjurus ke arah kramanisasi sedapat mungkin dihindari, bahkan cenderung diharamkan. Akibatnya, meskipun terdengar kasar, kalau kata yang dipilih sudah dianggap tepat, kata tersebut harus tetap digunakan. Hal itu sejalan dengan semangat reformasi yang di dalam segala hal menuntut keterbukaan dan transparansi. Dengan perkataan lain, setiap kata yang digunakan haruslah sesuai dengan maknanya yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa Indonesia secara keseluruhan. Makna kata yang demikian sudah terekam di dalam kamus.
9. Selain perbedaan yang sangat mencolok dalam hal perilaku berbahasa antara zaman Orde Baru dan Orde Reformasi seperti yang telah dikemukakan terdahulu, di antara keduanya ada pula persamaannya, yaitu masih tingginya kecenderungan untuk mengutamakan pemakaian kata atau istilah asing, alih-alih kata atau istilah Indonesia. Kalau kecenderungan itu hanya menyangkut kata/istilah asing yang belum ada atau tidak dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, hal tersebut dapat dengan mudah kita pahami. Akan tetapi, kalau yang digunakan dalam konteks berbahasa Indonesia itu adalah kata/istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau yang dapat dengan mudah dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia, hal ini benar-benar patut kita catat sebagai cacat yang harus segera diperbaiki. Kata seperti *voting*, *one man one vote*, *power sharing*, dan *bargaining position* adalah kata-kata asing yang dapat dengan mudah dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kenyataannya menunjukkan bahwa kata-kata tersebut masih digunakan oleh masyarakat

pemakai, termasuk dan terutama oleh para politisi yang menjadi anggota DPR/MPR. Sementara itu, contoh tambahan perlu disebutkan sehubungan dengan kata *interupsi*. Kata itu digunakan oleh seseorang di dalam sebuah forum pertemuan resmi yang ingin menyela atau segera mendapat giliran berbicara ketika pada saat tersebut sedang ada orang lain yang tengah berbicara. Yang patut disesalkan adalah karena kata itu cenderung digunakan dalam pengertian yang berbeda dari makna asalnya.

10. Paparan singkat di atas mencoba memperlihatkan perilaku berbahasa seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang dipengaruhi tidak saja oleh faktor internal dari pemakai bahasa itu sendiri, tetapi juga oleh faktor eksternal yang berasal dari berbagai bidang kehidupan di luar masalah kebahasaan. Yang paling dominan dari faktor eksternal ini adalah perilaku berbahasa kelompok pejabat pemerintah dan para politisi. Selama pemakaian bahasa oleh kelompok ini tidak memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi pemakaian bahasa Indonesia secara umum, maka selama itu pula cara berbahasa kelompok tersebut dapat diteladani. Sebaliknya, yang perlu dan harus dicermati adalah jangan sampai cara berbahasa kelompok tersebut akan merugikan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Untuk itu, semua pihak perlu benar-benar memahami dan menyadari makna yang sesungguhnya dari butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berupa pernyataan tekad untuk "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia".

13. BAHASA INDONESIA DI ANTARA KEMAUAN POLITIK DAN BELANTARA PEMAKAIANNYA

Pembinaan merupakan kegiatan kebahasaan yang pelaksanaannya melibatkan banyak pihak. Ada pihak yang secara sadar melakukannya sebagai upaya pembinaan, tetapi ada pula yang tidak menyadari bahwa yang dilakukannya itu mengandung misi pembinaan. Pusat Bahasa dan HPBI tentu saja termasuk ke dalam kelompok yang disebutkan pertama. Kegiatan yang dilakukannya tidak saja karena didorong oleh kesadaran, tetapi juga--dan ini memang yang lebih penting--oleh rasa tanggung jawab. Selain Pusat Bahasa dan HPBI, guru bahasa Indonesia juga dapat digolongkan sebagai bagian dari kelompok pertama karena yang dilakukannya di kelas bukan sekadar pembelajaran, melainkan juga merupakan upaya pembinaan dalam pemahaman yang lebih terbatas jika dibandingkan dengan upaya pembinaan yang dilakukan terhadap masyarakat pemakai bahasa pada umumnya.

Untuk kelompok kedua yang pertama-tama perlu disebut adalah kalangan pers; yaitu wartawan dan staf redaksi (termasuk penulis tajuk rencana atau editorial) untuk media massa cetak (surat kabar dan majalah) serta para pembawa acara, reporter, komentator, dan penulis naskah berita untuk media massa elektronik (radio dan televisi). Para penulis buku pengarang atau sastrawan, pejabat negara/pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama juga harus disebut sebagai bagian dari kelompok kedua yang kesemuanya itu melaksanakan tugas keprofesian dalam bidang masing-masing dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Hanya saja mereka itu tidak atau kurang menyadari bahwa bahasa yang mereka gunakan--mungkin yang berupa pilihan kata, gaya bahasa, atau susunan kalimatnya--akan memberikan pengaruh tertentu bagi pembaca atau pendengarnya. Ini berarti bahwa bahasa yang digunakan kelompok kedua, tanpa disadari oleh yang bersangkutan, secara tidak langsung akan berdampak pada sikap dan perilaku berbahasa kelompok masyarakat yang menjadi pembaca atau pendengarnya.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh cara berbahasa kelompok kedua itu tentu saja tidak dapat dipandang sebagai pernyataan hitam-putih karena di dalamnya pasti ada gradasi. Gradasi ini ditentukan oleh mutu pemakaian bahasa kelompok kedua yang berinteraksi dengan mutu pemakaian bahasa para pembaca atau pendengarnya. Dalam hal ini berlaku dalil bahwa yang kuat akan mempengaruhi yang lemah; pihak yang mutu pemakaian bahasanya baik akan mempengaruhi pihak yang mutu pemakaian bahasanya tidak baik atau kurang

baik. Dalam konteks pembinaan yang dibahas dalam tulisan ini, yang diharapkan ialah bahwa, dalam hal pemakaian bahasa, kelompok kedua hendaknya memperlihatkan bobot atau mutu yang lebih baik daripada pembaca atau pendengarnya. Kalau hal ini tidak disadari sebagai faktor yang menentukan, terutama oleh mereka yang tergolong kelompok kedua, tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh kelompok pertama dari waktu ke waktu akan makin berat.

Dalam menghadapi kemungkinan yang sama-sama tidak kita inginkan itu, perlu ada jalur komunikasi antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Jalur itu sebenarnya sudah ada atau—bagi mereka yang berpandangan skeptis terhadap jalur tersebut—pernah ada. Memang harus diakui bahwa pemanfaatan jalur komunikasi tersebut masih jauh dari tingkat pencapaian yang optimal, baik dilihat dari segi keintensifannya maupun diukur dari frekuensi pelaksanaannya. Yang penulis ketahui ialah bahwa jalur komunikasi yang dimaksudkan itu berlangsung satu tahun satu kali pada saat diselenggarakannya kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra oleh Pusat Bahasa. Di luar kesempatan itu, jalur tersebut boleh dikatakan menjadi "terputus", hampir tidak ada kontak sama sekali, masing-masing asyik dengan kesibukannya sendiri, paling-paling memantau dari kejauhan, sekadar untuk mengetahui "siapa melakukan apa".

Catatan yang layak dikemukakan sehubungan dengan jalur komunikasi tersebut ialah bahwa sejak dua tahun terakhir ini Pusat Bahasa menjalin kerja sama dengan para sastrawan di dalam merancang berbagai bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan apresiasi sastra masyarakat, khususnya generasi muda, mahasiswa, dan siswa. Pertemuan berkala diadakan dan hasilnya dapatlah disebut membesarkan hati. Yang lebih penting ialah bahwa melalui pertemuan berkala itu saling memahami di antara kedua belah pihak makin lebih baik dan lebih mantap sehingga segala permasalahan yang menyangkut upaya pembinaan sastra dapat dibicarakan, direncanakan, dan bahkan dilaksanakan secara bersama. Implikasi dari catatan itu ialah bahwa jalur komunikasi yang demikian untuk keperluan upaya pembinaan bahasa perlu mendapat porsi perhatian yang sekurang-kurangnya memadai, antara lain melalui seminar HPBI ini.

Upaya pembinaan yang menjadi beban tugas kelompok pertama, seperti telah disebutkan, antara lain dilakukan oleh HPBI. Sebagai organisasi profesi dalam bidang pembinaan bahasa Indonesia, HPBI sekaligus merupakan mitra kerja Pusat Bahasa. Oleh karena itu, apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh Pusat Bahasa dalam hal pembinaan bahasa Indonesia seyogianya diketahui oleh HPBI, demikian pula sebaliknya. Ihwal saling mengetahui dan saling memahami ini amat penting agar tidak terjadi pertumpangtindihan pelaksanaan tugas di antara keduanya. Dengan perkataan lain, perlu ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara Pusat Bahasa dan HPBI, terutama mengingat amat terbatasnya sarana, tenaga, dan dana di pihak

masing-masing, sementara kelompok sasaran pembinaan yang dihadapi begitu luas sehingga sering menimbulkan berbagai kesulitan di dalam menentukan urutan prioritas yang akan dijadikan kelompok sasaran upaya pembinaan.

Kelompok sasaran pembinaan yang begitu luas itu pada gilirannya akan menciptakan berbagai jenis pemakaian bahasa, khususnya bahasa lisan yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, yang tidak hanya berbeda ragamnya, tetapi juga mutu pemakaiannya. Perbedaan itu pada dasarnya dapat ditelusuri melalui sejumlah faktor yang mempengaruhinya. *Pertama*, sampai awal abad ke-21 ini bahasa Indonesia bagi sebagian terbesar dari masyarakat bangsa kita masih tetap merupakan bahasa kedua setelah bahasa ibu atau bahasa daerah yang mereka gunakan, bahkan masih ada di antaranya yang masih tergolong "buta bahasa Indonesia".¹ Bahasa daerah tersebut menjadi sumber interferensi terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang tingkat "kegawatannya" ditentukan oleh seberapa jauh seseorang "menguasai" bahasa Indonesia. Dalam hal ini pun berlaku pula dalil bahwa yang kuat akan menguasai yang lemah. Akibat interferensi itu, baik yang leksikal maupun gramatikal, ditambah dengan pengaruh lafal dari bahasa ibunya, kita dapat dengan mudah mengenali bahasa Indonesia yang dilisankan oleh para penutur yang berasal dari kelompok etnis tertentu.

Kedua, perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan cenderung makin jauh. Hal itu dapat dipahami karena bahasa lisan yang digunakan di dalam pergaulan sehari-hari memberi kesempatan yang sangat terbuka bagi para pemakai bahasa dari kelompok tertentu untuk mengembangkan corak bahasa yang mereka gunakan—meskipun pada umumnya terbatas pada masalah kosakata yang pembentukannya mengikuti kaidah yang (secara tidak sadar) telah mereka sepakati—untuk keperluan komunikasi di antara mereka yang sering ditandai oleh keinginan dan dorongan menjadi kelompok pemakai bahasa yang eksklusif. Demikianlah yang terjadi pada jenis bahasa lisan yang digunakan oleh generasi muda di Jakarta yang mereka sebut "bahasa gaul".² Menurut James Danandjaja, bahasa gaul atau bahasa "prokem" yang termasuk salah satu bentuk folklor yang disebut ujaran rakyat (*folk speech*) itu dewasa ini telah berhasil menjadi bahasa lisan masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya (termasuk kalangan pengusaha, artis film, sinetron, dan mahasiswa), yang bermukim di daerah perkotaan.³ Akibatnya, timbul kecenderungan baru di kalangan remaja di kota-kota besar selain Jakarta untuk ikut-ikutan menggunakan bahasa gaul, tentu saja dengan maksud agar mereka tidak dicap 'ketinggalan zaman'.⁴ Yang perlu kita catat ialah bahwa kenyataan tersebut merupakan fenomena kebahasaan yang menyangkut masalah sikap dan perilaku berbahasa dari sebagian penutur bahasa Indonesia yang juga perlu kita perhatikan.

Ketiga, latar belakang pendidikan seseorang sedikit banyak berkorelasi dengan mutu bahasa yang digunakannya sehingga dapat diasumsikan bahwa

mutu bahasa Indonesia tamatan perguruan tinggi lebih baik daripada lulusan SMU, tamatan SMU lebih baik bahasa Indonesiannya daripada lulusan SLTP, dan seterusnya. *Keempat*, jenis pekerjaan yang dihadapi sehari-hari juga akan menentukan tingkat keperluan seseorang pada bahasa Indonesia. Kalau kegiatan berbahasa, baik secara lisan maupun tulis, dianggap sebagai salah satu bentuk keterampilan, dan sebagaimana lazimnya keterampilan pada umumnya yang memiliki ciri bahwa makin sering digunakan atau dilatih akan makin terampil, maka dapat pula diasumsikan bahwa seseorang yang sering menggunakan atau memanfaatkan "jasa" bahasa dalam melaksanakan pekerjaannya akan lebih terampil berbahasa daripada yang jarang menggunakan bahasa untuk keperluan bidang pekerjaannya. Di dalam memahami apa yang dimaksudkan dengan faktor ketiga dan keempat itu perlu pula dipertimbangkan adanya unsur penunjang, yaitu bagaimana sikap seseorang terhadap bahasa Indonesia yang pada gilirannya sikap tersebut akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku berbahasanya. Kalau unsur penunjang itu dipertimbangkan, asumsi yang dikaitkan dengan faktor ketiga dan keempat itu belum tentu diakui dan dapat diberlakukan.

Keterampilan berbahasa perlu diposisikan berbanding sejajar dengan kerapian berbahasa. Artinya, kepiawaian berbahasa seseorang harus didukung dan bahkan ditentukan oleh kerapian atau keapikan bahasa yang digunakannya. Mengenai hal ini ada pandangan yang menyebutkan bahwa kerapian berbahasa sangat berkorelasi dengan kecermatan penalaran. Dengan demikian, keterampilan berbahasa itu akhirnya harus ditunjang oleh pemakaian bahasa yang rapi dan dilandasi oleh penalaran yang cermat, dua hal yang akan sangat membantu kemudahan dan kelancaran komunikasi.

Itulah beberapa faktor yang tampaknya dapat menggambarkan secara agak komprehensif potensi para pemakai bahasa Indonesia. Namun, ada satu hal lagi yang perlu disebut, yakni faktor minat dan perhatian seseorang terhadap bahasa Indonesia. Minat dan perhatian itu akan menjadi pendorong bagi yang bersangkutan untuk senantiasa meningkatkan mutu pemakaian bahasanya. Sebaliknya, kalau minat dan perhatian itu tidak ada, seseorang tidak akan berupaya memperbaiki bahasa Indonesia yang digunakannya. Dalam hubungan itu, tingkat kepositifan sikap seseorang terhadap bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan.

Gambaran mengenai potensi para pemakai bahasa yang berbeda-beda itu akan menghasilkan bahasa Indonesia yang berbeda-beda pula yang, jika ditinjau dari segi kerapian bahasa dan kecermatan bernalarnya, sering sekali membuat para pakar dan pengamat bahasa berkecil hati. Mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh para siswa dan bahkan mahasiswa, terutama dalam bahasa tulis, yang sering sangat mengecewakan dengan serta merta dipandang sebagai kegagalan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah, termasuk di luar

perguruan tinggi. Soal kurikulum yang tidak menunjang, karena hampir tidak pernah memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih dan mengembangkan keterampilan menggunakan bahasa tulis melalui pelajaran mengarang, misalnya, senantiasa dimunculkan sebagai kambing hitam.

Ketika dikemukakan argumentasi bahwa sebenarnya yang menentukan keberhasilan pengajaran itu adalah mutu tenaga pengajarnya alih-alih kurikulum, pokok masalahnya lalu berubah ke arah lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga pengajar.⁵ Baik di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi, masalah pengajaran ditentukan oleh sekurang-kurangnya tiga hal, yakni kurikulum, tenaga pengajar, dan sarana penunjang. Dari ketiga hal itu, yang paling penting dan utama adalah masalah sumber daya manusia, yaitu tenaga pengajar.⁶ Sampai sekarang, setelah mengalami sekian kali perubahan kurikulum yang berimplikasi pada perubahan pendekatan metodologis dalam proses belajar mengajar, kekurangberhasilan pengajaran bahasa Indonesia tetap merupakan benang kusut yang sulit dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya.⁷

Tingkat kerapian berbahasa di kalangan masyarakat secara umum juga belum dapat dijadikan pelipur lara untuk mengobati kekecewaan terhadap rendahnya mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh para siswa seperti yang telah dikemukakan. Masyarakat dalam konteks Indonesia adalah masyarakat yang pola umumnya berciri bilingual, bahkan ada—meskipun tidak banyak sehingga tidak signifikan dari jumlah keseluruhan—yang multilingual.⁸ Pemahaman dan penguasaannya terhadap bahasa Indonesia pada umumnya diperoleh melalui bangku sekolah. Adapun yang tidak lewat jalur sekolah "belajar" bahasa Indonesianya melalui pergaulan sehari-hari di daerah perkotaan yang karena penduduknya terdiri atas berbagai kelompok etnis, maka bahasa Indonesialah yang digunakan sebagai bahasa pergaulan.

Sebagai bahasa pergaulan, bahasa Indonesia seyogianya dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alamiah, sesuai dengan tuntutan, kehendak, dan selera warga kelompok masyarakat pendukungnya, seperti halnya kasus bahasa gaul atau bahasa prokem yang telah disinggung di atas. Kalau pilihan katanya tidak tepat, bentuk katanya tidak sesuai dengan kaidah morfologi atau morfofonemik, dan struktur kalimatnya tidak apik, maka para pembina bahasa tidak perlu merepotkan diri untuk memperbaikinya. Sungguh akan merupakan sikap yang arif dan terpuji kalau para pembina bahasa membiarkan kesemuanya itu tetap berlangsung sebagaimana adanya selama bahasa Indonesia itu dipakai dan dimanfaatkan sebagai bahasa pergaulan. Namun, ketika bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana komunikasi yang mengakibatkan kelompok masyarakat lain "terlibat" karena harus atau diharuskan mengetahuinya, maka dalam hal itu bahasa Indonesia tidak lagi berperan sebagai bahasa pergaulan, tetapi sebagai bahasa persatuan antarkelompok masyarakat yang lebih luas,

yakni masyarakat bangsa.

Penggunaan bahasa Indonesia oleh seseorang atau oleh suatu kelompok masyarakat yang kemudian akhirnya melibatkan keseluruhan masyarakat bangsa itu terjadi karena ada media yang menyebarkanluaskannya, baik secara tertulis maupun lisan. Di sinilah para pembina bahasa harus tampil dan berperan di dalam pemertahanan sosok bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Dengan demikian, sikap dan peran para pembina bahasa terhadap pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam masyarakat bangsa sama sekali berbeda—bahkan berlawanan—dengan sikapnya dalam menghadapi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Dengan meminjam ungkapan yang lazim dipakai pada masa lalu, dapat dikatakan bahwa bahasa pergaulan adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, sementara bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁹

Dengan pengertian seperti itu, Pemerintah pasti sangat berkepentingan dengan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari catatan sejarah kita mengetahui bahwa perilaku berbahasa pada masa Orde Lama memperlihatkan perbedaan yang cukup tajam dengan perilaku berbahasa pada masa Orde Baru. Kosakata yang berjiwa dan bersemangat "revolusi" pada masa Orde Lama sangat memasyarakat, seperti *indoktrinasi*, *kontra revolusi* (disingkat *kontrev*), *nasakom* (singkatan dari *nasional*, *agama*, dan *komunis*), dan *ganyang* (terutama dalam konteks *ganyang Malaysia* karena pada masa itu Indonesia tengah melakukan konfrontasi dengan negara tetangga itu) serta *nekolim* (singkatan dari *neo-kolonialisme*). Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia pada masa Orde Baru juga tidak lepas dari penciptaan sejumlah kata atau ungkapan untuk hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kebijakan Pemerintah, seperti *subversif*, *anti-pembangunan*, *OTB* (*organisasi tanpa bentuk*), *sara* (*suku*, *agama*, *ras*, dan *antargolongan*), dan *di luar sistem*. Kegiatan indoktrinasi pada masa Orde Lama pada masa Orde Baru dihaluskan menjadi penataran, terutama Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Upaya penghalusan dalam berbahasa itu kemudian menjadi ciri yang amat dominan dalam pemakaian bahasa Indonesia selama pemerintahan Orde Baru. Upaya ini merupakan gejala eufemisme, bahkan ada yang menamakannya "kramanisasi". Demikianlah kita masih ingat beberapa di antaranya adalah *rawan pangan* untuk menyatakan 'kelaparan', *diamankan* untuk 'ditangkap', dan *lembaga pemasyarakatan* untuk 'penjara'. Selain itu, yang amat menyedihkan adalah masalah akronim yang pemunculan dan pemakaiannya boleh dikatakan sangat tidak dapat diikuti dan dipahami.¹⁰ Yang perlu digarisbawahi dalam penggunaan bahasa Indonesia selama masa Orde Baru ialah bahwa

bahasa telah dimanfaatkan sedemikian rupa sebagai sarana kendali untuk menanamkan dan memasyarakatkan suatu ideologi agar secara fungsional berguna untuk mempertahankan struktur dan sistem sosial serta pola dominasi tertentu. Hal itu juga tercermin dalam perilaku berbahasa media massa yang justru membuktikan kemampuan pola dominasi tersebut. Kalangan pers sendiri mungkin menyadari ketidakberdayaannya bahwa sebenarnya mereka pun memiliki andil yang besar di dalam menyuburkan eufemisme dan akronim, dua fenomena paling dominan dalam perilaku berbahasa Orde Baru.

Pada era reformasi sejak tahun 1998, terdapat dua perubahan drastis. Pertama, Pemerintah tidak lagi menggunakan bahasa sebagai sarana kendali untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang terjadi adalah justru sebaliknya, pers, masyarakat, atau siapa saja diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengutarakan apa saja. Kedua—sebagai akibat dari yang disebutkan pertama, cara berbahasa dengan gaya eufemisme atau kramanisasi berubah 180 derajat menjadi cara berbahasa yang lugas, objektif, atau sebagaimana adanya, bahkan cenderung menjurus ke arah yang amat vulgar sehingga terkesan bahwa tata krama atau sopan santun berbahasa sudah tidak lagi dipedulikan. Untuk itu, ada yang menyatakan bahwa kebebasan pada era reformasi ini sudah berubah menjadi "kebablasan", akibat euforia dalam segala bidang yang masih terus berlangsung berkepanjangan.

Bidang politik, hukum, dan ekonomi yang menjadi sasaran utama reformasi telah dengan serta merta memunculkan para pakar, pengamat, dan pemerhati di ketiga bidang itu—termasuk yang instan alias dadakan—yang dengan bebas berbicara di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Belum lagi dihitung para tokoh dan pimpinan LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang begitu banyak jumlahnya, bak cendawan yang tumbuh di musim hujan, yang biasa berbicara lantang dan berani demi membela aspirasi dan kepentingan berbagai pihak yang dibelanya. Namanya pun memperlihatkan ciri keberanian yang sama dengan cara berbicaranya, yaitu, misalnya, *Geram* (Gerakan Anti Madat), *Gempar* (Gerakan Mahasiswa, Pemuda, dan Rakyat), dan *Kontras* (Komite Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan). Ada lagi LSM yang meskipun berjuang di Indonesia, untuk kepentingan rakyat Indonesia—konon pula yang miskin—, namanya tak urung menggunakan bahasa Inggris, misalnya *Poor Urban Consortium*, *Indonesian Corruption Watch*, dan *Judiciary Watch*.

Karena para pakar, pengamat, dan pemerhati serta para tokoh dan pimpinan tersebut semuanya berbicara hampir setiap saat, kemudian media massa cetak dan elektronik saling berlomba pula untuk meliput dan menginformasikannya kepada masyarakat luas sambil selalu tidak lupa untuk senantiasa memberikan "bumbu penyedap" agar menarik dan enak dibaca atau merdu didengar, melimpah ruahlah data kebahasaan untuk dikumpulkan,

diteliti, dan dianalisis. Karena data bahasa lisan begitu banyak, sekaranglah masanya untuk melihat seberapa jauh perbedaan antara bahasa tulis dan bahasa lisan sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia.

Yang menarik untuk disimak dari bahasa yang mereka gunakan ialah adanya sejumlah kata yang frekuensi pemakaiannya amat tinggi, misalnya *reposisi*, *redefinisi*, *paradigma*, *koridor*, *ke depan*, dan *wacana*. Kalau konteks pemakaiannya tepat, yang bersangkutan patut pula dijadikan contoh anutan dalam berbahasa. Kalau tidak, hal itu hanya akan memperkuat dugaan—mudah-mudahan dugaan itu keliru—bahwa kata-kata itu penting untuk diselipkan di dalam ujarannya semata-mata guna menggambarkan tingkat kepakaran dan kecendekiannya.¹¹

Demikianlah gambaran singkat tentang bahasa Indonesia pada era reformasi ini yang masih atau bahkan makin memperlihatkan "belantara" pemakaiannya seperti yang diisyaratkan dalam judul tulisan ini, apalagi masalah akronim tampaknya makin mengukuhkan diri sebagai "benalu bahasa" yang tidak mungkin dapat diberantas. Belantara pemakaian bahasa Indonesia inilah yang akan memandu para pembina bahasa di dalam membuat peta dan rambu-rambu sehubungan dengan tugas yang dihadapinya.

Peta dan rambu-rambu kegiatan pembinaan bahasa harus bersumber pada dua peristiwa bersejarah, yaitu butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 dan Pasal 36 UUD 1945. Keduanya jelas merupakan kemauan politik terhadap bahasa Indonesia, sama halnya dengan produk MPR yang berupa GBHN yang juga menggambarkan kemauan politik. Adapun hasil Kongres Bahasa Indonesia, berbagai putusan dan rekomendasi yang dihasilkannya merupakan respons baik terhadap kemauan politik tersebut maupun terhadap pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia secara umum.

Kalau kegiatan pembinaan itu dihubungkan dengan visi dan misinya, maka hubungan antara Pasal 36 dan isi Pembukaan UUD 1945 menggambarkan visi, sementara isi butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 adalah misi. Visi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus merupakan sarana komunikasi bagi tercapainya tujuan dari dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kesemuanya itu harus dapat dilakukan melalui penggunaan bahasa Indonesia. Misinya adalah menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, seperti yang tersurat dan tersirat di dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928. Maknanya ialah bahwa kita memiliki kewajiban moral untuk menghormati dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, baik di dalam konteks sebagai bahasa pergaulan maupun sebagai bahasa persatuan masyarakat bangsa seperti yang telah dikemukakan.

Visi dan misi tersebut kemudian di dalam GBHN memperoleh rambu-rambu pelaksanaannya. Mengenai hal itu, GBHN 1998 a.l. menyebutkan bahwa

upaya pembinaan bahasa 'perlu terus ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia, memperluas penerapan serta penggunaannya sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹²

Pemahaman terhadap visi dan misi yang demikian itu oleh Pusat Bahasa dan HPBI, yang di dalam awal tulisan ini disebut sebagai kelompok yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, haruslah seiring dan sejalan. Kedua-duanya harus pula menyadari bahwa yang dihadapinya adalah belantara pemakaian bahasa yang makin susah disiangi, terutama pada era reformasi sekarang ini.

Melalui seminar ini para pembina bahasa yang tergabung dalam organisasi profesi HPBI perlu menata diri kembali, bukan saja untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan merencanakan apa yang perlu dilakukan pada masa yang akan datang, melainkan juga untuk sekaligus melihat apa yang seharusnya dirancang oleh Pengurus Pusat dan apa yang sebaiknya diperhatikan oleh Pengurus Cabang. Selain itu, forum seperti ini hendaknya juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai program jangka pendek yang akan dilakukan baik oleh Pengurus Pusat maupun Pengurus Cabang yang hasil pelaksanaannya dapat saling diinformasikan pada forum serupa berikutnya. Justru hal penting inilah yang selama ini secara kasatmata tidak tampak pada kinerja HPBI.

Apabila hal yang disebutkan terakhir itu dapat diperbaiki oleh HPBI dalam waktu dekat, apalagi kalau disusul dengan diterbitkannya majalah HPBI yang sudah sangat lama ditunggu dan diimpi-impikan, maka dapatlah dikatakan bahwa seminar ini telah mencapai hasil seperti yang kita semua harapkan, di samping tentu saja bahwa kita akan dapat pula mengatur langkah yang mantap untuk melakukan kegiatan pembinaan di tengah-tengah belantara pemakaian bahasa yang seakan-akan dari waktu ke waktu makin mengepung kita.

Catatan:

1. Menurut Sensus Penduduk tahun 1990, dari penduduk Indonesia usia sepuluh tahun ke atas yang berjumlah 158.262.639 orang terdapat 27.154.448 orang (17,16%) yang sama sekali belum dapat berbahasa Indonesia. Sepuluh tahun setelah Sensus itu dilakukan, sebagai akibat dari kemajuan yang amat pesat dalam bidang teknologi informasi, angka "buta bahasa Indonesia" itu pasti sudah menurun meskipun tidak secara drastis. Seberapa banyak penurunan itu belum diketahui secara pasti karena belum diperoleh informasi dari Biro Pusat Statistik mengenai hasil Sensus Penduduk tahun 2000.
2. Bahasa gaul ini memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Dialek Betawi sebagai bahan baku yang kemudian mereka racik dengan memberlakukan sejumlah kaidah atau pola tertentu sehingga jenis bahasa yang dihasilkan lewat proses peracikan tersebut, sekali lagi

meskipun hanya dari segi kosakatanya, mereka namakan bahasa gaul. Disebut demikian mungkin untuk menggambarkan bahasa khusus untuk keperluan pergaulan di antara sesama mereka saja. Soal nama ini pernah pula digunakan bahasa "prokem", tetapi tampaknya sekarang mereka lebih merasa "bangga" dan "eksklusif" dengan nama bahasa gaul. Yang jelas jenis bahasa yang digunakan oleh kelompok eksklusif ini perlu diteliti karena hasilnya pasti akan menambah dan memperkaya khazanah kebahasaan di Indonesia.

3. Pandangan itu dikemukakan James Danandjaja dalam memberikan Kata Pengantar untuk kamus ukuran saku sebanyak 63 halaman, yaitu *Kamus Gaul* yang disusun oleh Debby Sahertian, terbitan Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1999.
4. Maraknya pemakaian jenis bahasa yang disebut bahasa prokem atau bahasa gaul itu bagi sementara pihak dipandang sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, bahkan mereka yang tergolong kalangan puritan menilainya sebagai gejala yang akan merusak bahasa Indonesia. Sebenarnya bila ditinjau dari status jenis bahasa seperti itu sebagai *slang*, *argot*, atau *jargon* yang hanya digunakan oleh kelompok tertentu, apalagi jangka waktu pemakaiannya tidak bertahan lama karena amat bergantung kepada perubahan zaman dan selera para pemakainya, maka digunakannya bahasa gaul atau bahasa prokem tersebut tidaklah perlu dirisaukan. Sebaliknya, kita harus memandangnya sebagai salah satu butir kekayaan bahasa lisan kita.
5. Pada masa lalu lembaga pendidikan tinggi yang mempersiapkan calon tenaga pengajar adalah IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) dan STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Di dalam merencanakan dan melaksanakan programnya, tampaknya lembaga pendidikan tersebut kurang memberikan peluang dan dukungan yang memungkinkan para mahasiswanya dapat memacu dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi tenaga pengajar setelah mereka selesai kuliah. Selain itu, ada masalah sensitif yang menyangkut mutu sumber daya manusianya. Pembicaraan mengenai hal itu memerlukan kehati-hatian dan "kewaspadaan", terutama karena belum pernah dilakukan penelitian yang memadai mengenai hal itu. Yang dimaksudkan ialah mutu sumber daya manusia lulusan SMU (sebelumnya SMA) yang menjadi mahasiswa di lembaga pendidikan tinggi itu. Dalam konteks perguruan tinggi negeri, orang selalu menyebut UI, ITB, UGM, dan IPB sebagai perguruan tinggi yang diunggulkan. Pada tataran fakultas, orang akan memilih kedokteran, teknik, ekonomi, dan hokum—misalnya—sebagai urutan prioritas. Akibatnya, mutu unggulan lulusan SMU itu pun akan dengan serta merta menetapkan pilihannya pada salah satu perguruan tinggi yang diunggulkan

tersebut. Kalau memang benar demikian keadaannya, pertanyaan yang timbul adalah: mutu lulusan SMU yang bagaimana yang dengan hati mantap menentukan pilihannya untuk menjadi mahasiswa IKIP atau STKIP? Sekali lagi, jawaban terhadap pertanyaan itu memerlukan penelitian yang sungguh-sungguh dan komprehensif. Mengenai persoalan sensitif tersebut, ada yang berpendapat bahwa selama gaji guru tetap seperti sekarang, selama itu pula pekerjaan sebagai guru akan tetap merupakan profesi yang sama sekali tidak memiliki daya tarik bagi para lulusan SMU kualitas unggul. Oleh karena itu, sistem penggajian bagi para guru harus diubah sedemikian rupa sehingga lembaga pendidikan yang menyiapkan calon tenaga pengajar akan "diperebutkan" oleh para lulusan SMU.

6. Untuk itu, tenaga pengajar bahasa Indonesia perlu memahami kurikulum (a.l. mengenai latar belakang, tujuan, dan isinya), menguasai segala permasalahan kebahasaan yang tercantum di dalam bahan ajar, dan memiliki wawasan yang luas tentang metodologi pengajaran bahasa. Yang lebih penting dari itu bahwa ia memiliki kecintaan yang mendalam terhadap profesinya sebagai guru bahasa Indonesia dan dapat menciptakan suasana kelas sedemikian rupa sehingga murid akan mengikuti pelajaran yang diberikannya dengan gembira.
7. Setiap kali ada pergantian Kabinet, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional) yang baru selalu tidak lupa menyebutkan, antara lain, tentang pentingnya pelajaran mengarang di sekolah. Akan tetapi, kondisi objektif di sekolah tampaknya masih belum mendukung terselenggaranya dengan baik garis kebijakan Menteri itu. Akibatnya, hasil pengajaran bahasa Indonesia belum beranjak dari situasi yang masih tetap belum menggembirakan. Dalam konteks itulah agaknya Anton Moeliono ketika Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993 sempat melontarkan gagasan bahwa untuk mengatasi keadaan yang seperti benang kusut itu, satu-satunya cara yang patut dilakukan ialah bahwa pengajaran bahasa Indonesia harus "turun mesin". Gagasan tersebut mendapat reaksi yang cukup keras dari berbagai pihak.
8. Masyarakat bilingual yang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah kelompok etnisnya, dilihat dari proses pemerolehannya, menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Akan tetapi, kalau dilihat dari tingkat penguasaannya, sebagian masyarakat lebih "akrab" dengan bahasa Indonesia daripada dengan bahasa daerahnya. Yang dikuasai kelompok masyarakat yang multilingual adalah bahasa Indonesia, bahasa daerahnya, dan salah satu (atau beberapa?) bahasa daerah lain atau bahasa Inggris (atau ditambah dengan bahasa asing lain). Sementara itu, seperti telah dikemukakan (lihat Catatan 1), masih ada penduduk Indonesia yang masih buta bahasa Indonesia. Mereka hanya menguasai bahasa daerahnya atau

hanya menguasai bahasa Indonesia. Kelompok terakhir ini bisa dipastikan adalah mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di kota besar yang kedua orang tuanya berbeda kelompok etnisnya.

9. Ungkapan yang dimaksud adalah "kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara" yang sudah sangat biasa digunakan pada masa Orde Baru.
10. Di dalam tulisannya yang berjudul "Bahasa, Jurnalisme, dan Politik Orde Baru", Daniel Dhakidae membahas tiga hal, yaitu bahasa birokrasi, bahasa birokrasi bahasa, dan bahasa jurnalistik. Mengenai bahasa birokrasi, sesuai dengan kepedulian Pemerintah terhadap bahasa persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang telah dikemukakan, disebutkan bahwa bahasa jenis ini penuh dengan jargon pembangunan dan *slang* birokrasi yang formal, gersang, dan surat dengan ritualisme, eufemisme, dan akronim. (Tulisan tersebut terdapat dalam buku *Bahasa dan Kekuasaan*, halaman 246--251, terbitan Mizan, 1996, dengan editor Yudi Latif dan Idi Subandy.)
11. Sekadar contoh, perhatikanlah data berikut.
 - a. Kekacauan politik akan menjadi warna utama lanskap politik *ke depan*. (*Kompas*, 1 Juni 1999, hlm. 14).
 - b. Itulah, kita juga sangat menyayangkan sikap-sikap tentara yang seolah-olah akan ada sesuatu yang akan didekritkan. Padahal itu kan hanya *wacana*, dan belum tentu layak dipublikasikan. (*Rakyat Merdeka*, 22 Mei 2001, hlm. 13, kolom 4).
 - c. Saya kira pertemuan para pimpinan partai itu sudah mencapai hasil yang sesuai dengan yang diagendakan, bahkan *beyond*.Pemakaian *ke depan* dalam arti 'pada masa yang akan datang' pada contoh **a** merupakan inovasi yang memperkaya daya ungkap bahasa Indonesia, sedang *wacana* pada contoh **b** merupakan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Sayang sekali karena pemakaian kata *wacana* yang tidak tepat seperti itu sekarang makin menggejala. Sementara itu, contoh **c** yang menggunakan kata Inggris *beyond* diungkapkan oleh seorang narasumber ketika diwawancarai lewat telepon oleh penyiar radio swasta di Jakarta sebelum sidang DPR yang menyepakati Memorandum II.
12. Masalah bahasa Indonesia terdapat dalam GBHN tahun 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998; GBHN tahun 1973 dan 1999 sama sekali tidak menyinggungnya. GBHN tahun 1978 hanya menyebutkannya di bidang Kebudayaan, sementara GBHN 1988, 1993, dan 1998 mengemukakannya baik dalam bidang Pendidikan maupun Kebudayaan. GBHN 1978 menyatakan bahwa "pengembangan bahasa Indonesia dengan mempergunakan bahasa daerah untuk memperkaya perbendaharaan dan pengembangan bahasa nasional". Dengan demikian, ihwal pembinaannya belum dising-

gung. Sebaliknya, GBHN 1983 menginggung bahasa Indonesia hanya dalam bidang pendidikan. Pada ketiga GBHN lainnya (1988, 1993, 1998), seperti telah dikatakan, bidang Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakannya tidak saja dalam hubungannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan, tetapi juga secara eksplisit disebutkan bahwa bahasa dan sastra Indonesia dan daerah perlu dibina dan dikembangkan, sementara pemakaian bahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu dibina dan didorong untuk memperlancar komunikasi dengan bangsa lain, termasuk untuk penyerapan iptek modern.

14. BAHASA MENUNJUKKAN BANGSA

Bahasa menunjukkan bangsa. Begitulah bunyi sebuah ungkapan lama yang, apabila kedalaman maknanya kita coba renungkan, mungkin akan membuat kita menjadi lebih arif di dalam memahami dan menyikapi segala perkara yang mempertautkan masalah bahasa dengan sikap atau perilaku kelompok masyarakat penutur bahasa tersebut. Meskipun dalam tingkat dan bobot yang berbeda dari setiap orang yang menghadapinya, kearifan tersebut mungkin pula akan membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran tentang perlunya meninjau—atau bahkan mendefinisikan—kembali hubungan antara peran bahasa dan tingkat peradaban bangsa suatu negara, terlebih-lebih pada abad sekarang yang ditandai oleh kecenderungan yang sering disebut kesejagatan (globalisasi).

Kearifan demikian akan makin memperkuat pandangan bahwa peran bahasa dalam upaya pengembangan kebudayaan sangat dominan. Pada masa awal lahirnya peradaban manusia bahasa hanya berperan sebagai sarana komunikasi dalam arti yang amat terbatas: seseorang atau kelompok masyarakat yang satu dapat berhubungan dengan orang lain atau kelompok masyarakat yang lain. Demikianlah seterusnya sehingga makin lama bahasa digunakan oleh kelompok atau masyarakat yang makin luas pula. Sementara itu, fungsi bahasa sebagai sarana berpikir pada gilirannya memperikutkan perspektif baru. Bahasa tidak sekadar difungsikan di dalam pergaulan, seperti yang dimaksudkan di atas, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana dalam administrasi pemerintahan, kegiatan keagamaan, dan perdagangan. Fungsi bahasa yang secara umum kita kenal sekarang—sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)—erat sekali kaitannya dengan fungsi bahasa dalam dunia pendidikan (sebagai bahasa pengantar).

Pertanyaan yang mungkin timbul dan yang jawabannya sudah kita ketahui ialah bagaimana jadinya kebudayaan atau tingkat peradaban suatu bangsa tanpa bahasa. Oleh karena itu, sejauh yang menyangkut fungsi bahasa Indonesia, tantangan kesejagatan yang dihadapi seyogianya tidak dipandang sebagai kendala, tetapi justru sebaliknya harus diterima dan diposisikan sebagai tantangan. Cara pandang yang demikian pada akhirnya akan dengan sendirinya membuat kita berusaha memberi makna yang tepat pada apa yang tersurat dan tersirat di balik ungkapan lama tersebut di atas.

Pandangan dan tantangan itu perlu dipahami dan dikaji dengan memperhatikan sekurang-kurangnya kedua hal berikut. Pertama, dalam hal apa dan dengan cara bagaimana kita harus menyikapi kecenderungan global yang memang tidak mungkin dapat dibendung itu. Kedua, dalam hal apa dan dengan cara bagaimana kita harus tetap mempertahankan segala sesuatu yang telah menjadi milik kita dan bahkan telah menjadi identitas atau jati diri kita sebagai bangsa. Solusi yang tepat terhadap permasalahan itu akan membuat kita lebih berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam si-

kap yang ambivalen.

Bagaimanapun sikap berhati-hati tidaklah sama atau bahkan sama sekali tidak dapat dipertentangkan dengan sikap fanatik. Menghadapi segala macam pengaruh dari luar dengan tetap berpegang pada kepentingan dan masa depan bangsa juga tidak dapat dikategorikan sebagai sikap yang didasari xenofobia. Dalam hubungan itu, tidaklah harus diungkapkan secara eksplisit bahwa kita tidak ingin (dituduh) ketinggalan zaman, tetapi pada saat yang sama kita pun tidak ingin mengorbankan harga diri kita sebagai bangsa (yang bermartabat).

Sudah menjadi ciri kodrati manusia bahwa di dalam menempuh perjalanan hidupnya, ia tidak akan pernah mampu berdiri sendiri dalam arti yang sesungguhnya. Ia akan senantiasa memerlukan orang lain untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi. Hubungan antarindividu tersebut pada gilirannya melahirkan kelompok-kelompok yang kemudian dikenal dengan sebutan keluarga, masyarakat (yang perwujudannya dapat diamati melalui berbagai kegiatan komunitas), dan bangsa. Frekuensi dan eskalasi hubungan itu sendiri terus meningkat sampai pada peringkat antarbangsa dan/atau antarnegara.

Pesatnya kemajuan dalam bidang iptek modern, terutama bidang teknologi informasi, tampaknya tidak akan pernah menyediakan ruang dan peluang bagi siapa pun untuk memunculkan dan mengembangkan gagasan atau pandangan yang bertujuan mempertahankan dan membenarkan sikap yang berseberangan dengan—apalagi menafikan—keniscayaan global tersebut. Seperti telah disebutkan, pada saat yang sama kita pun harus tetap menjaga dan mempertahankan jati diri bangsa sebagai kekayaan rohaniah yang harus diberdayakan sebagai penapis dalam mengidentifikasi segala pengaruh yang datang dari luar sehingga dengan jelas kita akan dapat membedakan yang benar-benar emas dari yang hanya loyang atau bahkan yang tidak lebih dari sampah belaka.

Kekayaan rohaniah kita yang paling berharga, seperti yang diisyaratkan lewat ungkapan lama pada awal tulisan ini, ialah bahasa. Bahasa Indonesia di Indonesia atau bahasa Melayu di Malaysia merupakan contoh yang amat sejalan dengan ungkapan tersebut (lihat juga Catatan 1.2) Adanya kesamaan antara nama bahasa dan nama bangsa itu tampaknya tidak dapat diberlakukan bagi, misalnya, bahasa Inggris di Inggris, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat yang secara sosiolinguistik dan sosio-kultural pasti berbeda dari, misalnya, bahasa Inggris di Filipina, Singapura, India, dan sejumlah negara anglofon lainnya. Oleh karena itu, penyebutan bahasa di dalam ungkapan atau peribahasa yang dikutip di atas perlu dipahami dalam perspektif seperti itu.

Lalu lintas antarnegara barang dan jasa, termasuk sumber daya manusianya yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam proses produksi barang dan jasa tersebut, sering dikemukakan sebagai gejala kesejagatan yang nyata. Negara mana pun tidak mungkin dapat mengelakkannya. Persaingan antarnegara akan makin ketat. Masalahnya ialah apakah dalam persaingan itu negara-negara maju akan tetap

berperan secara lebih dominan daripada negara-negara yang sedang berkembang. Kalau hal itu terjadi, perlu secara sungguh-sungguh diupayakan agar dampak dominasi tersebut tidak akan terlalu merugikan negara-negara yang sedang berkembang.

Kekhawatiran seperti itu patut dikemukakan bukan semata-mata karena setakat ini Indonesia masih "berstatus" negara yang sedang berkembang yang juga akan (dan sudah) merasakan pahit getirnya dampak persaingan global, melainkan karena sebenarnya di dalam persaingan global itu diperlukan semacam etika atau tata krama yang disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak (kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang). Dengan kekayaan rohaniah yang kita miliki, ditambah dengan adanya tata krama tersebut, meskipun posisi kita dalam banyak hal mungkin masih berada "di bawah angin", hendaknya tidak lantas membuat kita berkecil hati. Sebaliknya, persaingan global itu seyogianya dipandang sebagai peluang tidak saja untuk lebih mencermati posisi dan peran kita sebagai bangsa, tetapi juga untuk mengidentifikasi segala kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kita yang selama ini mungkin belum atau kurang kita sadari (lihat Alwi 2002).

Pencermatan dan pengidentifikasian seperti itu, yang disertai dengan upaya lebih memantapkan rasa percaya diri, sangat diperlukan agar kita tidak terjebak dalam kekeliruan ketika mengambil posisi dalam bingkai konfigurasi kesejagatan. Kesemuanya itu pada akhirnya akan sangat bergantung pada jenis jawaban yang dapat kita berikan terhadap pertanyaan tentang seberapa jauh kemantapan sistem yang ada dan seberapa jauh pula keterandalan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Korelasi di antara keduanya boleh dikatakan sudah menjadi aksioma yang tidak perlu diper-tentangkan lagi.

Mengenai hal itu, mungkin kita akan mengatakan bahwa keterlibatan sumber daya manusia berbanding terbalik dengan makin mantapnya sistem. Penafsiran yang hanya berfokus pada salah satu saja dari kedua komponen itu akan mengakibatkan timbulnya argumentasi lain yang berpandangan bahwa kalau sistemnya sudah benar-benar mantap, persoalan mutu sumber daya manusia tidak lagi merupakan faktor yang menentukan. Dasar pikiran seperti itu tidak seluruhnya tepat karena upaya memahami apa dan bagaimana mutu sumber daya manusia itu tidak mungkin dilakukan secara bebas konteks. Ada parameter keprofesionalan yang harus dipertimbangkan.

Jika kontroversi seperti itu muncul, seyogianya kita kembali pada prinsip keseimbangan di antara keduanya. Sistem yang sudah mantap sekalipun pada hakikatnya harus tetap didukung oleh mutu sumber daya manusia memadai, yaitu yang memiliki kualifikasi profesional. Tuntutan profesionalisme itu, apalagi dalam konteks persaingan global, harus dijadikan persyaratan pertama dan utama. Kenyataan (dan pengalaman) senantiasa menunjukkan bahwa upaya pengembangan yang dirancang dan dilaksanakan dalam hampir semua bidang kehidupan manusia, baik pada tataran nasional maupun internasional, akan selalu memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang sejalan dengan tingkat kemutakhiran iptek modern (Alwi dan Dendy Sugono [ed.] 2000: x).

Sejalan dengan prinsip keseimbangan tersebut, selain upaya pembenahan dan penyesuaian sistem, tampaknya upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yang bermuara pada tersedianya tenaga profesional untuk bidang-bidang yang diperlukan merupakan persoalan mendesak yang harus ditangani secara lebih berencana dan terarah. Segala potensi, peluang, dan kendalanya perlu dicermati. Salah satu komponen yang perlu dicermati itu ialah apa yang di atas disebut sebagai kekayaan rohaniah yang paling berharga, yakni bahasa.

Bahasa bagi sebuah bangsa atau negara sekurang-kurangnya harus memiliki dua macam fungsi, yaitu sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari dan sebagai bahasa resmi atau bahasa negara (fungsi terakhir sering disebut bahasa negara). Sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari, bahasa digunakan di dalam, misalnya, lingkungan keluarga dan masyarakat serta di dalam konteks komunikasi yang tidak resmi lainnya. Sebagai bahasa negara, bahasa digunakan, antara lain, di dalam administrasi pemerintahan, dunia pendidikan (sebagai bahasa pengantar), dan penulisan buku ilmiah.

Kalau kedua fungsi bahasa itu ditinjau dari sudut persaingan global, tampaknya perhatian khusus dan bersungguh-sungguh harus ditujukan pada fungsi bahasa sebagai bahasa negara karena, seperti telah disebutkan, hal itu secara langsung menyangkut pemakaian bahasa tidak saja di dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga di dalam dunia pendidikan dan perbukuan. Dunia pendidikan dan perbukuan inilah yang memiliki kekuatan dan peluang untuk mengantarkan kita ke depan pintu gerbang gudang iptek modern. Dengan menggali dan memanfaatkan harta karun yang melimpah ruah tersimpan di dalamnya, kita dapat merancang dan melaksanakan kegiatan apa saja, khususnya jenis kegiatan yang bertujuan menata dan memantapkan sistem serta meningkatkan mutu sumber daya manusia yang profesional yang akan mempersiapkan kita sebagai bangsa untuk menghadapi persaingan global.

Mampu menghadapi persaingan global sesungguhnya bukan merupakan tujuan utama dan satu-satunya dari upaya penggalian dan pemanfaatan iptek modern. Masih banyak manfaat lain yang dapat diraih, di antaranya ialah untuk memahami dan memberikan apresiasi yang sewajarnya terhadap tingkat peradaban yang telah dicapai oleh bangsa lain. Hal yang disebutkan terakhir ini berarti pula bahwa secara bertahap kita perlu mengambil posisi yang tepat dalam kancah persaingan global sehingga akhirnya (mudahmudahan) kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain di peringkat antarbangsa.³

Dalam konteks itulah kita melihat dan memaknai fungsi bahasa sebagai bahasa negara. Tentu saja amat tidak proporsional kalau kemudian kita berpandangan bahwa fungsi bahasa sebagai bahasa pergaulan sehari-hari memiliki tingkat prioritas yang rendah untuk diperhatikan. Selama kita mengupayakan agar kedua fungsi itu sesuai dengan ranah pemakaiannya masing-

masing, maka selama itu pula tidak diperlukan penilaian bahwa yang satu lebih penting daripada yang lain.⁵ Namun, sejauh menyangkut peran bahasa yang dikaitkan dengan masalah peradaban bangsa (dalam konteks kesejagatan), tinjauan pada tulisan ini secara khusus diarahkan pada permasalahan bahasa negara.

Pemilihan dan penentuan bahasa resmi di negara yang sebagian besar anggota masyarakatnya menguasai dua bahasa (atau lebih) ada kalanya dihadapkan pada berbagai pertimbangan yang cukup rumit, seperti yang mungkin dihadapi oleh sejumlah negara berkembang yang baru merdeka (lepas dari cengkeraman kekuasaan bangsa lain yang telah menjajahnya). Pada kasus yang demikian biasanya hanya ada dua kemungkinan mengenai bahasa yang akan dijadikan sebagai bahasa negara, yaitu bahasa asli pribumi atau bahasa asing yang berasal dari bangsa yang telah menjajahnya (bahasa asli pribumi selanjutnya disebut bahasa nasional atau bahasa kebangsaan).⁴ Setakat ini di seluruh dunia tercatat tujuh bahasa yang digunakan sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Portugis, Arab, Melayu, dan Mandarin (lihat Hassan Ahmad 2000: 46-47).⁵

Semua negara di dunia yang terlibat dalam persaingan global itu secara ekonomis dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu kelompok negara maju, kelompok negara sedang berkembang, dan kelompok negara terbelakang. Berdasarkan kenyataan di sejumlah negara, terutama di Afrika dan Amerika Latin, penentuan bahasa negara itu ternyata berkorelasi dengan tingkat kemajuan di bidang ekonomi yang dicapai oleh negara yang bersangkutan. Mengenai hal itu, Abdullah Hassan (1997) mengemukakan pandangan bahwa kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang memakai bahasa nasionalnya sendiri sebagai bahasa negara; sementara kelompok negara yang terbelakang justru memilih bahasa bekas penjajah (bukan bahasanya sendiri) sebagai bahasa negara.⁶

Pandangan tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa kelompok negara yang menggunakan bahasanya sendiri sebagai bahasa negara akan lebih berhasil, baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kelompok negara yang masih menggunakan bahasa asing bekas penjajah sebagai bahasa negara. Fenomena itu berdampak langsung tidak saja pada upaya pemanfaatan iptek, tetapi juga pada upaya peningkatan peradaban bangsa yang bersangkutan secara keseluruhan.

Bahasa negara yang diangkat dari bahasa yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan dapat dipastikan akan memberikan peluang yang hampir tanpa batas bagi seluruh rakyat untuk memahami segala macam informasi, gagasan, dan pandangan mengenai bidang apa pun, termasuk bidang iptek modern. Dampak yang sangat positif juga akan jelas terlihat pada dunia pendidikan yang

menggunakan bahasa kebangsaan, sebagai bahasa pengantar. Upaya penggalian dan pemanfaatan iptek modern yang diungkapkan dengan "bahasa yang dipahami oleh seluruh masyarakat bangsa" merupakan strategi yang tepat dalam rangka menyiapkan dan mengantarkan rakyat dan bangsa ke arah pencapaian taraf kehidupan yang lebih maju dan modern karena strategi tersebut pada hakikatnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.⁷

Selain dunia pendidikan, tidak disangsikan lagi dunia perbukuan juga memainkan peran yang menentukan di dalam upaya pencerdasan kehidupan bangsa. Gagasan dan pandangan tentang peradaban dunia—yang lama atau klasik dan yang modern—yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan dapat diserap dan dicerna oleh kalangan yang tidak terbatas ketika kesemuanya itu sudah diungkapkan dan disajikan dalam bentuk buku. Seberapa jauh khalayak pembaca dapat memanfaatkan kekayaan peradaban dunia itu akan sepenuhnya bergantung pada dua hal, yaitu bahasa yang digunakan (dalam buku) dan kelompok pembaca yang menguasai (atau sekurang-kurangnya memahami) bahasa yang digunakan itu (Alwi 2001).

Dalam konteks kecenderungan (bahkan keniscayaan) global sekarang, yang secara potensial layak diasumsikan memiliki kemampuan untuk memahami dan menyerap peradaban global itu adalah khalayak pembaca yang menguasai bahasa Inggris karena bahasa inilah yang setakat ini diakui dan diterima sebagai bahasa antarbangsa peringkat pertama (lihat Catatan 5 tentang bahasa Inggris yang digunakan di 45 negara).⁸ Pencerdasan kehidupan bangsa yang diupayakan lewat penggunaan bahasa Inggris dalam dunia perbukuan ini tampaknya hanya cocok bagi negara-negara yang sebagian terbesar warga bangsanya sudah terbiasa menggunakan bahasa tersebut. Sebaliknya, bagi negara-negara yang sebagian terbesar warga bangsanya tidak menguasai bahasa Inggris, perlu diupayakan strategi dan cara yang lain.

Kalau apa yang dapat disebut sebagai *the global language for a global village* (lihat Catatan 8) itu diterapkan dan dijadikan dasar kebijakan dalam bidang perbukuan kita, hal itu jelas akan sangat merugikan kepentingan dan masa depan negara dan bangsa. Seperti halnya garis kebijakan dalam bidang lain yang paling ramai dan sering dibicarakan (bidang politik, hukum, dan ekonomi), garis kebijakan dalam bidang kebahasaan pun (termasuk dalam dunia perbukuan) tidak boleh merugikan kepentingan negara dan bangsa. Penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa negara harus tetap dan terus-menerus diberdayakan agar kepentingan sekelompok kecil masyarakat (yang menguasai bahasa Inggris) tidak mendominasi—apalagi merugikan—kelompok masyarakat lain yang jauh lebih besar.⁹

Penggunaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa negara, seperti yang telah dipaparkan di atas, memperhadapkan kita pada dua pertanyaan mendasar yang

harus dijawab. Pertama, apa yang harus dilakukan agar bahasa negara mampu digunakan untuk pengembangan dan penyebarluasan iptek modern? Kedua, apa yang harus dilakukan agar pemanfaatan bahasa negara itu benar-benar bermuara pada pencerdasan kehidupan bangsa?¹⁰

Jawaban atas pertanyaan pertama terletak pada dua hal, yaitu pada tingkat kemantapan kaidah kebahasaan (yang terkodifikasi pada kitab tata bahasanya) dan keluasan atau kekayaan kosakata berikut peristilahannya (yang tercatat pada kamus ekabahasa berikut sejumlah kamus istilahnya). Pertanyaan kedua, yang menyangkut upaya pencerdasan kehidupan bangsa, mengharuskan kita untuk memikirkan dan sekaligus merencanakan kegiatan penulisan buku dalam bahasa kebangsaan (sebagai bahasa negara), baik yang berbentuk karangan asli maupun hasil penerjemahan.¹¹

Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, kedua persyaratan itu sudah terpenuhi meskipun dalam pengertian yang mungkin masih terbatas. Kodifikasi kaidah-kaidahnya setakat ini boleh dikatakan sudah lebih dari memadai. Yang masih harus terus digarap adalah penyusunan padanan istilah dalam bahasa Indonesia dari berbagai bidang ilmu, apalagi dengan adanya kecenderungan yang makin kuat bahwa hampir semua bidang/subbidang ilmu yang tergolong ke dalam iptek modern senantiasa berkembang. Akibatnya, jumlah istilahnya pun dari waktu ke waktu memperlihatkan peningkatan pula.¹²

Setelah dinyatakan sebagai bahasa persatuan pada butir ketiga ikrar Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 36) sebagai bahasa negara, yang, antara lain, berfungsi sebagai bahasa yang digunakan dalam administrasi pemerintahan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.¹³ Bahasa Indonesia dituntut agar mampu digunakan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan konsep berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam bidang ilmu dasar, ilmu pengetahuan sosial, maupun ilmu pengetahuan budaya, tidak saja untuk keperluan lembaga pendidikan formal, tetapi juga untuk keperluan yang lebih luas.

Strategi dasarnya ialah bahwa kita harus mengupayakan bahasa Indonesia menjadi sarana yang andal guna mengembangkan konsep berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat diharapkan bahwa, kalau tiba saatnya, kita akan memiliki kesiapan dan kemampuan untuk meningkatkan derajat kehidupan kita ke taraf yang lebih baik dan lebih modern. Itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan pemberdayaan bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa. Implikasinya ialah bahwa bahasa Indonesia harus tetap mantap untuk dapat digunakan sebagai sarana pengungkap pikiran, pandangan, atau konsep apa pun, mulai dari yang paling singkat dan sederhana sampai kepada yang paling rumit dan kompleks.¹⁴

Selain yang menyangkut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan sarana pengembangan iptek modern,

secara implisit paparan di atas telah pula menyinggung dua fungsi lain yang berkenaan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional dan lambang identitas nasional (lihat fungsi lain bahasa persatuan pada Catatan 13). Kedua fungsi inilah yang di atas telah disebutkan sebagai kekayaan rohaniah yang kita miliki yang akan memandu langkah-langkah kita selanjutnya dalam menyongsong dan menghadapi persaingan global.

Salah satu contoh konkret yang sepatutnya mulai dipikirkan sejak sekarang ialah langkah dan upaya apa yang harus kita ambil dalam menghadapi kemungkinan terjadinya arus sumber daya manusia dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Tidak akan terelakkan arus tenaga asing yang (akan) datang dan bekerja di Indonesia. Bagaimana pun Indonesia dengan wilayah geografinya yang begitu luas dan jumlah penduduknya yang begitu banyak akan tetap memiliki daya tarik yang luar biasa sebagai pasar yang amat potensial untuk perdagangan berbagai jenis dan mutu barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri. Ketika masuknya barang dan jasa itu diikuti oleh sumber daya manusianya, maka bersamaan dengan itu akan segera timbul persoalan yang tidak semata-mata menyangkut masalah lapangan kerja, tetapi juga yang berkaitan dengan bahasa sebagai sarana komunikasi.

Masalah lapangan kerja muncul karena kedatangan mereka yang akan bekerja di Indonesia itu sedikit banyak pasti akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi tenaga kerja Indonesia sendiri (dalam arti membatasi atau bahkan mengurangi) untuk memperoleh pekerjaan atau sekadar peluang kerja. Masalah yang menyangkut bahasa timbul karena mereka yang datang ke Indonesia untuk bekerja itu dapat diperkirakan sudah membekali diri dengan penguasaan bahasa Inggris (bagi mereka yang berasal dari negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan sehari-hari). Kalau kepakaran mereka itu memang benar-benar diperlukan, pilihannya hanya satu dari dua, yakni mereka membekali diri dengan upaya mempelajari bahasa Indonesia atau kita yang (terpaksa) mengalah dan "melayani" mereka dengan menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi.

Dalam menghadapi kedatangan tenaga asing yang akan bekerja di Indonesia itu, perlu dipertimbangkan untuk memberlakukan dua macam persyaratan. Pertama, yang akan ditangani oleh tenaga ahli asing itu seyogianya diprioritaskan hanya pada jenis pekerjaan yang tingkat kepakarannya belum dimiliki oleh tenaga yang tersedia di Indonesia. Kedua, tenaga asing yang akan bekerja di Indonesia, setelah memenuhi kualifikasi pertama, perlu dipersyaratkan dapat berbahasa Indonesia. Yang disebutkan terakhir ini menyiratkan makna yang tidak bersesuaian dengan yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai kasus yang serupa.

Ketentuan tentang persyaratan tenaga asing menguasai bahasa Indonesia

ini tidak dapat diberlakukan secara umum. Pemberlakuannya perlu disesuaikan dengan tingkat keperluan kita terhadap tenaga asing itu sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkannya dengan cermat, antara lain berdasarkan tingkat kepakaran dan keperluannya terhadap bahasa Indonesia. Ada tenaga asing yang memiliki tingkat keahlian yang tinggi. Mereka bekerja sebagai konsultan atau diserahi jabatan lain, sesuai dengan perjanjian kesepahaman (*memorandum of understanding*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ada pula tenaga asing yang, karena jenis tugasnya, lebih sering berada langsung di lapangan.

Kriteria tingkat keahlian tenaga asing itu akan berkorelasi dengan tingkat keperluan masing-masing terhadap bahasa Indonesia. Di dalam melaksanakan tugasnya, tenaga asing kategori pertama hanya akan berhubungan dengan kalangan terbatas, yaitu dengan orang-orang Indonesia yang menjadi mitra kerjanya. Komunikasi yang dilakukan dengan sendirinya tidak harus menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, persyaratan penguasaan bahasa Indonesia tidak perlu diberlakukan. Namun, untuk tenaga asing kategori kedua persyaratan itu secara tegas perlu, bahkan harus, diberlakukan karena, di dalam melaksanakan tugasnya, mereka akan lebih sering berhubungan langsung dengan masyarakat.

Masih ada beberapa segi yang belum secara eksplisit dikemukakan pada tulisan ini. Sejauh yang menyangkut peran bahasa Indonesia dalam konteks peradaban bangsa yang pada abad ke-21 ini harus diposisikan dalam konfigurasi peradaban global, apa yang telah dikemukakan secara singkat di atas tentang fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai sarana percerdasan kehidupan bangsa maupun sebagai sarana pemertahanan jati diri bangsa, agaknya sudah cukup memadai sebagai bahan pemikiran kita bersama di dalam mempertimbangkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak lanjutnya.

Sebagai catatan penutup perlu dimunculkan kembali ke permukaan sesuatu yang pada sebagian orang selama ini mungkin hanya tersimpan di bawah sadar, yaitu rasa memiliki bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara yang seyogianya diikuti oleh niat dan upaya untuk menghormati, memelihara, dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Apabila niat dan upaya itu tetap ada pada diri kita masing-masing, siapa pun kita dan apa pun tugas dan pekerjaan kita, kita dapat mengayunkan langkah dengan mantap untuk menyongsong dan menghadapi segala kemungkinan yang akan timbul dari dampak kesejagatan. Apabila niat dan upaya itu tetap ada, maka ungkapan bahasa menunjukkan bangsa bukan lagi sekadar peribahasa, melainkan benar-benar merupakan kekayaan rohaniah yang akan menjelma di dalam rasa kebersamaan kita sebagai bangsa.

Catatan:

1. Ungkapan itu semula mengacu pada makna bahwa sifat atau tabiat seseorang dapat diukur melalui budi bahasa, perangai, dan tutur katanya yang kesemuanya itu berimplikasi pula pada ukuran tinggi rendahnya martabat atau keturunan orang yang bersangkutan (lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, 2001:88). Dalam konteks yang lebih luas, yaitu pada tataran kebangsaan, hal itu berarti bahwa peradaban suatu bangsa dapat diukur melalui bahasanya, khususnya melalui mutu pemakaian bahasa tersebut oleh masyarakat penuturnya, baik secara lisan maupun tertulis. Korelasi seperti itu dapat dengan mudah dilacak kalau nama bangsa dan nama bahasanya memperlihatkan kesesuaian atau kesamaan, misalnya bangsa Inggris dan bahasa Inggris, bangsa Cina dan bahasa Cina, atau bangsa Jepang dan bahasa Jepang.
2. Dalam Seminar Politik Bahasa yang diselenggarakan pada tahun 1999, bahasa Melayu disejajarkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Artinya, bahasa Melayu tidak digolongkan sebagai "bahasa asing". Mengenai hal itu, rumusan Seminar menyebutkan: "Di dalam hubungan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa rumpun Melayu yang digunakan di Indonesia berkedudukan sebagai bahasa asing" (Lihat Alwi dan Dendy Sugono (ed.) 2000:220). Meskipun demikian, bahasa Melayu yang digunakan di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan pun tetap merupakan bahasa rumpun Melayu atau bahasa serumpun.
3. Sehubungan dengan peran bahasa dalam kaitannya dengan "dunia luar" seperti itu, Daoust (1997:436) mengemukakan pandangannya bahwa *"Language plays a crucial role in social interaction and is an all-important agent in the transmission of cultural and social values. It is shaped by the same political, social, and cultural forces which produce the world's diverse civilizations and cultures"*.
4. Antara satu negara dan negara yang lain pemenuhan kedua macam fungsi bahasa itu memperlihatkan perbedaan dalam hal jumlah bahasanya. Artinya, di dalam memenuhi kedua macam fungsi itu, ada negara yang hanya memerlukan satu bahasa saja sehingga bahasa yang digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari juga sekaligus digunakan sebagai bahasa negara. Dengan demikian, masyarakat pemakai bahasa di negara yang bersangkutan termasuk monolingual. Sementara itu, di negara yang masyarakatnya bilingual (atau multilingual) bahasa yang digunakan sebagai bahasa negara tidak dengan sendirinya sama dengan bahasa pergaulan sehari-hari. Bahasa kebangsaan atau bahasa nasional itu di Indonesia disebut bahasa persatuan karena bahasa Melayu yang melalui ikrar

Sumpah Pemuda 1928 diangkat sebagai bahasa Indonesia hanya merupakan salah satu dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh SIL International (2001), ada 731 bahasa di Indonesia: 726 bahasa masih digunakan; dua bahasa tanpa penutur asli sama sekali, tetapi digunakan sebagai bahasa kedua; dan tiga bahasa yang sudah punah.

5. Selanjutnya Hassan Ahmad menambahkan keterangan tentang negara-negara yang menggunakan salah satu dari ketujuh bahasa itu sebagai bahasa negara. Bahasa Inggris digunakan di 45 negara (Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada [dengan catatan wilayah Quebec menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi] serta 40 negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan). Bahasa Perancis digunakan di 30 negara, yaitu di Perancis, Kanada (Quebec), Belgia (yang juga menggunakan bahasa Flemish sebagai bahasa resmi), dan Swiss (yang juga menggunakan bahasa Jerman dan Itali sebagai bahasa resmi) serta di 26 negara Afrika bekas jajahan Perancis. Ada 30 negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, yaitu Spanyol dan 29 negara bekas jajahannya. Sementara itu, bahasa Arab digunakan di 20 negara, bahasa Melayu di empat negara (Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia), dan bahasa Mandarin di empat negara (China, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura)
6. Menurut Abdullah Hassan, ada 18 negara maju (yang menggunakan bahasa nasionalnya sebagai bahasa negara), yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Swiss, Belanda, Belgia, Denmark, Swedia, Norwegia, Italia, Spanyol, Portugal, Kanada, Jepang, Korea, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru. Adapun kelompok negara berkembang yang juga menggunakan bahasa nasionalnya sebagai bahasa negara adalah Korea, Cina, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Sementara itu, negara-negara terbelakang masih menggunakan bahasa bekas penjajah (bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, atau Portugis) sebagai bahasa negara.
7. Ungkapan "mencerdaskan kehidupan bangsa" itu memerlukan penjelasan lebih lanjut karena dalam pemakaian bahasa sehari-hari ungkapan itu terasa janggal. Yang dicerdaskan itu bukan kehidupan, melainkan bangsa. Pernalaran seperti itu sama sekali tidak salah. Namun, kita pun dapat pula menyatakan bahwa ada "kehidupan yang cerdas" yang berkontras dengan "kehidupan yang tidak cerdas". Kehidupan yang tidak dilandasi oleh perencanaan yang matang, misalnya pengelolaan perusahaan yang tidak didasarkan pada prinsip atau sistem manajemen yang baik, tidaklah dapat digolongkan sebagai contoh kehidupan yang cerdas. Dengan demikian, makna yang tersirat di balik ungkapan tersebut harus dihubungkan dengan, sekurang-kurangnya, ciri bernalar, bersistem, dan berencana.

8. Pemakaian bahasa Inggris yang demikian disebut oleh, antara lain, Anton M. Moeliono dan Mien A. Rifai (2001) sebagai *the global language for a global village*.
9. Pernyataan itu tidak boleh ditafsirkan bahwa upaya memberdayakan bahasa negara yang berasal dari bahasa kebangsaan itu berimplikasi pada pelarangan penggunaan bahasa Inggris. Tafsiran seperti itu sama sekali tidak benar karena bagaimanapun bahasa Inggris dan bahasa-bahasa asing yang lain masih dan akan tetap kita perlukan, bukan semata-mata untuk memper lancar komunikasi dengan dunia internasional, melainkan juga untuk pemer kayaan wawasan kita dalam bidang iptek modern yang masih tersimpan dalam berbagai buku teks (terutama yang) berbahasa Inggris.
10. Kata *harus* pada kedua pertanyaan itu dapat menimbulkan kesan imperatif. Untuk menghindarkan polemik yang tidak diperlukan mengenai hal itu, kata tersebut boleh saja disulih dengan kata seperti *sebaiknya* atau *seyogianya*.
11. Alisjahbana (1983) mengemukakan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan agar bahasa Indonesia benar-benar mampu berperan sebagai sarana pencerdasan kehidupan bangsa. Yang pertama ialah memperbaiki pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari sekolah rendah sampai sekolah menengah. Yang kedua ialah melipatgandakan penerbitan buku-buku yang menggambarkan puncak-puncak ilmu pengetahuan modern, baik yang isinya karangan asli maupun hasil penerjemahan.
12. Padanan istilah dalam bahasa Indonesia dalam berbagai bidang/subbidang ilmu itu pada umumnya merupakan hasil kerja sama kebahasaan antar-bangsa serumpun Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) sejak 1972. Istilah-istilah itu kemudian diolah lebih lanjut melalui penyusunan glosarium dan penyusunan kamus bidang ilmu atau kamus istilah. Hasil peristilahan yang telah dicapai meliputi 271.284 entri yang berasal dari $\pm$ 60 bidang/subbidang ilmu. Sebagai informasi dapat ditambahkan bahwa telah disusun 4 kamus istilah (Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika) dan 9 glosarium (Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Keuangan, Pertanian, Teknologi Informasi, Linguistik, dan Farmasi). Sementara itu, ada tiga glosarium yang telah disusun dan siap cetak (Kehutanan, Kedokteran, dan Ekonomi).
13. Mengenai bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara, Politik Bahasa yang dirumuskan berdasarkan hasil Seminar Politik Bahasa tahun 1999 menggariskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lemb. ga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembang-

an dan pemanfaatan iptek modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemer kaya bahasa dan sastra daerah. Selain itu, seperti telah disebutkan, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa persatuan yang fungsinya adalah sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas bangsa, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah (Alwi, Hasan, dan Dendy Sugono [ed.] 2000: 219-200).

14. Dalam hubungan itu, Soedjatmoko (1983) mengemukakan bahwa di dalam pertumbuhannya bahasa Indonesia telah berubah dari bahasa politik menjadi bahasa elite. Sebagai bahasa politik, ia telah berhasil menggalang kekuatan untuk perjuangan melawan penjajah. Ia juga merupakan pernyataan keyakinan dan tekad bangsa untuk hidup sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sementara itu, bahasa elite dirumuskannya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional yang mampu menampung dan mengungkapkan segala keperluan kehidupan bernegara.

III. PERENCANAAN LARAS BAHASA

1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA RAGAM IPTEK¹⁾

Pengantar

Sejak dinyatakan secara resmi menjadi bahasa persatuan melalui ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang kemudian disusul oleh penegasan konstitusional sebagai bahasa negara, seperti yang termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa Indonesia memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat diamati tidak hanya pada perubahan segi ketatabahasaan yang bertumpu pada tata kata dan tata kalimat, tetapi juga tercerminkan melalui makin bertambah kayanya kosakata bahasa Indonesia sebagai akibat dari terjadinya kontak bahasa yang tidak akan pernah dapat dihindari oleh bahasa alami mana pun. Sejauh yang menyangkut bahasa Indonesia, kontak bahasa itu bukan saja antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah, melainkan juga antara bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa asing terkemuka, khususnya bahasa Inggris.

Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu perlu diarahkan agar bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara itu benar-benar menjadi alat komunikasi yang efektif dan efisien sehingga dapat digunakan secara mantap dalam berbagai bidang kehidupan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek, berdasarkan judul makalah ini, menyiratkan, sekurang-kurangnya, dua hal pokok, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia serta bahasa Indonesia ragam iptek. Kedua pokok masalah itu, berikut hal-hal lain yang berkaitan dengannya, dikemukakan lebih lanjut berikut ini.

Situasi Kebahasaan

Sebelum sampai pada uraian mengenai bahasa Indonesia ragam iptek, perlu digambarkan dulu bagaimana situasi kebahasaan di Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa ibu atau bahasa daerah yang berbeda-beda, para penutur bahasa Indonesia memperlihatkan corak yang monolingual atau bilingual. Sehubungan dengan pemakaian bahasa asing, corak itu mungkin berubah menjadi multilingual pada kelompok penutur tertentu.

Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di desa-desa yang terpencil dan yang termasuk ke dalam golongan yang tidak/kurang memperoleh pendidikan formal merupakan penutur yang monolingual karena mereka hanya menguasai dan menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa daerahnya. Sementara itu, kelompok yang monolingual ini terdapat juga di kota-kota besar, terutama pada generasi mudanya. Sebagai akibat dari begitu heterogennya masyarakat kota besar, ditambah pula oleh kemungkinan berbedanya kelompok etnis antara ibu dan ayah mereka, maka generasi muda di kota besar itu juga termasuk ke dalam penutur yang monolingual dan bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Indonesia. Mereka yang sekaligus menguasai dua bahasa, misalnya bahasa daerah dan bahasa Indonesia, merupakan penutur yang bilingual. Adapun kelompok yang multilingual hampir dapat dipastikan terdapat pada golongan masyarakat yang terpelajar karena selain menguasai bahasa daerah dan bahasa Indonesia, seperti yang dicontohkan tadi, salah satu bahasa asing juga dikuasainya. Dalam kasus tertentu ciri multilingual ini mungkin sama sekali tidak perlu dikaitkan dengan penguasaan bahasa asing. Orang yang sekaligus menguasai bahasa Indonesia dan dua bahasa daerah atau lebih, misalnya, dapat pula disebut penutur yang multilingual. Akan tetapi, kemultilingualan yang dimaksudkan dalam makalah ini mengacu pada penguasaan bahasa asing sebagai salah satu faktornya.

Dalam situasi kebahasaan yang demikian, kontak bahasa yang tadi disebutkan berlangsung antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Seberapa jauh kontak bahasa itu dapat mengakibatkan seseorang dapat diidentifikasi sebagai penutur yang monolingual, bilingual, atau multilingual sangat erat berkaitan dengan, antara lain, tingkat pendidikan, latar belakang sosial, dan profesi yang bersangkutan. Arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi mengakibatkan makin gencar dan intensifnya proses saling mempengaruhi di antara ketiga bahasa itu sehingga yang terjadi ialah bahwa bahasa yang "kuat" akan mempengaruhi bahasa yang "lemah".

Saling mempengaruhi antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia, misalnya, sering mengakibatkan timbulnya interferensi, baik yang berciri leksikal maupun gramatikal. Yang menarik mengenai interferensi ini ialah kecenderungan pada sebagian di antara kita untuk memperlihatkan sikap yang mendua. Interferensi bahasa daerah akan dikatakan dapat memperkaya bahasa Indonesia, sementara interferensi bahasa Indonesia malah akan dinilai merusak kemurnian bahasa daerah.

Proses saling mempengaruhi yang berkembang ke arah interferensi itu berkorelasi dengan faktor "kuat-lemahnya"-nya bahasa yang bersangkutan, seperti yang dikemukakan di atas. Meskipun belum pernah dilakukan penelitian yang memadai mengenai hal itu, dapat dikemukakan hipotesis bahwa secara potensial bahasa Indonesia dapat mempengaruhi bahasa daerah dan bahasa

Indonesia pada gilirannya dapat dipengaruhi bahasa asing. Sudut pandang ini bahkan dapat berubah menjadi asumsi kalau kita mencoba melihat ketiga bahasa itu dalam fungsinya sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek.

Kalau fungsi tersebut secara khusus kita hubungkan dengan bahasa Indonesia, sebagaimana yang diisyaratkan dalam judul makalah ini, pertanyaan yang cukup menarik untuk dijawab ialah: seberapa banyak orang Indonesia yang dapat "dilibatkan" ke dalam pemenuhan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek? Untuk itu, yang terlebih dulu harus diketahui ialah jumlah penduduk Indonesia yang dapat digolongkan sebagai penutur bahasa Indonesia. Angka hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 berikut ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjawab pertanyaan tersebut.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980, dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 146.775.000 orang yang menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan sehari-hari hanya 17.505.000 orang (12%), setelah penutur bahasa Jawa 59.357.000 orang (40%) dan penutur bahasa Sunda 22.110.000 orang (15%). Setelah bahasa Indonesia berturut-turut dapat disebutkan, antara lain, bahasa Madura 6.914.000 orang (5%), bahasa Minang 3.546.000 orang (2%), bahasa Bugis 3.322.000 orang (2%), bahasa Batak 3.107.000 orang (2%), bahasa Bali 2.481.000 orang (2%), dan bahasa Banjar 1.662.000 orang (1%).

Angka 12 % yang menggambarkan jumlah penutur bahasa Indonesia menurut sensus penduduk 1980 itu memperlihatkan kenaikan pada sensus penduduk 1990 karena berdasarkan penduduk Indonesia usia lima tahun ke atas yang berjumlah 157.924.324 orang, yang menyatakan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berjumlah 23.802.520 orang (15%). Bandingkan dengan golongan penduduk yang sama sekali tidak dapat berbahasa Indonesia sebanyak 27.055.488 orang (17%) dan mereka yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tetapi menyatakan dapat memahaminya sebanyak 107.066.316 orang (68%).

Dasar dan Arah Kebijakan Bahasa

Seperti yang telah dikemukakan di atas, arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi situasi kebahasaan di Indonesia. Tanpa batas-batas pengendalian yang jelas, "persaingan" di antara ketiga bahasa itu akan merugikan bahasa yang berada dalam posisi yang "lemah". Oleh karena itu, perlu ditentukan garis yang tegas mengenai kebijakan bahasa di Indonesia agar bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing itu memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing yang saling menunjang.

Dasar dan arah kebijakan bahasa di Indonesia harus ditelusuri mulai dari

ikrar Sumpah Pemuda 1928 dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disinggung di atas. Selain itu, perlu pula disimak rumusan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 mengenai hal tersebut.

Butir ketiga Sumpah Pemuda "Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" mencerminkan kebulatan semangat kebangsaan untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat sehingga bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat penghubung antarsuku, antardaerah, dan bahkan antarbudaya. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu sekurang-kurangnya mengisyaratkan lima fungsi bahasa Indonesia, yaitu (1) sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, (2) sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan jenjang pendidikan (dengan catatan tambahan tentang dijadikannya bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar sampai perguruan tinggi), (3) sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), (4) sebagai sarana pengembangan iptek, dan (5) sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Sementara itu, penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh para penuturnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional juga tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan mengenai bahasa daerah dan bahasa asing dikemukakan dalam Pasal 42, yaitu (a) "Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu" dan (b) "Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu". Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan perlu diupayakan pelaksanaannya sedemikian rupa sehingga, misalnya, bahasa Indonesia benar-benar dapat digunakan baik oleh para mahasiswa maupun dosen agar mereka memiliki kemampuan akademik dan profesional untuk menerapkan, mengembangkan, dan bahkan menciptakan iptek, seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 16 undang-undang tersebut.

Dalam GBHN 1993 lebih ditegaskan lagi bahwa pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional perlu makin ditingkatkan agar bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa iptek. Untuk itu, perlu diupayakan "penelitian, pembakuan peristilahan dan kaidah bahasa, serta pemekaran perbendaharaan bahasa sehingga bahasa Indonesia lebih mampu menjadi sarana pengungkap citra, rasa, dan karsa secara tertib dan lebih mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi". Mengenai bahasa daerah digariskan

dua hal, yaitu fungsinya sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan sebagai landasan pengembangan dan pemerdayaan perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Akan halnya peningkatan penguasaan bahasa asing, disebutkan bahwa hal itu diperlukan untuk memperluas cakrawala berpikir, memperkuat penguasaan iptek, dan memperlancar komunikasi dengan bangsa lain.

Berdasarkan kerangka pandangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa bahasa daerah dan bahasa asing itu hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan bahasa Indonesia. Masukan dari bahasa daerah tidak hanya dimaksudkan untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia semata-mata, tetapi juga untuk memberikan gambaran tentang betapa beranekaragamnya unsur-unsur bahasa dan budaya daerah yang jalin-menjalin dalam memberi corak dan warna pada bahasa dan kebudayaan Indonesia. Pemanfaatan bahasa asing untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperkuat penguasaan iptek, seperti disebutkan di atas, harus diupayakan untuk keperluan pengembangan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa bagi setiap individu, selain sebagai sarana komunikasi kalau dia berhubungan dengan individu yang lain, juga merupakan sarana berpikir bagi dirinya sendiri. Jadi, kalau pada satu pihak bahasa asing dimanfaatkan untuk memperluas cakrawala berpikir, sedangkan pada pihak lain bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana berpikir, terlihat adanya korelasi antara bahasa asing dan bahasa Indonesia. Demikian pula halnya dengan fungsi bahasa asing untuk memperkuat penguasaan iptek yang dapat dihubungkan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek.

Pemanfaatan bahasa daerah dan bahasa asing itu dengan demikian mengisyaratkan bahwa konsep mengenai apa pun yang dapat diungkapkan oleh bahasa daerah dan bahasa asing harus pula dapat diungkapkan oleh bahasa Indonesia. Dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional, bahasa Indonesia perlu menyerap sebanyak-banyaknya konsep budaya daerah dan iptek yang menggambarkan tingkat peradaban kelompok etnis yang bersangkutan. Dalam rangka memacu bangsa kita ke arah peradaban modern, bahasa Indonesia juga perlu menyerap sebanyak-banyaknya konsep budaya dan iptek modern dari bahasa asing. Pengungkapan kembali segala konsep itu dalam bahasa Indonesia harus sesuai dengan sistem dan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditetapkan. Kalau hal itu menyangkut peristilahan, rujukan yang perlu diperhatikan ialah *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Kalau hal itu berkaitan dengan penulisan, rujukannya ialah *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

Kontak bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah berlangsung dengan intensitas yang berbeda dari kontak bahasa antara bahasa Indonesia

dan bahasa asing. Antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah ada hubungan timbal balik, sedangkan antara bahasa Indonesia dan bahasa asing hubungan seperti itu boleh dikatakan tidak ada. Sebagai unsur kebudayaan yang hidup dan mempunyai peranan khusus dalam kelompok masyarakat etnis yang bersangkutan, bahasa daerah tumbuh serasi dengan bahasa Indonesia sehingga bahasa daerah itu menjadi sumber utama pemekaran kosakata bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa Indonesia pun menjadi sumber pemekaran kosakata bahasa daerah sehingga bahasa daerah dapat memenuhi berbagai fungsi kemasyarakatannya. Yang perlu diperhatikan ialah kenyataan bahwa di Indonesia terdapat beratus-ratus bahasa daerah dengan taraf perkembangan yang tidak sama. Kelompok masyarakat etnis yang mendukung setiap bahasa daerah itu pun jumlahnya tidak sama. Sementara itu, pembinaan bahasa asing, sebagai sarana ke arah peradaban modern di bidang iptek, agama, kebudayaan, ekonomi, dan politik itu, berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan bahasa Indonesia, tanpa merusak bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia. Mengenai hal ini, GBHN 1993 memberi isyarat bahwa "penggunaan istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari".

Bahasa Indonesia Ragam Iptek

Bahasa Indonesia, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan yang amat luas cakupannya itu mesti dapat dikomunikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia oleh seseorang kepada orang lain, oleh seorang pembicara kepada lawan bicaranya atau oleh seorang penulis kepada pembacanya. Dengan mengecualikan pemakaian bahasa Indonesia untuk keperluan komunikasi yang menurut sifatnya sangat khusus, seperti dalam pengisian formulir atau pengiriman berita lewat telegram, pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan itu memperlihatkan persamaan dalam hal tata kata dan tata kalimatnya. Oleh karena itu, kalau semata-mata kita hanya memperhatikan tata kata dan tata kalimat itu saja, hampir tidak mungkin kita dapat melihat adanya perbedaan, misalnya, antara bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ekonomi dan bahasa Indonesia dalam bidang politik atau kebudayaan.

Sehubungan dengan hal itu, sebagai contoh, patut disinggung pandangan sementara orang yang cenderung beranggapan bahwa bahasa Indonesia dalam bidang hukum, terutama yang menyangkut perundang-undangan, sangat sukar dipahami karena kalimatnya panjang-panjang. Mereka menghendaki agar penataan atau formulasi kalimat dalam bidang tersebut disederhanakan menjadi kalimat yang pendek-pendek untuk memudahkan pemahamannya. Pandangan atau anggapan yang demikian tidaklah tepat karena pemahaman

terhadap isi suatu kalimat tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya kalimat yang bersangkutan, tetapi oleh keapikan atau kerapian susunan kalimat dan oleh ketepatan memilih kata atau istilah yang digunakan. Atas dasar itu, kalimat yang pendek tidak dengan sendirinya berarti mudah dipahami. Sebaliknya, kita tidak akan menghadapi kesukaran dalam memahami kalimat-kalimat yang panjang selama bagian-bagian kalimat yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan masih secara jelas dapat diidentifikasi.

Kalau begitu halnya, yaitu bahwa berdasarkan tata kata dan tata kalimatnya, bahasa Indonesia yang digunakan dalam berbagai bidang kehidupan itu tidak menyiratkan adanya perbedaan, padahal kita mengenal, misalnya, bahasa Indonesia ragam politik, bahasa Indonesia ragam ekonomi/perdagangan, dan bahasa Indonesia ragam iptek. Pertanyaan yang timbul ialah: faktor apa yang menyebabkan timbulnya perbedaan ragam itu?

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa faktor pembedanya terletak pada perangkat peristilahan yang digunakan dalam masing-masing bidang tersebut. Kata seperti *ekspor*, *pemegang saham*, dan *kamar dagang*, misalnya, tidak mungkin digunakan dalam bidang agama karena contoh itu merupakan istilah untuk bidang ekonomi/perdagangan. Demikian pula halnya dengan kata seperti *partai*, *oposisi*, dan *pemilihan umum* yang lebih tepat digunakan untuk bidang politik daripada untuk bidang-bidang yang lain.

Sehubungan dengan sebutan bahasa Indonesia ragam iptek, dan apabila hal itu dihubungkan dengan klasifikasi bidang ilmu yang lazim berlaku di Indonesia, yaitu ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan ilmu pengetahuan budaya (IPB), persoalannya ialah unsur *ip* pada *iptek* itu merujuk pada bidang ilmu yang mana. Berdasarkan pemakaian kata *ilmu pengetahuan* sebagai padanan kata *science(s)* dengan muatan makna '*natural sciences*', maka unsur *ip* pada kata *iptek* itu merujuk pada ilmu pengetahuan alam. Dengan demikian, bahasa Indonesia ragam iptek itu ialah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, seperti yang telah disebutkan di atas, kita perlu memahami, menguasai, dan menyebarluaskan, terutama, konsep-konsep iptek modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing. Agar konsep-konsep iptek modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing, yang jumlahnya pasti sangat tidak berarti dibandingkan dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penyebarluasan konsep-konsep iptek itu harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Upaya penyebarluasan konsep iptek dalam bahasa Indonesia itu hanya mungkin dapat dilakukan dengan baik kalau istilah-istilah yang biasa diguna-

kan dalam bidang iptek itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Hal itu berarti bahwa untuk dapat mengembangkan bahasa Indonesia ragam iptek, langkah pertama yang harus dilakukan ialah menyusun peristilahannya. Untuk keperluan itulah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dengan bantuan sejumlah ahli dari perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia, telah menyusun istilah untuk berbagai bidang ilmu dengan memberikan prioritas pada empat bidang ilmu dasar, yaitu fisika, matematika, biologi, dan kimia.

Sekarang ini peristilahan keempat bidang ilmu tersebut untuk keperluan pemakaian sampai dengan tingkat S-1 telah selesai disusun. Untuk itu, dalam rangka menyambut Kongres Bahasa Indonesia VI tanggal 28 Oktober–2 November 1993 di Jakarta, direncanakan penerbitannya dalam bentuk daftar istilah yang komprehensif untuk setiap bidang ilmu tersebut. Keempat terbitan itu masing-masing diberi judul *Glosarium Fisika*, *Glosarium Matematika*, *Glosarium Biologi*, dan *Glosarium Kimia*.

Sementara itu, dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan tersebut, istilah-istilah yang telah berhasil disusun itu diolah lebih lanjut menjadi berbagai kamus istilah. Tentu saja, selain mengandung padanan istilah istilah dalam bahasa Indonesia, kamus istilah itu juga mencantumkan rumusan atau penjelasan setiap istilah yang dicantumkan. Sampai sekarang telah berhasil disusun sekurang-kurangnya 25 buah kamus istilah.

Penerbitan daftar dan kamus istilah itu sangat penting dan bermanfaat dalam rangka pemasyarakatan dan penyebarluasan perangkat istilah yang sudah dibakukan. Kalau upaya penerbitan itu tidak dilakukan, maka hasil penyusunan dan pembakuan istilah itu akan tetap tinggal sebagai harta karun.

Jika para ilmuwan diharapkan menggunakan istilah yang telah dibakukan itu dengan taat asas, maka harus pula diupayakan adanya arus balik yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses pengembangan bahasa selanjutnya. Oleh karena itu, dilihat dari sudut pandang pembinaan bahasa, masuknya istilah-istilah yang sudah dibakukan itu ke dalam buku ajar, makalah, atau karangan-karangan ilmiah lainnya merupakan langkah berikutnya yang tidak dapat ditawar-tawar.

Penutup

Berdasarkan uraian singkat mengenai upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya yang menyangkut bahasa Indonesia ragam iptek, seperti yang telah dikemukakan di atas, kita perlu makin menyadari bahwa konsep dalam bidang apa pun, termasuk konsep di bidang iptek, harus dapat diungkapkan kembali dalam bahasa Indonesia.

Agar bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai sarana pemanfaatan dan pengembangan iptek, penyusunan dan pembakuan perangkat peristilahannya mutlak dilakukan dengan melibatkan sebanyak-banyaknya para ahli di

bidang/subbidang ilmu yang bersangkutan. Selepas itu, penerbitan dan pemasaran daftar dan kamus istilah yang ditujukan kepada berbagai kelompok sasaran yang memerlukannya juga perlu mendapat perhatian utama. Para ahli dari perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian, kalangan profesi, dan bahkan mereka yang bergerak dalam bidang industri dan niaga seyogianya sama-sama memikul beban tanggung jawab demi pemantapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam bidang iptek.

2. PERAN MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA^{*)}

Pengantar

Garis-Garis Besar haluan Negara 1993 mengisyaratkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun yang akan datang, yang disebut masa Pembangunan Jangka Panjang II, sumber daya manusia memperoleh porsi perhatian yang jauh lebih besar, dibandingkan dengan masa pembangunan 25 tahun sebelumnya. Bagi Indonesia yang hampir seluruh masyarakatnya bercorak bilingual, sumber daya manusia itu erat berkaitan dengan masalah bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara atau bahasa resmi.

Pada makalah ini akan dipaparkan secara singkat peran media massa dalam upaya pembinaan bahasa yang bertujuan menumbuhkan dan memelihara sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia sambil sekaligus meningkatkan mutu pemakaiannya.

Pembinaan Bahasa

Dalam hal bahasa Indonesia, masalah pembinaan bahasa sangat erat kaitannya dengan masalah pengembangan bahasa. Eratnya keterkaitan itu terutama disebabkan oleh masih sangat mudanya usia bahasa Indonesia itu sendiri (67 tahun sebagai bahasa nasional dan 50 tahun sebagai bahasa negara), sementara beban tugas yang dipikulnya sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangatlah sarat.

Dengan sasaran para pemakainya, upaya pembinaan bahasa bertujuan meningkatkan sikap positif warga masyarakat agar mereka memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk menggunakan bahasa secara baik dan benar dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dan dengan memperhatikan lingkungan sociolinguistik yang terkait.¹ Sementara itu, dengan sasaran bahasanya, upaya pengembangan bahasa bertujuan meningkatkan kelengkapan perangkat bahasa yang bersangkutan, seperti tata bahasa, tata ejaan, dan kosakata, agar bahasa itu benar-benar dapat digunakan sebagai sarana komunikasi umum, sarana komunikasi pemerintahan, sarana pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana pendukung kebudayaan (Halim,

^{*)} Simposium Nasional Ragam Bahasa Jurnalistik dan Pengajaran Bahasa Indonesia tanggal 10—12 Juli 1995 di IKIP PGRI Semarang.

1993).²

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan dengan porsi dan intensitas yang boleh dikatakan sama antara pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa. Akan tetapi, hasil yang dicapai dalam kedua bidang itu tidaklah sama. Hasil dalam bidang pengembangan cukup menggembirakan dan sudah memadai. Bahasa Indonesia sudah memiliki tata ejaan, tata bahasa, kamus, dan peristilahan.³ Pembinaan bahasa yang bermuara pada tumbuh dan terpeliharanya sikap positif itu hasilnya tidak saja tidak dapat dikuantifikasi, tetapi juga karena memang setakat ini masih jauh dari yang diharapkan.

Dengan memperhatikan kenyataan yang demikian, masalah sumber daya manusia berikut upaya peningkatannya lebih banyak berkenaan dengan masalah pembinaan bahasa daripada dengan masalah pengembangan bahasa.

Agar pembinaan bahasa itu berperan secara optimal dalam pengembangan sumber daya manusia, perlu dilakukan secara terus-menerus berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan bahasa, di antaranya ialah (1) perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi pemakaian bahasa Indonesia oleh pemakai yang bersangkutan, (2) tingkat keniraksaraan penduduk yang masih tinggi, (3) masih langkanya penutur anutan yang patut dijadikan teladan atau contoh dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, (4) adanya pemakaian bahasa asing tertentu (khususnya bahasa Inggris) yang dianggap oleh sebagian orang memiliki prestise dan gengsi sosial yang tinggi di dalam masyarakat, dan (5) kurang adanya motivasi pada sebagian terbesar warga masyarakat untuk meningkatkan penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia (Moeliono, 1985).

Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin dalam kerangka pembangunan bangsa yang dititikberatkan pada bidang ekonomi,⁴ sebagaimana yang dinyatakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 sebagai tujuan Pembangunan Jangka Panjang II, masalah peningkatan sumber daya manusia harus ditempatkan pada skala prioritas utama. Yang dimaksudkan dengan *peningkatan* dalam konteks itu tidaklah sekadar dalam hal jumlahnya, tetapi terutama mutunya.

Mutu sumber daya manusia ditentukan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan dan disiplin, keuletan, serta prestasi kerja. Untuk keperluan makalah ini, faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia itu secara khusus perlu dihubungkan dengan tiga faktor yang merupakan prasyarat utama yang saling menunjang, yaitu kemampuan berbahasa Indonesia, kepandaian membaca dan menulis huruf Latin, serta tingkat pendidikan.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, berdasarkan pemakaian bahasa sehari-hari terdapat tiga kelompok penduduk (lihat Tabel 1), yaitu (1) yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari: 24.042.010 orang (15,19%); (2) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat menggunakannya: 107.066.141 orang (67,65%); dan (3) yang tidak memahami bahasa Indonesia: 27.154.488 orang (17,16%).⁵

Kualifikasi sumber daya manusia yang secara potensial dapat ditingkatkan mutunya tidak hanya menyangkut penduduk pada kelompok pertama, tetapi juga penduduk pada kelompok kedua karena penguasaan bahasa Indonesia kelompok pertama belum tentu lebih baik daripada kelompok kedua. Hal itu berarti bahwa upaya pengembangan mutu sumber daya manusia ini harus diupayakan terutama melalui pembinaan bahasa terhadap 82,84% dari penduduk Indonesia. Hambatan yang akan dihadapi ialah tidak atau belum diketahuinya tingkat kemampuan berbahasa Indonesia yang sebenarnya, baik dari kelompok pertama maupun dari kelompok kedua.

Tabel 1
Penduduk Indonesia Usia 5 Tahun ke Atas
menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Kelompok	Jumlah	%
I	24.042.010	15,19
II	107.066.141	67,65
III	27.154.488	17,16
Jumlah	158.262.639	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Seperti sudah disinggung di atas, tingkat keniraksaraan penduduk yang masih tinggi merupakan salah satu kendala pembinaan bahasa. Hasil sensus penduduk tahun 1990 memperlihatkan bahwa penduduk Indonesia yang masih buta aksara (lihat Tabel 2) berjumlah 21.494.117 orang (15,92%), sementara yang sudah memiliki kepandaian membaca dan menulis huruf Latin berjumlah 111.365.827 orang (82,47%).⁶

Tabel 2
Penduduk Indonesia Usia 10 Tahun ke Atas
menurut Kepandaian Membaca dan Menulis

No.	Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk	%
1.	Huruf Latin	111.365.827	82,47
2.	Huruf Lain	2.145.277	1,59
3.	Buta Aksara	21.494.117	15,92
4.	Tak Terjawab	34.360	0,02
Jumlah		135.039.581	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Dalam hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia, kelompok yang harus dianggap potensial untuk keperluan itu ialah penduduk Indonesia yang sudah dapat membaca dan menulis huruf Latin. Kalau diperhatikan jumlahnya, maka terdapat dugaan yang kuat bahwa penduduk yang "melek huruf" Latin yang berjumlah 82,47% itu berkorelasi dengan penduduk Indonesia yang sudah dapat berbahasa Indonesia yang berjumlah 82,84%.⁷

Selain itu, dalam pengembangan sumber daya manusia ini perlu diperhatikan latar belakang pendidikan penduduk Indonesia secara umum (lihat Tabel 3). Apabila latar belakang pendidikan itu dikaitkan dengan keadaan PNS (lihat Tabel 4), jelas terlihat bahwa yang paling banyak ialah PNS yang berijazah SLTA.

Tabel 3
Tingkat Pendidikan
Penduduk Indonesia menurut Sensus 1990

No.	Pendidikan	Jumlah Penduduk	%
1.	Belum Pernah Sekolah	21.952.7919	16,26
2.	Tidak/Belum amat SD	42.480.415	31,46
3.	SD	40.996.434	30,36
4.	SLTP Umum	13.392.558	9,92
5.	SLTP Kejuruan	1.088.539	0,80
6.	SLTA Umum	7.882.905	5,84

7.	SLTA Kejuruan	5.204.538	3,85
8.	Diploma I/II	352.505	0,26
9.	Akademi/Diploma III	700.801	0,52
10.	Universitas	986.699	0,73
Jumlah		135.038.185	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Tabel 4
Latar Belakang Pendidikan PNS per 31 Maret 1993
Jumlah 4.009.347 Orang

No.	Pendidikan	Jumlah (%)
1.	SD	14%
2.	SLTP	10%
3.	SLTA	58%
4.	Sarjana Muda	10%
5.	Sarjana	8%

Sumber: Ceramah Menpan pada Sespans Promosi IVC Tahun 1994/ 1995

Sementara itu, kalau dilihat dari pemakaian bahasa sehari-hari, jumlah pemakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan dalam kehidupan sehari-hari hanya menempati posisi ketiga setelah jumlah pemakai bahasa Jawa dan bahasa Sunda, seperti terlihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5
Bahasa-Bahasa di Indonesia dan Jumlah Penuturnya

No.	Nama Bahasa	Jumlah	%
1.	Jawa	60.267.461	38,08
2.	Sunda	24.155.96	5,26
3.	Indonesia	24.042.01	15,19
4.	Madura	6.792.447	4,29
5.	Minang	3.527.726	2,23

No.	Nama Bahasa	Jumlah	%
6.	Bugis	3.228.742	2,04
7.	Batak	3.120.047	1,97
8.	Banjar	2.755.337	1,74
9.	Bali	2.589.256	1,64
10.	Lainnya	27.070.883	17,11
11.	Tak terjawab	712.629	0,45
	Jumlah	158.262.639	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Angka-angka yang dikemukakan di atas perlu diperhitungkan secara cermat dalam rangka penyusunan rencana kegiatan yang berhubungan dengan upaya pembinaan bahasa, termasuk dan terutama yang dilakukan oleh media massa.

Peran Media Massa

Bahwa media massa memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat dominan dalam upaya pembinaan bahasa, siapa pun tidak meragukannya. Mengingat peran dan tanggung jawabnya yang sangat dominan itu, bahasa media massa atau laras bahasa jurnalistik senantiasa menjadi topik bahasan yang menarik dalam setiap kali penyelenggaraan kongres bahasa Indonesia.

Gambaran mengenai hal itu dapat disimak melalui kutipan hasil Kongres Bahasa Indonesia I (25--27 Juni 1938 di Solo), Kongres Bahasa Indonesia II (28 Oktober—2 November 1954 di Medan), dan Kongres Bahasa Indonesia VI (28 Oktober—2 November 1993 di Jakarta) sebagai berikut.

a. Hasil Kongres Bahasa Indonesia I

Setelah mendengar praeadvies toean Adi Negoro, tentang "Bahasa Indonesia di dalam persoeratkabaran", maka sepandjang pendapatan Konggres, soedah waktoenja wartawan berdaja oepaja mentjari djalan-djalan oentoek memperbaiki bahasa di dalam persoeratkabaran, karena itu berharap soepaja Perdi bermoepakat tentang hal itoe dengan anggota-anggotanja dan komisi jang akan dibentoek oleh Bestuur Konggres jang baroe bersama-sama dengan Hoofbestuur Perdi.

b. Hasil Kongres Bahasa Indonesia II

- (1) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio tak dapat dianggap sebagai bahasa yang tak terpelihara dan rusak,
- (2) Bahasa Indonesia didalam Pers dan Radio adalah bahasa masjarakat

umum yang langsung mengikuti pertumbuhan sebagai fungsi masyarakat,

- (3) Pers dan Radio hendaknya sedapat mungkin berusaha memperhatikan tata bahasa yang resmi,
- (4) Menganggap perlu supaya diandjurkan adanya kerdjasama yang lebih erat antara Pers dan Radio dengan Balai² Bahasa.

c. Hasil Kongres Bahasa Indonesia VI

- (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membina kerja sama yang luas dengan berbagai lembaga, terutama dengan perguruan tinggi dan media massa.⁸
- (2) Untuk meningkatkan sikap positif dan menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih cendekia, media cetak dianjurkan menyediakan rubrik bahasa sebagai sarana pembaca untuk berdialog mengenai bahasa.
- (3) Dalam memperkaya bahasa Indonesia, dunia pers telah menunjukkan kepeloporannya dalam menerima unsur serapan. Bagi perkembangan bahasa, hal itu sama sekali tidak merugikan. Namun, pengguna bahasa dalam pers dianjurkan untuk menggali kekayaan bahasa dari bahasa serumpun dan bahasa daerah.
- (4) Selain penguasaan bahasa, minat terhadap sastra hendaknya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penerimaan calon wartawan.
- (5) Setiap media massa dianjurkan untuk mengangkat redaktur khusus bahasa agar pemantauan dan evaluasi atas bahasa yang dipergunakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Sebagai media komunikasi yang menggunakan bahasa, media massa (baik cetak maupun elektronik) telah membuktikan diri sebagai sarana yang sangat efektif tidak saja dalam pembinaan bahasa, tetapi juga bahkan dalam pengembangan bahasa. Oleh karena itu, peran media massa, terutama dalam hal pembinaan bahasa, yaitu sebagai penyebar dan sekaligus sebagai tolok ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.⁹

Penutup

Mengingat pentingnya peran pembinaan bahasa dalam pengembangan mutu sumber daya manusia di Indonesia, perlu dilakukan berbagai rencana dan upaya yang terpadu dan terarah, berdasarkan suatu kebijaksanaan bahasa nasional yang komprehensif, agar pembinaan bahasa itu dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif. Rencana dan upaya itu sama sekali tidak akan memadai kalau hanya dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa saja. Dalam hal ini, media massa harus tampil sebagai salah satu pihak

yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat menentukan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

Organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Lembaga Pers Dr. Soetomo, misalnya, perlu meningkatkan berbagai upaya nyata untuk meningkatkan mutu dan keterampilan para wartawan Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan bidang profesinya karena, bagaimanapun, laras bahasa jurnalistik merupakan salah satu bentuk dari ragam bahasa baku.

Catatan:

1. Bandingkan dengan pandangan Gunarwan (1993) yang menyebutkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia merujuk pada empat sasaran yang bertingkat, yaitu (1) penyebaran penggunaan bahasa Indonesia, (2) peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia, (3) penumbuhan sikap yang baik terhadap bahasa Indonesia agar warga negara Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan (4) pemupukan rasa cinta dan kesetiaan kepada bahasa Indonesia.
2. Dalam hal tertentu, upaya pengembangan bahasa itu dapat juga disebut upaya pembakuan bahasa. Kalau dihubungkan dengan bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis, maka upaya pembakuan bahasa itu diprioritaskan terlebih dahulu pada bahasa Indonesia ragam tulis. Akibatnya, pembakuan bahasa untuk bahasa Indonesia ragam lisan, seperti masalah lafal, merupakan lahan garapan yang masih menunggu perhatian dari para ahli bahasa.
3. Hasil upaya pengembangan bahasa yang telah dicapai, antara lain, berupa *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Selain itu, melalui wadah kerja sama kebahasaan antarnegara Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim), telah dihasilkan sejumlah peristilahan untuk berbagai bidang ilmu, bahkan beberapa di antaranya telah diolah lebih lanjut menjadi kamus istilah.
4. Sebagaimana yang dikutip Boediono (1993) berdasarkan laporan penelitian kebijaksanaan Bank Dunia dalam *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy* yang diterbitkan pada bulan Agustus 1993 oleh Oxford University Press, setelah Hongkong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan yang lazim dijuluki "Macan Asia", Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan tiga negara industri baru di kawasan Asia Tenggara. Menurut penilaiannya, kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia yang telah mengakibatkan pesatnya pembangunan bidang ekonomi di Indonesia itu tidak dapat dilepaskan dari peran yang dimainkan oleh bahasa Indonesia.

5. Angka-angka ini didasarkan pada penduduk usia 5 tahun ke atas yang berjumlah 158.262.639 orang.
6. Angka-angka ini didasarkan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang berjumlah 135.039.581 orang. Sehubungan dengan hal itu, dapat ditambahkan bahwa yang sudah dapat membaca dan menulis bukan huruf Latin berjumlah 2.145.277 orang (1,59%), sementara mereka yang tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai kepandaian membaca dan menulis ini berjumlah 34.360 orang (0,03%).
7. Korelasi semacam itu dapat pula dilihat antara 27.055.488 orang penduduk Indonesia yang belum dapat berbahasa Indonesia dengan 27 juta penduduk Indonesia yang sering disebut-sebut sebagai sasaran upaya "pengentasan kemiskinan" yang tengah dilancarkan.
8. Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan media massa itu antara lain terlihat dalam pertemuan berkala (dua minggu sekali) yang disponsori oleh majalah TEMPO. Seiring dengan permasalahan yang dihadapi majalah mingguan itu, pertemuan tersebut kemudian terhenti. Akan tetapi, dengan prakarsa pimpinan salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, pertemuan berkala yang secara khusus membahas masalah bahasa di kalangan media massa itu "dihidupkan" kembali dalam suatu acara yang diresmikan tanggal 28 Juni 1995 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Atmakusumah Astraatmadja, Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo, mengemukakan sejumlah kasus kesalahan bahasa dalam media massa, antara lain yang menyangkut tidak digunakannya tanda koma dan, dengan alasan penghematan kata, kata *dengan* pada kelompok kata seperti *sehubungan dengan* dan *sesuai dengan* (Seri Seminar LPDS 1994:7).
 - a. Gubernur mengatakan di Jakarta sekarang sering terjadi banjir.
 - b. Hal ini sesuai benar keputusan menteri nomor sekian itu?

Selain itu, media massa masih sangat sering menampilkan jenis kalimat rancu. Masalah akronim yang tidak lazim juga amat subur tumbuh dan berkembang di dalam media massa. Hal yang disebutkan terakhir ini merupakan masalah kebahasaan yang sangat serius untuk disadari oleh berbagai pihak secara lebih bersungguh-sungguh.

3. BAHASA KEBANGSAAN DAN PENGEMBANGAN ILMU*

Selama beberapa dekade terakhir abad kedua puluh ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam berbagai bidang mengalami kepesatan kemajuan yang makin meningkat. Keluasan cakupan taksonomi substansinya makin berkembang dan kedalaman elaborasi serta bobot keilmuannya makin meningkat. Kecenderungan ini menyebabkan siapa pun yang terlibat di dalamnya, kalau berniat menjadi pakar, haruslah menjadi pakar spesialis dalam bidang atau subbidang ilmu yang digelutinya. Berbeda dari kurun waktu sebelumnya ketika orang sudah puas dengan adanya para pakar generalis yang moderat, yang diperlukan sekarang adalah para pakar spesialis yang fanatik (Alwi dan Dendy Sugono, 1999:x). Penggunaan kata “moderat” dan “fanatik” dalam konteks tersebut mungkin tidak terlalu tepat. Kedua kata yang digunakan secara atributif itu dimaksudkan untuk menggambarkan telah terjadinya pergeseran dari penguasaan bidang ilmu secara umum pada masa lalu menjadi penguasaan subbidang ilmu secara khusus pada masa sekarang.

Catatan penting yang perlu ditambahkan terhadap pergeseran itu ialah bahwa pada masa lalu seorang pakar generalis boleh berasyik-asyik dalam bidangnya sendiri tanpa dibebani oleh keharusan untuk mengetahui dan mempertimbangkan apa yang telah dicapai oleh pakar generalis dari bidang yang lain. Hal itu pun sekarang mengalami perubahan pula karena seorang pakar spesialis subbidang yang satu harus memperhatikan prestasi yang telah diperoleh pakar subbidang yang lain, apalagi kalau menurut taksonominya para pakar spesialis itu berkibrah dalam bidang ilmu yang sama. Perubahan itu mengisyaratkan bahwa kesalingtergantungan (interdependensi) di antara para pakar spesialis harus dipandang sebagai salah satu keperluan profesional mereka.

Kepesatan kemajuan yang dapat kita amati pada berbagai bidang iptek itu sekaligus merupakan fenomena epistemologis dan ontologis yang harus diupayakan agar tetap bertujuan meningkatkan peradaban dan menyejahterakan kehidupan manusia, bukan menuju ke arah yang sebaliknya. Dalam batas-batas tertentu, kesejahteraan kehidupan manusia mencerminkan tingkat peradaban, bukan hal yang sebaliknya karena masalah kesejahteraan, termasuk dalam arti yang luas: kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin, hanya

* Makalah Persidangan Serantau Bahasa, Sastera, dan Budaya Melayu dengan tema “Bahasa dan Sastera Penjana Budaya Ilmu”, 22—23 Oktober 2001, Universiti Putra Malaysia, Serdang

merupakan salah satu dari sejumlah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat peradaban. Peradaban itu sendiri merupakan sesuatu yang abstrak, tetapi pengidentifikasiannya didasarkan pada berbagai hal yang ciri konkretnya lebih dominan daripada ciri abstraknya. Pemahaman seperti ini akan membuat kita untuk menempatkan kemajuan iptek tersebut (hanya) dalam konteks upaya meningkatkan peradaban. Masalah peradaban ini lebih lanjut akan disinggung dalam kaitannya dengan bahasa dan kebudayaan bangsa.

Mengenai kemajuan iptek yang amat pesat itu, tidak akan ada yang menafikan bahwa hal itu sangat erat kaitannya dengan fungsi bahasa sebagai sarana berpikir, sarana ekspresi dan/atau sarana komunikasi. Sebagai sarana berpikir, bahasa digunakan untuk memahami dan menginternalisasi berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi, menghubungkan sebuah konsep dengan konsep yang lain, serta merumuskan beberapa simpulan yang akan dijadikan sebagai landasan pemahaman dan dasar pandangan di dalam menyikapi fenomena dan peristiwa tersebut. Bahasa sebagai sarana berpikir telah dan akan terus memberi peluang yang seluas-luasnya kepada para pakar untuk melakukan berbagai eksplorasi ilmiah dan elaborasi akademis di bidang/subbidang ilmunya masing-masing. Keberhasilan di dalam “memanfaatkan” peluang itu bermuara pada makin meningkat dan berkembangnya bidang/sibbidang ilmu yang bersangkutan.

Sebagai sarana ekspresi dan/atau komunikasi, bahasa digunakan untuk merumuskan butir-butir simpulan dari eksplorasi ilmiah dan elaborasi akademis yang telah dilakukan dalam bentuk makalah, artikel, atau buku agar diketahui oleh orang lain atau khalayak yang lebih luas. Dilihat dari faktor interdependensi di antara para pakar spesialis seperti yang telah dikemukakan di atas, penyusunan makalah, artikel, atau buku itu merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa bahasa memiliki peran yang amat menentukan di dalam upaya peningkatan dan pengembangan iptek.

Masalah yang kemudian muncul ialah bahasa apa yang sebaiknya dan/atau seharusnya digunakan di dalam upaya peningkatan dan pengembangan iptek itu. Pertanyaan itu patut diajukan mengingat, seperti yang telah disebutkan, tulisan para pakar itu, terutama yang berbentuk buku, adalah untuk dibaca dan diketahui oleh khalayak yang lebih luas. Dalam konteks pemahaman bahwa kemajuan iptek itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan peradaban bangsa, maka khalayak yang lebih luas itu adalah masyarakat bangsa. Satu-satunya cara yang dipastikan paling efektif ialah digunakannya bahasa kebangsaan sehingga ada semacam jaminan bahwa tulisan tersebut akan dapat dengan mudah dipahami dan dicerna oleh para pembaca dari bangsa yang bersangkutan. Apa pun konsep iptek (termasuk yang modern) yang diungkapkan

dengan menggunakan bahasa kebangsaan pasti akan jauh lebih mudah dan jauh lebih luas dipahami oleh kalangan masyarakat bangsa yang bersangkutan daripada yang ditulis dengan bahasa yang bukan bahasa kebangsaan, misalnya dengan bahasa asing. Bagaimanapun, kelompok masyarakat yang menguasai bahasa asing di suatu negara dapat dipastikan jauh lebih kecil jumlahnya daripada yang menguasai bahasa kebangsaan.

Kalau di atas telah dikemukakan bahwa masalah kesejahteraan tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkat peradaban, maka tidaklah demikian halnya dengan masalah kesejahteraan yang dihubungkan dengan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Keduanya jelas memperlihatkan hubungan korelasional yang sangat erat. Yang masih harus dilihat ialah bagaimana keterkaitan tingkat pembangunan ekonomi itu dengan jenis bahasa yang digunakan sebagai bahasa kebangsaan. Mengenai hal ini, hanya ada dua kemungkinan, yaitu bahwa yang dijadikan sebagai bahasa kebangsaan (lazim pula disebut bahasa negara atau bahasa resmi) itu ialah bahasa asli pribumi atau bahasa asing bekas penjajah.¹

Dalam membicarakan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara, biasanya kita merujuk pada tiga macam pengelompokan, yaitu negara maju, negara yang sedang membangun, dan negara terbelakang (yang berkontras dengan negara maju). Di dalam menyimak hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi dan penggunaan bahasa kebangsaan, berikut ini dikemukakan hasil pengamatan Abdullah Hassan (1997).

Negara maju menggunakan bahasa asli pribumi masing-masing sebagai bahasa kebangsaan. Hal itu terlihat di 18 negara: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Swiss, Belanda, Belgia, Denmark, Swedia, Norwegia, Italia, Spanyol, Portugal, Kanada, Jepang, Korea, Taiwan, Australia, dan Selandia Baru. Adapun Korea, China, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang merupakan negara yang sedang membangun (tingkat perkembangan ekonominya selama tujuh tahun berturut-turut melebihi 8% per tahun) juga menggunakan bahasa asli pribumi sebagai bahasa kebangsaan.² Sementara itu, negara-negara terbelakang masih menggunakan bahasa bekas penjajah (bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, atau Portugis) sebagai bahasa kebangsaannya.

Dari pengelompokan negara yang didasarkan pada jenis bahasa kebangsaan itu dapat ditarik simpulan yang jelas bahwa negara yang menggunakan bahasa asli pribumi sebagai bahasa kebangsaan akan lebih berhasil di dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan kehidupan rakyatnya dibandingkan dengan negara yang masih menggunakan bahasa asing bekas penjajah sebagai bahasa kebangsaannya. Hal itu pada gilirannya juga berkorelasi baik dengan upaya pengembangan iptek maupun dengan upaya peningkatan peradaban (termasuk di dalamnya kebudayaan) bangsa yang bersangkutan.

Bahasa kebangsaan yang diangkat dari bahasa asli pribumi tidak saja akan memberikan peluang yang hampir tanpa batas bagi seluruh rakyat untuk memahaminya, tetapi juga—dan ini yang paling penting—akan berakibat pada dunia pendidikan yang menggunakan bahasa kebangsaan itu sebagai bahasa pengantar di sekolah (tingkat dasar dan menengah) dan perguruan tinggi. Dengan demikian, selain dapat mempertahankan keaslian cara berpikir (karena salah satu fungsi bahasa ialah sebagai sarana berpikir), rakyat lebih lanjut dapat pula mengembangkan cara berpikir itu untuk menghasilkan berbagai ide kreatif sesuai dengan latar belakang pendidikan, minat, dan tuntutan tugas (keprofesian) yang dihadapi. Pada tahap tertentu ide kreatif itu akan membuahkan peralatan teknologi yang amat bermanfaat, bukan saja bagi dirinya, melainkan juga bagi kelompok masyarakat bangsa secara keseluruhan, di dalam menghadapi dan mengatasi masalah dan tantangan kehidupan. Akhirnya, berbagai inovasi teknologi yang diperoleh lewat pengolahan dan pengembangan kegiatan berpikir itu secara langsung ataupun tidak langsung akan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan kehidupan bangsa.

Telah disebutkan bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan digunakan di empat negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura (lihat Pengiran Julaihi Pengiran Dato Paduka Othman, 1997; Mohd. Raman Daud, 1997). Bahasa Melayu dalam konteks ini dipandang dan dipahami sebagai bahasa Melayu yang supranasional. Oleh karena itu, ia disebut tetap bahasa Melayu untuk Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, sedangkan di Indonesia dikenal dengan nama bahasa Indonesia.

Di dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959, bahasa kebangsaan Brunei Darussalam adalah bahasa Melayu yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Majlis Mashuarat Di-Raja, Majlis Mashuarat Menteri-Menteri, dan Majlis Mashuarat Negeri. Selain itu, bahasa Inggris dapat juga digunakan bagi semua maksud resmi selama lima tahun setelah diberlakukannya ketentuan itu, kecuali ada peraturan perundang-undangan lain yang mengubah ketentuan tersebut. Pada saat diumumkannya kemerdekaan Negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984, apa yang tercantum di dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 itu masih dinyatakan tetap berlaku, bahkan makin diperkuat dengan diwujudkan konsep negara yang disebut Melayu Islam Beraja (Pengiran Julaihi Pengiran Dato Paduka Othman, 1997: 137—138).⁴ Adapun di Singapura, yang menjadi bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Akan tetapi, Perlembagaan Singapura juga menetapkan bahasa Cina (Mandarin), Tamil, dan Inggris sebagai bahasa resmi. Digunakannya bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, apalagi di dalam penyampaian informasi melalui media massa cetak dan elektronik, dapat dengan mudah dimengerti mengingat letaknya yang amat strategis sebagai pusat antarabangsa untuk perdagangan, keuangan, serta lalu lintas udara dan laut, apalagi kalau dihubungkan dengan

jumlah masyarakat Melayu yang hanya 15% dari keseluruhan penduduk Singapura (Mohd. Raman Daud, 1997:256).⁵

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia didasarkan pada Artikel 152 Perlembagaan dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967 (Hassan Ahmad, 2000:57—67; Awang Sariyan, 2000:84—97). Dibandingkan dengan Singapura, Malaysia memperlihatkan persamaan dalam hal digunakannya bahasa yang lain di samping bahasa Melayu, yaitu bahasa Mandarin dan Tamil. Akan tetapi, kedudukan dan peran bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia memperlihatkan kekuatan dan kemantapan yang tidak usah diragukan lagi. Hal itu adalah berkat adanya Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur. Institusi pemerintah dengan nama yang sama, yaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, terdapat juga di Brunei Darussalam. Sementara itu, Singapura memiliki Majlis Bahasa Melayu dan di Indonesia ada Pusat Bahasa dan Balai Bahasa yang sekarang ini baru terdapat di 17 daerah (di ibu kota provinsi).

Seperti halnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (sejak 1928) dan bahasa negara (sejak 1945) memperlihatkan kedudukan yang boleh dikatakan sudah sangat mantap. Dalam hubungannya dengan bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya lebih dari 500 bahasa,⁶ bahasa Indonesia sering dituduh sebagai penghalang yang dikhawatirkan dapat mempersempit—bahkan mematikan—penggunaan bahasa daerah. Tuduhan seperti itu muncul akibat makin berkurangnya generasi muda yang memahami dan menguasai bahasa daerahnya meskipun kedua orang tuanya berasal dari kelompok etnis yang sama.⁷

Mengenai pertanyaan tentang seberapa jauh bahasa Melayu (yang supranasional) sebagai bahasa kebangsaan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu, hal itu tidak perlu disangsikan lagi karena sudah memiliki sejarah yang panjang dan tradisi yang kuat. Pada masa Kerajaan Sriwijaya (abad VII—XI) yang kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, dan bahasa penyebaran agama. Kemudian pada abad XIV—XVI semasa Kerajaan Malaka yang wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Asia Tenggara, bahasa Melayu mengalami masa kejayaannya. Pada masa itu, bahasa Melayu tidak saja berfungsi seperti pada masa Sriwijaya, yaitu sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, dan bahasa penyebaran agama, tetapi juga mulai digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan.⁸

Pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan upaya pengembangan bahasa Melayu oleh kerajaan Malaka, di Aceh mulai bermunculan ulama besar yang menulis dalam bahasa Melayu tentang filsafat, metafisika, dan agama Islam; di antaranya ialah Nuruddin Ar-Raniri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Hamzah Fansuri yang digelar penyair sufi yang agung (lihat juga Hassan Ahmad, 2000: 51). Pada abad XIX patut pula disebut nama Abdullah bin Abdul

Kadir Munsyi (Singapura) dan Raja Ali Haji (Riau). Oleh kalangan luas di Indonesia, Raja Ali Haji hanya dikenal sebagai sastrawan yang menghasilkan karya "Gurindam Dua Belas". Tokoh ini sebenarnya amat berjasa dalam bidang kebahasaan karena ia patut disebut sebagai orang pertama yang melakukan penataan sistem dan kodifikasi bahasa Melayu. Buku *Bustanul Katibin* yang ditulisnya pada tahun 1857 merupakan buku tata bahasa Melayu yang pertama. Dua tahun kemudian (1859) ia menyusun *Buku Pengetahuan Bahasa* yang merupakan semacam kamus yang berisi deskripsi lengkap tentang kata-kata bahasa Melayu pada masa itu.

Paparan singkat yang menyangkut sejarah perkembangan bahasa Melayu itu perlu diutarakan untuk memberi keyakinan kepada diri kita sendiri bahwa bahasa Melayu sejak dahulu kala telah memperlihatkan potensi dan kemampuannya untuk digunakan sebagai bahasa dalam pengembangan ilmu. Kalau dahulu saja sudah seperti itu, apalagi sekarang. Itulah perkiraan simpulan yang semestinya kita tarik setelah mencermati paparan singkat tersebut. Sekadar contoh mengenai hal itu, dapat ditambahkan bahwa digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan⁹ menimbulkan dampak yang sangat positif bagi upaya pengembangan ilmu dalam arti yang luas, di antaranya ialah bahwa bahasa Indonesia tidak saja digunakan untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi (yang berturut-turut merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana, magister, dan doktor), tetapi juga digunakan, misalnya, untuk menyusun karangan dalam jurnal ilmiah dan buku teks. Kesemuanya ini merupakan contoh konkret tentang pemakaian dan pemanfaatan bahasa kebangsaan di Indonesia dalam pengembangan ilmu.

Dalam memasuki abad ke-21, yang lazim pula disebut alaf baru atau milenium ketiga, ada dua persoalan besar yang harus kita hadapi secara simultan, yaitu tuntutan globalisasi dan upaya pemertahanan jati diri kita sebagai bangsa. Sekarang ini tidak ada satu negara pun yang akan mampu mengisolasi diri atau menghindar dari tuntutan globalisasi. Namun, pada saat yang sama kita pun pasti tidak ingin hanyut diterpa arus globalisasi itu. Sebagai warga masyarakat bangsa, kita ingin tetap memiliki martabat dan jati diri.

Kedua persoalan itu sebenarnya sudah terjawab kalau kita makin memperteguh keyakinan dan tekad melalui pengoptimalan bahasa kebangsaan di dalam pengembangan ilmu. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa upaya pengembangan ilmu yang telah dan akan tetap kita lakukan sudah dengan sendirinya merupakan perwujudan yang nyata dalam memberikan jawaban terhadap tuntutan globalisasi itu. Tetap digunakannya bahasa kebangsaan kita di dalam upaya pengembangan ilmu itu harus dipandang sebagai upaya pemertahanan jati diri kita sebagai bangsa karena, seperti apa yang terkandung di dalam ungkapan yang telah lama kita kenal, pada hakikatnya bahasa menunjukkan bangsa.

Tentu saja hal itu harus pula disertai dengan upaya lain yang bertujuan makin memantapkan bahasa kebangsaan kita agar tetap berfungsi sebagai sarana berpikir dan sarana komunikasi, terutama dalam kaitannya dengan upaya pengembangan ilmu. Untuk itu, peristilahan dalam bahasa kebangsaan yang menyangkut semua bidang ilmu yang diperlukan harus tersedia dan lengkap. Tersedianya peristilahan dalam bahasa kebangsaan ini merupakan persyaratan utama untuk menjamin agar bidang/subbidang ilmu yang paling mutakhir pun tetap dapat diungkapkan dengan menggunakan bahasa kebangsaan.

Kegiatan penyebarluasan atau pemasyarakatan peristilahan itu harus dilakukan lewat jalur pendidikan/persekolahan agar pada kesempatan pertama para pelajar sudah mengenal dan memahami peristilahan yang diperlukan, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan mereka. Selain itu, para pengajar, penulis buku, dan kelompok-kelompok profesi perlu pula diprioritaskan sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari upaya pemasyarakatan peristilahan tersebut.

Dengan cara seperti itu, tampaknya kita merasa optimistis bahwa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan tetap dapat kita berdayakan bak pisau bermata ganda. Dengan sisinya yang satu, kita berupaya mengembangkan ilmu untuk mencerdaskan bangsa agar mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa yang lain. Dengan sisi yang satunya lagi, kita berupaya mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa karena upaya pengembangan ilmu itu tetap kita lakukan lewat pemanfaatan bahasa kebangsaan kita sendiri.

Catatan

1. Menurut Hassan Ahmad (2000:46—47), di dunia ini tercatat tujuh bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi yakni bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Arab, Melayu, dan Mandarin. Bahasa Inggris digunakan di 45 negara (Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada [dengan catatan wilayah Quebec menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi] serta 40 negara di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan). Bahasa Prancis digunakan di 30 negara, yaitu di Prancis, Kanada (Quebec), Belgia (yang juga menggunakan bahasa Flemish sebagai bahasa resmi), dan Swiss (yang juga menggunakan bahasa Jerman dan Itali sebagai bahasa resmi) serta di 26 negara Afrika bekas jajahan Prancis. Ada 30 negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, yaitu Spanyol dan 29 negara bekas jajahannya. Sementara itu, bahasa Arab digunakan di 20 negara, bahasa Melayu di 4 negara (Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia), dan bahasa Mandarin di 4 negara (China, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura).

2. Terhadap hasil pengamatan Abdullah Hassan itu patut dikemukakan catatan berikut.
 - a. Terdapat dua negara yang sekaligus dimasukkan sebagai negara maju dan negara yang sedang membangun. Kedua negara itu ialah Korea dan Taiwan. Yang dimaksudkannya mungkin ialah Korea Selatan sebagai negara maju dan Korea Utara sebagai negara yang sedang membangun. Mengenai Taiwan, tampaknya semata-mata hal itu merupakan kesilapan karena hanya ada satu Taiwan, berbeda dari Korea yang dapat merujuk pada dua negara (Korea Utara dan Korea Selatan)
 - b. Tidak ada catatan tahun mengenai tingkat perkembangan ekonomi di atas 8% per tahun selama tujuh tahun berturut-turut bagi kelompok negara yang sedang membangun. Akan tetapi, karena tulisan itu berasal dari makalah yang disampaikan dalam suatu seminar tahun 1996 (bulan Maret), maka dapat diperkirakan bahwa tujuh tahun berturut-turut itu mengacu pada kurun waktu antara 1989 dan 1995.
 - c. Dengan mempertimbangkan keadaan perkembangan ekonomi sekarang, terutama setelah terjadi krisis ekonomi pada beberapa tahun terakhir abad ke-20, mungkin ada beberapa negara yang tidak lagi berada pada posisi seperti yang telah dikemukakan itu. Krisis ekonomi yang masih melanda negara tertentu sampai sekarang akan mengakibatkan, misalnya, bahwa tolok ukur perkembangan ekonomi di atas 8% per tahun bagi negara-negara yang sedang membangun mungkin tidak dapat sepenuhnya diberlakukan.
3. Negara-negara yang oleh Abdullah Hassan dikelompokkan sebagai negara terbelakang itu ialah India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Sikum, Filipina, Myanmar, Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda, Jamaika, Fiji, Papua New Guinea, Argentina, Columbia, Guyana (Prancis), Bolivia, Suriname, Paraguay, Guatemala, Honduras, Peru, Chile, Brazil, Ekuador, Venezuela, Panama, Nicaragua, Cuba, Comoro, Malagasi, Mozambique, Sahara Spanyol, Utara Volta, Dahomey, Siera Leone, Liberia, Mauritania, Senegal, Gambia, Tanzania, Chad, Mali, Pantai Gading, Togo, Gabon, Kamerun, Angola, Zaire, Afrika Tengah, Costa Rica, Botswana, Zimbabwe, Uruguay, dan Meksiko.
4. Selain bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, di Brunei Darussalam yang berpenduduk sebanyak hampir 300.000 orang itu terdapat pula tujuh macam dialek Melayu, yaitu dialek Melayu Brunei, Belait, Bisaya, Dusun, Kedayan, Murut, dan Tutong. Nama-nama dialek itu sekaligus menggambarkan nama puak atau suku bangsa yang menggunakannya.
5. Menurut Mohd. Raman Daud (1997:256—257), sebagian besar masyarakat Melayu di Singapura berasal dari Jawa, Bawean, dan daerah-daerah lain Nusantara. Perbedaan asal-muasal keturunan masyarakat Melayu itu sekarang makin menipis sebagai akibat dari perkawinan dan persekolahan.

Patut dicatat bahwa sistem persekolahan dalam bentuk madrasah (sekolah agama) dan sekolah Melayu sejak pertengahan abad ke-19 menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar.

6. Status bahasa Melayu di Indonesia mengalami perubahan. Pada masa lalu pemahaman terhadap hal itu didasarkan pada rumusan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 yang menyebutkan, antara lain, bahwa bahasa asing adalah bahasa yang bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa daerah. Artinya, berbagai dialek Melayu di Indonesia digolongkan sebagai bahasa daerah. Akan tetapi, menurut rumusan hasil Seminar Politik Bahasa 1999, bahasa asing adalah bahasa yang bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, dan bukan bahasa rumpun Melayu.
7. Kecenderungan menurunnya minat generasi muda untuk menguasai bahasa daerah itu memang benar, tetapi antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain kasusnya berbeda. Ada yang mengemukakan alasan bahwa di dalam bahasa daerahnya, seperti bahasa Jawa dan Sunda, kaidah pemakaian tingkat honorifiknya yang amat ketat dan bervariasi sangat menyulitkan mereka yang ingin mempelajari dan menggunakannya. Itulah sebabnya kelompok ini kemudian lebih menyukai bahasa Indonesia yang mereka anggap lebih "demokratis". Kelompok lain merasa dirinya kurang "bermartabat" kalau menggunakan bahasa daerahnya. Itulah sebabnya kelompok kedua ini cenderung memilih bahasa Indonesia, terutama jenis bahasa Indonesia yang biasa digunakan oleh generasi muda terpelajar di Jakarta. Gejala yang menyangkut sikap bahasa ini kurang lebih sama dengan sebagian anggota masyarakat yang beranggapan bahwa bahasa Inggris, meskipun hanya mereka pahami dan kuasai sedikit saja, lebih bermartabat untuk digunakan daripada bahasa Indonesia. Mengenai hal yang sama di Malaysia, Hassan Ahmad (2000:54) mengungkapkannya dengan cara yang tepat sekali. Dikatakannya: "Kita risau tentang kelemahan bahasa Inggris di kalangan pelajar kita, tetapi tidak risau melihat penggunaan bahasa Melayu dalam sektor pembangunan ekonomi negara makin lama makin meminggir. Surat dalam bahasa Inggris masih dikirimkan kepada orang Melayu di kampung yang tidak memahami bahasa itu".
8. Masa kerajaan Malaka itu oleh Prentice (1991:184) bahkan disebut sebagai "Abad Keemasan" bahasa Melayu.
9. Selain sebagai bahasa resmi di lembaga pendidikan, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi di dalam perhubungan tingkat nasional, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek modern, bahasa media massa, pendukung sastra Indonesia, dan pemer kaya bahasa dan sastra daerah (Alwi dan Dendy Sugono, 2000:220).

IV. SASTRA DAN PENGEMBANGAN BAHASA

1. SASTRA DI INDONESIA PERLUKAH DIBINA DAN DIKEMBANGKAN?*

1. Barangkali hanya kepongahan yang telah mendorong saya untuk menerima tawaran seorang teman yang diajakannya dua bulan yang lalu agar saya bersedia berbicara tentang sastra pada malam ini di sini. Kepongahan yang telah menempatkan saya pada posisi yang sulit itu segera disusul oleh pertanyaan sederhana tetapi amat mendasar: mampukah saya melakukan hal itu? Arogansi pribadi yang sekali-sekali muncul pun tak kunjung berhasil membimbing dan menuntun saya ke arah ditemukannya jawaban yang paling tidak mendekati. Pengetahuan, pengalaman, dan wawasan saya tentang sastra amatlah jauh panggang dari api meskipun dalam konteks kriteria paling minimum yang seyogianya dipenuhi oleh seseorang untuk layak tampil di hadapan forum yang amat terhormat ini. Dalam keadaan seperti itu rasanya tak ada bentuk apology yang dapat saya gunakan untuk menutupi atau mengurangi beban kegamangan yang amat saya rasakan sekarang.
2. Selama manusia menggunakan media komunikasi verbal yang disebut bahasa di dalam menjalani kehidupan antar-sesamanya, selama kita yakin dan percaya bahwa bahasa merupakan lambang dan sekaligus perwujudan jati diri bangsa, dan selama kita menyadari sepenuhnya bahwa sastra adalah mahkota bahasa, maka selama itu pula masalah bahasa dan sastra dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa akan tetap merupakan kesatuan yang tak mungkin dapat dipisahkan. Keduanya telah menyatu ibarat dua sisi dari sekeping mata uang yang saling melengkapi dan saling membutuhkan. Bahasa tanpa sastra adalah laksana lautan gurun pasir tanpa sebatang pepohonan pun tumbuh di atasnya. Sebaliknya, sastra tanpa bahasa setakat ini harus dipandang sebagai pernyataan yang absurd, terutama mengingat salah satu fungsi bahasa sebagai media ekspresi kesenian dalam arti yang luas, termasuk dalam hal menciptakan karya sastra. Tentang bahasa sebagai lambang jati diri bangsa bahkan terdapat satu penafsiran yang menggambarkan-

* Bahan Ceramah Sastra di Taman Ismail Marzuki (TIM), 27 Agustus 1997.

kan bahwa bila ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan bahasanya terlebih dahulu. Begitu bahasanya lenyap, hancurlah bangsa itu. Penafsiran semacam itu akan tetap relevan sepanjang masa sehingga tak perlu ditarik dan dihubungkan dengan jiwa dan semangat patriotik. Dalam konteks keindonesiaan, penafsiran itu dapat dan tepat sekali untuk dihubungkan dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 tentang tekad untuk menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.¹

3. Kalau bahan pembicaraan yang saya sampaikan malam ini diberi judul yang berupa pertanyaan (bukan pernyataan) yang berhubungan dengan perlu atau tidak perlunya sastra di Indonesia dibina dan dikembangkan, hal itu sekurang-kurangnya menggambarkan dua hal. Pertama, sejak awal ketika saya menerima kehormatan berupa tawaran untuk berbicara di sini bahkan sampai saat sekarang ini pun saya masih tetap bimbang dan gamang. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk membayangkan, meramu, dan menyajikan topik pembicaraan yang benar-benar berada di luar kompetensi saya ini. Kedua, masalah sastra yang menjadi topik pembicaraan itu bagi saya—mungkin bagi yang lain tidak—masih merupakan sosok misteri dalam dunia pemakaian dan pemanfaatan bahasa sebagai media komunikasi dan media ekspresi. Untuk hal yang disebutkan terakhir ini, karena memang merasa tidak mencoba mencari jawaban atau penjelasannya. Saya harus berpuas diri dengan visi sederhana, yang oleh orang lain bisa jadi yaitu visi yang mencoba melihat, menempatkan, dan sekaligus mengapresiasi sosok misteri itu dalam konteks semantis dan mungkin juga pragmatis sehubungan dengan digunakannya bentuk-bentuk bahasa tertentu, oleh seorang sastrawan baik secara morfologis maupun sintaktis, untuk mengungkapkan gagasan dan pandangannya atau hasil pemikiran dan penghayatannya tentang sesuatu yang ingin dikomunikasikannya kepada masyarakat pembaca.²
4. Visi semacam itu menghadapkan dua hal yang secara terminologis masing-masing dapat disebut *isi* dan *bentuk*. Isi menyangkut berbagai pandangan, gagasan, persepsi yang berkaitan dengan sistem nilai atau norma, adat-istiadat, kebudayaan³, dan bahkan dunia angan-angan yang kesemuanya itu cakupannya amatlah luas sehingga tidak dapat ditentukan batas-batasnya. Sementara itu, untuk yang dimaksudkan adalah bahasa yang apabila diukur dengan menggunakan keluasan perbendaharaan kata (termasuk peristilahannya) yang merupakan kekayaan suatu bahasa pastilah amat terbatas. Akibatnya, pastilah pula akan cukup banyak terhadap konsep yang menyangkut isi itu yang tidak dapat diungkapkan oleh bentuk bahasa yang

memang amat terbatas itu. Saya tidak tahu apakah dikotomi bentuk dan isi itu dirasakan oleh sastrawan sendiri sebagai sesuatu yang dilematik.⁴ Bagi kita dikotomi dilematik ini dapat menimbulkan pertanyaan beruntun. Pertama, seberapa jauh keterbatasan isi sastra dapat disebut sastra Indonesia? Pertanyaan pertama ini haruslah ditangkap maknanya sedemikian rupa sehingga ia tetap diwarnai baik oleh ciri kodratnya sebagai manusia (humanisme universal?) maupun oleh ciri kejatidiriannya sebagai bangsa (keindonesiaan?). Pertanyaan kedua: seberapa jauh keterbatasan perbendaharaan bahasa Indonesia untuk digunakan sebagai alat ungkap yang efektif dan efisien sehubungan dengan isi sastra Indonesia itu?⁵ Untuk kedua pertanyaan ini pun saya tidak berani menjawabnya.

5. Sastra di Indonesia berbeda dari sastra Indonesia. Yang pertama lebih luas daripada yang kedua karena yang kedua itu merupakan subordinasi dari yang pertama. Sastra di Indonesia tidak hanya merujuk pada sastra Indonesia, tetapi juga pada sejumlah sastra daerah (seperti sastra Jawa, sastra Sunda, dan sastra Minang) yang sehingga kini masih tetap tumbuh dan berkembang karena terus dipelihara oleh kelompok masyarakat etnis yang bersangkutan. Mengenai apa yang disebut sastra Indonesia itu sendiri dapat dilihat berdasarkan bentuk bahasa yang digunakan sebagai media pengungkapannya ataupun berdasarkan kandungan isinya. Atas dasar itu, kandungan isi dengan tema kedaerahan yang dinyatakan melalui penggunaan bahasa Indonesia ataupun kandungan isi dengan tema keindonesiaan yang diungkapkan lewat (salah satu) bahasa daerah sama-sama "berhak" untuk disebut sastra Indonesia. Dalam hal ini agaknya atau seyogianya kita sepakat bahwa sastra Indonesia merujuk pada karya sastra yang menggunakan bahasa Indonesia dalam versi aslinya.⁶
6. Baik sastra Indonesia maupun sastra daerah kedua-duanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia. Apabila Pasal 32 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia", maka landasan konstitusional itu berarti pula bahwa upaya Pemerintah tersebut harus pula berlaku bagi kehidupan sastra di Indonesia (lihat catatan 3). Pada dasarnya upaya yang perlu dan harus dilakukan terhadap sastra berkaitan dengan kegiatan pembinaan pada satu pihak dan kegiatan pengembangan pada pihak lain. Kedua jenis kegiatan itu seyogianya memperoleh porsi perhatian yang seimbang. Kegiatan pembinaan berhubungan dengan unsur manusianya: pengarang/sastrawan, peneliti, guru/dosen, murid/mahasiswa, dan masyarakat umum yang memiliki minat dan perhatian pada sastra. Adapun kegiatan pengembangan berkaitan dengan karya sastra sebagai sesuatu yang konkret. Sementara itu,

landasan pembinaan dan pengembangan sastra, yang dapat pula disebut landasan kebijakan bahasa, memperhadapkan kita pada sekurang-kurangnya tiga jenis persoalan yang masing-masing berkenaan dengan sastra Indonesia, sastra daerah, dan sastra asing. Dalam konteks yang demikian, terutama yang menyangkut kegiatan pengembangan, sastra Indonesia seyogianya ditempatkan pada posisi terminal. Oleh karena itu, pengembangan sastra daerah dan sastra asing hendaknya diupayakan dalam rangka pengembangan sastra Indonesia.

7. Kegiatan penelitian, di samping berbagai forum pertemuan yang membahas ihwal sastra berikut serangkaian masalah yang melingkupinya, merupakan upaya pengembangan sastra yang perlu diutamakan. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk penulisan atau penyusunan-penyusunan seperti kamus sastra, ensiklopedi sastra, sejarah sastra, dan berbagai buku panduan untuk keperluan pengajaran sastra. Dengan memperhatikan contoh kegiatan seperti itu, dapatlah dikatakan bahwa upaya pengembangan sastra bertujuan agar sastra sebagai mahkota bahasa. Seperti yang telah disinggung di atas, tetap terpelihara. Salah satu topik penelitian yang cukup menarik dari segi pemakaian bahasa dalam karya sastra menyangkut, misalnya, bentuk-bentuk ungkapan yang lazim digunakan para pengarang dari masa ke masa. Mengenai hal itu dapat diperbandingkan antara lain, apa yang tertulis pada majalah *Panji Poestaka* (tahun 1920-an), *Poedjangga Baroe* (tahun 1930-an), *Boedaja* (tahun 1940-an), *Kisah* (tahun 1950-an), dan *Sastra* (tahun 1960-an).⁷ Contoh sederhana tentang pergeseran atau perubahan bentuk-bentuk ungkapan itu terlihat pada pemakaian kata pembilang. Bahasa Indonesia memiliki kekayaan yang cukup membanggakan dalam hal itu: *sepucuk* senapan, *sebilah* pedang, *sebatang* pohon, *sekuntum* bunga, *sehelai* kertas, *sebentuk* cincin, *secercah* cahaya, *sejempit* rumput, dan lain-lain. Sekarang, barangkali karena pengaruh dan perkembangan arus komunikasi yang menuntut segala sesuatunya harus serba singkat dan langsung, kata pembilang itu boleh dikatakan hanya ada tiga, yaitu *seorang* untuk manusia, *seekor* untuk binatang, dan *sebuah* untuk benda pada umumnya.⁸ Sejauh yang menyangkut karya sastra, saya kira simplifikasi semacam itu perlu benar-benar dipertimbangkan agar ciri keunggulannya dari tulisan lain yang menyangkut keaslian, keartistikan, dan keindahan isi serta bentuk ungkapannya tetap terjaga (lihat Catatan 2)⁹
8. Pembinaan sastra, seperti sudah disebutkan, berhubungan dengan unsur manusianya. Agar generasi muda, termasuk para pelajar dan mahasiswa, memiliki daya apresiasi yang makin meningkat terhadap sastra, pada

kegiatan Bulan Sastra yang diadakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa setiap tahun pada bulan Oktober, paling tidak diadakan tiga jenis kegiatan: Bengkel Sastra, pertemuan antara sastrawan dan siswa, serta berbagai macam lomba seperti sayembara mengarang cerita pendek dan puisi serta lomba deklamasi atau membaca. Untuk memberi kesempatan kepada para sastrawan sendiri guna saling bertukar pandangan dan pengalaman, ada forum seperti Pertemuan Sastrawan Nusantara yang juga diikuti oleh para sastrawan dari Malaysia, Brunei, dan Singapura. selain itu, sekarang mulai terbuka kesempatan baru melalui wadah kerja sama kesastraan yang belum lama dibentuk, yaitu Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastra). Untuk "menggairahkan" para sastrawan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, sejak tahun 1978 dilakukan pemilihan sastrawan terbaik yang pemenang pertamanya berhak mewakili Indonesia untuk menerima hadiah sastra *South-East Asia Write Award* dari Kerajaan Thailand.¹⁰

9. Itulah beberapa catatan mengenai upaya pembinaan dan pengembangan sastra yang dapat saya sampaikan. Meskipun catatan itu tidak signifikan sehubungan dengan topik pembicaraan yang diminta dan dikemukakan dengan cara yang mungkin dianggap tidak lazim, sekurang-kurangnya saya berharap bahwa kegamangan yang saya rasakan bisa berkurang. Sebagai penutup saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan harapan agar pihak Pemerintah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 32 UUD 1945, baik di tingkat pusat maupun daerah, memberikan perhatian dan dana yang bersungguh-sungguh terhadap usaha-usaha pembinaan dan pengembangan sastra di Indonesia. harapan yang kurang lebih sama patut pula dialamatkan kepada Dewan-Dewan Kesenian yang sudah mulai tumbuh dan berkembang di tiap provinsi.

Catatan:

1. Semboyan atau imbauan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesungguhnya bersumber pada butir ketiga Sumpah Pemuda tersebut. Tahun 1928 dengan demikian merupakan tonggak sejarah yang mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tonggak sejarah lainnya bertariikh tahun 1945 karena melalui Pasal 36 UUD 1945 kedudukan bahasa Indonesia dikukuhkan lagi sebagai bahasa negara. Kedudukan yang disebutkan terakhir ini bahkan dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam semua jenjang dan jenis pendidikan. Mengenai pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, hal itu selalu

tercantum dalam setiap GBHN, baik dalam sektor pendidikan maupun kebudayaan. Menurut GBHN 1993, secara eksplisit dinyatakan bahwa upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat antara lain untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam GBHN yang sama juga dikemukakan bahwa penggunaan kata atau istilah asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia harus dihindari. Namun, dalam kenyataannya imbauan itu tidak atau belum terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya ialah masih adanya pandangan pada sebagian anggota masyarakat kita yang menganggap bahasa asing lebih bergengsi karena memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia. Masalah inilah yang melatarbelakangi dan mendorong Kepala Negara untuk mencanangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada tanggal 20 Mei 1995. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan itu ialah ditertibkannya pemakaian bahasa asing di tempat-tempat umum dan menggantinya dengan bahasa Indonesia.

2. Salah satu pengertian tentang sastra terdapat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II (1994:882) yang menyebutkan bahwa kalau dibandingkan dengan tulisan lain, sastra sebagai karya tulis memiliki berbagai ciri keunggulan baik yang menyangkut keaslian, keartistikan, maupun keindahan dalam hal isi dan ungkapannya.
3. Seperti kita ketahui, masalah kebudayaan ini amatlah penting dalam kehidupan suatu bangsa. Itulah sebabnya Pasal 32 UUD 1945 menyebutkan bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" yang penjelasannya adalah sebagai berikut: "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan aslinya yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Sastra Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan nasional Indonesia dengan demikian menjadi salah satu komponen utama yang perlu dan harus pula "diperhatikan" oleh Pemerintah.
4. Dilema itu bahkan mungkin bisa lebih diperparah lagi oleh kenyataan kemampuan berbahasa kita. Yang dimaksudkan dengan kemampuan berbahasa di sini berkorelasi dengan penguasaan kita terhadap keseluruhan kosa kata yang sudah terekam dalam kamus. Dapat dipastikan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan menguasai (dalam arti memahami dan sekaligus terampil menggunakannya) semua kosa kata yang

terdapat dalam sebuah kamus yang cukup lengkap meskipun orang yang bersangkutan sudah jelas-jelas tergolong sebagai penutur asli (*native speaker*) bahasa tersebut.

5. Mudah-mudahan bukan karena dikotomi dilematik tersebut kalau secara kebetulan saya menemukan ungkapan yang (hampir) sama dalam ketiga sajak Cecep Syamsul Hari yang dimuat dalam majalah sastra *Horison* edisi Agustus 1997, seperti yang terlihat pada bentuk ungkapan dengan *rambutmu* berikut ini.

- a. "... Seluruh kesedihan berawal di sini.
Pada *ujung* helai-helai *rambutmu* yang runcing...."
- b. "... Tempias hujan senja hari menjangkau
ujung kerudung *rambutmu*. ..."
- c. "Haruskah kita berpisah malam ini, katamu, Ketika separuh tubuhku hilang di masa silam dan menemukannya kembali pada *bau rambutmu* yang lembut. ... Perpisahan adalah akhir dari seluruh kepiluan, gumammu, sedang kau mencarinya seumur hidupmu: bukankah itu surga yang dijanjikan padamu? Namun, *bau rambutmu* pula yang tertinggal pada telapak tanganku...."

Kutipan di atas masing-masing diambil dari sajak "Syair Kemurungan" (5a), "Syair Hujan" (5b), dan "Syair Tahun Baru (5c). Kesamaan bentuk ungkapan yang dicontohkan itu bisa jadi semata-mata hanya menggambarkan idiolek dalam hal diksi atau mungkin juga berkaitan dengan upaya pemenuhan terhadap tuntutan stilistika yang ditimbulkan oleh masing-masing sajak yang bersangkutan.

6. Tolok ukur "versi asli" atau "versi asal" ini perlu ditonjolkan sebagai kriteria klasifikasi karena karya sastra terjemahan atau yang dihasilkan melalui penyaduran pun juga menggunakan bahasa Indonesia, tetapi versi aslinya berbahasa asing atau berbahasa daerah.
7. Dalam rangka penyusunan buku tentang sejarah sastra Indonesia yang sedang dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, terdapat sejumlah media cetak berupa majalah dan surat kabar yang di dalamnya (secara keseluruhan ataupun sebagian-sebagian) memuat karya sastra atau tulisan-tulisan mengenai sastra. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa pada tahun 1920-an terdapat 36 majalah dan 15 surat kabar, tahun 1930-an 20 majalah dan 11 surat kabar, tahun 1940-an 20 majalah dan 11 surat kabar, serta tahun 1950-an 76 majalah dan 40 surat kabar.
8. Simpifikasi serupa dapat kita amati antara lain pada diksi lagu-lagu berbahasa Indonesia. Bentuk-bentuk ungkapan yang digunakan oleh Ismail Marzuki, Iskandar, Mochtar Embut, dan Surni Warkiman (sekadar me-

- nyebutkan beberapa nama seniman kita di bidang musik pada masa yang lalu) amatlah idiomatis dan plastis, tetapi tetap intens. Karakteristik yang demikian boleh dikatakan tidak kita temui lagi sekarang. Yang menonjol ialah ungkapan-ungkapan yang langsung bahkan terkesan vulgar bagi mereka yang berusia di atas 40 tahun.
9. Karya sastra dan karya bukan sastra dapat dibedakan ketika keduanya sudah dalam bentuk cetakan atau buku. Buku karya sastra yang mengalami cetak ulang tidak pernah diubah atau direvisi isinya, sedangkan cetak ulang buku non-sastra, misalnya buku teks tentang bidang ilmu tertentu, mungkin saja isinya mengalami perubahan karena diubah/direvisi sesuai dengan perkembangan bidang ilmu yang bersangkutan.
 10. Para pemenang pertama sejak tahun 1978 itu adalah sebagai berikut.
 - 1978: Iwan Simatupang (*Ziarah*, novel)
 - 1979: Sutardji Calzoum Bachri (*O Amuk Kapak*, kumpulan sajak)
 - 1980: Putu Wijaya (*Telegram*, novel)
 - 1981: Goenawan Mohammad (*Parikesti*, kumpulan sajak)
 - 1982: Marianne Katoppo (*Raumanen*, novel)
 - 1983: Y.B. Mangunwidjaja (*Burung-Burung Manyar*, novel)
 - 1984: Budi Darma (*Olenka*, novel)
 - 1985: Abdul Hadi Wiji Muthari (*Tergantung Pada Angin*, kumpulan sajak)
 - 1986: Sapardi Djoko Damono (*Perahu Kertas*, kumpulan sajak)
 - 1987: Umar Kayam (*Sri Sumarah dan Bawuk*, novel)
 - 1988: Danarto (*Berhala*, cerpen)
 - 1989: Gerson Poyk (*Sang Guru*, novel)
 - 1990: Arifin C. Noer (*Sumur Tanpa Dasar*, drama)
 - 1991: Subagio Sastrowardoyo, M.A. (*Simponi Dua*, puisi)
 - 1992: A.A. Navis (*Hujan Panas dan Kabut Musim*, cerpen)
 - 1993: Ramadhan K.H. (*Ladang Perminus*, novel)
 - 1994: Taufik Ismail (*Tirani dan Benteng*, puisi)
 - 1995: Ahmad Tohari (*Bekisar Merah*, novel)
 - 1996: Rendra (*Orang-orang Rangkas Bitung*, puisi)
 - 1997: Seno Gumira Ajidarma (*Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi*, cerpen)

2. KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SASTRA DI INDONESIA^{*)}

1. Bahasa dan sastra merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga sering diibaratkan sebagai dua sisi dari sekeping mata uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak akan pernah ada karya sastra yang dapat melepaskan diri dari peran bahasa sebagai alat ungkapnya. Demikian pula halnya dengan sastra Indonesia dan bahasa Indonesia.

Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang harus dijunjung, dihormati, dipelihara, dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Formulasi tentang bahasa persatuan itu pada hakikatnya merupakan pernyataan politis dan sekaligus berperan sebagai legitimasi terhadap pemakaian bahasa Melayu yang disepakati sebagai bahasa Indonesia itu. Sebelum Sumpah Pemuda itu diikrarkan, bahasa Melayu sudah amat meluas digunakan dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketika Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaannya (abad 14—16) yang antara lain dan terutama ditandai oleh peran Bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di kawasan Asia Tenggara, di Aceh mulai bermunculan ulama-ulama besar yang menulis sejumlah syair dan kitab dalam bahasa Melayu, di antaranya terdapat nama Hamzah Fansuri (yang sampai sekarang masih disebut sebagai "pilar agung" penyair Melayu), Syamsuddin Alsumatrani, dan Nuruddin Arraniri. Peran bahasa Melayu pada masa Kerajaan Malaka sebagai bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa penyebarluasan agama (Islam), dan bahasa ilmu pengetahuan makin dimantapkan pada masa Kerajaan Johor-Riau-Pahang (abad 17—19). Perkembangan sejarah memperlihatkan bahwa, sebagai akibat Perjanjian London tahun 1824, arah pertumbuhan bahasa Melayu menjadi bercabang karena wilayah Johor-Pahang diserahkan kepada Inggris dan wilayah Riau-Lingga kepada Belanda. Akibatnya, sejak saat itu bahasa Melayu di Malaysia (termasuk Singapura dan Brunei Darussalam) dipengaruhi bahasa Inggris dan bahasa Melayu di Indonesia dipengaruhi bahasa Belanda.

Perkembangan bahasa dan sastra Melayu di Indonesia selanjutnya memperoleh pengaruh baik dari bahasa dan sastra daerah maupun dari bahasa dan sastra asing lewat bahasa dan sastra Belanda. Didirikannya

^{*)} Makalah untuk Pertemuan Sastrawan Nusantara IX dan Pertemuan Sastrawan Indonesia di Sumatera Barat, 6—11 Desember 1997.

Balai Pustaka pada tanggal 22 September 1917 dapat dipandang sebagai langkah awal upaya pencerdasan kehidupan bangsa lewat bacaan. Banyak buku sastra yang diterbitkan dan dibaca oleh khalayak pembaca yang lebih luas. Belum lagi karya-karya sastra yang dimuat dalam surat-surat kabar dan majalah-majalah. Kalau hal itu dibatasi pada kurun waktu antara pendirian Balai Pustaka (1917) dan Sumpah Pemuda (1928), dapat dicontohkan surat kabar *Soeara Kaoem Betawi* (1922), *Kemadjoean* (Semarang, 1924), *Pertja Timoer* (Medan, 1927), dan *Bendahara Borneo* (Samarinda, 1927) serta majalah *Matahari* (Bandung, 1922), *Sin Jit Po* (Surabaya, 1924), *Berani* (Pontianak, 1925), *Han Po* (Palembang, 1926), dan *Asahan* (Medan, 1927).

Contoh di atas tidaklah berarti bahwa sebelum *Balai Pustaka* tidak ada surat kabar dan majalah yang memuat karya sastra. Hal itu terlihat, misalnya, pada surat kabar *Soeling Hindia* (Semarang, 1910), *Bok Tok* (Surabaya, 1913), dan *Penghiboer* (Batavia, 1914) serta majalah *Tjahaja Siang* (Menado, 1869), *Bianglala* (Batavia, 1870), dan *Bintang Djohar* (Batavia, 1873). Di sini perlu ditambahkan catatan bahwa dalam rangka penyusunan buku tentang sejarah sastra Indonesia yang sedang dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, diperoleh data yang berupa majalah dan surat kabar yang memuat karya sastra atau tulisan mengenai sastra. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa pada tahun 1920-an terdapat 36 majalah dan 15 surat kabar, tahun 1930-an 20 majalah dan 11 surat kabar, tahun 1940-an 20 majalah dan 11 surat kabar, serta tahun 1950-an 76 majalah dan 40 surat kabar.

Keberadaan surat kabar dan majalah tersebut, terutama yang terbit sebelum tahun 1928, jelas mengisyaratkan bahwa butir ketiga Sumpah Pemuda itu sekaligus merupakan legitimasi sosiopolitis dan sosiokultural terhadap bahasa Melayu yang juga sudah dimanfaatkan secara meluas sebagai alat ekspresi dalam karya sastra.

2. Sastra di Indonesia, sebagaimana yang dimaksudkan dalam judul makalah ini, tidak hanya menyangkut (karya) sastra yang menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga meliputi (karya) sastra yang menggunakan bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah di Indonesia mencapai ratusan. Tidak ada atau belum ada angka yang pasti mengenai hal itu. Sering diperkirakan bahwa jumlah bahasa daerah di Indonesia berkisar antara 400 sampai 500 buah. Yang pasti ialah bahwa tidak setiap bahasa daerah mempunyai atau didukung oleh tradisi sastranya. Yang juga pasti ialah bahwa tidak semua sastra daerah mempunyai atau didukung oleh tradisi tulis. Terhadap yang terakhir ini, untuk keperluan penelitian, jenis sastra lisan, misalnya, perlu

dilakukan perekaman untuk kemudian diolah lebih lanjut melalui transkripsi dan penerjemahan. Terhadap sastra daerah yang ditulis dengan aksara daerah, perlu diupayakan transliterasi berikut penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.

Selain sastra Indonesia dan sastra daerah, sastra di Indonesia juga mencakupi karya sastra asing yang sudah diterjemahkan, baik ke dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah tertentu. Dalam makalah ini uraian tentang kebijakan pembinaan dan pengembangan sastra di Indonesia hanya akan difokuskan pada keberadaan sastra Indonesia dan sastra daerah saja.

3. Pembinaan sastra berbeda dari pengembangan sastra. Perbedaan itu terletak pada sasaran dan tujuannya. Yang menjadi sasaran pembinaan ialah manusianya: pengarang/sastrawan, guru, siswa, atau masyarakat secara umum yang berperan sebagai kelompok pembaca yang mengapresiasi karya sastra. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada dua kelompok yang menjadi sasaran pembinaan, yaitu kelompok yang menghasilkan karya sastra dan kelompok yang menikmati karya sastra. Adapun sasaran pengembangan adalah (karya) sastra itu sendiri.

Berdasarkan sasaran tersebut, pembinaan sastra bertujuan agar pada satu pihak kelompok penghasil karya sastra atau kelompok sastrawan memiliki "kegairahan" dalam melaksanakan profesinya dan pada pihak lain kelompok pembaca/penikmat karya sastra memiliki apresiasi yang makin lama makin meningkat terhadap karya sastra. Pengembangan sastra bertujuan agar keberadaan sastra sebagai salah satu unsur utama kebudayaan nasional tetap mantap dan mutunya makin meningkat sehingga kelompok pembaca tetap dapat merasakannya sebagai salah satu jenis kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini perlu ditandaskan sehubungan dengan adanya kecenderungan bahwa dinamika perkembangan kehidupan dapat mengakibatkan kelompok pembaca berpaling dan makin menjauh dari sastra. Tingkat perkembangan itu seringkali lebih "dahsyat" daripada tingkat pertumbuhan dan perkembangan sastra itu sendiri.

4. Kegairahan kelompok sastrawan dalam menekuni bidang profesinya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkenaan baik dengan wawasan dan pandangan filosofis yang bersangkutan tentang dunia sastra maupun dengan motivasi yang melatarbelakangi dan mendorong yang bersangkutan untuk menghasilkan karya sastra. Adapun faktor eksternal berkaitan dengan sejumlah akibat yang timbul setelah karya sastra itu diterbitkan: berapa banyak karya sastra itu dicetak (tiras), bagaimana penyebarannya kepada masyarakat pembaca, apakah harganya terjangkau atau

sesuai dengan daya beli masyarakat, seberapa jauh tema yang disajikan dapat menarik minat para (calon) pembeli/pembaca, dan seterusnya.

Dari rentetan pertanyaan seperti itu dapat dilihat seberapa jauh korelasi antara minat baca dan tingkat apresiasi masyarakat terhadap karya sastra dengan daya beli masyarakat. Upaya meningkatkan daya beli masyarakat jelas bukan merupakan bagian dari tujuan pembinaan sastra. Yang relevan dengan upaya pembinaan ialah upaya menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra.

Kegiatan pembinaan yang paling mungkin dan dapat dilakukan ialah melalui pengajaran. Para siswa dapat dibina untuk secara berangsur-angsur memiliki apresiasi yang makin baik, memadai, dan meningkat terhadap sastra. Kenyataan dan pengalaman menunjukkan bahwa dalam hal pengajaran ini sering muncul keluhan dan ketidakpuasan yang bersumber dari penilaian bahwa gurunya tidak menguasai masalah sastra sehingga pengajaran sastra dirasakan oleh para siswa sebagai sesuatu yang hambar dan membosankan. Dalam berbagai pertemuan seperti seminar yang membicarakan pengajaran sastra, hal itu acap kali muncul. Dapat langsung diduga bahwa usul yang dikemukakan untuk mengatasi persoalan itu ialah bahwa guru sastra hendaknya dibedakan atau dipisahkan dari guru bahasa. Usul itu sangat wajar, tetapi hampir tidak mungkin dapat dilaksanakan selama kurikulum lembaga pendidikan tinggi yang mendidik dan mempersiapkan para calon guru tidak disesuaikan untuk memenuhi "tuntutan pasar" seperti itu.

Di dalam menghadapi kenyataan di "lapangan" yang demikian, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melakukan berbagai upaya. Melalui kegiatan penyuluhan bahasa yang diikuti oleh para guru, baik guru bahasa Indonesia maupun guru non-bahasa Indonesia, diberikan mata sajian apresiasi sastra. Pada Bulan Bahasa dan Sastra yang diadakan pada setiap bulan Oktober, ada sejumlah kegiatan yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi sastra di kalangan para siswa. Lomba menulis cerita pendek atau puisi untuk para siswa merupakan kegiatan tahunan yang makin digemari. Lomba menulis esai untuk para guru memang belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, terutama diukur dari jumlah peserta yang mengikutinya. Sementara itu, Bengkel Sastra dan Pertemuan Sastrawan dengan Siswa merupakan dua kegiatan yang amat efektif dalam upaya pembinaan sastra di kalangan siswa.

Pada Bengkel Sastra para siswa tidak hanya dibekali wawasan dan pengetahuan untuk memahami (bahkan melakukan analisis terhadap) suatu karya sastra, tetapi juga dituntun untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan awal di dalam menciptakan suatu karya sastra, misalnya yang berbentuk puisi. Pada umumnya kegiatan Bengkel Sastra ini diikuti oleh

para siswa yang memang sudah memperlihatkan kecintaan dan ketertarikannya pada karya sastra.

Pertemuan Sastrawan dengan Siswa juga diikuti oleh para guru, terutama guru yang ditugasi oleh kepala sekolah untuk mendampingi para siswa sekolahnya dalam mengikuti kegiatan itu. Pertemuan itu disebut juga Dialog Sastra. Sastrawan dapat secara langsung bertukar pikiran dengan dan memberikan berbagai penjelasan kepada para siswa dan guru tentang seputar masalah sastra yang aktual atau yang dijadikan topik pertanyaan para peserta. Karena dinilai efektif sebagai upaya pembinaan sastra, Bengkel Sastra dan Dialog Sastra tidak hanya diadakan di Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah.

Tentang kegiatan pembinaan yang menyangkut kelompok sastrawan dapat dikemukakan dua hal: pertama, hubungan antara sastrawan dan penerbit dan kedua, hubungan di antara sesama sastrawan sendiri. Hal yang disebutkan terakhir dapat diamati melalui jenis jawaban yang dapat dikemukakan terhadap pertanyaan tentang ada atau tidak adanya wadah atau organisasi profesi kesastrawanan atau kepengarangan. Organisasi profesi seperti ini, kalau belum ada, patut dipertimbangkan. Dalam menghadapi berbagai urusan atau tuntutan, misalnya dari pihak penerbit atau bahkan mungkin dari pihak pemerintah, organisasi profesi kepengarangan dapat tampil dan berperan dalam membela dan melindungi hak dan kepentingan para anggotanya. Para sastrawan Indonesia, yang juga menurut rencana akan berkumpul pada kesempatan ini, perlu secara bersungguh-sungguh mempertimbangkan tentang perlu tidaknya dibentuk wadah seperti itu.

Pemberian hadiah atau penghargaan kepada sastrawan yang karyanya dinilai berprestasi dan memiliki kelebihan atau keunggulan tertentu dapat pula disebut sebagai salah satu upaya pembinaan sastra. Setiap tahun sejak 1978 ditentukan seorang sastrawan yang berhak memperoleh penghargaan tersebut dan sekaligus mewakili Indonesia untuk menerima penghargaan *South-East Asia Write Award* dari Kerajaan Thailand di Bangkok. Para sastrawan yang telah menerima penghargaan itu adalah sebagai berikut.

1978: Iwan Simatupang (*Ziarah*, novel)

1979: Sutardji Calzoum Bachri (*O Amuk Kapak*, kumpulan sajak)

1980: Putu Widjaya (*Telegram*, novel)

1981: Goenawan Mohammad (*Parikesit*, kumpulan sajak)

1982: Marianne Katoppo (*Raumanen*, novel)

1983: Y.B. Mangunwidjaja (*Burung-Burung Manyar*, novel)

1984: Budi Darma (*Olenka*, novel)

1985: Abdul Hadi Wiji Muthari (*Tergantung Pada Angin*, kumpulan sajak)

1986: Sapardi Djoko Damono (*Perahu Kertas*, kumpulan sajak)

- 1987: Umar Kayam (*Sri Sumarah dan Bawuk*, novel)
- 1988: Danarto (*Berhala*, cerpen)
- 1989: Gerson Poyk (*Sang Guru*, novel)
- 1990: Arifin C. Noer (*Sumur Tanpa Dasar*, drama)
- 1991: Subagio Sastrowardoyo (*Simponi Dua*, kumpulan puisi)
- 1992: A.A. Navis (*Hujan Panas dan Kabut Musim*, cerpen)
- 1993: Ramadhan K.H. (*Ladang Pernimus*, novel)
- 1994: Taufik Ismail (*Tirani dan Benteng*, kumpulan puisi)
- 1995: Ahmad Tohari (*Bekisar Merah*, novel)
- 1996: Rendra (*Orang-Orang Rongkas Bitung*, kumpulan puisi)
- 1997: Seno Gumira Ajidarma (*Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi*, cerpen)

Hadiah atau penghargaan sastra seperti itu tentu dapat pula diberikan oleh pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan sastra di Indonesia, misalnya oleh Dewan Kesenian yang sekarang ini diupayakan keberadaannya di setiap propinsi. Juga patut dicatat Hadiah Sastra Rancage yang diprakarsai dan terus dikembangkan oleh sastrawan Ajip Rosidi.

Apa yang dilakukan oleh para pengelola majalah sastra *Horison* dengan menyisipkan lembaran *Kaki Langit* pada setiap penerbitannya merupakan kegiatan pembinaan yang amat membesarkan hati karena lembaran tersebut dikhususkan untuk menampung minat dan karya sastra yang dihasilkan oleh para siswa SLTA.

5. Seperti sudah disinggung di atas, pengembangan sastra menempatkan karya sastra sebagai sasaran atau objek kegiatan yang akan diteliti dan dikaji. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk penyusunan, misalnya, kamus sastra, ensiklopedi sastra, sejarah sastra, ataupun buku panduan pengajaran sastra. Karya sastra yang menjadi sasaran pengembangan itu tidak hanya menyangkut sastra Indonesia, tetapi juga sastra-sastra daerah; bukan hanya sastra Indonesia dan daerah yang modern, melainkan juga sastra Indonesia dan daerah yang lama; tidak hanya karya sastra yang berbentuk tulisan, tetapi juga yang masih berbentuk lisan. Sejak tahun 1974 Pusat Bahasa melakukan penelitian terhadap sastra Indonesia dan sastra daerah. Sebagian besar laporan hasil penelitiannya belum diterbitkan. Untuk yang sudah diterbitkan, judul penelitiannya disenaraikan pada bagian lampiran makalah ini.

Upaya pengembangan sastra dengan demikian menjadi tanggung jawab para kritikus sastra, pakar sastra, dan peneliti sastra. Yang perlu diusahakan ialah jangan sampai hasil penelitian sastra dalam bentuk seperti

skripsi, tesis, dan disertasi tidak hanya tersimpan rapi di perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi, tetapi perlu dipilih dan dipertimbangkan penerbitan dan penyebarluasannya kepada masyarakat peminat sastra yang lebih luas. Dalam hal penerbitan ini, buku-buku yang berisi kumpulan puisi, kumpulan cerita pendek, atau novel sudah cukup banyak. Akan tetapi, yang masih langka (untuk tidak disebut tidak ada sama sekali) ialah buku yang khusus berisi esai sastra, padahal manfaat yang dapat ditarik untuk keperluan pengembangan sastra dari buku seperti itu tidak perlu diragukan lagi.

Peran kritikus sastra dalam pengembangan sastra di Indonesia setakat ini cukup dominan dan masih sangat diperlukan. Seharusnya ada keseimbangan antara kuantitas dan kualitas karya sastra yang dipublikasikan pada satu pihak dengan frekuensi kritik dan esai sastra pada pihak lain. Untuk yang disebutkan terakhir ini tampaknya perlu diupayakan agar kritik dan esai sastra tidak terlalu jauh tertinggal di belakang produksi karya sastranya.

6. Upaya pembinaan dan pengembangan sastra di Indonesia juga dilakukan melalui kerja sama dengan pihak-pihak di luar Indonesia. Yang patut disebut pertama-tama ialah kerja sama di lingkungan ASEAN melalui wadah yang bernama *Working Group on Literary and Asean Studies*. Hasil yang berupa penerbitan dari wadah kerja sama ini adalah sebagai berikut.

- a. *Oral Literature of Indonesia* (1985)
- b. *Pre-Islamic Literature of Indonesia* (1987)
- c. *The Islamic Period in Indonesian Literature* (1989)
- d. *An Anthology of Indonesian Folk Literature* (1993)

Ada pula kegiatan yang mempertemukan para penulis dari seluruh negara anggota ASEAN, yaitu Bengkel Penulisan Puisi (Filipina, 1994), Bengkel Penulisan Cerpen (Thailand, 1995), dan Bengkel Penulisan Esai (Indonesia, 1996).

Wadah kerja sama yang lain ialah Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera) yang pembentukannya diresmikan pada bulan Agustus 1995 dengan prakarsa dari Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia dan Brunei Darussalam) serta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Indonesia). Singapura ikut sebagai pemerhati/pendukung, sementara Thailand dan Filipina diharapkan dapat mengikuti beberapa kegiatan Mastera. Menurut rencana, Mastera akan memberikan Hadiah Sastra dan Anugerah Mastera. Selain itu, diadakan juga Bengkel Sastra dan penerbitan jurnal sastra *Pangsura*. Kegiatan yang berupa penelitian/penyusunan sastra, baik yang menyangkut sastra modern maupun sastra tradisional, juga merupakan kegiatan yang sedang dan akan terus dilakukan oleh Mastera.

7. Agar kegiatan pembinaan sastra dan pengembangan sastra itu dapat saling menunjang dan saling melengkapi, keduanya perlu dilakukan atas dasar suatu kebijakan yang berencana, terarah, dan terpadu. Rambu-rambu seperti ini diperlukan mengingat kondisi sastra daerah di Indonesia yang boleh dikatakan amat heterogen. Saling menunjang dan saling melengkapi itu perlu pula diterapkan sehubungan dengan kegiatan untuk sastra Indonesia yang dibandingkan dengan kegiatan untuk sastra daerah.

Meskipun diniatkan dan bahkan direncanakan agar terdapat keseimbangan antara kegiatan pembinaan dan pengembangan, ternyata keseimbangan itu susah diukur. Hal itu berkaitan dengan mungkin atau tidak mungkinnya dilakukan kuantifikasi terhadap hasil kedua jenis kegiatan itu. Kegiatan pengembangan sastra yang hasilnya antara lain berupa hasil penelitian atau penerbitan buku jelas dapat dikuantifikasi, sedangkan kegiatan pembinaan sastra yang bertujuan menumbuhkan dan meningkatkan minat dan apresiasi masyarakat terhadap sastra jelas tidak dapat dikuantifikasi, hanya dapat diamati. Dalam hubungan ini, ada satu hal yang patut dicatat, yakni makin menggejalanya para pejabat tinggi negara yang seolah-olah saling berlomba membaca puisi dalam berbagai kesempatan. Apakah hal itu merupakan gejala semu yang menggembirakan ataukah gejala menggembirakan yang semu. Rasanya belum ada jawaban yang pasti mengenai hal itu. Yang perlu dilakukan adalah terus mengupayakan agar kondisi yang demikian makin diarahkan dan dimantapkan sehingga gejala itu tidak bersifat sesaat, tetapi berangsur-angsur menuju ke arah pembudayaan sastra dalam arti yang luas.

Hal itu hanya dapat dicapai apabila semua pihak yang merasa berkepentingan dengan sastra, seperti Dewan Kesenian, Dinas Kebudayaan Pemerintah Daerah Tingkat I, Pusat Bahasa, dan Direktorat Kesenian, menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sastra merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang perlu terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan.

3. UPAYA PENINGKATAN KERJA SAMA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SASTRA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN ZAMAN*

Seminar Mastera yang pertama ini bertema "Tradisi dan Kreativitas Sastra dalam Menjawab Tantangan Zaman: Dahulu, Sekarang, dan yang akan Datang". Sehubungan dengan hal itu, pembicaraan dalam makalah ini akan difokuskan pada kerja sama pembinaan dan pengembangan sastra dalam menghadapi tantangan zaman itu.

Sebagaimana sudah umum diketahui, tantangan zaman yang akan kita hadapi sekarang ini adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terus-menerus berlangsung menempatkan kita pada posisi yang mudah terombang-ambing. Posisi labil seperti itu mungkin saja terjadi bila kita tidak memiliki akar budaya yang kuat. Globalisasi sebagai buah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tidak dapat kita hindari. Dengan perkataan lain, era globalisasi sekaligus dapat kita manfaatkan untuk mengukur tingkat kemandirian kita sebagai bangsa. Kita harus berupaya dan berbuat untuk memperkuat akar budaya, jati diri, dan kepribadian bangsa kita masing-masing. Akar budaya, jati diri, dan kepribadian bangsa itu tertuang dan tersimpan dalam karya sastra.

Di samping ketahanan dan kemandirian setiap negara, arus globalisasi ini perlu pula dihadapi dengan atau melalui kerja sama antarnegara. Dalam bidang kebahasaan, sejak 1972 kita telah memiliki wadah kerja sama yang mula-mula bernama MBIM (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia) dan kemudian menjadi Mabbim (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia). Adapun wadah kerja sama dalam bidang kesastraan baru dimulai pada tahun 1995. Maka lahirlah Mastera (Majelis Sastra Asia Tenggara) dengan negara pendukung yang sama dengan Mabbim, yaitu Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Dari negara pemerhati Mastera, yaitu Singapura, Thailand, dan Filipina, tampaknya hanya Singapura yang dapat diharapkan berperan serta secara lebih nyata, apalagi kalau status Singapura sebagai negara pemerhati Mastera dapat ditingkatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama menjadi negara anggota.

Dalam hubungannya dengan wadah kerja sama kesastraan itu, pada kesempatan ini amatlah layak untuk meyebut kegiatan dua tahunan Pertemuan

* Makalah Seminar Mastera I, 16 Februari 1998, di Malaysia

Sastrawan Nusantara yang tempat penyelenggaraanya diatur secara bergiliran di antara negara anggota (Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia). Pertemuan Sastrawan Nusantara ini pertama kali diadakan pada tahun 1974 di Malaysia.

Beruntunglah kita karena bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu Brunei, dan bahasa Melayu Singapura berasal dari sumber yang sama, yaitu bahasa Melayu. Inilah modal utama yang harus disadari dan terus-menerus dikembangkan di dalam melakukan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan Mastera. Modal itu sudah terbukti dalam penyelenggaraan Pertemuan Sastrawan Nusantara yang tadi disinggung.

Kegiatan pembinaan dan pengembangan sastra itu sudah dimulai tahun 1997/1998, antara lain, berupa penyelenggaraan Bengkel Sastra (Puisi), Seminar Sastra Mastera, penelitian/penyusunan antologi sastra tradisional dan sastra modern (ketiganya di koordinasikan oleh Indonesia); kuliah sastra bandingan dan pemberian hadiah sastra Mastera diselenggarakan oleh Malaysia, serta pemberian anugrah sastra Mastera dan penerbitan majalah sastra "Pangsura" diselenggarakan oleh Brunei Darussalam.

Usaha kerja sama ini perlu diteruskan dan ditingkatkan. Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh suatu negara perlu diketahui oleh negara-negara lain agar hal yang sama tidak dilakukan oleh negara lain. Misalnya, penerbitan ulang dan penerjemahan karya agung sastra lama Malaysia sebagaimana dianjurkan oleh Y.A.B. Timbalan Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim, di antaranya *Sejarah Melayu*, *Misa Melayu*, *Bustanussalatin*, *Hikayat Patani*, *Hikayat Panji Semirang*, dan *Hikayat Pandawa Lima*. Pada hakikatnya karya-karya sastra ini merupakan karya besar sastra Melayu sehingga sastra lama Malaysia itu boleh dikatakan sama dengan sastra lama Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak perlu melakukan hal yang sama. Indonesia perlu menerbitkan karya agung sastra daerah dalam bahasa Indonesia seperti Kaba Cindua Mato, dan Kaba Nan Tungga dari sastra Minangkabau, Cut Muhammad dan Hikayat Menkuta Alam dari sastra Aceh; Tanggomo dari sastra Gorontalo; dan I Lagaligo dari sastra Bugis.

Hal kedua yang rasanya perlu dilakukan adalah peningkatan mutu pengajaran sastra. Sebagaimana sudah umum diketahui, salah satu sebab kurangnya apresiasi masyarakat terhadap sastra adalah rendahnya mutu pengajaran sastra, antara lain, kurang terampilnya guru dalam mengajarkan sastra, kurangnya waktu pengajaran sastra, dan tidak tersedianya bahan pengajaran sastra yang bermutu. Masalah terakhir ini perlu dibicarakan secara sungguh-sungguh dalam Sidang Mastera. Dalam hubungan itu, perlu diusahakan bahan pengajaran sastra yang berisi karya sastra dari negara-negara yang berbahasa Melayu/ Indonesia untuk tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi; khususnya karya sastra yang tergolong karya agung. Pemilihan karya

agung sastra lama ini rasanya tidak akan menimbulkan masalah karena karya sastra lama itu, seperti sudah dikemukakan di atas, sesungguhnya merupakan kekayaan sastra lama yang tidak hanya dimiliki oleh Malaysia dan Indonesia, tetapi juga oleh Brunei dan Singapura. Perbedaan baru jelas tampak sosoknya dalam hal karya (agung) sastra modern. Usaha ke arah ini perlu segera diupayakan agar generasi muda dapat dengan mudah mengenali dan mengapresiasi karya agung sastra negara-negara serumpun itu.

Hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah penelitian nilai budaya dalam sastra. Usaha peningkatan apresiasi sastra dapat dilakukan melalui pengenalan terhadap kandungan nilai budaya dari karya sastra yang bersangkutan. Nilai budaya itu baru dapat diidentifikasi melalui penelitian. Yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam hubungan itu ialah penelitian nilai budaya yang terkandung dalam karya sastra daerah dan sastra lama. Misalnya, *Nilai Budaya dalam Sastra Daerah di Sumatra* (1993), *Nilai Budaya dalam Sastra Daerah di Kalimantan* (1995), *Analisis Tema, Amanat, dan Nilai Budaya dalam Sastra Daerah di Nusa Tenggara Barat* (1993); *Struktur dan Nilai Budaya dalam Cerita Berbingkai* (1995), dan *Struktur dan Nilai Budaya Cerita Wayang* (1996). Penelitian yang sama rasanya perlu dilakukan terhadap sastra di Malaysia, dan Brunei Darussalam, dan Singapura.

Pada bagian akhir makalah singkat ini perlu disampaikan catatan untuk mengingatkan kita semua bahwa apa pun yang kita lakukan melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan sastra Melayu/Indonesia di kawasan Asia Tenggara ini, yang perlu selalu dipedomani ialah tujuannya, yaitu sekurang-kurangnya yang bermuara pada upaya (1) mengukuhkan keberadaan sastra Melayu/Indonesia di dunia internasional, (2) memberdayakan sastrawan Melayu/Indonesia di forum internasional, (3) menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki sastra Melayu/Indonesia, serta (4) mengaktualkan tradisi dan nilai budaya sastra lama yang menggunakan bahasa Melayu/Indonesia sebagai media ekspresi.

4. PENGEMBANGAN KESUSASTRAAN INDONESIA PADA ABAD KE-21*

Sastra dan Keberaksaraan

Pemahaman kita sekarang tentang sastra atau karya sastra pasti menampilkan gambaran tentang sesuatu dalam bentuk tulisan. Karya sastra itu mungkin berupa puisi, cerita pendek, novel, atau bahkan naskah drama.¹ Dengan demikian, pemahaman kita tentang sastra itu tidak memberikan peluang untuk membayangkan sesuatu dalam bentuk lisan.

Gambaran tersebut jauh berbeda dengan masa-masa awal ketika manusia belum mengenal aksara atau budaya tulis. Pada saat itu segala sesuatunya diungkapkan secara lisan. Sastra pun demikian pula sehingga dalam sejarah perkembangan sastra tercatat, misalnya, cerita, dongeng, hikayat, dan mantra² sebagai bentuk-bentuk sastra lisan yang amat dikenal dalam kehidupan budaya masyarakat pada masa itu.

Intensitas keakraban masyarakat terhadap sastra lisan secara gradual berubah seiring dengan tingkat keberaksaraan masyarakat yang bersangkutan. Kecenderungannya ialah bahwa tingkat keberaksaraan yang makin tinggi berbanding terbalik dengan tingkat keakraban terhadap sastra lisan yang makin rendah. Sarana komunikasi lisan dalam kehidupan budaya masyarakat secara berangsur-angsur diambil alih perannya oleh sarana komunikasi yang berbentuk tulisan.³

Perubahan dari yang lisan ke tulisan itu semata-mata hanya menyangkut bentuk penyampaian. Hakikat sastra itu sendiri tetap tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya yang tersurat. Yang tersirat di balik bentuk yang lisan ataupun yang tertulis itu tetap sama. Dengan perkataan lain, visi dan misi sastra tidak berubah dan harus diupayakan agar tetap konsisten, yaitu "membudayakan manusia" yang pada hakikatnya hal itu juga mengandung makna "memanusiakan manusia."⁴

Membaca Sastra

Tingkat keberaksaraan masyarakat terhadap sastra akan memberikan gambaran secara umum tentang seberapa jauh apresiasi atau penghargaan masyarakat yang bersangkutan terhadap karya sastra. Pertanyaan yang dapat dan patut diajukan mengenai hal itu: Apakah masyarakat Indonesia suka

* Makalah Pertemuan Sastrawan Nusantara X dan Pertemuan Sastrawan Malaysia I, 16-20 April 1999, Johor Bahru, Malaysia

membaca sastra? Kalau jawabannya positif, pertanyaan berikutnya adalah: Seberapa seringkah atau bagaimana frekuensi membaca sastra yang dilakukan masyarakat?

Jawaban terhadap kedua pertanyaan itu harus menggambarkan kenyataan yang sebenarnya, yaitu kenyataan tentang apresiasi masyarakat di Indonesia terhadap sastra. Sayang sekali belum ada penelitian yang memadai mengenai hal ini. Akan tetapi, sering dikemukakan bahwa gambaran yang diperoleh sangat tidak membesarkan hati. Artinya, tingkat apresiasi masyarakat terhadap sastra, khususnya di kalangan generasi muda, masih sangat rendah.⁵

Gambaran kelabu mengenai tingkat apresiasi sastra ini akan dipaparkan lebih lanjut pada bagian lain makalah ini. Sebelum itu, yang perlu segera dijawab ialah pertanyaan: Mengapa orang membaca sastra? Untuk itu, apa yang telah disebut di atas tentang "membudayakan manusia" dan "memanusiakan manusia" sebagai visi dan misi sastra perlu diyakini kebermaknaan dan kebenarannya.

Kedua konsep itu sesungguhnya memiliki pengertian yang sama. Kalau pun tidak, keduanya saling menunjang dan saling melengkapi. Bahwa sastra merupakan bagian dari kebudayaan, hal itu sudah disepakati atau paling tidak sampai saat ini belum ada pandangan lain yang menolak atau (apalagi) bertentangan dengan kesepakatan itu. Dari segi keberadaan bahasa sebagai salah satu sarana komunikasi yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, baik sastra maupun kebudayaan sama-sama tidak terpisahkan dari keberadaan bahasa itu. Dalam pengertian itu, tidak ada yang menafikan peran bahasa dalam sastra dan kebudayaan. Tidak dapat dibayangkan adanya karya sastra dalam bentuk apa pun tanpa penggunaan dan pemanfaatan bahasa. Tanpa penggunaan dan pemanfaatan bahasa juga kita tidak dapat membayangkan bukan saja keberadaan kebudayaan itu sendiri, melainkan juga upaya pengembangannya. Dalam hal ini peran bahasa dalam pengembangan kebudayaan dalam arti yang luas sudah terbukti dan tidak terbantahkan.

Karena sastra merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan, maka kalau seseorang membaca sastra, hal itu berarti bahwa pada saat yang sama dia berkenalan dengan (salah satu unsur) kebudayaan. Kalau kebudayaan diartikan pada awalnya sebagai sesuatu yang terpancar dari pikiran dan akal budi dan kemudian menyandang muatan makna yang lebih sarat, yaitu sebagai sesuatu yang sudah maju dan beradab, isi dan muatan sastra pun berkisar pada kehidupan manusia yang berperadaban yang bersumber pada pikiran dan akal budi.

Pikiran sebagai sumber akan menghasilkan sesuatu yang cendekia. Hasil olah pikir yang cendekia akan memberikan jaminan tentang kebenaran. Adapun akal budi akan membimbing pikiran agar potensi yang dimilikinya menghasilkan sesuatu yang tidak saja benar dari segi penalaran, tetapi juga sekaligus

sesuai dengan akal budi dan tuntutan hati nurani.⁶ Oleh karena itu, sebuah karya sastra dapat disebut baik dan berhasil kalau ia mampu menggugah akal budi dan hati nurani pembacanya. Dengan demikian, karya sastra berfungsi untuk mencendekiakan penalaran, menghaluskan akal budi, dan meng- asah hati nurani para pembacanya. Pikiran (dan perasaan), akal budi, dan hati nurani itulah yang membedakan manusia dari jenis makhluk hidup lainnya. Itulah sebabnya di atas dikemukakan bahwa visi dan misi utama sastra yang tidak berubah itu ialah "membudayakan manusia" dan "memanusiakan manusia" yang menjadi pembacanya.⁷

Tingkat keberaksaraan masyarakat terhadap sastra itu pastilah tidak sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Apresiasi sastra masyarakat di negara yang sudah maju berbeda tingkatannya dengan apresiasi sastra masyarakat di negara yang sedang berkembang. Ukuran sudah maju atau masih berkembangnya suatu negara biasanya didasarkan pada tingkat kemajuan negara yang bersangkutan dalam bidang ekonomi, industri, dan perdagangan. Terhadap pandangan mengenai ukuran tingkat kemajuan suatu negara ini masih perlu dikemukakan pertanyaan: Apakah negara maju itu sudah dengan serta-merta dapat disebut juga negara yang berperadaban tinggi? Atau dengan jenis pertanyaan lain: Adakah korelasi antara kemajuan dalam bidang ekonomi, industri, dan perdagangan itu dengan tingkat peradaban masyarakatnya?

Cukup muskil memperoleh jawaban yang tepat terhadap pertanyaan seperti itu. Ada beberapa alternatif yang seyogianya dijadikan bahan pertimbangan. Pertama, tolok ukur ekonomi, industri, dan perdagangan hanya berhubungan dengan hal yang bersifat kebendaan atau materi yang bermuara pada upaya pencapaian kemakmuran atau kesejahteraan lahiriah. Adapun peradaban tidak hanya mengejar kemajuan/ kesejahteraan lahiriah, tetapi juga menyangkut kemajuan/ kesejahteraan batin. Kedua, kemajuan dan kesejahteraan lahiriah yang diperoleh bisa sejajar dengan tingkat peradaban yang diupayakan. Ketiga, dalam hal tidak sejajar, tingkat peradaban itu mungkin berada pada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat kemajuan/ kesejahteraan lahiriah.

Dalam konteks itu, dan juga sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya, sastra berada dalam konstelasi kebudayaan yang bermuara pada upaya pencapaian kesejahteraan yang non-materi. Bertolak dari dikotomi kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin itu, kecenderungannya ialah bahwa pada umumnya orang akan mendahulukan upaya pemerolehan kesejahteraan lahir. Setelah mencapai tahap tertentu dalam kesejahteraan lahir, barulah seseorang akan mulai mengupayakan kesejahteraan batin. Tahapan ini dalam kenyataannya tidak bersifat hitam-putih. Artinya, kedua-duanya mungkin sama-sama tetap diupayakan, tetapi dengan porsi perhatian yang berbeda.

Perbedaan dalam hal porsi perhatian itu, apalagi bila dihubungkan dengan pencapaian tahap tertentu dalam kesejahteraan lahir seperti yang dimaksudkan di atas, akan berakibat pada sikap yang menomorduakan sastra sebagai salah satu komponen kesejahteraan batin. Yang perlu dijaga dan diupayakan ialah jangan sampai terjadi perbedaan yang terlalu timpang atau terlalu berat sebelah di antara upaya pencapaian kedua jenis kesejahteraan tersebut.

Apabila terdapat perbedaan yang sangat timpang, maka sikap dan tindakan masyarakat dalam bidang apa pun akan kehilangan ciri kemanusiaannya karena sikap dan tindakannya tidak bersumber pada dan dikendalikan oleh akal budi dan hati nurani. Yang seperti itu sering disebut sebagai sikap dan tindakan yang tidak beradab. Secara lebih sederhana hal itu lazim pula dikatakan tidak manusiawi.

Fenomena ini bisa sangat membahayakan keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam bidang ekonomi yang akan terjadi ialah keinginan dan upaya yang tidak terkendali untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Kecerakahan para pelaku ekonomi ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya akan menjadi pemicu, kalau ada kesempatan, bagi timbulnya kerusuhan sosial yang pada akhirnya bisa memporakporandakan berbagai tatanan kehidupan yang telah berhasil dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun.

Dalam bidang politik dapat disaksikan hubungan sebab-akibat yang hampir mirip. Adagium tujuan menghalalkan cara akan benar-benar dilaksanakan seoptimal mungkin, semata-mata hanya untuk kepentingan golongan atau kelompok yang garis politiknya satu haluan. Tanpa bimbingan akal budi dan hati nurani, dalam bidang politik jelas akan terjadi pengeksploitasian terhadap kelompok yang lemah oleh kelompok yang lebih kuat.

Untuk menghindarkan dampak negatif yang akan diderita oleh kelompok yang secara ekonomis dan politis itu berada dalam posisi yang lemah, diperlukan semacam keseimbangan atau harmoni antara upaya mengejar kesejahteraan lahir dan upaya menikmati kesejahteraan batin. Salah satu upaya yang mudah dilakukan untuk belajar menikmati kesejahteraan batin itu ialah dengan cara membiasakan diri membaca karya sastra.⁸

Situasi Kehidupan Sastra

Kehidupan sastra di Indonesia dewasa ini, bahkan sudah sejak lama, berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Perhatian masyarakat terhadap sastra yang masih sangat jauh dari memadai memang dapat dikatakan sebagai akibat dari masih sangat rendahnya minat baca masyarakat secara keseluruhan. Faktor ini berangsur-angsur berubah menjadi tembok penghalang yang kian memisahkan dan menjauhkan karya sastra dari kalangan masyarakat.

Tembok penghalang itu makin dipertebal oleh daya beli masyarakat yang juga masih amat rendah. Bagi sebagian besar anggota masyarakat yang harus berjuang untuk menyelamatkan diri dari himpitan beban dan tuntutan ekonomi, membaca buku sastra—apalagi memilikinya—merupakan sesuatu yang nyaris mustahil.

Upaya dari pihak-pihak tertentu yang sepantasnya melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap kehidupan sastra yang memprihatinkan itu juga belum terlihat secara jelas. Belum ada bukti tentang perencanaan yang terarah dan komprehensif untuk mengatasi situasi kehidupan sastra yang tidak menggembirakan itu. Kalaupun sekali-sekali ada, upaya yang ditempuh masih bersifat sporadis. Akibatnya, kehidupan sastra seperti dibiarkan terbengkalai sehingga upaya pembinaan itu diserahkan sepenuhnya hanya kepada mereka yang benar-benar mencintai sastra secara tulus dan sungguh-sungguh karena berani mempertaruhkan hidupnya semata-mata agar sastra di Indonesia tidak mati. Akan tetapi, mereka yang berani mati demi sastra ini jumlahnya amat sangat sedikit sehingga boleh dikatakan hampir tidak berarti apa-apa, ibarat sebutir pasir di atas hamparan pantai yang sangat luas.

Ketika selama lebih dari tiga puluh tahun di Indonesia dilaksanakan dengan gegap gempita pembangunan dalam bidang ekonomi dan industri, selama itu pula bidang kesusastraan tidak ada yang melirik dan memperhatikan. Sastra Indonesia dibiarkan hidup sendiri dalam dunianya yang sepi dan terasing dari hingar bingarnya derap pembangunan yang tengah dilaksanakan. Kesusastraan sebagai bidang yang tersendiri dalam kehidupan sebagian kecil masyarakat Indonesia dibiarkan bertarung dengan kemampuan yang sangat tidak seimbang melawan kekuatan raksasa yang menyemangati pembangunan ekonomi dan industri yang, seperti telah disebutkan di atas, bertujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahiriah kepada rakyat.

Iklim yang tidak mendukung bagi kehidupan sastra itu secara tidak langsung dapat menurunkan mutu dan tingkat keproduktifan karya sastra yang dihasilkan. Hal ini erat kaitannya dengan kemungkinan makin berkurangnya gairah dan kiprah para pengarang atau sastrawan dalam berkarya. Masalahnya ialah seberapa banyak sastrawan yang rela dan tetap setia pada profesinya, padahal secara ekonomis dunia kepengarangannya sama sekali tidak pernah memperlihatkan tanda-tanda untuk dapat beranjak dari neraca rugi dan saldo yang tetap minus.

Perihal masih memprihatinkannya apresiasi sastra di kalangan generasi muda di Indonesia sering dihubungkan dengan praktik pengajaran sastra di sekolah yang tidak menarik dan, sebagai akibatnya, membosankan. Guru sastra yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak memenuhi kualifikasi, kurikulum yang muatannya tidak menunjang, dan tidak atau kurang tersedianya buku-buku sastra yang diperlukan di perpustakaan sekolah senantiasa di-

kemukakan dan digarisbawahi sebagai penyebab tidak menarik dan membosankannya pengajaran sastra di sekolah. Ketika hal itu dibahas, dan hal itu sudah amat sering dilakukan dalam berbagai pertemuan, jalan keluar untuk mengatasinya tidak semudah mengatakannya. Yang dihadapi seperti benang kusut atau ibarat lingkaran setan. Tenaga pengajar sastra yang tidak memenuhi persyaratan, misalnya, tidaklah berdiri sendiri. Ia merupakan hasil atau produk dari lembaga pendidikan yang telah menyiapkan yang bersangkutan menjadi pengajar sastra.

Kalau begitu persoalannya, yang perlu dilihat lebih jauh ialah bagaimana kualifikasi dosen dan kurikulum lembaga pendidikan yang telah menghasilkan tenaga pengajar sastra itu. Daftar permasalahan yang perlu ditelusuri ini bisa dibuat lebih panjang lagi. Akan tetapi, cara seperti itu akan memaksa kita untuk mengulangi jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan. Untuk menghadapi kenyataan seperti itu, pengajaran sastra di sekolah memang perlu segera dibenahi secara keseluruhan, jangan sampai ada satu aspek pun yang tertinggal atau terluput dari perhatian.

Gambaran serba kelabu yang dipaparkan di atas dalam perspektif ke-waktuan, seperti sudah disebutkan, berhubungan dengan peta kehidupan sastra di Indonesia dewasa ini dan keadaan seperti itu sudah mulai berlangsung sejak lebih dari tiga puluh tahun. Hal itu tidaklah berarti bahwa sejarah sastra Indonesia tidak pernah mencatat saat-saat yang membesarkan hati. Secara jujur harus diakui bahwa selama kurun waktu antara tahun 40-an sampai paruh pertama tahun 60-an tingkat apresiasi masyarakat terhadap sastra Indonesia dapat dikatakan cukup tinggi dan menggembirakan.⁹

Selama kurun waktu itu terdapat beberapa majalah dengan prestise dan kredibilitas yang tidak diragukan secara teratur menampilkan berbagai karya sastra (puisi, cerita pendek, atau bahkan esai sastra) yang senantiasa dibaca dan dinikmati oleh kalangan pembaca yang terpelajar. Apresiasi sastra kelompok pembaca yang terpelajar ini menjadi lebih terbina dan terpelihara. Masyarakat yang tergolong awam juga membaca karya sastra meskipun dalam frekuensi dan intensitas yang berbeda kalau dibandingkan dengan pembaca yang terpelajar. Mereka membaca karya sastra mungkin sekadar sebagai pengisi waktu sehingga jenis karya sastra yang mereka baca pun pasti yang sesuai dengan selera mereka (lihat juga Catatan 8).

Patut ditambahkan bahwa RRI (Radio Republik Indonesia) baik yang berada di Jakarta maupun di daerah mengambil peran yang tidak kalah penting dan strategisnya dalam menata dan menyelenggarakan siaran-siaran khusus yang bertujuan membina dan meningkatkan minat generasi muda terhadap sastra. Para penerbit pun, meski dalam jumlah yang tidak terlalu banyak menurut ukuran sekarang, sama-sama ikut mengambil bagian dalam menerbitkan buku-buku karya sastra.

Suasana "bulan madu" dalam kehidupan sastra di Indonesia itu mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun ketika pada tahun 1962 mulai dibangun TVRI (Televisi Republik Indonesia), satu-satunya stasiun siaran televisi milik Pemerintah, apalagi ketika menjelang tahun 70-an banyak bermunculan stasiun siaran radio swasta. Mulai saat itu terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam kebiasaan hidup masyarakat Indonesia. Kebiasaan membaca yang sebelumnya mulai terbina dengan serta merta berubah menjadi kebiasaan mendengarkan radio dan menonton televisi.

Perubahan yang merugikan minat baca masyarakat itu makin diperparah ketika pada tahun 80-an menyusul munculnya lima buah stasiun televisi milik swasta. Sementara itu, kemajuan mutakhir dalam bidang teknologi informasi makin memberikan tambahan kemudahan bagi mereka yang ingin mencari hiburan (seperti menonton film) tanpa harus meninggalkan rumah. Pemberian tambahan kemudahan yang seakan-akan melimpah itu makin meningkatkan mutu dan keterampilan masyarakat dalam peran barunya sebagai penonton televisi dan pendengar radio. Sebaliknya, dilihat dari upaya pemupukan kebiasaan membaca di kalangan masyarakat, termasuk kebiasaan membaca karya sastra, hal itu benar-benar merupakan ancaman yang sangat merugikan.

Tinjauan tentang situasi kehidupan sastra di atas pasti menimbulkan kesan yang cukup kuat bahwa yang dicoba diangkat dan dikomentari hanyalah fragmen-fragmen tertentu dari wacana kehidupan sastra di Indonesia yang tampaknya masih tetap pekat diselimuti awan. Agar penilaian balik terhadap tinjauan itu tetap berada dalam bingkai yang proporsional, perlu ditambahkan bahwa upaya untuk mengatasi berbagai ketimpangan itu bukannya tidak pernah dilakukan. Sudah ada langkah dan usaha untuk memperbaiki keadaan yang serba memprihatinkan itu, tetapi masih dalam taraf yang belum memadai sehingga "penyakit"-nya itu sendiri belum sembuh dan masih memerlukan penanganan dan tindak lanjut yang lebih bersungguh-sungguh.

Upaya Penanggulangan

Dalam menghadapi situasi kehidupan sastra di Indonesia seperti yang dikemukakan di atas, perlu dilaksanakan upaya-upaya penanggulangan yang pada dasarnya ada yang berkaitan dengan upaya pembinaan dan ada pula yang berhubungan dengan upaya pengembangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa upaya pembinaan berhubungan dengan manusia: pengarang atau sastrawan, guru dan siswa, pihak penerbit, serta masyarakat dalam arti luas yang menjadi pembaca dan penikmat sastra.¹⁰

Yang menjadi sasaran upaya pengembangan adalah karya sastranya itu sendiri agar keberadaan sastra sebagai salah satu unsur utama kebudayaan tetap mantap, agar sastra tetap hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai sumber yang dapat memperkaya kehidupan batin, menghaluskan akal budi,

dan menjaga serta memelihara kepekaan hati nurani para pembacanya.

Uraian lebih lanjut mengenai upaya penanggulangan berikut ini tidak secara eksplisit menyebutkan apakah butir-butir kegiatan yang bersangkutan termasuk upaya pembinaan ataukah upaya pengembangan.

1. Masalah apresiasi tidaklah berlebihan rasanya untuk disebut sebagai kunci utama yang diharapkan mampu menjebol dan meruntuhkan dinding pemisah antara karya sastra dan masyarakat. Memang tidak dapat dan tidak mungkin dilakukan perubahan sikap masyarakat yang selama ini dikenal masa bodoh terhadap sastra berbalik secara tiba-tiba menjadi masyarakat yang akrab, senang, dan cinta pada sastra. Upaya menumbuhkan minat dan kecintaan masyarakat terhadap sastra, terutama di kalangan generasi mudanya, benar-benar memerlukan waktu yang tidak dapat diperkirakan kapan akan selesai dan membuahkan hasil yang diharapkan. Berbagai langkah dan upaya berikut yang pernah dilakukan perlu dilanjutkan dengan teknik dan metode yang lebih tepat.
 - a. **Bengkel Sastra** yang diikuti oleh siswa sekolah menengah umum amat bermanfaat bagi pemupukan dan pemeliharaan apresiasi peserta. Mereka belajar mengenal secara lebih dekat bagaimana memahami, menganalisis, dan bahkan menciptakan karya sastra. Bimbingan yang diberikan oleh para sastrawan dalam kegiatan ini ternyata amat membantu.
 - b. **Pertemuan Sastrawan** yang secara langsung mempertemukan para siswa dan guru dengan sastrawan juga merupakan langkah yang tidak kalah strategisnya dalam rangka menumbuhkan minat dan perhatian mereka terhadap sastra. Kegiatan ini ternyata memberikan manfaat lain karena guru atau murid yang menghadiri pertemuan itu dapat bertemu dan berbicara dengan para sastrawan yang sebelumnya tidak atau belum mereka kenal secara langsung.
 - c. **Sisipan "Kakilangit"** pada majalah sastra *Horison* yang khusus disajikan bagi para siswa sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan pesantren memiliki manfaat ganda, yaitu membina apresiasi dan pemahaman para siswa terhadap sastra serta bagi para pengelola *Horison* itu sendiri sisipan itu sudah terbukti membawa "berkah" tersendiri (majalah tersebut dapat terbit secara teratur setiap bulan dengan tiras yang cukup tinggi untuk ukuran sebuah majalah sastra di Indonesia).
 - d. **Sayembara Mengarang** cerita pendek atau esai tentang sastra berikut pengajarannya yang diikuti oleh para siswa SMU dan para guru

SLTP/SMU ternyata cukup menggembirakan dilihat dari jumlah naskah karangan yang masuk untuk dinilai. Penghargaan berupa hadiah uang (meski dalam jumlah yang tergolong sangat sedikit) dan piagam kepada para pemenang sayembara diharapkan dapat memacu mereka untuk terus berkarya dalam bidang sastra. Demikian pula halnya sertifikat keikutsertaan bagi para peserta sayembara yang bukan pemenang diharapkan menjadi tenaga pendorong agar mereka tetap memiliki minat, perhatian, dan kecintaan pada sastra.

- e. Mata sajian **Apresiasi Sastra** selama sepuluh jam yang diberikan dalam rangka pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi para guru dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah tingkat I dan II di seluruh Indonesia juga diharapkan akan menjadi andil yang dapat memotivasi mereka untuk memberikan minat dan perhatian yang selayaknya terhadap sastra.
- f. **Bulan Sastra** yang diadakan setiap tahun selama bulan Oktober membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi masyarakat luas untuk lebih berkenalan dengan denyut kehidupan sastra. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa Pertemuan Kesastraan yang dihadiri tidak hanya oleh para guru dan mahasiswa, tetapi juga oleh para peminat yang berasal dari berbagai organisasi profesi. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan di hampir semua ibukota provinsi di seluruh Indonesia. Kegiatan Bulan Bahasa lain yang perlu diintensifkan penyelenggaraannya adalah **Lomba Deklamasi, Lomba Baca Puisi, dan Festival Musikalisasi Puisi**. Ketiga jenis kegiatan sastra ini tidak hanya diadakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi sering juga diselenggarakan oleh instansi lain pada kesempatan yang berbeda.
- g. **Media massa**, baik cetak maupun elektronik, perlu pula dimanfaatkan untuk keperluan pemupukan apresiasi sastra bagi khalayak pembaca, pendengar, dan pemirsanya. Beberapa **surat kabar** ada yang sudah menyediakan kolom atau bahkan halaman khusus secara teratur pada hari-hari tertentu untuk pemuatan karya sastra: ada ruangan untuk puisi, cerita pendek, cerita bersambung, dan/atau esai yang mengulas masalah sastra. Sejumlah **stasiun radio** juga ada yang sudah memiliki acara tetap untuk menyiarkan, misalnya, pembacaan puisi berikut komentar atau ulasan tentang puisi yang dibacakan. Yang belum terlihat adalah peran **stasiun televisi**, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun oleh swasta. Sampai sekarang belum pernah ada acara khusus televisi yang dirancang untuk menampung dan menyalurkan berbagai kegiatan dan karya sastra. Seluruh alokasi waktu siaran yang

dimilikinya benar-benar dimanfaatkan secara bisnis. Iklan niaga di televisi swasta tampaknya begitu beragam dan padat sehingga para pengelola stasiun televisi itu menutup pintunya rapat-rapat bagi upaya pembinaan sastra. Tidak ada celah atau peluang sedikit pun bagi siaran yang bermuara pada pemupukan apresiasi sastra karena, menurut anggapan mereka, secara bisnis dan ekonomis hal itu sama sekali tidak menguntungkan. Keadaan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Perlu ada upaya dan pendekatan khusus oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi agar para pengelola stasiun televisi itu terbuka mata dan hatinya sehingga pada akhirnya mereka pun akan menyadari bahwa pada hakikatnya penyediaan siaran khusus untuk keperluan pembinaan dan pemupukan apresiasi sastra itu merupakan bagian integral dari peran dan tanggung jawab mereka.

2. Dari berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan untuk keperluan apresiasi sastra, yang paling strategis dan memiliki tingkat kebermaknaan yang paling tinggi adalah melalui **pengajaran sastra**. Mutu dan tingkat pemahaman serta apresiasi mereka terhadap sastra yang diperoleh di sekolah akan menjadi modal utama bagi pengembangan lebih lanjut ketika mereka nanti belajar di perguruan tinggi atau terjun sebagai anggota masyarakat. Telah disebutkan di atas bahwa merosotnya pengajaran sastra di sekolah berkorelasi dengan tiga faktor, yaitu (1) guru sastra yang tidak sesuai dengan persyaratan, (2) kurikulum yang tidak menunjang, dan (3) kurang tersedianya buku-buku sastra di perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, upaya memperbaiki mutu pengajaran sastra harus diprioritaskan pada pembenahan terhadap ketiga faktor tersebut.
 - a. Kalau selama ini **guru sastra** itu dirangkap oleh guru bahasa dan yang bersangkutan dinilai tidak cakap dan tidak memiliki wawasan dan keterampilan yang memadai untuk mengajar sastra, yang tersedia hanya ada dua pilihan: guru sastra tidak boleh dirangkap oleh guru bahasa atau guru sastra yang "darurat" itu terlebih dahulu diwajibkan mengikuti kegiatan yang berupa pelatihan atau penataran agar dari segi wawasan, pengetahuan, dan keterampilan sebagai guru sastra, mereka sudah dipersiapkan secara matang.
 - b. **Kurikulum** untuk pelajaran sastra dari segi alokasi waktu seyogianya memungkinkan guru dan para murid memiliki keleluasaan untuk pengembangan pemahaman lebih lanjut. Dari segi isi atau muatannya, kurikulum pelajaran sastra hendaknya tidak mengisolasi diri terhadap seputar kehidupan nyata yang dihadapi para siswa sehari-hari. Untuk itu, diperlukan kecermatan dan kejelian guru dalam memilih topik karya

sastra yang akan dibebankan sebagai tugas membaca kepada siswa. Hal ini penting karena dengan cara seperti itu para siswa secara tidak disadari akan merasa terlibat dalam permasalahan yang tersaji dalam karya sastra yang bersangkutan. Dengan demikian, para siswa yang merasa terlibat itu tidak lagi akan menempatkan dirinya semata-mata sebagai objek yang harus menjalankan tugas dari guru untuk membaca karya sastra, tetapi mereka akan merasa terangkat sebagai subjek dalam bentuk personifikasi tokoh cerita dalam karya sastra yang dibacanya; apalagi kalau kepada mereka guru juga memberikan kesempatan untuk mendiskusikan hasil pemahaman atas karya sastra yang telah dibacanya itu. Sekali lagi harus dikatakan bahwa cara seperti itu memerlukan kecermatan dan kejelian dari pihak guru. Dengan perkataan lain, guru sama sekali tidak boleh terpacu pada silabus standar yang telah ditentukan. Ia harus kreatif dan bahkan inovatif.

- c. Ketersediaan buku-buku sastra yang diperlukan di **perpustakaan sekolah** sebenarnya harus menjadi persyaratan minimal. Kalau tidak, apresiasi dan pemahaman siswa terhadap sastra akan sangat gersang dan miskin karena mereka hanya mengandalkan pada bahan yang diberikan guru. Oleh karena itu, guru sastra, dengan bantuan kepala sekolah, harus mencari upaya agar sekurang-kurangnya persyaratan minimal tentang ketersediaan buku-buku sastra di perpustakaan sekolah itu bisa terpenuhi.
3. Betapapun tingginya apresiasi masyarakat terhadap sastra, hal itu tidak akan ada artinya kalau para **sastrawan** itu sendiri tidak atau kurang bergairah untuk menulis dan menghasilkan karya sastra. Agar hal itu tidak terjadi, perlu dilakukan upaya agar mereka menjadi lebih bergairah daripada sebelumnya untuk berprestasi. Berbagai bentuk penghargaan, baik yang berupa hadiah uang maupun dalam bentuk yang lain, yang diberikan oleh pihak Pemerintah, yayasan, atau lembaga swasta lainnya benar-benar akan membangkitkan dorongan dan semangat yang dapat memacu mereka untuk menghasilkan karya-karya sastra yang lebih bermutu.
4. **Penerbit** juga dapat tampil dan berperan sebagai pihak yang dapat menggairahkan para sastrawan untuk lebih berprestasi. Sekadar contoh: sudah banyak sekali karya sastra yang muncul berserakan di surat-surat kabar. Karya-karya sastra sejenis yang masih berserakan itu dapat dikemas dalam bentuk buku. Melalui pilihan dan penanganan editor yang tepat, dapatlah kita berharap bahwa suatu saat nanti masyarakat dapat menikmati buku Antologi Puisi, Antologi Cerita Pendek, atau mungkin juga

Antologi Esai Sastra yang bahan bakunya berasal dari karya-karya sastra yang bertebaran di surat-surat kabar itu. Antologi seperti itu akan memberikan manfaat tidak saja kepada para pengarang yang karya sastranya termuat, tetapi juga kepada masyarakat pembaca yang akan memiliki pilihan yang lebih luas dalam menentukan buku sastra yang akan dibacanya.

5. **Kerja sama** antarpihak di suatu negara atau kerja sama antarnegara dalam bidang sastra pasti akan memberikan dampak yang amat positif bagi keberlangsungan kehidupan sastra itu sendiri. Di Indonesia, misalnya, dapat dibina kerja sama antara Dewan Kesenian Jakarta, Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, majalah sastra *Horison*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, atau dengan pihak-pihak lain dalam menyepakati upaya bersama yang dapat dilakukan untuk kemajuan kesusastraan di Indonesia. **Pertemuan Sastrawan Nusantara** (PSN) yang dimulai tahun 1977 di Singapura memiliki arti yang amat penting dalam memupuk kerja sama antarnegara serumpun yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam menciptakan karya sastranya. Melalui forum PSN, para sastrawan dari negara serumpun itu (Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia) memiliki kesempatan yang leluasa untuk saling bertukar pengalaman, pengetahuan, dan wawasan mengenai kegiatan sastra di negara masing-masing. Wadah kerja sama lain yang didukung oleh instansi Pemerintah negara serumpun (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia) adalah **Mastera**, bentuk singkat dari **Majelis Sastra Asia Tenggara**, yang baru diresmikan pendiriannya pada tahun 1996. Perbedaannya dengan PSN ialah bahwa Mastera lebih menitikberatkan kegiatannya pada penelitian, penyusunan buku, dan hal-hal yang bersifat akademis lainnya. Selain menyelenggarakan forum penulisan kreatif dan seri perkuliahan tentang sastra bandingan serta penerbitan jurnal Mastera yang bernama **Pangsura**, Mastera juga merencanakan untuk memberikan dua jenis penghargaan Mastera bagi sastrawan negara serumpun yang berjasa dan berprestasi, yaitu yang berupa Anugerah Mastera dan Hadiah Mastera. Mengenai penghargaan ini, patut pula dicatat penghargaan **South-East Asia Write Awards** yang diberikan oleh Kerajaan Thailand setiap tahun sejak 1978. Setiap negara pasti sudah memiliki kebijakan dan tradisi masing-masing dalam memberikan penghargaan kepada sastrawan yang berprestasi di negaranya.

Catatan Penutup

Butir-butir upaya penanggulangan di atas secara keseluruhan boleh dikatakan lebih banyak terfokus pada upaya pemertahanan agar kehidupan sastra Indonesia mampu bertahan di tengah-tengah gejolak dan dinamika bidang kehidupan

lainnya. Untuk itu, yang diangkat sebagai permasalahan dengan bobot prioritas yang tinggi sesungguhnya hanya berkisar pada dua hal, yaitu agar masyarakat memiliki tingkat apresiasi sastra yang memadai dan agar para sastrawan tetap bergairah dan setia pada profesi kepengarangannya. Dengan demikian, permasalahan utama lainnya tentang apa yang perlu dan harus diupayakan terhadap sastra dalam menghadapi abad ke-21, sebagaimana diisyaratkan oleh judul makalah ini, belum disentuh.

Abad ke-21 sudah "terlanjur" dikenal dan disebut orang sebagai abad globalisasi. Hampir semua pihak—termasuk pihak pemerintah dan swasta serta lembaga-lembaga profesi dan kemasyarakatan—seakan berlomba menyibukkan diri untuk mencari dan menemukan rencana dan strategi yang tepat agar kegiatan apa pun yang akan dilakukan oleh pihak-pihak itu seiring sejalan dengan tuntutan dan dinamika era globalisasi.

Kalau memang benar harus demikian adanya, yaitu bahwa arus globalisasi itu begitu kuat derasnya sehingga tidak ada satu bidang kehidupan pun yang akan mampu bertahan terhadap terpaan gelombang samudera global, maka sastra pun harus menerimanya dengan tabah. Ketabahan itu menjadi semacam *conditio sine qua non* karena pada satu sisi berkaitan dengan upaya pemerintahan dan pada sisi yang lain sastra (baca: sastra Indonesia) harus berani tampil di atas pentas global.

Tampil di atas pentas global mengandung makna bahwa masyarakat global diasumsikan memiliki peluang dan kesempatan untuk dapat memahami dan menikmati karya sastra Indonesia. Untuk itu, karya sastra Indonesia perlu dan harus diperkenalkan kepada masyarakat luas yang tidak lagi disekat-sekat oleh batas negara. Implikasinya ialah bahwa karya sastra Indonesia, melalui seleksi dari berbagai sudut pertimbangan, harus dikemas terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa yang dikenal oleh masyarakat dunia, yaitu bahasa Inggris. Artinya, upaya memperkenalkan sastra Indonesia kepada masyarakat global itu ditempuh melalui edisi terjemahan dalam bahasa Inggris.¹¹

Globalisasi sastra Indonesia itu perlu pula dilihat dan ditempatkan pada konteks yang lebih terbatas, yaitu konteks kawasan Nusantara. Upaya yang ditempuh dalam konteks kawasan Nusantara ini tidak memerlukan tahap penerjemahan. Persoalannya tinggal: bagaimana langkah dan strategi yang harus dipilih atau ditentukan agar sastra Indonesia dapat pula dibaca dan dinikmati oleh masyarakat di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dalam konteks yang sama, pertanyaan "bagaimana" itu sekaligus berlaku juga bagi karya sastra berbahasa Melayu di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Permasalahan yang akan muncul adalah ihwal lalu-lintas atau pertukaran buku sastra di antara negara serumpun yang pelaksanaannya sekurang-kurangnya akan berkaitan dengan kebijakan dan peraturan di negara masing-

masing tentang kepabeanan. Apabila para pemegang kebijakan di setiap negara serumpun itu menyadari dan meyakini pentingnya peran karya sastra dalam kehidupan manusia, tentunya dapat diharapkan bahwa kebijakan dan peraturan untuk lalu-lintas buku-buku sastra tidak seharusnya diperlakukan sama dengan peraturan yang diberlakukan bagi barang-barang niaga. Jadi, yang diperlukan ialah semacam keringanan atau kemudahan agar masyarakat di negara-negara serumpun itu dapat lebih saling mengenal, memahami, dan menghormati lewat karya-karya sastranya.

Dengan jiwa dan semangat bangsa serumpun itu, yang juga patut dipertimbangkan ialah melakukan penerbitan bersama. Yang dimaksudkan ialah, misalnya, penerbitan buku jenis antologi: antologi cerita pendek atau antologi puisi yang memuat karya-karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan dari keempat negara serumpun.

Itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan upaya pengembangan sastra Indonesia menjelang abad ke-21. Akan tetapi, sebelum tuntutan era globalisasi itu dipenuhi, sastra Indonesia pertama-tama harus melakukan konsolidasi intern: membangkitkan minat dan perhatian masyarakat pembaca serta menggairahkan para sastrawan untuk menghasilkan karya yang lebih bermutu. Konsolidasi intern itu tentu saja perlu dilaksanakan terhadap sastra Melayu di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Setelah itu, kerja sama di antara para sastrawan Nusantara perlu lebih digalang dan diintensifkan.

Forum seperti PSN ini perlu benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk membicarakan dan menyepakati berbagai langkah dan perencanaan—sekaligus berikut skala prioritasnya—yang bertujuan agar sastra Indonesia dan sastra Melayu dapat berdiri tegak sehingga dapat tetap berkibar di negaranya masing-masing untuk kemudian ditindaklanjuti dengan upaya yang bertujuan memenuhi berbagai tuntutan globalisasi dalam bidang sastra.

Catatan

1. Naskah drama memang dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk karya sastra. Akan tetapi, ketika naskah itu sudah diangkat dan disajikan dalam bentuk pentas atau pertunjukan, ia tidak lagi tampil sebagai karya sastra karena telah berubah menjadi seni drama.
2. Dari segi bentuknya, mantra menggambarkan susunan kata yang mirip dengan bentuk puisi, antara lain, karena ada rima dan irama. Dari segi isinya, mantra dianggap mengandung kekuatan gaib atau mengandung daya magis karena biasanya mantra itu diucapkan oleh para dukun atau pawang untuk menangkal atau menandingi kekuatan gaib yang lain. Ciri bentuk dan muatan isi mantra seperti itu oleh penyair tertentu dimanfaatkan dan

dikembangkan dalam penciptaan puisi-puisi yang dihasilkannya sehingga sebagian para ahli kritik sastra menyebutnya sebagai puisi mantera.

3. Tidak semua wacana komunikasi mengikuti pola perubahan itu. Untuk hal-hal yang memang hanya dapat disampaikan dengan komunikasi lisan, misalnya dalam bidang pengajaran atau persekolahan, peran komunikasi lisan itu tetap dominan karena pada tahap tertentu peran itu tak mungkin diambil alih oleh komunikasi secara tertulis.
4. Tinjauan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat, antara lain, pada makalah Budi Darma yang berjudul "Sastra: Memanusiakan Manusia" yang disampaikan dalam Persidangan Antarabangsa Bahasa, Sastra, dan Budaya Melayu: ke Arah Keseimbangan Insan". Persidangan ini diselenggarakan pada tanggal 17—18 Juli 1998 oleh Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura.
5. Taufiq Ismail rajin melakukan pengamatan untuk mengetahui apresiasi generasi muda terhadap sastra. Dalam berbagai kesempatan sering dikemukakan olehnya bahwa para siswa SMU di Indonesia boleh dikatakan hampir tidak pernah membaca sastra dalam arti yang sebenarnya. Kalaupun dilakukan, hal itu adalah karena disuruh oleh guru dan yang dibacanya bukanlah karya sastra yang utuh, melainkan yang sudah tersaji dalam bentuk ringkasannya. Menurut pengamatannya, hal itu amat berbeda dengan, misalnya, murid-murid SMU di Singapura, Malaysia, apalagi di Amerika Serikat atau di negara-negara yang sudah maju lainnya.
6. Secara sederhana akal budi dan hati nurani sering disebut moral. Agama juga pada dasarnya mengajar dan membimbing orang agar bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti yang baik. Perbedaan yang perlu diperhatikan ialah bahwa moral dalam agama mengandung unsur dogmatis, sedangkan dalam sastra tidak.
7. Paparan itu secara implisit menggambarkan adanya perbedaan yang mendasar antara membaca karya sastra dan membaca karya nonsastra. Pada karya-karya ilmiah, misalnya, pembaca semata-mata hanya dibimbing untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bernalarnya. Hal yang berhubungan dengan akal budi dan hati nurani pada karya ilmiah sama sekali tidak dipersoalkan.
8. Karya sastra yang dimaksudkan di sini pada umumnya ialah yang berupa cerita pendek atau novel, termasuk cerita bersambung (*feuilleton*). Pembaca yang senang pada puisi jumlahnya sangat sedikit dan terbatas sekali. Seberapa jauh karya sastra yang dibaca itu dapat memperkaya kehidupan batin pembacanya, hal itu bergantung pada atau ditentukan oleh kadar

sastra yang terkandung di dalamnya. Atas dasar itu, sering dibedakan karya sastra yang kadarnya tinggi dari karya sastra yang kadarnya "biasa-biasa" saja karena lebih banyak atau lebih menonjol unsur hiburannya. Jenis yang disebut terakhir ini lazim diberi label atau cap sastra pop yang biasanya terdapat di dalam majalah-majalah yang isinya memang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat hiburan. Karena bagaimanapun pada niat seseorang untuk membaca karya sastra itu pasti tersirat keinginan untuk mengisi waktu luang sambil mencari hiburan, maka yang pada umumnya digemari oleh masyarakat luas untuk dibaca ialah karya sastra pop itu. Oleh karena itu, kalangan pembaca sastra pop jumlahnya jauh lebih banyak daripada golongan pembaca yang dapat menikmati karya sastra yang kadarnya tinggi.

9. Ketika Pertemuan Sastrawan Nusantara IX dan Pertemuan Sastrawan Indonesia I diselenggarakan pada tanggal 6—11 Desember 1997 di Sumatera Barat, dalam salah satu kesempatan Deliar Noer bahkan menyampaikan informasi bahwa pada tahun 50-an para pejabat tinggi negara dengan suka rela menyisihkan waktunya untuk dapat membaca beberapa karya sastra dalam setahun.
10. Dalam makalah yang berjudul "Sastra Kita: Menghadapi Masa Depan" yang disampaikan pada Seminar Kesusastraan I yang diselenggarakan oleh Mastera (Majelis Sastra Asia Tenggara) pada tanggal 16—17 Februari 1998 di Jakarta, Budi Darma juga menyinggung masalah pembinaan ini. Disebutkannya bahwa upaya itu "bertujuan menanamkan rasa hormat kepada sastra sendiri, memacu kesempatan kepada sastrawan untuk berprestasi, dan memperbaiki pengajaran sastra". Komentar yang ditambahkan ialah bahwa ketiga jenis upaya pembinaan itu "tampak benar-benar terabaikan".
11. Upaya memperkenalkan sastra Indonesia ke dunia luar melalui edisi terjemahan dalam bahasa Inggris itu sebenarnya boleh dikatakan merupakan jalan pintas. Cara lain, yang bukan jalan pintas, adalah membiarkan sastra Indonesia tetap dalam versi aslinya, yakni sastra Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Kalau yang akan ditempuh itu adalah cara yang disebutkan terakhir, maka keterlaksanaan memperkenalkan sastra Indonesia ke dunia luar menjadi amat mustahil karena semua orang asing yang berminat membaca sastra Indonesia harus terlebih dahulu benar-benar menguasai bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bagaimana pun cara yang terbaik setakat ini ialah melalui penerjemahan.

5. BAHASA INDONESIA DAN SASTRA INDONESIA: KESEJAJARAN DALAM PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGANNYA

1. Ketika pada tahun 1928 bahasa Melayu diangkat dan diterima sebagai bahasa persatuan dengan nama baru bahasa Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah karena sastra Melayu, yang sejak saat itu dengan sendirinya diterima dan disebut sastra Indonesia, sudah memiliki tradisi yang kuat. Pertumbuhan dan perkembangannya makin mantap dengan didirikannya Balai Pustaka (1917) yang menerbitkan majalah *Panji Pustaka*. Pembacanya makin meluas di antara kalangan terpelajar pada saat itu. Dapat dicontohkan *Azab dan Sengsara* (1921) oleh Merari Siregar, *Siti Nurbaya* (1922) oleh Marah Rusli, *Salah Pilih* (1928) oleh Nur Sutan Iskandar, dan *Salah Asuhan* (1928) oleh Abdul Muis. Selain itu, apa yang lazim dikenal sebagai sastra Melayu Cina juga berkembang di Batavia, Bogor, Semarang, Malang, Surabaya, dan Medan yang kegiatannya antara lain menerbitkan edisi *Pustaka Roman*.
2. Pada saat bahasa Indonesia sudah berkedudukan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional itu, pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia makin lebih dimantapkan oleh diterbitkannya majalah *Pujangga Baru* (1933). Karya sastra yang terbit setelah Sumpah Pemuda dan sebelum proklamasi kemerdekaan antara lain *Layar Terkembang* (1936) oleh Sutan Takdir Alisyahbana, *Di Bawah Lindungan Kakbah* dan *Tenggelamnya Kapal Van der Wijk* (1938) oleh Hamka, serta *Belenggu* (1940) oleh Armijn Pane.
3. Pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia yang sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu ternyata telah berhasil menumbuhkan dan menggelorakan jiwa dan semangat kebangsaan yang pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan (1945).
4. Dengan kedudukan sebagai bahasa negara (Pasal 36 UUD 1945), bahasa Indonesia berfungsi antara lain sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan sarana pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Pada saat yang sama sastra Indonesia pun menempuh jalur yang searah dengan berbagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam pengertian yang luas. Sementara

itu, daerah asal para sastrawan pun mulai memperlihatkan ciri kebhinnekaan, tidak hanya dari Sumatera (Barat), tetapi hampir dari seluruh Indonesia, terutama dari Pulau Jawa.

5. Selepas tahun 70-an, kehidupan sastra Indonesia berikut dunia kepengarangannya memperlihatkan sisi yang makin multidimensional. Masalah sastra tidak terbatas pada karya sastra dan sastrawannya. Media komunikasi seperti majalah sastra perlu mendapat tempat dan perhatian yang layak. Dalam kenyataannya media ini, baik yang menyangkut jenis dan jumlahnya, sangat tidak sebanding dengan populasi pengarang dan makin melimpahnya karya sastra yang dihasilkan. Wadah yang menghimpun para sastrawan seperti *Komunitas Sastra* sekarang ini ada di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Demikian pula halnya dengan pusat dokumentasi dan pusat kajian sastra, meskipun jumlahnya hanya beberapa. Yang menarik ialah timbulnya berbagai "LSM" dalam dunia sastra. Kelompok ini tampaknya berupaya dengan sungguh-sungguh agar kegiatan-kegiatan yang dirancang dan dilaksanakannya benar-benar dijaga mutunya agar masyarakat diarahkan pada tingkat apresiasi yang diharapkan. Forum Komunikasi tempat para sastrawan bertukar pengalaman, wawasan, dan pengetahuan juga memperlihatkan frekuensi yang menggembirakan, baik forum yang berskala lokal, nasional, maupun regional.
6. Rasanya kita sepakat bahwa sastra Indonesia dan bahasa Indonesia dalam hal pertumbuhan dan perkembangannya selama ini memperlihatkan kesejajaran. Pusat Bahasa dalam konteks yang seperti itu senantiasa memberikan porsi perhatian yang sama, antara lain lewat penyelenggaraan Bulan Bahasa dan Sastra.

V. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH

1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN BAHASA SUNDA*

Pengantar

Masalah kebahasaan di Indonesia tidak hanya berkenaan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, tetapi juga dengan bahasa asing. Ketiga jenis bahasa itu di dalam kenyataan pemakaiannya memperlihatkan ciri yang, dalam batas-batas tertentu, saling mempengaruhi. Dalam kontak bahasa seperti itu, bahasa yang 'lemah' akan dipengaruhi oleh bahasa yang 'kuat'.¹ Agar proses saling mempengaruhi antarbahasa itu tidak memberikan dampak yang merugikan bagi salah satu bahasa, terutama bagi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, maka perlu ditetapkan secara tegas fungsi setiap bahasa yang bersangkutan sesuai dengan kedudukannya.²

Atas dasar itu, kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa di Indonesia seyogianya diupayakan dengan memperhatikan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing tersebut yang tujuannya ialah memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing. Upaya pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut masalah bahasanya, tetapi juga masalah sastranya karena sastra merupakan faktor penunjang perkembangan bahasa dan kebudayaan yang bersangkutan. Dalam pengertiannya yang lebih luas pembinaan dan pengembangan bahasa juga bahkan dapat dikaitkan dengan bidang pengajaran. Akan tetapi, masalah pengajaran ini tidak akan secara khusus dibicarakan.

Seperti yang tercerminkan dalam judul makalah ini, yang akan dipaparkan berikut ini ialah masalah pembinaan dan pengembangan bahasa sehubungan dengan bahasa Sunda sebagai salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia dilihat dari jumlah penuturnya. Uraian mengenai hal itu dikemukakan berdasarkan keterkaitannya, antara lain, dengan latar belakang pendidikan dan tingkat kemampuan membaca dan menulis huruf Latin, dua hal yang diasumsikan mempunyai korelasi yang tinggi dengan tingkat kemampuan berbahasa seseorang.

* Makalah Kongres Bahasa Sunda Tahun 1993, Bandung, 26–30 Desember 1993

Kedudukan dan Fungsi Bahasa

a. Bahasa Indonesia

Butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928 mengangkat bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara yang berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan, (3) bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (4) bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

b. Bahasa Daerah

Sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, bahasa-bahasa di Indonesia seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Batak berkedudukan sebagai bahasa daerah dan merupakan unsur kebudayaan nasional. Dalam kedudukannya yang demikian, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah.

Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

c. Bahasa Asing

Bahasa-bahasa di Indonesia yang bukan bahasa Indonesia dan tidak tergolong sebagai bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa sejumlah bahasa asing diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pada tingkat tertentu. Bahasa-bahasa yang berkedudukan sebagai bahasa asing itu berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa, (2) alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan (3) alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional.

Pembinaan Bahasa

Pembinaan bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang berkenaan dengan usaha membudidayakan pemakaian bahasa agar para pemakai bahasa Indonesia memiliki sikap positif yang mencakup tiga unsur, yaitu kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, dan kesadaran akan norma bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia itu dilakukan karena terdapat ketakpadanan di dalam perilaku kebahasaan para penuturnya, baik secara perseorangan maupun secara kelompok.

Sehubungan dengan hal itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 menyebutkan bahwa pembinaan bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan untuk (1) mempertinggi mutu pemakaian, (2) meningkatkan sikap positif, dan (3) mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Penerapan dan penggunaannya perlu terus ditingkatkan dan diperluas sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pembinaan bahasa daerah, baik sebagai salah satu sarana pendidikan dini dan landasan pengembangan bahasa Indonesia, maupun sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional dan alat perhubungan dalam lingkungan masyarakat daerah, perlu dilaksanakan seiring dengan pembinaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, selain melestarikan sikap positif terhadap bahasa daerah, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, pembinaan bahasa daerah juga bertujuan memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka tetap memelihara, menghormati, dan menggunakan bahasa daerah dalam situasi dan konteks pemakaian yang tepat.

Berbeda dari pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, pembinaan bahasa asing harus diartikan sebagai pembinaan terhadap pemakaian bahasa asing agar peningkatan penguasaan bahasa asing di Indonesia ditujukan untuk (1) memperluas cakrawala berpikir, (2) memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (3) meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan terhadap bahasa asing di Indonesia hendaknya diupayakan agar kegiatan itu tidak mengorbankan sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Upaya pembinaan bahasa, terutama pembinaan bahasa Indonesia, menghadapi berbagai macam kendala, seperti (1) perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah, (2) tingkat keniraksaraan penduduk yang masih cukup tinggi, (3) kelangkaan penutur anutan yang dapat diteladani, (4) adanya bahasa asing yang bergengsi sosial di dalam masyarakat, dan (5) kurang adanya motivasi untuk meningkatkan penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia.

Kendala lainnya berhubungan dengan perubahan dan perkembangan struktur sosial yang, terutama di daerah perkotaan, cenderung memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi pembinaan bahasa daerah. Oleh

karena itu, perlu diupayakan agar pembinaan bahasa daerah dilakukan atas dasar "semangat" yang saling menunjang dengan pembinaan bahasa Indonesia. Sementara itu, pemakaian bahasa asing di Indonesia mengakibatkan timbulnya kendala yang cukup serius bagi upaya pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Untuk itu, perlu disadari sungguh-sungguh bahwa penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, jangan sampai menggeser kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, apalagi mengambil alih fungsinya.

Sehubungan dengan perbedaan bahasa ibu atau bahasa daerah yang dikemukakan di atas, perlu disimak bahasa Indonesia dan sejumlah bahasa daerah berikut jumlah para penuturnya, seperti yang tercantum dalam Tabel 1 berikut. Dengan membandingkan hasil sensus penduduk 1980 dengan hasil sensus penduduk 1990, tampak bahwa selain bahasa Indonesia, masih ada dua bahasa daerah yang memperlihatkan peningkatan jumlah penuturnya, yakni bahasa Sunda dan bahasa Banjar. Sementara itu, semua bahasa daerah yang lain, terutama bahasa Jawa, memperlihatkan jumlah penutur yang menurun.

Tabel 1
Bahasa-Bahasa di Indonesia dan Jumlah Penuturnya

No.	Nama Bahasa	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penutur	%	Jumlah Penutur	%
1.	Indonesia	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
2.	Jawa	59.357.040	40,44	60.267.461	38,08
3.	Sunda	22.110.403	15,06	24.155.962	15,26
4.	Madura	6.913.977	4,71	6.792.447	4,29
5.	Batak	3.106.970	2,12	3.120.047	1,97
6.	Minang	3.545.928	2,42	3.527.726	2,23
7.	Bali	2.481.249	1,69	2.589.256	1,64
8.	Bugis	3.322.192	2,26	3.228.742	2,04
9.	Banjar	1.661.792	1,13	2.755.337	1,74
10.	Lainnya	25.653.378	17,48	27.070.883	17,11
11.	Tak terjawab	1.118.235	0,76	712.629	0,45
	Jumlah	146.776.473	100,00	158.262.639	100,00

Penutur bahasa Sunda yang berjumlah 22.110.403 orang menurut Sensus 1980 dan yang kemudian meningkat menjadi 24.155.962 orang menurut Sensus 1990 itu tersebar di seluruh Indonesia. Tentu saja mayoritas bertempat tinggal di Jawa Barat, sementara Jawa Tengah, Lampung, dan DKI Jakarta merupakan tiga provinsi (di luar Jawa Barat) dengan penutur bahasa Sunda terbanyak dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Berdasarkan perbandingan antara hasil Sensus 1980 dan Sensus 1990, seperti yang tampak pada Tabel 2, jumlah penutur bahasa Sunda di Nusa Tenggara Barat dan terutama di Nusa Tenggara Timur, misalnya, menunjukkan penurunan yang boleh dikatakan sangat tajam. Sebaliknya, jumlah penutur bahasa Sunda di Irian Jaya, Riau, dan Kalimantan Tengah, misalnya, memperlihatkan peningkatan yang cukup berlipat ganda. Masalah ini perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh hal itu berkorelasi dengan faktor kekuasaan bahasa (*language power*) yang dimiliki bahasa Sunda dilihat, antara lain, dari segi demografi, ekonomi, serta mobilitas dan persebaran penduduk (lihat Catatan 1).

TABEL 2
PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN
JUMLAH PENUTUR BAHASA SUNDA

No.	Provinsi	Sensus 1980	Sensus 1990	Keterangan
1.	Daerah Istimewa Aceh	356	6.281	+5.925
2.	Sumatra Utara	9.955	8.480	-1.475
3.	Sumatra Barat	489	2.940	+2.451
4.	Riau	2.813	29.226	+26.413
5.	Jambi	10.052	31.531	+21.479
6.	Sumatra Selatan	55.291	71.051	+15.760
7.	Bengkulu	12.276	34.585	+22.309
8.	Lampung	487.701	514.749	+27.048
9.	DKI Jakarta	151.765	93.171	-58.594
10.	Jawa Barat	20.858.324	22.746.859	+1.888.535
13.	Jawa Timur	8.955	7.243	-1.712

No.	Provinsi	Sensus 1980	Sensus 1990	Keterangan
14.	Bali	2.277	1.434	-843
15.	Nusa Tenggara Barat	333	153	-180
16.	Nusa Tenggara Timur	152	12	-140
17.	Kalimantan Barat	9.374	14.755	+5.381
18.	Kalimantan Tengah	831	9.710	+8.879
19.	Kalimantan Selatan	6.621	12.434	+5.813
20.	Kalimantan Timur	1.220	11.309	+10.089
21.	Sulawesi Utara	275	878	+603
22.	Sulawesi Tengah	2.310	5.342	+3.032
23.	Sulawesi Selatan	348	1.589	+1.241
24.	Sulawesi Tenggara	6.978	15.593	+8.615
25.	Maluku	130	597	+467
26.	Irian Jaya	58	3.444	+3.386
27.	Timor Timur	-	232	-
	Jumlah	22.110.403	24.155.962	+2.045.559

Pengembangan Bahasa

Berbeda dari pembinaan bahasa yang menempatkan para pemakai bahasa sebagai sasarannya, yang menjadi sasaran pada pengembangan bahasa ialah bahasanya. Atas dasar itu, pengembangan bahasa bertujuan meningkatkan kelengkapan perangkat bahasa yang bersangkutan, seperti tata bahasa, tata ejaan, dan kosakata, agar bahasa itu benar-benar dapat digunakan sebagai sarana komunikasi umum, sarana komunikasi pemerintahan, sarana pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana pendukung kebudayaan (Halim, 1993).³

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah melakukan berbagai upaya dan kegiatan dengan porsi dan intensitas yang boleh dikatakan hampir sama antara pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa. Akan tetapi, hasil yang dicapai dalam kedua bidang itu tidaklah sama. Hasil dalam bidang pengembangan cukup menggembirakan dan sudah memadai. Bahasa Indonesia sudah memiliki tata ejaan, tata bahasa, kamus, dan peristilahan.⁴ Untuk bidang

pembinaan bahasa kita masih harus menangguk dan menyimpan kesan optimistis seperti itu, entah sampai kapan, karena sikap positif terhadap bahasa Indonesia dari sebagian besar para pemakainya masih jauh dari yang diharapkan.

Kegiatan pengembangan juga meliputi pengkajian atau penelitian. Untuk bahasa dan sastra Sunda, termasuk pengajarannya, menurut catatan yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, penelitian yang dilakukan sejak tahun 70-an telah menghasilkan laporan penelitian sebanyak 79 buah dan 32 di antaranya telah diterbitkan.⁵

Keadaan Penutur

Khusus untuk jumlah penutur bahasa Indonesia dan bahasa Sunda, Tabel 1 memperlihatkan adanya kenaikan dari hasil Sensus 1980 ke Sensus 1990, yaitu sebanyak 3,26% untuk bahasa Indonesia, dan 0,20% untuk bahasa Sunda. Kalau kedua bahasa itu diperbandingkan berdasarkan jumlah penuturnya, bahasa Sunda tetap berada di atas bahasa Indonesia. Menurut Sensus 1980, jumlah penutur bahasa Sunda lebih banyak 3,13% daripada penutur bahasa Indonesia, sedangkan menurut Sensus 1990, perbedaan itu berkurang menjadi 0,07% saja. Berdasarkan perkembangan itu, dapatlah diramalkan bahwa hasil sensus penduduk yang akan datang akan memperlihatkan jumlah penutur bahasa Indonesia yang melampaui atau lebih banyak daripada jumlah penutur bahasa Sunda.

Apabila yang diperbandingkan itu didasarkan pada pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, menurut persentase secara nasional dan persentase di Jawa Barat, terlihat bahwa angka secara nasional masih lebih tinggi daripada angka Jawa Barat, meskipun tidak berbeda jauh, yaitu sebanyak 1,84% menurut Sensus 1980 dan 0,11% menurut Sensus 1990.

Kalau disimak angka-angka pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut, kemampuan menggunakan bahasa Indonesia tidak terbatas hanya pada Kelompok I karena penduduk yang termasuk Kelompok II pun memahami dan dapat juga menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, berdasarkan laporan hasil Sensus 1980 dan 1990 itu, sama sekali tidak ada petunjuk bahwa tingkat penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia Kelompok I lebih baik daripada Kelompok II; bahkan mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu untuk sebagian penduduk yang termasuk Kelompok II, tingkat penguasaan dan mutu pemakaian bahasa Indonesiannya lebih baik daripada rata-rata penduduk yang termasuk Kelompok I. Oleh karena itu, untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia yang sudah dapat berbahasa Indonesia, angka pada Kelompok II harus ditambahkan pada angka Kelompok I. Hasilnya mengisyaratkan bahwa angka Jawa Barat lebih tinggi daripada angka nasional, yakni sebanyak 0,73% menurut Sensus 1980 dan 1% menurut Sensus 1990.

Angka-angka yang disebutkan terakhir itu ternyata berkorelasi dengan angka penduduk yang masih buta bahasa Indonesia. Dalam hal jumlah penduduk yang masih buta bahasa Indonesia itu, angka nasional lebih tinggi daripada angka Jawa Barat, yaitu 0,43% menurut Sensus 1980 dan 1% menurut Sensus 1990, seperti yang dapat diamati pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.

Tabel 3
Penduduk Indonesia Usia 5 Tahun ke Atas
menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Kelompok	Sensus 1980		Sensus 1990	
	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
I	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
II	71.758.926	48,89	107.066.141	67,65
III	57.512.244	39,18	27.154.488	17,16
Jumlah	146.776.473	100,00	158.262.639	100,00

Keterangan

- Kelompok I : menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
 Kelompok II : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat memahami dan menggunakannya.
 Kelompok III : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya.

Tabel 4
Penduduk Jawa Barat Usia 5 Tahun ke Atas
menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Kelompok	Sensus 1980		Sensus 1990	
	Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
I	2.769.685	10,09	4.690.654	15,08
II	14.042.165	51,16	21.390.927	68,76
III	10.639.99	38,75	5.029.529	16,16
Jumlah	27.449.840	100,00	31.111.110	100,00

Keterangan

- Kelompok I : menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari.
Kelompok II : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi dapat memahami dan menggunakannya.
Kelompok III : tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari karena tidak memahaminya.

Seperti yang telah disinggung di atas, ada dua faktor yang menunjang tingkat kemampuan dan keterampilan berbahasa seseorang, yaitu kepandaian membaca dan menulis huruf Latin dan tingkat pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal kepandaian membaca dan menulis huruf Latin, angka persentase untuk Jawa Barat lebih tinggi daripada angka persentase untuk seluruh Indonesia, yaitu sebanyak 3,11% menurut Sensus 1980 dan 2,94% menurut Sensus 1990. Demikian pula halnya dengan kepandaian membaca dan menulis huruf yang lain (yang bukan aksara Latin), angka Jawa Barat masih lebih baik daripada angka nasional, yaitu sebanyak 0,69% menurut Sensus 1980 dan 0,28% menurut Sensus 1990.

Sebagai akibat dari kedua hal itu, dalam hal jumlah yang masih buta aksara, angka Jawa Barat lebih rendah daripada angka nasional, yakni 3,86% menurut Sensus 1980 dan 3,22% menurut Sensus 1990. Untuk ketiga hal itu, periksa Tabel 5 dan Tabel 6 berikut.

Tabel 5
Penduduk Indonesia menurut Kepandaian Membaca dan Menulis

No.	Membaca dan Menulis	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Huruf Latin	72.670.883	69,64	111.365.827	82,47
2.	Huruf Lain	1.514.493	1,45	2.145.277	1,59
3.	Buta Aksara	30.096.559	28,84	21.494.117	15,92
4.	Tak Terjawab	70.635	0,07	34.360	0,02
Jumlah		104.352.570	100,00	135.039.581	100,00

Tabel 6
Penduduk Jawa Barat menurut Kepandaian Membaca dan Menulis

No.	Membaca dan Menulis	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Huruf Latin	13.904.896	72,75	22.532.215	85,41
2.	Huruf Lain	409.303	2,14	493.954	1,87
3.	Buta Aksara	4.774.318	24,98	3.351.116	12,70
4.	Tak Terjawab	24.189	0,13	5.157	0,02
Jumlah		19.112.706	100,00	26.382.442	100,00

Selain kepandaian membaca dan menulis huruf Latin, tingkat pendidikan juga diasumsikan sebagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kemampuan dan mutu pemakaian bahasa seseorang. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990, sebagaimana yang berturut-turut terlihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 berikut, sampai dengan tingkat pendidikan sekolah dasar angka Jawa Barat masih lebih baik daripada angka nasional. Akan tetapi, mulai tingkat pendidikan SLTP sampai dengan universitas, angka persentase untuk Jawa Barat menjadi lebih rendah daripada angka persentase untuk seluruh Indonesia.

Kalau hal itu dihubungkan dengan dasar pemikiran bahwa makin tingginya tingkat pendidikan seseorang akan mengakibatkan makin meningkatnya kemampuan dan mutu pemakaian bahasa yang bersangkutan, maka pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab ialah: apakah tingkat kemampuan dan mutu pemakaian bahasa Indonesia dari rata-rata penduduk Indonesia pada umumnya lebih baik daripada rata-rata penduduk Jawa Barat?

Meskipun dalam makalah ini pertanyaan seperti itu tidak akan dijawab karena memerlukan penelitian khusus yang lebih seksama, dasar pemikiran tersebut di atas masih harus tetap kita jadikan patokan sambil, tentu saja, mengecualikan kasus khusus yang lebih bersifat perseorangan.

Tabel 7
Tingkat Pendidikan
Penduduk Indonesia dan Jawa Barat menurut Sensus 1980

No.	Pendidikan	Indonesia		Jawa Barat	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Tidak tamat SD	42.772.729	56,57	8.274.771	57,95
2.	SD	21.537.840	28,49	4.302.457	30,14
3.	SLTP	5.164.454	6,84	753.622	5,28
4.	SLTP	1.072.007	1,42	169.303	1,19
5.	SLTA	2.263.224	3,00	349.315	2,45
6.	SLTA	2.273.951	3,01	354.329	2,49
7.	Akademi	280.241	0,37	38.475	0,27
8.	Universitas	227.932	0,31	31.720	0,23
Jumlah		75.592.378	100,00	14.273.998	100,00

Tabel 8
Tingkat Pendidikan
Penduduk Indonesia dan Jawa Barat menurut Sensus 1990

No.	Pendidikan	Indonesia		Jawa Barat	
		Jumlah Penduduk	%	Jumlah Penduduk	%
1.	Belum Pernah Sekolah	21.952.7919	16,26	3.598.430	13,64
2.	Tidak/Belum Tamat SD	42.480.415	31,46	8.624.714	32,69
3.	SD	40.996.434	30,36	9.107.570	34,52
4.	SLTP Umum	13.392.558	9,92	2.209.112	8,37
5.	SLTP Kejuruan	1.088.539	0,80	186.207	0,71
6.	SLTA Umum	7.882.905	5,84	1.381.620	5,24
7.	SLTA Kejuruan	5.204.538	3,85	917.657	3,48

8.	Diploma I/II	352.505	0,26	64.669	0,24
9.	Akademi/Diploma III	700.801	0,52	126.431	0,48
10.	Universitas	986.699	0,73	165.676	0,63
Jumlah		135.038.185	100,00	26.382.116	100,00

Penutup

Sebagai bahasa dengan jumlah penutur terbesar sesudah bahasa Jawa dan sebelum bahasa Indonesia (lihat Tabel 1), pembinaan dan pengembangan bahasa Sunda benar-benar harus dilakukan secara berencana, terarah, dan bersungguh-sungguh. Kekuatan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah di Indonesia tidak hanya terletak pada jumlah penuturnya yang banyak, tetapi juga ditentukan oleh dua faktor lainnya, yaitu digunakannya bahasa Sunda dalam bentuk tulisan (antara lain dalam karya sastra dan media massa cetak) pada satu pihak dan digunakannya bahasa Sunda sebagai sarana pendukung utama kehidupan sosial budaya kelompok etnis yang bersangkutan pada pihak lain.

Agar kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Sunda itu dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tengah mengupayakan didirikannya Balai Penelitian Bahasa Provinsi Jawa Barat. Seberapa jauh keinginan dan niat itu dapat diwujudkan bergantung bukan semata-mata pada dana, melainkan juga pada dukungan dari berbagai pihak, antara lain dan terutama dukungan moral dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sendiri.

Akhirnya, Kongres Bahasa Indonesia VI yang baru lalu menganggap bahwa pengertian "pemeliharaan bahasa daerah", sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945, perlu dirumuskan lebih lanjut, terutama sehubungan dengan tindakan operasionalnya. Selain itu, dalam kaitannya dengan bahasa dan sastra daerah (termasuk bahasa dan sastra Sunda", Kongres Bahasa Indonesia VI juga merumuskan lima butir putusan sebagai berikut.

- a. Sebagai upaya pengadaan bahan sastra klasik Nusantara, perlu disusun buku ajar sastra Nusantara untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah dengan:
 - (a) mengadakan seleksi bahan bacaan sastra dan budaya, sesuai dengan penilaian kelompok pendukung budaya yang bersangkutan;
 - (b) menyusun, menyadur, menerjemahkan, menjelaskan, dan memberi catatan pada bahan, sesuai dengan jenis, jenjang, dan tingkat pendidikan peserta didik.
- b. Perlu diwujudkan kebijaksanaan yang mewajibkan bahan-bahan sastra dan

kebudayaan klasik Nusantara sebagai bagian dari kurikulum nasional.

- c. Perlu diusahakan agar setiap daerah memiliki majalah budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang diusahakan oleh Pemerintah dengan imbalan yang memadai bagi pengarang.
- d. Sastra klasik Nusantara perlu diterjemahkan, disadur, dan diterbitkan secara teratur dengan memanfaatkan berbagai media elektronik dan cetak yang memiliki jangkauan luas.
- e. Perpustakaan Pusat/daerah perlu dijadikan sarana aktif untuk promosi bacaan, khususnya bagi generasi muda. Fungsinya sebagai pusat penyimpanan hasil penerbitan harus disertai dengan fungsi sebagai pusat penyebaran.

Catatan:

- 1. Kuat dan lemahnya suatu bahasa ditentukan oleh berbagai hal. Menurut Mackey (1973), ada tiga faktor yang menentukan kekuatan suatu bahasa, yaitu faktor kekuasaan bahasa (*language power*), faktor daya tarik bahasa (*language attraction*), dan faktor daya tekan bahasa (*language pressure*). Kekuasaan bahasa berhubungan dengan masalah demografi, penyebaran, mobilitas, ekonomi, ideologi, dan kebudayaan. Daya tarik bahasa berkaitan dengan daya tarik status, teritorial, dan interlingual; sedangkan ciri perilaku (*behaviorial traits*) dan akulturasi konsep (*concept acculturation*) merupakan kriteria untuk mengetahui seberapa jauh daya tekan yang dimiliki suatu bahasa.
- 2. Berdasarkan rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975, kedudukan bahasa menggambarkan status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan. Sementara itu, fungsi bahasa adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya.
- 3. Dalam hal tertentu, upaya pengembangan bahasa itu dapat juga disebut upaya pembakuan bahasa. Kalau dihubungkan dengan bahasa Indonesia ragam lisan dan ragam tulis, maka upaya pembakuan bahasa itu diprioritaskan terlebih dahulu pada bahasa Indonesia ragam tulis. Akibatnya, pembakuan bahasa untuk bahasa Indonesia ragam lisan, seperti masalah lafal, merupakan lahan garapan yang masih menunggu perhatian dari para ahli bahasa.
- 4. Hasil upaya pengembangan bahasa yang telah dicapai, antara lain, berupa *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Selain itu, melalui wadah kerja sama kebahasaan antarnegara Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-

Malaysia (Mabbim), telah dihasilkan sejumlah peristilahan untuk berbagai bidang ilmu, bahkan beberapa di antaranya telah diolah lebih lanjut menjadi kamus istilah.

5. a. Hasil penelitian yang sudah diterbitkan adalah sebagai berikut.
 - 1) *Puisi Sunda Selepas Perang Dunia II*
 - 2) *Sastra Lisan Sunda: Cerita Karuhun, Kajajaden, dan Dedemit*
 - 3) *Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Ciamis*
 - 4) *Raden Memed Sastrahadiprawira*
 - 5) *Puisi Sunda Selepas Perang Dunia Kedua*
 - 6) *Yuhana Sastrawan Sunda*
 - 7) *Puisi Guguritan Sunda*
 - 8) *Kemampuan Berbahasa Sunda Murid SD Kelas VI di Jawa Barat: Membaca dan Menulis*
 - 9) *Kata Tugas Bahasa Sunda*
 - 10) *Sistem Perulangan Bahasa Sunda*
 - 11) *Geografi Dialek Sunda di Kabupaten Serang*
 - 12) *Kemampuan Berbahasa Sunda Murid Kelas VI Sekolah Dasar Jawa Barat: Mendengarkan dan Berbicara*
 - 13) *Struktur Bahasa Sunda Pesisir Utara Jawa Barat*
 - 14) *Geografi Dialek Sunda Kabupaten Bogor*
 - 15) *Kosa Kata Bahasa Sunda dalam Media Massa*
 - 16) *Morfologi Kata Benda Bahasa Sunda*
 - 17) *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Sunda di Jawa Barat*
 - 18) *Sistem Pemajemukan Bahasa Sunda*
 - 19) *Struktur Bahasa Sunda Dialek Bogor*
 - 20) *Biografi dan Karya Pujangga Haji Hasan Mustafa*
 - 21) *Naskah Sunda Lama Kelompok Babad*
 - 22) *Perkembangan Bahasa Sunda Sesudah Perang Dunia II*
 - 23) *Naskah Sunda Lama di Kabupaten Sumedang*
 - 24) *Puisi Pupujian dalam Bahasa Sunda*
 - 25) *Puisi Sawyer Bahasa Sunda*
 - 26) *Struktur Bahasa Sunda Dialek Tangerang*
 - 27) *Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Karawang*
 - 28) *Refleks Fonem Proto-Austronesia Bahasa Sunda*
 - 29) *Sebuah Naskah Sastra-Sejarah Karya Kelompok Kerja di Bawah Tanggung Jawab Pangeran Wangsakerta*
 - 30) *Wawacan Ogim Amarasakti*
 - 31) *Tata Bahasa Sunda*
 - 32) *Panggung Karaton: Sebuah Cerita Rakyat Sunda*

- b. Laporan Penelitian yang belum diterbitkan adalah sebagai berikut.
- 1) Struktur Dialek Sunda Priangan
 - 2) Sastra Lisan Sunda
 - 3) Unda-Usuk Sunda
 - 4) Struktur Bahasa Sunda Dialek Banten
 - 5) Morfologi dan Sintaksis Bahasa Sunda
 - 6) Dialek Geografi Bahasa Sunda di Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah
 - 7) Sastrawan Sunda M.A. Salmun
 - 8) Wawasan dalam Sastra Sunda
 - 9) Biografi dan Sastrawan Sunda 1945–1965
 - 10) Struktur Dialek Sunda di Perbatasan Timur Jawa Barat
 - 11) Geografi Dialek Bahasa Sunda di Daerah Cianjur
 - 12) Bahan Pelajaran Bahasa Sunda untuk Sekolah Dasar
 - 13) Perkembangan Novel/Roman Sunda Modern
 - 14) Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Sunda
 - 15) Struktur Cerita Pantun Sunda
 - 16) Naskah Sunda Lama
 - 17) Biografi dan Karya H. Hasan Mustapa
 - 18) Biografi dan Karya Sastrawan Sunda 1966–1980
 - 19) Naskah Sunda Lama Kelompok Cerita
 - 20) Geografi Dialek Sunda Kabupaten Subang
 - 21) Pelajaran Bahasa Sunda Murid SMP
 - 22) Pola Kalimat Bahasa Sunda
 - 23) Struktur Bahasa Sunda Dialek Cirebon
 - 24) Geografi Dialek Sunda Kabupaten Tasikmalaya
 - 25) Kosa Kata Dialek Sunda Bandung
 - 26) Struktur Bahasa Sunda Dialek Cianjur
 - 27) Naskah Sunda Lama yang terdapat di Kabupaten/Kotamadya Bandung
 - 28) Geografi Dialek Bahasa Sunda di Kabupaten Purwakarta
 - 29) Struktur Bahasa Sunda Dialek Pandeglang
 - 30) Interferensi Gramatikal Bahasa Indonesia dalam Bahasa Sunda
 - 31) Kosa Kata Bahasa Sunda Dialek Bekasi
 - 32) Morfologi Kata Sifat dan Kata Bilangan Bahasa Sunda
 - 33) Struktur Sastra Lisan Drama Bahasa Sunda
 - 34) Kemampuan Berbahasa Sunda (Berbicara dan Menulis) Murid SMTP di Jawa Barat
 - 35) Biografi Karya Sastrawan M. Ambri
 - 36) Naskah Sunda Lama di Kabupaten Cianjur
 - 37) Geografi Dialek Sunda di Kabupaten Pandeglang

- 38) Kosa Kata Bahasa Sunda Dialek Banten
- 39) Pengajaran Bahasa Sunda di SD di Jawa Barat
- 40) Bahasa Sunda Kampung Naga
- 41) Puisi Sindiran Bahasa Sunda
- 42) Naskah Sunda Lama di Kabupaten Garut
- 43) Fonologi Bahasa Sunda Baku
- 44) Nilai Budaya dalam Sastra Nusantara di Jawa Barat
- 45) Sistem Sapaan dalam Bahasa Sunda
- 46) Akulturasi Bahasa Sunda dan Non-Sunda di Daerah Pariwisata
Pangandaran Jawa Barat
- 47) Bahasa dan Sastra Sunda dalam Media Massa Cetak dan
Elektronik

2. PEMBINAAN SASTRA DAERAH ^{*)}

Pengantar

Pengertian sastra daerah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi bentuk dan dari sisi isi. Dari sisi bentuk, sastra daerah ialah (karya) sastra yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa daerah sebagai medium. Dengan pengertian itu, apa saja yang dinyatakan melalui pemakaian bahasa daerah dan hasilnya merupakan karya sastra dapat digolongkan sebagai sastra daerah. Apabila (semata-mata) dilihat dari kandungan isinya, penamaan sastra daerah itu akan ditentukan oleh kekhususan ciri yang diungkapkannya, yaitu ihwal yang berkaitan erat, misalnya, dengan perilaku, adat-istiadat, kebiasaan, dan pandangan hidup masyarakat penutur (asli) bahasa daerah yang bersangkutan. Dalam pengertian yang disebutkan terakhir, bahasa apa yang digunakan sebagai medium boleh jadi akan dianggap sebagai faktor yang tidak terlalu menentukan.¹

Sehubungan dengan hal itu, pengertian sastra daerah yang dimaksudkan dalam tulisan ini merupakan semacam "penggabungan" dari kedua pandangan di atas, yaitu menjadi (karya) sastra dengan bahasa daerah sebagai medium yang mengungkapkan segala hal yang mencerminkan perilaku, adat-istiadat, kebiasaan, dan pandangan hidup kelompok masyarakat pemakai bahasa daerah yang bersangkutan.² Oleh karena itu, karya sastra dalam bahasa daerah yang isinya merupakan hasil penyaduran atau penerjemahan, misalnya, tidaklah dapat digolongkan sebagai (karya) sastra daerah.

Sastra daerah di Indonesia merupakan salah satu perwujudan kebudayaan daerah dan kebudayaan daerah pada gilirannya merupakan pendukung atau bagian dari kebudayaan nasional. Mengenai hal itu penjelasan Pasal 32 UUD 1945 menyebutkan bahwa "kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa".

Kehidupan dan perkembangan sastra daerah, seperti halnya sastra Indonesia itu sendiri, secara umum dapat dikatakan belum begitu menggembirakan. Oleh karena itu, upaya pembinaan yang dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki tujuan ganda yang sangat erat saling berkaitan, yaitu (1) menciptakan iklim yang memungkinkan sastra daerah dapat hidup dan berkembang dan (2) menumbuhkan dan memelihara apresiasi masyarakat terhadap sastra daerah.³ Dalam hubungan itu, uraian singkat berikut ini mencoba mengemukakan beberapa hal yang berkenaan dengan pembinaan sastra daerah.

Potensi Pembinaan Sastra Daerah

Sering dikemukakan sebagai ungkapan bahwa sastra adalah mahkota bahasa.⁴ Dalam hubungannya dengan sastra daerah, ungkapan itu berubah menjadi: sastra daerah adalah mahkota bahasa daerah. Hal itu berarti bahwa kemantapan suatu bahasa daerah sebagai sarana komunikasi akan menjadi lebih bermakna kalau ditunjang pula oleh kemantapan pertumbuhan dan perkembangan sastranya. Tingkat kehidupan sastra daerah yang demikian akan dengan sendirinya dapat lebih memantapkan bahasa daerah yang bersangkutan dalam memenuhi fungsinya, bukan sekadar sebagai alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah, melainkan terlebih-lebih sebagai lambang kebanggaan daerah dan lambang identitas daerah.

Selain oleh sastranya, tingkat kemantapan suatu bahasa daerah di Indonesia juga ditentukan oleh jumlah penuturnya. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, terdapat delapan bahasa daerah yang berdasarkan jumlah penuturnya dapat diurutkan sebagai berikut.⁵

No.	Nama Bahasa	Jumlah Penutur	Prosentase
1.	Bahasa Jawa	60.267.461	38,08%
2.	Bahasa Sunda	24.155.962	15,26%
3.	Bahasa Madura	6.792.447	4,29%
4.	Bahasa Minang	3.527.726	2,23%
5.	Bahasa Bugis	3.228.742	2,04%
6.	Bahasa Batak	3.120.047	1,97%
7.	Bahasa Banjar	2.755.337	1,74%
8.	Bahasa Bali	2.589.256	1,64%

Kehidupan sastra daerah berbanding sejajar dengan seberapa jauh bahasa daerah yang bersangkutan memiliki dan memanfaatkan tradisi tulis. Pada saat sekarang tradisi tulis itu merujuk pada huruf Latin. Ke dalam hal itu tentu tidak termasuk sastra lisannya. Jenis karya sastra ini pun, untuk keperluan dokumentasi dan bahan penelitian lebih lanjut, perlu pula ditranskripsikan (ke dalam huruf Latin). Selain itu, patut pula diingat pemakaian dan pemanfaatan aksara daerah dalam kaitannya dengan sastra daerah yang klasik.

Sejauh menyangkut bahasa daerah sebagai medium sastra daerah, para penutur bahasa-bahasa daerah yang disebutkan di atas, di samping para penutur bahasa-bahasa daerah lainnya yang tidak tercantum pada daftar tersebut, jelas merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembinaan sastra daerah. Dalam hal jumlah penutur bahasa daerah itu di-

hubungkan dengan kemampuannya membaca dan menulis, potensi untuk keperluan pembinaan sastra daerah itu menjadi makin kuat.

Apabila diasumsikan bahwa pada saat sekarang kehidupan dan perkembangan sastra-sastra daerah di Indonesia menggunakan dan memanfaatkan huruf Latin, maka kemampuan membaca dan menulis dalam konteks pembinaan sastra daerah itu harus mengacu pada kemampuan membaca dan menulis aksara Latin. Catatan mengenai hal itu memperlihatkan bahwa 82,47% penduduk Indonesia memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf Latin.⁶

Meskipun tidak dapat dinyatakan secara tepat bahwa ada korelasi antara minat dan perhatian seseorang terhadap sastra dengan latar belakang pendidikannya, perlu pula dikemukakan bahwa latar belakang pendidikan seseorang secara tidak langsung akan berpengaruh pada seberapa jauh minat dan perhatiannya terhadap sastra. Menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, penduduk Indonesia yang sama sekali belum pernah bersekolah mencapai jumlah 21.952.791 orang (16,26%). Adapun mereka yang bersekolah, berdasarkan tingkat pendidikannya, dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Tidak Tamat SD	:	42.480.415	orang	(31,46%)
2. SD	:	40.996.434	orang	(30,36%)
3. SLTP	:	14.481.097	orang	(10,72%)
4. SLTA	:	13.087.443	orang	(9,69%)
5. Akademi dan DI/II/III	:	1.053.306	orang	(0,78%)
6. Universitas	:	986.699	orang	(0,73%)

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah dikatakan ada korelasi dalam hal jumlah antara (1) para penutur kedelapan bahasa daerah tersebut di atas (termasuk penutur bahasa Indonesia; lihat Catatan 5), (2) penduduk Indonesia yang pandai membaca dan menulis huruf Latin, dan (3) penduduk Indonesia yang "sempat bersekolah". Korelasi yang dimaksudkan terlihat pada jumlah yang hampir sama di antara ketiga komponen tersebut, seperti berikut.⁷

(1) Penutur 8 bahasa daerah dan bahasa Indonesia:	84,36%
(2) Penduduk yang menguasai huruf Latin	: 82,47%
(3) Penduduk yang mengalami pendidikan	: 83,74%

Sudah barang tentu hal-hal yang diduga dapat mempengaruhi minat dan perhatian seseorang terhadap sastra daerah itu tidak terbatas pada ketiga komponen yang telah disebutkan di atas. Masih ada faktor-faktor lainnya yang diperkirakan dapat dihubungkan masalah tersebut, antara lain, ketersediaan sarana tempat karya sastra daerah itu dimunculkan, seperti buku, majalah, dan surat kabar. Kemampuan menjangkau sarana yang tersedia itu pun akan dikendalai pula oleh kenyataan yang pada umumnya menggambarkan bahwa kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat kita masih sangat rendah.

Beberapa Kendala

Apa yang disebutkan pada paragraf terakhir di atas memberikan dampak yang sangat tidak menguntungkan bagi upaya pembinaan sastra daerah. Langkanya atau sangat terbatasnya sarana akan mengakibatkan sastra tidak mungkin dapat hidup dan berkembang sebagaimana mestinya. Sementara itu, sangat rendahnya daya beli sebagian besar masyarakat, di samping masih kurangnya minat dan perhatian orang terhadap sastra, akan mengakibatkan tetap tidak memadainya apresiasi yang diberikan kepada sastra. Kesemuanya itu akan mengakibatkan pula timbulnya semacam keengganan pada diri para penulis/sastrawan itu sendiri untuk terus berkarya karena bidang yang ditekuninya itu merupakan profesi yang secara ekonomis tidak bisa diharapkan.

Apresiasi terhadap sastra akan timbul dan terpelihara apabila kita merasa akrab dengan sastra. Kalau merasa akrab dengan sastra, kita akan secara teratur meluangkan waktu dan perhatian kita untuk "menikmati" karya sastra yang sesuai dengan "selera" dan "dunia" kita. Dengan kondisi seperti itu, sastra akan menjadi sesuatu yang kehadirannya diperlukan dalam kehidupan seseorang. Akan tetapi, kenyataan yang kita hadapi sekarang tampaknya tidak demikian. Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mengakibatkan waktu terluang kita dengan mudah disita oleh "informasi dan hiburan" yang disuguhkan lewat media elektronik dalam bentuk radio dan televisi. Dalam hal memperebutkan waktu dan perhatian kita ini, radio dan televisi jelas jauh lebih gesit dan lebih banyak memiliki "kiat" daripada karya sastra. Dalam posisi yang sudah terdesak itu, karya sastra masih menghadapi saingan lain yang tidak kalah "wibawa" dan ketangguhannya dari radio dan televisi, yaitu berbagai terbitan media cetak, seperti majalah, mingguan tabloid, dan surat kabar yang dalam penataan dan penyajiannya memang jauh lebih menarik daripada buku-buku sastra.

Kecenderungan dan arus perubahan semacam itu juga melanda generasi muda kita, termasuk anak-anak usia sekolah. Sebagai akibat dari "listrik masuk desa", misalnya, hal itu tidak saja menyangkut generasi muda yang tinggal di perkotaan, tetapi juga generasi muda di pedesaan. Khusus mengenai generasi muda yang tinggal di perkotaan, ada gejala lain yang perlu dicermati, yaitu makin berkurangnya pengenalan dan pengetahuan mereka terhadap bahasa daerah. Gejala itu bukan semata-mata sebagai akibat dari heterogennya kelompok masyarakat perkotaan, terutama dalam hal keetnisan dan keprofesian, melainkan juga karena tidak digunakannya bahasa daerah di rumah. Hal yang disebutkan terakhir pada umumnya terlihat pada lingkungan rumah tangga yang pasangan suami-istrinya berbeda bahasa ibunya. Kenyataan itu pada satu pihak menyebabkan bertambahnya para pemakai bahasa Indonesia, tetapi pada pihak lain menyebabkan "kerugian" bagi bahasa daerah yang

bersangkutan dan, khususnya, bagi upaya pembinaan sastra daerah itu sendiri.

Apabila pengenalan terhadap sastra daerah itu dikaitkan dengan kegiatan pendidikan formal di sekolah, sering sekali terdengar keluhan yang pada dasarnya mempertanyakan mengapa isi dan cara pengajaran bahasa selama ini boleh dikatakan "kering" sehingga tidak mungkin dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan minat dan perhatian siswa terhadap sastra. Dalam berbagai forum yang secara khusus membahas masalah itu, biasanya dikemukakan usul tentang kurikulum dan pengajarnya, yaitu bahwa alokasi waktu mata pelajaran sastra perlu dibedakan dari mata pelajaran bahasa dan seorang pengajar bahasa tidak dengan sendirinya memiliki kualifikasi sebagai pengajar sastra. Selain itu, juga sering disebut masalah kurang atau tidak tersedianya buku sastra di (perpustakaan) sekolah dan tidak adanya kegiatan ekstra-kurikuler yang menunjang upaya pemupukan minat siswa terhadap sastra.

Di antara berbagai kendala pembinaan sastra yang belum dikemukakan, patut disebut dua hal lagi. Pertama, belum adanya kondisi atau suasana yang menunjang, antara lain dalam bentuk contoh dari, misalnya, guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan pejabat negara.⁸ Contoh dari pihak-pihak tersebut akan sangat berperan dalam upaya "memasyarakatkan sastra". Kedua, keengganan kalangan penerbit untuk turut "berkiprah" dalam kegiatan sastra. Keengganan penerbit ini berkorelasi baik dengan masih kurangnya minat dan perhatian masyarakat kita terhadap sastra maupun dengan masih sangat rendahnya daya beli mereka untuk memiliki terbitan-terbitan sastra, seperti yang telah dikemukakan di atas.

Upaya Pembinaan

Upaya pembinaan haruslah dilakukan atas dasar pandangan bahwa masyarakat pendukung bahasa dan sastra daerah juga merupakan masyarakat pendukung bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu, kedua-duanya perlu kita tempatkan sebagai dua kutub yang saling menunjang dalam suatu ekosistem budaya Indonesia. Yang tidak dapat dielakkan ialah kemungkinan dan kecenderungan lebih cepatnya perkembangan bahasa dan sastra Indonesia daripada perkembangan bahasa dan sastra daerah. Meskipun demikian, perlu diusahakan agar laju perkembangan yang "tidak seimbang" itu jangan sampai merugikan sastra daerah itu sendiri. Itulah sebabnya, upaya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan Pusat Bahasa tidak hanya terbatas pada bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga meliputi bahasa dan sastra daerah.

Untuk menunjang upaya pembinaan sastra daerah itu, Pusat Bahasa telah melakukan 188 penelitian sastra daerah.⁹ Penelitian itu mencakupi sejumlah aspek sastra daerah, termasuk aspek yang terdapat pada sastra lisannya. Selain itu, Pusat Bahasa juga mengadakan berbagai forum/pertemuan yang memungkinkan para ahli, peminat sastra, dan sastrawan dapat bersama-sama

membahas serta bertukar pikiran dan pengalaman tentang persoalan yang menyangkut sastra daerah.¹⁰

Sejak 1989, Pusat Bahasa setiap tahun memberikan penghargaan kepada para pengarang Indonesia yang dinilai telah berprestasi dalam bidang prosa, puisi, ataupun drama. Sayangnya sampai saat ini Pusat Bahasa belum dapat memberikan penghargaan yang sama kepada para pengarang sastra daerah. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, patut dicatat upaya Ajip Rosidi, juga sejak 1989, yang secara teratur sekali setahun memberikan penghargaan berupa hadiah "Rancage" kepada para pengarang sastra Sunda yang, menurut penilaiannya, dianggap telah berprestasi. Hadiah itu, mulai tahun 1994, diberikan oleh Yayasan Kebudayaan Rancage yang juga dikelolanya. Yang sangat menarik untuk dicatat ialah bahwa Yayasan itu pada tahun 1994 ini juga memberikan penghargaan kepada pengarang sastra Jawa. Usaha seperti itu sepatutnya didukung dan ditiru oleh para pengayom (*maecenas*) sastra daerah lainnya.

Dalam rangka memberikan rangsangan kepada para calon pengarang di kalangan siswa, Pusat Bahasa juga mengadakan sayembara menulis cerita pendek untuk siswa SLTA. Para pemenang sayembara tahun 1993, misalnya, karyanya telah diterbitkan sebagai sisipan majalah sastra *Horison*. Melalui kegiatan sayembara seperti itu, yang penting ialah memberikan kesempatan kepada para calon pengarang di kalangan generasi muda kita untuk memperlihatkan dan menyalurkan bakat dan kemampuannya. Alangkah baiknya kalau kegiatan serupa juga dapat dilakukan untuk keperluan sastra daerah.

Penutup

Pada bagian akhir makalah ini perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh tiga butir putusan Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993 mengenai sastra daerah sebagai berikut.

1. Perlu diwujudkan kebijaksanaan yang mewajibkan bahan-bahan sastra dan kebudayaan klasik Nusantara sebagai bagian dari kurikulum nasional.
2. Perlu diusahakan agar setiap daerah memiliki majalah budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang diusahakan oleh Pemerintah dengan imbalan yang memadai bagi pengarang.
3. Sastra klasik Nusantara perlu diterjemahkan, disadur, dan diterbitkan secara teratur dengan memanfaatkan berbagai media elektronik dan media cetak yang memiliki jangkauan luas.

Putusan Kongres tersebut menyiratkan perlunya pembinaan sastra daerah dilakukan secara terintegrasi dalam pendidikan formal di sekolah. Masalah kerja sama, baik dengan para ahli di perguruan tinggi dan para sastrawan, maupun dengan para pejabat pengambil keputusan di lingkungan pemerintah daerah, merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendesak untuk diwujudkan

dalam berbagai bentuk kegiatan yang nyata.

Penerjemahan, penyaduran, dan penerbitan sastra klasik Nusantara atau sastra klasik daerah haruslah dilakukan sebagai bagian dari upaya kita yang menyeluruh untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang sastra daerah tertentu. Oleh karena itu, dalam jangka panjang perlu pula dipikirkan agar gambaran yang lengkap tentang suatu sastra daerah tertentu di Indonesia dapat kita baca melalui semacam *handbook* khusus untuk sastra daerah yang bersangkutan.

Catatan:

1. Bandingkan dengan Soebadio (1990) yang mempersoalkan apakah penyebutan sastra Indonesia dimulai sejak bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam UUD 1945, sejak pernyataan Sumpah Pemuda 1928, atau bahkan sejak tahun 1920 yang ditandai oleh mulai digunakannya bahasa Melayu (yang kemudian diangkat menjadi bahasa Indonesia) dalam majalah *Jong Sumatra*.
2. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1993:882) merumuskan sastra daerah (yang disinonimkan dengan *sastra Nusantara*) sebagai karya sastra yang memiliki berbagai ciri keunggulan, seperti keaslian, keartistikan, serta keindahan dalam hal isi dan cara pengungkapannya.
3. Pernyataan dan pandangan seperti itu didasarkan pada hasil/putusan Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993 tentang pokok masalah Pembinaan Bahasa dan Sastra.
4. Bandingkan dengan Fuad Hassan (1990) yang mengemukakan bahwa bahasa, maksudnya bahasa Indonesia, menggambarkan eksistensi kita sebagai satuan kebudayaan yang utuh dan menyeluruh dengan tetap ditandai oleh pluralisme pendukungnya. Bahasa Indonesia dengan postur dan profil seperti itu baru merupakan *silhouette* yang belum bersuasa karena bahasa Indonesia lebih memperlihatkan ciri instrumentalnya. *Silhouette* itu akan memiliki makna dan suasana ketika bahasa tampil dalam sosok (karya) sastranya.
5. Hasil sensus itu didasarkan pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang berjumlah 158.262.639 orang. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 24.042.010 orang (15,19%) hanya menempati urutan ketiga, yaitu setelah bahasa Sunda dan sebelum bahasa Madura. Sementara itu, penutur bahasa-bahasa daerah lainnya, yang tidak disebutkan/dirinci lebih lanjut, berjumlah 27.070.883 orang (17,11%).
6. Angka ini didasarkan pada hasil sensus penduduk usia 10 tahun ke atas tahun 1990. Untuk itu, perlu ditambahkan bahwa penduduk Indonesia yang dapat membaca dan menulis huruf lain (bukan huruf latin) berjumlah 1,59%, sementara yang sama sekali tidak mengenal huruf (buta aksara)

berjumlah 15,92%.

7. Dugaan tentang adanya korelasi seperti itu dapat pula diamati pada sisi yang sebaliknya, yaitu antara penduduk Indonesia yang buta aksara (15,92%) dan penduduk Indonesia yang tidak pernah bersekolah (16,26%). Kedua hal itu dapat pula dikaitkan dengan penduduk Indonesia yang tidak dapat berbahasa Indonesia yang, menurut hasil sensus penduduk tahun 1990, mencapai jumlah 17,13%.
8. Dalam beberapa kesempatan, yang jumlahnya boleh dikatakan baru satu dua kali, tokoh masyarakat dan pejabat negara tertentu membaca puisi. Karena peristiwa itu diberitakan secara nasional melalui televisi, beberapa media massa cetak juga tidak mau ketinggalan, dampaknya cukup positif. Contoh seperti itu akan sangat besar maknanya, terutama bagi generasi muda kita.
9. Jumlah itu didasarkan pada catatan kegiatan yang dilakukan Pusat Bahasa pada tahun 1975—1993 untuk sastra daerah di 24 provinsi (3 provinsi yang belum termasuk ialah Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Irian Jaya).
10. Forum/pertemuan yang telah diadakan atas prakarsa Pusat Bahasa adalah, antara lain, sebagai berikut.
 - a. Seminar Politik Bahasa Nasional (Februari 1975)
 - b. Sanggar Kerja Penelitian Bahasa dan Sastra (Maret 1975)
 - c. Seminar Pengembangan Sastra Daerah (Oktober 1975)
 - d. Seminar Bahasa Daerah (Januari 1976)
 - e. Konferensi Bahasa dan Sastra Daerah (Januari 1977)
 - f. Seminar Pengajaran Bahasa dan Sastra (April 1982)
 - g. Pertemuan Bahasa dan Sastra Daerah Wilayah Timur (Januari 1985)
 - h. Pertemuan Bahasa dan Sastra Daerah Wilayah Barat (Januari 1986)Perlu ditambahkan bahwa pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1978, 1983, 1988, dan 1993 serta dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa, masalah-masalah sastra dan pengajarannya, termasuk sastra daerah, selalu menjadi salah satu topik pembahasan.

3. PEMBINAAN BAHASA JAWA*

Pengantar

Setiap kali membicarakan bahasa daerah tertentu di Indonesia, termasuk sastra dan pengajarannya, seyogianya hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia. Dalam konteks yang demikian, ada dua hal yang patut terlebih dahulu dikemukakan. Pertama, Pasal 36 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedua, penjelasan pasal tersebut yang mengungkapkan bahwa bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang dipelihara secara baik-baik oleh para penuturnya akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara.

Bahasa Jawa sebagai bahasa daerah yang paling banyak jumlah penuturnya di Indonesia amat jelas memperlihatkan terpenuhinya persyaratan tersebut, yaitu sebagai bahasa daerah yang dipelihara secara baik-baik oleh para pemakainya. Atas dasar itu, bahasa Jawa memiliki hak sepenuhnya untuk dihormati dan dipelihara oleh negara. Pemeliharaan bahasa Jawa oleh negara ini sekaligus dapat dihubungkan baik dengan upaya pembinaan maupun dengan upaya pengembangannya.

Tentang kedua jenis upaya itu secara singkat dapat ditambahkan bahwa pembinaan bahasa Jawa bertujuan agar para penuturnya selain memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Jawa juga mampu menggunakannya secara tertib dalam berbagai konteks atau situasi pemakaiannya. Sementara itu, pengembangan bahasa Jawa bertujuan agar bahasa Jawa tetap mantap dapat digunakan sebagai alat komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Yang akan dipaparkan dalam makalah ini hanyalah yang menyangkut upaya pembinaan. Untuk itu, seperti yang sudah disinggung di atas, paparan tentang pembinaan bahasa Jawa ini akan dicoba dilihat keterkaitannya dengan bahasa Indonesia.

Jumlah Penutur

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1990 yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik, penutur bahasa Jawa di seluruh Indonesia berjumlah 60.267.461 orang. Angka tersebut bermakna 38,08 % dari seluruh penduduk Indonesia usia lima tahun ke atas pada saat itu. Tabel berikut memperlihatkan ketersebaran penutur bahasa Jawa di setiap provinsi yang dihubungkan dengan penutur bahasa Jawa di provinsi yang bersangkutan.

* Makalah Kongres Bahasa Jawa II, 22--26 Oktober 1996, Malang, Jawa Timur

Tabel 1
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
menurut Provinsi dan Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Provinsi	Bahasa Indonesia	Bahasa Jawa
Daerah Istimewa Aceh	373.355	176.845
Sumatera Utara	3.532.362	1.441.362
Sumatera Barat	80.200	94.478
Riau	506.267	378.572
Jambi	228.763	363.231
Sumatera Selatan	344.737	1.018.461
Bengkulu	85.761	181.928
Lampung	680.956	3.091.330
DKI Jakarta	6.889.081	188.170
Jawa Barat	4.690.654	3.240.577
Jawa Tengah	373.106	24.413.734
DI Yogyakarta	82.826	2.584.834
Jawa Timur	787.599	21.947.986
Bali	134.686	41.492
Nusa Tenggara Barat	103.728	10.024
Nusa Tenggara Timur	515.421	2.548
Timor Timur	42.932	2.237
Kalimantan Barat	233.268	125.787
Kalimantan Tengah	60.366	124.376
Kalimantan Selatan	65.837	198.002
Kalimantan Timur	637.351	222.614
Sulawesi Utara	911.351	24.787
Sulawesi Tengah	479.512	78.156
Sulawesi Selatan	861.862	108.390
Sulawesi Tenggara	239.673	78.679
Maluku	587.547	54.484
Irian Jaya	513.019	74.377
Jumlah	24.042.010	60.267.461

Sumber: Biro Pusat Statistik 1990

Dari Tabel 1, pertama-tama dapat dicatat bahwa ada tujuh provinsi yang jumlah penutur bahasa Jawanya lebih dari satu juta orang. Ketujuh provinsi itu, dari segi pemeringkatan berdasarkan jumlah penutur, berturut-turut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Dari segi pemeringkatan ini yang menarik ialah bahwa jumlah penutur bahasa Jawa di Jawa Barat (3.240.577 orang) dan Lampung (3.091.330 orang) ternyata lebih banyak daripada di Yogyakarta (2.584.834 orang). Sudah barang tentu perbandingan jumlah penutur bahasa Jawa di ketiga provinsi ini harus pula dilihat dari atau dihubungkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di provinsi yang bersangkutan. Kalau jumlah penutur bahasa Jawa di ketiga provinsi itu dihubungkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di provinsi masing-masing, urutan persentasenya adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Persentase Penutur Bahasa Jawa
di Yogyakarta, Lampung, dan Jawa Barat

No.	Provinsi	Jumlah Penutur Bahasa Jawa	Jumlah Penduduk	%
1.	DI Yogyakarta	2.584.834	2.686.478	96,22
2.	Lampung	3.091.330	5.220.044	59,22
3.	Jawa Barat	3.240.577	31.111.110	10,42

Sumber: Biro Pusat Statistik 1990

Catatan lain yang perlu dikemukakan sehubungan dengan angka-angka yang tertera pada Tabel 1 ialah perbandingan antara jumlah penutur bahasa Jawa dan bahasa Indonesia di setiap provinsi. Dari ke-27 provinsi itu ada sepuluh di antaranya dengan jumlah penutur bahasa Jawa yang lebih banyak daripada jumlah penutur bahasa Indonesiannya. Selain di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, ternyata jumlah penutur bahasa Jawa di Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan bahkan di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah pun masih lebih banyak daripada jumlah penutur bahasa Indonesiannya.

Cenderung Menurun?

Penutur bahasa Jawa yang berjumlah 60.267.461 orang itu memperlihatkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan jumlah 59.357.040 orang menurut hasil sensus sebelumnya (tahun 1980). Akan tetapi, dari segi persentase, angka tersebut menggambarkan adanya penurunan: 40,44 % pada

tahun 1980 dan 38,08 % pada tahun 1990. Hal itu jelas terlihat pada tabel berikut yang juga sekaligus dapat dibandingkan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya, termasuk bahasa Indonesia.

Tabel 3
Bahasa-Bahasa di Indonesia dan Jumlah Penuturnya

No.	Nama Bahasa	Sensus 1980		Sensus 1990	
		Jumlah Penutur	%	Jumlah Penutur	%
1.	Jawa	59.357.040	40,44	60.267.461	38,08
2.	Sunda	22.110.403	15,06	24.155.962	15,26
3.	Indonesia	17.505.303	11,93	24.042.010	15,19
4.	Madura	6.913.977	4,71	6.792.447	4,29
5.	Minang	3.545.928	2,42	3.527.726	2,23
6.	Bugis	3.322.192	2,26	3.228.742	2,04
7.	Batak	3.106.970	2,12	3.120.047	1,97
8.	Bali	2.481.249	1,69	2.589.256	1,64
9.	Banjar	1.661.792	1,13	2.755.337	1,74
10.	Lainnya	25.653.378	17,48	27.070.883	17,11
11.	Tak Terjawab	1.118.235	0,76	712.629	0,45
	Jumlah	146.776.473	100,00	158.262.639	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Selain jumlah penutur bahasa Indonesia yang meningkat (dari 11,93% ke 15,19%), bahasa Sunda (dari 15,06% ke 15,26%) dan bahasa Banjar (dari 1,13% ke 1,74%) juga memperlihatkan hal yang sama. Sementara itu, bahasa Madura, Minang, Bugis, Batak, dan Bali mengalami "nasib" yang sama seperti bahasa Jawa. Kecenderungan tentang menurunnya jumlah penutur bahasa Jawa itu dapat ditelusuri berdasarkan golongan umur penutur yang bersangkutan. Dengan memperhatikan hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 mengenai hal itu, dapatlah disebutkan bahwa penurunan tersebut terutama terdapat pada golongan umur 5—9 tahun (2,45 %), 10—14 (0,86%), dan 15—24 tahun (0,89%).

Pada pihak lain dapat dikemukakan kecenderungan yang sebaliknya, yaitu bahwa kesadaran untuk menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari itu makin mantap seiring dengan bertambahnya usia. Seperti yang dapat

disimak pada tabel berikut, peningkatan terdapat pada golongan umur 25—49 tahun menjadi (2,05 %) dan pada golongan umur 50 tahun ke atas peningkatan itu bahkan "sangat mengembirakan", yaitu 2,16%.

Tabel 4
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
menurut Golongan Umur
dan Bahasa Jawa yang Dipakai Sehari-hari

Golongan Umur	Sensus 1980		Sensus 1990	
	Jumlah	%	Jumlah	%
5--9	8.217.257	15,97	8.148.421	13,52
10--14	7.144.679	13,89	7.853.694	13,03
15--24	11.428.470	22,21	12.851.538	21,32
25--49	17.003.367	33,04	21.148.048	35,09
50 +	7.649.908	14,87	10.264.129	17,03
Tak Terjawab	8.914	0,02	1.633	0,01
Jumlah	51.452.595	100,00	60.267.461	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik

Catatan: Dibandingkan dengan Tabel 1 dan Tabel 2, jumlah penutur bahasa Jawa pada Tabel 3 berbeda.

Selisih sebanyak 7.904.445 orang untuk golongan umur 0--4 tahun pada Sensus 1980 tidak ditampilkan pada Tabel 3.

Tingkat "kearifan" terhadap bahasa Jawa yang seiring dengan "kematangan" usia itu masih tetap dapat dipertahankan meskipun bila dibandingkan dengan persentase penutur bahasa Indonesia. Tabel di bawah ini mengisyaratkan bahwa pada golongan umur 5--9 tahun, 10--14 tahun, 15--24 tahun, dan 25--49 tahun persentase penutur bahasa Indonesia selalu lebih tinggi daripada bahasa Jawa, tetapi pada golongan umur 50 tahun ke atas justru jumlah penutur bahasa Jawa (17,03 %) yang berada jauh di atas jumlah penutur bahasa Indonesia (8,60%).

Tabel 5
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
menurut Golongan Umur
dan Bahasa yang Dipakai Sehari-hari

Golongan Umur	Bahasa Indonesia		Bahasa Jawa	
	Jumlah	%	Jumlah	%
5--9	3.521.105	14,64	8.148.421	13,52
10--14	3.216.231	13,38	7.853.694	13,03
15--24	6.375.162	26,31	12.851.538	21,32
25--49	8.861.241	36,86	21.148.048	35,09
50 +	2.067.835	8,60	10.264.129	17,03
Tak Terjawab	436	0,01	1.633	0,01
Jumlah	24.042.010	100,00	60.267.461	100,00

Sumber: Biro Pusat Statistik 1990

Upaya Pembinaan

Penurunan persentase jumlah penutur bahasa Jawa sebagaimana yang tercermin dalam hasil sensus penduduk tahun 1980 dan 1990 itu hanya terdapat pada golongan umur di bawah 15 tahun. Seperti yang tampak pada Tabel 4, penurunan terbesar, yaitu 2,45%, menyangkut golongan umur 5—9 tahun, sedangkan pada golongan umur 10—14 tahun penurunan tersebut hanya 0,86%.

Apabila dihubungkan dengan usia sekolah, hal itu jelas menggambarkan bahwa kecenderungan menurunnya jumlah penutur bahasa Jawa itu tampak dengan jelas pada kelompok penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar, yakni SD dan SMP. Gejala ini menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian lapangan yang komprehensif dengan memperhitungkan sejumlah faktor sosiolinguistik yang signifikan. Namun, yang sudah dapat diasumsikan ialah bahwa gejala tersebut merupakan gambaran dari kekurangberhasilan pelaksanaan pengajaran bahasa Jawa di sekolah, seperti halnya sering dikeluhkan tentang masih memprihatinkannya mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Selain itu, patut pula ditambahkan keadaan di rumah, lingkungan pergaulan, dan kondisi masyarakat secara umum yang tidak terlalu mendukung bagi pemakaian bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari di kalangan penduduk usia sekolah tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, ada angka statistik mengenai perbandingan antara bahasa Jawa sebagai bahasa ibu dan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Tabel berikut memperlihatkan perbandingan yang dimaksudkan, khusus untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, tiga provinsi yang merupakan "wilayah utama" para penutur bahasa Jawa.

Tabel 6
Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas
menurut Bahasa Jawa sebagai Bahasa Ibu
dan Bahasa Jawa sebagai Bahasa Sehari-hari

Provinsi	Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu	Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari
Jawa Tengah	24.421.652	24.413.734
DI Yogyakarta	2.586.292	2.584.834
Jawa Timur	21.908.570	21.947.986
Jumlah	48.916.514	48.946.554

Sumber: Biro Pusat Statistik 1990

Di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta gejala penurunan itu terlihat karena penduduk yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari lebih sedikit jumlahnya daripada yang menyatakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu mereka. Akan tetapi, Jawa Timur menyodorkan kasus yang menarik. Jumlah penduduk yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari ternyata lebih banyak daripada jumlah penduduk yang berbahasa ibu bahasa Jawa. Hal itu sekurang-kurangnya berarti bahwa ada 39.416 orang yang berbahasa ibu bukan bahasa Jawa, tetapi menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari mereka. Pertanyaan sederhana yang harus segera dikemukakan mengenai kasus itu ialah: apakah bahasa Jawa penduduk Jawa Timur lebih mudah digunakan sebagai bahasa sehari-hari dibandingkan dengan bahasa Jawa penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta? Jawaban atas pertanyaan ini mengisyaratkan diperlukannya suatu penelitian mengenai hal itu.

Agar kecenderungan menurunnya penutur bahasa Jawa itu pada masa-masa yang akan datang tidak bertambah "parah", perlu dilakukan berbagai upaya yang bertujuan tidak saja meningkatkan mutu pengajaran bahasa Jawa di sekolah, tetapi juga mengkondisikan lingkungan rumah dan masyarakat agar generasi muda kelompok etnis Jawa memiliki keterampilan menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya-upaya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pembinaan ini pada gilirannya perlu juga dihubungkan dengan keperluan yang menyangkut peningkatan penguasaan bahasa Indonesianya. Hal yang disebutkan terakhir ini penting dan cukup mendesak, mengingat masih tingginya angka buta bahasa Indonesia di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Dibandingkan dengan persentase buta bahasa Indonesia secara nasional yang berjumlah 17,16%, angka buta bahasa Indonesia di ketiga provinsi itu, seperti terlihat pada tabel berikut, masih cukup tinggi.

Tabel 7
Penduduk Buta Bahasa Indonesia
di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta

Provinsi	Jumlah Penduduk	Buta Bahasa Indonesia	
		Jumlah	%
Jawa Timur	29.406.373	7.464.990	25,39
Jawa Tengah	25.432.403	5.445.162	21,41
DI Yogyakarta	2.686.478	536.637	19,98

Sumber: Biro Pusat Statistik 1990

Secara nasional, persentase penduduk yang tidak mengenal bahasa Indonesia di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta itu masing-masing berada pada peringkat ke-3, 7, dan 9. Seperti yang terlihat pada urutan pemeringkatan mengenai hal itu di bawah ini, perlu pula dicatat Timor Timur sebagai provinsi yang persentase buta bahasa Indonesianya paling tinggi (45,85%) dan DKI Jakarta paling rendah (0,06%).

- | | | |
|-----|---------------------|--------|
| 1. | Timor Timur | 45,85% |
| 2. | Nusa Tenggara Barat | 30,74% |
| 3. | Jawa Timur | 25,39% |
| 4. | Bali | 29,92% |
| 5. | Sulawesi Selatan | 22,91% |
| 6. | Nusa Tenggara Timur | 22,41% |
| 7. | Jawa Tengah | 21,41% |
| 8. | Irian Jaya | 21,30% |
| 9. | DI Yogyakarta | 19,98% |
| 10. | DI Aceh | 16,20% |
| 11. | Jawa Barat | 17,17% |
| 12. | Kalimantan Selatan | 14,68% |
| 13. | Kalimantan Tengah | 14,61% |
| 14. | Kalimantan Barat | 14,48% |
| 15. | Sumatera Barat | 13,73% |
| 16. | Sulawesi Tenggara | 12,75% |
| 17. | Bengkulu | 12,32% |
| 18. | Jambi | 11,78% |
| 19. | Sumatera Selatan | 10,93% |
| 20. | Lampung | 9,45% |
| 21. | Riau | 8,57% |

22. Sulawesi Tenggara	6,64%
23. Sumatera Utara	6,58%
24. Kalimantan Timur	4,91%
25. Sulawesi Utara	3,81%
26. Maluku	2,96%
27. DKI Jakarta	0,06%

Berdasarkan uraian di atas, upaya pembinaan bahasa Jawa, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta perlu mempertimbangkan "keadaan" kelompok sasarannya. Untuk itu, arah perhatian upaya pembinaan itu memang harus dipusatkan pada kelompok penduduk yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga perlu diperhatikan dua kelompok penduduk lainnya, yaitu mereka yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan tidak kalah pentingnya adalah juga mereka yang sama sekali belum memahami bahasa Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan, pada tabel berikut disajikan ketiga jenis kelompok penduduk tersebut.

Tabel 8
Penutur Bahasa Jawa, Penutur Bahasa
Indonesia, dan Penduduk yang Buta Bahasa Indonesia

Provinsi	Penutur Bahasa Jawa	Penutur Bahasa Indonesia	Tidak Mengenal Bahasa Indonesia
Jawa Timur	74,64%	2,68%	25,39%
Jawa Tengah	96,00%	1,47%	21,41%
DI Yogyakarta	96,22%	3,08%	19,98%

Sumber: Biro Pusat Statistik 1990

Penutup

Kalau kecenderungan menurunnya persentase penutur bahasa Jawa pada kelompok penduduk usia sekolah itu diakibatkan oleh hal-hal seperti perkawinan antaretnis orang tuanya, urbanisasi penduduk, dan/atau makin meningkatnya kemajuan teknologi informasi yang pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai medium komunikasi, hal itu harus kita terima sebagai kenyataan yang tidak perlu dirisaukan. Namun, kalau asumsi yang telah dikemukakan di atas memperoleh pembenaran dari berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu bahwa kecenderungan tersebut berkorelasi baik

dengan masih memprihatinkannya mutu pengajaran bahasa Jawa di sekolah maupun dengan lingkungan (rumah dan masyarakat) yang tidak mendukung, maka hal itu harus kita upayakan langkah-langkah perbaikan dan penanggulangannya.

Pendirian Balai Penelitian Bahasa untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah (di Yogyakarta sudah ada) dalam hubungan itu perlu dipertimbangkan sebagai keperluan yang mendesak. Untuk itu, Pemda TK 1 Jawa Timur dan Jawa Tengah telah membina kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai itulah yang seharusnya merencanakan dan melaksanakan berbagai upaya pembinaan, tidak saja dalam hubungannya dengan bahasa Jawa, tetapi juga dengan bahasa Indonesia. Di dalam pelaksanaannya, upaya pembinaan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mendapat dukungan dan bantuan dari kelompok-kelompok profesi, seperti para pakar, guru, dan media massa.

Akhirnya, perlu pula ditambahkan tentang pentingnya upaya pembinaan itu ditunjang oleh tersedianya data kebahasaan yang memadai. Hal itu berarti bahwa penelitian tentang bahasa Jawa, termasuk pemakaiannya dalam bidang sastra dan pengajaran, perlu dilaksanakan secara terus-menerus. Mengenai hal ini dapat disampaikan bahwa sejak tahun tujuh puluhan penelitian tersebut dilakukan di bawah koordinasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (lihat Lampiran).

VI. PENERJEMAHAN

1. BEBERAPA CATATAN TENTANG PENERJEMAHAN^{*)}

Pendahuluan

Selain masalah-masalah yang secara langsung berhubungan dengan penerjemahan, pada makalah ini dikemukakan juga hal-hal yang secara tidak langsung berhubungan dengan penerjemahan. Yang secara langsung berhubungan dengan penerjemahan ialah beberapa teori penerjemahan yang dihubungkan dengan persoalan-persoalan penerjemahan yang sempat diamati penulis selama menerjemahkan *Le Solitaire (Terasing)* karangan Eugène Ionesco. Namun, tidak bisa dihindari bahwa masih banyak persoalan lainnya yang luput dari pengamatan dan oleh karenanya tidak dikemukakan dalam makalah ini.

Adapun hal-hal yang secara tidak langsung berhubungan dengan penerjemahan penulis batasi pada (1) hubungan antara penerjemahan dan Politik Bahasa Nasional dan (2) pentingnya penerjemahan karya-karya sastra asing dan sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia. Kedua masalah yang disebutkan terakhir ini penulis tempatkan pada bagian terakhir makalah ini, sedangkan masalah-masalah penerjemahan itu sendiri, mengingat jangkauan permasalahannya yang lebih luas dan yang sekaligus menjadi tema pokok seminar ini, penulis kemukakan pada bagian pertama.

Masalah-masalah Penerjemahan

Apabila kita melihat dan meneliti masalah-masalah yang secara langsung berhubungan dengan penerjemahan, sesungguhnya hal itu merupakan upaya untuk mencoba mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apakah yang dimaksud dengan penerjemahan? (2) Apa maksud dan tujuan penerjemahan? (3) Bagaimana cara menerjemahkan? (4) Kesulitan-kesulitan apa yang timbul sewaktu menerjemahkan dan bagaimana mengatasinya? (5) Apakah manfaat penerjemahan? dan (6) Siapa yang menerjemahkan?

Arti Terjemahan

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa penerjemahan ialah pergantian dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. "Bahasa yang satu"

^{*)} Makalah Seminar Penerjemahan, diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2—6 Oktober 1978, di Wisma Arga Mulya, Tugu, Bogor.

VI. PENERJEMAHAN

1. BEBERAPA CATATAN TENTANG PENERJEMAHAN^{*)}

Pendahuluan

Selain masalah-masalah yang secara langsung berhubungan dengan penerjemahan, pada makalah ini dikemukakan juga hal-hal yang secara tidak langsung berhubungan dengan penerjemahan. Yang secara langsung berhubungan dengan penerjemahan ialah beberapa teori penerjemahan yang dihubungkan dengan persoalan-persoalan penerjemahan yang sempat diamati penulis selama menerjemahkan *Le Solitaire (Terasing)* karangan Eugène Ionesco. Namun, tidak bisa dihindari bahwa masih banyak persoalan lainnya yang luput dari pengamatan dan oleh karenanya tidak dikemukakan dalam makalah ini.

Adapun hal-hal yang secara tidak langsung berhubungan dengan penerjemahan penulis batasi pada (1) hubungan antara penerjemahan dan Politik Bahasa Nasional dan (2) pentingnya penerjemahan karya-karya sastra asing dan sastra daerah ke dalam bahasa Indonesia. Kedua masalah yang disebutkan terakhir ini penulis tempatkan pada bagian terakhir makalah ini, sedangkan masalah-masalah penerjemahan itu sendiri, mengingat jangkauan permasalahannya yang lebih luas dan yang sekaligus menjadi tema pokok seminar ini, penulis kemukakan pada bagian pertama.

Masalah-masalah Penerjemahan

Apabila kita melihat dan meneliti masalah-masalah yang secara langsung berhubungan dengan penerjemahan, sesungguhnya hal itu merupakan upaya untuk mencoba mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Apakah yang dimaksud dengan penerjemahan? (2) Apa maksud dan tujuan penerjemahan? (3) Bagaimana cara menerjemahkan? (4) Kesulitan-kesulitan apa yang timbul sewaktu menerjemahkan dan bagaimana mengatasinya? (5) Apakah manfaat penerjemahan? dan (6) Siapa yang menerjemahkan?

Arti Terjemahan

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa penerjemahan ialah pergantian dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. "Bahasa yang satu"

^{*)} Makalah Seminar Penerjemahan, diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2—6 Oktober 1978, di Wisma Arga Mulya, Tugu, Bogor.

lazim disebut *bahasa sumber* (BSu), sedang "bahasa yang lain" sebagai *bahasa sasaran* (BSa). Pergantian BSu dengan BSa ini dilakukan melalui padanan antara BSu dan BSa yang mengacu kepada *situasi*, *substansi*, atau *informasi* yang sama, sehingga pesan BSu tersampaikan dengan jelas di dalam BSa.

Agar padanan antara BSu dan BSa mengacu kepada situasi atau informasi yang sama, padanan tersebut harus dicari pada *tataran kebahasaan* yang meliputi *tata bahasa* dan *leksikon*. Dengan demikian, hubungan antara tata bahasa dan leksikon di satu pihak dengan situasi atau informasi di lain pihak merupakan *hubungan semantik*. Catford menyebutnya *contextual meaning* (Catford, 1974:3).

Oleh karena bahasa mencakup *bahasa lisan* (sistem fonik atau fonologi) dan *bahasa tulisan* (sistem grafik atau grafologi), maka pengertian penerjemahan dapat dirumuskan menjadi "pergantian tata bahasa dan leksikon BSu dengan padanan tata bahasa dan leksikon BSa yang mengakibatkan pergantian fonologi dan grafologi BSu dengan fonologi dan grafologi BSa yang tidak berpadanan" (Catford, 1974:22).

Dalam penerjemahan karya sastra, padanan antara BSu dan BSa tidak hanya dicari pada tataran kebahasaan, tetapi juga pada tataran *stilistika* (gaya). Oleh karena itu, rumusan penerjemahan di atas mesti dilengkapi pula dengan pergantian gaya BSu dengan padanan gaya BSa.

Atas dasar pandangan bahwa bahasa merupakan sistem lambang, Revzin dan Rozecveig merumuskan penerjemahan sebagai "pergantian teks dari sistem lambang yang satu ke dalam sistem lambang yang lain" (Balcerzan, 1970:5). Pergantian sistem lambang ini dibarengi oleh *transformasi* dari bagian-bagian teks yang dibedakan menurut proses terjadinya transformasi itu, yaitu melalui cara: (1) *reduksi*: pemendekan sebagian teks dengan menghilangkan unsur-unsur tertentu; (2) *suplementasi*: penambahan unsur-unsur baru; (3) *inversi*: perubahan urutan kata, ungkapan atau seluruh kalimat; dan (4) pertukaran unsur-unsur dengan mempergunakan padanan-padanan (Balcerzan, 1970:5).

Maksud dan Tujuan Penerjemahan

Seperti telah dikemukakan di atas, penerjemahan bertujuan menyampaikan pesan BSu melalui pergantian sistem lambang dan proses transformasi dari BSu ke BSa. Tuntutan ini mengharuskan si penerjemah untuk menerjemahkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang akan membaca hasil terjemahannya. Ini berarti bahwa si penerjemah bukan hanya mesti mengerti pesan BSu, tapi yang lebih penting lagi ialah dia mesti mampu memindahkan pesan tersebut ke dalam BSa.

Maksud dan tujuan penerjemahan dapat juga ditentukan oleh golongan pembacanya. Theodore Savory membedakan 4 macam penerjemahan yang ditujukan kepada 4 kelompok pembaca yang berlainan: (1) penerjemahan bebas bagi pembaca yang sama sekali tidak mengetahui BSu; (2) penerjemahan

harfiah bagi pembaca golongan mahasiswa yang tengah mempelajari BSu, sehingga memungkinkan pembaca membuat perbandingan antara BSu dan BSa; (3) penerjemahan yang bisa dibaca sebagai penerjemahan bagi pembaca yang pernah mempelajari BSu, tapi pada saat membaca penerjemahan, BSu tidak lagi dikuasanya; dan (4) penerjemahan yang disertai pendapat-pendapat atau kritik-kritik para ahli bagi pembaca yang menguasai BSu dan BSa (Savory, 1973:58--59).

Cara Menerjemahkan

Agar tujuan penerjemahan tersebut tercapai, proses penerjemahan harus dilakukan melalui: (1) tahap *analisis*, (2) tahap *pemindahan*, dan (3) tahap *penyusunan kembali* (Newman, 1977).

Tahap analisis diterapkan pada paragraf, kalimat, maupun frase teks BSu guna memperoleh jawaban atas ketiga pertanyaan berikut: (1) Apa yang dikatakan pengarang? (2) Apa yang dia maksudkan? dan (3) Bagaimana dia mengatakannya? (Savory, 1973:26).

Setelah jawaban ketiga pertanyaan itu diperoleh, pada tahap pemindahan si penerjemah berusaha memindahkan pesan teks BSu dengan mencari padanannya di dalam BSa.

Tahap penyusunan kembali baru boleh dilakukan setelah si penerjemah benar-benar merasa yakin bahwa pesan yang terkandung di dalam frase, kalimat, paragraf, maupun keseluruhan teks BSu telah dipindahkan dengan tepat dan jelas ke dalam BSa tanpa dia kurangi maupun dia tambahi. Pada tahap terakhir ini si penerjemah harus menyusun kembali struktur bahasa terjemahannya agar sesuai dengan struktur BSa yang berlaku, dan terutama agar para pembacanya nanti tidak akan merasakannya sebagai terjemahan (Hoed, 1977).

Berdasarkan cara-cara yang ditempuh sewaktu menerjemahkan, Vinay (1968) dalam tulisannya *La traduction humaine* membedakan 4 jenis penerjemahan dengan contoh-contoh penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Perancis sebagai berikut.

1. *Transposisi*, yaitu dengan mengganti tata bahasa dan leksikon BSu dengan padanan tata bahasa dan leksikon BSa. *He merely nodded* diterjemahkan menjadi *Il se contenta de faire oui de la tête*.
2. *Modulasi*, yaitu penerjemahan yang mementingkan pesannya, dan bukan hanya bentuknya. *Forget it!* (kalimat perintah positif) diterjemahkan menjadi *N'y pensez plus!* (kalimat perintah negatif).
3. *Ekuivalensi*, yaitu penerjemahan yang mempergunakan gaya dan susunan yang sama sekali berbeda, pesan tidak dipindahkan bagian demi bagian, melainkan secara keseluruhan. *Open to the public* diterjemahkan menjadi *Entrée libre*. Jenis penerjemahan ini biasa kita temukan, baik pada penerjemahan peribahasa, slogan, maupun judul.

4. *Adaptasi*, yaitu penerjemahan yang dilakukan bilamana situasi B_{Su} tidak dapat dicarikan padanannya di dalam situasi B_{Sa}.

Masalah-Masalah yang Dihadapi

a. Masalah gaya

Kalau dalam penerjemahan karya nonsastra seperti dalam bidang ilmu kedokteran si penerjemah di samping mesti mengenal bidangnya itu sendiri, juga mesti mengetahui atau memahami sejumlah kata yang sudah menjadi peristilahan yang baku, dalam penerjemahan karya sastra masalah yang selalu timbul dan mesti dihadapi si penerjemah ialah memindahkan secara tepat gaya B_{Su} ke dalam gaya B_{Sa}, meskipun sering dikemukakan bahwa gaya bahasa hanya merupakan struktur permukaan bentuk bahasa yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan makna (Hoed, 1977), si penulis B_{Su} (pengarang) mempunyai maksud tertentu di dalam memilih gaya bahasa yang dipergunakannya.

Apabila si penerjemah berhasil memindahkan gaya B_{Su} dengan menemukan padanannya dalam B_{Sa}, maka dia telah menerjemahkan melalui dua macam transformasi: *transformasi teks* pada tataran kebahasaan dan *transformasi karya* pada tataran sastra. Dalam hubungan itu, Balcerzan menyimpulkan bahwa kedua macam transformasi itu, disadari atau tidak, sesungguhnya merupakan akibat dari penafsiran si penerjemah. Itulah sebabnya dia mengemukakan bahwa menerjemahkan merupakan seni menafsirkan, sehingga pergantian teks B_{Su} dengan teks B_{Sa} merupakan titik akhir persamaan dan juga sekaligus merupakan titik awal perbedaan antara teks B_{Su} dan teks B_{Sa} (Balcerzan, 1970:5--11).

b. Masalah Kata Ganti Orang

Bahasa Perancis yang membedakan kata ganti orang ketiga antara laki-laki dan perempuan (*il*: dia laki-laki, *elle*: dia perempuan, *ils*: mereka laki-laki atau laki-laki dan perempuan dan *elles*: mereka perempuan) dapat menimbulkan masalah di dalam penerjemahan, karena bahasa Indonesia hanya mengenal kata *dia* (tunggal) dan kata *mereka* (jamak). Apalagi kalau kedua jenis kata ganti orang ketiga itu terdapat dalam sebuah kalimat.

"*Etait-elle mieux avec lui maintenant?*" (Ionesco, 1973:11), yang diterjemahkan menjadi "Lebih berbahagialah dia bersama dia sekarang?", kurang jelas menunjukkan siapa yang diacu oleh kedua kata "dia" itu, sehingga yang membaca terjemahannya mesti melihat kembali kalimat-kalimat sebelumnya. Sesuai dengan maksud pengarang B_{Su} bahwa "dia" yang pertama ialah Lucienne dan "dia" yang kedua Pierre Ramboule, dan untuk tidak mempersulit para pembaca terjemahannya, maka sebaiknya kalimat itu diterjemahkan menjadi "Lebih berbahagialah Lucienne bersama Pierre Ramboule sekarang" atau "Lebih berbahagialah dia bersama Pierre

Ramboule sekarang? atau "Lebih berbahagiakah Lucienne bersama dia sekarang?".

c. *Masalah Judul*

Tidak selamanya judul sebuah tulisan atau buku dapat diterjemahkan dengan mengganti tata bahasa dan leksikon BSu dengan padanan tata bahasa dan leksikon BSa, bahkan di dalam karya sastra judul mesti menggambarkan isi dan tema cerita. Oleh karena itu, judul BSu kadang-kadang diterjemahkan tidak melalui padanan tata bahasa dan leksikonnya, tetapi melalui terjemahan yang disebut "ekuivalensi" sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Le Solitaire karangan Ionesco menceritakan seorang laki-laki yang berusia hampir 40 tahun. Secara tidak diduga-duga dia memperoleh warisan dalam jumlah yang besar sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan pindah ke luar kota Paris. Dalam keadaan yang tanpa sanak saudara dan tanpa kawan itu, yang dia kerjakan hanyalah merenung dan mempertanyakan segala hal: eksistensi manusia dan alam semesta, hubungannya dengan dimensi ruang dan dimensi waktu. Akibatnya, dia selalu merasa tertekan dan menderit. "Andaikan aku tidak terlalu berfilsafat, aku bisa hidup lebih bahagia" (Ionesco, 1973:34), katanya.

Dengan tema cerita serupa itu, semula *Le Solitaire* diterjemahkan dengan "Sebatang kara", tapi ini berarti akan sama dengan penerjemahan judul buku Hector Malot, *Sans Famille*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan penerjemahan ekuivalensi, *Le Solitaire* kemudian diterjemahkan menjadi "Terdampar di pelabuhan sepi". Akhirnya, judul karya Ionesco itu diterjemahkan menjadi "Terasing".

d. *Masalah Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan*

Perbedaan latar belakang kebudayaan dan dunia kehidupan antara BSu dan BSa dapat menimbulkan masalah di dalam menemukan padanan kata-kata tertentu, misalnya nama-nama jenis makanan atau minuman di Perancis yang tidak terdapat di Indonesia. Kadang-kadang pada tataran leksikon padanan itu bisa ditemukan, tapi padanan itu tidak mengacu kepada informasi yang sama. Sebagai contoh: *café* memang berarti "kopi", tetapi dalam situasi yang lain kata tersebut tidak bisa diterjemahkan dengan "warung kopi" seperti yang terdapat di negeri kita. Begitu juga "rumah murah" yang dibangun Perumnas tidak bisa menggantikan padanan *HLM* di Perancis.

Menghadapi masalah tersebut penulis tak bisa berbuat lain kecuali membiarkan kata-kata itu sebagaimana adanya sambil memberikan catatan belakang, agar pesan, latar belakang kebudayaan, dan dunia kehidupan BSu dipindahkan secara utuh ke dalam BSa.

Manfaat Penerjemahan

Penerjemahan yang teratur dan berencana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kedua belah pihak: pembaca hasil penerjemahan dan, terutama, si penerjemahnya sendiri.

Melalui penerjemahan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan negara-negara yang sudah maju dapat kita ikuti dan memanfaatkan bagi perkembangan maju negara kita sendiri. Yang paling banyak mengambil manfaat dari penerjemahan sudah pasti adalah si penerjemahnya itu sendiri, apalagi kalau dia seorang pengarang yang kreatif, sebab dengan menerjemahkan dia tidak hanya menggali kekayaan gagasan dan pikiran yang terkandung di dalam BSu, tetapi secara tidak langsung dia juga mempertajam dan memperbaiki cara menyatakan diri seperti yang dipergunakan oleh pengarang BSu (Jassin, 1978).

Siapa yang Menerjemahkan?

Seorang penerjemah mesti menguasai BSu dan BSa dengan baik sebagai persyaratan minimal. BSu harus dikuasai secara analitis dan kritis, sedangkan BSa secara praktis (Savory, 1973:35). Selain itu, dia juga mesti mengenal bidang persoalan yang diterjemahkannya, sebab hal itu merupakan faktor yang sangat penting, terutama kalau kita berbicara tentang penerjemahan karya sastra yang menyangkut tidak hanya transformasi teks, tetapi juga transformasi karya. Karena transformasi karya dilakukan pada tataran sastra, perlu dipertanyakan apakah semua orang yang menguasai BSu dan BSa serta mengetahui teori-teori penerjemahan bisa dengan sendirinya menjadi penerjemah ataukah masih diperlukan syarat lain yang biasa disebut "bakat"?

Makalah ini tidak bermaksud menjawab pertanyaan tersebut sebab bagaimana pun hal itu pada akhirnya bergantung pada hasil terjemahannya, dan penilaian terhadap hasil terjemahan harus dilihat dari tiga segi persyaratan: (1) terjemahan harus merupakan transkripsi yang lengkap tentang ide-ide dan pesan BSu; (2) gaya dan penulisan antara BSu dan BSa harus mempunyai ciri-ciri yang sama; dan (3) terjemahan harus enak dibaca sebagaimana halnya karya asli (Savory, 1973:43).

Penerjemahan dan Politik Bahasa Nasional

Setiap kali kita membicarakan persoalan penggunaan dan pemanfaatan bahasa Indonesia, maka sudah semestinya sejak awal kita sadari bahwa pada akhirnya hal itu tidak bisa terlepas dari Politik Bahasa Nasional yang telah digariskan. Demikian juga halnya dengan penerjemahan yang juga merupakan masalah kebahasaan.

"Politik Bahasa Nasional ialah kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan" yang mencakup "(1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pe-

makaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia" (Halim, 1976:144).

Di dalam penggarisan yang dihasilkan oleh Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 yang berupa kesimpulan, pendapat, dan usul itu, penerjemahan hanya disebutkan pada bagian usul, yaitu bahwa Seminar Politik Bahasa Nasional mendesak supaya usaha penerjemahan yang berencana segera dilancarkan (Halim, 1976:152).

Setahun kemudian, masalah ini disinggung pula oleh Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional: "Usaha penerjemahan dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia bertujuan menyebarkan ilmu dan pengalaman lebih merata ke semua golongan masyarakat Indonesia yang membutuhkan penambahan ilmu, dan mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri" (Hasil Perumusan Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional, 1976:11).

Penataran Penerjemahan yang diselenggarakan tahun berikutnya oleh Pusat Bahasa ditujukan pada (1) pengembangan jumlah dan mutu penerjemah karya sastra dan bahasa; (2) pengembangan jumlah dan mutu dosen yang mengajarkan penerjemahan di perguruan tinggi; dan (3) pengadaan tenaga yang ahli dalam melakukan kritik terhadap penerjemahan dengan menggunakan teori di bidang linguistik dan antropologi (Hoed, 1978).

Sehubungan dengan kegiatan yang disebutkan terakhir, yang perlu dipertanyakan ialah sejauh mana ketiga jenis tujuan tersebut di atas dapat dicapai, dan sejauh mana pula tujuan usaha penerjemahan yang dirumuskan oleh Sanggar Kerja Politik Bahasa nasional dapat didekati. Hal itu kita kemukakan mengingat kenyataan bahwa (1) sebageian besar peserta penataran adalah dosen perguruan tinggi yang kesempatannya untuk melakukan penerjemahan terbatas, (2) struktur kurikulum perguruan tinggi di negara kita yang belum memungkinkan masalah penerjemahan dijadikan sebagai salah satu pilihan bidang studi (spesialisasi), dan (3) usaha penerjemahan belum merupakan profesi yang menarik.

Membiarkan kenyataan-kenyataan itu terus berlangsung akan merugikan Politik Bahasa Nasional, sebab bukankah usaha penerjemahan itu (diharapkan) dapat mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri?

Penerjemahan Karya Sastra

Penerjemahan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi jelas besar sekali peranannya. Akan tetapi, bagaimana dengan peranan penerjemahan karya-karya sastra dari bahasa asing atau bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia? Sudah tiba saatnya masalah ini diatur dan direncanakan secara jelas, sejalan dengan perkembangan Politik Bahasa Nasional. Ajip Rosidi menyebutnya sebagai Politik Pengembangan Sastra Nasional yang antara lain harus mencakup adanya usaha-usaha yang berencana dan teratur dalam mempelajari dan menerjemahkan karya-karya sastra dari bahasa asing dan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia (Halim, 1976:119).

Penerjemahan karya-karya sastra asing jelas dapat memperkembangkan kesusastraan Indonesia sebab penerjemahan tersebut di samping memperkaya khazanah sastra Indonesia, juga dapat dijadikan contoh ideal oleh sastrawan Indonesia di dalam menghasilkan karya sastranya sendiri. Jakob Sumardjo bahkan sampai mengemukakan bahwa para sastrawan Indonesia harus mempelajari karya-karya sastra asing yang besar guna memperkaya penalaran dan mempertajam daya analisisnya sendiri. Kenyataan tentang kurangnya penerbitan karya-karya sastra terjemahan di Indonesia dapat merugikan para sastrawan kita yang tidak atau kurang menguasai bahasa asing secara baik (Sumardjo, 1977).

Kesimpulan

1. Penerjemahan akan berhasil dengan baik apabila si penerjemah tidak hanya menguasai dengan baik BSu dan BSA serta mengenal latar belakang kebudayaannya, tetapi juga mengetahui teori-teori penerjemahan yang dia terapkan secara tepat sambil memanfaatkan alat-alat pembantu seperti kamus, ensiklopedi, atlas, maupun penutur BSu.
2. Dalam menerjemahkan karya nonsastra, si penerjemah dituntut untuk mengenal bidang yang diterjemahkannya dan memahami istilah-istilah yang digunakan dalam bidang yang bersangkutan.
3. Dalam penerjemahan karya-karya sastra, akan lebih baik kalau si penerjemah juga memiliki bakat sebagai pengarang.
4. Masalah penerjemahan mesti diatur dan mendapat tempat yang layak di dalam Politik Bahasa Nasional agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perkembangan dan kemajuan negara kita.

2. PENGINDONESIAAN ISTILAH KOMPUTER DAN INTERNET

Komputer dan internet sekarang ini boleh dikatakan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita. Di kota-kota besar dengan mudah kita dapat menemukan tempat (biasanya di pinggir jalan) yang memberikan pelayanan jasa komputer. Tempat pelayanan jasa internet dari segi jumlahnya memang tidak "seramai" tempat pelayanan jasa komputer. Meskipun begitu, *warnet* (warung internet) dengan serta merta menambah semaraknya penggunaan akronim dalam bahasa kita, menyusul *wartel* (warung telepon) dan *warteg* (warung tegal) yang sudah lebih dahulu memasyarakat. Istilah komputer dan internet, yang hampir semuanya berasal dari bahasa Inggris itu, erat kaitannya dengan bahasa Indonesia, sehubungan dengan upaya pemerdayaan kosakata berikut peristilahannya.

Mereka yang benar-benar menguasai bahasa Inggris tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam memahami isi atau konsep di balik peristilahan yang digunakan. Akan tetapi, peristilahan tersebut akan sulit dipahami oleh mereka yang pengetahuan bahasa Inggrisnya belum memadai. Untuk itu, harus dilakukan upaya pengindonesiaannya, bukan semata-mata untuk menolong mereka yang belum menguasai bahasa Inggris, melainkan untuk memper-lengkap dan memperkaya perbendaharaan kata dan istilah bahasa Indonesia itu sendiri.

Khusus mengenai komputer, sudah terbit beberapa kamus istilah. Ada yang sudah memandai dan ada yang belum. Sudah atau belum memadainya kamus istilah tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu perumusan konsepnya dan penentuan padanan bahasa Indonesianya. Pada umumnya definisi yang menjelaskan istilah yang menjadi lema kamus tersebut sudah memenuhi persyaratan leksikografi. Akan tetapi, penentuan padanan Indonesianya seringkali belum tepat; mungkin karena penerjemahan yang terlalu harfiah atau karena pilihan kata yang tidak sesuai. Istilah *back up*, misalnya, dipadankan dengan *cadangan*, tetapi ada pula yang mengindonesiakannya dengan *rekam cadang*. Kedua-duanya bertolak dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari hasilnya (untuk *cadangan*) dan dari prosesnya (untuk *rekam cadang*).

Pengindonesiaan tersebut selama ini dilakukan melalui penyesuaian ejaan dan penerjemahan. Penyesuaian ejaan terlihat, antara lain, pada *cursor*, *diskette*, dan *icon* yang masing-masing diindonesiakan menjadi *kursor*, *disket*, dan *ikon*. Selain melalui penyesuaian ejaan, ada pula yang mengindonesiakan *cursor* melalui penerjemahan dan menghasilkan *pemandu* sebagai padanannya.

Penyesuaian ejaan juga diberlakukan untuk *access* dan *hypertext* yang masing-masing menjadi *akses* dan *hiperteks*. Sementara itu, *laptop* bahkan

dapat diindonesiakan tanpa penyesuaian ejaan sama sekali sehingga kita pun dapat menyebutnya *laptop*. Lain halnya jika penyesuaian ejaan itu menyangkut istilah yang dalam bahasa Inggrisnya lebih dari satu kata. Istilah Indonesianya harus memperlihatkan struktur yang berlaku, yaitu yang kita kenal sebagai hukum D-M (diterangkan-menerangkan). Contoh: *program aplikasi* kita gunakan sebagai padanan *application program*.

Hukum D-M itu juga tetap diperhatikan dalam pengindonesiaan melalui penerjemahan. Yang sudah dikenal umum ialah *perangkat lunak* dan *perangkat keras* sebagai padanan *soft ware* dan *hard ware*. Demikian juga dengan *data base*, *flow chart*, *error message* dan *password* yang masing-masing dipadankan dengan *pangkalan data*, *bagan alir*, *pesan galat*, dan *kata sandi*.

Bagaimana dengan *CPU* (*Central Processing Unit*)? Perlukah singkatan itu dipertahankan dalam padanan Indonesianya? Kalau konsepnya diterjemahkan dengan *unit pemrosesan pusat* atau *unit pemrosesan sentral*, dapatkah singkatan *UPP* atau *UPS* diterima sebagai padanan *CPU*? Pertanyaan seperti ini hanya mungkin dapat dijawab secara tepat jika para pakar di bidang komputer (dan internet) bekerja sama dengan pakar bahasa untuk menemukan padanan yang tepat untuk sejumlah istilah yang dianggap muskil. Melalui kerja sama seperti itu, kita dapat dengan mudah menentukan pilihan apakah (*world wide web*) akan dipadankan dengan *www* (*waring wera wanua*) atau *jji* (*jaring jagat jembar*)? Alternatif pertama berasal dari bahasa Jawa Kuno: *waring* berarti *jala*, *wera* bermakna *luas*, dan *wanua* menggambarkan daerah atau wilayah yang dihuni. Pada alternatif kedua kata *jaring* dan *jagat* sudah jelas maknanya, sedangkan makna *jembar* sama dengan *luas*.

Kerja sama tersebut dapat diperluas dengan melibatkan para pakar dari negeri yang bahasanya serumpun seperti Malaysia dan Brunei Darussalam sehingga kalau kita masih belum berhasil menemukan padanan *home page*, misalnya, apa salahnya kita pun menggunakan dan memanfaatkan kata *laman* (bentuk asalnya *halaman*) yang telah mereka temukan sebagai pada *home page* tersebut.

Tampaknya kita dituntut untuk makin menyadari bahwa tantangan era penjagatan (globalisasi) dalam bidang teknologi informasi ini, termasuk tantangan untuk mengindonesiakan peristilahannya, hanya mungkin dapat dihadapi kalau para pakarnya tidak lagi asyik sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing, tetapi mulai membina dan mengembangkan kerja sama yang dapat memberikan manfaat tidak saja bagi para pakar yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat kita pada umumnya.

VII. PENGAJARAN BAHASA DAN SARANANYA

1. PENGAJARAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ASING^{*)}

Judul makalah ini tidak sama dengan yang diminta oleh Panitia, yaitu "Perkembangan Bahasa Indonesia Sedunia". Pengubahan judul itu terpaksa dilakukan berdasarkan dua alasan. Pertama, karena tidak tersedianya informasi dan data yang dapat disajikan dalam makalah dengan judul seperti yang diminta Panitia itu. Kedua, judul yang dipilih sebagai pengganti itu rasanya cukup sesuai dengan tema Simposium.

Yang dimaksud dengan *bahasa Indonesia sebagai bahasa asing* dalam judul makalah ini ialah bahasa Indonesia yang diajarkan kepada atau yang dipelajari oleh mereka yang tidak tergolong sebagai orang Indonesia. Dengan pengertian seperti itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa asing (selanjutnya disebut BIPA) tidak hanya diberikan oleh lembaga pendidikan di luar Indonesia, tetapi juga oleh lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, yang berada di Indonesia. Untuk keperluan makalah ini, yang akan dipaparkan hanyalah pengajaran bahasa Indonesia yang diajarkan oleh beberapa perguruan tinggi yang berada di luar Indonesia.

Dengan mengecualikan Negeri Belanda yang memiliki Universitas Leiden yang sudah sejak lama dikenal sebagai pusat studi untuk bahasa dan sastra Indonesia, melalui Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988 di Jakarta kita memperoleh informasi yang cukup memadai mengenai pengajaran BIPA di luar Indonesia. Pertama-tama tentu perlu disebutkan Jepang, Korea Selatan, dan Cina sebagai tiga negara Asia terkemuka yang mengajarkan BIPA. Akan tetapi, karena informasi yang lebih mutakhir mengenai pengajaran BIPA di ketiga negara itu akan kita peroleh melalui simposium ini, maka hal itu tak akan disinggung pada makalah ini.

Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia patut dicatat sebagai empat negara Eropa Barat yang mengajarkan BIPA. Selain itu, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan tentu saja Australia juga tak kalah pentingnya dalam hal perintisan dan pengembangan pengajaran BIPA. Berdasarkan urutan waktu yang menandai dimulainya pengajaran BIPA, Prancis boleh dikatakan merupakan negara pertama. Bersama-sama dengan bahasa Arab, Persia, dan Turki, sejak tahun 1795 bahasa Indonesia (pada saat itu tentu saja masih bernama bahasa Melayu) diajarkan di *Institut National des Langues et Civilisations Orientales*, terutama untuk kepentingan politik dan perdagangan pemerintah Prancis.

^{*)} Makalah "Simposium Perkembangan Bahasa Indonesia di Kawasan Timur Jauh" yang diselenggarakan pada tanggal 19-20 Juli 1993 di Tokyo

Setelah itu, berturut-turut BIPA mulai diajarkan di Amerika (1948), Australia (1957), Italia (1964), Inggris (1967), dan Selandia Baru (1968). Tidak diketahui secara pasti sejak kapan BIPA mulai diajarkan di Jerman. Meskipun demikian, penelitian tentang sejarah bahasa Melayu telah dilakukan oleh, misalnya, Dempwolff tahun 1934--1938. Sementara itu, Hilgers-Hesse dan R. Carle merupakan peneliti sastra Indonesia yang terkemuka.¹ Dewasa ini di sana ada tiga universitas yang sekaligus mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia (Hamburg, Köln, dan Frankfurt) dan ada enam universitas yang hanya mengajarkan bahasa Indonesia (Bremen, Bonn, Bielefeld, Gottingen, Nürtingen, dan München).

School of Oriental and African Studies (SOAS) di London merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Inggris yang melaksanakan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang didampingi dengan pengajaran bahasa/sastra Belanda dan Arab, antropologi, ekonomi, hukum, politik, dan perbandingan agama. Hal penting yang perlu dicatat ialah bahwa bahasa/sastra Indonesia dapat dipelajari di SOAS untuk memperoleh gelar akademik sampai dengan jenjang pascasarjana.

Sama halnya dengan di Inggris dan Prancis, hanya ada satu lembaga pendidikan di Italia yang menyelenggarakan pengajaran BIPA, yaitu *Istituto Universitario Orientale* yang berada di kota Napoli. Sementara itu, dilihat dari segi jumlah lembaga pendidikan penyelenggara BIPA ini, keadaan di Selandia Baru lebih "menggembirakan" karena di sana terdapat tiga perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA, yaitu Universitas Auckland, Universitas Victoria (di Wellington), dan Rangitoto College.

Di Amerika Serikat pengajaran BIPA dipelopori oleh Prof. Isidore Dyer pada tahun 1948 di Universitas Yale, menyusul kemudian Prof. John Echols (yang di Indonesia kamus susunannya sangat dikenal secara meluas) pada tahun 1951 di Universitas Cornell. Selain di kedua universitas tersebut, pengajaran BIPA juga dapat diikuti di tujuh universitas lainnya yaitu di Universitas Hawaii, Berkeley, Wisconsin, Ohio, Michigan, Northern Illinois, dan Arizona. Menurut hasil penelitian yang dilaporkan oleh Soemarmo (1988), bahasa Indonesia di Amerika merupakan bahasa Asia ketiga yang paling banyak dipelajari (setelah bahasa Jepang dan Cina).

Pengajaran BIPA di Australia memperlihatkan corak dan warna tersendiri karena tidak hanya melibatkan perguruan tinggi, tetapi juga sekolah dasar dan sekolah menengah. Tercatat tidak kurang dari 13 perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA. Universitas Sydney dan Universitas Melbourne memelopori kegiatan itu pada tahun 1957, sedangkan University College of the Northern Territory baru mengawali pengajaran BIPA pada tahun 1986. Royal Australian Air Force School of Languages bahkan menyelenggarakan kursus intensif bahasa Indonesia sejak tahun 1950. Kursus semacam itu, yang lebih singkat, juga dikelola oleh beberapa perguruan tinggi dan sekolah menengah.

Minat orang Australia yang begitu besar untuk mempelajari bahasa Indo-

nesia itu, selain karena makin gencarnya arus pariwisata di antara penduduk kedua negara, terutama dari Australia ke Indonesia, juga disebabkan oleh pertimbangan yang lebih bersifat geopolitik, mengingat Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan ASEAN, di samping peranan Indonesia selaku pelopor dan pimpinan gerakan nonblok. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau menurut Survei 1983, seperti yang dikemukakan oleh Sarumpaet (1988), bahasa Indonesia menempati urutan keempat di antara bahasa-bahasa asing yang diajarkan di Australia, setelah bahasa Prancis, Jerman, dan Italia.

Berkenaan dengan materi pengajaran, dapat dikemukakan bahwa pada umumnya pengajaran bahasa dikaitkan dengan rangka memperkenalkan sastranya. Melalui karya-karya sastra yang sudah diterjemahkan, makin jelas terlihat bahwa sastra tidak hanya menopang pengajaran bahasa dalam rangka memperkaya perbendaharaan kosakata para pelajar/mahasiswa, tetapi juga sangat bermanfaat untuk mengamati gaya bahasa yang digunakan. Bahkan hal itu pada gilirannya dapat dijadikan salah satu pintu masuk ke arah pengenalan kehidupan masyarakat dan kebudayaan Indonesia dalam arti yang luas.

Dengan memperhatikan dorongan semangat yang melatarbelakangi pilihan untuk mempelajari BIPA (masalah ini juga akan disinggung), persoalan yang dihadapi ialah bagaimana sebaiknya proporsi perbandingan antara bahasa tulis dan bahasa lisan. Ada kecenderungan bahwa bahasa lisan perlu lebih diperhatikan daripada bahasa tulis. Hal itu berarti bahwa kurikulumnya harus disusun sedemikian rupa sehingga para mahasiswa memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk melatih dan meningkatkan keterampilan dan penguasaan bahasa lisannya, baik pada saat menyimak maupun (terlebih-lebih) pada saat berbicara.

Upaya peningkatan penguasaan dan keterampilan berbahasa lisan ini dapat dilakukan di dalam dan di luar kelas. Upaya ke arah itu perlu didukung, antara lain, oleh tersedianya berbagai bahan pengajaran yang diperlukan (termasuk buku dan kamus), laboratorium bahasa, dan (tenaga pengajar) penutur asli. Melakukan kunjungan langsung ke Indonesia dan tinggal di sana untuk beberapa waktu tentu merupakan hal yang akan sangat membantu, bukan saja karena yang bersangkutan akan memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperagakan sambil meningkatkan kemampuan bahasa lisannya, melainkan juga sekaligus yang bersangkutan akan mengetahui begitu beragamnya cara orang Indonesia berbahasa. Sebagai akibatnya, kalau kita berbicara mengenai usaha pembakuan, hal itu hanya mungkin dapat diterapkan (dan memang sudah diprioritaskan) terhadap bahasa tulis, terutama bahasa tulis ragam resmi melalui pemasyarakatan bahasa Indonesia (yang telah disepakati untuk disebut) yang baik dan benar. Upaya pembakuan dengan tujuan dan intensitas yang seperti itu sangat tidak mungkin dapat dilakukan terhadap pemakaian bahasa Indonesia lisan oleh masyarakat penutur di Indonesia secara menyeluruh.²

Kecenderungan untuk lebih memperhatikan/mengutamakan bahasa lisan daripada bahasa tulis itu didasarkan pada tuntutan untuk menguasai bahasa

Indonesia sebagai alat komunikasi semata-mata untuk mencapai tujuan lain, misalnya agar dapat melakukan penelitian di Indonesia dalam bidang yang tidak ada kaitannya dengan bahasa dan sastra Indonesia. Dapat dikemukakan bahwa para peminat BIPA di berbagai negara pada umumnya "didominasi" oleh mahasiswa jurusan antropologi, sosiologi, politik, ekonomi, perbandingan agama, dll. Tuntutan semacam itu bahkan datang pula dari kalangan masyarakat di luar universitas sehingga tidaklah mengherankan kalau Nothofer (1988) merasa perlu untuk melaporkan bahwa para peminat BIPA di Jerman dari luar universitas lebih banyak jumlahnya daripada yang berasal dari dalam universitasnya (mahasiswa) sendiri.

Motivasi untuk mempelajari BIPA itu secara jelas terlihat pada laporan Soemarmo (1988) mengenai keadaan di Amerika. Ingin dapat berbicara (sebanyak 83%) menempati urutan tertinggi sehubungan dengan alasan mempelajari bahasa Indonesia. Hal itu dikontraskannya dengan alasan ingin dapat menulis makalah (sebanyak 13%) yang menempati urutan paling bawah. Di antara keduanya berturut-turut terdapat alasan:

- a. berencana mengunjungi Indonesia (75%),
- b. agar dapat membaca surat kabar dan buku-buku terbitan Indonesia (63%),
- c. ingin mempelajari kebudayaan Indonesia (57%),
- d. agar dapat menulis surat dalam bahasa Indonesia (40%),
- e. untuk keperluan pekerjaan (38%),
- f. karena memiliki teman/keluarga di Indonesia (17%), dan
- g. ingin melakukan penelitian di Indonesia (16%).

Pada laporan itu dikemukakan juga urutan bidang yang diinginkan diketahui, yaitu:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. sejarah (76%) | f. kesenian (49%) |
| b. politik (67%) | g. ekonomi (41%) |
| c. masalah sosial (65%) | h. bahasa daerah (24%) |
| d. cerita rakyat (57%) | i. olahraga (6%) |
| e. kesusastraan (52%) | |

Minat mahasiswa Amerika itu cukup menarik untuk dibandingkan dengan minat sarjana Jerman ahli studi Indonesia. Seperti yang dikutip oleh Nothofer (1988), berdasarkan ahli studi Indonesia pada tahun 1987 yang berjumlah 127 orang, pemeringkatnya adalah:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. antropologi (30 orang) | d. agama (9 orang) |
| b. ilmu-ilmu sosial (12 orang) | e. sastra (7 orang) |
| geografi (12 orang) | f. sejarah (6 orang) |
| c. ekonomi (10 orang) | g. kesenian (5 orang) |
| ilmu-ilmu terapan (10 orang) | |
| linguistik (10 orang) | |

Setelah kesenian, masih ada sejumlah bidang lain yang jumlah ahlinya berkisar antara satu sampai tiga orang.³

Di atas telah disebutkan bahwa keberhasilan pengajaran BIPA yang berorientasi pada penguasaan bahasa lisan antara lain ditentukan oleh faktor sarana (laboratorium bahasa) dan manusia (pengajar/penutur asli). Dalam konteks yang tidak dibatasi oleh penekanan terhadap keperluan tertentu seperti itu, buku rujukan yang digunakan dalam penyelenggaraan BIPA pastilah memainkan peran utama yang akan sangat menunjang keberhasilan tersebut. Agar buku rujukan pelajaran BIPA itu sesuai dengan latar belakang kebahasaan para mahasiswa yang mempelajarinya, maka perlu diusahakan agar untuk sekurang-kurangnya satu negara terdapat satu buku rujukan. Mungkin saja dapat dilakukan upaya yang melebihi hal itu, yakni setiap perguruan tinggi yang mengajarkan BIPA dapat menyusun dan mengelaborasi bahan pelajarannya masing-masing, termasuk dalam penyusunan buku rujukan tersebut.⁴

Upaya setiap negara atau setiap perguruan tinggi penyelenggaraan BIPA seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang bertujuan untuk "mempertemukan" para penyelenggara BIPA. Simposium ini jelas merupakan bentuk tindak lanjut yang akan sangat bermanfaat bukan hanya dalam rangka saling menukar pengalaman dan informasi mengenai pengajaran BIPA di negara/perguruan tinggi masing-masing, melainkan juga dalam rangka melakukan koordinasi dan membina kerja sama agar pengajaran BIPA di kawasan Timur Jauh ini dapat ditingkatkan lagi.

Pertemuan koordinasi yang demikian dilakukan oleh negara-negara penyelenggara BIPA di Eropa. Sejak 1978 diadakan semacam seminar atau lokakarya "Studi Melayu-Indonesia di Eropa". Kegiatan itu diadakan secara berkala, dua tahun sekali. Pertemuan kedua bahkan diadakan hanya setahun setelah pertemuan pertama: 1978 di Paris dan 1979 di London. Kota lain yang pernah menjadi penyelenggara, antara lain, Napoli, Leiden, Sintra (Portugal), Passau, dan Bern. Dapat ditambahkan bahwa pada tahun 1991 di Jakarta telah diadakan "Seminar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing)" yang dihadiri oleh wakil-wakil perguruan tinggi penyelenggara BIPA dari Australia dan Indonesia. Menurut rencana, pada tahun 1994 di Salatiga (Indonesia), dengan Universitas Kristen Sastya Wacana sebagai tuan rumah, akan diadakan pertemuan semacam itu dengan mengikutsertakan para penyelenggara BIPA yang lebih luas.

Dalam hubungan itu, patut pula dicatat berbagai kegiatan serupa yang tidak saja diprakarsai dan diselenggarakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh Malaysia dan Brunei Darussalam, baik yang berkenaan dengan bahasa dan sastra Indonesia, maupun yang berhubungan dengan bahasa dan sastra Melayu. Catatan khusus dapat ditambahkan sehubungan dengan bahasa Indonesia/Melayu ini. Pertama, seminar tahun 1992 di Tanjung Pinang, dihadiri oleh para peserta yang mewakili kelima negara anggota ASEAN, dengan tema: Bahasa Melayu (bahasa Indonesia) sebagai Bahasa Pergaulan di Kawasan Asia Tenggara. Kedua, seminar tahun 1993 yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional (Jakarta), di bawah pimpinan Prof. Sutan Takdir Alisjahbana, ber-

tujuan mengupayakan, melalui pembakuan (standardisasi), agar yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam adalah jenis bahasa yang sama.⁵

Upaya yang tidak kalah pentingnya untuk menunjang upaya peningkatan pengajaran BIPA itu dapat dilakukan melalui terbitan-terbitan berkala. Masalahnya adalah seberapa jauh kita bisa memanfaatkan terbitan-terbitan semacam itu. Mengenai terbitan ini dapat disebutkan, antara lain, *Bijdragen* (Belanda), *Archipel* (Prancis), *Rima* atau *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* (Australia), dan *Papers on Oriental Studies* (Cina). Di Malaysia ada *Dewan Bahasa* dan *Dewan Sastra* yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, sedangkan yang dikelola oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ialah (majalah) *Bahasa dan Sastra*. Kalau perlu, para penyelenggara BIPA peserta Simposium ini pun dapat pula mempertimbangkan kemungkinan melakukan kerja sama dalam hal terbitan seperti itu.

Selain itu, kerja sama antara penyelenggara BIPA di luar Indonesia dengan mitranya yang berada di Indonesia pasti akan merupakan upaya yang akan banyak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Masih banyak upaya lainnya yang dapat dibicarakan dalam rangka meningkatkan pengajaran BIPA ini. Untuk itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sesuai dengan kemampuan dan batas-batas kewenangannya, akan memberikan bantuan yang diperlukan.

Catatan:

1. Untuk Italia, Giovanni Gaggino (lahir tahun 1846 di sebuah kota kecil dekat Genova), meskipun belum dapat digolongkan sebagai peneliti bahasa yang sebenarnya, pada tahun 1884 di Singapura berhasil menerbitkan sebuah kamus kecil bahasa Italia-Melayu untuk keperluan percakapan sehari-hari. Sebagai seorang pedagang, sebagian besar hidupnya dia jalani di Singapura dan meninggal tahun 1918 di sebuah sanatorium di Garut, Jawa Barat.
2. Strategi pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu perlu memperhatikan hasil Sensus Penduduk Indonesia tahun 1990 (yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik, Jakarta). Berdasarkan jenis bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh penduduk yang berusia 5 tahun ke atas, diketahui angka-angka sebagai berikut. Penduduk yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah 23.802.520 (15,07%). Penduduk yang secara tegas menyatakan tidak dapat berbahasa Indonesia berjumlah 27.055.488 (17,13%). Sementara itu, ada pula golongan penduduk yang dapat berbahasa Indonesia, tetapi tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari; jumlahnya 107.066.316 (67,80%).
3. Pada bagian lain Nothofer (1988) juga mengutip dari sumber yang sama, yakni *Dictionary of West European Indonesianist* tahun 1987. Berdasarkan

ahli-ahli studi Indonesia yang terdapat di Eropa yang jumlahnya 760 orang, diketahui bahwa yang terbanyak terdapat di Belanda (423 orang), kemudian secara berturut-turut (sampai peringkat ke-5) diikuti oleh Jerman (127 orang), Inggris (84 orang), Prancis (53 orang), dan Swis (25 orang). Berdasarkan bidang keahliannya, keadaan di kelima negara Eropa Barat itu menunjukkan bahwa yang paling banyak ialah ahli di bidang antropologi (174 orang), kemudian sejarah (130 orang), ekonomi (59 orang), dan linguistik (53 orang). Setelah peringkat ke-4 itu, terlihat, antara lain, bahwa ahli di bidang sastra berjumlah 30 orang, sedangkan yang meminati bidang agama ada 27 orang.

4. Nothofer, Pampus, dan Poedjosoedarmo secara bersama-sama menyusun *Bahasa Indonesia: Indonesisch fur Deutsche* (2 jilid) untuk pengajaran BIPA di Jerman. Untuk Prancis tercatat dua buku, yakni *Introduction à l'Indonésien* karangan D. Lombard dan *Méthode d'Indonésien* yang disusun oleh P. Labrousse dan F. Soemargono. Di Amerika ada *Beginning Indonesian* yang ditulis oleh John U. Wolff. Yang paling banyak terdapat di Australia, sekurang-kurangnya ada 25 buah, lima di antaranya (sekadar contoh) adalah:
 - a. *Introduction to Bahasa Indonesia* (J.P. Sarumpaet dan J.A.C. Mackie)
 - b. *Indonesian fur Schools* (V.J. Turner)
 - c. *Learn Indonesian* (J.D. McGarry dan Sumaryono)
 - d. *Bahasa Indonesia: Langkah Baru, A New Approach* (Yohanni Johns)
 - e. *Essentials of Indonesian Grammar* (Li Chuan Siu)
5. Pada seminar itu penulis mengemukakan bahwa upaya pembakuan dengan tujuan seperti itu sangat tidak mungkin dapat dilakukan. Meskipun bahasa yang digunakan di ketiga negara itu bersumber dari bahasa yang sama (bahasa Melayu), perkembangan dan arah pengembangannya di negara masing-masing memperlihatkan perbedaan yang cukup besar. Dengan perkataan lain, bahasa di ketiga negara itu tidak dapat diseragamkan, apalagi melalui semacam usaha rekayasa. Yang dapat dilakukan ialah mengupayakan agar bahasa di ketiga negara itu benar-benar dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang mantap di segala bidang, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern. Untuk itu, sejak tahun 1972 ada wadah kerja sama yang disebut *MBIM* (Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia). Mulai tahun 1985, karena Brunei Darussalam ikut, nama wadah itu berubah menjadi *Mabbim* (Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia). Tujuan utamanya ialah menyusun istilah dalam bidang iptek tersebut. Yang diprioritaskan ialah istilah untuk empat bidang ilmu dasar, yaitu biologi, kimia, matematika, dan fisika. Menurut program kegiatan untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang, upaya penyusunan istilah itu akan dialihkan pada bidang ekonomi, kedokteran, filsafat, linguistik, dan sastra.

2. UPAYA MENINGKATKAN PENGAJARAN BIPA DI LUAR INDONESIA*

1. Bahasa Indonesia sudah lama diajarkan di luar negeri, bahkan sejak sebelum nama bahasa Indonesia digunakan secara resmi sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 1928 yang merupakan keputusan Kongres Pemuda II.¹ Setiap negara melaksanakan pengajaran bahasa Indonesia dengan cara masing-masing, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, tenaga pengajar yang ada, ketersediaan bahan pelajaran dan sarana pendukung pengajaran yang lain (seperti kamus, bahan bacaan, dan laboratorium bahasa), serta jumlah mahasiswa yang berminat mempelajari bahasa Indonesia. Satu-satunya alat pengikat yang dapat "mendekatkan" para pengelola pengajaran bahasa Indonesia di berbagai negara itu² ialah perkembangan atau perubahan metodologi pengajaran, khususnya yang menyangkut pengajaran bahasa asing.

Ketiadaan kontak di antara negara/universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia itu berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Menurut catatan, baru mulai tahun 1978 diselenggarakan seminar/lokakarya berkala (setiap dua tahun?) "Studi Melayu-Indonesia di Eropa".³ Universitas-universitas di Asia Timur telah dua kali mengadakan Simposium Perkembangan Bahasa Indonesia di Kawasan Asia Timur, yaitu di Tokyo (19—20 Juli 1993) dan Beijing (14—17 Desember 1995).⁴

Yang cukup unik ialah perkembangan pengajaran bahasa Indonesia di Papua Nugini. Dengan maksud lebih memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di negara itu, Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Port Moresby mengupayakan siaran pelajaran bahasa Indonesia lewat televisi (seminggu sekali) dan mengisi surat kabar setempat dengan bahan pelajaran bahasa Indonesia (juga seminggu sekali). Sejak setahun terakhir ini bahkan tengah disusun kamus tiga bahasa: Inggris-Indonesia-Pidgin. Sementara itu, beberapa universitas Australia menempuh cara yang dianggapnya lebih efektif dan efisien, yaitu menjalin hubungan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi tertentu di Indonesia.⁵

2. Bahasa Indonesia yang diajarkan di luar negeri itu sekarang lazim disebut BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing). Orang asing yang mempelajari

* Makalah Seminar dan Workshop Penyebaran/Peningkatan Studi Bahasa dan Kebudayaan Indonesia, Passau (Jerman), 18—21 September 1997.

bahasa Indonesia terdapat juga di Indonesia. Itulah sebabnya beberapa perguruan tinggi di Indonesia sejak tahun 70-an juga mengajarkan BIPA.⁶ Kenyataan inilah yang melatarbelakangi dan menggerakkan adanya kerja sama di antara sejumlah universitas di luar negeri dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pengajaran BIPA, baik melalui pertukaran dosen maupun mahasiswanya (lihat juga Catatan 5).

Untuk memberi kesempatan kepada para pengelola BIPA di luar negeri dan Indonesia agar mereka dapat bertemu, saling bertukar wawasan dan pengalaman, pada Kongres Bahasa Indonesia V tahun 1988 dan juga pada Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993 masalah BIPA ini dibicarakan dalam sidang kelompok khusus.⁷ Kalau pada Kongres 1988 hanya disimpulkan tiga hal yang menyangkut kerja sama antarpengelola BIPA di luar negeri, bantuan dari pihak (pemerintah) Indonesia, dan perlunya dibentuk satu pusat internasional untuk kajian bahasa Indonesia, pada kongres 1993 kesimpulan tentang pengajaran BIPA mencakupi bidang yang lebih luas lagi. Upaya peningkatan mutu pengajaran BIPA lebih eksplisit dan dirinci, ada yang menyangkut dosen berikut kurikulum dan materi pengajaran dan ada pula yang berkenaan dengan perlunya dilakukan penelitian yang cukup komprehensif tentang aspek-aspek pengajaran BIPA. Selain itu, unsur budaya mendapat penekanan yang penting dalam kaitannya dengan materi BIPA.⁸

3. Sejak Kongres Bahasa Indonesia 1988 membicarakan BIPA, berbagai forum diadakan. Pada bulan Februari 1991 Fakultas Sastra Universitas Indonesia tampil sebagai penyelenggara "Seminar BIPA" yang pesertanya mewakili sejumlah perguruan tinggi dari dua negara: Indonesia dan Australia. Kemudian Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga mengadakan "Konferensi Internasional I Pengajaran BIPA" pada tanggal 20—23 Januari 1994, sedangkan "Konferensi Internasional II Pengajaran BIPA" diadakan oleh IKIP Padang pada tanggal 29 Mei—1 Juni 1996. Kedua konferensi ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Sebelum Konferensi Padang, Universitas Indonesia mengadakan "Kongres Internasional Pengajaran BIPA" (28—30 Agustus 1995). Yang menarik ialah persoalan nama: di Salatiga dan Padang digunakan *konferensi*, sedangkan Universitas Indonesia menggunakan *kongres*.⁹ Sementara itu, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia telah pula menjadi tuan rumah "Kongres Bahasa Melayu Sedunia" di Kuala Lumpur pada tanggal 21—25 Agustus 1995. Konsep bahasa Melayu pada kongres itu bercorak supranasional karena cakupannya meliputi bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, termasuk bahasa Melayu yang digunakan di Brunei Darussalam (lihat juga Catatan 3 dan 4).

4. Salah satu keputusan Kongres Bahasa Indonesia 1993 berkenaan dengan upaya meningkatkan mutu pengajaran BIPA. Unsur pertama dan utamanya ialah bahan pengajaran, terutama yang berupa buku. Mengingat sudah cukup memadainya, terutama dari segi jumlah, buku pelajaran yang digunakan untuk keperluan pengajaran BIPA, sekarang ini sudah saatnya dilakukan penelitian terhadap semua buku pelajaran BIPA yang telah diterbitkan dan digunakan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

Dilihat dari segi bahasa yang digunakan, ada buku pelajaran yang menitikberatkan pada penguasaan bahasa yang baku dan ada pula yang lebih mementingkan penguasaan bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan perkataan lain, yang disebutkan terakhir ini berorientasi pada penguasaan bahasa percakapan. Dalam menghadapi pilihan semacam itu, yang perlu dijadikan pertimbangan utama ialah tujuan penutur asing yang bersangkutan dalam mempelajari bahasa Indonesia. Penguasaan bahasa (bahasa baku atau bahasa percakapan) itu perlu dilengkapi dengan pengenalan terhadap unsur budayanya.

Pengenalan terhadap unsur budaya ini sebaiknya dilakukan melalui pengiriman mahasiswa yang bersangkutan ke Indonesia dan tinggal di sana beberapa lama, bergaul dengan sesama mahasiswa dari Indonesia, berbicara dengan orang-orang Indonesia yang kelompok etnisnya sangat beragam, mengetahui adat-istiadat dan kebiasaan mereka, dan lain-lain. Dalam keadaan "darurat", yaitu apabila pengiriman mahasiswa ke Indonesia itu tidak mungkin dilakukan, pengenalan terhadap unsur budaya ini bisa ditempuh melalui bahan bacaan, termasuk surat kabar dan majalah Indonesia, melihat rekaman elektronik yang secara audio-visual menggambarkan "denyut budaya" Indonesia. Khusus dalam hal ini perwakilan Indonesia di luar negeri dapat berperan secara lebih aktif. Oleh karena itu, perwakilan Indonesia di suatu negara perlu mengetahui lembaga-lembaga pendidikan mana yang mengajarkan BIPA sambil sekaligus berupaya mengetahui pula kebutuhan-kebutuhannya.

Berdasarkan penelitian terhadap buku-buku pelajaran BIPA itu, paling tidak dapat disusun suatu buku pelajaran yang berlaku secara umum untuk negara yang bersangkutan. Dari buku "resmi" untuk setiap negara itu dapat pula disusun semacam buku pelengkap, yaitu buku yang disusun oleh masing-masing lembaga pendidikan penyelenggara pengajaran BIPA itu sendiri. Untuk itu, pertemuan berkala di antara para penyelenggara pengajaran BIPA di suatu negara akan memberikan manfaat yang makin berarti.

5. Pengajar BIPA di luar Indonesia seyogianya dilengkapi oleh seorang penutur asli yang sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan sarjana (S1). Akan tetapi, kenyataannya sering menunjukkan bahwa tenaga pengajar Indonesia tersebut belum tentu berlatar belakang pendidikan dan memiliki

kualifikasi yang cocok untuk keperluan pengajaran BIPA. Ada kalanya, mungkin dalam keadaan terpaksa, persyaratan seperti itu terpaksa pula "dilupakan" karena yang penting adalah menampilkan sosok bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Indonesia sendiri. Kasus seperti ini harus dianggap sementara. Apabila tidak, hal itu pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi upaya pencapaian tujuan yang sebenarnya dari pengajaran BIPA itu sendiri.¹⁰

6. Pertumbuhan dan perkembangan pengajaran BIPA sekarang, baik yang diselenggarakan di luar Indonesia maupun di Indonesia, sudah mencapai taraf yang tidak lagi memungkinkan penyelenggara pengajaran BIPA itu asyik berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, kerja sama dan koordinasi di antara mereka merupakan sesuatu yang dari waktu ke waktu memerlukan perhatian yang makin bersungguh-sungguh.

Kerja sama dan koordinasi yang demikian dapat dilaksanakan melalui pertemuan berkala, baik di antara para penyelenggara BIPA di suatu negara tertentu, di antara sejumlah negara yang secara geografis berada di kawasan tertentu, maupun melalui pertemuan antarnegara yang cakupannya lebih internasional.

Kerja sama yang sifatnya lebih permanen perlu diupayakan antara perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di luar Indonesia dengan perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di Indonesia. Memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*) untuk keperluan itu sebaiknya dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal itu diperlukan agar pelaksanaannya, yang pasti akan menyangkut pengaturan dari segi administrasi, sarana, dan dana, tidak menghadapi kendala birokratis yang berarti. Selain itu, kerja sama semacam itu akan lebih efisien dan efektif kalau sebelum piagam kerja sama tersebut diresmikan/ditandatangani, sudah ada perjanjian kerja sama kebudayaan di antara kedua pemerintah yang dapat dirujuk.

Setakat ini telah ada kerja sama dalam arti dan bentuk yang lebih sederhana. Meskipun demikian, upaya setiap negara atau setiap perguruan tinggi penyelenggara BIPA seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang bertujuan "mempertemukan" para penyelenggara BIPA. Seminar ini jelas merupakan bentuk tindak lanjut yang akan sangat bermanfaat bukan hanya dalam rangka saling menukar pengalaman dan informasi mengenai pengajaran BIPA di perguruan tinggi masing-masing, melainkan juga dalam rangka melakukan koordinasi dan membina kerja sama agar pengajaran BIPA secara keseluruhan dapat ditingkatkan lagi.

7. Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengajaran BIPA, terutama di luar Indonesia, pemerintah Indonesia, melalui koordinasi antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Luar Negeri, perlu

segera mengambil langkah-langkah sehubungan dengan hal-hal berikut.

- a. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengajaran BIPA di luar Indonesia, antara lain yang berupa buku pelajaran, bahan bacaan, serta alat penunjang pengajaran lainnya seperti surat kabar, majalah, kaset, dan VCD.
 - b. Memberikan kemudahan bagi tenaga Indonesia yang akan bertugas sebagai pengajar BIPA di luar Indonesia.
 - c. Mengupayakan agar di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dibentuk semacam Pusat Kebudayaan Indonesia yang dapat disejajarkan/dibandingkan dengan Centre Culturel Français-nya Prancis, Goethe Institut-nya Jerman, atau Erasmus Huis-nya Belanda (khusus untuk keperluan ini, kalau dianggap perlu, dapat dipertimbangkan kemungkinan melakukan kerja sama dengan kantor perwakilan Malaysia dan Brunei Darussalam di negara yang bersangkutan).
 - d. Mempertimbangkan pemberian beasiswa kepada calon pengajar BIPA dari luar Indonesia untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi Indonesia sampai tingkat sarjana (S1).
8. Di samping keempat aspek pengajaran BIPA yang telah secara singkat dipaparkan di atas (bahan pelajaran, pengajar, kerja sama, dan peran pihak Indonesia), tentu masih ada sejumlah aspek lainnya yang juga perlu dikemukakan dan dibicarakan dalam seminar ini. Dari keempat aspek itu sendiri pun tentu masih ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau diberi catatan khusus.

Sekadar contoh, program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan tenaga pengajar BIPA bukanlah merupakan terminal akhir. Kepada mereka yang sudah menjadi pengajar BIPA pun perlu pula diberi kesempatan untuk senantiasa memutakhirkan pengetahuan dan wawasannya.

Catatan:

1. Dengan mengecualikan Negeri Belanda, bahasa Indonesia diajarkan di Prancis mulai 1795 dan di Jepang mulai 1925. Setelah Sumpah Pemuda 1928 dan sebelum Proklamasi Kemerdekaan 1945, pada tahun 1931 Jerman mulai mengajarkan bahasa Indonesia di Universitas Hamburg. Setelah zaman kemerdekaan, berturut-turut bahasa Indonesia mulai diajarkan di Amerika Serikat (1984), RRC (1950), Australia (1957), Italia (1964), Korea Selatan (1964), Inggris (1967), dan Selandia Baru (1968). Selain di negara-negara tersebut, Rusia juga pantas dicatat sebagai salah satu negara yang mengajarkan bahasa Indonesia.
2. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, selaku penyelenggara Kongres Internasional Pengajaran BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) pada tanggal 28—30 Agustus 1995 di Depok (Jawa Barat), menyebutkan bahwa ada 29 negara yang mengajarkan BIPA, yaitu: Amerika, Arab Saudi,

- Australia, Austria, Belanda, Ceko, Cina, Denmark, Filipina, India, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea, Malaysia, Mesir, Norwegia, Papua Nugini, Prancis, Rusia, Singapura, Selandia Baru, Swedia, Swis, Suriname, Vatikan, dan Vietnam.
3. Seminar/lokakarya yang dihadiri oleh wakil-wakil universitas di Eropa Barat itu pernah diadakan di Paris, London, Napoli, Leiden, Sintra (Portugal), Passau, dan Bern. Pertemuan sekarang di Passau ini diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman bekerja sama dengan Universitas Passau dan antara lain dihadiri oleh para peserta yang mewakili universitas Hamburg, Köln, Bonn, Passau, Frankfurt, Berlin, Jena, Wien, dan Bern serta sejumlah peserta yang mewakili beberapa universitas di Indonesia (Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Merdeka, Malang).
 4. Simposium di Tokyo yang diprakarsai majalah berita *Tempo* dihadiri oleh wakil-wakil dari Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Peserta yang menghadiri simposium di Beijing lebih banyak lagi karena selain ketiga negara yang mengikuti simposium di Tokyo, juga hadir wakil-wakil dari Korea Utara, Hongkong, Taiwan, Mongolia, dan Rusia. Pemrakarsa simposium di Beijing adalah majalah berita *Gatra*.
 5. Mengenai hal itu dapat disebut sebagai contoh kerja sama antara Monash University dengan Universitas Gadjah Mada, University of Western Sydney dengan IKIP Yogyakarta, University of Northern Territory dengan Universitas Nusa Cendana dan Universitas Pattimura, serta Sydney University dengan Universitas Kristen Satya Wacana (lihat Sugino, 1993). Sehubungan dengan kerja sama seperti itu, ada pula hubungan kerja sama antarkota yang lazim disebut kota kembar (*twin city*), seperti antara Jakarta dan Tokyo atau Semarang dan Brisbane. Seberapa jauh keberadaan kota kembar tersebut dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengajaran bahasa Indonesia belum diketahui.
 6. Sehubungan dengan hal itu, ada informasi bahwa para diplomat asing, sebelum melaksanakan tugasnya di Indonesia, mempelajari dan memperdalam dahulu bahasa Indonesiannya di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi Indonesia yang biasa menerima "kunjungan" para diplomat asing untuk maksud itu ialah Universitas Gadjah Mada. Dipilihnya universitas ini mungkin karena Yogyakarta, kota tempat universitas itu berada, secara meluas dikenal sebagai kota budaya. Dengan demikian, mereka dapat melakukan dua hal sekaligus, yakni mempelajari bahasa Indonesia sambil berkenalan langsung dengan adat-istiadat dan budayanya. Hal yang disebut terakhir ini masih terbuka untuk dibicarakan lebih lanjut karena, misalnya, kita masih harus menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh adat-istiadat budaya yang dapat disaksikan di Yogyakarta merupakan representasi serupa dengan cakupan nasional Indonesia.
 7. Kongres Bahasa Indonesia V (1988) merumuskan tiga hal sebagai berikut.

- a. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.
- b. Pemerintah Indonesia perlu membantu lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama antara lain dengan ikut menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
- c. Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

Sementara itu, Kongres Bahasa Indonesia VI (1993) menyepakati enam hal sebagai berikut.

- a. Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan para pembelajar agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula dikembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemerintah dan swasta mengadakan program pertukaran pengajaran dan materi pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri.
 - b. Perlu dikembangkan materi BIPA yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ujaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara proporsional dan sesuai dengan konteks.
 - c. Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu ditingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum, mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran, serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
 - d. Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan praanggapan, yang sangat lazim dipergunakan di dalam interaksi informal. Di samping itu, perlu diperhatikan juga unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya.
 - e. Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain.
 - f. Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru sampai lulus S1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan lebih baik di negara asal pembelajar..
8. Bahwa masalah atau unsur budaya merupakan aspek yang amat penting

dalam materi BIPA, hal itu banyak disoroti oleh para pemakalah Konferensi Internasional II Pengajaran BIPA (29 Mei--1 Juni 1996 di Padang), antara lain oleh John Wolff, Siahaan, Suroso, Atmazaki, Sudjiman, Sudewa, dan Sihombing.

9. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berkeinginan "meluruskan" masalah ini agar pada waktu-waktu yang akan datang forum internasional di Indonesia yang membicarakan pengajaran BIPA sebaiknya menggunakan nama yang tidak mengundang timbulnya perbedaan seperti itu.
10. Sehubungan dengan tenaga pengajar BIPA ini, perlu diperhatikan dua hal berikut. Pertama, selain berlatar belakang pendidikan dan memiliki kualifikasi yang cocok, pengajar BIPA di luar Indonesia yang bukan orang Indonesia juga dituntut untuk memiliki pengetahuan yang memadai tentang budaya Indonesia. Untuk itu, yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan itu dengan menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Indonesia atau dengan jalan tinggal di Indonesia dalam waktu yang dianggap cukup lama, misalnya sambil melakukan penelitian lapangan mengenai salah satu aspek kebahasaan yang relevan dengan pengajaran BIPA. Kedua, penutur asli yang menjadi pengajar BIPA di luar Indonesia pada saatnya nanti perlu memenuhi persyaratan yang disebutkan di atas. Sehubungan dengan kedua hal itu, pemerintah Indonesia, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak sekarang harus mempersiapkan suatu program pendidikan khusus (pada jenjang pascasarjana?) yang akan menghasilkan tenaga pengajar BIPA. Langkah ke arah itu dapat dimulai dengan mempertemukan para pimpinan perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pengajaran BIPA. Masukan dari penyelenggara pengajaran BIPA di luar Indonesia untuk keperluan itu jelas akan sangat bermanfaat, terutama dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum dan penentuan metodologi pengajaran yang tepat.

3. KEBIJAKAN PENGAJARAN BIPA*

Pengantar

Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (KIP-BIPA) ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya. KIP-BIPA I diadakan tanggal 20—23 Januari 1994 di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga dan KIP-BIPA II tanggal 29—1 Juni 1996 di IKIP Padang (sekarang Universitas Negeri Padang). Ketiga pertemuan ini dilaksanakan atas dasar kerja sama antara pihak perguruan tinggi penyelenggara pertemuan dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa). Universitas Indonesia tercatat telah dua kali bertindak sebagai penyelenggara pertemuan kegiatan serupa, yakni Seminar BIPA (1991) dan Kongres Internasional Pengajaran BIPA (1995). Selain yang sudah disebutkan, tentu saja ada sejumlah forum pertemuan lain yang secara khusus juga membicarakan pengajaran BIPA, diselenggarakan di dalam ataupun di luar negeri oleh perguruan tinggi atau lembaga yang lain.

Setiap pertemuan itu antara lain bertujuan memperoleh pikiran dan pandangan baru agar pengajaran BIPA dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai hasil seperti yang diharapkan oleh penyelenggaranya masing-masing. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang pikiran dan pandangan baru tersebut, seluruh dokumen yang dihasilkan lewat berbagai pertemuan itu seyogianya dijadikan acuan. Sumber acuan tersebut pada makalah ini tidak secara eksplisit dikemukakan. Sebagai penggantinya, yang disajikan adalah Putusan Kongres Bahasa Indonesia mengenai pengajaran BIPA. Dasar pertimbangannya ialah karena pada umumnya mereka yang terlibat dalam berbagai pertemuan itu turut juga menjadi peserta Kongres Bahasa Indonesia sehingga diasumsikan bahwa dalam garis-garis besarnya pikiran dan pandangan baru itu tercermin juga di dalam putusan Kongres Bahasa Indonesia mengenai pengajaran BIPA.

Pengajaran BIPA dalam Putusan Kongres Bahasa Indonesia

Sejak Kongres Bahasa Indonesia diadakan tahun 1938, ihwal pengajaran BIPA baru secara khusus dibahas pada Kongres Bahasa Indonesia V (1988). Berikut ini dikutip secara lengkap putusan tiga kali Kongres Bahasa Indonesia (1988, 1993, 1998) mengenai pengajaran BIPA.

a. Kongres Bahasa Indonesia V (1988)

1. Para pembina pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri perlu menjalin kerja sama dalam pengadaan bahan pengajaran dan pertukaran pengalaman dan informasi.

2. Pemerintah Indonesia perlu membantu lembaga pendidikan di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia, dengan menjalin kerja sama antara lain dengan ikut menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan kepada para siswa yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan kebudayaan Indonesia.
3. Pembentukan pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia perlu dipertimbangkan.

b. Kongres Bahasa Indonesia VI (1993)

1. Perlu adanya pengkajian pengajaran BIPA di luar negeri tentang tujuan dan macam serta tingkat kemampuan berbahasa yang diinginkan para pembelajar agar perangkat BIPA yang diperlukan dapat pula dikembangkan di Indonesia. Disarankan agar lembaga pemerintah dan swasta mengadakan program pertukaran pengajaran dan materi pengajaran BIPA dengan lembaga pemerintah dan swasta di luar negeri.
2. Perlu dikembangkan materi BIPA yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, terutama tentang topik dan informasi kultural yang diperlukan untuk memahami ujaran di dalam konteks yang tidak dipahami oleh para pembelajar asing. Selain itu, bahasa formal dan informal perlu disajikan secara proporsional dan sesuai dengan konteks.
3. Mutu dan peranan pengajaran BIPA perlu ditingkatkan antara lain dengan memantapkan kurikulum, mengembangkan materi pengajaran, dan meningkatkan mutu guru dan dosen BIPA dalam hal pengetahuan linguistik, metode pengajaran, serta kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
4. Unsur budaya dalam materi BIPA perlu mendapat tempat yang penting, terutama yang berhubungan dengan unsur budaya yang direfleksikan di dalam bahasa, seperti basa-basi, implikatur, sapaan, dan praanggapan, yang sangat lazim dipergunakan di dalam interaksi informal. Di samping itu, perlu diperhatikan juga unsur budaya yang berhubungan dengan sopan santun dalam pergaulan, dalam berbicara, dan sebagainya.
5. Dalam pengembangan dan pembinaan bahasa, kita perlu memetik pengalaman dari keberhasilan dan berbagai kegagalan yang dialami negara-negara tetangga, terutama dalam persaingan dengan bahasa-bahasa lain.
6. Perlu diupayakan pemberian beasiswa kepada pembelajar asing calon guru sampai lulus S1 agar pengajaran BIPA dapat berkembang dengan lebih baik di negara asal pembelajar.

c. Kongres Bahasa Indonesia VII (1998)

1. Pengajaran dan pemyarakatan BIPA perlu ditingkatkan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pengajaran

BIPA perlu mengembangkan program dan bahan BIPA, termasuk metodologi pengajarannya, sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.

3. Kantor perwakilan RI di luar negeri perlu lebih berperan dalam mendukung program pemasyarakatan BIPA di luar negeri.

Kedua belas butir rumusan itu berkenaan dengan kurikulum, materi bahan ajar, metodologi pengajaran, dan kualifikasi pengajar. Juga disinggung diperlukannya pengkajian untuk mengetahui motivasi pembelajar dan kerja sama antarlembaga. Menyediakan bahan pengajaran, memberikan informasi kebahasaan yang mutakhir, dan memberikan kemudahan termasuk beasiswa kepada pembelajar dikemukakan sebagai upaya yang sepatutnya dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Perwakilan Indonesia di luar negeri juga diharapkan dapat berperan secara lebih aktif dan nyata dalam menunjang keberhasilan pengajaran BIPA. Yang tidak kalah pentingnya adalah harapan para peserta Kongres Bahasa Indonesia tentang perlu dipertimbangkannya pembentukan suatu pusat pengkajian internasional tentang bahasa Indonesia.

Butir-butir rumusan tersebut boleh dikatakan sudah menggambarkan keseluruhan aspek pengajaran BIPA. Dengan demikian, paparan pada makalah ini hanya mencoba menyoroti beberapa aspek di antaranya dengan memberikan penekanan pada upaya tertentu yang pelaksanaannya diperkirakan dapat membuka peluang yang lebih lebar bagi peningkatan kerja sama antarlembaga penyelenggara BIPA.

Kurikulum

Dalam hal penyusunan kurikulum, setiap lembaga penyelenggara pengajaran BIPA akan berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan. Kurikulum untuk mencapai gelar akademis tertentu akan sangat berbeda dengan Kurikulum untuk pendidikan non-gelar. Contoh yang memperlihatkan perbedaan muatan kurikulum yang kontras ini mengisyaratkan betapa pentingnya mengetahui motivasi pembelajar terhadap pengajaran BIPA, terutama yang di luar Indonesia.

Penguasaan kosakata yang ditunjang oleh pemahaman terhadap kaidah-kaidah ketatabahasaan yang sesuai merupakan komponen utama yang harus senantiasa dipedomani dalam mendesain kurikulum untuk setiap jenjang dan program pengajaran BIPA. Komponen utama itu akan memberi arah pada dan tercerminkan dalam kemampuan dan keterampilan mendengar, membaca, berbicara, dan menulis.

Pengembangan selanjutnya dari dua komponen utama yang bermuara pada empat jenis keterampilan berbahasa itu akan sepenuhnya ditentukan oleh pilihan para pembelajar dalam merintis karier akademisnya. Dalam konteks ini, jalur keahlian dalam bidang bahasa atau linguistik dan bidang sastra perlu

pertama-tama disebutkan. Jalur keahlian ini ada yang keluar dari konteks BIPA, tetapi masih tetap berada dalam bingkai keindonesiaan. Kasusnya terlihat pada pembelajar yang memilih bidang-bidang ilmu seperti antropologi, sejarah, kebudayaan, atau politik Indonesia. Dengan demikian, kepentingannya terhadap pengajaran BIPA ialah dimilikinya penguasaan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang memungkinkan yang bersangkutan dapat melakukan studi lebih lanjut, termasuk melakukan penelitian lapangan dalam bidangnya di Indonesia.

Kemampuan dan keterampilan para pembelajar dalam menulis dapat ditingkatkan lewat pelatihan penerjemahan. Mengenai penerjemahan ini, para penyelenggara pengajaran BIPA memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Ketika Simposium Pengajaran Bahasa Indonesia diadakan di Universitas Passau (18—21 September 1997), antara lain diketahui bahwa penerjemahan di Universitas Passau diberikan pada semester III dan IV, sedangkan di Universitas Leiden pada semester VII dan VIII. Dikemukakan bahwa di Universitas Passau yang dilakukan ialah penerjemahan dua arah untuk dongeng-dongeng Jerman dan Indonesia. Di Universitas Leiden penerjemahan dua arah itu (Indonesia-Belanda dan Belanda-Indonesia) diperkuat dengan pemberian mata kuliah teori penerjemahan.

Faktor lain yang juga signifikan ialah bahwa pengajaran BIPA hendaknya memperlihatkan keterkaitan dengan konteks budayanya. Dengan mempertimbangkan faktor itu, kurikulum pengajaran BIPA didesain dengan niat bukan saja untuk memberikan kemampuan dan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia secara tertulis dan lisan, melainkan juga untuk membekali para pembelajar dengan pemahaman terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka perlu memiliki wawasan dan pandangan yang memadai tentang konsep "Bhinneka Tunggal Ika" yang dikaitkan antara lain dengan aspek kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia itu.

Bahan Ajar

Bahan ajar yang berupa buku merupakan sarana utama yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui isi dan mutu pengajaran BIPA yang dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan. Jenis buku yang dimaksudkan bisa bermacam-macam. Ada buku yang amat komprehensif, setiap komponen kebahasaan termuat di dalamnya: teks/bacaan, penjelasan kosakata baru, uraian ketatabahasaan yang diperlukan, dan bagian evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman pembelajar terhadap teks yang bersangkutan (salah satu di antaranya mungkin berbentuk pertanyaan). Dalam buku seperti itu, muatan sosial budaya secara bertahap diintegrasikan ke dalam teks/bacaan.

Kemungkinan yang lain ialah adanya berbagai jenis buku, sesuai dengan isinya, seperti buku khusus bacaan, buku khusus penjelasan kosakata (kamus), dan buku khusus tata bahasa. Pemilihan antara jenis buku yang komprehensif dan jenis buku khusus itu terpulang sepenuhnya pada garis kebijaksanaan yang

dianut oleh setiap penyelenggara pengajaran BIPA.

Di samping sarana utama bahan ajar yang telah disebutkan, juga diperlukan sarana pendukung seperti laboratorium bahasa dan perpustakaan khusus yang mengoleksi buku yang erat kaitannya dengan kegiatan pengajaran BIPA. Surat kabar dan majalah terbitan Indonesia pasti dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung yang amat berharga. Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang berupa sarana internet akan makin mempermudah dan mempercepat para pembelajar dalam mengakses pada media massa Indonesia itu. Hasil rekam dalam bentuk kaset, CD, atau VCD tentu akan lebih mendukung keberhasilan pengajaran BIPA dalam hal penyediaan bahan ajar ini.

Ada sisi lain yang harus diperhatikan terutama dalam penyusunan bahan ajar dalam bentuk buku, yaitu penentuan ragam bahasa yang digunakan. Buku-buku yang sekarang digunakan memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Ada yang menekankan pada penguasaan ragam bahasa baku dan ada pula yang menitikberatkan pada penguasaan ragam bahasa yang tidak baku, yakni ragam bahasa yang oleh masyarakat Indonesia digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sekali lagi, pemilihan ragam bahasa ini pun terpulang pada kebijaksanaan para pengelola pengajaran BIPA masing-masing dan hal itu tentunya harus pula disesuaikan dengan tuntutan dan motivasi para pembelajar BIPA itu sendiri.

Strategi yang patut dipertimbangkan ialah mengawali kegiatan pengajaran BIPA dengan penekanan pada ragam bahasa baku. Setelah itu, terutama kalau para pembelajar dianggap sudah menguasainya secara memadai, barulah mereka diperkenalkan pada ragam bahasa yang tidak baku. Seberapa banyak porsinya, hal itu harus disesuaikan dengan keinginan pembelajar. Pengajaran BIPA yang menekankan penguasaan ragam bahasa sehari-hari ini perlu diprioritaskan, misalnya, kepada para pembelajar yang segera akan melakukan kunjungan singkat ke Indonesia, antara lain sebagai wisatawan.

Upaya memperkenalkan ragam-ragam pemakaian bahasa dalam arti yang luas dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis bahan ajar yang telah disebutkan di atas. Yang cukup menarik adalah pemakaian bahasa Indonesia dalam iklan. Ragam bahasa ini pasti dengan mudah dapat ditemukan pada surat kabar dan majalah. Dari sudut pemakaian bahasanya, pembelajar dibimbing untuk dapat memperkirakan kelompok masyarakat tertentu yang dijadikan sasaran iklan yang bersangkutan.

Pengajar

Ihwal pengajar merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengajaran BIPA. Bagaimanapun mantapnya kurikulum yang disusun dan bagaimanapun lengkapnya bahan ajar berikut sarana dan prasarannya yang disediakan, kesemuanya itu tidak dengan sendirinya merupakan jaminan akan keberhasilan pengajaran BIPA kalau tidak ditangani oleh tenaga pengajar yang berkualifikasi. Pengajar BIPA di luar Indonesia seyogianya dilengkapi oleh se-

orang penutur asli yang sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan sarjana (S1). Akan tetapi, kenyataannya sering menunjukkan bahwa tenaga pengajar Indonesia tersebut belum tentu berlatar belakang pendidikan dan memiliki kualifikasi yang cocok untuk keperluan pengajaran BIPA. Ada kalanya, mungkin dalam keadaan terpaksa, persyaratan seperti itu terpaksa pula "dilupakan" karena yang penting adalah menampilkan sosok bahasa Indonesia yang dituturkan oleh orang Indonesia sendiri. Kasus seperti ini harus dianggap sementara. Apabila tidak, hal itu pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi upaya pencapaian tujuan yang sebenarnya dari pengajaran BIPA itu sendiri.

Kerja Sama

Pertumbuhan dan perkembangan pengajaran BIPA sekarang, baik yang diselenggarakan di luar Indonesia maupun di Indonesia, sudah mencapai taraf yang tidak lagi memungkinkan penyelenggara pengajaran BIPA itu asyik berjalan sendiri-sendiri. Sebaliknya, kerja sama dan koordinasi di antara mereka merupakan sesuatu yang dari waktu ke waktu memerlukan perhatian yang makin bersungguh-sungguh.

Kerja sama dan koordinasi yang demikian dapat dilaksanakan melalui pertemuan berkala, baik di antara para penyelenggara BIPA di suatu negara tertentu, di antara sejumlah negara yang secara geografis berada di kawasan tertentu, maupun melalui pertemuan antarnegara yang cakupannya lebih internasional.

Kerja sama yang sifatnya lebih permanen perlu diupayakan antara perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di luar Indonesia dengan perguruan tinggi penyelenggara pengajaran BIPA di Indonesia. Memorandum saling pengertian (*memorandum of understanding*) untuk keperluan itu sebaiknya dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal itu diperlukan agar pelaksanaannya—yang akan menyangkut pengaturan dari segi administrasi, sarana, dan dana—tidak menghadapi kendala birokratis yang berarti. Selain itu, kerja sama semacam itu akan lebih efisien dan efektif kalau sebelum piagam kerja sama tersebut diresmikan/ditandatangani, sudah ada perjanjian kerja sama kebudayaan di antara kedua pemerintah yang dapat dirujuk.

Setakat ini telah ada kerja sama dalam arti dan bentuk yang lebih sederhana. Meskipun demikian, upaya setiap negara atau setiap perguruan tinggi penyelenggara BIPA seperti itu perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang bertujuan "mempertemukan" para penyelenggara BIPA. Pertemuan seperti KIP-BIPA ini jelas merupakan forum yang sangat bermanfaat bukan hanya dalam rangka saling menukar pengalaman dan informasi mengenai pengajaran BIPA di perguruan tinggi masing-masing, melainkan juga dalam rangka melakukan koordinasi dan membina kerja sama agar pengajaran BIPA secara keseluruhan dapat ditingkatkan lagi.

Peran Pemerintah Indonesia

Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan pengajaran BIPA, terutama di luar Indonesia, Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Luar Negeri, perlu segera mengambil langkah-langkah sehubungan dengan hal-hal berikut.

- a. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengajaran BIPA di luar Indonesia, antara lain yang berupa buku pelajaran, bahan bacaan, serta alat penunjang pengajaran lainnya seperti surat kabar, majalah, kaset, CD, dan VCD.
- b. Memberikan kemudahan bagi tenaga Indonesia yang akan bertugas sebagai pengajar BIPA di luar Indonesia.
- c. Mengupayakan agar di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dibentuk semacam Pusat Kebudayaan Indonesia yang dapat disejajarkan/dibandingkan dengan Centre Culturel Français-nya Prancis, Goethe Institut-nya Jerman, atau Erasmus Huis-nya Belanda (khusus untuk keperluan ini, kalau dianggap perlu, dapat dipertimbangkan kemungkinan melakukan kerja sama dengan kantor perwakilan Malaysia dan Brunei Darussalam di negara yang bersangkutan).
- d. Mempertimbangkan pemberian beasiswa kepada calon pengajar BIPA dari luar Indonesia untuk menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi Indonesia sampai tingkat sarjana (S1).

Penutup

Di samping kelima aspek pengajaran BIPA yang telah secara singkat dipaparkan di atas (kurikulum, bahan ajar, pengajar, kerja sama, dan peran Pemerintah Indonesia), tentu masih ada sejumlah aspek lainnya yang juga perlu dikemukakan dan dibicarakan dalam pertemuan ini. Dari kelima aspek itu sendiri pun tentu masih ada hal-hal lain yang perlu ditambahkan atau diberi catatan khusus.

Sekadar contoh, program pendidikan yang bertujuan mempersiapkan tenaga pengajar BIPA bukanlah merupakan terminal akhir. Kepada mereka yang sudah menjadi pengajar BIPA pun perlu pula diberi kesempatan untuk senantiasa memutakhirkan pengetahuan dan wawasannya.

4. PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHASA¹⁾

1. Setiap kali bahasa Indonesia diposisikan dalam kaitannya dengan upaya untuk mengetahui seberapa jauh ia berfungsi secara efektif dan efisien sebagai sarana komunikasi dalam bidang kehidupan tertentu, ada baiknya hal itu diawali dengan melihat korelasi antara fungsi yang dimaksudkan dan kedudukan bahasa Indonesia tersebut dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kita. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional, sesuai dengan butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, memiliki fungsi yang berbeda dari bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara, seperti yang tertera di dalam pasal 36 UUD 1945.¹

Dalam bidang pendidikan, yang digunakan ialah bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa negara. Dalam bidang pendidikan ini, selain berfungsi sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan,² bahasa Indonesia juga merupakan salah satu mata pelajaran pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Baik sebagai bahasa pengantar maupun sebagai salah satu mata pelajaran, bahasa Indonesia memainkan peran yang mendasar dan strategis dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional kita, termasuk dalam upaya mencapai tujuan seperti yang tertera di dalam bagian pembukaan atau mukadimah UUD 1945, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Judul makalah di atas mengisyaratkan bahwa yang akan dibahas berikut ini adalah bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran dalam sistem pendidikan nasional kita.

2. Yang perlu disimak secara lebih cermat lagi ialah bagaimana jawaban yang dapat dikemukakan atas pertanyaan: dapatkah bahasa Indonesia digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan."³

Dalam konteks yang demikian, bahasa Indonesia menurut Kurikulum

¹⁾ Makalah Konvensi Nasional Pendidikan IV, 19—22 September 2000, Hotel Indonesia, Jakarta.

1994 berfungsi "mengembangkan kemampuan bernalar, berkomunikasi, dan mengungkapkan pikiran dan perasaan, serta membina persatuan dan kesatuan bangsa". Mengembangkan kemampuan bernalar memberi petunjuk bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana berpikir untuk menginternalisasi berbagai gagasan yang timbul dari diri seseorang, bagaimana hal itu berkorelasi dengan sejumlah faktor eksternal dari orang yang bersangkutan, dan akhirnya bagaimana yang bersangkutan sampai pada kesimpulan sebagai tahap akhir dari proses berpikir atau internalisasi itu. Mengungkapkan pikiran dan perasaan jelas menggambarkan betapa pentingnya fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana ekspresi. Sementara itu, ihwal membina persatuan dan kesatuan bangsa pada hakikatnya harus dipandang sebagai salah satu tujuan dari manfaat pengoptimalan ketiga fungsi bahasa Indonesia itu, baik sebagai sarana internalisasi, sarana ekspresi, maupun sarana komunikasi.

3. Pengoptimalan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana internalisasi, sarana ekspresi, dan sarana komunikasi itu menyiratkan adanya dua sisi yang sepiintas lalu tampak berbeda, tetapi sesungguhnya sama dalam pengertian bahwa sisi yang satu berpotensi dalam menentukan atau memberi corak pada sisi yang lain. Kedua sisi yang dimaksudkan masing-masing berhubungan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana internalisasi pada satu sisi dan fungsi bahasa Indonesia sebagai ekspresi dan sarana komunikasi pada sisi yang lain. Dengan perkataan lain, sisi yang satu berimplikasi pada kecermatan berbahasa, sedangkan sisi yang lain pada keterampilan berbahasa.

Kalau kecermatan bernalar atau kecermatan berpikir itu dihubungkan dengan matematika sebagai mata pelajaran yang paling berkemampuan melatih atau membiasakan murid untuk berpikir atau bernalar secara cermat, perbandingan alokasi waktu—dalam bentuk jumlah jam pelajaran—antara bahasa Indonesia dan matematika dalam Kurikulum 1994 benar-benar memperlihatkan tingkat korelasi yang tinggi. Selain itu, bahasa Indonesia dan matematika dalam hal alokasi waktu tersebut merupakan mata pelajaran "yang diunggulkan".⁴

Tingginya korelasi antara bahasa Indonesia dan matematika itu menunjukkan bahwa kerapian berbahasa seseorang pada dasarnya merupakan refleksi dari kecermatan berpikir orang yang bersangkutan. Angka NEM rata-rata SMU untuk bahasa Indonesia dan matematika selama empat tahun, yaitu mulai tahun 1993/1994 s.d. tahun 1996/1997, sebagaimana yang dilaporkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian, Balitbang Departemen Pendidikan Nasional (pada masa itu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), memberi petunjuk yang jelas mengenai hal itu, yakni seperti yang diperlihatkan oleh tabel berikut.

Mata Pelajaran	93/94			94/95			95/96			96/97		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
1. Bhs Indonesia	6,70	6,35	6,10	6,84	6,35	6,07	6,97	6,51	6,08	7,25	6,75	6,25
2. Matematika	5,41	4,35	3,17	4,83	3,99	3,30	5,76	4,18	3,61	6,15	4,51	3,99

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, baik untuk bahasa Indonesia maupun matematika, NEM rata-rata A1, A2, dan A3 menggambarkan kecenderungan bahwa A1 lebih baik daripada A2 dan A3 serta A2 lebih baik daripada A3. Jurusan IPS (A3) yang angka matematikanya lebih rendah daripada jurusan Biologi (A2) dan Fisika (A1) ternyata juga memperlihatkan prestasi yang sama untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Sekali lagi hal itu jelas menunjukkan bahwa tingkat kecermatan bernalar atau berpikir akan berpengaruh langsung pada tingkat kerapian berbahasanya.

4. Keterampilan berbahasa, baik yang menyangkut bahasa lisan maupun bahasa tulis, yang berhubungan dengan fungsi bahasa sebagai sarana ekspresi dan sarana komunikasi itu diharapkan akan diperoleh murid lewat empat komponen dasar atau aspek pokok dalam pembelajaran bahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.⁵ Lewat keempat aspek pembelajaran bahasa itu, diharapkan siswa mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia secara lisan ataupun tertulis. Kemampuan berkomunikasi ini mempersyaratkan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini pada gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan kemampuan bernalar atau berpikir, bahkan akan berpengaruh pula pada kemampuan memperluas wawasan.⁶

Keterampilan berbahasa itu hanya akan diperoleh jika murid diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa lisannya lewat latihan berbicara dan meningkatkan keterampilan berbahasa tulisnya lewat latihan menulis atau mengarang.⁷ Apabila aspek berbicara dan terlebih-lebih aspek menulis ini tidak memperoleh porsi perhatian yang memadai dalam kegiatan pembelajaran bahasa, dapatlah dipastikan bahwa mutu dan keterampilan berbahasa murid tidak akan pernah memberikan kesan yang menggembirakan.

5. Jika dibandingkan dengan GBPP 1984 dan GBPP sebelumnya, GBPP 1994 memperlihatkan adanya persamaan dan sekaligus perbedaan. Persamaannya menyangkut bahan atau materi, yaitu selalu disebutkannya empat aspek yang telah disebutkan di atas (mendengar, berbicara, membaca, dan menulis), di samping aspek kosakata, tata bahasa, dan sastra. Adapun perbedaannya berkaitan dengan cara penyajian. GBPP 1984 mengenai cara

penyajian ini merujuk pada enam pokok bahasan, yaitu membaca, kosakata, struktur, menulis, pragmatik, dan sastra. Sementara itu, GBPP 1994 tidak merujuk pada pokok bahasan, tetapi pada komponen yang berjumlah tiga buah, yaitu komponen kebahasaan, komponen pemahaman, dan komponen penggunaan. Perbedaannya dari pokok bahasan seperti yang terdapat dalam GBPP 1984 yang disajikan secara sendiri-sendiri, ketiga komponen menurut GBPP 1994 disajikan secara terpadu melalui penentuan tema tertentu yang akan mewarnai ketiga pemahaman tersebut.⁸

Komponen kebahasaan menempatkan dan memperlakukan bahasa sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan sebagai satuan-satuan yang merupakan aspeknya seperti fonologi, morfologi, kalimat, dan paragraf. Oleh karena itu, keutuhan seperti itu juga harus diperhatikan dalam penyajian komponen pemahamannya. Bahan pembelajaran harus disajikan dalam sebuah wacana, bukan dalam kalimat-kalimat yang saling tidak berhubungan. Demikian pula halnya dengan komponen penggunaan sehingga aspek mendengar, berbicara, membaca, dan menulis harus disajikan secara terpadu pula. Dengan demikian, kegiatan berbahasa lisan dipadukan dengan kegiatan belajar berbahasa tulis, seperti halnya keterpaduan antara aspek reseptif dan aspek produktif (mendengar dan berbicara atau membaca dan menulis).

6. Dengan memperhatikan Kurikulum 1994, upaya apa pun yang menyangkut pengembangan kurikulum bahasa haruslah diarahkan pada tujuan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa murid, baik keterampilan berbahasa secara tertulis maupun keterampilan berbahasa secara lisan. Selain kurikulum dan bahan ajar, guru boleh dikatakan memiliki peran yang sangat dominan dan menentukan.

Bagaimanapun baiknya kurikulum dan bahan ajar, pembelajaran bahasa tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi itu ialah tenaga pengajar yang (1) memahami secara tersurat dan tersirat latar belakang, tujuan, dan isi Kurikulum 1994; (2) menguasai seluruh permasalahan kebahasaan yang tercantum dalam buku-buku yang dijadikan sebagai bahan ajar; dan (3) memiliki wawasan yang mendalam tentang metodologi pengajaran bahasa.⁹

Tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan seperti itu dalam batas-batas tertentu tergolong sebagai tenaga pengajar yang profesional. Yang bersangkutan tidak hanya memenuhi kualifikasi tersebut di atas, tetapi juga—dan ini mungkin yang lebih penting—memiliki minat, perhatian, dan kecintaan yang mendalam terhadap bidang profesinya sebagai guru bahasa Indonesia. Unsur minat, perhatian, dan kecintaan itu akan selalu menjadi pelita dan pembimbing yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru bahasa Indonesia.

Tenaga pengajar yang profesional tidak akan berhenti terpaku hanya pada bahan dan cara mengajar yang telah digariskan. Ia akan senantiasa tampil sebagai seseorang yang kreatif dan inovatif sehingga pada akhirnya murid akan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan perasaan gembira tanpa mengabaikan sikap yang bersungguh-sungguh.

Catatan

1. Menurut Seminar Politik Bahasa 1999, bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah. Adapun bahasa Indonesia dengan kedudukan sebagai bahasa negara berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (6) bahasa media massa, (7) pendukung sastra Indonesia, dan (8) pemer kaya bahasa dan sastra daerah.
2. Lihat Pasal 41 UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain bahasa Indonesia, bahasa daerah juga dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan di sekolah dan sejauh diperlukan, terutama pada tahun-tahun awal (kelas I--III) di sekolah dasar (Pasal 42 UU No. 2 Tahun 1989).
3. Tujuan pendidikan nasional itu termaktub di dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 1989 (tentang Sistem Pendidikan Nasional).
4. Hal itu jelas terlihat dalam tabel berikut yang berisi susunan program pengajaran pendidikan dasar menurut Kurikulum 1994.

Jenjang dan Kelas Mata Pelajaran	SD						SLTP		
	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III
1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2. Pendidikan Agama	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	10	10	10	8	8	8	6	6	6
4. Matematika	10	10	10	8	8	8	6	6	6
5. IPA	-	-	3	6	6	6	6	6	6
6. IPS	-	-	3	5	5	5	6	6	6
7. Kerajinan Tangan dan Kesenian	2	2	2	2	2	2	2	2	2

8. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9. Bahasa Inggris	-	-	-	-	-	-	4	4	4
10. Muatan Lokal	2	2	4	5	7	7	6	6	6
Jumlah	30	30	38	40	42	42	42	42	42

5. Sebagaimana kita ketahui, aspek mendengarkan dan berbicara bermuara pada keterampilan berbahasa lisan, sedangkan aspek membaca dan menulis pada keterampilan berbahasa tulis.
6. Lihat bagian rambu-rambu GBPP bahasa Indonesia untuk SLTP.
7. Sudah lama diungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya mutu berbahasa Indonesia di kalangan murid. Sudah pula diketahui secara meluas faktor penyebabnya, yaitu hampir tidak pernahnya guru memberikan kesempatan kepada murid melatih kemampuan berbicara dan kemampuan menulisnya. Kambing hitamnya selalu dialamatkan pada besarnya jumlah murid dalam satu kelas yang mencapai 40 orang atau bahkan lebih sehingga kalau latihan menulis atau mengarang itu dilakukan sebagaimana mestinya, guru tidak akan mungkin dapat memeriksa karangan murid-muridnya itu dengan baik. Akibatnya, karena murid memang praktis tidak pernah mendapat kesempatan untuk berlatih menulis, bahasa Indonesia yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ketika mereka sudah menjadi mahasiswa seringkali membuat pusing dosen pembimbingnya. Itulah sebabnya Menteri Pendidikan Nasional menginstruksikan kepada semua Kakanwil Depdiknas agar mulai tahun ajaran ini pelajaran mengarang dihidupkan kembali, sekurang-kurangnya sekali dalam dua minggu. Menurut Menteri, lewat kegiatan mengarang sebenarnya murid dilatih untuk merumuskan pikiran-pikirannya dan hal itu akan sangat bermanfaat bagi hari depan mereka (*Kompas*, 9 September 2000, halaman 9, kolom 8—9).
8. Persamaan dan perbedaan antara GBPP 1994 dan GBPP 1984 itu antara lain dapat disimak dalam *Pokok-pokok Pengajaran Bahasa dan Kurikulum 1994* yang disusun oleh Bambang Kaswanti Purwo dan diterbitkan tahun 1997 oleh Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Mengenai pengajaran bahasa Indonesia melalui sistem persekolahan, Seminar Politik Bahasa Tahun 1999 berpendapat bahwa kegiatan itu harus dilakukan dengan mempertimbangkan bahasa sebagai suatu keseluruhan berdasarkan konteks pemakaian dengan tujuan meningkatkan mutu penguasaan dan pemakaian bahasa yang baik dengan tidak mengabaikan adanya berbagai ragam bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, Seminar menyebutkan empat kegiatan berikut yang perlu dilakukan.
 - (a) Pengembangan kurikulum bahasa Indonesia

- (b) Pengembangan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan metodologi pengajaran bahasa
- (c) Pengembangan tenaga kependidikan kebahasaan yang profesional
- (d) Pengembangan sarana pengajaran bahasa yang memadai

5. PLUS MINUS KAMUS BADUDU-ZAIN*

Pengantar

Keperluan manusia akan bahasa untuk berkomunikasi dapat dikatakan sama pentingnya dengan keperluan manusia akan barang dan jasa untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya soal bahasa, barang, dan jasa itu dalam kehidupan manusia sehingga tanpa ketiganya sulit kita membayangkan apa yang akan terjadi atau peradaban yang seperti apa yang dapat diwujudkan.

Dengan tidak usah memperhitungkan kerumitan sintaktis, keperluan manusia akan bahasa dalam konteks makalah ini akan dibatasi hanya pada ihwal penguasaan kosakata yang antara seorang penutur dan penutur yang lain biasanya memperlihatkan tingkat penguasaan yang berbeda. Keseluruhan kosakata suatu bahasa, termasuk bahasa Indonesia, terekam atau terkodifikasi dalam sebuah dokumen yang disebut *kamus* yang penyusunannya dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah leksikografi yang telah disepakati. Sehubungan dengan kamus yang sudah disusun secara alfabetis seluruh kosakatanya, perlu dicatat dua hal. Pertama, para penutur tidak menguasai seluruh kosakata yang tercantum dalam kamus. Kedua, dari keseluruhan kosakata yang dikuasainya itu, hanya sebagian (besar?) saja yang biasa mereka gunakan dalam berkomunikasi, baik secara tertulis maupun lisan. Kita memang tidak pernah mengetahui secara pasti berapa persen yang dapat kita pahami dari keseluruhan kosakata bahasa Indonesia yang sudah terkodifikasi dalam berbagai kamus monolingual bahasa Indonesia sekarang.

Soal Nama

Sebelum *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan Badudu-Zain yang diterbitkan tahun 1994 oleh Pustaka Sinar Harapan Jakarta, telah ada sejumlah kamus bahasa Indonesia, antara lain seperti berikut.

Pertama-tama tentu harus disebut *Kamus Moderen Bahasa Indonesia* yang disusun oleh Sutan Mohammad Zain terbitan Yayasan Dharma tahun 1954 yang justru dikembangkan oleh Badudu menjadi kamus dengan nama yang telah disebutkan di atas. Sebelumnya, tahun 1951, melalui penerbit G. Kolff (Batavia) E. Sultan Harahap mengeluarkan *Kamus Indonesia*.

* Makalah untuk Bedah Kamus Bahasa Indonesia karya J.S. Badudu pada acara "Tujuh Puluh Lima Tahun Prof. Dr. H.J.S. Badudu", 2 Mei 2001, Fakultas Sastra, Universitas Padjadjaran, Bandung

Pada tahun 1953 Balai Pustaka (Jakarta) menerbitkan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta. Kamus ini mengalami cetak ulang tahun 1954, 1960, dan 1966 sebelum diolah kembali oleh tim penyusun dari Pusat Bahasa yang edisinya mulai terbit tahun 1976. Sementara itu, masih harus disebut kamus Pusat Bahasa terbitan Balai Pustaka, yaitu *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi I terbit tahun 1988, Edisi II tahun 1991, dan Edisi III tahun 2001.

Dari lima buah kamus yang telah disebutkan itu, ada dua kamus yang namanya sama, yaitu *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh Badudu-Zain (1994) dan *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh W.J.S. Poerwadarminta (1953). Seyogianya kesamaan dalam hal nama kamus itu diupayakan agar tidak terjadi karena akan "merepotkan" dalam penyebutannya. Kalau nama kamusnya yang disebut, yakni *Kamus Umum Bahasa Indonesia* atau singkatannya *KUBI*, masih harus dijelaskan siapa penyusunnya, Badudu-Zain atau Poerwadarminta. Penyebutan kamus berdasarkan nama penyusunnya pasti tidak akan membingungkan karena *Kamus Poerwadarminta*, misalnya, tidak akan dikelirukan dengan *Kamus Badudu-Zain*.

Zain dan Badudu-Zain

Pembahasan tentang *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh Badudu-Zain (selanjutnya disebut BZ) ini dalam beberapa hal akan diperbandingkan dengan *Kamus Moderen Bahasa Indonesia* oleh Sutan Mohammad Zain (selanjutnya disebut Z) atau dengan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II oleh Pusat Bahasa (selanjutnya disebut KBBI).

Pada Z tidak ada lema dengan abjad **Q**, **V**, **X**, dan **Y**. Tidak adanya **Y** pada Z dapat dipahami karena ejaan yang berlaku pada saat itu untuk **y** ialah **j**. Untuk itu, lema abjad **J** pada Z dapat dibandingkan dengan lema abjad **Y** pada BZ dengan perbedaan sebagai berikut.

- a. Jumlah lema pada Z (382--384) 36 buah dan pada BZ (1632--1634) 61 buah.
- b. Perbedaan itu antara lain karena kata-kata seperti *yudikatif*, *yudisium*, *yudo*, *yudoka*, *yunior*, *yuridis*, *yuris*, *yurisdiksi*, *yurisprudensi*, dan *yustisi* pada BZ belum muncul dalam Z. Selain itu, BZ juga memunculkan *yonif* (1633) yang merupakan akronim dari batalion infantri.

Mengenai abjad **Q**, **V**, dan **X** berikut ini dikemukakan perbedaan antara BZ dan KBBI.

- a. Abjad **Q** pada BZ (1113) memiliki 6 lema dan pada KBBI (805) 9 lema. Pada BZ tidak ada *qaf* (nama huruf ke-21 abjad Arab), *qasar*, dan *qiraah*.
- b. Abjad **V** pada BZ (1608--1613) terdiri atas 124 lema dan pada KBBI (1116--1121) 213 lema. Yang perlu dicatat sehubungan dengan BZ ialah bentuk *vegetarier*, *veste*, *viktori*, *visibel*, *voile*, *vokabuler*, dan *vulger*.
- c. Abjad **X** pada BZ (1631) mempunyai 16 lema dan pada KBBI (1132) 29 lema.

Yang patut disayangkan ialah bahwa nama-nama huruf dalam abjad Arab atau alifbata Arab pada BZ, entah dengan alasan atau pertimbangan apa, tidak ada lagi, padahal pada Z hal itu disebutkan, misalnya:

- ja** huruf yang penghabisan daripada abjad Arab dan harganya dalam abjad sepuluh (BZ:382)
- ba** huruf Arab yang kedua daripada alifbata Arab, dalam susunan abjad harganya dua (BZ:66)
- cha** huruf yang ke-7 daripada alifbata, harganya 600 dalam abjad, terdapat dalam kata-kata Arab dan Parsi saja (BZ:185)

Demikian pula halnya dengan **ga**, **ha**, dan **za** atau **zai** yang pada Z masing-masing terdapat pada halaman 288, 336, dan 1087. Adanya **fa** pada BZ (402) dengan penjelasan 'huruf ke-21 dalam abjad Arab' dapat menghibur rasa kecewa kita meskipun **fa** pada Z (285) diberi penjelasan yang lebih luas, yaitu (1) huruf yang ke-21 daripada alifbata pengganti **f** huruf Latin dan harganya menurut abjad 80; (2) kata penghubung dalam bahasa Arab yang artinya sama dengan **maka**.

Istigasah dan Pasukan Berani Mati

Sudah dapat ditebak bahwa kata **istigasah** yang sangat populer akhir-akhir ini belum tercantum sebagai lema baik pada KBBI (1991) maupun BZ (1994). Kata ini baru muncul pada KBBI Edisi III (2001: 445) dengan rumusan 'doa untuk memohon pertolongan kepada Allah Swt.' Bagaimana halnya dengan **pasukan berani mati**?

Mengenai **pasukan**, BZ (1010--1011) menjelaskannya sebagai 'kelompok, kumpulan, kawanana bisa dikatakan kepada tentara, polisi, pramuka'. Kemudian dikemukakan delapan gabungan kata dengan lema **pasukan**, yaitu **pasukan artileri**, **pasukan berkuda**, **pasukan gerak cepat**, **pasukan meriam**, **pasukan payung**, **pasukan sukarela**, **pasukan teras**, dan **pasukan udara**.

BZ (164) mendefinisikan **berani mati** pada lema **berani** dengan menyebutkan 'sangat berani dan sama sekali tidak gentar menghadapi bahaya atau tantangan; tidak takut mati'. Tidak ada **berani mati** pada lema **mati** (kasus ini akan dibahas pada bagian berikut). Sebagai gabungan kata pada lema **mati**, BZ (876--877) tidak menyebut **mati syahid** dan **mati berkalang tanah**, dua ungkapan yang sebenarnya sudah sangat akrab bagi penutur bahasa Indonesia. Menurut KBBI (637--638), **mati syahid** ialah mati di jalan Allah atau karena Allah (misalnya mati membela agama atau kebenaran hakiki) dan **mati berkalang tanah** adalah mati yang tergeletak di tanah.

Kasus **mati syahid** ini menggambarkan hal yang sebaliknya dari yang telah dikemukakan, yaitu bahwa sebuah kamus pada hakikatnya harus merupakan rekaman atas seluruh kosakata suatu bahasa dan, oleh karena itu, pada umumnya penutur memahami atau menguasai sebagian saja dari keseluruhan kosakata yang tercantum dalam kamus tersebut.

Selain **pasukan berani mati**, masalah **preman** juga cukup meresahkan keberadaannya bagi masyarakat kita sekarang. Kata **preman** bagi kita sekarang tidak lagi dalam pengertian asalnya, yaitu orang swasta atau partikelir, tetapi justru yang menyebabkan rasa tidak aman itu adalah karena **preman** yang sekarang diartikan sebagai 'sebutan kepada orang jahat seperti penodong dan perampok' (lihat KBBI:786--787). Makna yang telah bergeser seperti itu tidak ada dalam BZ (1087) karena definisi **preman** yang dikemukakan hanya "yang dimaksudkan bukan militer, bukan tentara; sipil".

Salah Cetak?

Kata **menghujat** dan **paradigma**, misalnya, selama era reformasi ini frekuensi pemakaiannya boleh dikatakan sangat tinggi. Cobalah kita simak penjelasan tentang kata **paradigma** berikut ini.

paradigma *Ling* seperangkat unsur bahasa yg sebgm bersifat konstan dan yg sebgm berubah-ubah; msl semua unsur berikut membentuk paradigma: *mengajar, mengajarkan, pengajar, pengajaran, belajar, pelajar, pelajaran, pengajaran, ajaran* (BZ:1022)

Uraian BZ tentang **paradigma** itu hanya dikemukakan dalam konteks ilmu bahasa atau linguistik. Makna **paradigma** sebagaimana yang lazim digunakan sekarang, yaitu dalam arti 'kerangka berpikir' (lihat KBBI:729), sama sekali tidak disinggung. Jadi, kasusnya sama dengan definisi BZ untuk kata **preman** yang tadi telah disinggung. Selain itu, kalau definisi BZ tentang **paradigma** itu kita cermati, ada dua catatan kekeliruan yang harus diungkapkan. Pertama, terdapat penulisan *sebgm* sebanyak dua kali. Pada daftar singkatan kata (BZ: xxi) tidak ada *sebgm*; yang ada ialah *seb* (sebangsa) dan *sebag* (sebagian). Berdasarkan konteks tentang definisi paradigma itu, *sebgm* seharusnya dibaca *sebag*. Kedua, kata *pengajaran* disebut dua kali, seharusnya satu kali saja.

Salah cetak yang bisa menyesatkan terlihat pada lema **hujat** (BZ:518) yang untuk penjelasannya pembaca kamus diminta untuk melihat lema **hujan**, bukan **hujah**.

Penulisan Sublema

Salah satu jenis sublema ialah gabungan kata, misalnya yang berbentuk frasa nomina endosentris yang penulisannya menempatkan nomina yang menjadi lema sebagai induknya, atau kalau mengacu kepada hukum D-M, lema yang bersangkutan menempati posisi D. Dengan demikian, misalnya frasa **anak kandung** dan **anak tiri** harus tercantum pada lema **anak**. Dalam BZ ternyata ketentuan seperti itu tidak ada sehingga frasa **anak kandung** dan **anak tiri** yang dicontohkan merupakan sublema tidak saja dari lema **anak**, tetapi juga dari lema **kandung** dan **tiri**. Perhatikan uraian yang dikemukakannya.

- a. Pada lema **anak**
 1. **anak kandung**, anak sendiri; *lw* anak tiri (BZ:45)
 2. **anak tiri**, bukan anak sendiri, tetapi anak bawaan istri atau suami ketika kawin (BZ:45)
- b. Pada lema **kandung**
anak kandung, anak sendiri bukan anak angkat atau anak tiri (BZ:610)
- c. Pada lema **tiri**
anak tiri, anak bawaan istri atau suami ketika dia menikahi kita (BZ:1517)

Karena ketentuan penulisan sublema seperti itu tidak ada, maka banyak sekali terjadi duplikasi dalam hal penulisan frasa. Tentu saja yang demikian itu menimbulkan kemubaziran, apalagi kalau ditambah dengan formulasi uraian atau definisinya yang tidak konsisten. Untuk itu, bandingkan definisi **anak kandung** antara yang tercantum pada lema **anak** dan lema **kandung**. Demikian pula halnya dengan definisi **anak tiri** pada lema **tiri**. Pertanyaannya ialah: kata *dia* dan *kita* pada definisi itu mengacu kepada siapa?

Bentuk **mata air** juga terdapat baik pada lema **mata** (BZ: 873) maupun **air** (BZ: 17). Untunglah, meskipun tetap ada duplikasi, definisinya konsisten atau sama, yaitu 'sumber air, tempat air keluar dari dalam tanah'. Satu contoh lagi mengenai duplikasi dengan definisi yang tidak sama, yaitu sublema **mata kucing** yang masing-masing tercantum pada lema **mata** dan **kucing**.

- a. Pada lema **mata**
mata kucing 1 mata yg ada di kepala kucing sbg alat pelihatnya; 2 *ki* lampu berwarna hijau pd radio utk menentukan tepatnya penerimaan siaran (BZ:873)
- b. Pada lema **kucing**
mata kucing *ki* lampu berwarna hijau pd radio yg menentukan tepatnya siaran (BZ:729)

Seperti yang terlihat, uraian **mata kucing** pada lema **mata** lebih luas dan lebih tepat dibandingkan dengan yang tercantum pada lema **kucing**. Lebih luas karena uraiannya meliputi makna kiasannya. Lebih tepat karena ciri ketepatan yang dimaksudkan pada makna kiasan itu bukan ketepatan siarannya, melainkan ketepatan penerimaan siarannya.

Masalah lain yang perlu dicatat mengenai sublema ini ialah penentuan pencantumannya. Yang dimaksudkan ialah apabila makna sublema (atau frasa) itu sudah dapat ditangkap atau dapat diperkirakan berdasarkan makna leksikal setiap unsurnya, maka sublema (atau frasa) tersebut tidak perlu dicantumkan dalam kamus. Catatan ini dikemukakan karena pada lema **nenek** (BZ:939) terdapat sublema **nenek di pihak ibu**, **nenek di pihak ayah**, dan **saudara senenek**. Selain itu, sekadar tambahan contoh, pada lema **pinjam** (BZ:1066) terdapat sublema **meminjam buku**, **meminjam telepon**, dan **meminjam uang**. Akan tetapi, pada lema tersebut tidak ada sublema **simpan pinjam**, gabungan

kata yang sudah sangat lazim digunakan, misalnya dalam konteks kegiatan koperasi. Kasus ini juga setali tiga uang dengan lema **simpan** (BZ:1324) yang juga tidak memunculkan bentuk **simpan pinjam**.

Sehubungan dengan lema **simpan** itu, terdapat bentuk yang tidak lazim, yakni **buku simpanan** pada lema **buku** (BZ:217), yang definisinya adalah 'buku yang mencatat besarnya tabungan, misalnya tabungan uang di bank; tabungan di koperasi, dsb.' Ada dua catatan yang akan dikemukakan untuk definisi itu. Pertama, **buku** dengan pengertian itu sekarang disebut **buku tabungan**, bukan **buku simpanan**. Pada lema **tabung** (BZ:1394--1395) juga tidak ada sublema **buku tabungan**. Kedua, pada rumusan yang digunakan untuk **buku simpanan** itu terdapat sekaligus dua kata, yakni *misalnya* dan *dan sebagainya*, pasangan yang senantiasa dicontohkan oleh penyusun BZ sebagai salah satu bentuk pemakaian bahasa Indonesia yang tidak cermat.

Agama dan Nabi

Mengenai dua agama besar di Indonesia, Islam dan Kristen, BZ merumuskannya sebagai berikut.

agama Islam, agama yang kitabnya diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad saw (BZ:539).

Kristen (*Blā*) nama agama yg disebarkan oleh Kristus (Isa Almasih) (BZ:724)

Dari kedua definisi itu, catatan atau komentar berikut perlu diperhatikan.

- Definisi Islam didasarkan pada kitab yang diwahyukan-Nya, sedangkan definisi Kristen (sebagai agama) didasarkan pada nabi yang menyebarkannya.
- Penulisan definisi untuk **agama Islam** didahului oleh tanda koma, sedangkan definisi **Kristen** tidak didahului oleh tanda koma. Mana yang benar? Pengamatan sepintas menunjukkan bahwa pada BZ antara lema atau sublema dan definisinya tidak terdapat tanda koma.
- Pada definisi **agama Islam** digunakan bentuk *yang*, tetapi pada definisi **Kristen** bentuk yang digunakan ialah *yg*. Mana yang benar? Pada daftar kata yang disingkat (BZ:xxi) tidak terdapat singkatan *yg*. Kalau begitu, ada dua kemungkinan yang patut disebut. Pertama, daftar singkatan tersebut kurang lengkap sehingga perlu ditambahkan bentuk *yg* atau, kedua, memang bentuk *yang* tidak perlu disingkat sehingga *yg* pada definisi Kristen merupakan kekeliruan.
- Yang mirip dengan kasus butir c di atas ialah pemakaian bentuk *kepada* pada definisi **agama Islam**. Sebenarnya, menurut daftar singkatan kata (BZ:xxi), kata *kepada* digunakan dalam bentuk singkatannya, yaitu *kpd*. Lagi-lagi pertanyaannya ialah: mana yang benar?

Menurut definisi tentang **Kristen**, Kristus disebut juga Isa Almasih.

Mengenai penulisan **Almasih**, ada tiga versi, yaitu **Almasih** (BZ:38) pada lema **Almasih**, **al Masih** (BZ:538) pada lema **Isa**, dan **Al-Masih** (BZ:607) pada sublema **Kamis putih** yang definisinya ialah seperti yang dikutip sebagaimana adanya berikut ini.

Kamis putih hari Kamis menjelang hari raya Paskah sbg peringatan wafatnya Isa Al-Masih yg diisi dng ibadat pertobatan dan penyucian diri (dl agama Katolik) (BZ:607)

Mengenai nama Nabi Ibrahim, di dalam uraian atau definisinya terdapat penggunaan kata **datuk**, yang bagi sebagian penutur bahasa Indonesia, terutama yang lahir dan dibesarkan di Jawa, sulit dipahami tanpa membuka kamus terlebih dahulu. Cobalah simak kutipan berikut.

Abraham, (*Bld*) nama orang sama dng Ibrahim; datuk pertama bangsa Yahudi dan Arab (BZ:3)

Salah satu makna **datuk** ialah 'nenek moyang'. Kalau demikian halnya, seharusnya dalam definisi tersebut yang digunakan ialah *nenek moyang pertama bangsa Yahudi dan Arab*, bukan *datuk pertama bangsa Yahudi dan Arab*. Yang perlu diperhatikan sehubungan dengan formulasi definisi ini ialah bahwa kata-kata yang digunakan hendaknya yang sudah dipahami oleh para pembaca kamus. Dengan perkataan lain, pembaca kamus, di dalam memahami definisi sebuah lema atau sublema, jangan sampai direpotkan untuk membuka kamus beberapa kali karena di dalam definisi tersebut masih terdapat sejumlah kata yang belum menjadi *langue* (istilah yang digunakan Saussure) dari pembaca kamus yang bersangkutan.¹

Ada satu catatan lagi yang berkenaan dengan lema **Islam** dan **Kristen**, yaitu sublema **mengislamkan** dan **mengkristenkan** dengan definisi seperti yang dikutipkan berikut ini.

mengislamkan orang 1 memasukkan atau menjadikan dia orang yg beragama Islam; 2 menyunat atau mengkhitan orang (BZ:539)

mengkristenkan menjadikan (seseorang) penganut agama Kristen (BZ:724)

Kedua lema itu sama-sama berkategori verba dengan ciri morfologi yang juga sama, tetapi yang pertama (**mengislamkan orang**) diikuti objek, sedangkan yang kedua (**mengkristenkan**) tidak diikuti objek.

Kekonsistenan

Kekonsistenan antara lain dapat dilihat pada cara merumuskan definisi. Di bawah ini dikutipkan definisi untuk nama-nama hari.

Minggu n hari di antara hari Sabtu dan Senin (BZ:900)

Ahad (*Ar*), n hari yang pertama dl seminggu, hari yg ditentukan

sbg hari libur kerja bagi pegawai dan murid sekolah (BZ:14)

Senin n hari kedua dl seminggu di antara hari Ahad dan hari Selasa (BZ:1280--1281)

Selasa (Ar) n hari sesudah Senin sebelum Rabu; hari ketiga dl seminggu (BZ:1249)

Rabu (Ar) n hari yg keempat; (Jw) **Rebo** (BZ:1115)

Kamis n hari yg kelima dl seminggu sesudah hari Rabu sebelum hari Jumat (BZ:607)

Jumat hari keenam dalam seminggu, hari orang Islam bersembahyang berjamaah di mesjid (BZ:586)

Sabtu nama hari ketujuh antara hari Jumat dan Minggu (BZ:1194)

Selain cara menyusun definisi yang berbeda seperti tampak pada kutipan di atas, ada juga perbedaan lain, yaitu dalam hal menentukan sublema dari nama-nama hari tersebut. Untuk **Minggu**, **Ahad**, **Selasa**, dan **Sabtu**, ada sublema dengan struktur seperti ... **Minggu** dan **Minggu** Dengan demikian, ada sublema **malam Minggu** dan **Minggu malam**, **malam Ahad** dan **Ahad malam**, **malam Selasa** dan **Selasa malam**, serta **malam Sabtu** dan **Sabtu malam**. Sublema dengan struktur seperti itu tidak terdapat pada lema **Senin**, **Kamis**, **Rabu**, dan **Jumat**. Mengapa terjadi diskriminasi serupa itu? Pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh penyusun BZ sendiri.

Beberapa komentar lainnya tentang definisi nama-nama hari di atas adalah sebagai berikut.

- a. Hari Ahad, Selasa, dan Rabu dibubuhi tanda yang menjelaskan bahwa nama ketiga hari itu berasal dari bahasa Arab. Kecuali hari Minggu yang memang tidak berasal dari bahasa Arab, mengapa definisi untuk hari Senin, Kamis, Jumat, dan Sabtu tidak dibubuhi tanda yang sama, padahal jelas nama keempat hari itu pun berasal dari bahasa Arab pula.
- b. Hari Minggu sama dengan hari Ahad. Akan tetapi, menurut definisi tersebut, hanya hari Ahad yang menjadi hari libur kerja dan hari libur sekolah, sedangkan hari Minggu tidak jelas, terutama karena dalam definisi itu tidak ada penanda bahwa hari Minggu sama dengan hari Ahad.
- c. Pada hari Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu berturut-turut didefinisikan secara eksplisit sebagai hari pertama, kedua, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Definisi seperti itu tidak tercantum pada hari Minggu dan Selasa.
- d. Definisi yang dimaksudkan pada butir c itu diungkapkan melalui lima macam pola pengungkapan sebagai berikut.
 1. hari ke ... dalam seminggu
 2. hari ke ... dalam seminggu di antara hari ... dan hari ...
 3. hari (yang) ke ...
 4. hari (yang) ke ... dalam seminggu sesudah hari ... sebelum hari ...

5. hari ke ... antara hari ... dan (hari) ...
- e. Pada definisi hari Jumat terdapat informasi tentang hari orang Islam bersembahyang di mesjid. Namun, pada definisi hari Minggu dan Ahad tidak ada informasi serupa untuk orang Kristen.

Pemahaman Konsep

Pemahaman terhadap konsep yang terkandung dalam suatu bentuk bahasa merupakan hal yang amat mendasar di dalam penyusunan definisi untuk bentuk bahasa yang bersangkutan. Pandangan ini perlu dikemukakan sehubungan dengan formulasi definisi **MPR** yang tidak tepat seperti berikut ini.

Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), dewan negara Indonesia yg tertinggi yg mewakili seluruh rakyat Indonesia (BZ:845)

MPR yang dilengkapkan menjadi Majelis Perwakilan Rakyat itu jelas menggambarkan kekeliruan di dalam memahami sistem pemerintahan dan ketatanegaraan kita. Siapa pun mengetahui bahwa bentuk lengkap MPR itu ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Untuk lebih meyakinkan hal itu, berikut dikutip penggalan pandangan Prof. Dr. Soepomo, S.H. mengenai kasus tersebut.

Pokok pikiran untuk Undang-Undang Dasar, untuk susunan negara, ialah begini. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat; sebagai penjelmaan rakyat, di dalam suatu badan yang dinamakan di sini: Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi, yang tidak terbatas kekuasaannya.²

Banzai dan lain-lain

Seperti diketahui, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu di dalam pertumbuhan dan perkembangannya menerima masukan dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing, termasuk bahasa Jepang. Itulah sebabnya kata-kata seperti **heiho**, **banzai**, **taiso**, dan **romusya** (KBBI menyebutnya **romusa**) tercantum dalam BZ. Hanya saja kata **bakero** yang artinya 'bodoh' dan digunakan sebagai makian (KBBI:81) tidak terdapat dalam BZ. Mengenai **banzai**, BZ memperlihatkan kelebihan dibandingkan dengan KBBI.

banzai (Jp) hiduplah!

Nippon banzai! Hiduplah Jepang!

Tennoheika banzai! Hiduplah Kaisar Tenno! (BZ:126)

banzai *Jp.p.* hiduplah! (KBBI:92)

Kelebihan itu tampak pada contoh pemakaiannya. Tanpa contoh pemakaian seperti itu, orang akan dengan seenaknya menggunakan kata **banzai** dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, pendukung gerakan reformasi yang fanatik

mungkin saja meneriakkan, misalnya, **Banzai reformasi!**, satu hal yang pasti janganal sekali kedengarannya, terutama bagi orang Indonesia yang pernah mengalami masa pendudukan Jepang.

Penutup

Menyusun sebuah kamus memang harus tekun, ulet, teliti, dan sabar. Segala sesuatu yang telah dirumuskan sebagai definisi untuk lema dan sublema yang menjadi isi kamus itu harus senantiasa dicek atau dibaca dan diteliti kembali, antara lain untuk memantapkan kekonsistenan perumusan definisi dan untuk meyakinkan diri si penyusun bahwa karyanya yang berupa kamus itu sudah bersih dari kesalahan cetak.

Sebagai penyusun BZ, Badudu perlu memperhatikan berbagai hal seperti beberapa persoalan leksikografi yang digarisbawahi dalam makalah ini. Selain itu, pencantuman lambang kategori atau kelas kata, yang di dalam BZ 1994 tidak ada, perlu juga dijadikan bahan pertimbangan. Kita harapkan agar pada cetakan atau edisi berikutnya BZ benar-benar dapat kita banggakan dan sekaligus memenuhi harapan para pemakainya.

Catatan

1. Pandangan Saussure mengenai **langue** dan **parole** masing-masing dapat dipahami sebagai leksikon pasif dan leksikon aktif seseorang. Leksikon pasif merupakan khazanah atau kekayaan kosakata seseorang yang dipahaminya, tetapi yang belum tentu dia gunakan dalam berkomunikasi secara tertulis apalagi secara lisan. Sebaliknya, leksikon aktif menggambarkan kosakata seseorang yang biasa digunakannya dalam berkomunikasi.
2. Pandangan itu dikemukakan oleh Prof. Dr. Soepomo, S.H. pada tanggal 18 Agustus 1945 di Jakarta pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Soekarno (lihat Saafoedin Bahar dkk. (Ed.), 1995:423).

6. KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA*

Pengantar

Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut *KBBI*) adalah kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh Pusat Bahasa dan diterbitkan oleh Balai Pustaka (Jakarta). Menurut definisi yang tercantum di dalam kamus tersebut (Edisi III hlm. 499), kamus besar bermakna "kamus yang memuat khazanah secara lengkap, termasuk kosakata istilah dari berbagai bidang ilmu yang bersifat umum". Terbitnya sebuah kamus, di mana pun dan tentang bahasa apa pun, tidak pernah berdiri sendiri. Artinya, ia selalu menggambarkan dan dalam batas-batas tertentu dipengaruhi oleh kamus-kamus sebelumnya tentang bahasa yang sama. Demikian pula halnya dengan *KBBI*.

Seperti yang dikemukakan di dalam Prakata Edisi I (1988) oleh Anton M. Moeliono selaku Kepala Pusat Bahasa dan sekaligus selaku Penyunting Penyelia, *KBBI* berasal dari berbagai sumber, seperti *Kamus Indonesia* oleh E. St. Harahap (1951), *Kamus Modern Bahasa Indonesia* oleh Sutan Moh. Zain (tanpa tahun), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* oleh WJS Poerwadarminta (1976), dan *Kamus Bahasa Indonesia* oleh Pusat Bahasa (1983). Kamus yang disebutkan terakhir terdiri atas dua jilid, dicetak dalam jumlah yang amat terbatas sehingga tidak beredar di kalangan masyarakat luas. Selain sumber yang berupa kamus, termasuk kamus bidang ilmu *KBBI* juga memanfaatkan data kebahasaan yang terdapat pada berbagai buku pelajaran dan media massa cetak.

Sampai saat ini *KBBI* sudah mengalami perubahan edisi sebanyak tiga kali. Edisi I (1988) beredar sampai dengan cetakan ke-4, Edisi II (1991) sampai dengan cetakan ke-10, dan Edisi III (2001) belum mengalami cetak ulang. Dilihat dari jumlah lema dan sublema yang tercantum di dalam *KBBI*, perubahan edisi itu memperlihatkan adanya peningkatan atau penambahan. Edisi I mengandung lema dan sublema sebanyak 62.100 butir, Edisi II 72.000 butir, dan Edisi III 78.000 butir.

Perubahan edisi *KBBI* itu ternyata tampak pula pada sebutan para penyusun atau redaksinya. Edisi I, dengan nama Tim Penyusun, terdiri atas Penyunting Penyelia (1 orang), Penyunting Penyelia Pengganti (1 orang), Penyunting Pengelola (1 orang), Penyunting Akhir (4 orang), Penyunting (12 orang), Penyunting Muda (7 orang), Pengumpul Data (94 orang), dan Pembantu Teknis (12 orang). Tim Redaksi pada Edisi II, setelah menampilkan Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab yang masing-masing dijabat oleh Kepala

* Bahan Penataran Leksikografi I, diselenggarakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, 13—16 Agustus 2001, Hotel Parkroyal, Kuala Lumpur

Pusat Bahasa dan Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan secara *ex-officio*, didukung oleh Pemimpin Redaksi (1 orang), Redaksi Pelaksana (5 orang), Sidang Redaksi (9 orang), Redaksi Pembantu (16 orang), dan Pembantu Pelaksana (7 orang). Pada Edisi III Kepala Pusat Bahasa dan Kepala Bidang Perkamusan dan Peristilahan tidak berperan secara *ex-officio* seperti halnya pada Edisi II, tetapi masing-masing bertindak sebagai Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi. Setelah itu, yang tampil pada susunan Tim Redaksi Edisi III adalah Redaksi Pelaksana (5 orang), Sidang Redaksi (7 orang), Redaksi Pembantu (14 orang), dan Pembantu Pelaksana (6 orang).

Dengan mengecualikan Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab pada Edisi II, ketiga edisi KBBI itu memperlihatkan perbedaan dalam hal jumlah peringkat dari tim penyusun atau redaksinya, yaitu 8 peringkat pada Edisi I, 5 peringkat pada Edisi II, dan 6 peringkat pada Edisi III. Sebagai perbandingan mengenai hal itu, dapat disebutkan bahwa Sidang Editor pada *Kamus Dewan* Edisi III terdiri atas 5 peringkat, yaitu Ketua Editor (1 orang), Editor (8 orang), Yang Turut Menyumbang (5 orang), Pemasukan Data (3 orang), dan Reka Bentuk Kulit (1 orang).

Dalam hal Lampiran yang ditempatkan setelah batang tubuh kamus, *KBBI* memuat tiga belas pokok sebagai berikut.

1. Kata dan Ungkapan Bahasa Daerah
2. Kata dan Ungkapan Bahasa Asing
3. Singkatan dan Akronim
4. Aksara Daerah
5. Aksara Asing
6. Nama Negara, Ibu Kota, dan Bahasa
7. Nama Mata Uang
8. Sukatan dan Timbangan
9. Nama Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II di Indonesia
10. Jumlah Penduduk di Indonesia
11. Bintang dan Tanda Kehormatan
12. Tanda dan Lambang
13. Ukuran Kertas Standar

Dilihat dari isi atau materi yang menjadi Lampiran KBBI itu, sekurang-kurangnya ada enam butir yang tidak secara langsung berhubungan dengan masalah kebahasaan, yakni butir 4, 5, 9, 10, 12, dan 13.

Hal itu sangat berbeda dengan, misalnya, isi lampiran *Kamus Dewan* Edisi III yang hanya menampilkan satu pokok saja, yaitu "Senarai Perkataan yang Sering Dieja Salah" dengan memberi penegasan pada dua kasus. Yang pertama berhubungan cara menulis kata secara benar (ejaan salah → ejaan betul) seperti yang terlihat pada contoh berikut.

disel	→	diesel
ejensi	→	agensi

karena	→	kerana
kawin	→	kahwin
kewajiban	→	kewajipan
talipon	→	telefon
warong	→	warung
yaitu	→	iaitu

Kasus kedua menyangkut pergantian vokal atau konsonan (variasi → bentuk standard) dengan contoh seperti berikut.

ai → e	:	haibat	→	hebat
au → e	:	tauladan	→	teladan
o → au	:	tobat	→	taubat
h → kh	:	habar	→	khavar
h → t	:	ibadah	→	ibadat
h → ●	:	hatur	→	atur
kh → h	:	khaid	→	haid
th → s	:	hadith	→	hadis

Lampiran *Kamus Dewan* itu benar-benar hanya berisi masalah kebahasaan yang memiliki tingkat kepraktisan yang tinggi karena pemakaian bahasa tulis oleh kalangan masyarakat luas sering sekali memperlihatkan kesalahan seperti yang terlihat pada kolom sebelah kiri. Dengan demikian, bentuk pada kolom sebelah kanan, yaitu yang benar, akan sangat bermanfaat bagi pemakai bahasa Melayu di Malaysia, Brunei, dan Singapura.

Tujuh pokok berikut yang merupakan lampiran dari *Webster's Collegiate Dictionary* Edisi X (2000) juga masih tetap dalam konteks kebahasaan, khususnya yang menyangkut bidang leksikografi.

1. *Abbreviations and Symbols for Chemical Elements*
2. *Foreign Words and Phrases*
3. *Biographical Names*
4. *Geographical Names*
5. *Signs and Symbols*
6. *A Handbook of Style*
 - a. *Punctuation*
 - b. *Capitalization*
 - c. *Italicization*
 - d. *Documentation of Source*
 - e. *Form of Address*
7. *Index*

Pembinaan Korpus

Sering dikemukakan pendapat yang menyatakan bahwa kamus yang baru terbit langsung menjadi ketinggalan zaman karena pada saat kamus itu terbit pasti cukup banyak kata/istilah baru yang belum sempat terekam di dalam kamus tersebut. Tingkat kecepatan bertambahnya kosakata baru dalam berbagai bidang kehidupan, apalagi pada kurun waktu yang ditandai oleh pesatnya kemajuan dan perkembangan dalam dunia teknologi informasi, pasti lebih tinggi daripada tingkat kecepatan para penyusun kamus di dalam melaksanakan tugasnya. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa kamus selalu ketinggalan zaman.

Agar tingkat kecepatan para penyusun kamus itu tidak terlalu jauh berbeda dari tingkat kecepatan pertambahan kosakata/istilah baru, perlu diupayakan kegiatan pembinaan korpus yang memadai sehingga setiap kata/istilah baru itu sekurang-kurangnya dapat segera dicatat dan disenaraikan. Proses berikutnya, yaitu yang sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan kerja dalam leksikografi, tentu akan memerlukan waktu, terutama dalam perumusan definisinya.

Mengenai pembinaan korpus ini, telah dikemukakan bahwa *KBBI* (Edisi I) disusun berdasarkan berbagai sumber, yakni kamus-kamus bahasa Indonesia yang telah terbit sebelumnya, kamus bidang ilmu, buku-buku pelajaran, dan media massa, terutama media massa cetak. Cara seperti itu juga diberlakukan dalam pembinaan korpus untuk Edisi II. Paparan berikut adalah gambaran singkat mengenai hal yang sama untuk Edisi III.

Edisi II jelas merupakan sumber pertama dan utama dalam penyusunan Edisi III. Catatan penting yang perlu dikemukakan ialah bahwa tidak seluruh lema/sublema Edisi II dimuat kembali dalam Edisi III karena lema/sublema yang ciri kedaerahannya amat menonjol dikeluarkan. Kasus itu menyangkut lema/ sublema yang diberi label *Jw* (bahasa Jawa) yang pada Edisi II berjumlah 1.386 butir dan pada Edisi III 929 butir. Hal itu berarti bahwa pada Edisi III lema/ sublema yang berasal dari bahasa Jawa mengalami pengurangan sebanyak 457 butir. Meskipun demikian, pengurangan itu tidak dapat diartikan bahwa keseluruhan lema/sublema Edisi II yang berasal dari bahasa Jawa yang berjumlah 457 butir itu tidak dimuat sama sekali dalam Edisi III. Mengenai perkara ini, ada tiga hal yang patut diperhatikan.

Pertama, ada lema/sublema yang masih muncul pada Edisi III tanpa label *Jw* karena dianggap sudah biasa digunakan sebagai kosakata bahasa Indonesia. Contohnya adalah *ajang*, *anjlok*, *serakah*, dan *tengara*.

- ajang** 1 *n* tempat untuk makan sesuatu (piring dsb); 2
 medan; tempat (untuk bertempur dsb): -- *pertempuran*;
 3 *p* untuk; bagi: -- *si Badu*

an.jlok *v* **1** meloncat ke bawah dari tempat ketinggian dengan posisi kedua kaki sbg tumpuan); **2** turun dari posisi semula (tt jembatan, bangunan, dsb); **3** keluar dari rel (ttg kereta api); **4** turun banyak dlm waktu sangat singkat (tt harga, berat badan, kesehatan orang, dsb)

se.ra.kah *a* selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki; loba; tamak; rakus: *meskipun sudh kaya, ia masih -- juga hendak mengangangi harta saudaranya*

te.nga.ra *n* tanda; firasat: *jika terdapat meteror jatuh, orang-orang tua pd zaman dahulu menganggapnya sbg -- buruk*

Pada umumnya perubahan dari Edisi II ke Edisi III itu hanya menyangkut penghilangan atau penghapusan label *Jw*, sementara definisi dan contoh pemakaiannya tidak berubah. Namun, ada juga yang definisinya pun mengalami sedikit perubahan seperti yang terlihat pada contoh kata *simbar* berikut.

sim. bar *Jw n* — dada bulu yang tumbuh di dada (Edisi II)

sim.bar *n* bulu yang tumbuh di dada laki-laki (Edisi III)

Kedua, ada lema/sublema yang pada Edisi III memang tidak dimunculkan lagi, contohnya ialah *antup*, *anyang*, dan *songsong* (definisi berikut didasarkan pada Edisi II).

an.tup *Jw n* alat penyengat (pd serangga)

anyang *Jw n*, **me.nga.nyang** *v* minta pengurangan harga; menawar

son.gsong *Jw n* payung kebesaran: *Sri Sultan berjalan menuju tempat upacara dng memakai -- berwarna kuning emas*

Ketiga, ada lema/sublema baru pada Edisi III dengan label *Jw*, padahal pada Edisi II lema/sublema tersebut tidak tercantum; contohnya adalah *subal*, *Anggorokasih*, *srinanganti*, dan *sumeh*.

su.bal *Jw n* barang (yg kurang baik) yg dicampurkan spy kelihatan banyak bertambah berat, dsb)

Ang.go.ro.ka.sih *Jw n* Selasa Kliwon

sri.ma.ngan.ti *Jw n* pintu gerbang untuk masuk keraton yg sebenarnya (krn ada beberapa pintu gerbang)

su.meh *Jw a* murah senyum kepada setiap orang

Sehubungan dengan definisi *Anggorokasih*, perlu ditambahkan bahwa di dalam kebudayaan Jawa ada yang disebut *pasaran*; artinya jangka waktu yang lamanya lima hari, masing-masing dengan sebutan atau nama yang berbeda, yaitu *Legi*, *Pahing* atau *Paing*, *Pon*, *Wage*, dan *Kliwon*.

Setelah Edisi II, yang dijadikan sumber untuk penyusunan Edisi III ialah buku *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing* yang diterbitkan tahun 1995 oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Diterbitkannya buku itu merupakan tindak lanjut dari anjuran Presiden Republik Indonesia yang dikemukakan pada tanggal 20 Mei 1995 agar nama dan kata bahasa asing yang digunakan di tempat umum (seperti pada kain rentang atau spanduk, nama gedung, dan nama perusahaan) segera diganti dengan nama dan kata bahasa Indonesia. Di dalam buku itu disenaraikan kata dan nama asing yang di sebelahnyanya dicantumkan padanannya dalam bahasa Indonesia.

Senarai tersebut, yang hampir semuanya berasal dari bahasa Inggris, disusun dalam tujuh bidang, yaitu Bisnis dan Keuangan, Industri, Olahraga dan Seni, Pariwisata, Perhubungan dan Telekomunikasi, Perlengkapan Pribadi, dan Properti. Karena buku tersebut hanya memuat senarai nama/kata asing berikut padanan bahasa Indonesia, maka untuk keperluan Edisi III entri yang berasal dari buku itu harus dirumuskan terlebih dahulu definisinya. Hal yang disebutkan terakhir ini memerlukan waktu sehingga isi buku itu belum dimanfaatkan secara keseluruhan untuk keperluan Edisi III. Sementara itu, buku itu sendiri masih harus dimutakhirkan, sesuai dengan perkembangan penggunaan bahasa dalam ketujuh bidang tersebut.

Sumber untuk penyusunan Edisi III berikutnya ialah apa yang dapat disebut sebagai Suplemen. Setiap orang di Bagian Perkamusan Pusat Bahasa diberi tugas untuk memantau pemakaian bahasa Indonesia pada surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Kalau ada kata atau istilah yang baru, mereka diharuskan mencatat kata/istilah baru tersebut. Karena pada dasarnya mereka bekerja dalam sebuah tim, pada akhir tahun hasil pencatatan itu digabungkan dalam sebuah dokumen yang disebut Suplemen. Dengan demikian, untuk Edisi III telah dihasilkan sebanyak enam suplemen, yaitu Suplemen I—VI. Tim Suplemen itu bertugas bukan hanya mencatat kata/istilah yang akan diusulkan menjadi entri Edisi III, melainkan juga harus mencoba menyusun rumusan definisinya. Hanya saja sangat disayangkan karena cara dan mekanisme kerja yang belum tertata secara rapi, sampai dengan diterbitkannya Edisi III ini kita tidak dapat mengetahui dengan pasti entri mana saja yang benar-benar berasal dari Suplemen. Untuk masa yang akan datang, dengan berpegang pada peribahasa yang menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik, kekeliruan dan kekurangan seperti itu mudah-mudahan akan dapat diatasi.

Kamus bidang ilmu, seperti sudah disebutkan, juga digunakan sebagai sumber penyusunan Edisi III. Jenis sumber ini adalah hasil Sidang Pakar Mabbim, yaitu yang berupa senarai istilah dalam bahasa Inggris berikut padanan bahasa Indonesianya untuk bidang-bidang ilmu tertentu, sesuai dengan bidang ilmu yang dijadwalkan dalam Sidang Pakar Mabbim. Mengenai hasil Sidang Pakar ini, apa yang dilakukan di Indonesia sedikit berbeda dengan apa yang dikerjakan di Malaysia. Hasil Sidang Pakar itu oleh DBP Malaysia langsung diterbitkan untuk disebarluaskan kepada berbagai pihak yang

memerlukannya. Senarai istilah yang merupakan hasil Sidang Pakar itu oleh Indonesia tidak langsung diterbitkan, tetapi diolah terlebih dahulu sampai berwujud kamus untuk bidang ilmu yang bersangkutan. Dengan demikian, pemasyarakatan hasil Sidang Pakar itu baru dilakukan di Indonesia setelah berwujud kamus. Catatan khusus yang perlu dikemukakan ialah mengenai empat bidang ilmu dasar yang meliputi Fisika, Matematika, Biologi, dan Kimia. Pada tahun 1993 diterbitkan Glosarium keempat bidang ilmu yang memuat senarai lengkap istilah setiap bidang ilmu itu berikut semua subbidang ilmu yang bersangkutan, sesuai dengan taksonominya. Setelah itu, dilakukanlah penyusunan kamus dari keempat bidang ilmu itu, dan kamus-kamus itu baru selesai diterbitkan pada tahun 1998.

Di antara para pengguna *KBBI*, ada yang sekali-kali menyampaikan pandangan, saran, atau komentarnya terhadap isi *KBBI* Edisi II. Ada pula yang boleh dikatakan memberi masukan secara tetap dan berkala, termasuk masukan yang berupa usul perbaikan definisi dan bahkan usul penambahan lema/sublema baru untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Edisi III. Kelompok peminat kamus seperti yang disebutkan terakhir ini jumlahnya tidaklah banyak, hanya tiga atau empat orang saja. Meskipun demikian, sumbangan pemikirannya untuk Edisi III sangatlah berharga.

Yang terakhir yang perlu disebut sebagai sumber pembinaan korpus untuk Edisi III ialah pertanyaan dari kalangan masyarakat, baik melalui surat, telepon, maupun secara langsung yang bersangkutan datang ke Pusat Bahasa, mengenai kata atau istilah yang erat sekali kaitannya dengan isi kamus. Pertanyaannya sangat bervariasi. Ada yang menanyakan makna kata/istilah berikut contoh pemakaiannya yang tepat, ada yang menanyakan padanan bahasa Indonesianya dari kata/istilah yang pada umumnya berasal dari bahasa Inggris, atau ada pula yang tidak mengetahui cara penulisannya secara benar sesuai dengan kaidah ejaan dan kaidah pembentukan istilah.

Cara Penyusunan

Bentuk bahasa yang maknanya dirumuskan atau didefinisikan dalam sebuah kamus lazim disebut lema dan sublema. Yang disusun secara alfabetis di dalam kamus ialah lema yang kadang-kadang disebut juga lema pokok atau lema kata dasar. Seperti telah disinggung pada bagian Pengantar, lema/sublema Edisi III berjumlah ± 78.000 butir. Dari jumlah itu, yang paling sedikit ialah lema/sublema pada abjad Q (12 butir semuanya dari bahasa Arab) dan abjad X (32 butir, semuanya berasal dari bahasa Indo-Eropa). Kata Indonesia seperti *qariah*, *qasar*, dan *qudsi* (jenis hadis) dipungut dari bahasa Arab, sementara *xenofobia*, *xenograf*, dan *xilofon* dari bahasa Indo-Eropa.

Entri Edisi III yang disusun secara alfabetis itu tidak hanya kata dasar, tetapi juga empat bentuk berikut.

1. Gabungan kata dasar (idiomatis atau tidak) seperti *campur aduk*, *tanggung jawab*, dan *warga negara* diperlakukan sebagai lema yang diikuti oleh bentuk-bentuk derivasinya sebagai sublema seperti *bercampur aduk* dan *pencampuradukan* untuk *campur aduk*; *bertanggung jawab* dan *pertanggung-jawaban* untuk *tanggung jawab*; serta *mewarganegarakkan* dan *kewarganegaraan* untuk *warga negara*. Dengan demikian, *campur aduk*, *tanggung jawab*, dan *warga negara* itu tidak secara langsung menjadi bagian dari lema *campur*, *tanggung*, dan *warga*.
2. Kata ulang yang berubah bunyi seperti *bolak-balik*, *compang-camping*, dan *pontang-panting* diperlakukan sebagai lema. Artinya, ketiga bentuk itu tidak secara langsung merupakan bagian dari lema *balik*, *camping*, dan *panting*.
3. Bentuk ulang yang seolah-olah seperti kata ulang, misalnya *kupu-kupu*, *laba-laba*, dan *kunang-kunang* diperlakukan sebagai lema. Tidak ada kata dasar *kupu*, *laba*, dan *kunang* yang menurunkan ketiga bentuk ulang itu. Bentuk *kupu* dirujuk pada *kufu* (dari bahasa Arab) yang bermakna kesamaan derajat atau martabat. *Laba-laba* sebagai nama binatang sama sekali tidak memperlihatkan kesamaan ciri semantis dengan kata *laba* yang bermakna keuntungan. Sementara itu, bentuk *kunang* tidak ada dalam kosakata bahasa Indonesia.
4. Kata yang berawalan *se-* dengan makna 'sama', misalnya *seimbang* dan *sesuai*, diperlakukan sebagai lema pokok dengan penulisan sebagai berikut.
se.im.bang lihat **imbang**
se.su.ai lihat **suai**

Dengan demikian, penjelasan makna *seimbang* dan *sesuai* itu masing-masing terdapat pada lema *imbang* dan *suai*.

Peribahasa dan Urutan Susunan Lema

Karena bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kaya dengan peribahasa, maka dalam Edisi III peribahasa yang dicatat berjumlah 1954 buah atau $\pm 2,5\%$ dari isi Edisi III. Jumlah itu jauh lebih banyak daripada kata dengan makna kiasan yang hanya tercatat 281 buah atau kurang dari $0,4\%$ diukur dari keseluruhan Edisi III.

Pentingnya peribahasa itu juga terlihat dari penempatannya dalam urutan lema, yaitu segera setelah kata dasar dan sebelum gabungan kata. Urutan itu selengkapanya adalah sebagai berikut.

1. Lema pokok atau kata dasar
2. Peribahasa
3. Gabungan kata dari kata dasar
4. Kata ulang
 - a. bentuk dasar
 - b. dwipurwa

5. ...-i
6. ber-..
 - ber-...-an
 - keber-...-an
 - pember--an
 - ber-...-an
 - member-...-an
7. me-
 - me-...-i
 - me-...-kan
 - menge-...-kan
8. di-...
9. ter-...
 - ter-...-i
 - ter-...kan
10. ..-an
 - keter-...-an
11. per-...
 - per-...-an
 - per-...-kan
 - memper-...
 - memper-...-kan
 - teper-...-kan
12. pe-...
 - pe-...-an
 - pe-...-i
13. ke-...
 - ke-...-an
14. se-...
 - menye-...-i
 - menye-...kan
 - se-...-an
 - berse-...-an
 - perse-...-an
 - penye-...-an
 - kese-...-an
 - sepe-...
 - seper-...
 - seper-...-an
 - se-...-nya

Mengenai urutan di atas, ada dua hal yang patut diperhatikan. Pertama, urutan itu tidak selalu demikian apabila penjelasan makna menuntut susunan lain. Kedua, sejauh yang menyangkut verba, kalau sudah ada bentuk dengan *me-*, maka tidak ada bentuk derivasi dengan *di-*.

Label Kelas Kata dan Bidang Ilmu

Semua lema/sublema Edisi III, sama halnya dengan Edisi I dan Edisi II, dilengkapi dengan label yang menunjukkan kelas katanya. Ada tujuh kelas kata, yaitu *a* (adjektiva), *adv* (adverbia), *n* (nomina), *num* (numeralia), *p* (partikel), *pron* (pronomina), dan *v* (verba). Label kelas kata itu dicetak miring.

Selain label kelas kata, lema/sublema itu, apabila diperlukan, diberi juga label lain untuk memberikan informasi tambahan apakah lema/sublema yang bersangkutan di dalam kenyataan pemakaian bahasa Indonesia tergolong *ark* (arkais), *kl* (klasik), *cak* (ragam cakapan), *hor* (ragam hormat), atau *kas* (ragam kasar). Label yang menunjukkan informasi tambahan itu juga dicetak dengan huruf miring. Kalau suatu bentuk merupakan kependekan, label *kp* digunakan, juga dicetak miring. Sama halnya dengan label kependekan, label *akr* (akronim) dengan huruf miring digunakan untuk menandainya.

Sehubungan dengan adanya lampiran mengenai Singkatan dan Akronim, keberadaan sejumlah akronim pada batang tubuh kamus masih dipertahankan dengan pertimbangan bahwa akronim-akronim itu sudah benar-benar dirasakan sebagai kata biasa. Contohnya adalah *laser*, *rudal*, dan *tilang* yang di bawah ini masing-masing dengan penjelasan menurut batang tubuh kamus (a) dan lampiran mengenai Singkatan dan Akronim (b).

- a. **la.ser** *n* *Fis* pembangkit cahaya produk sains dan teknologi modern, yg dapat menghasilkan cahaya yg mempunyai intensitas tinggi, bersifat koheren dan monokromatis

ru.dal *n* *akr* peluru kendali

ti.lang *n* *akr* bukti pelanggaran lalu lintas ...

- b. **laser** *light amplification by stimulated emission of radiation*

rudal peluru kendali

tilang **1** tindakan langsung; **2** bukti pelanggaran

Dari contoh di atas, dapat dipertanyakan mengapa *laser* pada a tidak diberi label *akr*, sementara bentuk lengkap *tilang* menurut a dan b tidak sama. Di luar contoh itu, dapat dicatat satu hal lagi, yaitu mengenai *pemilu*. Bentuk akronim ini pada lampiran mengenai Singkatan dan Akronim dimuat, tetapi pada batang tubuh kamus tidak. (Bentuk lengkap *pemilu* ialah pemilihan umum.)

Penjelasan *laser* pada a menggunakan label *Fis* (Fisika). Label bidang ilmu seperti itu pada Edisi III ada 66 buah. Berikut ini disebutkan dua puluh di antaranya.

<i>Ant</i>	antropologi	<i>Geo</i>	geografi dan geologi
<i>Ark</i>	arkeologi	<i>Hidm</i>	hidrometeorologi
<i>Bio</i>	biologi	<i>Huk</i>	hukum
<i>Dag</i>	perdagangan	<i>Kim</i>	kimia
<i>Dok</i>	kedokteran	<i>Komp</i>	komputer
<i>Ek</i>	ekonomi	<i>Man</i>	manajemen
<i>El</i>	elektronika	<i>Mat</i>	matematika
<i>Far</i>	farmasi dan farmakologi	<i>Met</i>	meteorologi
<i>Fil</i>	filsafat	<i>Stat</i>	statistik
<i>Fis</i>	fisika		

Label kelas kata dan bidang ilmu itu pada dasarnya merupakan singkatan yang penulisannya dengan huruf miring ditempatkan setelah lema/sublema yang bersangkutan dengan urutan label kelas kata dahulu, baru kemudian diikuti oleh label bidang ilmu (lihat contoh *laser* pada a). Pada definisi atau contoh pemakaian ada tujuh belas kata yang tidak ditulis secara lengkap, tetapi digunakan singkatannya sebagai berikut.

<i>dl</i>	dalam	<i>msl</i>	misalnya
<i>dll</i>	dan lain-lain	<i>pd</i>	pada
<i>dng</i>	dengan	<i>sbg</i>	sebagai
<i>dp</i>	daripada	<i>spt</i>	seperti
<i>dr</i>	dari	<i>thd</i>	terhadap
<i>dsb</i>	dan sebagainya	<i>tsb</i>	tersebut
<i>dst</i>	dan seterusnya	<i>tt</i>	tentang
<i>kpd</i>	kepada	<i>yg</i>	yang
<i>krn</i>	karena		

Sekadar bahan perbandingan, dapat dilihat singkatan yang digunakan dalam *Kamus Dewan* berikut.

<i>bd</i>	bahasa dalam	<i>ki</i>	kiasan
<i>bh</i>	bahasa halus	<i>kpd</i>	kepada
<i>bk</i>	bahasa kasar	<i>lwn</i>	lawan
<i>bp</i>	bahasa percakapan	<i>mis</i>	misalnya
<i>prb</i>	peribahasa	<i>pd</i>	pada
<i>bkn</i>	berkenaan (dengan)	<i>sbg</i>	sebagai
<i>dng</i>	dengan	<i>sj</i>	sejenis
<i>dll</i>	dan lain-lain	<i>sl</i>	sastera lama
<i>drpd</i>	daripada	<i>spt</i>	seperti

dsb dan sebagainya
kep kependekan

sr seruan
utk untuk
yg yang

Pemenggalan

Lema/sublema Edisi III dicetak dengan huruf tebal dan suku katanya dipenggal dengan menggunakan tanda titik. Perhatikan penulisan *operasi*, *elaborasi*, *uban*, dan *via* berikut.

ope.ra.si	bukan	o.pe.ra.si
ela.bo.ra.si	bukan	e.la.bo.ra.si
uban	bukan	u.ban
via	bukan	vi.a

Dari contoh di atas terlihat suku kata yang terdiri atas satu huruf vokal pada awal atau akhir kata tidak dipenggal. Demikian pula halnya dengan akhiran-*i* seperti pada *mengobati* dan *mencabuti* berikut.

men.ca.but.i	bukan	men.ca.but.i
meng.o.bati	bukan	meng.o.bat.i

Ketentuan mengenai pemenggalan itu diberlakukan agar tidak terdapat satu huruf vokal pada awal atau akhir baris. Kalau satu huruf vokal itu terdapat di tengah, pemenggalannya adalah seperti pada *beroperasi*, *searah*, *mengurus*, dan *puisi* berikut.

ber.o.pe.ra.si	meng.u.rus
se.a.rah	pu.i.si

Akhiran *-isme* dari bahasa asing pada kata yang unsurnya merupakan kata mandiri diperlakukan sebagai akhiran dengan pemenggalan sebagai berikut.

kolonialisme	→	ko.lo.ni.al.is.me
sekularisme	→	se.ku.lar.is.me
verbalisme	→	ver.bal.is.me

Akhiran *-isme* itu tidak diperlakukan sebagai akhiran kalau unsurnya bukan kata mandiri. Perhatikan pemenggalan kata *anarkisme*, *fasisme*, dan *nudisme* berikut.

anar.kis.me
fa.sis.me
nu.dis.me

Pemenggalan kata-kata tertentu dari bahasa Arab yang mengandung *ain* atau *hamzah* yang didahului konsonan dipenggal seperti lafal aslinya.

Alquran	→	Al. qur.an
bidah	→	bid.ah
Jumat	→	Jum.at
mutah	→	mut.ah

Angka Arab, Superskrip, dan Subskrip

Angka Arab cetak tebal digunakan untuk menandai makna polisemi, seperti terlihat pada dua makna *emulasi* berikut.

emu. la.si *n* 1 ambisi atau usaha keras untuk menyamai atau melebihi yang lain dl prestasi; kedengkian; iri hati; 2 imitasi; tiruan

Superskrip atau tika atas digunakan utk menandai bentuk homonim yg homograf dan homofon (diletakkan di depan lema yg memiliki bentuk homonim, setengah spasi ke atas), seperti deskripsi makna bisa berikut.

¹**bi.sa** *v* mampu (kuasa melakukan sesuatu), dapat: *ia -- membaca, tetapi tidak -- menulis*

²**bi.sa** *n* 1 zat racun yg dapat menyebabkan luka, busuk, atau mati bagi sesuatu yg hidup (biasanya terdapat pd binatang); 2 *ki* sesuatu yg buruk, yg dapat merusakkan akhlak manusia atau masyarakat: *ajarannya itu menjadi -- bagi kami.*

Subskrip atau tika bawah digunakan untuk menuliskan rumus kimia (diletakkan di belakang huruf lambang kimia, setengah spasi ke bawah), seperti contoh berikut.

ok.si.da *n* Kim senyawa oksigen yg bersifat biner, umumnya dng logam (spt Na₂O) atau bukan logam (spt NO₂)

Pengganti Lema dan Sublema

Di dalam deskripsi lema dan sublema, apabila bentuk yang menjadi lema atau sublema itu harus diulang atau disebut kembali, maka digunakanlah tanda hubung ganda (--) sebagai pengganti lema dan tilde (~) sebagai pengganti sublema. Pada contoh berikut tanda hubung ganda menggantikan *akibat* dan tilde menggantikan *berakibat*.

aki.bat *n* sesuatu yg merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan tau keadaan yg mendahuluinya: -- *gempa bumi itu ratusan penduduk kehilangan tempat tinggalnya;*

ber.a.ki.bat *v* berkesudahan; berakhir dng: *tindakan yg gagabah itu ~ sangat merugikan;*

Pada contoh di atas terdapat tiga jenis tanda baca, yaitu titik dua, titik koma, dan tanda elipsis.

- a. Titik dua (:) dipakai sebagai pengganti kata *misalnya* di dalam deskripsi untuk memisahkan kalimat contoh dari deskripsi.
- b. Titik koma dipakai untuk memisahkan bentuk-bentuk kata yang bermakna sama atau hampir sama yang terdapat pada deskripsi makna (lihat titik koma sebelum *pensyaratan* pada lema *akibat*). Selain itu, titik koma juga digunakan sebagai penanda akhir deskripsi makna sebuah sublema yang masih belum merupakan bentuk derivasi terakhir (lihat titik koma sebelum *ber.a.ki.bat*). Contoh berikut memperlihatkan bahwa deskripsi makna sublema yang merupakan bentuk derivasi terakhir sebuah lema tidak diakhiri dengan tanda baca apa pun.

am a 1 tidak terbatas pd orang atau golongan tertentu; umum; awam: orang --; **2** tidak terbatas pd bidang tertentu: *pengetahuan* --;

meng.am.kan v 1 menyediakan untuk orang; **2** mengumumkan; menyampaikan (menyiarkan, memberitahukan) kpd khalayak
- c. Tanda elipsis pada deskripsi makna lema *akibat* menunjukkan bahwa ada contoh atau bagian yang dihilangkan (lihat Edisi III hlm. 20)

Garis Miring dan Anak Panah

Garis miring dipakai untuk lafal kata yang mengandung unsur bunyi / / / agar tidak terjadi kesalahan di dalam melafalkannya

mer.de.ka / merd ka / a ...

te.ras / t ras / n ...

Tanda anak panah digunakan sebagai penanda rujuk silang bagi kata lema yang tidak disarankan pemakaiannya, yang merupakan bentuk varian kata lama yang ejaannya dianggap baku.

aktif → **aktif**

apem → **apam**

na.se.hat / nas hat / → **nasihat**

Huruf Miring dan Huruf Tebal

Pada uraian terdahulu telah diketahui bahwa huruf miring dipakai untuk menuliskan

- a. label kelas kata
- b. label akronim
- c. label kependekan
- d. label bidang ilmu
- e. label ragam bahasa
- f. label kiasan dan peribahasa
- g. kalimat contoh pemakaian

Selain itu, huruf miring juga digunakan untuk menuliskan nama ilmiah yang pada umumnya merupakan istilah Latin. Huruf pertama istilah Latin itu ditulis dengan huruf kapital dan didahului oleh tanda titik koma, seperti terlihat pada contoh berikut.

eru *n* pohon cemara; *Casuarina equisetifolia*

ge.li – ge.li *n* tumbuhan rawa; *Lesia spinosa*

¹ha.ra *n* ikan darat; *Osteochilus melanopleura*

Dari beberapa contoh yang telah dikemukakan, diketahui bahwa huruf tebal digunakan dalam penulisan

- lema
- sublema, termasuk gabungan kata (berafiks atau tidak)
- kata rujukan (kata yang berada setelah tanda anak panah)
- angka dan huruf untuk polisemi.

Angka untuk polisemi terlihat pada contoh ²bisa dan *am* serta *mengamkan*. Pemakaian huruf tebal untuk angka dan huruf untuk polisemi tersebut sekaligus terlihat pada deskripsi makna *artikulasi* berikut.

ar.ti.ku.la.si *n* 1 Anat sendi; 2 Bot *a* sambungan di antara dua bagian, msl tempat melekatnya daun pd ranting; *b* buku pada batang; 3 Ling *a* lafal, pengucapan kata; **b** perubahan rongga dan ruang di saluran suara untuk menghasilkan bunyi bahasa;

ber.ar.ti.ku.la.si *v* mempunyai artikulasi

Aspek Morfologi

Penyusunan Edisi III dihadapkan pada beberapa hal yang menyangkut tataran morfologi. Sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi karena ketentuan mengenai kaidah morfologi, terutama yang berhubungan dengan afiksasi, sudah jelas dan sudah baku, bahkan sudah pula dikenal dan dipahami oleh masyarakat pemakai bahasa. Namun, ketika kaidah itu hendak diterapkan pada lema atau kata dasar yang berasal dari bahasa asing, terjadi semacam tarik-menarik antara bentuk yang didasarkan pada kaidah dan bentuk yang didasarkan pada kecenderungan atau keinginan para pemakai bahasa di kalangan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal itu, sublema pada Edisi III mengenai bentuk kata yang demikian mungkin oleh sebagian orang akan dinilai sebagai sesuatu yang belum tuntas. Namun, kita tetap berkewajiban untuk memasyarakatkan bentuk-bentuk yang menurut Edisi III sudah disajikan sebagai bentuk baku. Pemberian contoh mengenai aspek morfologi berikut ini akan ditinjau dari dua hal, yaitu pasangan yang bersaing dan ihwal luluh tidaknya huruf (atau huruf-huruf) awal kata dasar dari bahasa asing itu pada saat dihubungkan dengan awalan (prefiks), khususnya *meN-* dan *peN-*.

Pasangan yang Bersaing

Dari sejumlah kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing, berikut ini dicontohkan lima pasangan yang bersaing (yang dirujuk oleh tanda anak panah berarti bentuk yang disarankan untuk digunakan)

praktek	→	praktik
apotik	→	apoteke
propinsi	→	provinsi
provokatur	→	provokator
fora	→	forum

Dipilihnya *praktik* karena bentuk inilah yang menjadi dasar bagi derivasi bentuk-bentuk lainnya (*praktikum*, *praktis*, *praktisi*); sama halnya dengan *apoteke* yang jelas berkorelasi dengan *apoteker*. Mengenai *provokatur* dan *provokator*, pada Edisi II yang terbit tahun 1991 tercantum *provokatur*. Namun, ketika perjuangan Reformasi mulai bergulir tahun 1998, yang digunakan oleh semua pihak ialah *provokator*. Atas dasar itu, bentuk baku yang disarankan pada Edisi III ialah *provokator*. Sementara itu, bentuk *forum* yang dalam pemakaian bahasa Indonesia sudah sangat mantap mulai dipermasalahkan oleh para ahli yang mengetahui bahwa di dalam bahasa Latin *forum* dan *fora* masing-masing menunjukkan jumlah tunggal dan jamak, sama halnya dengan *datum* dan *data*.

Bentuk yang pertama kali masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia ialah *forum* dan *data*, dan bentuk itulah yang diterima dan digunakan tanpa harus mempertimbangkan konsep yang sebenarnya menurut bahasa sumbernya. Itulah sebabnya pada Edisi III bentuk *fora* merujuk ke *forum*, sedangkan *datum* tidak tercantum (yang ada hanya *data*). Masih ada "kaji lama" tentang pasangan bersaing itu yang dirasakan masih perlu pula diungkapkan pada Edisi III, yaitu bentuk *subyek* dan *obyek* yang dirujuk dengan tanda anak panah masing-masing ke *subjek* dan *objek*.

Bentuk *asasi* pada Edisi III tidak dipasangkan dengan *azasi* yang di dalam kenyataan berbahasa oleh kalangan masyarakat luas sangat tinggi frekuensi pemakaiannya. Yang paling sering dibicarakan pada masa Reformasi di Indonesia sampai sekarang ini ialah masalah yang menyangkut *HAM* yang oleh mereka ditulis dan dilafalkan berdasarkan bentuk *hak azasi manusia*, bukan *hak asasi manusia*. Untuk kasus seperti ini, ketelitian dalam menata dan membina korpus untuk edisi selanjutnya masih harus lebih ditingkatkan lagi.

Masing-masing dari pasangan berikut masih memperlihatkan persaingan yang ketat.

jasirah	→	jazirah
jaman	→	zaman
dosin	→	lusin
losin	→	lusin

Salah satu penyebab timbulnya bentuk bersaing itu diakibatkan oleh ada atau tidak adanya konsonan *h* pada awal kata, seperti pada contoh berikut.

hutang	→	utang	ibah	→	hibah
handal	→	andal	ibuk	→	hibuh

Dari contoh di atas, yang perlu dijelaskan adalah *hibuk*. Kata sifat atau adjektiva ini berasal dari bahasa Melayu Jakarta yang bermakna 'banyak pekerjaan; giat bekerja; sibuk' dan yang menurunkan bentuk nomina *kehibukan* ('perihal hibuk; kesibukan').

Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia di dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan kosakatanya banyak sekali mendapat masukan dari bahasa Arab, terutama yang menyangkut konsep ajaran agama Islam. Meskipun sejak tahun 1989 di Indonesia telah ada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Pedoman Transliterasi dari Aksara Arab ke Aksara Latin, masyarakat pemakai bahasa masih tetap saja menggunakan bentuk-bentuk yang bersaing, seperti yang dicontohkan berikut ini.

aqidah	→	akidah	napsu	→	nafsu
ustad	→	ustaz	nasehat	→	nasihat
mesjid	→	masjid	wassalam	→	wasalam
nafas	→	napas	salawat	→	selawat
harafiah	→	harfiah	kuatir	→	khawatir

Contoh berikut lebih banyak berhubungan dengan bidang ilmu. Bentuk *agribisnis* pada Edisi III dirujuk pada *agrobisnis*. Bentuk lainnya dengan unsur terikat *agro-*, antara lain, ialah *agroekonomi*, *agroindustri*, dan *agrokimia*. Selanjutnya, perlu pula diamati pasangan antara bentuk adjektiva (sebelah kiri) dan bentuk nomina (sebelah kanan) berikut.

aerobik	aerobika
fisik	fisika
matematis	matematika
statistis	statistika
	statistik

Bentuk *statisika* dan *statistik* sama-sama berkelas kata nomina dan sama-sama pula memiliki adjektiva *statistis* sehingga deskripsinya pada Edisi III adalah sebagai berikut.

- sta. tis.tik** *n* 1 catatan angka-angka (bilangan); perangkaan; 2 data yg berupa angka yg dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan sehingga dapat memberi informasi yg berarti mengenai suatu masalah atau gejala
- sta. tis.ti.ka** *n* 1 ilmu tt cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yg berarti dr data yg berupa angka; 2

pengetahuan yg berhubungan dng pengumpulan data, penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti, berupa catatan bilangan (angka-angka)

sta. tis.tis. a 1 berkaitan dng statistik; **2** berkaitan dng statistika

Pasangan *statistis* dengan *statistik* yang masing-masing memperlihatkan kategori adjektiva dan nomina itu memperlihatkan ciri morfologis yang sama dengan pasangan *semantis/semantik*, *linguistis/linguistik*, *metodis/metodik*, *didaktis/didaktik*, dan *pragmatis/pragmatik*. Dari pasangan-pasangan ini pada Edisi III tidak tercantum bentuk *linguistis*. Jelas hal itu memperlihatkan kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penyusunan edisi berikut.

Pada contoh berikut terlihat bahwa vokal awal *o* dirujuk ke *au* dengan catatan bahwa bentuk *otoritarian* dirujuk ke *otoriter*.

otografi	→ autografi	otokritik	→ autokritik
otokrasi	→ autokrasi	otomasi	→ automasi
otokrat	→ autokrat	otopsi	→ autopsi

Konsonan Awal: Bertahan atau Luluh?

Konsonan awal *k*, *p*, *s*, dan *t* akan luluh kalau dirangkaikan dengan prefiks *meN-* atau *peN-*. Kata *kerat*, *pukul*, *serang*, dan *tendang*, misalnya, kalau digunakan dengan kedua prefiks itu, masing-masing akan menjadi *mengerat* dan *pengerat(an)*, *memukul* dan *pemukul(an)*, *menyerang* dan *penyerang(an)*, serta *menendang* dan *penendang(an)*. Hal yang sama terjadi pula pada kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa asing dengan konsonan awal seperti yang baru saja dicontohkan, seperti yang diperlihatkan contoh berikut.

Lema	Sublema dengan <i>meN-</i>	Sublema dengan <i>peN-</i>
kodifikasi kontras	mengodifikasikan mengontaraskan	pengodifikasian pengontrasan
paraf parkir	memaraf memarkir	pemarafan ^{x)} pemarkiran ^{x)}
sukses sinergi	menyukkseskan menyinerlgikan	penyukksesan ^{x)} penyinerlgian ^{x)}
topik torpedo	menopikkan menorpedo	penopikan penorpedoan ^{x)}

Pada contoh di atas ada sublema dengan *peN-* yang diberi tanda ^{x)}. Artinya ialah bahwa bentuk-bentuk itu tidak terdapat di dalam Edisi III, tetapi secara potensial bentuk-bentuk itu dapat digunakan. Meskipun demikian, konsonan *s* pada *sinyalir* dan *sosialisasi* tidak luluh sehingga sublemanya ialah *mensinyalir* dan *mensosialisasikan*. Mungkin hal itu didasarkan pada pertimbangan fono-

taktik karena *menyinyalir* dan *menyosialisasikan* cenderung lebih sulit diucapkan daripada *mensinyalir* dan *mensosialisasikan*.

Gugus konsonan *kl* dan *kr* tidak luluh dan bentuk *pengklarifikasian* pada contoh berikut tidak termuat dalam Edisi III, tetapi secara potensial dapat digunakan, bahkan sudah digunakan oleh para pemakai bahasa.

Lema	Sublema dengan <i>meN-</i>	Sublema dengan <i>peN-</i>
klasifikasi	mengklasifikasikan	pengklasifikasian
klarifikasi	mengklarifikasi	pengklarifikasian
kredit	mengkreditkan	pengkreditan
kritik	mengkritik	pengkritik

Gugus konsonan *pr* yang didahului *meN-* tidak luluh, tetapi luluh kalau diartangkakan dengan *peN-*

Lema	Sublema dengan <i>meN-</i>	Sublema dengan <i>peN-</i>
program	memprogram	pemrogram
proses	memproses	pemproses
produksi	memproduksi	pemproduksi
propaganda	memprogandakan	pempropaganda

Yang juga termasuk sebagai gugus konsonan yang tetap bertahan atau tidak mengalami peluluhan kalau didahului prefiks *meN-* dan *peN-* ialah *sp*, *st*, dan *str*. Demikian pula halnya dengan gugus konsonan *tr*, seperti pada contoh berikut.

Lema	Sublema dengan <i>meN-</i>	Sublema dengan <i>peN-</i>
sponsor	mensponsori	pensponsoran
stabil	menstabilkan	penstabilan
steril	mensterilkan	pensterilan
strata	menstratakan	penstrataan
struktur	menstrukturkan	pensrukturan
transkripsi	mentranskripsikan	pentranskripsian
transformasi	mentransformasikan	pentransformasian
transmigrasi	mentransmigrasikan	pentransmigrasian

Pemerian Makna

Dalam kegiatan penyusunan kamus, menyusun deskripsi makna lema/sublema merupakan tahapan yang utama dan sangat menentukan bagi keberhasilan kamus yang diterbitkan. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa mutu kamus ditentukan oleh ketepatan perumusan definisinya, di samping ditentukan juga

oleh kepraktisan contoh pemakaian dari lema/sublema yang dideskripsikan maknanya tersebut. Karena lema/sublema yang didefinisikan itu pada dasarnya harus ditinjau dari atau dihubungkan dengan kelas katanya, maka perumusan makna itu harus memperhatikan atau bahkan didasarkan pada kelas kata lema/sublema yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, cara merumuskan kata yang tergolong nomina, misalnya, haruslah berbeda dari cara merumuskan kata yang tergolong verba atau adjektiva.

Demikian pula halnya dengan kata yang tergolong partikel harus dirumuskan dengan cara yang tidak sama dengan perumusan kata yang termasuk adverbial atau kelas kata lainnya.

Sehubungan dengan hal itu, berikut ini dicontohkan perumusan kata *rumah*, *sekolah*, *kantor*, dan *masjid* yang kesemuanya berkelas kata nomina dan "diperkirakan" memiliki ciri-ciri semantis yang bermiripan.

ru. mah *n* **1** bangunan untuk tempat tinggal; **2** bangunan pd umumnya (spt gedung); ...

se. ko.lah *n* **1** bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran ...

kan.tor *n* **1** balai (gedung, rumah, ruang) tempat mengurus suatu pekerjaan (perusahaan dsb); **2** tempat bekerja; ...

mas.jid *n* rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam ...

Pada definisi keempat nomina di atas terdapat tiga kata kunci yang juga diperkirakan memiliki kemiripan dalam ciri-ciri semantisnya, yaitu kata *bangunan*, *balai* dan *gedung*. Berikut adalah kutipan deskripsi makna dari ketiga kata tersebut.

ba. ngun.an *n* sesuatu yg didirikan; sesuatu yg dibangun (spt rumah, gedung, menara); ...

ba. lai *n* **1** gedung; rumah (umum); kantor; **2** kl rumah (di lingkungan istana); ...

ge.dung *n* **1** bangunan tembok dsb yg berukuran besar sbg tempat kegiatan, spt perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dsb; **2** rumah tembok yg berukuran besar; ...

Untuk makna untuk lema/sublema yang berkelas kata verba berikut ini dicontohkan verba yang erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dan kaki, yaitu *melempar*, *memukul*, dan *menyepak*.

me.lem.par *v* **1** membuang jauh-jauh; **2** melontari (dng) ...

me.mu.kul *v* **1** mengenakan suatu benda yg keras atau berat dng kekuatan (untuk mengetuk, memalu, meninju, menohok, menempa, dsb) ...

me.nye.pak *v* memukul dng kaki; menendang; mendepak; ...

Dari definisi itu terlihat bahwa pada *melempar* dan *memukul* peran tangan sama sekali tidak dimunculkan secara eksplisit. Hal ini berbeda dengan definisi *menyepak* yang secara jelas menyebutkan bahwa perbutan yang dimaksudkan dilakukan dengan menggunakan kaki. Pada verba *membakar* dan *memotong* berikut ini yang berperan tidak hanya tangan, tetapi ada semacam alat yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan yang bersangkutan, yaitu *api* untuk *membakar* dan *barang tajam* untuk *memotong*.

mem.ba.kar *v* menghanguskan (menyalakan, merusakkan)
dng api ...

me.mo.tong *v* 1 memutuskan dng barang tajam; mengerat;
memenggal ...

Pada contoh berikut ditampilkan deskripsi makna tentang lema/sublema yang tergolong adjektiva. Kata *sedih* dan *senang* pasti menggambarkan keadaan atau suasana hati seseorang, sedangkan kata *gelap* dan *terang* ada atau erat kaitannya dengan ada atau tidak adanya cahaya di suatu tempat tertentu.

se.dih *a* 1 merasa sangat pilu dl hati; susah hati; ...; 2
menimbulkan rasa susah (pilu dsb) dl hati; duka ...

se.nang *a* 1 puas dan lega, tanpa rasa susah dan kecewa,
dsb ...; 2 betah ...; 3 berbahagia (tidak ada sesuatu yg
menyusahkan, tidak kurang suatu apa dl hidupnya) ...;
4 suka; gembira ...

ge.lap *a* 1 tidak ada cahaya; kelam; tidak terang ...; 2 malam
...; 3 tidak atau belum jelas (tt perihal, perkara, dsb);
samar ...; 4 rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak
halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-
undang hukum) yg berlaku ...

te.rang *a* 1 dl keadaan dapat dilihat (didengar); nyata; jelas
...; 2 cerah; bersinar ...; 3 siang hari ...; 4 bersih (tt
halaman atau kebun) krn dibersihkan (disiangi,
ditebangi, dsb) ...; 5 jernih; bersih (tt udara, langit) ...; 6
sah (tt bukti, barang-barang, dsb) ...; 7 terbukti
(kebenarannya, kesalahannya, dsb) ...; 8 cahaya; sinar
...

Telah dikemukakan bahwa ketepatan mendeskripsikan makna lema/sublema merupakan syarat utama dalam penyusunan kamus. Tingkat ketepatan pendeskripsian makna itu akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh definisi yang dirumuskan itu menggambarkan komponen makna yang secara inheren merupakan konsep inti yang terkandung di balik lema/sublema yang bersangkutan. Untuk jenis permainan dalam bidang olahraga, misalnya, deskripsi makna yang disusun haruslah menyinggung sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu pemain, alat yang digunakan, dan tempat permainan atau cara bermain. Untuk

itu, contoh tentang *bulu tangkis*, *sepak bola* dan *tenis* di bawah ini perlu disimak untuk mendefinisikan ketiga hal tersebut.

bu.lu tang.kis *n* cabang olahraga yg berupa permainan yang dimainkan dng memakai raket dan kok yg dipukul melampaui jaring yg direntangkan di tengah lapangan; badminton; ...

se.pak bo.la *n* Olr permainan beregu di lapangan, menggunakan bola sepak dr dua kelompok yg berlawanan yg masing-masing terdiri atas sebelas pemain, berlangsung selama 2 X 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yg masuk ke gawang lawan; ...

te.nis *n* permainan olahraga yg menggunakan bola (sebesar kepala) sbg benda yg dipukul dan raket sbg pemukulnya, dimainkan oleh dua pemain (dua pasang), di lapangan yg dibatasi oleh jaring setinggi kira-kira satu meter ...

Ketiga cabang olahraga di atas ditandai secara berbeda. Pada *bulu tangkis* dan *tenis* masing-masing ditandai dengan *cabang olahraga* dan *permainan olahraga*, sementara penanda tersebut pada *sepak bola* dinyatakan dengan singkatan *Olr*. Seharusnya, demi ketaatasasan, singkatan *Olr* itu digunakan juga pada *bulu tangkis* dan *tenis*.

Sehubungan dengan hal itu, ketaatasasan dalam arti yang luas harus benar-benar dijadikan sebagai pemandu utama di dalam merumuskan atau mendeskripsikan makna. Oleh karena itu, pada Edisi III ketaatasasan perumusan makna itu diupayakan agar tetap terjaga, terutama untuk lema/sublema yang sudah pasti memiliki ciri makna yang sama, seperti pada

1. penyebutan bilangan: *puluh, ratus, ribu*, dst.
2. nama hari: *Ahad, Kamis, Sabtu*, dst.
3. nama bulan tahun Masehi: *Januari, Februari, Maret*, dst.
4. nama bulan tahun Kamariah: *Muharam, Safar, Rabiulawal*, dst.
5. nama Zodiak: *Akuarius, Aries, Leo*, dst.
6. satuan berat: *gram, ons, ton*, dst.

Mengenai hal itu, pada bagian akhir paparan tentang Pemerian Makna ini dicontohkan beberapa rumusan yang didasarkan pada ketaatasasan tersebut.

ki.lo.gram *n* satuan ukuran berat (massa) 1.000 g (disingkat *kg*)

ton *n* satuan ukuran berat 1.000 kg

Se.nin *n* hari ke-2 dl jangka waktu satu minggu

Sab.tu *n* hari ke-7 dl jangka waktu satu minggu

Ja.nu.a.ri *n* bulan pertama tahun Masehi (31 hari)

Agus.tus *n* bulan ke-8 tahun Masehi (31 hari)

Catatan Penutup

Itulah beberapa hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penyusunan *KBBI* Edisi III. Di luar itu, tentu masih cukup banyak masalah kebahasaan yang dapat disajikan dan yang mungkin jauh lebih penting dan lebih menarik dari segi leksikografi. Akan tetapi, sesuai dengan keterbatasan kesempatan untuk melakukan peninjauan terhadap Edisi III secara lebih komprehensif dan mendasar, apa yang telah disajikan pada tulisan ini boleh dikatakan atau mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami secara memadai.

Tinjauan yang lebih komprehensif dan mendasar itu pasti akan membawa kita kepada berbagai pokok, baik yang menyangkut kerepresentatifan korpus, kerapian penyusunan, ketaatan pendeskripsian makna, maupun kelengkapan informasi yang seyogianya dikemukakan sehubungan dengan definisi lema/sublema tertentu. Akhirnya tentu saja harus dikatakan dan diakui bahwa bagaimanapun penyusunan kamus itu merupakan kegiatan yang bersifat manusiawi sehingga hasilnya tidak terlepas dari adanya kekeliruan dan kesalahan. Dalam konteks itulah apa yang sudah dan belum teridentifikasi sebagai kekeliruan dan kesalahan di dalam tulisan ini diharapkan dapat diperbaiki pada edisi yang akan datang.

7. PENELITIAN KEBAHASAAN DI INDONESIA BAGAIMANA DASAR KEBIJAKAN DAN PERENCANAANNYA?*)

1. Yang akan dipaparkan dalam makalah ini adalah ihwal kegiatan penelitian kebahasaan yang bertujuan menyingkapkan berbagai aspek kebahasaan tentang bahasa Indonesia (bukan tentang bahasa daerah ataupun bahasa asing)¹. Paparan tersebut akan dikemukakan dalam upaya menemukan jawaban atas pertanyaan seperti yang diangkat menjadi subjudul makalah ini, yaitu bagaimana dasar kebijakan dan perencanaan yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksudkan.

Pertanyaan seperti itu didasari oleh semacam pengetahuan bersama—yang mungkin merupakan asumsi—bahwa kegiatan penelitian terhadap bahasa Indonesia itu selama ini telah dilakukan berdasarkan adanya rambu-rambu yang dapat diacu sebagai dasar kebijakan berikut perencanaannya. Dilihat dari keluasan jangkauannya, asumsi itu bisa benar—atau sekurang-kurangnya mendekati benar—dan bisa juga, sebaliknya, sama sekali tidak benar. Penelitian kebahasaan yang dilakukan oleh para peneliti yang bernaung di bawah suatu fakultas atau lembaga penelitian yang sama diharapkan dapat menengarai kebenaran asumsi itu karena para peneliti-nya telah saling mengenal, terutama dalam konteks topik penelitian yang mereka garap. Selain itu, terutama untuk penelitian yang dilaksanakan di lingkungan fakultas, para dosen yang menjadi pembimbingnya pun diperkirakan memiliki kebiasaan untuk saling menginformasikan topik penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bimbingannya. Dengan demikian, dasar kebijakan dan perencanaan kegiatan penelitian di perguruan tinggi itu boleh dikatakan memang ada meskipun secara remi tidak dinyatakan secara hitam di atas putih.

Contoh di atas merupakan kasus lokal yang ruang lingkupnya satu perguruan tinggi atau satu lembaga penelitian tertentu. Kalau masalah penelitian itu dicermati dan ditempatkan pada skala nasional, maka asumsi tersebut menjadi kabur dan tidak bermakna lagi. Dengan perkataan lain, tidak ada indikator yang dapat menggambarkan bahwa penelitian kebahasaan itu secara nasional dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan perencanaan yang telah digariskan dan disepakati bersama.

Keadaan seperti itu jelas tidak menguntungkan bagi masa depan penelitian linguistik di Indonesia. Tinjauan mengenai hal itu yang dikemukakan dalam makalah ini tentu hanya merupakan salah satu alternatif, di antara sejumlah upaya lainnya yang dapat dilakukan, untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pola alternatif yang diajukan pada akhir makalah ini didasarkan pada pokok-pokok pikiran berikut.

- (1) Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara berimplikasi pada jenis penelitian yang seharusnya dilakukan.
 - (2) Setiap penelitian yang dilakukan harus mampu menjelaskan secara tuntas aspek kebahasaan yang menjadi topik penelitian.
 - (3) Hasil setiap penelitian perlu diupayakan agar bermuara pada makin kokohnya landasan yang memungkinkan dunia linguistik Indonesia dapat dibangun dan dikembangkan.
 - (4) Penelitian yang dilakukan akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti itu sendiri.
2. Di dalam perkembangannya, bahasa Indonesia dicoraki oleh dua peristiwa yang secara politis amat signifikan. Sumpah Pemuda tahun 1928 tidak saja menggambarkan kesepakatan nasional untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, tetapi juga sekaligus memancarkan tekad untuk menjunjungnya sebagai bahasa persatuan. Peristiwa kedua terjadi tujuh belas tahun kemudian. UUD 1945, Bab XV Pasal 36, memberikan dasar dan arah yang lebih pasti karena bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara.

Dengan kedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa Indonesia dituntut untuk senantiasa mampu berperan sebagai komunikasi yang mantap dalam memenuhi berbagai fungsi yang diembannya.² Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia antara lain berfungsi sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia harus mampu memenuhi fungsinya antara lain sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi dalam dunia pendidikan, bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, dan sarana pengembangan dan pemanfaatan iptek modern.³

Fungsi bahasa persatuan atau bahasa nasional sebagai lambang jati diri bangsa dan alat pemersatu itu oleh Holmes (1994:105) dipandang sebagai fungsi yang bersifat simbolik. Hal itu dikontraskannya dengan fungsi bahasa negara atau bahasa resmi yang menekankan fungsi bahasa dari segi manfaat atau faedah penggunaannya. Atas dasar itu, Holmes menyebutkan bahwa fungsi yang bersifat simbolik ditandai oleh pemakaian bahasa yang afektif dan ideologis, sedangkan yang tidak simbolik oleh pemakaian bahasa yang referensial dan instrumental.

3. Kalau fungsi bahasa yang simbolik dan nonsimbolik itu diamati lewat penelitian yang cermat, hasilnya tentu akan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa jauh korelasi antara fungsi yang simbolik dan pemakaian bahasa yang afektif dan ideologis pada satu pihak serta korelasi antara fungsi yang nonsimbolik dan pemakaian bahasa yang referensial dan instrumental pada lain pihak. Korelasi itu mungkin akan terlihat pada tataran frasa, klausa, atau bahkan wacana. Mungkin pula korelasi itu bisa

tercerminkan lewat bentuk dan pilihan kata serta stilistikanya. Dengan memperhatikan aspek-aspek linguistik seperti yang dicontohkan itu, pada gilirannya dapat diidentifikasi kriteria yang membedakan bahasa yang afektif dari yang referensial atau bahasa yang ideologis dari yang instrumental. Selain itu, dapat pula dipertanyakan apakah penelitian yang preskriptif hanya sesuai untuk bahasa yang referensial/instrumental dan penelitian yang deskriptif untuk bahasa yang afektif/ideologis.

Contoh di atas dikemukakan untuk memberikan gambaran bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia seperti yang telah disebutkan (lihat juga Catatan 3) memiliki implikasi pada topik-topik penelitian yang perlu dirancang dan dilaksanakan. Dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif, implikasi yang demikian jelas berpihak pada pandangan bahwa penelitian apa pun yang akan dilakukan harus senantiasa bertolak dari garis kebijakan yang telah ditentukan, sedangkan hasilnya dituntut untuk dapat memberikan manfaat bagi upaya-upaya pembinaan dan pengembangan bahasa yang merupakan tindak lanjut dari garis kebijakan tersebut.⁴

Dalam hal menentukan topik penelitian itu ada pandangan lain yang liberal: siapa pun boleh melaksanakan penelitian tentang apa pun selama anjakan teoretis dan metodologinya secara akademis dapat dipertanggungjawabkan. Ditinjau dari kepentingan yang lebih luas dan mendasar, yakni pengembangan linguistik Indonesia, penelitian yang didasarkan pada pandangan yang liberal itu akan mengakibatkan tidak berimbangnya aspek-aspek kebahasaan yang dijadikan topik penelitian. Ada aspek kebahasaan yang sering dijadikan topik penelitian dan ada pula aspek kebahasaan yang boleh dikatakan kurang mendapat perhatian.

Ketidakseimbangan itu sangat mungkin berkorelasi dengan sesuatu yang dapat disebut faktor kepraktisan, yaitu bahwa dalam penentuan topik penelitian pertimbangannya lebih banyak bertumpu pada minat yang dimiliki si peneliti dan/atau dosen pembimbingnya. Sementara itu, pertumpangtindihan topik penelitian bukan tidak mungkin akan (atau telah?) terjadi kalau di antara institusi pengelola penelitian tidak ada kontak atau koordinasi. Yang perlu segera dipikirkan ialah upaya agar pertumpangtindihan itu tidak terjadi atau tidak terlalu sering terjadi.

Para peneliti kebahasaan, yang jumlahnya pasti masih amat terbatas, perlu dioptimalkan potensinya dan diefisienkan penelitian yang dilakukannya agar gambaran yang tidak menguntungkan bagi pengembangan linguistik Indonesia, seperti yang dikemukakan di atas, tidak terjadi dalam jenis dan frekuensi yang mengarah pada kemubaziran. Oleh karena itu, sebelum terlambat, perlu mulai dipikirkan dan ditata apa yang dapat diacu sebagai perencanaan penelitian untuk bahasa Indonesia.⁵

4. Bagaimana perkembangan linguistik Indonesia selama ini? Pertanyaan ini dicoba dijawab oleh Wahab (2000) dan Lauder (2000). Dengan memperhatikan 99 laporan penelitian tahun 1984—1989 dan 1994—1999 dari 22 perguruan tinggi (universitas dan IKIP) dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Wahab menyimpulkan bahwa yang sangat menonjol sebagai topik penelitian yang sering dipilih ialah aspek sintaksis dengan pendekatan struktural yang berpedoman pada aliran linguistik yang deskriptif struktural. Ditambahkannya bahwa aspek semantik pun termasuk bidang yang cukup mendapat perhatian, tetapi masih terbatas pada semantik leksikal.

Bahwa minat para peneliti Indonesia lebih banyak terfokus pada aspek sintaksis, sebagaimana yang disimpulkan Wahab di atas, hal itu memperlihatkan adanya kesamaan dengan hasil pengamatan yang dilakukan Lauder terhadap laporan penelitian di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Oleh Lauder disampaikan bahwa struktur bahasa menempati peringkat pertama sebagai topik penelitian yang sangat diminati (67,65%). Bidang yang lain adalah sastra (16,46%), dialektologi (9,12%), sosiolinguistik (3,67%), dan pengajaran (3,10%).⁶ Catatan penting lainnya dari Lauder ialah bahwa (a) fokus penelitian hanya pada analisis produk bahasa, bukan pada analisis proses berbahasa; (b) perhatian pada data bahasa Indonesia barat lebih besar daripada Indonesia timur⁷; dan (c) masalah perencanaan bahasa, yang merupakan bagian dari sosiolinguistik, kurang sekali dibicarakan.

Apa yang disampaikan Wahab dan Lauder itu pada dasarnya menggambarkan adanya ketidakseimbangan dalam hal aspek-aspek kebahasaan yang diteliti karena terlalu terpusat pada aspek sintaksis. Gambaran itu tetap tidak bergeser pada topik disertasi mengenai bahasa Indonesia yang digarap oleh para ahli kita yang menyelesaikan studinya di luar negeri. Dari 13 disertai yang diamati, pemeringkatan berdasarkan aspek kebahasaan yang diteliti adalah: sintaksis (30,76%), sosiolinguistik (30,76%), dan semantik (7,70%).⁸ Yang patut dicatat ialah bahwa minat pada sosiolinguistik ternyata sama dengan sintaksis, hanya tentu saja dengan fokus kajian yang berbeda.⁹

5. Untuk memperoleh gambaran yang agak lebih luas mengenai penelitian linguistik tentang bahasa Indonesia yang telah dilakukan selama ini, perlu pula ditambahkan data yang ada di Pusat Bahasa dan Balai Bahasa Yogyakarta.¹⁰ Pada kedua instansi ini pun kedudukan aspek sintaksis sebagai topik penelitian yang paling diminati tetap tidak tergoyahkan, yaitu sebanyak 68,75% untuk Balai Bahasa Yogyakarta dan 32% untuk Pusat Bahasa. Menurut data di Pusat Bahasa, aspek sintaksis yang 32% itu cukup ketat bersaing dengan aspek sosiolinguistik yang mencapai 26%. Selain itu, aspek kebahasaan yang diteliti menurut data yang ada di Pusat Bahasa lebih bervariasi daripada data yang dimiliki Balai Bahasa

Yogyakarta. Data aspek bahasa yang ada di Pusat Bahasa, yaitu fonologi, dialektologi, leksikografi, historis-komparatif, dan analisis kontrastif, tidak terlihat sebagai aspek bahasa yang diteliti oleh Balai Bahasa Yogyakarta. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

- a. Balai Bahasa Yogyakarta dengan 32 hasil penelitian: sintaksis (68,75%), analisis wacana (12,50%), morfologi (6,25%), semantik (6,25%), dan sosiolinguistik (6,25%).
 - b. Pusat Bahasa dengan 50 hasil penelitian: sintaksis (32%), sosiolinguistik (26%), semantik (10%), fonologi (8%), morfologi (8%), analisis wacana (6%), historis-komparatif (4%), dialektologi (2%), leksikografi (2%), dan analisis kontrastif (2%).
6. Kalau pada paparan di atas jelas terlihat bahwa aspek sintaksis, baik pada tataran frasa maupun klausa, senantiasa menjadi topik penelitian yang paling banyak mendapat perhatian, hal itu berarti bahwa kita perlu menelusuri sejumlah kemungkinan yang melatarbelakanginya. Pertama, seperti sudah disebutkan, karena hal itu cocok dengan minat peneliti dan dosen pembimbingnya (khusus untuk penelitian di perguruan tinggi dalam kaitannya dengan program pascasarjana). Kedua, aspek sintaksis atau struktur bahasa itu merupakan topik yang relatif mudah untuk diteliti sehubungan dengan status penelitiannya yang boleh disebut sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Ketiga, sebaliknya dari yang baru saja disebutkan, justru aspek sintaksis itu merupakan topik yang paling menantang. Selain itu, mungkin pula ada faktor yang lain, misalnya tersedianya data yang cukup melimpah, baik data bahasa tulis maupun data bahasa lisan. Yang jelas ialah bahwa aspek sintaksis itu mengandung cukup banyak permasalahan, apalagi kalau ditinjau dari segi dan kepentingan bahasa tulis dan bahasa lisan yang secara sintaksis memiliki sejumlah perbedaan yang cukup signifikan; belum lagi kalau tinjauan tentang aspek sintaksis itu secara khusus dihubungkan dengan persoalan baku dan tidak bakunya bentuk-bentuk yang digunakan.

Terlepas dari kemungkinan mana yang benar dan bisa diterima secara objektif-akademis, sudah saatnya semua persoalan kebahasaan yang menyangkut kegiatan penelitian itu dikaji secara sistematis dan menyeluruh. Kalau aspek sintaksis itu sudah cukup sering dijadikan topik penelitian, pertanyaannya ialah: sudahkah ada upaya untuk memeriksa kembali semua penelitian tentang sintaksis dengan tujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, pertumpangtindihannya, dan rumpang-rumpang yang masih memerlukan penuntasan lewat penelitian lebih lanjut. Pada akhirnya, upaya seperti ini harus bermuara pada kegiatan "pembulatan" dari aspek sintaksis itu sendiri.

Aspek-aspek kebahasaan lainnya pada saat yang sama perlu memperoleh porsi perhatian yang sama. Aspek fonologi, morfologi, dan semantik

masih sangat memerlukan uluran tangan untuk digarap lebih lanjut penelitiannya sampai ke taraf yang mendekati ketuntasan. Sebagai bahasa yang masih sedang berkembang melalui berbagai pengaruh dari bahasa lain yang lebih modern, khususnya dari bahasa Inggris, masalah ketuntasan itu mungkin tidak terlalu relevan untuk disebut. Kemajuan di bidang teknologi informasi akan makin memacu perkembangan bahasa Indonesia lisan, di samping tentu saja tetap memberikan pengaruh yang penting bagi perkembangan bahasa tulisnya.

Kalau semua aspek kebahasaan yang telah diteliti itu dicermati, maka perencanaan yang menyangkut penelitian kebahasaan ini sudah dapat disusun garis-garis besarnya. Hal itu perlu segera dilakukan, paling tidak agar kekhawatiran yang dikemukakan pada bagian awal makalah ini, yakni kemungkinan terjadinya pertumpangtindihan penelitian yang mengarah pada kemubaziran, sedapat mungkin dapat diupayakan untuk tidak berulang.

7. Dalam hubungannya dengan pencermatan terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan yang bertujuan menyusun perencanaan itu, ada baiknya kita mengingat kembali apa yang telah diupayakan oleh ILDEP (Indonesian Linguistics for Development Project), suatu wadah kerja sama kebahasaan antara Pusat Bahasa dan Universitas Leiden, Negeri Belanda. Sebelum perguruan tinggi di Indonesia menyelenggarakan program pascasarjana seperti sekarang, kegiatan ILDEP berupa penataran yang pesertanya adalah para dosen bahasa/sastra dari seluruh Indonesia itu telah berjalan dengan sangat efektif karena ditunjang dengan dana yang cukup dan, yang tidak kalah pentingnya, perencanaan kegiatan yang mencakup hampir seluruh aspek kebahasaan yang perlu diteliti.

Aspek kebahasaan yang diangkat menjadi tema penataran adalah leksikografi (1974), sosiolinguistik (1975), dialektologi (1976), penerjemahan (1977), sastra (1978), morfo-sintaksis (1979), dan historis komparatif (1980). Setiap penataran dilaksanakan dalam empat tahapan: tahap I untuk memperluas wawasan teori, tahap II untuk latihan penelitian lapangan, tahap III untuk melaporkan hasil penelitian dalam sebuah seminar, dan tahap IV untuk studi lanjutan di Belanda bagi peserta yang terpilih dan untuk melakukan penelitian bagi peserta lainnya. Tingkat keberhasilan penataran ILDEP itu cukup tinggi. Di antara pesertanya banyak yang telah menyelesaikan program doktor. Catatan penting untuk penataran ILDEP ini ialah bahwa wawasan kebahasaan para pesertanya mengalami peningkatan yang sangat berarti.¹¹

Yang disebutkan terakhir ini sangat penting sebagai modal bagi terpenuhinya dua hal yang telah disebutkan pada bagian awal makalah ini, yaitu ketuntasan masalah kebahasaan yang diteliti dan peran penelitian yang demikian bagi pengembangan linguistik Indonesia.

8. Paparan singkat di atas mencoba menggambarkan dua hal pokok, yaitu bahwa pada satu sisi penelitian kebahasaan di Indonesia telah banyak dilakukan dan akan terus dilakukan, tetapi pada sisi lain ada kesan bahwa penelitian-penelitian tersebut dilaksanakan tanpa dasar kebijakan dan acuan yang jelas. Sementara itu, di dalam menentukan topik penelitian, tampaknya setiap lembaga pengelola penelitian berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada kerja sama atau koordinasi antara lembaga yang satu dan lembaga yang lain. Akibatnya, pertumpangtindihan topik penelitian, meskipun tidak persis sama, bukan mustahil sering terjadi. Mengingat jumlah peneliti yang masih sangat terbatas, hal tersebut jelas mencerminkan pelaksanaan penelitian yang tidak efisien.

Keadaan seperti itu harus kita sadari sebagai sesuatu yang tidak boleh berlanjut. Para pengelola program pascasarjana untuk bidang studi bahasa dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, perlu segera duduk bersama untuk membicarakan dan menyepakati berbagai hal yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian kebahasaan di Indonesia. Prioritas utama perlu diberikan pada penyusunan rencana induk (*grand design*) penelitian yang tidak perlu terlalu rinci, cukup garis-garis besarnya saja. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pokoknya harus dibahas secara tuntas. Sekadar contoh: karena selama ini penelitian yang dilakukan boleh dikatakan lebih condong pada analisis bahasa tulis, mungkin sudah tiba saatnya untuk berganti haluan dan mulai lebih banyak mencurahkan perhatian kita pada analisis bahasa lisan.

Setelah rencana induk penelitian tersebut memperoleh bentuk yang memadai, dapat dilakukan pembagian tugas berdasarkan ketersediaan kepakaran atau keahlian yang diperlukan. Pembagian tugas yang disesuaikan dengan faktor kepakaran ini hendaknya benar-benar disadari sebagai salah satu upaya peningkatan mutu agar tidak terjadi seorang mahasiswa melakukan penelitian dengan topik tertentu, padahal sebenarnya kepakaran untuk topik tersebut di perguruan tinggi yang bersangkutan tidak tersedia. Untuk penyegaran dan saling bertukar pengalaman, pertukaran tenaga dosen di antara perguruan-perguruan tinggi tertentu patut juga dipertimbangkan.

Saling memberikan informasi tentang topik penelitian yang telah dan akan dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi hendaknya dijadikan semacam kesepakatan tidak tertulis. Kenyataan mengenai hal itu sekarang ini masih memprihatinkan sehingga seringkali seseorang tidak mengetahui apa yang dilakukan orang lain di tempat lain karena informasinya sama sekali tidak tersedia di perpustakaan.

Masih banyak hal lainnya yang bisa dimanfaatkan lewat forum koordinasi seperti itu. Akan tetapi, pertanyaan yang segera perlu dijawab ialah

siapa pemrakarsanya. Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) dapat mengambil alih tugas itu. Di sela-sela kesibukan pertemuan berkalanya, dapat disisihkan waktu untuk mengadakan forum tersebut. Kalau tidak, Pusat Bahasa dapat juga memegang peran pemrakarsa itu. Pihak mana pun yang tampil, apakah MLI, Pusat Bahasa, ataupun pihak lain, hal itu bukanlah persoalan yang mendasar karena yang penting adalah mengupayakan agar perguruan tinggi pengelola penelitian tidak berjalan sendiri-sendiri.

Catatan

1. Kalau kita menyebut masalah kebahasaan di Indonesia, maka masalah yang dimaksudkan mengacu pada tiga hal, yaitu masalah bahasa Indonesia, masalah bahasa daerah, dan masalah bahasa asing. Masalah bahasa Indonesia dan daerah dikaitkan dengan upaya pembinaan dan pengembangannya, sedangkan masalah bahasa asing hanya perlu dihubungkan dengan upaya pemakaian atau pemanfaatannya, terutama yang menyangkut pengajarannya (lihat Halim (ed.), 1976: 144). Yang dicoba dikemukakan dalam makalah ini difokuskan pada masalah bahasa Indonesia dalam konteks upaya pengembangannya yang dilakukan lewat kegiatan penelitian.
2. Tuntutan agar bahasa Indonesia tetap dapat berperan sebagai sarana komunikasi yang mantap itu harus dijadikan landasan utama dalam menghadapi pesatnya kemajuan dalam bidang iptek yang antara lain ditandai oleh begitu pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kalau bahasa Indonesia tidak mampu berperan sebagai sarana komunikasi dalam bidang kehidupan yang modern, misalnya karena kosakata dan peristilahannya tidak menunjang, dikuatirkan masyarakat terpelajar kita akan meninggalkan bahasa Indonesia dan berpaling kepada bahasa Inggris untuk dijadikan sebagai sarana komunikasi mereka. Dalam konteks bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa, kemungkinan tersebut harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat merisaukan. Oleh karena itu, upaya pemekaran atau pemutakhiran kosakata dan peristilahan bahasa Indonesia untuk berbagai bidang ilmu perlu diprioritaskan dan digarap secara bersungguh-sungguh.
3. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu tercantum dalam putusan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dan dibicarakan kembali dalam Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Sejauh yang menyangkut kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedua Seminar menyepakati bahwa bahasa Indonesia memiliki empat fungsi, yaitu sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya serta antardaerah. Akan tetapi, mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdapat perbedaan karena Seminar tahun 1999 menambahkan

tiga jenis fungsi, yakni bahasa Indonesia sebagai (1) bahasa media massa, (2) pendukung sastra Indonesia, dan (3) pemer kaya bahasa dan sastra daerah. Adapun fungsi-fungsi yang lainnya sehubungan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu memperlihatkan adanya persamaan antara Seminar tahun 1975 dan Seminar tahun 1999. Yang dimaksudkan adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional, (4) bahasa resmi untuk pengembangan kebudayaan nasional, dan (5) sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

4. Sejak dua tahun yang lalu, Pusat Bahasa melaksanakan penelitian tentang pemakaian bahasa di Indonesia yang antara lain bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan berbahasa (*parole*) masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pemakaian bahasa secara umum, maupun dengan ragam bahasa tertentu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih memantapkan perencanaan yang menyangkut pembinaan bahasa agar kegiatan penyuluhan, misalnya, dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
5. Perencanaan penelitian itu perlu didukung oleh perencanaan korpus (*corpus planning*) yang menurut Noss (1994: 4--5) terdiri atas dua konsep yang berbeda, tetapi saling mendukung. Yang pertama menyangkut ketersediaan data bahasa, baik data bahasa tulis maupun data bahasa lisan, yang meliputi berbagai jenis ragam bahasa yang ada. Yang ke dua berkenaan dengan analisis linguistik yang unsur-unsurnya terdiri atas (1) fonologi dan ejaan (termasuk angka dan tanda baca), (2) morfologi dan sintaksis, (3) leksikon, dan (4) wacana dan stilistika serta sosiolek dan ragam bahasa (yang bukan dialek geografis ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sudah tidak digunakan lagi). Pandangan Noss mengenai korpus bahasa itu terbatas pada data bahasa yang sinkronis. Dalam konteks upaya mengembangkan linguistik Indonesia yang lebih komprehensif, data bahasa yang diakronis pun diperlukan, antara lain untuk keperluan penelitian historis-komparatif.
6. Dilihat dari benang merah yang menjadi alur pemikiran dalam makalah ini, komponen-komponen yang diamati Lauder itu seharusnya bukan seperti itu. Karena yang diamati adalah laporan penelitian yang dikelola oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengelompokan bidang penelitian yang dilakukan berkisar pada tiga komponen utama, yaitu bahasa, sastra, dan pengajaran. Baik bahasa maupun sastra, perlu pula dibedakan antara yang Indonesia dan daerah. Atas dasar itu, yang seyogyanya diperhatikan dalam konteks makalah ini hanya tiga aspek, yakni struktur bahasa, dialektologi, dan sociolinguistik.
7. Pernyataan ini berkenaan dengan penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang oleh Lauder disimpulkan seperti itu, yakni bah-

wa perhatian peneliti pada data bahasa di Sumatera dan Jawa (termasuk Madura) jauh melebihi perhatian terhadap data bahasa di bagian Indonesia lainnya. Kutipannya mengenai hal itu adalah: Sumatera (31,87%), Jawa Madura (24,76%), Bali--Nusa Tenggara (8,76%), Kalimantan (11,26%), Sulawesi (18%), Maluku (4,74%), dan Irian Jaya (0,61%).

8. Harus diakui bahwa data yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengenai hal itu masih belum memadai. Ketiga belas disertasi yang dimaksudkan ditulis oleh Soenjono Dardjowidjojo, Sri Utari Nababan, Amran Halim, Zaini Machmoed, Maruli Butar-Butar, Daulat P. Tampubolon, Husen Abas, Asim Gunarwan, M. Diah, dan I Gusti Made Sucaya. Selain itu, masih ada catatan mengenai disertasi Samsuri, E. Sadtono, P.W.J. Nababan, Abbas Badib, dan Stephanus Djawanai. Akan tetapi, disertasi dari kelima peneliti ini bukan tentang bahasa Indonesia.
9. Disertasi tentang sociolinguistik yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.
 - a. *Indonesian: Problems of Development and Use of a National Language* (Khaidir Anwar, 1976)
 - b. *Bahasa Indonesia as a Unifying Language of Wider Communication: A Historical and Sociolinguistic Perspective* (Husen Abas, 1978)
 - c. *A Sociolinguistic Study of Grammatical Variations in Indonesian* (Asim Gunarwan, 1981)
 - d. *National Language Policy and the Writing Curriculum in Indonesia* (M. Diah, 1982)
10. Penulis ini sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Abdul Wahab yang telah mengirimkan daftar karya ilmiah tentang penelitian kebahasaan yang ada di Universitas Negeri Malang (sebelumnya bernama IKIP Malang). Daftar itu memuat 411 karya ilmiah S2 dan S3 yang secara keseluruhan boleh dikatakan dikaitkan dengan masalah pengajaran. Untuk keperluan makalah ini penelitian kebahasaan yang dihubungkan dengan pengajaran belum dibicarakan, sama halnya dengan penelitian tentang bahasa daerah dan sastra. Dalam konteks perencanaan penelitian kebahasaan yang benar-benar komprehensif, tentu saja masalah pengajaran pun perlu mendapat perhatian yang sama. Demikian juga halnya dengan penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah.
11. Wawasan kebahasaan bagi seorang peneliti bahasa merupakan faktor determinan. Ia dituntut tidak saja untuk menguasai pengetahuan teoretis, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya dalam berbagai kegiatan penelitian yang dilakukannya. Dilihat dari perlunya hasil penelitian untuk menunjang para pengambil keputusan dalam menentukan garis kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa, maka sebenarnya tugas peneliti itu ialah menyediakan berbagai informasi kebahasaan yang bersumber dari hasil penelitiannya. Hal itu berarti pula

bahwa secara tidak langsung para peneliti ikut mengambil bagian dalam mengembangkan teori kebahasaan di Indonesia (lihat juga Effendi, 2000: 895—896).

8. SEPUTAR KALIMAT IMPERATIF DALAM BAHASA INDONESIA

Pengantar

Pokok bahasan yang disajikan dalam tulisan ini berkisar pada pemakaian kalimat bahasa Indonesia seperti

(1) Baca buku itu!

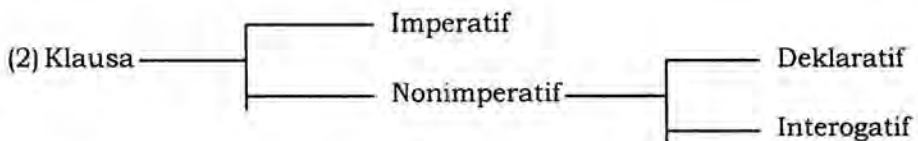
yang biasa disebut kalimat imperatif atau yang oleh sebagian besar di antara kita dikenali sebagai kalimat perintah.

Paparan singkat berikut mengenai hal itu dikemukakan berdasarkan pandangan yang berhubungan dengan wawasan teoretis dan kendala pemakaiannya, terutama yang menyangkut partikel *-lah* dan pronominalisasi *-nya*.

Beberapa Pandangan tentang Kalimat Imperatif

Dari sudut pandang daya ilokusi (*illocutionary force*), Lyons (1977:745) menghubungkan pernyataan (*statement*) dengan kalimat deklaratif, pertanyaan (*question*) dengan kalimat interogatif, dan perintah (*command*) dengan kalimat imperatif.

Ketiga jenis kalimat itu oleh Huddleston dan Uren (1981:239--241) hanya digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu klausa imperatif dan klausa non-imperatif. Pandangan yang didasarkan pada kadar keimperatifan kalimat itu menempatkan klausa deklaratif dan klausa interogatif sebagai subordinat dari klausa nonimperatif (lihat bagan berikut).



Pengelompokan seperti yang digambarkan dalam bagan di atas didasarkan pada dua fenomena kebahasaan, yakni kala dan aspek (*tense and aspect*) dan hubungan antara tuturan langsung (*direct speech*) dan tuturan tak langsung (*indirect speech*). Kala dan aspek dapat diterapkan baik pada klausa deklaratif maupun interogatif, sedangkan klausa imperatif hanya dapat diungkapkan dengan rujukan waktu kekinian (*present tense*).

Mengenai hubungan antara tuturan langsung dan tak langsung, menurut Huddleston dan Uren, hal itu jelas dapat diamati pada klausa deklaratif dan interogatif. Hubungan yang demikian pada klausa imperatif dinilai oleh kedua ahli itu sebagai sesuatu yang tidak dengan sendirinya ada. Itulah sebabnya mereka tidak menyebut tuturan tak langsung sebagai imperatif tak langsung

(*reported imperative*), tetapi menggunakan sebutan analogi tak langsung (*reported analogue*), istilah yang sebelumnya telah digunakan oleh Palmer (1965:108)

Dengan memperhatikan pandangan Lyons (1977) dan Huddleston dan Uren (1981) tersebut, dapat pula dikemukakan bahwa 'pertanyaan' diungkapkan lewat kalimat interogatif. Adapun 'pernyataan' dan 'jawaban' yang berkaitan dengan 'pertanyaan' – dinyatakan dalam kalimat deklaratif. Yang disebutkan terakhir ini tidak sejalan dengan pandangan Hausser (1983:100—103) yang tidak menghubungkan 'jawaban' dengan kalimat deklaratif. Ahli ini, yang membedakan modus sintaktis dari modus verbal (seperti indikatif, subjungtif, dan optatif), berpendapat bahwa pada analisis interogatif perlu ditambahkan satu modus sintaktis baru, yaitu responsif. Dengan demikian, kalau modus sintaktis menurut Hausser (1983) itu dikorelasikan dengan tidak tutur (*speech acts*), akan diperoleh gambaran sebagai berikut.

(3)

No.	Modus Sintaktis	Tindak Tutur
1.	Deklaratif	Pernyataan
2.	Imperatif	Perintah
3.	Interogatif	Pertanyaan
4.	Responsif	Jawaban

Imperatif dan Analogi Tak Langsung

Penerapan teori Huddleston dan Uren (1981) tentang analogi tak langsung terhadap contoh (1) akan menghasilkan contoh sebagai berikut.

- (4) a. Dia mengatakan agar saya membaca buku itu.
b. Dia mengharapkan agar saya membaca buku itu.
c. Dia menganjurkan agar saya membaca buku itu.
d. Dia meminta agar saya membaca buku itu.
e. Dia mengharuskan agar saya membaca buku itu.
f. Dia memerintahkan agar saya membaca buku itu.

Hanya contoh (4e) dan (4f) yang tergolong imperatif tak langsung karena verba klausa utamanya masing-masing adalah *mengharuskan* dan *memerintahkan*. Hal itu berarti bahwa contoh (4a)—(4d) bukan merupakan imperatif tak langsung dari (1), melainkan hanyalah sebagai analogi tak langsung dari kalimat imperatif yang sama, yakni contoh (1).

Contoh (4a—f) itu menunjukkan indikasi yang kuat bahwa imperatif tak langsung atau analogi tak langsung harus menggambarkan ciri atau tingkat keimperatifan yang sama dengan yang terkandung dalam imperatif langsungnya. Ketika harus mengungkapkan kembali isi perintah yang pernah diterimanya dari orang lain, seorang penutur atau pembicara memiliki kebebasan dalam

memilih dan menentukan verba klausa utama pada kalimat deklaratif yang merupakan tuturan tak langsung itu haruslah menggambarkan informasi yang sama dengan yang diungkapkan oleh kalimat imperatif yang merupakan tuturan langsungnya.

Penggunaan Prefiks dan Pemfokusan

Dalam hal penggunaan prefiks, verba kalimat imperatif dapat dilekati prefiks *di-* atau $\emptyset$. Prefiks *di-* terdapat pada kalimat imperatif yang berdiatesis pasif, sedangkan yang berdiatesis aktif terlihat pada pemakaian prefiks $\emptyset$. Perhatikan contoh berikut.

- (5) a. Baca buku itu!
- b. Dibaca buku itu!

Berdasarkan konstruksinya, contoh (5a)—yang diangkat kembali dari (1)—dan (5b) memperlihatkan pemfokusan pada tindakan, seperti yang diungkapkan lewat *baca* dan *dibaca*. Pemfokusan itu dapat bergeser dari tindakan ke sasaran sehingga contoh (5a,b) yang berfokus pada tindakan dapat diubah menjadi (6a,b) yang berfokus atau mengedepankan sasaran *buku itu*.

- (6) a. Buku itu baca!
- b. Buku itu dibaca!

Pada umumnya persona kedua tidak muncul pada konstruksi imperatif. Akan tetapi, persona kedua itu dapat dimunculkan secara vokatif, tetapi hanya pada konstruksi yang memfokuskan tindakan. Akibatnya, pemakaian persona kedua secara vokatif pada konstruksi yang memfokuskan sasaran tidak atau belum berterima sebagai tuturan yang apik. Bandingkanlah contoh (7a,b) dengan (8a,b) berikut.

- (7) a. Kamu, baca buku itu!
- b. Kamu, dibaca buku itu!
- (8) a. *Kamu, buku itu baca!
- b. *Kamu, buku itu dibaca!

Partikel -lah

Dalam konstruksi pasif dapat digunakan partikel *-lah* dengan maksud untuk lebih memperlunak atau memperhalus 'perintah' yang diungkapkan. Partikel *-lah* itu ternyata hanya dapat digunakan pada konstruksi pasif dengan prefiks $\emptyset$ saja. Pada prefiks *di-* partikel *-lah* tidak dapat digunakan, baik pada konstruksi pasif yang mengedepankan tindakan maupun sasaran.

- (9) a. Bacalah buku itu!
- b. *Dibacalah buku itu!

- (10) a. Buku itu bacalah!
b. *Buku itu dibacalah!

Contoh (9b) dan (10b) memperlihatkan bahwa partikel *-lah* tidak dapat digunakan pada konstruksi pasif dengan prefiks *di-*. Selain itu, partikel *-lah* juga tidak dapat digunakan, baik pada verba dengan prefiks $\emptyset$ maupun prefiks *di-*, kalau konstruksi imperatif tersebut menggunakan kata *jangan*. Pemakaian partikel *-lah* pada konstruksi yang demikian hanya berterima kalau *-lah* itu melekat pada *jangan*, seperti yang tampak pada contoh berikut.

- (11) a. Jangan baca buku itu!
Jangan dibaca buku itu!
b. Janganlah baca buku itu!
Janganlah dibaca buku itu!
c. *Jangan bacalah buku itu!
*Jangan dibacalah buku itu!

Ketidakberterimaan contoh seperti (11c) dapat ditelusuri secara semantis. Kata *jangan* yang menyatakan 'larangan' atau 'perintah untuk melakukan sesuatu' pada hakikatnya tidak sejalan dengan maksud pemakaian *-lah* pada *baca* atau *dibaca* yang menggambarkan 'perintah (yang diperlunak atau diperhalus) untuk membaca'.

Analisis semantis seperti itu akan menghasilkan dua hal. Pertama, 'perintah yang diperlunak atau diperhalus' itu dapat ditafsirkan sebagai 'anjaran' (*advisability*). Kedua, 'anjaran' jelas memiliki ciri makna yang berbeda dengan 'perintah' sehingga apabila perbedaan di antara keduanya diukur berdasarkan parameter yang digunakan oleh Marino (1973: 315—316), perbedaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

(12)

No.	Categoris	Necessity	Possible	Execution
1.	Imperative	+	+	-
2.	Advisability	+	-	-

Dengan menggunakan tiga macam parameter, yaitu keharusan/*keniscayaan* (*necessity*), kemungkinan (*possible*), dan keterlaksanaan (*execution*), Marino melihat bahwa perbedaan antara 'perintah' dan 'anjaran' terletak pada kemungkinan aktualisasi peristiwanya yang mengisyaratkan bahwa pada 'perintah' hal itu merujuk pada ciri makna yang lebih pasti daripada 'anjaran'.

Pronominalisasi

Kalau konstruksi imperatif dibandingkan dengan konstruksi deklaratif, yang

dapat segera diamati ialah kemungkinan digunakannya pronominalisasi dengan *-nya*. Dalam menghadapi contoh seperti

- (13) a. Baca *buku itu!*
*Bacanya!
- b. Dibaca *buku itu!*
* Dibacanya!
- (14) a. Dia membaca *buku itu.*
b. Dia membacanya.

Kaswanti Purwo (1984:186) melihatnya dari fungsi sintaktis bagian kalimat yang akan dipronominalisasi. Menurut pendapatnya, ketidakberterimaan contoh (13a,b) adalah karena *buku itu* merupakan subjek, bukan objek. Cara pandang seperti ini perlu diuji dengan mengamati lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh fungsi sintaktis objek dapat dipronominalisasi dengan *-nya*.

Yang dapat disimpulkan dari contoh (13) dan (14) ialah bahwa pronominalisasi dengan *-nya* hanya dapat diterapkan pada konstruksi deklaratif, bukan pada konstruksi imperatif. Hal itu terlihat melalui contoh (14).

Berikut ini dikemukakan beberapa contoh yang dapat menggambarkan pandangan bahwa yang dipersyaratkan dalam pronominalisasi itu bukanlah semata-mata bagian kalimat yang berfungsi sebagai objek, melainkan bagian kalimat dalam bentuk frasa nomina yang takrif dan memiliki peran semantis tertentu.

- (15) a. Ali membaca *buku itu.*
Ali membacanya.
- b. Ali baca *buku itu.*
* Ali bacanya.
- c. Buku itu *dibaca Ali.*
Buku itu dibacanya.
- d. Buku itu dibaca *seseorang.*
* Buku itu dibacanya.
- (16) a. Ali menanam *kebunnya* dengan pohon pepaya.
Ali menanamnya dengan pohon pepaya.
- b. Ali menanam *pohon pepaya itu* di kebunnya.
Ali menanamnya di kebunnya.
- c. Ali menanam *pohon pepaya* di kebunnya.
* Ali menanamnya di kebunnya.
- d. "Ali, sudah kamu tanami *kebunmu?*"
*"Ya, sudah saya tanamnya".

- (17) a. Tadi malam dia mencuri *mangga*.
 **Tadi malam dia mencurinya*.
 b. Tadi malam dia mencuri *mangga Pak Ali*.
 Tadi malam dia mencurinya.
 c. Mangga Pak Ali dicuri *orang*.
 * *mangga Pak Ali dicurinya*.
 d. Mangga Pak Ali dicuri *Amir*.
 Mangga Pak Ali dicurinya.

Pencermatan terhadap contoh (15)–(17) mengisyaratkan bahwa pronominalisasi dengan *-nya* dapat dilakukan kalau bentuk verba dan peran semantis yang tersirat di balik frasa nomina yang mengikutinya memenuhi kriteria berikut.

- a. Verbanya berprefiks *meN-* dan diikuti frasa nomina takrif yang berperan sebagai sasaran (15a, 16b, 17b) atau lokatif (16a)
- b. Verbanya berprefiks *di-* dan diikuti frasa nomina takrif yang berperan sebagai pelaku (15c, 17d)

Ketakrifan frasa nomina tampaknya merupakan kriteria yang harus dipenuhi untuk keperluan pronominalisasi. Sebaliknya, frasa nomina taktakrif atau generik, meskipun didahului verba berprefiks *meN-*, tidak mungkin dapat dipronominalisasi (16c, 17c). ketidakberterimaan pronominalisasi itu juga tampak pada (15d, 17c) yang memperlihatkan frasa nomina dengan peran pelaku dan didahului oleh verba dengan prefiks *di-*. Adapun *buku itu* pada (15b) juga tidak dapat dipronominalisasikan karena verbanya berprefiks $\emptyset$, bukan *meN-*, meskipun frasa nomina yang mengikutinya takrif dan berperan sebagai sasaran.

Catatan Penutup

Analisis terhadap jenis kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia tampaknya masih menyisakan ruang yang masih luas dan terbuka bagi upaya penelitian lebih lanjut. Penelitian secara semantik ataupun pengamatan secara sintaktis tampaknya juga masih sama-sama menarik dan menantang.

Apa yang telah dicoba dituangkan melalui paparan di atas boleh dikatakan masih belum menyentuh batas ketuntasan yang memadai. Apalagi kalau korpus yang digunakan dihubungkan dengan tingkat kesantunan berbahasa dalam mengungkapkan ‘perintah’, ruang yang tersisa itu bukan saja akan makin menarik dan makin menantang, melainkan juga akan makin memperlihatkan sosoknya sebagai mozaik kebahasaan yang penuh rona dan pesona sebagai sesuatu yang hasilnya bari dapat dipetik kalau kita mampu dan

berhasil mengungkapkan keterkaitan antara dimensi sintaktis, semantis, dan pragmatis yang setakat ini masih menyelimuti tabir misteri kebahasaan yang secara sederhana kita sebut imperatif itu.

VIII. KARANGAN LEPAS

1. KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA

Ini resepsi pernikahan. Lagi-lagi terdengar celoteh baku si pembawa acara, "*Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah...*"

Berpanjang-panjang dengan celoteh yang tak mengundang kejutan, si pembawa acara akhirnya membebaskan tamu dari rasa bosan ketika menyelesaikan kalimat penutupnya: "Sekarang tibalah saatnya bagi Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan hadirin sekalian untuk menyampaikan ucapan selamat kepada *kedua pengantin yang berbahagia*."

Dua kali ungkapan *yang berbahagia* dilafalkan, masing-masing mengandeng kata *kesempatan* dan *pengantin*. *Pengantin yang berbahagia* bermakna 'pengantin yang merasa bahagia' atau 'pengantin yang merasakan kebahagiaan' (merasa dan merasakan digunakan seperti mendengar dan mendengarkan). Namun *kesempatan yang berbahagia* tidak mungkin dipahami sebagai 'kesempatan yang merasa bahagia' atau kesempatan yang merasakan kebahagiaan'.

Yang berbahagia pada *pengantin yang berbahagia* berterima karena *pengantin* adalah nomina insani yang bernyawa, sedangkan *kesempatan* bukanlah nomina yang insani dan bernyawa. Berdasarkan kriteria itu, pemimpin dan rakyat atau polisi dan pencuri dapat berbahagia, bergembira, atau bersedih; sementara kesempatan dan peluang atau peristiwa dan kejadian tidak mungkin berperan sebagai konstituen kalimat yang mampu menanggung beban emosi seperti itu.

Di mana pun dan kapan pun kesempatan tidak akan pernah berbahagia. Ia hanya memiliki potensi untuk membuat kita sedih, gembira, atau bahagia. Pada saat itulah kita bertemu dengan kesempatan yang menyedihkan, menggembarakan, atau membahagiakan.

Saran saya kepada si pembawa acara: gantilah celoteh Anda dengan "Pada kesempatan yang membahagiakan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa yang telah..."

Dari persoalan *siapa yang berbahagia* kita beralih pada masalah *siapa membohongi siapa* yang bentuk pengungkapannya mungkin belum memberikan ketenangan batin bagi sebagian di antara kita. Ketika seorang pejabat atau tokoh masyarakat memberikan penjelasan atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan serta-merta kita pun

mengemukakan penilaian dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan *kebohongan publik*. Kalau dianalogikan dengan *kekayaan pribadi* yang bermakna 'kekayaan milik pribadi', maka *kebohongan publik* tidak dapat ditafsirkan lain kecuali kebohongan milik publik atau milik masyarakat'.

Tafsiran yang demikian akan memunculkan pertanyaan bernada protes ihwal siapa yang dibohongi publik atau kepada siapa publik berbohong karena hakikatnya, penggunaan *kebohongan publik* telah mengakibatkan terjadinya pemutarbalikan fakta (dilihat dari segi kebenaran) atau pemutarbalikan peran (ditinjau dari sisi partisipan komunikasi). Kalau yang hendak diungkapkan ialah konsep yang merujuk pada proses, cara, atau perbuatan membohongi publik, yang harus digunakan ialah *pembohongan publik*.

Kerancuan berbahasa pada dasarnya identik dengan ketidakcermatan berbahasa. Penyebabnya, kita jarang atau bahkan tidak pernah mempertanyakannya, termasuk kepada diri kita sendiri. Atau boleh jadi hal itu memang tidak perlu dipersoalkan. Bukankah kita sudah terbiasa dengan cara berbahasa seperti itu?

Bukankah orang lain pun berbahasa dengan cara yang kurang lebih sama seperti kita? Dan karena bahasa merupakan perwujudan dari konvensi atau kesepakatan bersama masyarakat penuturnya, bukankah perilaku berbahasa yang kolektif seharusnya diasumsikan lebih penting dan lebih bermanfaat daripada yang tidak "guyub"?

Fungsi utama bahasa selain sebagai sarana berkomunikasi, juga sarana berpikir. Muaranya kecermatan berbahasa. Dalam konstelasi itu, agaknya kita perlu memahami yang tersurat dan tersirat di balik pandangan seorang wakil Papua pada Kongres Kebudayaan di Bukittinggi tahun lalu. Seperti yang dilaporkan Rosihan Anwar di *Kompas* pada 6 November 2003, wakil Papua itu berucap: "Kami menyesal belajar bahasa Indonesia secara baik dan benar karena kemudian terbukti di luar kami, bahasa Indonesia mereka sangat kacau."

2. BAHASA SBY MEMRIHATINKAN?

Dalam tulisan “Mesin dan Mekanika” di kolom bahasa *Kompas* ini dua pekan lalu, Salomo Simanungkalit menyinggung nama acara televisi kita *Who Wants to be a Millionaire*. Menurut Wikipedia yang ia rujuk, 48 dari 51 negara yang jaringan televisinya memperoleh lisensi menayangkan acara itu menggunakan bahasa sendiri menamai acara tersebut. *Quien quiere ser Millonario* di Argentina, *Wer wird Millionär* di Jerman, *מי רוטשע להיט מיליונר* di Israel, dan *Kaun Banega Crorepati* di India. Lalu, mengapa di Indonesia acara itu tidak ditampilkan dengan nama, misalnya, *Siapa yang jadi Miliarder?* Begitu tanyanya.

Pertanyaan Salomo itu seakan makin tertantang karena pada edisi yang sama *Kompas* mengutip penggunaan bahasa Inggris oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika berceramah sehari sebelumnya di Lemhanas. Mengenai seorang pejabat eselon II yang menyelewengkan dana kompensasi BBM sebanyak Rp 10 miliar yang dicontohkannya, Presiden mengatakan bahwa *he is committed to corruption*. Menurut Presiden, kasus ini *totally different corruption, totally different outlook* jika dibandingkan dengan contoh lain: tuduhan penggelepan uang Rp 50.000 oleh seorang pegawai golongan I.

Jika cara berbahasa seperti itu dilakukan oleh “orang yang biasa-biasa saja”, kita tidak akan merasa gusar. Namun jika hal itu dilakukan oleh Kepala Negara, masalahnya menjadi lain, apalagi oleh seorang SBY yang pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 2003 dinobatkan sebagai tokoh berbahasa terbaik. Kita tahu bahwa sebagai kepala negara, SBY menghadapi berbagai persoalan besar: pemberantasan korupsi, pembalakan liar, bencana alam, dan keterpurukan kita sebagai bangsa dalam hampir semua bidang kehidupan. Meskipun demikian, kita berharap bahwa sebagai tokoh berbahasa terbaik, SBY akan tetap menjaga dan memelihara kerapian bahasanya – bahasa dalam arti bahasa Indonesia sebagai bahasa negara-sehingga pemakaian bahasa Inggris yang tidak pada tempatnya seperti di Lemhanas itu hanya merupakan semacam “keterpelesetan bahasa” yang mudah-mudahan tidak akan berulang.

Kekaguman kita pada bahasa Inggris selama era reformasi ini tampaknya semakin menjadi-jadi. Di kantor pos saja sudah terpampang iklan dengan bumbu penyedap seperti ini: *Kiriman tiba dalam sehari? Why not!* Untuk dalam kota ada *Express City Courier* yang *Sameday Service*, sementara untuk luar kota tersedia *Express Intercity Courier* yang *Nextday Service*. Persoalannya ialah mengapa dan untuk siapa iklan itu dibuat?

Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh para pejabat di instansi bersangkutan yang telah memutuskan dan menetapkan iklan tersebut. Kita hanya dapat berandai-andai, mungkin iklan itu dibuat sebagai upaya untuk mengantisipasi kalau-kalau ada orang bule yang tidak memahami bahasa Indonesia datang ke sana. Bahwa di dalam kenyataannya orang bule yang datang itu hanya satu atau dua orang dalam seminggu atau bahkan mungkin dalam sebulan, itu urusan lain.

Penggunaan bahasa Inggris di dalam menamai acara televisi sudah lama marak. Coba saja simak nama acara seperti ini: *Breaking News*, *Celebrity Profile*, *Economic Challenges*, *family Financing*, *Healthy Home*, *Indonesia Solutions*, *Lunch Break*, *Market Review*, *Midnight Live*, *News Flash*, *Showbiz News*, dan *Today's Dialogue*. Entah apa maksudnya karena pada semua acara yang namanya berbahasa Inggris itu, isinya masih tetap menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, ada juga nama acara televisi yang berbahasa Indonesia tetapi aneh: *Derap Hukum Selasa*, *Dunia Lain Selasa*, *Gentayangan Selasa*, *Investigasi Selasa*, *Kupas Tuntas Selasa*, dan *Lacak Selasa*. Ada juga yang strukturnya tidak seperti itu: *Selasa Drama Spc*. Nama acara yang aneh ini mungkin karena siarannya ditayangkan hari Selasa.

Contoh di atas hanya sekelumit kecil dari belantara keingarbingaran pemakaian bahasa Indonesia dewasa ini. Kenyataan berbahasa yang cenderung aneh tapi nyata itu bagi sebagian mungkin memprihatinkan, tetapi bagi sebagian yang lain mungkin tidak apa-apa, tidak perlu dipikirkan, apalagi dikhawatirkan. Bukankan pada salah satu acara televisi yang banyak peminatnya, penonton yang hadir di studio bersama-sama dengan pembawa acaranya yang berulang kali secara serempak meneriakkan, "*Don't worry! Be APII*"

3. KAPTEN KESEBELASAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR

Pada paruh kedua tahun tujuh puluhan saya mulai mengenal Yus Badudu lewat layar kaca TVRI. Saat itu TVRI merupakan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia karena belum ada satu pun stasiun televisi swasta yang muncul. Mengenai hal ini, seorang kenalan berkebangsaan Belanda sampai berkomentar yang bernada sindiran. Dikatakannya bahwa Sumpah Pemuda tahun 1928 yang keramat itu sudah berubah karena ikrarnya bertambah satu butir lagi. Yang dikenal selama ini, tambahanya, hanya tiga butir, yakni satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa (persatuan). Yang satu butir tambahannya itu, tandasnya, ialah satu saluran televisi.

Meskipun yang disebutkan terakhir itu tidak lebih dari sindiran dalam rangka berseloroh, kenyataannya ialah bahwa bangsa Indonesia pada saat itu untuk media massa elektronik yang audio-visual tidak mempunyai pilihan lain kecuali menonton TVRI, termasuk di dalamnya acara Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia seminggu sekali. Sebagai akibatnya, bagi para pemirsa yang meminati bahasa Indonesia, yang dibawa oleh Yus Badudu itu merupakan salah satu acara yang boleh dikatakan sangat ditunggu-tunggu. Maka, Yus Badudu pun makin meluas dikenal masyarakat sehingga namanya lama-lama seperti tak terpisahkan dari atau bahkan identik dengan Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia TVRI itu sendiri.

Ada dua hal sekurang-kurangnya yang dapat dicatat sebagai faktor penyebab. Pertama, seperti telah disebutkan, karena hanya ada satu saluran televisi. Kedua, karena cara dan gaya penyajian Yus Badudu berikut pilihan materi bahasa Indonesia yang ditampilkannya tampaknya sesuai dengan "selera" sebagian besar masyarakat pemirsa.

Kalau cara dan gaya penyajian itu dikaitkan dengan ihwal berbahasa secara lisan, maka komponen-komponen seperti pemenggalan kalimat, intonasi, tekanan, dan enunsiasi yang diperagakan Yus Badudu sangat menopang keefektifan tersebut akan dirasakan oleh para pemirsa sebagai sesuatu yang mereka perlukan, sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam membimbing mereka untuk berupaya menggunakan bahasa Indonesia secara lebih tertib dan lebih bernalar.

Demikianlah seperti halnya jarum waktu yang terus berputar, hubungan antara Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia dan Yus Badudu pun di mata masyarakat penggemarnya tetap menyatu meskipun yang bersangkutan tidak lagi tampil pada acara televisi itu. Agaknya untuk urusan bahasa Indonesia yang (acapkali perlu ditambah atribut) baik dan benar nama Yus Badudu seakan-akan telah menjadi semacam merek dagang (*trademark*).

Salah satu petunjuk mengenai hal itu ialah adanya rubrik tetap Yus Badudu pada majalah *Inti Sari* yang diberinya tajuk "Inilah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar".

Mengenal tokoh Badudu hanya lewat layar kaca—seperti yang disebutkan pada awal tulisan ini—segera berakhir pada tahun 1978 ketika saya beralih tugas dari Akademi Bahasa Asing Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ke Pusat Bahasa. Sejak saat itu, setiap kali saya bertemu dengan seseorang dan kemudian dia tahu bahwa saya bekerja di Pusat Bahasa, biasanya orang tersebut menanyakan perihal Yus Badudu, antara lain tentang apakah yang bersangkutan masih bekerja di Pusat Bahasa. Pertanyaan seperti itu memang wajar diajukan karena si penanya tidak melihat lagi Yus Badudu muncul di televisi, sementara dia mengira bahwa "yang dirindukan"-nya itu bekerja di Pusat Bahasa.

Ibarat kata pepatah bahwa yang haus harus diberi minum dan yang lapar harus diberi makan, maka mereka yang rindu akan penampilan Yus Badudu di televisi pun harus pula diperhatikan dan dipertimbangkan. Itulah sebabnya tidak lama setelah saya menggantikan Drs. Lukman Ali (almarhum) selaku Kepala Pusat Bahasa (1992), Yus Badudu sempat tampil kembali dalam beberapa kali Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia TVRI.

Kesan tentang merek dagang itu tampaknya makin menyakinkan saya karena dalam setiap kali saya memperoleh kesempatan bersama-sama dengan Yus Badudu menghadapi mahasiswa S2 atau S3 Unpad, baik dalam rangka seminar rancangan penelitian maupun ujian tesis atau disertasi, yang bersangkutan senantiasa mengingatkan si mahasiswa untuk menggunakan bahasa Indonesia ragam tulis yang baik dan benar, yang ejaannya sesuai dengan kaidah, yang pilihan katanya benar secara morfologis dan cocok dari segi pemakaian, yang kalimatnya rapi secara sintaktis, dan yang penerapannya dapat diterima akal sehat.

Ketekunan dan ketegaran seperti Yus Badudu itu amat diperlukan agar kita semua makin menyadari tugas dan peran masing-masing di dalam melaksanakan amanat butir ketiga Sumpah Pemuda 1928, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam konteks itu, Yus Badudu telah berhasil dengan baik dalam menjalankan tugasnya sebagai kapten kesebelasan agar kesebelasan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar yang dipimpinnya tidak kebobolan dalam menghadapi pertandingan-pertandingan melawan kesebelasan lain yang dalam era globalisasi ini pasti lebih tangguh.

PUSTAKA ACUAN DAN BACAAN

- Abdullah, Taufik. 1996. Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia. Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy (ed.). 1996: 345—362.
- Adam, Asvi Warman. Strategi Pengajaran Bahasa Indonesia di Luar Negeri: Kasus *Langues-O*. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, 1988, Jakarta].
- Ahmad, Hassan. 2000. *Imbasan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Alisjahbana, Sutan Takdir, 1957. *Dari Perjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1991. Sejarah Bahasa Indonesia. Dalam Hari-murti Kridalaksana (ed.). 1991: 93—109.
- Allan, Keith. 1986. *Linguistic Meaning* (terutama Bab 4, Lexical Semantics): 214--273. London: Routledge & Kegan Paul.
- Alwi, Hasan. 1993a. Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa].
- Alwi, Hasan. 1993b. Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing. [Makalah Simposium Perkembangan Bahasa Indonesia di Kawasan Timur Jauh, 19--20 Juli 1993, Tokyo].
- Alwi, Hasan. 1993c. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah. [Makalah Simposium Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jawa, Kaliurang (Yogyakarta), 26—27 Juli 1993].
- Alwi, Hasan. 1993d. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Sunda. [Makalah Kongres Bahasa Sunda, Bandung, 26—30 Desember 1993].
- Alwi, Hasan. 1993e. Pembinaan Bahasa dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. [Makalah Seminar Nasional III Bahasa dan Sastra Indonesia 1993 tanggal 2—4 Desember 1993 di Universitas Jember].
- Alwi, Hasan. 1993f. Pembinaan Bahasa: Tantangan dan Harapan. [Makalah Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia serta Pengajarannya tanggal 15—16 Desember 1993 di IKIP Medan].
- Alwi, Hasan. 1995a. Strategi Pengindonesiaan Bahasa Asing di Tempat Umum. [Makalah Seminar Nasional V HPBI, 10—12 Agustus 1995, UNS Surakarta].

- Alwi, Hasan. 1995b. BIPA: Hari ini dan Esok. [Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, 28—30 Agustus 1995, Universitas Indonesia].
- Alwi, Hasan. 1995c. Pengajaran BIPA: Upaya Pengembangan. [Makalah Simposium Bahasa Indonesia di Asia Timur, 14—17 Desember 1995, Beijing].
- Alwi, Hasan. 1996a. Dari Bahasa Melayu ke Bahasa Indonesia: Pemantapan Sarana Pencerdasan Kehidupan Bangsa. [Makalah Simposium Raja Ali Haji, 29—31 Oktober 1996, Pulau Penyengat, Riau].
- Alwi, Hasan. 1996b. Upaya Pengembangan Bahasa Melayu-Bahasa Indonesia. [Makalah Seminar Jaringan Melayu Antarbangsa, 12—13 September 1996, Hotel Grand Hyatt, Jakarta].
- Alwi, Hasan. 1997. Upaya Meningkatkan Pengajaran BIPA di Luar Indonesia. [Makalah Seminar dan Workshop Penyebaran/Peningkatan Studi Bahasa dan Kebudayaan Indonesia, Universitas Passau, 18—21 September 1997].
- Alwi, Hasan. 2001. Bahasa Kebangsaan dan Pengembangan Ilmu. [Makalah Persidangan Serantau Bahasa, Sastra, dan Budaya Melayu dengan tema "Bahasa dan Sastra Penjana Budaya Ilmu", 22—23 Oktober 2001, Universiti Putra Malaysia, Serdang].
- Alwi, Hasan. 2002. Pemberdayaan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Kemungkinan Timbulnya Kecemburuan Global. [Makalah Seminar Internasional tentang Prospek Pengembangan Kajian Indonesia dalam Kemajemukan Budaya, diselenggarakan tanggal 25 Juni 2002 di Hotel Patra Jasa Semarang oleh FBS Unnes].
- Alwi, Hasan. (ed.) 1997. *Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Iptek*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (ed.). 1999. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (ed.). 2000a. *Politik Bahasa*. Risalah Seminar Politik Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Alwi, Hasan, Dendy Sugono, dan Abdul Rozak Zaidan (ed.). 2000b. *Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Atmazaki. Menggunakan Karya Sastra untuk Bahan Pembelajaran Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Asing. [Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei—1 Juni 1996, Padang].
- Awang Sariyan. 2000. *Warna dan Suasana: Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Bachtiar, Harsja W. 1981. Bahasa Indonesia and the Indonesian Nation. Dalam Amran Halim (ed.). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*: 357—376. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bahar, Saafoedin dll. (ed). 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Balcerzan, Edward. 1970. *La Traduction, Art d'Interpréter. The Nature of Translation*. Bratislava: Publishing House of the Slovak Academy of Sciences.
- Biro Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk Tahun 1980*.
- Biro Pusat Statistik. *Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990*.
- Boediono. 1993. Bahasa Indonesia dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI, Jakarta]
- Catford, J.C. 1974. *A Linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University Press.
- Chung Young-Rhim. Pengajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa Asing Hankuk, Seoul, Korea. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta]
- Daoust, Denis. 1997. Language Planning and Language Reform. Dalam Florian Coulmas (ed.) *The Handbook of Sociolinguistics*. Cambridge: Blackwell: 436—452.
- Daud, Mohd. Raman. 1997. Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam Hasan Alwi (ed.) 1997: 256—272.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1992. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993a. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1975—1993*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993b. *Sosok, Pokok, Tokoh: Dua Dasawarsa Kerja Sama Kebahasaan MABBIM*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993c. *Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Eastman, Carol M. 1991. *Language Planning*. San Francisco: Chandler & Sharp.

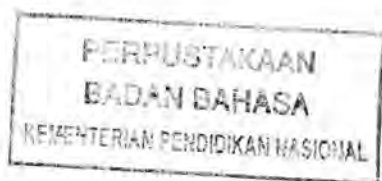
- Edwards, John. 1985. *Language Society and Identity*. Oxford: Blackwell.
- Effendi, S. 2000. Peningkatan Mutu Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa Indonesia. Dalam Hasan Alwi, Dendy Sugono, dan Abdul Rozak Zaidan (ed.). 2000: 890—901.
- Fasold, Ralph W. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. Oxford: Blackwell.
- Fasold, Ralph W. 1990. *Sociolinguistics of Language*. Cambridge: Blackwell.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara, 1993.
- Gunarwan, Asim. 1993. Bahasa Asing sebagai Kendala Pembinaan Bahasa Indonesia. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI, Jakarta]
- Halim, Amran (ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran (ed.). 1981. *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran dan Yayah B. Lumintaintang (ed.). 1983. *Kongres Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Halim, Amran. 1979. *Pembinaan Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran. 1981. Language, Education and Nation Building. Dalam Amran Halim (ed.). *Bahasa dan Pembangunan Bangsa*: 329—337. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halim, Amran. 1993. Kesenambungan Dalam Kebijakan Bahasa Nasional. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa].
- Hamidy, U U, 1995. *Dari Bahasa Melayu sampai Bahasa Indonesia*. Pekanbaru: Unilak Press.
- Hasil Perumusan Sanggar Kerja Politik Bahasa Nasional. 1976. Jakarta.
- Hassan, Abdullah (ed.). 1994. *Language Planning in Southeast Asia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hassan, Abdullah. 1997. Bahasa Melayu dalam Membina Minda Kreatif dan Dominan. Dalam Hasan Alwi (ed.) 1997: 15-38.
- Hassan, Fuad. 1990. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Pembukaan Seminar Hubungan Sastra dan Budaya.
- Hausser, Roland R. 1983. The Syntax and Semantics of English Mood. Dalam F. Kiefer (ed.). *Questions and Answers*: 97—158. Dordrecht: D Reidel.
- Hoed, B.H. *Kerja Sama Antarpemerintah dan Antarlembaga untuk Pengembangan BIPA*. [Makalah Kongres Internasional Pengajaran BIPA, 28-30 Agustus 1995, Universitas Indonesia].
- Hoed, B.H. 1977. Beberapa Informasi Teoretis Dasar mengenai Terjemahan. *Berita HPI* 10. Jakarta.
- Hoed, B.H. 1978. Penataran Penerjemahan dan Politik Bahasa nasional. *Berita HPI* 11. Jakarta.

- Holmes, Janet. 1992/1994. *An Introduction to Sociolinguistics*. Cetak ulang ke-4. London: Longman.
- Huddelston, R.D. dan Ormond Uren. 1981. Declarative, Interrogative and Imperative in French. Dalam M.A.K. Halliday dan J.R. Martin (ed.). *Readings in Systemic Linguistics*: 237—256. London: Batsford Academic and Education.
- Ionesco, Eugène. 1973. *Le Solitaire*. Paris: Mercure de France.
- Iskandar, Maskun dan Atmakusumah Astraatmadja (ed.). 1995. *Masalah Bahasa dan Nama Geografi dalam Pers Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo.
- Ismail Hussein, Tan Sri Datuk, 1995. *Bahasa Melayu di Dunia Melayu: Syarahan Raja Ali Haji*. Kuala Lumpur: Persatuan Linguistik Malaysia.
- Jamil, Taufik, 1996. Raja Ali Haji, Hadir pada Setiap Zaman. *Kompas*, 22 Oktober 1996, halaman 24: 1—4.
- Jassin, H.B. 1978. Saya dan Max Havelaar. *Berita HPI* 12--13. Jakarta.
- Johannes, Herman. 1988. Usaha Mencari Istilah Ilmiah Indonesia. Dalam Adjat Sakri (ed.): 130—142. *Ilmuwan dan Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Junus, Umar, 1965. *Sejarah Perkembangan ke Arah Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia*. Malang: Lembaga Penerbit IKIP Malang.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1984. *Deiksis dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I—VI.*
- Ketetapan-Ketetapan MPR-RI dan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.*
- Kratz, E.U. Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Negara Inggris. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti (ed.). 1991. *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kwee, John B. Bahasa dan Sastra Indonesia di Selandia Baru [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (ed.). 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Lauder, Multamia R.M.T. 1999. "Derap Perkembangan Linguistik". Dalam Hasan Alwi dan Dendy Sugono (ed.). 1999: 183—195.
- Liang Li-ji: Pengajaran dan Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia di Tiongkok. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Jilid 1 dan 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mackey, William F. 1973. *Three Concepts for Geolinguistics*. Quebec: Centre International de Recherches sur le Bilinguisme.

- Maier, H.M.J. Keadaan dan Perkembangan Bahasa dan Sastra Indonesia di Negeri Belanda. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Marino, Matthew. 1973. "A Feature Analysis of the Modal System of English". *Lingua* 32: 309—323.
- Moeliono, Anton M dan Mien A. Rifai. 2001. Sudah Perlukah Perevisian *Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* Dilakukan? [Makalah Sidang ke-15 Pakar Mabbim, Denpasar, 10-14 September 2001].
- Moeliono, Anton M dan Soenjono Dardjowidjojo (ed.). 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeliono, Anton M. 1981. Language Royalty Versus Linguistics Diversification. Dalam Amran Halim (ed.). 1981: 339—345.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Moeliono, Anton M. 1994. Indonesian Language Development and Cultivation. Dalam Abdullah Hassan (ed.):195—213.
- Mounin, G. 1963. *Les Problèmes Théoriques de la Traduction*. Paris: Galimard.
- Newman, Barclay M. 1977. "Rambut Sama Hitam Hati Berlain-lain". *Berita HPI* 10. Jakarta.
- Noss, Richard B. 1994. The Unique Context of Language Planning in Southeast Asia. Dalam Abdullah Hasan (ed.). 1994: 1—51.
- Nothofer, Bernd. Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia di Jerman. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI, 28 Oktober—2 November 1993, Jakarta].
- Nothofer, Bernd. Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Republik Federal Jerman. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Palmer, F.R. 1965. *A Linguistic Study of the English Verb*. London: Longman.
- Pengiran Julaihi Pengiran Dato Paduka Othman. 1997. Bahasa Melayu sebagai Penyalur Ilmu dan Pembangunan Sosial. Dalam Hasan Alwi (ed.). 1997: 137—150.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Diolah kembali oleh Pusat Bahasa-Depdikbud. Edisi II, Cetakan pertama. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prentice, D.J. 1991. Perkembangan Bahasa Melayu sebagai Bahasa (Inter)nasional. Dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). 1991: 180—194.
- Pride, J.B. dan J. Holmes (ed.). 1972. *Sociolinguistics*. Harmondsworth: Penguin Books.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. 1999. Rumusan Seminar Politik Bahasa. Jakarta.
- Rosidi, Ajip. 1976. Pengembangan Bahasa Daerah. Dalam Amran Halim (ed.). 1976: 103—115.

- Saidi, Shaleh, 1969. *Gurindam Duabelas*. Singaraja: Direktorat Bahasa dan Kesusastraan.
- Salim, Emil. 1988. Membangun Bahasa Pembangunan. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia IV].
- Santa Maria, Luigi. Tiga Windu Pengajaran bahasa dan Sastra Indonesia di Tanah Air Antonio Pigafetta: Sebuah Survei. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Sarumpaet, J.P. Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Savory, Theodore. 1973. *The Art of Translation*. London: Jonathan Cape.
- Shigeru, Morimura. Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Jepang. [Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei—1 Juni 1996, Padang].
- Siahaan, Bistok A. Muatan Budaya dalam Materi Pelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. [Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei—1 Juni 1996, Padang].
- Sihombing, Tetty Simmanjuntak. *Pendekatan Lintas Budaya dalam Pelatihan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing*. [Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei—1 Juni 1996, Padang].
- SIL International, Indonesia Branch. 2001. *Languages of Indonesia*. Second Edition. Jakarta: SIL International, Indonesia Branch.
- Sitanggang, S.R.H. 1993. Kehidupan dan Masa Depan Sastra Daerah di Indonesia. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI].
- Soebadio, Haryati. 1990. Sastra Indonesia dan Sastra Nusantara. [Makalah Seminar Hubungan Sastra dan Budaya].
- Soedjatmoko. 1983. Bahasa Indonesia dalam Perjuangan Bangsa. Dalam Amran Halim dan Yayah B. Lumintaintang (ed.). 1983: 49—73.
- Soedjatmoko. 1996. Bahasa dan Transformasi Bangsa. Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy (ed.). 1996: 173—194.
- Soemarmo, Marmo: Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Amerika Serikat. [Makalah Kongres Bahasa Indonesia V, tahun 1988, Jakarta].
- Sudewa, Alex. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (Sebagai Pengantar Menghayati Kehidupan Sosial, Budaya, dan Orientasi Nilai Masyarakat Indonesia). [Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei—1 Juni 1996, Padang].
- Sumardjo, Jakob. 1977. Sastra Terjemahan Indonesia Selama Ini. *Budaya Jaya 115*. Jakarta.
- Suroso. Kontribusi Orientasi Kontekstual Terhadap Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing (Studi Kasus Pengajaran Bahasa dan Budaya Indonesia untuk Mahasiswa Charles Sturt dari Deakin

- University). [Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei—1 Juni 1996, Padang].
- Teeuw, A. 1991a. Sejarah Bahasa Melayu. Dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). 1991: 110--132.
- Teeuw, A. 1991b. Pertumbuhan Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Dunia. Dalam Harimurti Kridalaksana (ed.). 1991: 133—165.
- Teeuw, A. 1994. *Indonesia antara Kelisanan dan Keberaksaraan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tim Penyusun. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II, Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahab, Abdul. 2000. Perkembangan Kajian Linguistik di Indonesia. *Linguistik Indonesia*. 18.1:31—49.
- Vinay, J.P. 1968. La Traduction Humaine. *Le Langage*. Paris: Galimard.
- Vinay, J.P. dan Darbelnet, J. 1958. *Stylistique Comparée du Français et de l'Anglais*. Paris: Didier.
- Wolff, John. Penerapan Penemuan Sociolinguistik dalam Pengajaran Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing. [Makalah Konferensi Internasional II Pengajaran Bahasa bagi Penutur Asing, 29 Mei—1 Juni 1996, Padang].
- Zain, Sutan Mohammad. 1954. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Dharma.



Buku ini berisi kumpulan tulisan Dr. Hasan Alwi yang diambil dari berbagai media massa dan acara seminar, kongres, simposium, ataupun sidang kebahasaan dan kesastraan. Buah pemikiran Dr. Hasan Alwi mengenai bahasa dan sastra, yang selama ini tersebar, patut dibaca oleh masyarakat untuk memperluas wawasannya mengenai bahasa dan sastra. Tema tulisannya pun sangat beragam, seperti perkembangan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia, kebijakan dan perencanaan bahasa, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, penerjemahan, pengajaran bahasa, perkamusan, dan penggunaan bahasa di kalangan pejabat. Semoga buku ini memberikan manfaat kepada para pembaca dalam mengembangkan wawasannya mengenai bahasa Indonesia.